BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/202/KPTS-BUP/2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah;
b. bahwa perkembangan keadaan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan serta saldo anggaran sisa tahun anggaran 2024 yang harus dipergunakan untuk tahun anggaran 2025;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
d. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Bupati ini;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan perangkat daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
1. Bab I pendahuluan;
2. Bab II evaluasi renja sampai dengan triwulan ii tahun lalu;
3. Bab III rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
4. Bab IV penutup;

KELIMA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Pangan dan Perikanan;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Pertanian;
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Inspektorat Daerah;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Kecamatan Pulau Punjung;
27. Kecamatan Sitiung;
28. Kecamatan Koto Baru;
29. Kecamatan Sungai Rumbai;
30. Kecamatan Sembilan Koto;
31. Kecamatan Timpeh;
32. Kecamatan Koto Salak;
33. Kecamatan Asam Jujuhan;
34. Kecamatan Koto Besar;
35. Kecamatan Padang Laweh;
36. Kecamatan Tiumang; dan
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Perangkat Daerah yang bersangkutan.

RENCANA KERJA (RENJA)

Perubahan 2025

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN DHARMASRAYA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, salah satu dokumen perencanaan yang berupa Recana Kerja (Renja) 2025 telah selesai disusun. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini diharapkan dapat digunakan sebagai barometer perencanaan dan penganggaran pada anggaran perubahan tahun 2025 yang akan datang.

Penyusunan Renja ini telah berusaha semaksimal mungkin mengacu pada rancangan awal RKPD, sehingga diharapkan tidak menyimpang terlalu jauh dari RKPD, meskipun tidak menutup kemungkinan SKPD memodifikasi dengan isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini. Di samping berfungsi sebagai arah dalam pembanguan pendidikan, Renja ini diharapkan mampu sebagai memberikan arah Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya

Secara substansial program dan kegiatan yang terkandung dalam dokumen ini merupakan turunan atau penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang merupakan arah pembangunan Kabupaten Dharmasraya lima tahun ke depan. Penyusunan Renja ini juga diselaraskan dengan isu-isu yang berkembang pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelompokkan menjadi tiga, yakni pemerataan dan penguatan akses, peningkatan mutu dan daya saing, peningkatan tata kelola dan pencitraan publik dan perencaan yang mengacu pada pemenuhan kegiatan yang menunjang capaian rapor pendidikan capaian per – Agustus 2025.

Kami menyadari bahwa Renja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu masukan atau saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan Renja ini. Dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan diucapkan terima kasih, semoga menjadi amal yang baik. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Perubahan Anggaran Tahun 2025 ini, diucapkan terimakasih.

Pulau Punjung, 2025

Plt. Kepala Dinas

Bobby P. Riza, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19820521 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.3.1. Maksud 7
1.3.2. Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rentra Perangakat Daerah 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 33
3.1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi 34
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 38
4.2 Penelaah Usulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD 38
4.3 Arah Kebijakan Tahun 2024 39
4.4 Matrik Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 46
BAB V PENUTUP 47

DAFTAR TABEL

Tabel 1- Analisa Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Terget Renstra Dinas Pendidikan 11
Tabel 2. Capaian kinerja program urusan pendidikan sesuai dengan target kinerja yang diteatapkan dalam Perjanjian Kinerja 13
Tabel 3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan 14
Tabel 4- Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiDinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Perubahan atau saat ini disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan merupakan SKPD yang bertanggung jawab membantu Bupati melaksanakan urusan Bidang Pendidikan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Dinas Pendidikan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Perubahan Anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1/ Point 11).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) pada Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2025. Selanjutnya Renja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025 memuat program/kegiatan tahun 2025 pada Perubahan Anggaran, lokasi kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif perubahan dan prakiraan maju tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan tahun 2025 telah melalui proses penyusunan dan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Dinas Pendidikan khususnya tim penyusun Renja Dinas Pendidikan 2025. Hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada tahun rencana 2025 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini berpedoman kepada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 serta memperhatikan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026. Sebagai Perangkat Daerah/ Dinas Daerah, maka Dinas Pendididkan berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memiliki tugas dibidang pendidikan. Peraturan daerah kabupaten dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan pendidikan Di kabupaten dharmasraya, Dinas Pendidikan memiliki tugas sebagai: Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten. Pada Renja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025 sudah berbasis pada Rapor Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 per Agustus diatur dalam PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbudristek No. 09 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
7. PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Siaran Pers NOMOR: 4/SP-Ses.3/5/2025 Wujudkan Asta Cita, Presiden RI Prabowo Subianto Revisi Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Permendikbudristek No. 09 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
11. Peraturan Daerah kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan pendidikan Di kabupaten dharmasraya
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Dinas pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tujuan adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan serta dalam pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dan Hasil Rapor Pendidikan di tahun berikutnya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan tahun 2025 adalah untuk :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2025
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Dinas Pendidikan
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Pendidikan
d. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran

e. Acuan dalam penyusunan RKA Awal dan RKA Perunahan Dinas Pendidikan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka pokok bahasan serta susunan garis besar penulisan Renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

3.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (2018-2022)

3.2 Permasalahan dan Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Penelaahan Usulan Masyarakat/ Musrembang Kecamatan

4.2 Penelaahan Usulan Pokok- pokok Pikiran Anggota DPRD

4.3 Arah Kebijakan Tahun 2024

4.4 Matrik Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya masih berpedoman pada strategi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2020- 2024 maupun RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rentra Perangakat Daerah

Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mencantumkan pembahasan atas Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan tahun 2022. Untuk itu pada bagian ini dijabarkan hasil kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023. Hasil yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pendidikan berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam renja – renja tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja pada tahun 2023 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pendidikan atau realisasi APBD untuk Dinas Pendidikan. Adapun pokok-pokok materi yang akan dirangkum dalam tabel yang akan dijabarkan setelah ini memuat poin – poin diantaranya :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan ;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pendidikan
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel 1- Analisa Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Terget Renstra Dinas Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			RENSTRA		Akhir RENSTRA 2026		ANGGARAN		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*=6/5*100*	*8*	*9*	*=9/8*100*	*11*	*12*	*12/11*100*	*14*	*12/14*100*	*16*	*12/16*100*	*18*	*19*	*=19/18*100*
1	Meningkatnya tingkat pendidikan dan pemerataan akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,65	8,55	98,84	8,70	8,56	98,39	8,49	8,71	102,59	8,49	102,59	8,50	102,471			
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,24	12,44	93,96	13,29	12,51	94,13	12,45	12,68	101,85	12,45	101,85	12,46	101,766			
		APK PAUD	%	72,63	69,68	95,94	73	119,66	163,92	75,50	72,84	96,48	75,50	96,48	83	87,759	86.288.397.582	82.951.673.527	96,13
		APK SD/MI	%	116,12	106,49	91,71	106,94	106,49	99,58	107,94	99,43	92,12	107,94	92,12	110,94	89,625			
		APK SMP/MTs	%	84,2	96,75	114,90	105,3	96,75	91,88	106,30	80,44	75,67	106,30	75,67	109,3	73,5956			
		APM SD/MI	%	99,74	98,4	98,66	99,47	98,4	98,92	99,55	99,48	99,93	99,55	99,93	99,79	99,6893			
		APM SMP/MTs	%	83,65	39,03	46,66	95,13	90,71	95,35	96,13	81,05	84,31	96,13	84,31	99,13	81,7613			
		Jumlah Warga Negara 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	91,02	93,02	102,20	n/a	n/a	100	93,02			
		Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	73,17	81,30	111,11	n/a	n/a	n/a	n/a			
2	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	%	95	46,29	48,73	96	46,3	48,23	97,00	56,77	58,53	97,00	58,53	100	56,7721	231.850.000	220.230.416	94,99
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akip Dinas Pendidikan	Hrf/Nilai	70,62	70,62	100	72,5	70,1	96,69	74,37	73,85	99,30	74,37	99,30	80,00	92,3125	217.124.046.754	199.341.904.167	91,81

Page 1

Sumber: Lakip Dinas Pendidikan Tahun 2023

Berdasarkan evaluasi atas Tabel 1 serapan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya 2023 sebesar Rp. 282.513.814.510 atau sebesar 93.04 Persen. Adapun untuk kinerja, capaian kinerja Dinas Pendidikan 2023 untuk masing masing indikator kinerja adalah sebesar 96,61 untuk Sasaran Strategis 1, 94,99 persen untuk Sasaran Strategis 2 dan 91,81 persen untuk Sasaran Strategis 3.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kabupaten Dharamsraya sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pendidikan merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan pelayanan pendidikan di daerah khususnya di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati yang tertuang dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi , Uraian Kegiatan Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pendidikan dengan melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan dibidang pendidikan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan
d. Pelaksanaan administrasi dinas dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Dinas

   Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan yang meliputi Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan

b. Sekretariat

   Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

   Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) di Pimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Pelaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pembinaan PAUD dan Pembinaan Formal.

d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

   Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Pimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi Dinas di Bidang Pendidikan Dasar.

e. Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Bidang Pembinaan Ketenagaan.dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi pada bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 Pengukuran atas kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dilakukan melalui analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan. Pengukuran dilakukan atas ketercapaian indikator kinerja yang telah ditargetkan dalam Renstra, untuk kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pada akhirnya, akan diperoleh rasio capaian indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian indikator dimaksud. Berikut dijabarkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 yang tergambar melalui tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. Capaian kinerja program urusan pendidikan sesuai dengan target kinerja yang diteatapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,49	8,71	102,59
			Harapan lama sekolah	Tahun	12,45	12,68	101,85
	Meningkatnya tingkat pendidikan dan pemerataan akses pendidikan	1	APK PAUD	%	75,50	72,84	96,48
		2	APK SD/MI	%	107,94	99,43	92,12
		3	APK SMP/MTs	%	106,30	80,44	75,67
		4	APM SD/MI	%	99,55	99,48	99,93
		5	APM SMP/MTs	%	96,13	81,05	84,31
		6	Jumlah Warga Negara 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	91,02	93,02	102,20
		7	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	%	73,17	81,30	111,11
2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	8	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	%	97	56,77	58,53
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	9	Nilai Akip Dinas Pendidikan	Hrf/Nilai	74,37	73,85	99,30

Dari target capaian kinerja urusan pendidikan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dinas pendidikan , masih terdapat rendahnya persentase capaian kinerja. Dari tiga sasaran kinerja, indikator kinerja APK PAUD, SD/Mi dan SMP/Mts

serta APM PAUD dan SD/Mi dimana realiasi capaian masih belum mencapaian target tahun 2023. Sedangkan untuk indikator lainnya, yaitu Jumlah Warga Negara 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD capaian realisasi nya sudah melebihi target .

Hal yang masih menjadi tugas besar OPD pada tahun mendatang adalah pada persentase guru dan tenaga kependidikan profesional. Upaya yang ditempuh agar angka peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan bisa mencapai persentase minimal 80% capaian tahunan. Pada tahun 2023, program kegiatan yang menunjang naiknya angka capaian kualitas guru dan tenaga kependidikan sudah di uraikan dalam penyusunan renja PD tahun 2023 dan tahun 2024. Pemenuhan anggaran yang disediakan bersumber dari pendapatan daerah tahun berjalan , Dana DAK fisik dan Non fisik serta Dana DAU yang diarahkan.

Indikator kinerja lainnya yang menyangkut APM dan APK satuan jenjang pendidikan juga perlu didukung dengan kegiatan- kegiatan yang mampu menarik , mengajak dan meningkatkan kemauan serta partisipasi warga daerah untuk mengampuh pendidikan di Dharmasraya. Kegiatan dalam bentuk fisik maupun non fisik diharapkan sudah merangkum pemenuhan kebutuhan masing- masing satuan pendidikan dalam menjalankan tupoksinya masing masing. Selain itu, kegiatan yang menunjang peningkatan capaian indikator pada setiap sasaran kinerja juga dapat meningkatkan realisasi nilai AKIP dinas pendidikan pada tahun berjalan.

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu Strategis

Permasalahan utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendidian Kabupaten Dharmasraya adalah masih rendahnya kualitas pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya pada pengelolaan kualitas pendidikan pada semua jenjang satuan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia khusus nya guru. Akibatnya indeks pendidikan belum bisa dicapai secara maksimal. Isu-isu strategis pendidikan di Kabupaten Dharmasraya telah tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 yang mencakup table 2 berikut :

Tabel 3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan

NO	Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Kebehasilan/ Rencana Aksi
1	Angka rata-rata lama sekolah	Lebih rendah dari provinsi tapi lebih tinggi dari nasional	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya di pengaruhi telah berkurangnya tingkat kemiskinan pada masyarakat serta meningkatnya pembangunan insfrastruktur pendidikan sekolah.

NO	Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Kebehasilan/ Rencana Aksi
2	Harapan lama sekolah	Masih rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya yang didukung oleh faktor telah meratanya insfrastruktur pembangunan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya dan telah mendapatkan tempat pendidikan yang layak.
3	APK PAUD	Belum optimalnya pemerataan, akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan akses serta sarana dan prasarana PAUD dan anggaran yang cukup relevan yang bersumber dari APBD dan BOS.
4	APK SD/MI	APK SMP lebih rendah dari APK SD Belum optimalnya pemerataan, akses dan mutu Pendidikan	Peningkatan akses serta sarana dan prasarana SD dan anggaran yang cukup relevan yang bersumber dari APBD dan BOS.
5	APK SMP/MTs		Peningkatan akses serta sarana dan prasarana SMP dan anggaran yang cukup relevan yang bersumber dari APBD dan BOS.
6	APM SD/MI	Belum optimalnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan	Meningkatnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Dharmasraya perlunya pendidikan dengan usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase usia sekolah.

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya (2023)

2.3. Pemasalahan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun secara detail, identifikasi permasalah penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 4- **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiDinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat Ini	Standart yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan PelayananDinas Pendidikan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENAGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pendidikan	- Jumlah Bidang = 3 - Jumlah Sekretariat =1 - Jumlah Seksi/Subbag = 7				
	PENDIDIKAN FORMAL				
	- Jumlah PAUD/TK Negeri =21 - Jumlah PAUD/TK Swasta =275 - Jumlah SD Negeri = 147 - Jumlah SD Swasta = 21 - Jumlah SMP Negeri = 33 - Jumlah SMP Swasta = 8				
	PENDIDIKAN NON FORMAL				

	- Jumlah PKBM Negeri = 1 - Jumlah PKBM Swasta = 8				

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat Ini	Standart yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan PelayananDinas Pendidikan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENAGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					1. BIDANG SEKRETARIAT
	Index Kepuasan Masyarakatterhadap pelayanan publik belum maksimal	- PP No. 96 Tahun 2012 TentangPelayanan Publik - Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah - Undang-Undang ASN No. 3Tahun 2014 Tentang ASN - Permenpan No. 21 Tahun 2010Tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya - Permenpan No. 14 Tahun 2010Tentang Penilik dan Angka Kreditnya - Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah - Undang-Undang No. 43 Tahun2009 Tentang	- Keterbatasan saranadan prasarana penunjang untuk pelayanan publik - Minimnya SDM yangmemiliki sertifikat sesuai kompetensi - Rasio pengawas tidak sebanding dengan jumlah sekolah binaan - Rasio penilik tidak sebanding dengan jumlah lembaga binaan - Rasio pamong seni	- Kurangnya pemahaman dan Kesadaran masyarakatdalam mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan - Kurangnya penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur - Terbatasnya lembaga penyelenggara diklat bagi pengawas - Terbatasnya lembaga penyelenggara diklat bagipenilik	Belum optimalnya : 1. Pemenuhan jabatan fungsional tertentu (penilik,pengawas, pamong) 2. Pemenuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaantugas pegawai 3. Pemenuhan kompetensi sebagai syarat menduduki jabatan tertentu (pejabat pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Analis Perencanaan, Analis Keuangan) 4. Layanan umum sesuaistandar pelayanan 5. Perekrutan pegawai padajabatan tertentu belum

		Kearsipan	dan budaya tidak sebanding dengan lembaga binaan	- Terbatasnya lembaga penyelenggara diklat bagipamong seni dan budaya	sesuai dengan kebutuhanyang tertuang dalam analisis jabatan 6. Penatausahaan KeuanganSekolah

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat Ini	Standart yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan PelayananDinas Pendidikan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENAGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					7. Penatausahaan AsetSekolah 8. Evaluasi Perencanaan 9. Pemenuhan jabatan fungsional tertentu (penilik,pengawas, pamong) 10. Pemenuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaantugas pegawai 11. Pemenuhan kompetensi sebagai syarat menduduki jabatan tertentu (pejabat pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Analis Perencanaan, Analis Keuangan) 12. Layanan umum sesuaistandar pelayanan 13. Perekrutan pegawai padajabatan tertentu belum sesuai dengan kebutuhanyang tertuang dalam analisis jabatan

					14. Penatausahaan KeuanganSekolah 15. Penatausahaan AsetSekolah Evaluasi Perencanaan 16. Pemenuhan jabatan fungsional tertentu (penilik,pengawas, pamong) 17. Pemenuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaantugas pegawai 18. Pemenuhan kompetensi sebagai syarat menduduki

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat Ini	Standart yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan PelayananDinas Pendidikan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENAGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					jabatan tertentu (pejabat pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Analis Perencanaan, Analis Keuangan) 19. Layanan umum sesuaistandar pelayanan 20. Perekrutan pegawai padajabatan tertentu belum sesuai dengan kebutuhanyang tertuang dalam analisis jabatan 21. Penatausahaan KeuanganSekolah 22. Penatausahaan AsetSekolah 23. Evaluasi Perencanaan
					2. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

	Angka Partisipasi SekolahPendidikan Dasar (APS Pendidikan Dasar) belummaksimal Sarana prasarana pendidikandasar belum optimal	❖ Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standarteknis pelayanan Minimal Pendidikan ❖ Permendiknas No.24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana ❖ PP No. 2 Tahun 2018 TentangStandar Pelayanan Minimal	1. Keterbatasan SumberDaya Manusia bidang Sarana Prasarana DIKDAS 2. Validitas data kurangmemadai 3. Pemahaman Peraturan tentang sarana prasarana yang masih rendah	1. Keterbatasan Lahan dalam pemenuhan sarana prasarana sesuai standar 2. Minimnya peran sertamasyarakat terhadap pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas	Belum optimalnya : 1. Angka Partisipasi SekolahPendidikan Dasar (APS Pendidikan Dasar) 2. Angka Literasi dan Numerasi Siswa 3. Sekolah Terakreditasi A 4. Sistem Penerimaan PesertaDidik Baru 5. Pembinaan karakterPeserta Didik 6. Pengelolaan data PIP dansiswa kurang mampu 7. Penyediaan dan Pengelolaan Dana BOS 8. Capaian Kompetensi Siswadalam Lomba-lomba

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat Ini	Standart yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan PelayananDinas Pendidikan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENAGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal belummencapai 100%	Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standarteknis pelayanan Minimal Pendidikan Akreditasi DIKDAS Kurikulum Merdeka ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer)	Pemenuhan terhadap 28 Indikator Pelayanan DasarPendidikan Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Keterbatasan SDM diseksi Keterbatasan SDM diseksikurikulum Minimnya jumlah gurupenggerak	Rendahnya manajemenSatuan Pendidikan Rendahnya pemahaman tentang kurikulum merdeka pada satuan Pendidikan Belum optimalnya pelaksanaan proses pendidikan pada satuan	9. Pembinaan Penyusunan Dokumen Kurikulum DIKDAS 10. Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran DIKDAS 11. Pengelolaan Penyelenggaraan UjianDIKDAS 12. Sumber Daya dalam melakukan analisis terkaitKurikulum dan Penilaian 13. Pelayanan Perizinan Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan DIKDAS 14. Pembinaan dalam persiapan Akreditasi 15. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah 16. Keterlibatan orang tuadalam penyelenggaran pendidikan di satuan DIKDAS 17. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka 18. Hasil ANBK

					3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak UsiaDini dan Pendidikan Non Formal
	Kualifikasi Tenaga PendidikPAUD 9,65% Kualifikasi Tenaga Pendidik SD74, 8 2 % Kualifikasi Tenaga PendidikSMP 65,40 %	❖ Permendiknas No. 16 Tahun2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru	Kurangnya pengawasan terhadap pemenuhan kebutuhan Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan Kualifikasi Tenaga Pendidikbelum memenuhi syarat	Adanya moratorium penerimaan CPNS TenagaPendidik Jumlah Formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanterbatas.	Belum optimalnya: 1. Angka Partisipasi SekolahPAUD 2. Capaian SPM PAUD 3. kualitas layanan administrasi terhadap Lembaga PAUD dan Kesetaraan.

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat Ini	Standart yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan PelayananDinas Pendidikan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENAGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tenaga Pendidik PAUD yangmemiliki Sertifikat Pendidik 14,32% Tenaga Pendidik SD yang memiliki Sertifikat Pendidik 42,85% Tenaga Pendidik SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik 46,86%	❖ Permendikbud No.37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi BagiGuru Dalam Jabatan Yang Diangkat sampai Tahun 2015 Hasil Pengembangan KeprofesianBerkelanjutan	dan ketentuan yangberlaku.		4. Kompetensi pemberi layanan terhadap bidang layanan kepada LembagaPAUD dan PNF. 5. Peralatan pendukung layanan yang tersedia. 6. Penerapan standar yang diberikan kepada Lembaga PAUD dan Kesetaraan. 7. Pemahaman terhadap sebuah peraturan dan ketentuan yang sudah ada.
					4. Bidang Pembinaan Ketenagaan

			1. Kurangnya sosialisasidan pembinaan terhadap Tenaga Pendidik dalam	1. Rendahnya motivasi Tenaga Pendidik dalam memenuhi kompetensiyang ditetapkan	Belum Optimalnya: 1. Analisis kebutuhan tenagapendidik dan Kependidikan disatuan pendidikan 2. Data pokok
Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat Ini	Standart yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan PelayananDinas Pendidikan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENAGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					3. Pemenuhan Kualifikasi Tenaga Pendidik 4. Pemenuhan Tenaga Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik 5. Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta pelakubudaya 6. Minat Kepala Sekolah danTenaga Pendidik dalam mengikuti kegiatan PTK Berprestasi 7. Pendayagunaan TIK (sarana pembelajaran dan bahan ajar) di Satuan Pendidikan

2.4 . Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.4.1. Penelahaan Hasil Musrembang RKPD di Kecamatan

REKAPITULASI KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN TAHUN 2024					
	KECAMATAN/NAGARI/ KEGIATAN	LOKASI	Nagari	Kecamatan	VOLUME
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Toilet siswa	Pembangunan kamar mandi /Toilet SD	Nagari Koto Baru	Kecamatan Koto Baru	
2	Pembangunan Musholah SD	Jorong Padang Bintungan V Nagari Sialang Gaung	Nagari Sialang Gaung	Kecamatan Koto Baru	
3	Perbaikan/ rehab ruang kelas (PAUD, SD, SMP)	Nagari Ampang Kuranji	Nagari Ampang Kuranji	Kecamatan Koto Baru	
4	Lanjutan Pembangunan SMP Nagari Tebing Tinggi	Jr.Koto Tebing Tinggi	Nagari Tebing Tinggi	Kecamatan Pulau Punjung	1 unit
5	Pembangunan SD Baru	Tanjung Salilok	Nagari Sikabau	Kecamatan Pulau Punjung	1 Paket
6	Pembangunan MCK 3 SD, 1 SMP, dan TK/PAUD	Nagari Sungai Rumbai Timur	Nagari Sungai Rumbai Timur	Kecamatan Sungai Rumbai	6 Paket
7	Pembuatan pagar SD N 12 Sitiung		Nagari Siguntur	Kecamatan Sitiung	
8	Pembangunan/ perbaikan ruang kelas baru (PAUD, SD, SMP) sdn 19 sitiung		Nagari Gunung Medan	Kecamatan Sitiung	
9	pembangunan rumah dinas SD 12		Nagari Lubuk Karak	Kecamatan Sembilan Koto	
10	penambahan Ruang kelas SD 15		Nagari Banai	Kecamatan Sembilan Koto	3 ruang kelas tersedia, jumlah murid 50 orang

11	Drainase SD 05 Timpeh	Jorong Saiyo Beringin Sakti	Nagari Taratak Tinggi	Kecamatan Timpeh	400m
12	Pembangunan Gedung Sekolah Dasar	Nagari Koto Salak	Nagari Koto Salak	Kecamatan Koto Salak	6 Ruang Kelas
13	Gafura SD N 07 Koto Salak	Nagari Padukuan	Nagari Padukuan	Kecamatan Koto Salak	1 Unit
14	pembangunan TK negeri 01 Tiumang		Nagari Tiumang	Kecamatan Tiumang	
15	kelanjutan pembangunan mushallah SD 12 tiumang		Nagari Sungai Langkok	Kecamatan Tiumang	
16	pagar smp 1 tiumang		Nagari Sipangkur	Kecamatan Tiumang	
17	Pavling Blok Halaman SDN 03 Padang Laweh		Nagari Batu Rijal	Kecamatan Padang Laweh	1 Paket
18	Pavling Blok Halaman SDN 01 Padang Laweh		Nagari Batu Rijal	Kecamatan Padang Laweh	1 Paket
19	Pagar + Paving Blok SD 05		Nagari Muaro Sopan	Kecamatan Padang Laweh	1 Paket
20	Paping Block SDN 01 Asam Jujuhan	Sungai Limau	Nagari Sungai Limau	Kecamatan Asam Jujuhan	1 paket
21	Pembangunan Gapura SDN 04 Asam Jujuhan	Jorong Sinamar	Nagari Sinamar	Kecamatan Asam Jujuhan	1 paket

Pada rekapitulasi usulan musrembang RKPD di Kecamatan, usulan kegiatan untuk bidang pendidikan mengarah kepada kegiatan fisik pada pemenuhan sarana dan prasarana bidang pendidikan di tahun 2025. Terdapat 3 usulan pembangunan sekolah baru untuk jenjang PAUD dan 2 untuk sekolah dasar. Untuk pembangunan TK negeri di kecamatan Tiumang, usulan ini merupakan pertimbanga terbesar karena jumlah satuan TK Negeri yang angkanya masih kecil serta ini juga bisa memetakan jumlah PNS Guru Paud yang juga sudah melebihi kuota. Selain pembangunan sekolah baru, ada juga beberapa usulan untuk pembangunan ruang kelas baru dan sarana dan prasarana ulitilas seperti pembangunan pagar, paving block, toilet siswa dan lanjutan pembangunan musola. Untuk jenjang SMP, lanjutan pembangunan ruang kelas untuk SMP di tebing tinggi akan menjadi pertimbangan.

2.4.2. Penelahaan Pokok Pokok Pikiran Masyarakat dan Anggota DPRD

No	Nama Proyek Pokir	Dinas	Anggota DPRD Pengusul	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi
1.	Pembangunan Pagar baru sederhana SDN 11 Koto Baru	Dina Pendidikan	ADIDAS	46.233.000	SDN 11 Koto Baru, Kab. Dharmasraya
2.	Pembangunan Pagar baru sederhana SDN 11 Sungai Rumbai	Dina Pendidikan	JEMI HENDRA	129.690.000	SDN 11 Sungai Rumbai, Kab.Dharmasraya
3.	Pembangunan kantin sekolah SDN 01 Timpeh	Dina Pendidikan	MAWARDI, S. Ag	46.650.000	SDN 01 Timpeh, Kab. Dharmasraya
4.	Pemasangan Paving Block SDN 08 Tiumang	Dina Pendidikan	BAYU IRAWAN	138.000.000	SDN 08 Tiumang, Kab. Dharmasraya
5.	Pemasangan Paving Block SDN 10 Timpeh	Dina Pendidikan	MAWARDI, S. Ag	83.100.000	SDN 10 Timpeh, Kab. Dharmasraya

6	Pembangunan Pagar Tembok SDN 12 Pulau Punjung	Dina Pendidikan	ADE PERDANA	129.618.400	SDN 12 Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya
7	Pembangunan Pagar Tembok SDN 15 Pulau Punjung	Dina Pendidikan	ADE PERDANA	129.618.400	SDN 15 Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya
8	Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Ibtidayah Beringin Sakti	Dina Pendidikan	WIGIONO	74.058.300	MI Beringin Sakti, Kab. Dharmasraya
9	Rehabilitasi Toilet SD/MI Unggul Sungai Rumbai	Dina Pendidikan	EMILAYANTI	18.411.000	SD MI Unggul Dharmasraya
10	Pemasangan Paving Block SDN 12 Koto Baru	Dina Pendidikan	AMRIZAL SH	129.600.000	SDN 12 Koto Baru, Kab. Dharmasraya
11	Pembangunan Pagar Tembok SDN 12 Sitiung	Dina Pendidikan	ST. RIKI ALKHALIK , A. Md	46.168.000	SDN 12 Sitiung, Kab. Dharmasraya
12	Pemasangan Paving Block SMP IT Almunawaroh	Dina Pendidikan	REDEN AWALUDDIN	138.600.000	SMP IT Almunawaroh, Kab. Dharmasraya

13	Pemasangan Paving Block SMPN 3 Koto Baru	Dina Pendidikan	REDEN AWALUDDIN	129.600.000	SMPN 3 Koto Baru, Kab. Dharmasraya
14	Pembangunan Pagar Tembok SMPN 2 Koto Besar	Dina Pendidikan	IRZAL RIYANTO	129.595.200	SMPN 2 Koto Besar, Kab. Dharmasraya

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

3.1.1 Penelahaan Renja Kemendikdasmen

Penyusunan Renstra mempertimbangkan juga kajian dari sisi aspek kebijakan nasional khususnya terhadap Renstra Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui peningkatan mutu pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat, ntuk membantu Presiden dalam menyelenggarkan pemerintahan Negara. Sehubungan tugas tersebut, maka pemerintah daerah dalam hal urusan pendidikan sudah semestinya mengacu kepada tujuan strategis kementerian terkait, agar pemajuan pendidikan dapat dilaksanakan secara selaras, sejalan, dan berkesinambungan mulai dari daerah hingga ke pusat. Terbitnya **Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025** tentang *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029*. Dokumen strategis ini menjadi pedoman utama dalam mewujudkan visi pendidikan nasional yang berkualitas, merata, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman—menuju **Indonesia Emas 2045**. Untuk mendukung tujuan strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam hal peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dijabarkan di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan kewenangannya mendukung pemajuan pendidikan di ranah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Kesetaraan.

Arah kebijakan dan strategi pendidikan Dasar dan Menengah pada kurun waktu *2025–2029* Rencana Strategis ini disusun sebagai amanat dari berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dan
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

  Renstra ini juga menjadi respons terhadap sejumlah tantangan pendidikan di Indonesia, seperti:

  1. Angka partisipasi sekolah yang belum merata—khususnya di jenjang PAUD dan SMA,
  2. Kesenjangan akses pendidikan antarwilayah, kelompok ekonomi, dan anak berkebutuhan khusus,
  3. Capaian literasi dan numerasi yang masih perlu ditingkatkan,
  4. Kurangnya kualifikasi dan sertifikasi guru, serta ketimpangan distribusi guru,
  5. Relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja.

Visi dan Misi Kemendikdasmen 2025–2029

Visi :"Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045."

Misi:

1. **Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan** dengan sarana prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. **Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia** melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan.
3. **Mengoptimalkan kerja sama dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan** untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

3.1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Visi Pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka Visi Provinsi Sumatera Barat untuk menggambarkan tujuan utama

penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada misi pertama dan kedua tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

- Masyarakat Madani

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

- Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya

pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 pada Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing

Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional. Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkreativitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi. Selain pendidikan berkualitas, misi pertama yang ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/pikiran/ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna,sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. V.8 Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2026- 2030 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut:

Dharmasraya Sejahtera Merata

1. Visi tersebut akan diwujudkan melalui enam misi utama yang telah mereka susun. Yaitu, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan memastikan akses yang lebih baik serta peningkatan mutu layanan bagi seluruh masyarakat.
2. Mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal, dengan memberikan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memanfaatkan sumber daya daerah secara maksimal.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang maju dan merata, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan mengedepankan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan inovatif, dengan mendorong digitalisasi layanan publik serta menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan bersih.

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.2 Penelaah Usulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD

4.3 Arah Kebijakan Tahun 2024

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja yang diarahkan sebagai jawaban terhadap isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, berusaha mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan daerah. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional.

Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif, antusias dan adaptif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang dimaksud adalah untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi misi tujuan sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan pemerintahan dan masyarakat sehingga tercapainya kelancaran dalam upaya memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai :

1. Petunjuk prinsip-prinsip dalam menyusun program dan kegiatan.
2. Informasi tentang bagaimana strategi yang akan dilaksanakan.
3. Keyakinan bagi pelaksana maupun penerima layanan.
4. Keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan, hingga sub kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan Tahun 2025 mengacu pada peraturan berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya keputusan menteri ini, praktis seluruh nomenklatur program maupun kegiatan yang disusun dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam dokumen RPJMD) mengalami perubahan dan perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk reklasifikasi dan rekodefikasi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ditetapkannya keputusan menteri ini atas dasar adanya penyesuaian kembali atas Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

a. Dasar pertimbangan penentuan program dan kegiatan

Dalam Renja Dinas Pendidikan Tahun 2025, penentuan program dan kegiatan yang prioritas maupun non prioritas didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan tertentu terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. Program dan kegiatan yang dipilih dianggap dapat mengakomodir dan menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, serta kegiatan yang memuhi naiknya capaian pada indikator Rapor Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, serta yang berkaitan dengan program prioritas kepala daerah terpilih. Adapun beberapa pertimbangan tersebut diantaranya diuraikan sebagai berikut :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, salah satu visi kepala daerah terpilih adalah meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan. Peningkatan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Berdasar hal tersebut, Dinas

Pendidikan berupaya memformulasikanprogram dan kegiatan yang mendukung pencapaian kondisi tersebut.

2. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Pendidikan merupakan salah satu target pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam program SDGs hingga tahun 2030. Pada tujuan ke empat disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan adalah tercapainya Pembangunan Berkualitas, dengan memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Diharapkan, program dan kegiatan yang direncanakan berdampak positif bagi pencapaian tujuanSDGs 2030.

3. Pengentasan Kemiskinan

Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai. Sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia kerja maupun dunia usaha. Hal ini kemudian membuat angka pengangguran dan kemiskinan menjadi bertambah. Oleh karena itulah, peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) secara tidak langsung menjadi strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, pemerataan kesempatan belajar, serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang layak berpengaruh besar dalam penentuan kualitas pendidikan masyarakat. Semakin baik kualitas pendidikan masyarakat, maka semakin besar pula peluang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak pada saat usia aktif bekerja nanti.

4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan)

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sebelumnya diatur dalam amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Naional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota. Amanat SPM menurut peraturan tersebut lebih menitik beratkan pada ketersediaan sarana dan prasaran penunjang pendidikan di daerah, berikut juga tentang dukungan ketersediaan tenaga pendidik yang berkompeten. Peraturan menteri tersebut kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, aturan SPM terbaru menitikberatkan apa saja pelayanan minimal yang wajib dipenuhi pemerintah daerah

kepada capaian indikator pada Rapor Pendidikan.

Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

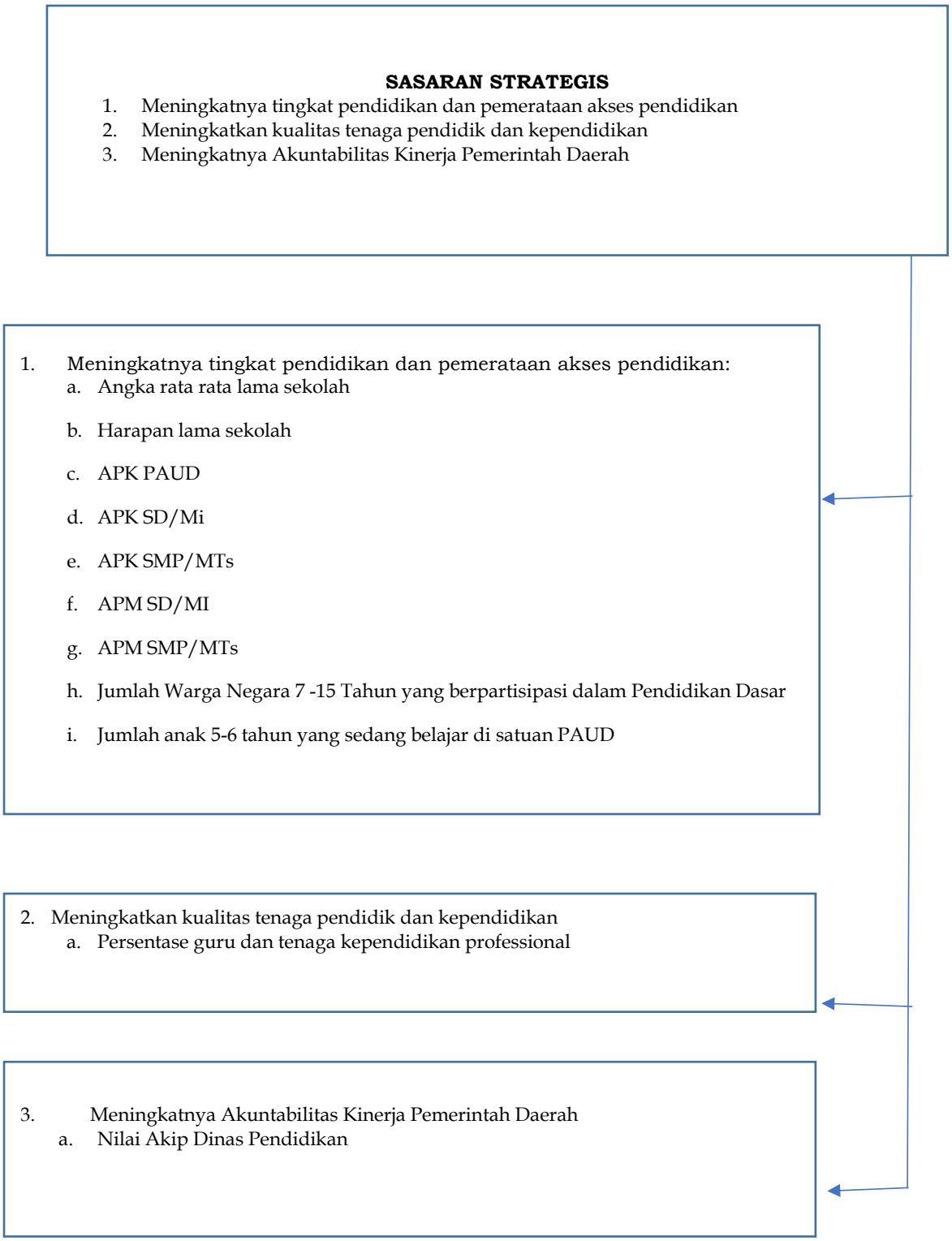

4.4 Matrik Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Sumber Data : SIPD Dinas Pendidikan Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Perubahan Tahun 2025 disusun dalam upaya Pengembangan Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya yang mencakup rencana pengembangan satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP. Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, rencana kerja ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pengembangan pendidikan daerah dengan tetap mengacu pada Standar Pendidikan Nasional (SPN).

Peran perencanaan tingkat Kabupaten di era otonomi dalam rangka meningkatkan pengembangan Pendidikan Dasar sangat penting, baik bagi Provinsi maupun Nasional. Kerena hanya Kabupaten yang dapat melihat adanya kesenjangan tingkat kemajuan pendidikan di wilayah. Disamping itu, masalah – masalah pendidikan yang paling mendasar dalam pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat di Kabupaten/Kota, dan Kabupaten/Kota mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Provinsi maupun Nasional.

Dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, pemerintah daerah memanfaatkan otonomi daerah seoptimal mungkin untuk memacu pendidikan daerah dalam rangka pembangunan pendidikan nasional secara keseluruhan sekaligus merupakan masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait dengan permasalahan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.

Meskipun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya merupakan dokumen pengembangan pendidikan, namun tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dari rencana pembangunan pendidikan Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan, oleh kerena materi substansi dasar penjabaran materi mengacu pada tiga permasalahan pendidikan yang meliputi Pemerataan dan perluasan akses, Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik,

artinya Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sudah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 - 2026. Semoga dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dalam rangka tahapan proses Penyusunan RKPD tahun 2025.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA (RENJA)

2025

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DHARMASRAYA
2024

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1.... PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.3.1. Maksud 3
1.3.2. Tujuan 3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 4

BAB 2.... *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU* ..... Error! Bookmark not defined.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... ***Error! Bookmark not defined.***
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 31
2.3.1. Isu strategis 31
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 32
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan 34
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD 37

BAB 3.... TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 38

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 38
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait 39
3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat 40
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 41

BAB 4.... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 43
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 45

BAB 5.... PENUTUP 46

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Tahun 2019-2023 7
Tabel 2-2 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2019-2023 10
Tabel 2-3 Prevalensi Malnutrisi Tahun 2019-2023 12
Tabel 2-4 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tahun 2019-2023 15
Tabel 2-5 Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2019-2023 17
Tabel 2-6 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam Tahun 2019-2023 19
Tabel 2-7 Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2019-2023 23
Tabel 2-8 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular Tahun 2019-2023 24
Tabel 2-9 Visite Rate Tahun 2019-2023 27
Tabel 2-10 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama Tahun 2019-2023 28
Tabel 2-11 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 30
Tabel 2-12 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan 30
Tabel 2-13 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD 30
Tabel 3-1 Target kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023 30
Tabel 4-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 44
Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 45

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Dinas Kesehatan disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
   1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024.
   2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
   3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2019 s.d 2024.

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2025

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
   1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan prangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida
   2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini siserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.

e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
   1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Dinas Kesehatan. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahap yaitu: Persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan awal Renja, Penyusunan rancangan renja, Perumusan rancangan akhir renja dan Penetapan Renja OPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 meliputi RSUD, Labkesda, IGFK dan Puskesmas. Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas KeasehatanTahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
8. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II **Hasil Evaluasi Renja Dinas KesehatanTahun 2023**
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Dinas Kesehatan, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

BAB IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

BAB V Penutup

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kesehatan tahun lalu dilihat berdasarkan evaluasi pelaksanaan target RPJMD Tahun 2023. Indikator pelaksanaan RPJMD yang ada di Dinas Kesehatan meliputi 11 (sebelas) indikator kinerja utama. Pada tahun 2023 semua indikator kinerja utama yang ada di Dinas Kesehatan sudah tercapai. Untuk lebih jelasnya capaian indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Urusan/Bidang/Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2023	2023	2023	
1	Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	17,6	9	148,86	Tercapai
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100,000 kelahiran hidup	108	84	122,22	Tercapai
4	Prevalensi Stunting	indeks	11,65	7,6	134,76	Tercapai
3	Prevalensi Malnutrisi	Persen	19,65	5,7	170,99	Tercapai
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	33	49,4	149,70	Tercapai
5	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	50	65	130,00	Tercapai
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	Persen	100	100	100,00	Tercapai
7	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	100	100	100,00	Tercapai
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	100	100	100,00	Tercapai
9	Visite Rate	/ Jumlah Penduduk	5	5,25	105,00	Tercapai
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	Persen	50	93,3	186,60	Tercapai
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	100	100	100,00	Tercapai

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan.

1. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dari derajat kesehatan yang merupakan salah satu target dalam tujuan pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu tujuan SDGs 3a yakni mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup Tahun 2030. Selain itu, kematian ibu dapat dikaitkan dengan kualitas tenaga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat disuatu daerah dimana semakin tinggi Angka Kematian Ibu disuatu daerah, kemungkinan besar kinerja tenaga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat daerah tersebut rendah.

Kematian ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk kehamilan ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian incidental, per 100.000 kelahiran hidup. Risiko yang dihadapi ibu hamil selama kehamilan dan melahirkan dipengaruhi oleh keadaan social ekonomi, factor budaya keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, serta gambaran ketersedian sarana dan prasarana dilapangan dan penggunaan fasilitas kesehatan pelayanan obstetrik prenatal.

Tabel 2-1 Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	/100.000 Kh	108	77,02	257,59	201	84

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berikut dijelaskan mengenai angka kematian ibu melahirkan dari tahun 2019-2023

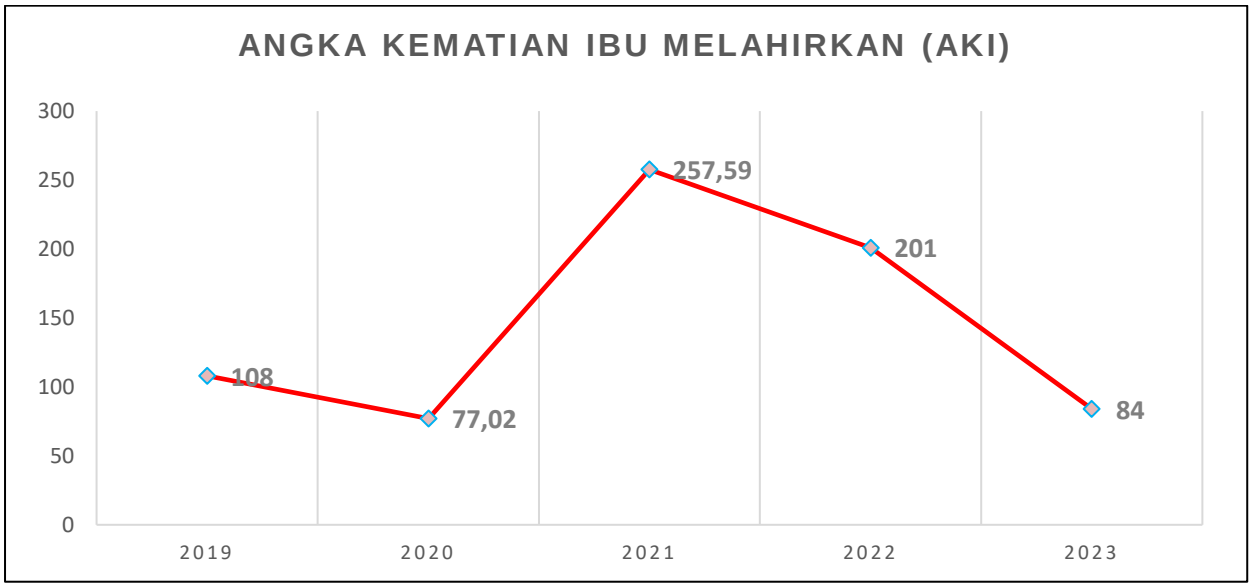

Grafik 2.1 Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Tahun 2019-2023

Kematian ibu di Kabupaten Dharmasraya dalam periode tiga tahun terakhir terjadi penurunan jumlah kematian ibu yang cukup siknifikan. Pada tahun 2023 jumlah kelahiran hidup atau surviving infant di Kabupaten Dharmasraya adalah 3.562 jiwa, jumlah kematian Ibu sebanyak 3 orang dengan Angka Kematian Ibu 84 per 100.000.000 Kelahiran hidup, dengan capaian kinerja 156,7%, tahun 2022 jumlah kematian Ibu sebanyak 7 orang dengan Angka Kematian Ibu 201 per 100.000.000 Kelahiran hidup, dengan capaian kinerja 102%, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kematian ibu 14 orang dengan angka kematian ibu 257,59 per 100.000 kelahiran hidup, dengan penilaian kinerja 108%. Dengan penurunan jumlah kematian ibu yang cukup siknifikan tahun 2023, jumlah kematian ibu sama dengan jumlah kematian ibu pada tahun 2020, sebanyak 3 orang dengan angka kematian ibu 77,02 per 100.000 kelahiran hidup. Diharapkan target SDGs tahun 2030 untuk Angka Kematian Ibu dapat tercapai, dimana target Kematian ibu kurang dari 70/100.000 kelahiran hidup.

Penurunan AKI di Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan berbagai upaya seperti, melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), audit maternal, pelacakan kasus pada setiap kematian ibu, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan dan workshop baik ditingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, koordinasi lintas program dan lintas sector terkait, bimbingan dengan menghadirkan Nara sumber ahli ke FKTP atau Puskesmas terutama Puskesmas PONED. Adanya inovasi Bidan Datang Memberikan Asuhan Mandiri Kepada Keluarga (BIDADARI Keluarga), diharapkan semua sasaran mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan

kebutuhannya. Untuk meningkatkan implentasi inovasi BIDADARI Keluarga di masyarakat, tahun 2023 bidang kesehatan masyarakat membuat program Inovasi Patwal Militer (Patut Kawal Ibu Hamil Baca Buku KIA Terintegrasi), dimana petugas dipuskesmas harus melakukan edukasi pada ibu hamil di Pos Yandu, Kelas Ibu Hamil untuk membaca dan memahami isi dari buku KIA dengan melibatkan tenaga gizi dan tenaga Promosi kesehatan.

Capaian kinerja AKI tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dimana target AKI sebesar 194 per 100,000 kelahiran hidup, dengan realisasi 84 per 100.000 kelahiran hidup dan capaian kinerja sebesar 156,7%.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia tepat 1 tahun yang dinyatakan per 1000 kelahiran hidup (UNICEF, 2020). AKB digunakan untuk mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup.dari masyarakat yang kemudian hal ini dituangkan dalam rumusan Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ketiga untuk mencapai target yang diharapkan yaitu salah satu indikatornya menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Pengukuran AKB dipilih karena potensi masalah dan resiko kematian lebih tinggi dibanding pada kelompok umur lain pada usia balita. Metode pengukuran AKB diukur dengan menghitung jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (KH). Menurut WHO mayoritas dari semua kematian neonatal 75% terjadi selama minggu pertama kehidupan, dan sekitar 1 juta bayi baru lahir meninggal dalam 24 jam pertama. Termasuk didalamnya kelahiran prematur, komplikasi terkait intrapartum (lahir dengan keadaan asfiksia atau kegagalan bernafas), dan infeksi cacat lahir, hal ini yang menyebabkan sebagian besar kematian pada neonatal.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan Status kesehatan disuatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Disamping itu, AKB merupakan salah satu indikator yang berpengaruh terhadap Usia Harapan Hidup yang nantinya akan menentukan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2-2 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 Kh	9,4	8,98	7,72	11,7	9,0

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berikut dijelaskan mengenai angka kematian Bayi (AKB) dari tahun 2019-2023

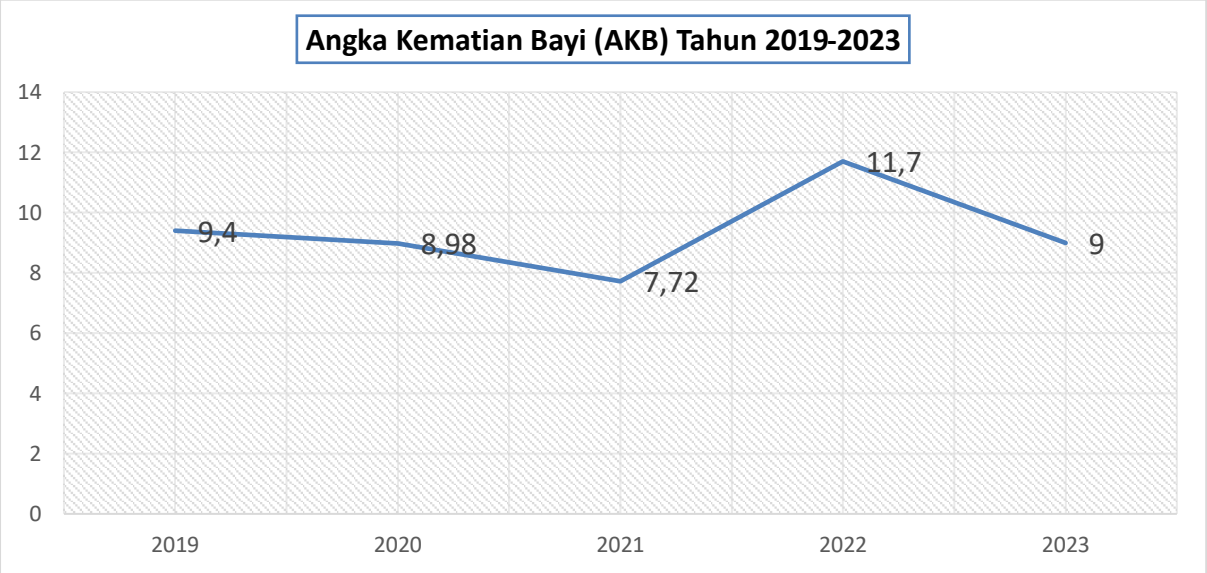

Grafik 2.2 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2019-2023

Pada tahun 2023 jumlah kematian bayi di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 32 orang dengan jumlah kelahiran hidup 3.562 jiwa, sehingga Angka kematian Bayi 9,0 per 1.000 kelahiran hidup dari target kinerja 17,6 per 1.000 kelahiran hidup, dengan capaian kinerja 148,8%. Pada Tahun 2022 jumlah kematian bayi di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 41 orang dengan angka kematian Bayi 14,7 per 1.000 kelahiran hidup dari target kinerja 18,6 per 1.000 kelahiran hidup, dengan capaian kinerja 137%. Tahun 2021 jumlah kematian bayi sebanyak 42 orang, Angka Kematian Bayi sebesar 7,72 per 1.000 kelahiran hidup, dengan capaian kinerja sebesar 161,4%. Tahun 2020 jumlah kematian bayi sebanyak 50 orang dengan angka kematian bayi 8,98 per 1000 kelahiran hidup, dan capaian kinerja sebesar 155,1%.

Dalam empat tahun terakhir terjadi penurunan angka kematian bayi, meskipun penurunan belum signifikan namun sudah memperlihatkan meningkatnya mutu pelayanan kesehatan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir.

Capaian kinerja AKB tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dimana target AKB sebesare 17,6 per 1000 kelahiran hidup, dengan realisasi 9,0 per 1000 kelahiran hidup dan capaian kinerja sebesar 156,7%.

3. Prevalensi Malnutrisi

Malnutrisi masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Prevalensi malnutris pada balita di Indonesia masih cukup tinggi. Diagnosis malnutrisi dapat diketahui melalui gejala klinis, antropometri dan pemeriksaan laboratorium. Malnutrisi pada balita tidak hanya meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian tetapi juga dapat menimbulkan gangguan dalam pertumbuhan fisik, mental maupun kemampuan berpikir yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja. Keterlambatan dalam memberikan pelayanan gizi pada balita dengan malnutrisi dapat mengakibatkan kerusakan yang sukar atau tidak dapat diperbaiki lagi.

World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa 175 juta anak di negara berkembang mengalami malnutrisi dilihat dari data berat badan menurut umur dan sekitar 230 juta mengalami stunted dilihat dari tinggi badan menurut umur. Pada tahun 2007, hampir 20 juta anak bawah lima tahun menderita malnutrisi berat akut. Menurut WHO, anak penderita gizi buruk berisiko kematian 5-20 kali lebih besar daripada anak dengan nutrisi baik. Malnutrisi ber-tanggung jawab langsung dan tidak langsung ter hadap 60% kematian balita, lebih dari dua pertiga kematian tersebut justru terjadi pada usia kurang dari satu tahun. Dampak jangka pendek dari malnutrisi adalah penurunan daya tahan tubuh anak sehingga anak akan lebih mudah terserang penyakit. Beberapa penyakit yang kian menyerang anak dengan kondisi malnutrisi, misalnya diare, pneumonia, dan penyakit infeksi lainnya.

Di Indonesia, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018 menunjukkan 17,7% bayi usia di bawah lima tahun (balita) masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan yang menderita gizi kurang sebesar 13,8%. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, didapatkan angka balita stunting 21,6%, angka balita wasting 7,7% dan balita underweight sebesar 17,1%. Sedangkan angka stunting di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, sebesar 23,3% dan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 25,2%, angka stunting di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 tertinggi pada balita rentang usia 24-35.

Tabel 2-3 Prevalensi Malnutrisi Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Prevalensi Malnutrisi	%	8,39	6,56	6,25	6,65	5,7

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berikut dijelaskan Prevalensi Malnutrisi dari tahun 2019-2023

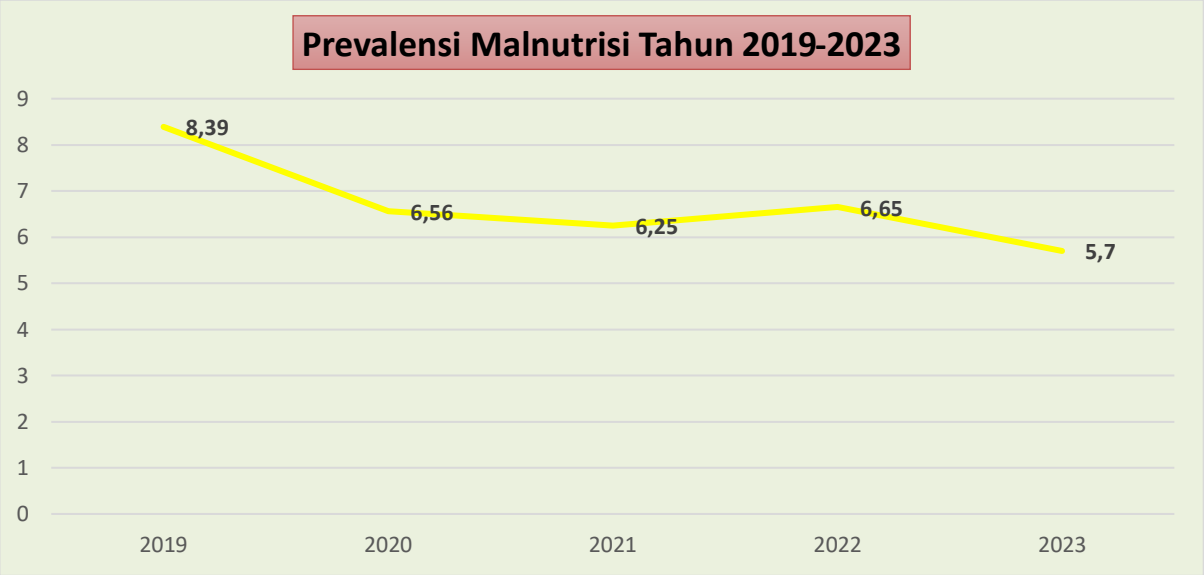

Grafik 2.3 Prevalensi Malnutrisi Tahun 2019-2023

Prevalensi malnutrisi pada balita di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebesar 1.958 balita dari 15.722 orang balita yang diukur berat badan dan tinggi badan atau 5,7% dari target tahun 2023 10%, dengan capaian kinerja 143%. Tahun 2022 prevalensi malnutrisi pada balita sebesar 2.159 orang dari 14.522 orang balita yang diukur berat badan dan tinggi badan, atau 6,65%, dari target 22,15%, dengan capaian kinerja >100%, tahun 2021 prevalensi malnutrisi pada balita 2.113 Orang dari jumlah 16.888 Orang balita yang diukur berat badan dan tinggi badan, atau 6,25% dari target 7,8%.

Prevalensi malnutrisi pada balita terdiri dari:

1. Stunting

   Hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting atau gizi buruk di Indonesia saat ini mencapai 21,6% sedikit menurun dari hasil SSGI Tahun 2024 yaitu, 24,4%, angka tersebut jauh dari yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 14%. Stunting terjadi tidak begitu saja melainkan melalui proses yang

cukup lama atau kronis. Stunting berarti kondisi anak yang memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya diakibatkan asupan gizi yang kurang. Jika ini berlangsung terus maka kualitas generasi mendatang akan menurun. Apabila tidak segera diatasi menurut Bapenas kerugian yang dapat ditimbulkan karena stunting mencapai 300 triliun.

Ada lima poin penting perlu diperhatikan dalam mengatasi permasalah stunting yaitu, 1) pola makan dengan gizi seimbang perlu dibiasakan agar kecukupan nutrisi dan kesehatan balita terjamin, 2) pola asuh dalam pemberian dan perawatan dari mulai kehamilan hingga balita. Bahkan idealnya diberikan pendidikan sejak remaja putri. Pemeriksaan kehamilan yang rutin, konsumsi makanan yang tepat saat hamil, merawat bayi, cara memberi makan dan jenisnya, pemberian asi ekslusif termasuk menjaga kesehatan ibunya. 3) sanitasi lingkungan, akses air bersih yang sulit, kebiasaan mencuci tangan, buang air besar sembarangan dapat menimbulkan masalah infeksi pada ibu dan bayinya. 4) perilaku hidup bersih dan sehat. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, perilaku membuang sampah dan pengelolaanya, penggunaan alas kaki untuk mencegah kecacingan. 5) mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan identik dengan daya beli yang rendah, lingkungan yang kumuh serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi rendah.

Sanitasi lingkungan berperan penting terhadap pencegahan kejadian stunting ini. WHO pada 2018 mengumumkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua sanitasi terburuk di dunia setelah India. Bahkan di Indonesia diperkirakan terdapat 150.000 kematian balita setiap tahunnya akibat perilaku BAB sembarangan. Diperkirakan ada sekitar 84 juta orang yang belum memiliki akses pada higiene dan sanitasi yang layak. Berdasarkan data Susenas, BPS tahun 2017 menyebutkan hanya 72% masyarakat yang memiliki akses ke sumber air minum yang layak. Begitu juga persentase yang memiliki akses sanitasi yang layak hanya 68% (BPS, 2018). Kondisi ini mempengaruhi kejadian infeksi karena sanitasi yang buruk. Kejadian penyakit diare dan kecacingan misalnya dapat menggangu proses penyerapan nutrisi makanan. Hal ini dapat menyebabkan menurunya berat badan bayi dan balita. Apabila hal ini berlangsung lama dan tidak disertai asupan makanan yang cukup maka dapat menyebabkan stunting. Pencegahan balita stuntimg jauh lebih baik dari pada pengobatan pada balita dengan kasus stunting.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Dharmasraya telah dilakukan:

1) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Dharmasraya, dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/65/KPTS-BUP/2022, tanggal 19 Januari 2022

2) Nagari Prioritas Penanganan Stunting Tingkat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2023, dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/210/KPTS-BUP/2022, tanggal 20 Mei 2022
3) Program pengembangan lingkungan sehat seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar pada masyarakat.

   Pada tahun 2023 jumlah balita Stunting 1.329 orang balita, dengan persentase 7.6% dari 15.722 balita yang diukur Tinggi Badannya dan ditimbang berat badannya. Target Nasional tahun 2023 adalah 16%. Pada tahun 2022, jumlah stunting 1.329 orang, atau 7,6%, artinya 7,6% balita mengalami stunting dari 14.522 orang balita yang diukur berat badan dan tinggi badan, target nasional presentase stunting 18,4%. Tahun 2022 terjadi penurunan jumlah kasus stunting yang cukup siknifikan bila dibandingkan dengan kasus stunting tahun 2021, dimana jumlah stunting 1.558 orang, atau 13,5%.

2. Wasting

   Wasting adalah salah satu bentuk kekurangan gizi yang mengakibatkan balita berisiko mengalami ketertinggalan tumbuh kembang secara jangka panjang. Angka wasting di Indonesia berdasarkan data Riskesdas pada tahun 2007 sebesar 13,6%, tahun 2013 meningkat menjadi 19,6% dan tahun 2018 sebesar 10,2%, sedangkan hasil SSGI Tahun 2022 didapatkan angka balita wasting, sebesar 7,7% sehingga wasting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius untuk ditangani menurut standar WHO.

   Wasting disebabkan oleh beberapa faktor yaitu asupan makanan yang kurang dan penyakit infeksi merupakan faktor langsung. Ketahanan pangan keluarga, pola pengasuhan anak, dan pelayanan kesehatan serta lingkungan yang kurang memadai menjadi faktor tidak langsung. Wasting memiliki dampak yang besar sehingga masih dikatakan sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat. Anak balita yang wasting secara tidak langsung dapat mengalami defisiensi zat gizi yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kesehatan pertumbuhan, penyakit infeksi dan kecerdasan anak. Keadaan kurang gizi yang tidak teratasi pada masa balita dapat mempengaruhi intellectual performance, kapasitas kerja, dan kondisi kesehatan di usia selanjutnya. Beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian wasting adalah asupan karbohidrat, penyakit infeksi, ASI ekslusif, kelengkapan imunisasi, usia ibu dan BBLR).

   Angka wasting pada tahun 2023 adalah 902 orang balita dari 15722 balita yang diukur yaitu 5.7% dan target 7.3%. Tahun 2022, balita wasting (gizi buruk dan gizi kurang) di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 830 orang dari 14.522 orang balita yang diukur berat badan dan tinggi

badan, atau 5,7% dari target 7,5%. Tahun 2021, balita wasting berjumlah 709 orang 15.637 orang balita yang diukur berat badan dan tinggi badan, atau 4,5%.

Capaian kinerja Prevalensi Malnurisi tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dimana target Prevalensi Malnutrisi 10%, dengan realisasi 5,7% dan capaian kinerja sebesar >100%.

Prevalensi malnutrisi di Kabupaten Dharmasraya tiga tahun terakhir sudah terjaring dan sudah tertangani sesuai dengan standar.

4. Persentase Rumah Tangga PHBS

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan,memelihara, dan melindungi kesehatannya baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Perilaku hidup bersih dan sehat bertujuan memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok, keluarga, dengan membuka jalur komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku sehingga masyarakat sadar, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersihdan sehat. Manfaat PHBS secara umum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat.

Penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari memiliki tolok ukur yang dapat digunakansebagai ukuran bahwa seseorang dikatakan sudah melakukan atau memenuhi kriteria menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut adalah indikator-indikator PHBS yaitu: 1) Persalinan ditolong oleh tenaga Kesehatan, 2) Memberi bayi ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif, 3) Menimbang bayi dan anak sampai dengan usia 6 tahun secara rutin setiap bulan, 4) Menggunakan Air Bersih, 5) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan benar, 6) Gunakan Jamban Sehat, 7) Memberantas jentik nyamuk di rumah sekali seminggu secara rutin, 8) Makan makanan yang sehat dan bergizi, 9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari, 10) Tidak merokok

Tabel 2-4 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%			30,9	32,9	49,4

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berikut dijelaskan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari tahun 2019-2023

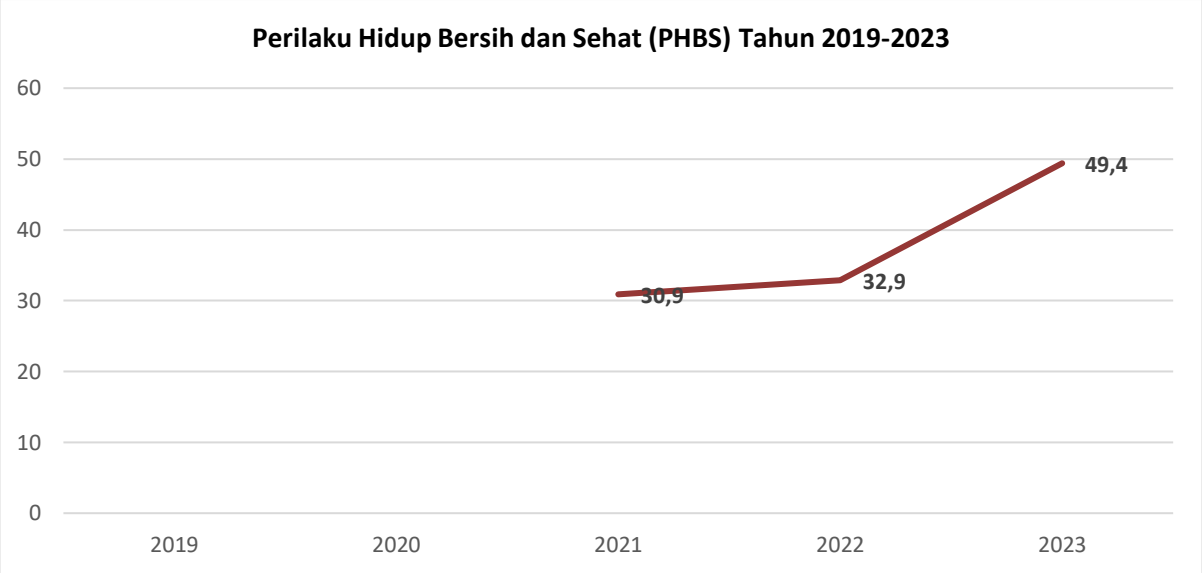

Grafik 2.4 mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tahun 2019-2023

Peningkatan capaian PHBS tahun 2023 didukung oleh adanya koordinasi lintas program dan pelaksanaan program secara terintegrasi, antara lain dengan PTM (Penyakit Tidak Menular), KIA (Kesehatan Ibu dan Anak, Program Gizi, Kesehatan Lingkungan, dan Imunisasi serta program-program lainnya di bidang Kesehatan.

5. Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan dan paradigma baru pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku. Adapun tujuan penyelenggaraan STBM adalah untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang hygienes dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pada pasal 6 menyatakan strategi nasional STBM adalah aksi terpadu untuk menurunkan angka diare dan meningkatkan hygienitas dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan STBM dilakukan menggunakan tiga komponen pendekatan yaitu penciptaan lingkungan yang mendukung (*enabling)*, peningkatan kebutuhan sanitasi (*demand*) dan peningkatan sanitasi (*supply*). Lingkup sanitasi dalam STBM meliputi 5 pilar yaitu : 1) Stop Buang Air Besar Sembarangan BABS, 2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS, 3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan dalam rumah tangga, 4) pengelolaan sampah rumah tangga dan 5) pembuangan saluran limbah cair rumah tangga secara aman. Fokus pembangunan

kesehatan saat ini adalah *universal acces* / 100 0 100 yaitu 100 % akses air bersih, 0% perumahan Kumuh dan 100 % akses Jamban sehat.

Capaian SBS/ODF Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebanyak 70% sekitar 781 kelurahan/nagari yang sudah SBS/ODF, secara kabupaten/ kota, baru 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang telah mencapai 100% kelurahan/nagari SBS/ODF, satu diantaranya adalah Kabupaten Dharmasraya. Masih ada 3 (tiga) kabupaten/kota yang mencapai 50% desa/kelurahan SBS/ODF dan ada 4 (empat) kabupaten/kota yang capaian desa/kelurahan SBS/ODF di bawah 20% serta 2 (dua) kabupaten yaitu Kab. Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai yang belum memiliki desa/kelurahan SBS/ODF.

Tabel 2-5 Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	34,62	40,38	51,92	55,40	65

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berikut dijelaskan mengenai meningkatnya sanitasi total berbasis masyarakat dari tahun 2019-2023

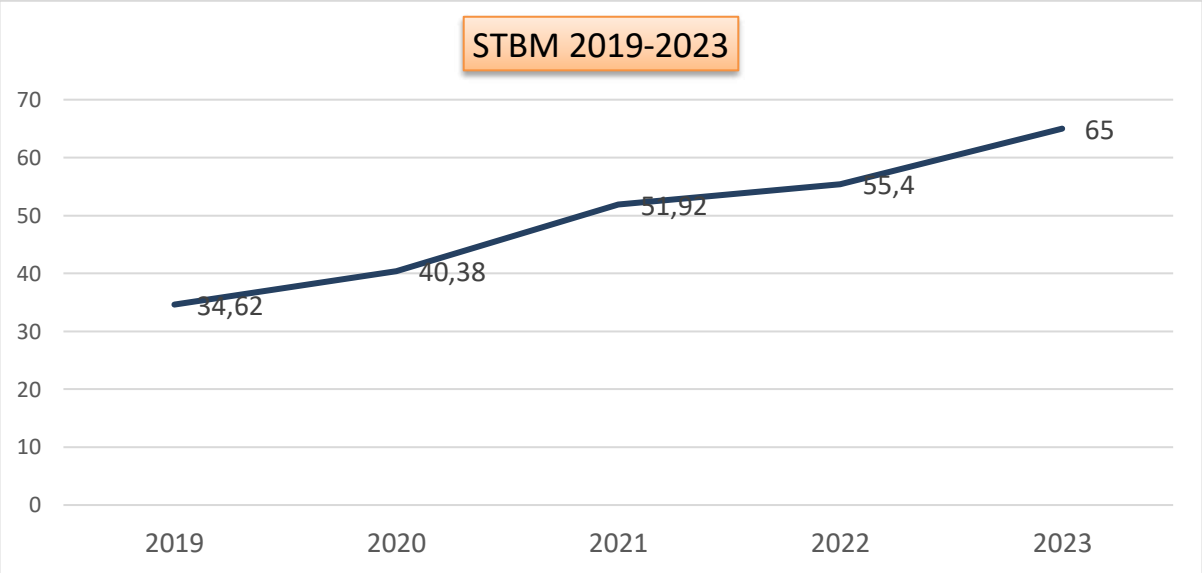

Grafik 2.5 mengenai meningkatnya sanitasi total berbasis masyarakat Tahun 2019-2023

Tahun 2023 capaian kinerja 5 pilar STBM Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya sebesar 65% dari target 65%, dengan capaian kinerja 100%. Capaian 5 pilar STBM di Kabupaten Dharmasraya

tahun 2023 yaitu 1) BABS sebesar 100%, 2) CTPS sebesar 53,51%, 3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan di Rumah Tangga (PAMMRT) sebesar 96,04, 4)) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT) sebesar 15,34 dan 5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT) sebesar 69,43. Tahun 2022 capaian program 5 pilar STBM di Kabupaten Dharmasraya, sudah melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu 55,40% dari target 45%, dengan capaian pilar, 1) BABS sebesar 100%, 2) CTPS sebesar 47,56%, 3) Pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga tercapai 68,6%, 4) Pengelolaan sampah rumah tangga tercapai 10,99%, dan 5) Pengamanan limbah cair rumah tangga 50,10%. Sedangkan tahun 2021 capaian STBM 45% dari target 41%, dengan capaian kinerja 109,7%.

Capaian kinerja STBM tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dari target 65%, telah realisasi 65% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Peningkatan air minum yang berkualitas Dinas Kesehatan tahun 2023 melalui survei kualitas air minum rumah tangga dan melakukan pemeriksaan sampel air minum pada 15 RT dan 6 Tempat Fasilitas Umum (TFU) pada 10 puskesmas dengan jumlah sampel sebanyak 360 sampel. Pemeriksaan bakteriologis, fisik dan kimia pada 19 parameter sesuai dengan PMK No 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

6. Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam

Menurut Peraturan menteri kesehatan Nomor 1501 tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan cara penanggulamgannya menyatakan bahwa Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah Timbulnya atau meningkatnya Kejadian Kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Berdasarkan data WHO hingga tanggal 31 desember 2022 jumlah Infeksi Covid-19 diseluruh Dunia telah mencapai 671,46 juta kasus, serta 6,443 juta orang meninggal dunia. 21.673.486 kasus aktif Covid-19 dan 643.053.227 dinyatakan Sembuh.

Tahun 2023 di Kabupaten Dharmasraya terjadi penurunan kasus covid-19 dimana kasus covid-19 melandai dengan dratis yaitu dari 296 kasus di akhir tahun 2022 menjadi 3 kasus di awal tahun 2023. Pada bulan juni keluar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan keluarnya Peraturan Presiden ini Covid19 sudah menjadi penyakit endemic. Namun di bulan Oktober 2023 dari laporan SKDR (Sistem Kewaspadaaan Dini dan Respon) mingguan puskesmas muncul KLB Pertusis dengan respon KLB pada

dua puskesmas, yaitu Puskesmas Sungai Dareh sebanyak 9 kasus suspek pertusis dan Puskesmas Silago 2 kasus suspek pertusis.

Pertusis (batuk rejan/batuk seratus hari) adalah penyakit menular pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertusis. Penyakit ini merupakan penyakit endemik di hampir seluruh negara di dunia dengan puncak epidemik biasanya terjadi setiap 2-5 tahun (rata-rata 3-4 tahun). Secara global, WHO memperkirakan terdapat lebih dari 151.074 kasus terjadi pada tahun 2018, dengan 95% diantaranya terjadi di negara berkembang. Namun demikian, kasus pertusis di negara berkembang umumnya tidak terlaporkan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan laporan WHO yang menunjukkan bahwa data kasus pertusius lebih banyak berasal negara maju. Tahun 2019, WHO melaporkan 145.486 kasus pertusis terjadi di seluruh dunia. Kasus terbanyak dilaporkan dari Cina (30.027 kasus), disusul Jepang (16.845 kasus), Rusia (14.407 kasus), dan Australia (12.021 kasus).

Tabel 2-6 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam	%	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berikut dijelaskan persentase kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani s24 jam tahun 2019-2023

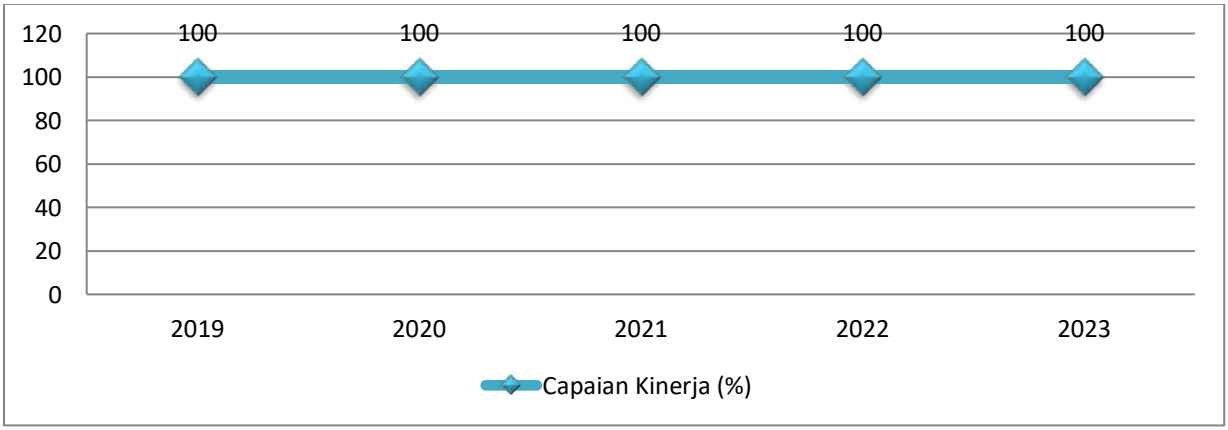

Grafik 2.6 persentase kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani s24 jam tahun 2019-2023

Upaya yang sudah dilakukan Dinas kesehatan dalam rangka respon KLB mencegah penularan penyakit pertusis dengan pelacakan kontak erat dan pendataan anak usia dibawah lima tahun pada nagari yang positif kasus pertusis, dari satu kasus pertusis di dapatkan 10 (sepuluh) kontak erat dan 18 orang anak balita yang belum lengkap imunisasi DPT-HB-Hib. Penatalaksanaan respon KLB pada kontak erat dengan pemberian antibiotic sedangkan pada anak balita yang belum lengkap pemberian Imunisasi DPT-HB-Hib 1 sampai 4 diberikan imunisasi, dari 18 anak balita yang ditemukan sebanyak 16 anak balita sudah diberikan imunisasi DPT-HB-Hib, 2 orang anak tidak dilakukan imunisasi karena penolakan orang tuanya.

Pada tahun 2023 juga terjadi KLB keracunan makanan sebanyak dua kali kejadian yaitu keracunan makanan yang berasal dari sate dengan jumlah korban sebanyak 12 orang dan keracunan makanan dengan jenis makanan Lontong Pical dengan jumlah korban 9 orang. Kedua kasus keracunan makanan ini dapat di tangani dalam waktu kurang dari 24 jam dan tidak menimbulkan korban jiwa.

7. Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Penyakit menular merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Munculnya penyakit baru *(new emerging disease*) dan munculnya kembali penyakit menular yang lama (*re-emerging disease*) membuat Indonesia menanggung beban berlebih dalam penanggulangan penyakit (*triple burden disease*). Penyakit menular dapat didefinisikan sebagai sebuah penyakit yang dapat ditularkan (berpindah dari orang satu ke orang yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara/penghubung). Penyakit menular ini ditandai dengan adanya agent atau penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah serta menyerang host atau inang (penderita). Dalam dunia medis, pengertian penyakit menular atau penyakit infeksi adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi (seperti virus, bakteria, jamur dan parasit), dan bukan disebabkan oleh faktor fisik (seperti luka bakar) atau kimia (seperti keracunan).

Menurut World Health Organization (WHO) saat ini penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan. Penyebab kematian tetinggi adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Tuberculosis (TBC) dan Penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien. Secara Global tahun 2016 terdapat 10,4 juta kasus insiden tuberculosis (TBC) yang setara dengan 120 kasus per 100.000 penduduk. TBC tetap menjadi 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai beban tuberculosis yang terbesar diantara 8 negara lainnya yaitu india (27%),

China (9%), Indonesia (8%), Philipina (6%), Pakistan (5%), Nigeria (4%), Banglades (4%), dan Afrika Selatan (3%).

Tahun 2023 di Kabupaten Dharmasraya penyakit menular yang disebabkan oleh TBC terjadi penurunan kasus baru sebesar 2,9% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kurang ketatnya dalam menetapkan DO pada terduga yang diperiksa, sedangkan pada tahun 2023 ditemukan kasus baru HIV sebanyak 8 orang, dimana penemuan kasus baru HIV terdapat peningkatan sebesar 22,22% dari tahun sebelumnya, ini disebabkan adanya penambahan unit Layanan yaitu Rumah Sakit Umum Sungai Dareh. Tahun 2023 kasus ODIV yang diobati (ODIV on ART) secara keseluruhan sebanyak 25 kasus, pengobatan ini dilaksanakan di Puskesmas Sialang dan RSUD Sungai Dareh yang merupakan Fasyankes PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan). Tahun 2022 di Kabupaten Dharmasraya penyakit menular yang disebabkan oleh TBC terdapat peningkatan penemuan kasus baru, sebesar 11,5% dari capaian tahun 2021, sedangkan HIV mengalami penurunan penemuan kasus baru sebesar 25%, hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat berisiko untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan.

Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terdiri dari:

1. **Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC**

   Pelayanan kepada penderita TBC termasuk kedalam standar pelayanan minimal kesehatan yang tertuang pada PMK No.4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, adapun Mekanisme Pelayanan pada penderita penyakit TBC antara lain;

   - Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
   - Pemeriksaan klinis Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
   - Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
   - Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
   - Melakukan rujukan jika diperlukan.

   Pada tahun 2023 tidak ada perubahan defenisi operasional (DO) indikator terduga TBC dengan tahun sebelumnya. DO indikator terduga TBC berdasarkan jumlah TBC semua Tipe. Pada tahun 2023 ditemukan terduga TBC sebanyak 2.544 orang, terjadi penurunan angka terduga TBC yang mendapatkan pelayanan pada tahun 2023 sebesar 2,9%, dari 2.544 orang terduga TBC

tahun 2023 ditemukan kasus baru TBC sebanyak 455 orang (41,85%) dan terjadi penurunan capaian penemuan kasus TBC tahun 2023 sebesar 2,05%. Tahun 2022 adanya perubahan defenisi operasional (DO) indikator terduga TBC. Tahun Sebelumnya DO terduga yang diperiksa adalah kasus TB Paru BTA Positif, sedangkan pada tahun 2022 DO indikator terduga TBC berdasarkan jumlah TBC semua Tipe, sehingga terjadi peningkatan sasaran terduga TBC lebih kurang 35%. Penemuan kasus TBC tahun 2022 terjadi peningkatan kasus, dari 2.627 orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan, penemuan kasus TBC sebanyak 371 orang (43,9%), tahun 2021 dari 2.560 orang terduga TBC setelah mendapatkan pelayanan kesehatan ditemukan kasus TBC sebanyak 273 0rang (32,38%), terjadi peningkatan capaian penemuan kasus pada tahun 2022, ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan.

Upaya – upaya yang sudah dilakukan dinas kesehatan dalam penjaringan kasus TBC dilapangan, dimana tahun 2021 bidang P2P membuat inovasi OKE TBC, bentuk kegiatannya adalah meningkatkan peran serta tokoh masyarakat di nagari akan berperan aktif dalam penjaringan kontak erat pada penderita TBC baru. Dengan adanya inovasi OKE TBC dalam dua tahun di dapat gambaran, tahun 2022 terjadi peningkatan kasus baru TBC dan semua kontak erat sudah dilakukan pemeriksaan sputum. Tahun 2023 terjadi penurunan kasus TBC baru, sehingga skrening untuk kontak erat juga mengalami penurunan. Dengan penurunan kasus kontak erat diharapkan semua kasus TBC positif sudah tetangani dengan baik.

2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

HIV/AIDS disebabkan oleh infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Penyakit ini ditularkan melalui cairan tubuh penderita yang terjadi melalui proses hubungan seksual, transfuse darah, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi secara bergantian, dan penularan dari ibu ke anak dalam kandungan maelalui plasenta dan kegiatan menyusui.

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV). Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi: 1) Edukasi perilaku berisiko 2) Skrining.

Dinas Kesehatan beserta jajarannya dua kali setahun rutin melaksanakan skrining HIV kepada kelompok yang berisiko HIV dengan melibatkan petugas LKB (Layanan Komprehensif Berkesinambungan) dan kader HIV di nagari. Selama masa pandemi kegiatan skrining HIV tetap dilakukan kepada kelompok berisiko yaitu, ibu hamil, penderita TBC, dan kelompok beresiko tinggi seperti tahanan yang ada di LAPAS Kabupaten Dharmasraya dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Tahun 2023 ditemukan 8 kasus baru dari 4.922 orang berersiko yang dilakukan skrining HIV, dimana 5 kasus baru ditemukan oleh Puskesmas Sialang dan 3 ditemukan di RSUD Sungai Dareh. Jumlah orang dengan kasus HIV tahun 2023 berjumlah 25 orang. Terjadi penurunan skrining kasus HIV dibanding tahun 2022 hal ini disebabkan calon pengantin (catin) tidak dilakukan lagi skrining HIV karena hal tersebut belum ada Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pada calon pengantin. Pada tahun 2023 Kabupaten Dharmasraya sudah mempunyai 3 Layanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan). Semua penderita HIV baru dan lama, sudah 100% mendapatkan pengobatan, dengan capaian kinerja 100%.

Penemuan kasus tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan penemuan kasus tahun 2022 dan tahun 2021, dimana tahun 2022 ditemukan 2 kasus baru HIV dari 5.316 orang berisiko yang dilakukan skrining HIV dengan 1 orang meninggal, terjadi peningkatan skrining kasus pada orang berisiko HIV bila dibandingkan tahun 2021, dimana orang berisiko HIV sebesar 4.677 orang, dengan penemuan kasus baru 4 orang. Semua penderita HIV yang ditemukan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan 100%. Tahun tahun 2020 ditemukan 14 kasus HIV dari 5.219 orang berisiko yang dilakukan skrining HIV, sampai akhir tahun 2022 di Kabupaten Dharmasraya terdapat 21 kasus HIV positif, baik kasus baru maupun kasus lama. Dengan adanya peningkatan kasus HIV setiap tahunnya, hal ini perlu menjadi prioritas bagi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya dalam penanggulangan kasus ini mengingat penyakit yang disebabkan oleh virus ini tidak bisa diobati dan hanya dapat dicegah.

Tabel 2-7 Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	%	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berikut dijelaskan Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular tahun 2019-2023

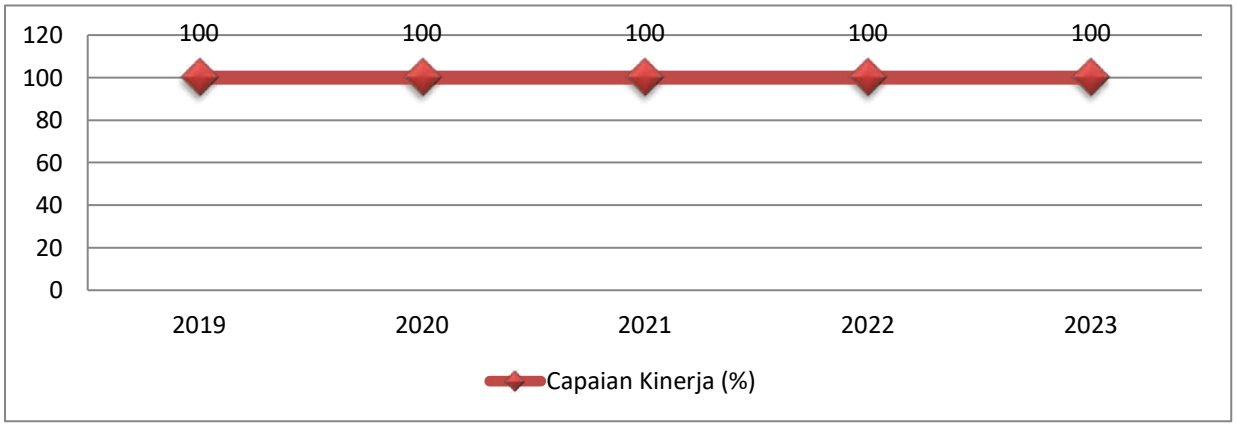

Grafik 2.7 Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular tahun 2019-2023

8. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular

Keprihatinan terhadap peningkatan prevalensi PTM telah mendorong lahirnya berbagai inisiatif di tingkat global dan regional. Pertemuan tahunan WHO tahun 2000 telah melahirkan tentang strategi global pencegahan dan pengendalian PTM, khususnya dinegara berkembang. Strategi bersandar pada 3 pilar utama yaitu 1) surveilans, 2) pencegahan primer, dan 3) penguatan sisitem pelayanan kesehatan. Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman. Penyebab kematian utama penduduk semua golongan umur pada saat ini disebabkan oleh PTM yaitu sebesar 63% yang membunuh 36 juta jiwa per tahun. Empat penyakit Riset *Burden of Diseases,* 2018 melaporkan bahwa penyebab kematian telah terjadi perubahan penyebab kematian dari tahun 1990 – 2017. Stroke masih menempati urutan teratas dikemudian disusul dengan *Ischemic Heart Diseases, Diabetes Melitus (DM) dan Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)* semakin meningkat. Data ini memperkuat bahwa Penyakit Tidak Menular akan terus meningkat dan sebagian besar dialami pada usia produktif.

Tantangan kesehatan di Indonesia salah satunya adalah terkait dengan Penyakit Tidak Menular (PTM), angka PTM sejak tahun 2010 mulai meningkat. Pola makan, pola asuh, pola gerak dan pola makan seperti tinggi kalori, rendah serat, tinggi garam, tinggi gula dan tinggi lemak diikuti gaya hidup sedentary lifestyle, memilih makanan junk food/siap saji, ditambah dengan kurangnya aktivitas fisik, stress dan kurangnya istirahat memicu timbulnya penyakit Hipertensi, Diabetes Militus, Obesitas, Kanker, Jantung, dan hiperkolesterol dikalangan Masyarakat Indonesia. Upaya kita harus terus menekan angka kejadian PTM supaya rendah dalam rangka mendorong pencapaian target pembangunan kesehatan termasuk target SDGs 2030.

Tahun 2023 di Kabupeten Dharmasraya penemuan penyakit PTM menurun dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 2023 ditemukan 25.324 kasus hipertensi dan diabetes melitus, terjadi penurunan kasus baru sebesar 6.538 0rang. Penurunan kasus pada PTM terjadi pada kasus hipertensi. Tahun 2022 ditemukan 31.864 kasus hipertensi dan diabetes militus, tahun 2021 ditemukan 28.797 kasus hipertensi dan diabetes milutus, terjadi peningkatan penjaringan kasus baru sebesar 3.067 0rang, atau 9,62%. Sedangkan kasus Orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ), mengalami peningkatan dari 444 orang, meningkat menjadi 447 orang tahun 2023, dengan peningkatan kasus 3 orang. Tahun 2022 kasus Orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ), juga mengalami peningkatan dari 395 orang tahun 2021, meningkat menjadi 444 orang tahun 2022, dengan peningkatan kasus 49 orang.

Tabel 2-8 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	%	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Pada tahun 2023 jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 22.191 orang, menurun bila dibandingkan dengan capaian kasus hipertensi pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 29.124 orang, meningkat bila dibandingkan dengan capaian kasus hipertensi pada tahun 2021, sebesar 26,485 orang.

Penurunan kasus hipertensi pada tahun 2023 dari hasil evaluasi disebabkan karena terjadinya salah pencatatan (dobel pencatatan) di puskesmas, sehingga penderita yang terjaring tahun 2022 ada yang terhitung dua kali. Dari 22.191 orang penderita hipertensi yang terjaring 100% sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar, dengan capaian kinerja 100%. Penjaringan hipertensi dilakukan secara terpadu dan terintegrasi lintas program, seperti program Germas, Pis PK, program UKS dan memperkuat kerjasama lintas sektor yang ada di nagari dan kecamatan dengan mengaktifkan posbindu – posbindu yang ada disetiap nagari serta membentuk kelompok posbindu di sekolah dan diperkantoran.

Mekanisme pelayanan penanganan penderita hipertensi meliputi, pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat dan melakukan rujukan jika diperlukan. Bila Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

Pada tahun 2023 di Kabupaten Dharmasraya penderita diabetes melitus terdeteksi dan tertangani sesuai standar 3.133 orang, meningkat dari capaian tahun 2022 sebesar 12,6%, dimana pada tahun 2022 penderita diabetes melitus terdeteksi dan tertangani sesuai standar 2.738 orang, tahun 2021 penderita diabetes militus terdeteksi dan tertagani 2.312 orang. Penjaringan diabetes militus dilakukan secara terpadu lintas program dengan mengaktifkan posbindu yang ada disetiap nagari, memperkuat kerjasama lintas sector yang ada di nagari dan kecamatan, dan membentuk kelompok posbindu di sekolah dan diperkantoran.

Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi, pengukuran 1-2 kali setahun untuk deteksi dini factor risiko, pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi yang berisiko, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi, melakukan rujukan jika diperlukan. Bila Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

Pada tahun 2023 jumlah penderita gangguan jiwa terdeteksi dan tertangani sebesar 447 orang, jumlah ini meningkat dari tahun 2022 sebanyak 3 orang. Pada tahun 2022, jumlah penderita gangguan jiwa terdeteksi dan tertangani sebesar 444 orang, jumlah ini jauh meningkat dari jumlah kasus tahun 2021, dimana pada tahun 2021 jumlah kasus penderita ODGJ terdeteksi dan tertangani 395 orang, dengan penambahan kasus baru sebanyak 49 orang. Dari laporan tahunan bidang P2P Dinas Kesehatan tahun 2023, dari 447 orang ODGJ Berat kasus tertinggi pada rentang usia 15-64 tahun, yaitu sebanyak 429 orang, dimana penyebab tertinggi ODGJ berat di Kabupaten Dharmasraya karena factor ekonomi, berpisah dengan pasangan dan karena kecanduan narkoba.

Peningkatan jumlah penderita ODGJ tiga tahun terakhir di Kabupaten Dharmasraya dari hasil evaluasi karena meningkatnya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penangulangan kasus ODGJ berat di Kabupaten Dharmasraya. Tahun 2022 sudah terbentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Dharmasraya dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/370/JPTS-BUP/2022 tertanggal 1 November 2022. Dimana masing –masing OPD terkait mengambil peran penting dalam rangka penangulangan ODGJ berat. Kegiatan penjaringan terpadu dengan melibatkan lintas program dan lintas sector dinagari sejak tahun 2022 juga sudah mengalami peningkatan, sehingga kendala dalam merujuk pasien ODGJ berat karena faktor ekonomi dan tidak memiliki kartu JKN sudah mulai dapat teratasi.

Berikut dijelaskan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular tahun 2019-2023

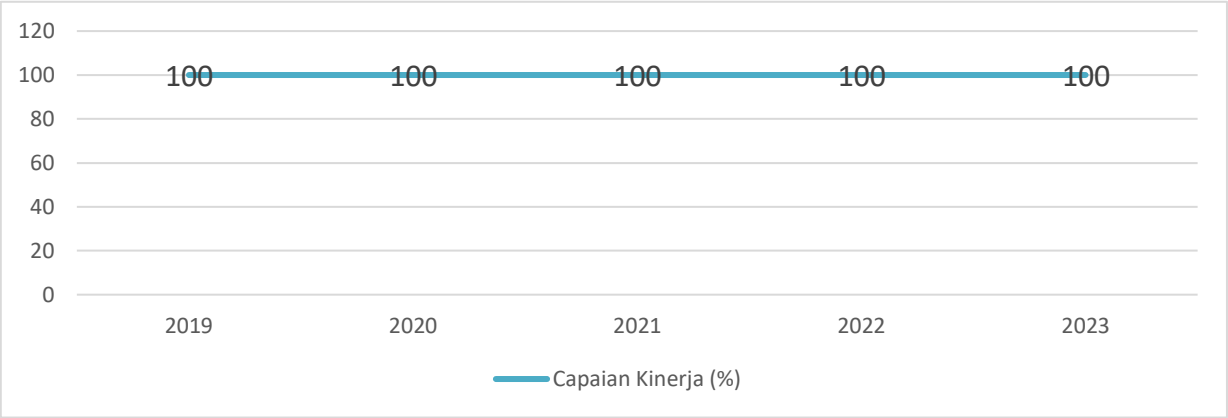

Grafik 2.8 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular tahun 2019-2023

9. Visite Rate

Visite Rate tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dilihat dari jumlah kunjungan dibanding populasi penduduk pada setiap satu kurun waktu. Visite rate dihitung dengan total kunjungan sehat, total kunjungan sakit, total kunjungan dalam gedung dan total kunjungan luar gedung baru dan lama per jumlah penduduk dalam tahun yang sama. Visite rate di fasilitas kesehatan perlu dilakukan evaluasi demi memperbaiki kualitas suatu pelayanan kesehatan.

Visite rate Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 adalah 5,25 dari total kunjungan sehat, total kunjungan sakit, total kunjungan dalam gedung dan total kunjungan luar gedung baru dan lama sebanyak 1.164.833 total kunjungan dari 227.063 penduduk riil per puskesmas tahun 2023, dengan capaian kinerja 105%. Angka ini meningkat dari tahun 2022, dimana tahun 2022 capaian visite rate di Kabupaten Dharmasraya adalah 4,6 dari jumlah penduduk yang ada diwilayah kerja, sedangkan tahun 2021 capaian visite rate di Kabupaten Dharmasraya 4,0, dengan capaian kinerja 100%. Peningkatan visite rate di fasilitas kesehatan mengambarkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas sudah menjangkau seluruh penduduk yang ada di wilayah kerja dengan rata- rata kunjungan masing – masing individu 5 kali atau lebih kunjungan dalam satu tahun.

Tabel 2-9 Visite Rate Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan						
Visite Rate		3,5	3,8	4	4,6	5,25

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Capaian kinerja visite rate tahun 2023 mengalami peningkatan capaian bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, dengan capaian kinerja 105%. Sesuai dengan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, pada pasal 1 ayat (1) yang menyatakan pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dipertegas pula pada ayat (7), bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan tertukur.

10. Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

Akreditasi Puskesmas adalah proses penilaian eksternal oleh Komisi Akreditasi dan/atau Perwakilan di Provinsi terhadap puskesmas untuk menilai apakah sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi yang menilai atau mengakreditasi Puskesmas merupakan komisi yang memang sudah dilatih khusus menjadi penilai apakah sebuah puskesmas lulus akreditasi atau tidak.

Akreditasi Puskesmas tebagi menjadi 5 tingkatan akreditasi yaitu;

1. Tidak Akreditasi
2. Terakreditasi dasar
3. Terakreditasi madya
4. Terakreditasi utama, dan
5. Terakreditasi paripurna

Tabel 2-10 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan						
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	%	21,40	21,40	21,40	21,40	93,4

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Tahun 2023 jumlah puskesmas di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 15 puskesmas, ada penambahan satu puskesmas di wilayah kerja Kecamatan Koto Besar, yaitu Puskesmas Sitiung IV. Puskesmas Sitiung IV sudah registrasi Kementerian Kesehatan dan sudah ada izin operasional sejak awal tahun 2023, sedangkan tahun 2022 jumlah puskesmas di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 14 puskesmas.

Berdasarkan target RENSTRA Dinas Kesehatan tahun 2021-2026, target puskesmas dengan akreditasi utama tahun 2023 adalah 50%, artinya dari 15 puskesmas yang ada 7 atau 8 puskesmas harus terakreditasi utama tahun 2023. Namun dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya harus melakukan pembinaan dan pendampingan pada 14 (empat belas) puskesmas untuk persiapan re-akreditasi puskesmas dengan membentuk Tim Terpadu Pembinaan Claster Binaan (TPCB). Penilaian re akreditasi di 14 puskesmas Kabupaten Dharmasraya di mulai dari bulan oktober sampai bulan desember tahun 2023. Satu puskesmas yaitu puskesmas Sitiung IV belum bisa dilakukan penilaian akreditasi karena belum operasional dua tahun.

Dari hasil penilaian re-akreditasi tahun 2023 didapatkan 10 (sepuluh) puskesmas dengan terakreditasi paripurna, yaitu Puskesmas Sungai Dareh, Puskesmas Silago, Puskesmas Sialang, Puskesmas Gunung Medan, Puskesmas Sitiung 1, Puskesmas Koto Baru, Puskesmas Tiumang, Puskesmas Sitiung 2, Puskesmas Timpeh, Puskesmas Sungai Rumbai, sedangkan 4 (empat) puskesmas dengan akreditasi utama, yaitu Puskesmas Padang Laweh, Puskesmas Koto Besar, Puskesmas Sungai Limau dan Puskesmas Beringin Sakti.

Dengan adanya re-akreditasi di 14 puskesmas Kabupaten Dharmasraya tahun 2023, maka capaian kinerja sangat jauh meningkat dari target yang sudah ditetapkan, yaitu 50%. Dimana realisasi capaian puskesmas terakreditasi utama sebesar 93,3% dengan penilain kinerja 186,6%, peningkatan capaian ini sangat siknifikan bila dibandingkan dengan capaian puskesmas terakreditasi utama tahun 2022, tahun 2021 dan tahun 2020, dengan jumlah puskesmas terakreditasi utama sebanyak 3 Puskesmas atau 21.4%, capaian ini belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian Puskesmas dengan Terakreditasi Utama tahun 2023 sudah melebihi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dimana target Puskesmas dengan Terakreditasi Utama di Kabupaten Dharmasraya adalah 50% dengan realisasi 93,3%,dengan capaian kinerja 186,6%.

11. Persentase UPT RSUD Terakreditasi

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dengan cara meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit secara internal dan secara eksternal. Peningkatan Mutu Eksternal (External Continous Quality Improvement) merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit secara keseluruhan. Beberapa kegiatan yang termasuk peningkatan mutu eksternal adalah perizinan, sertifikasi, dan akreditasi. Survei akreditasi rumah sakit dilakukan oleh lembaga-lembaga akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketentuan Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit

Hasil akreditasi berdasarkan pemenuhan standar akreditasi dalam Keputusan Menteri ini, dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Hasil Akreditasi Kriteria **Paripurna,** Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%
2) Hasil Akreditasi Kriteria **Utama,** 12 – 15 Bab mendapatkan nilai 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Untuk rumah sakit selain rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan maka kelulusan adalah 12 – 14 bab dan bab SKP minimal 80 %.
3) Hasil Akreditasi Kriteria **Madya,** 8 sampai 11 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70%.
4) Hasil Akreditasi Kriteria **Tidak terakreditasi** Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%.

Tabel 2-11 Persentase UPT RSUD Terakreditasi Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan						
Persentase UPT RSUD Terakreditasi	%	50	50	50	100	100

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Tahun 2023, jumlah rumah sakit terakreditasi sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja 100%. Capaian RSUD Sungai Rumbai Terakreditasi sejak tahun 2022 sudah memenuhi target tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dimana target RSUD Sungai Rumbai Terakreditasi di Kabupaten Dharmasraya dengan capaian kinerja 100%.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.2.1. Isu strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, antara lain sebagai berikut:

1. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman emerging diseases akibat tingginya mobilitas penduduk seperti penyakit menular langsung (diare, ISPA/Pneumonia, Kusta, Frambusia) dan penyakit bersumber binatang seperti DBD, Filariasis, Rabies. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat.
2. Masih adanya AKI dan AKB

   Menurunkan angka kematian ibu dan bayi merupakan bagian dari kesepakatan global terhadap pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Dengan komitmen ini maka akses ibu hamil dan bersalin terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu menjadi sasaran penting dalam mencapai peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi. Pelayanan Persalinan di Faskes (PF) menjadi penting karena penyebab kematian ibu sebagian besar disebabkan oleh karena perdarahan dan infeksi pada saat persalinan, yang seharusnya dapat dicegah bila ibu mendapatkan pelayanan persalinan sesuai dengan standar di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatal essensial belum sesuai standar yang juga memberikan kontribusi pada kematian neonatal dan bayi.
3. Masih adanya stunting

   Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk (wasting) dan stunting masih tinggi meskipun telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir namun tetap menjadi isu penting karena sebagai indikator untuk menentukan kualitas Sumber Daya Manusia. Angka Prevalensi balita wasting dan stunting diperoleh dari hasil Riset Kesehatan Dasar

(Riskesdas) yang dilakukan sekali 5 (lima) tahun dan dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan setiap tahun. Disamping itu peran Surveilans gizi melalui aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sangat penting dalam melakukan intervensi gizi pada sasaran yang bermasalah gizi. Namun keterisian entry data pada Aplikasi e-PPGBM masih belum optimal.

4. Masih adanya persalinan dengan tenaga non kesehatan
5. Masih adanya kasus gizi buruk dan gizi kurang pada balita
6. Masih tingginya kasus penyakit menular
7. Masih Rendahnya Cakupan Penderita TBC
8. Masih Rendahnya Cakupan Imunisasi

2.2.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

1. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

   Penyebab Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu terjadinya pendarahan saat melahirkan, usia ibu saat hamil, masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada trimester pertama kehamilan, masih ada persalinan ditolong oleh non kesehatan. Belum berjalannya sistem rujukan pada ibu bersalin, masih ada ibu yang tidak melakukan pemeriksaan rutin kepada bayi termasuk pemberian imunisasi. Masih ditemui remaja anemia, ibu hamil KEK. Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang merupakan perbukitan dan kondisi jalan yang tidak memadai sehingga petugas kesehatan mengalami kesulitan memberikan pelayanan kedaerah sulit/terpencil. Kurang memadainya sarana dan prasarana dilapangan kesehatan pada ibu dan bayi belum maksimal.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

   Penyebab masih adanya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Dharmasraya, yaitu disebabkan oleh penyakit infeksi dan kekurangan gizi. Kematian pada bayi juga disebabkan oleh adanya trauma persalinan dan kelainan bawaan yang disebabkan oleh rendahnya status gizi ibu pada saat kehamilan serta kurangnya jangkauan pelayanan kesehatan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

3. Prevalensi Malnutrisi

   Penyebab masih adanya prevalensi malnutrisi di Kabupaten Dharmasraya yaitu masih ditemuinya remaja yang anemia, ibu hamil KEK, bayi BBLR yang disebabkan jika ibu hamil

menderita kurang energi protein akan berpengaruh pada gangguan fisik, mental dan kecerdasan anak, juga meningkatkan resiko bayi yang dilahirkan kurang zat besi.

4. Persentase Rumah Tangga PHBS

   Permasalahan pada rumah tangga ber PHBS di Kabupaten Dharmasraya masih rendahnya indikator PHBS yaitu merokok, dimana indikator merokok sangat mempengaruhi terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kabupaten Dharmasraya sudah mengeluarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok seharusnya dengan adanya peraturan tersebut memperkuat orang tidak merokok.

5. Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

   Permasalahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 yaitu capaian program 5 pilar STBM di Kabupaten Dharmasraya dibawah dari target yang ditetapkan yaitu 63,82% dari target 75%. Dimana yang menyebabkan indikator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat belum tercapainya yaitu cuci tangan pakai sabun 64,5%, Pengelolaan sampah rumah tangga tercapai 21,22%, Pengamanan limbah cair rumah tangga 47,79%.

6. Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam

   Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam di Kabupaten Dharmasraya sudah semua kasus kejadian luar biasa tertangani

7. Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

   Permasalahan yang terjadi pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kabupaten Dharmasraya adalah belum semua masyarakat yang beresiko mau memeriksakan kesehatannya secara rutin ke fasilitas kesehatan.

8. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular

   Masih adanya ditemui kasus pasung pada ODGJ berat, dan masih kurangnya peranan keluarga dalam pendampingan pasien minum obat pada kasus TBC dan ODGJ berat.

9. Visite Rate

   Masih kurangnya pemahaman fasilitas kesehatan dengan definisi operasional (DO) visite rate.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini disajikan pada perangkat daerah yang menerima usulan Musrenbang dan/atau Pokok-pokok pikiran Anggota DPRD

2.3.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Tabel 2-12 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan

NO	Usulan Masyarakat	LOKASI	Nagari	Kecamatan	Volume	SKPD Pelaksana	Keterangan	rekeing sub kegiatan	target	pagu
1	Peningkatan gedung pertemuan Puskesmas	Jor Balai Timur	Nagari Sungai Rumbai Timur	Kecamatan Sungai Rumbai	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0006		750.000.000
2	Relokasi Puskesmas Pembantu		Nagari Sitiung	Kecamatan Sitiung	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0006		900.000.000
3	Pembangunan/ perbaikan pagar Puskesmas		Nagari Gunung Medan	Kecamatan Sitiung	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0009		600.000.000
4	Dam Puskesmas Sitiung II		Nagari Padukuan	Kecamatan Koto Salak	80 M	Dinkes		1.02.02.2.01.0009		450.000.000
5	Relokasi pembangunan pustu di Jorong Tiumang		Nagari Tiumang	Kecamatan Tiumang	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0006		900.000.000
NO	**Usulan Masyarakat**	**LOKASI**	**Nagari**	**Kecamatan**	**Volume**	**SKPD Pelaksana**	**Keterangan**	**rekeing sub kegiatan**	**target**	**Pagu**
6	Perbaikan pustu dan rumah bersalin		Nagari Sipangkur	Kecamatan Tiumang	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0003		200.000.000

NO	Usulan Masyarakat	LOKASI	Nagari	Kecamatan	Volume	SKPD Pelaksana	Keterangan	rekeing sub kegiatan	target	pagu
7	Renovasi Gedung PUSTU		Nagari Batu Rijal	Kecamatan Padang Laweh	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0010		300.000.000
8	Pagar dan Paving Blok Puskesmas		Nagari Muaro Sopan	Kecamatan Padang Laweh	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0009		350.000.000
9	Rehab Berat PUSTU		Nagari Koto Tinggi	Kecamatan Koto Besar	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0010		300.000.000
10	Rehab Bangunan Puskesmas		Nagari Silago	Kecamatan IX Koto	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0009		2.500.000.000
11	Pustu Jorong Banai dan Pustu Jorong Lubuk Pauh		Nagari Silago	Kecamatan IX Koto						400.000.000
12	Pembangunan ruang pertemuan Puskesmas		Nagari Tiumang		1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0006		750.000.000

Dari hasil musrenbang Kecamatan, terdapat 12 usulan yang disampaikan untuk Dinas Kesehatan, diantaranya Peningkatan gedung pertemuan Puskesmas, Relokasi Puskesmas Pembantu, Pembangunan/ perbaikan pagar Puskesmas, Dam Puskesmas Sitiung II, Relokasi pembangunan pustu di Jorong Tiumang, Renovasi Gedung Pustu, Pagar dan Paving Blok Puskesmas, Rehab berat pustu, Rehab bangunan Puskesmas, Pembangunan ruang pertemuan Puskesmas.

2.3.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD

Tabel 2-13 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengadaan alat terapi Puskesmas	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembangunan pagar Puskesmas beringin sakti	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengadaan ambulan Aur Jaya	-	-	-	-	-	-	-
4	Rehab Pustu Ranah Palabi	-	-	-	-	-	-	-
5	Bantuan pemasangan batu penahan tanah puskesmas	-	-	-	-	-	-	-
6	pembangunan paving blok puskesmas beringin sakti	-	-	-	-	-	-	-
7	Pengadaan mobil ambulance	-	-	-	-	-	-	-

Dari usulan pokir DPRD Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 tidak ada usulan untuk Dinas Kesehatan.

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mewujudkan indonesia emas 2045 “Negara Nusantara Berdaulat, maju dan berkelanjutan” sesuai dengan RPJPN 2025-2045. Kementerian kesehatan menjabarkan visi tersebut dibidang kesehatan yaitu Indonesia Sehat merupakan salah satu sasaran transformasi sosial untuk Indonesia Emas 2045, melalui membangun sistem kesehatan yang tangguh dan responsif serta memastikan penduduk berusia panjang dan hidup sehat dengan target stunting di bawah 5% dan menuntaskan TBC dan Kusta.

Adapun target pembangunan kesehatan dalam rancangan dalam rancangan RPJPN 2025-2045, yaitu :

1. Prevalensi Stunting

   proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatanpenurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Angka Kematian Ibu

   Angka kematian ibu (maternal mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaianpembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Penanganan TBC

   Tuberkulosis (TBC) menjadi masalah global sebagai penyakit menular, TBC menjadi pembunuh yang paling mematikan di dunia. Komitmen Global dan Nasional dalam mengakhiri Tuberkulosis dituangkan dalam *End TBC Strategy* yang menargetkan penurunan kematian akibat Tuberkulosis hingga 90% pada tahun 2030, pengurangan insiden Tuberkulosis sebesar 80% pada tahun 2035.

4. Cakupan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun dem ikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).

3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

Dinas kesehatan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Dharmasraya mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Dharmasraya yaitu: **"TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA"** yang dijabarkan dalam misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026, sebagai berikut:

1 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur .
2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3 Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.
4 Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
6 Meningkatkan nilai – nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Dengan tetap memperhatikan visi dan misi Bupati, dan mengacu pada tujuan dari kementerian kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2021-2026, mempunyai tujuan **'Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat'** untuk mencapai tujuan Dinas Kesehatan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis kesehatan yaitu: 1) meningkatknya status kesehatan masyarakat; 2) meningkatnya mutu dan Akses pelayanan kesehatan; dan 3) meningkatkannya Kualitas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah Harapan hidup masyarakat meningkat dengan indikator capaian sasaran Angka Harapan Hidup dengan sasaran daerah pendukung

diantaranya Kemiskinan Masyarakat Menurun, Keberdayaan masyarakat meningkat, Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat, ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk menurun, Kualitas lingkungan hidup meningkat, serta Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam hal ini Dinas Kesehatan.

3.1.2. Penelaahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat

Kesepakatan target maupun informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya antara lain:

Tabel 3.1 Target kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Usia harapan hidup	71,10	71,33	73,47	73,84	74,04
2	**Kesehatan ibu dan anak**					
2.a	angka kematian ibu	108/100.000	77,02/100.000	257,59/100.000	201/100.000	84/100.000
2.b	prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,6	16,6	13,5	7,6	7,6
3.	**Insidensi Tuberkulosis**					
3.a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	87,4	83,7	35,8	83,7	42,1
3.b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	99,5	97,2	89,7	97,2	94,4
4.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	63,3	59,5	63,3	84,7	98,32

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Misi RPJMD

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tujuan RPJMD

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Sasaran RPJMD

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Bidang Urusan

Bidang Kesehatan

3.3. **Tabel 3.2** Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Data Realisasi		
		2021	2022	2023
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
Angka Harapan Hidup(AHH)	Tahun	73,47	73,84	74,04
Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	/100.000 Kh	257,59	201	84
Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 Kh	13,5	7,6	7,6
Prevalensi Malnutrisi	%	6,25	6,65	5,7
Persentase Rumah Tangga PHBS	%	30,9	32,9	49,4
Tujuan/ Sasaran/ Indikator	**Satuan**	**Data Realisasi**		
		2021	**2022**	**2023**
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	51,92	55,40	65
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam	%	100	100	100
Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	%	100	100	100
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	%	100	100	100
Meningkatnya status kesehatan masyarakat				
Visite Rate	/Jumlah Penduduk	4	4,6	5,25
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	%	21,40	21,40	93,4
Persentase UPT RSUD Terakreditasi	%	50	100	100

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan realisasi 2021, 2022 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2023, maka proyeksi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

MATRIK RENJA HASIL INPUTAN SIPD RI

4.2. Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	/100.000 Kh	201	84	183	172	183	172
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 Kh	11,7	9,0	16	15	16	15
3	Prevalensi Malnutrisi	%	6,65	5,7	17,5	17,5	17,5	17,5
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	%	32,9	49,4	35	37	35	37
5	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	55,40	65	60	65	60	65
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam	%	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	%	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	%	100	100	100	100	100	100
9	Visite Rate	/Jumlah Penduduk	4,6	5,25	5	5	5	5
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	%	21,40	93,4	64,2	78,5	64,2	78,5

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100

BAB 5 PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2025. Renja Dinas Kesehatan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.

Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2025.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						**166.704.590.625,00**							**172.841.425.277,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**166.704.590.625,00**							**172.841.425.277,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**166.704.590.625,00**							**172.841.425.277,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan administrasi perkantoran***	**100 Persen**			**100 Persen**	**83.346.107.625,00**						**100 Persen**	**84.168.624.477,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	367.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	45.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	135.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	77.686.065.654,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	78.554.909.469,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				732 Orang/bulan	77.659.822.154,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		78.525.804.369,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	14.641.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.105.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	6.602.500,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 Persen	35.980.750,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	37.078.825,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.660.250,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.026.275,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.320.500,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.052.550,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			1 tahun	172.030.929,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	189.655.630,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	81.746.329,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		96.887.470,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	8.784.600,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		9.663.060,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	26.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	39.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	15.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.105.100,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			1 tahun	587.074.632,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	618.110.587,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.689.374,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		12.858.312,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	278.456.070,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		256.630.168,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	13.176.900,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		14.494.590,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.955.643,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		24.151.208,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	53.204.707,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		80.525.178,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	193.950.938,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		213.346.031,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	14.641.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.105.100,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 tahun	340.457.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	340.457.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				82 Unit	65.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	275.457.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		275.457.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	3.774.570.460,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	3.492.227.506,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.198.960,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.018.856,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	161.051.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		177.156.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.320.500,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.052.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.600.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	367.928.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	441.185.460,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	145.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		151.913.440,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.928.200,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.221.020,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		81.051.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Peningkatan Pelayanan BLUD*	-			100 Persen	15.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				16 Unit Kerja	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Jenis Pelayanan SPM 100%*** ***Akreditasi Labor*** ***Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan*** ***Jumlah Puskesmas Terakreditasi***	**29119 orang** **2 unit** **9 unit** **1 unit** **12 jenis**			**12 Indikator** **1 Unit** **26693 Peserta** **7 Unit**	**79.775.043.000,00**						**29119 orang** **0 unit** **9 unit** **0 unit** **12 jenis**	**84.874.500.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*AVLOS* *BOR* *BTO* *GDR* *NDR* *Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana* *Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar* *TOI*	-			5.5 Persen 63.4 Persen 45 Persen 35 Persen 14.5 Persen 100 Persen 75 Persen 3 Persen	43.197.543.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	44.675.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	4.300.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	460.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		460.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				6 Unit	4.587.543.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Koto Salak Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		5.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	1.800.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				4 Unit	4.200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Koto Salak Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Unit	1.900.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				32 Unit	4.500.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		4.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				1 Unit	1.100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		1.165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				35 Unit	3.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	15.850.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		16.950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				51253 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV* *Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB* *Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk)* *Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e 15 tahun)* *Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e 15 tahun)* *Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan* *Jumlah kelompok ASMAN yang dibina* *Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT* *Jumlah nagari sadar gizi* *Jumlah nagari yang melaksanakan STBM* *Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS)* *Persentase balita di timbang di posyandu* *Persentase balita yang di MTBS / MTBM* *Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi* *Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF)* *Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas* *Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)* *Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-			100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 6 Persen 30 Kelomok 9 Kelomok 40 Nagari 36 Nagari 0.5 Persen 80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 46 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 50 Persen 14 Persen 100 Persen 100 Persen 6 Persen 100 Persen 56 Persen 100 Persen	36.187.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	39.774.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 *Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana* *Persentase penanggulangan Kasus KLB* *Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri* *Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi* *Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan* *Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra* *Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra* *Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi* *Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan* *Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar*														
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6331 Orang	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6043 Orang	250.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5617 Orang	250.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28073 Orang	125.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				42928 Orang	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Rp 70,000,000 Orang	65.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22421 Orang	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48971 Orang	110.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Rp 95,000,000 Orang	95.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				606 Orang	65.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3914 Orang	125.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5219 Orang	115.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		112.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	322.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		352.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		145.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	155.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				45 Orang	85.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				70 Orang	75.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	16.500.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		17.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	4.500.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	11.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		13.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	95.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				50 Orang	60.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase RS dan Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan*	-			100 Persen	170.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	170.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		190.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sarana fasyankes yang memenuhi standar perizinan* *Persentase sarana fasyankes yang teregistrasi*	-			100 Persen 100 Persen	220.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	235.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	70.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi*** ***Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi***	**100 persen 100 persen 100 persen 100 persen**			**100 Persen 90 Persen**	**2.513.240.000,00**						**100 persen 100 persen 100 persen 100 persen**	**2.713.240.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi*	-			100 Persen	161.400.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	161.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	86.400.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		86.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Monitoring dan Evaluasi kebutuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar* *Persentase pemenuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar* *Persentase Perencanaan kebutuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar*	-			100 Persen 90 Persen 100 Persen	51.840.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	51.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	51.840.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		51.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tanaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi* *Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat fungsional* *Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan*	-			40 Persen 15 Persen 45 Persen	2.300.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Orang	2.300.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Persentase sarana yang tersertifikasi*** ***Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT***	**100 persen 100 persen 15 unit**			**100 Persen 15 Puskesmas**	**655.200.000,00**						**100 persen 100 persen 15 unit**	**670.060.800,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemberian informasi obat (PIO) Sosialisasi Agent of Change (AoC) pada Apoteker*	-			100 Persen 30 Orang	429.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	429.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	429.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		429.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah sampel PKRT yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa Jumlah Sarana PKRT yang tersertifikasi Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi PKRT sesuai standar kesehatan*	-			1 sampel 100 sarana 15 Puskesmas	32.280.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	40.736.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	32.280.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		40.736.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Cakupan Sosialisasi penyuluhan keamanan pangan pada PIRT*	-			160 PIRT	48.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	48.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		48.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	95.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Persentase pembinaan dan pengawasan makanan minuman di pasar tradisional dan Sentra Makanan*	-			100 Persen	25.920.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	27.324.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	25.920.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		27.324.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah sampel makanan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa*	-			60 sampel	25.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS*** **100 persen** ***Persentase peningkatan PHBS*** **45 persen**	**100 persen** **45 persen**			**100 Persen** **40 Persen**	**415.000.000,00**						**100 persen** **45 persen** **44 persen**	**415.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan* *Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS*	-			100 Persen 100 Persen	155.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	155.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		155.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah KK yang berperilaku hidup bersih dan sehat*	-			20542 KK	135.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		135.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Nagari Siaga Aktif* *Jumlah Nagari yang melaksanakan Germas Aktif*	-			35 Nagari 60 Nagari	125.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	-	125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH						**157.538.127.900,00**							**163.358.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**157.538.127.900,00**							**163.358.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**157.538.127.900,00**							**163.358.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**38.432.428.900,00**						**-**	**45.158.000.000,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			371 orang/bulan	37.632.428.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	45.158.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				orang/bulan Orang/bulan	37.632.428.900,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		45.158.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tarlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 tahun	800.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	800.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**119.105.699.000,00**						**-**	**118.200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan* *Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan* *Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat Tidur terhadap Jumlah penduduk Minimal 1:1000* *Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit*	-			3 unit 114 unit 3 unit 6 unit	49.105.699.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	43.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				3 Unit	500.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		1.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				6 Unit	1.017.062.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		15.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				117 Unit	39.605.220.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		18.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				3 Unit	7.983.417.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		9.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	-			4 dokumen	70.000.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	75.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	70.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		75.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
		LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH						**375.000.000,00**							**430.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**375.000.000,00**							**430.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**375.000.000,00**							**430.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan administrasi perkantoran***	**100 persen**			**100 persen**	**175.000.000,00**						**100 persen**	**180.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tarlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*	-			1 tahun	175.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	180.000.000,00	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	175.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		180.000.000,00	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah*	-			1 Tahun	200.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	250.000.000,00	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		250.000.000,00	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	J U M L A H							**324.617.718.525,00**							**336.629.425.277,00**	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH (RENJA) PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1. .. PENDAHULUAN 1-1

1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Landasan Hukum 1-1
1.3. Maksud dan Tujuan 1-2
1.3.1. Maksud 1-2
1.3.2. Tujuan 1-2
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1-2

BAB 2. .. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU* 2-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-2
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-8
2.3.1. Isu strategis 2-8
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 2-10
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-1
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan 2-1
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD**Error! Bookmark not defined.**

BAB 3. .. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3-1

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 3-1
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait 3-1
3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat 3-4
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3-1

BAB 4. .. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 4-1

4.1. Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah 4-1
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 4-38

BAB 5. .. PENUTUP 4-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-165 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2-166 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2024 2-2
Tabel 5-1 Penetapan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 6-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 2
Tabel 6-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Perubahan Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 serta pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya hingga Tahun 2025 dan prediksi Tahun 2026
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.., Isu-Isu

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB IV Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB 2. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU*

Bab II. Memuat evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2020-2024, dan penelaahan usulan masyarakat

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kinerja OPD diukur berdasarkan tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program dan kegiatan. Evaluasi

pelaksanaan kegiatan tahun lalu mengacu kepada hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025. Hasil evaluasi ini memuat realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi dan melebihi target kinerja serta faktor penyebabnya. Lebih lanjut hasil evaluasi kegiatan tahun lalu (2020 – 2024) ini kemudian dijadikan acuan dalam implikasi pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengambilan kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran tahun 2026.

Hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya tahun lalu (2020 – 2024) dan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel II.2.1. Dari tabel II.2.1 terlihat perkiraan tingkat pencapaian realisasi target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pencapaian RPJMD 2023 sampai dengan tahun berjalan dimana sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik atau dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD.

Berdasarkan tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dari indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya dapat disimpulkan

untuk Tahun 2020 – 2024 capaian realisasi dari indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) s/d tahun 2024 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Khusus (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel II.2.2 berikut.

Analisis kinerja pelayanan juga dapat diketahui melalui identifikasi hasil capaian kinerja menurut rentang capaian kinerja sesuai dengan kategori capaian kinerja. Berdasarkan target capaian kinerja RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026, sebagaimana tercantum pada hasil review bahwa pada akhir periode RPJMD tahun 2024 bagi program yang belum tuntas harus dituntaskan pencapaian targetnya sampai akhir periode RPJMD tahun 2024

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

   Mengambarkan **(Panjang jalan kabupaten kondisi baik + Panjang jalan kabupaten kondisi sedang / Total panjang jalan kabupaten X 100)**

   Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap, **Jalan Daerah** yakni jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) berupa **Kemantapan Jalan Provinsi** di Indonesia yang mana jalan Mantap adalah jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan Tidak Mantap adalah jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Tabel 2-1 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	49,75 %	50,20%	58,09%	58,16%	54,59 %
Panjang jalan kabupaten kondisi baik + Panjang jalan kabupaten	KM	523,89	523,49	611,49	612,21	606,10

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
kondisi sedang						
Total panjang jalan	KM	1.042,85	1.042,85	1.042,85	1.052,66	1.052,65

Sumber Bidang Bina Marga Tahun 2024

Untuk terwujudnya Indikator Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap dengan melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya tahun 2023, diukur melalui Persentase jalan dalam kondisi baik dan capaiannya sebesar 58,16 %, Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 dilaksanakan melalui 1 Kegiatan, dan 4 Sub Kegiatan..

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Adanya inflasi menyebabkan perubahan harga material, sehingga volume panjang jalan berkurang
- Kapasitas jalan tidak bertambah dimana tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan
- Kurangnya trotoar jalan yang layak sehingga tidak nyaman bagi pejalan kaki
- Adanya beberapa titik kemacetan arus lalu lintas akibat simpang jalan yang sempit

Beberapa jembatan sudah mulai rusak Upaya mengatasi permasalahan:

- Mengoptimalkan perbaikan kondisi jalan dengan pelebaran jalan, pemeliharaan jalan, rekonstruksi jalan dan rehabilitasi jalan yang berfokus pada titik-titik jalan yang berkondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat
- Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain terkait pengadaan tanah untuk pelebaran simpang jalan • Penganggaran pembangunan jembatan baru dan pemeliharaan jembatan

2. Indikator kinerja utama perangkat daerah Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik

…Mengambarkan persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dibangun/ditingkat dan di pelihara **(Luas DI irigasi kondisi baik / Total Luas DI Kabupaten X 100)**

Irigasi merupakan upaya penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang budidaya pertanian, Air irigasi dibawa melalui jaringan irigasi yang terdiri atas saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya dan melayani kesatuan lahan pertanian yang disebut Daerah Irigasi Fungsi irigasi dapat diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi yang meliputi penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi dilaksanakan berdasarkan asas kewenangan. Dari data Status Daerah Irigasi tahun 2015, total luas daerah irigasi nasional adalah 9,1 juta hektar terdiri dari 6 juta hektar (65 persen) daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dan 3,1 juta hektar (35 persen) daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat.

Luasan tersebut merujuk kepada batasan daerah irigasi kewenangan provinsi, yaitu daerah irigasi seluas 1.000-3.000 hektar dan daerah irigasi yang terletak antar-kabupaten/kota, sedangkan daerah irigasi kabupaten, yaitu daerah irigasi di bawah 1.000 hektar dalam satu daerah kabupaten/kota.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi daerah merupakan tanggung jawab pemda. Artinya, menjadi tugas dan tanggung jawab pemda untuk membangun, meningkatkan, merehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya serta mengoperasikan dan memelihara agar kondisi dan fungsi jaringan irigasi tetap terjaga dalam melayani kebutuhan air lahan pertanian.

Namun, pada 2023, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melaporkan sebagian jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan perlu segera direhabilitasi karena 1,2 juta hektar luas daerah irigasi tidak terlayani secara optimal (Laporan Data Teknis Daerah Irigasi Daerah, Kementerian PUPR, 2023). Minimnya pasokan air irigasi menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi tidak optimal bahkan mati.

Kerusakan jaringan irigasi daerah yang relatif tinggi menunjukkan ada permasalahan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dari aspek kelembagaan organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola sumber daya air, saat ini hanya ada 30 pemda (6 persen)—terdiri dari 9 provinsi dan 21 kabupaten/kota—yang memiliki OPD yang khusus membidangi sumber daya air dan/atau ditambah satu urusan lainnya. Selebihnya, urusan pengelolaan sumber daya air dikelola OPD yang menggabungkan urusan sumber daya air ditambah dua atau lebih urusan lainnya.

Tabel 2-2 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	**%**	**67,22**	**67,35**	69,02%	**71,00%**	**72,62 %**	**72,45 %**
Luas DI irigasi kondisi baik	Ha	*1.482*	1.485	1.522	1.552	1.601	1.612
Total Luas DI Kabupaten	Ha	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205

Sumber : Bidang Sumber daya Air, Tahun 2024

Untuk terwujudnya Indikator , Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik ini didukung oleh dengan Program dan kegiatan di Bidang sumber Daya Air yaitu :

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) mempunyai 2 (dua) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan. Terlihat pada Tabel di atas

3. Indikator kinerja utama perangkat daerah Persentase penduduk yang terlayani Jaringan Pipa Air Minum

(jumlah Rumah Tangga yang terlayani pelayanan air Minum dibagi jumlah Rumah Tangga seluruh nya X 100)

Persentase penduduk yang mampu mengakses air minum yang terlindung meliputi, air ledeng (keran), keran umum, hyrant umum, terminal air, penampung air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.

Tabel 2-3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indikator Persentase		80 %	**85 %**		89,07 %	

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
penduduk yang terlayani air minum layak	%			88,22 %		89,64 %
Variabel …(jumlah Rumah Tangga yang terlayani pelayanan air Minum	Rumah	47.002	50.031	51.631	52.131	52.465
Variabel … jumlah Rumah Tangga seluruh nya	Rumah	58.526	58.526	58.526	58.526	58.526

Sumber Bidang Cipta karya Tahun 2024

Untuk mewujudkan Indikator Persentase penduduk yang terlayani air minum layak pada Tahun 2023 target 89,00 % **Realisasi** 89,00% .pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target yang diharapkan serta kemampuan SDM dalam pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum dengan melakukan Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa hal, yaitu:

a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;

b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;

c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan;

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:

a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (Non-Revenue Water/NRW), pemanfaatan idle capacity, dan pembangunan kapasitas;

b. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;

c. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;

d. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;

e. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/Water Safety Plan (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;

f. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar;

g. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu, strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM ialah:

a. Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;

b. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam penyelenggaraan SPAM;

c. Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;

d. Memperkuat peran stakeholders termasuk masyarakat dan Badan Usaha;

e. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga; f. Menerapkan prinsip Good Governance untuk penyelenggaraan SPAM;

g. Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.

4. Indikator kinerja utama perangkat daerah Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestic Disajikan definisi indikator …

Penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik (jumlah Rumah Tangga yang terlayani pelayanan air limbah domestic dibagi jumlah Rumah Tangga seluruh nya)

Tabel 2-4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	%	**90,21**	**91,73%**	**92,15%**	**92 %**	**89,64 %**
Rumah yang terlayani pelayanan air limbah domestic	Rumah	46.328	53.234	53.934	54.134	52.465
Rumah seluruh nya	Rumah	51.353	58.526	58.526	58.526	58.526

Sumber Bidang Cipta karya, Tahun 2024

capaian atas Persentase Rumah Tangga yang terlayani pelayanan air limbah domestik di tahun 2024 terlihat pada Tabel diatas, Pada Tahun 2024 untuk mendukung indikator sasaran Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik didukung oleh Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah **yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :**

1. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
   Berupa *Pembangunan Tangki Septik Individual Program Hibah Air Limbah Setempat 179 unit*
   Lokasi Kec. Koto Besar : Nagari Koto Ranah, Kec. Sungai Rumbai : Nagari Kurnia Selatan, Kec. Kec. Koto Baru: Nagari Koto Padang, Kec. Sitiung Nagari Sungai Duo, Kec. Pulau Punjung Nagari Sungai Dareh, Nagari Sungai Kambut
2. **Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT**
   Berupa Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
   Lokasi IPLT Situng V Ragusa Nagari Gunung Medan Kec. Sitiung
3. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan:

a. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;

b. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi;

c. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;

d. Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;

e. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota Prioritas;

b. Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun;

c. Fasilitasi penyiapan readiness criteria pada Kabupaten/Kota Prioritas;

d. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;

e. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan platform database sanitasi lainnya;

f. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan).

5. Indikator kinerja utama perangkat daerah Persentase Gedung perangkat daerah dalam kondisi baik

Mengambarkan Persentase perangkat daerah yang memiliki gedung kantor yang representatif (Jumlah gedung kantor / dinas / badan kondisi baik / jumlah seluruh gedung pemerintah)

Tabel 2-5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor	%	59,46	62,16	62,16	64,86	64,86
Jumlah gedung kantor / dinas / badan kondisi baik	unit	22	23	23	24	24
jumlah seluruh gedung pemerintah	unit	*37*	*37*	*37*	*37*	*37*

Sumber Bidang Cipta karya, Tahun 2024

Untuk mewujudkan indikator sasaran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung,

Tahun 2023 untuk pembangunan Gedung Kantor bagi OPD yang belum memiliki gedung kantor sendiri, belum terlaksana karena keterbatasan Anggaran APBD, tapi hanya berupa Lanjutan Pembangunan Gedung Layanan Arsip dan Perpustakaan

6. Indikator kinerja utama perangkat daerah Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Disajikan

Mengambarkan Kesesuaian rencana penataan Ruang dengan perencanaan pembangunan (**Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan** Pemanfaatan yang sesuai peruntukan di bagi dengan jumlah luas Rekomendasi perizinan X 100)

Tabel 2-6 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	**%**	**-**	**6,4**	**6,4**	**7,4**	**8,03**
Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan Pemanfaatan yang sesuai peruntukan	Ha	-	17.961	17.961	20.734,64	21.110
Jumlah luas Rekomendasi perizinan	Ha	-	279.604	279.604	279.604	262,849

Sumber :Bidang Penataan Ruang Tahun 2024

dengan indicator sasaran kesesuaian rencana Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, dari **Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan** Pemanfaatan yang sesuai peruntukan 21.110 Ha di bagi dengan jumlah luas Rekomendasi perizinan sebesar 262.849 Ha terealisasi sebesar 8,03 %.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu strategis

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Dengan memperhatikan tujuan serta mempertimbangkan kekuatan, peluang-peluang serta faktor- faktor ancaman yang ada, juga permasalahan-permasalahan yang terjadi,.

Adapun isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi serta terkait sasaran dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, terutama permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: Too much, Too little, Too dirty)
2. penyediaan infrastruktur irigasi masih rendah dan belum diselaraskan dengan lahan pertanian yang ada dan yang akan dibangun

3. ketersediaan jaringan jalan dan jembatan yang ada belum memadai, kondisi jalan mantap masih rendah dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun untuk membuka keterisoliran.
4. Cakupan layanan air minum kabupaten masih rendah dan masih akses sanitasi yang belum mencapai target nasional.
5. Masih banyak OPD yang belum memiliki gedung kantor yang layak dan representative.
6. Belum ditetapkannya perda Revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya sehingga dalam penyusunan dan penetapan perda RDTR sebagai dokumen turunannya mengalami hambatan.
7. Keterbatasana SDM teknis.

Kebijakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya, untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran organisasi adalah:

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
2. Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten
3. Merekomendasikan Kelanjutan Pembangunan Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan BWS V
4. Penyusunan Rencana Pemanfaatan SDA yang berkelanjutan
5. Pembangunan Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
6. pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan embung kabupaten
7. Menyediakan peraturan-peraturan terkait dengan penyelenggaraan air
8. Menyusun basis data cakupan layanan air minum layak dan dokumen perencanaan pengembangan SPAM Perkotaan dan Perdesaan
9. Pelaksanaan sosialisasi program air minum aman dan layak
10. Pengembangan sarana dan prasarana SPAM Perkotaan dan Perdesaan
11. Melakukan pembinaan teknis dan monitoring pelaksanaan SPAM yang dikelola oleh kelompok masyarakat
12. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pengelola SPAM
13. Menyusun data base cakupan layanan air limbah domestik dan dokumen perencanaan pengembangan Layanan Air Limbah Domestik
14. Peningkatan sarana dan prasarana IPLTuntuk menunjang layanan penyedotan lumpur tinja
15. Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal (LLTT)
16. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang penggunaan sarana air limbah aman
17. Meningkatkan sistem pengolahan air limbah terpusat skala kawasan dan Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat menuju sanitasi aman

18. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai
19. Menyelenggarakan infrastruktur berupa fasilitas umum atau fasilitas sosial, beserta pemanfaatan dan pemeliharaannya
20. Pembangunan dan rehab gedung perkantoran
21. Penerbitan Rekomendasi IMB
22. Pembinaan tata bangunan dan lingkungan
23. Meningkatkan pembnagunan bangunan gedung sesuai dengan IMB
24. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang
25. Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan tata ruang
26. Menerbitkan Keterangan Rencana Kota sesuai dokumen perencanaan
27. Menerbitkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang
28. Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang
29. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
30. Peningkatan kompetensi aparatur penyelenggara penataan ruang
31. .Penyediaan sistem informasi penataan ruang berbasis Web-GIS

2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Dharmasraya seperti beberapa penjelasan berikut ini diantaranya :

1. Bidang Bina Marga

a. Belum terpenuhinya infrastruktur jalan mantap

b. Belum terpenuhinya infrastruktur jembatan yang memiliki standard kelayakan jangka panjang

a) Keterbatasan anggaran

b) Koordinasi yang belum optimal

c) Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi teknis

2. Bidang Cipta karya

a. Belum terpenuhinya akses layanan air minum layak bagi masyarakat

b. Belum terpenuhinya akses layanan air limbah aman dan layak bagi masyarakat

a) Keterbatasanan infrastruktur system penyedian air minum.

b) Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas air perpipaan rendah

c. Masih rendah rasio bangunan yang ber- PBG terhadap jumlah bangunan yang ada

- Seringnya terjadi perubahan peraturan perundangundangan dan pedoman terkait pelayanan Dinas PU dan Penataan Ruang

3. Bidang Sumber daya Air

a. penyediaan infrastruktur irigasi masih rendah dan belum diselaraskan dengan lahan pertanian yang ada dan yang akan dibangun

b. Rendahnya penanganan irigasi kewenangan kabupaten

- Terbatasnya database sebagai data pendukung

4. Bidang penataan Ruang dan Jasa Konstruksi

a. Masih minimnya penetapan kebijakan rencana tata ruang, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan . Serta pengendalian ruang daerah

b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruks

Strategi Pemecahan Masalah

Beberapa langkah dan strategi untuk pemecahan masalah dengan melalui :

1. Bidang Bina Marga

Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah jalan, jembatan menuju kondisi baik

2. Bidang Cipta karya

Peningkatan rasio bangunan yang ber- PBG terhadap jumlah bangunan yang ada

3. Bidang Sumber Daya Air

Peningkatan kualitas infrastruktur irigasi dan sumber daya air menuju kondisi baik

4. Bidang Penataan Ruang dan Bina Konstruksi

a) Percepatan penetapan kebijakan rencana tata ruang, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan serta pengendalian ruang daerah

b) Peningkatan pembinaan dan melakukan pengaturan, pengawasan serta pemberdayaan sektor jasa konstruksi

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Tabel 2-7 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan

No.	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aspal hotmix/ pengaspalan jalan Kabupaten, perbaikan/ peningkatan jalan kabupaten	Sepanjang Jalan Kabupaten dari simpang Bukit Bajang ke Koto Salak	Nagari Koto Baru	Kecamatan Koto Baru	Pembangunan Jalan			
2	Pelebaran jalan kabupaten	Pelebaran Jalan Simpang Jalan Asoy ke jembatan Seberang Piruko	Nagari Koto Baru	Kecamatan Koto Baru	Pembangunan Jalan			
3	Rehab/ renovasi pembangunan kantor Wali Nagari	Nagari Sialang Gaung	Nagari Sialang Gaung	Kecamatan Koto Baru	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota			
4	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing sungai/ DAM penahan tebing	Jorong Koto Gadang Nagari Ampang Kuranji	Nagari Ampang Kuranji	Kecamatan Koto Baru	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			
5	Pembangunan/ penggantian jembatan	Jorong Pasa Banda Nagari Ampang Kuranji	Nagari Ampang Kuranji	Kecamatan Koto Baru	Pembangunan Jembatan			
6	Aspal hotmix/ pengaspalan jalan Kabupaten, perbaikan/ peningkatan jalan kabupaten	Jorong Koto Diateh Nagari Ampang Kuranji	Nagari Ampang Kuranji	Kecamatan Koto Baru	Pembangunan Jalan			
7	Pembangunan/ lanjutan pembangunan Gedung Pertemuan Umum nagari	Jorong Aur Jaya I-VI	Nagari Koto Padang	Kecamatan Koto Baru	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota			
8	Pembangunan/ lanjutan pembangunan kantor wali nagari	Jorong Sungai Lomak	Nagari Koto Padang	Kecamatan Koto Baru	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis			

					DaerahKabupaten/Kota			
9	Pelebaran Jalan dan pembangunan jembatan Riolin	Jr.Sungai Kilangan	Nagari Sungai Dareh	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	1 paket		
10	DAM penanggulangan banjir	Jr.Batang Tabek	Nagari Tebing Tinggi	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	200 m		
11	Jembatan Gantung Sungai Piruko	Jr.Batang Tabek	Nagari Tebing Tinggi	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jembatan	100 M		
12	Pelebaran jalan samping RSUD Sungai Dareh Sampai jalan Baru	IV Koto Pl.Punjung	Nagari Empat Koto Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	800 M		
13	Pengerasan jalan dari samping Pengadilan sampai jalan Baru	IV Koto Pl.Punjung	Nagari Empat Koto Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	800 M		
14	Pelebaran Jalan Mulai Simpang Empat Pulau punjung sampai Perbatasan dengan Nagari Gunung Selasih	IV Koto Pl.Punjung	Nagari Empat Koto Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	5 KM		
15	Aspal Jalan Poros	Jr. Sungai Kambut II dan Kulim basisiak 2.5 km	Nagari Sungai Kambut	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	2,5 Km		
16	Aspal jalan Lambau	Jlan Lambau	Nagari Sungai Kambut	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	1 KM		
17	Pengaspalan Jalan Poros	Jr. Kampung Surau, Lubuk Bulang	Nagari Gunung Selasih	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	10 KM		
18	Lanjutan Pembangunan Dinding Penahan Tebing Sungai Batang hari	Jr Lubuk Bulang	Nagari Gunung Selasih	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1,2 KM		
19	Pengerasan jalan Lingkar Jorong Batu agung	Jr. Sibubuik	Nagari Gunung Selasih	Kecamatan Pulau	Pembangunan Jalan	2 KM		

				Punjung				
20	Pembangunan Jembatan Batang Mimpi	Parik tarajak	Nagari Sikabau	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jembatan	1 Unit		
21	Kelanjutan Pembangunan kantor Wali Nagari	Jrg. Tarandam	Nagari Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota			Hibah Barang
22	Aspal hotmix / pengaspalan jalan kab, peningkatan jalan kab	Jrg. Sungai baye	Nagari Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai	Pembangunan Jalan			
23	Normalisasi Sungai	Kurnia Koto Salak	Nagari Kurnia Koto Salak	Kecamatan Sungai Rumbai	Normalisasi/Restorasi Sungai	1 Paket		
24	Aspal hotmix jln lingkar kampung baru ke bukit berbunga	Jrg. Kambang baru dan bukit berbunga	Nagari Sungai Rumbai Timur	Kecamatan Sungai Rumbai	Pembangunan Jalan	3,5 Km		
25	Lanjutan Kantor Wali Nagari	Jrg. Koto Ranah Kab Dharmasraya	Nagari Kurnia Selatan	Kecamatan Sungai Rumbai	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota	1 Paket		Hibah Barang
26	Pembangunan Jembatan	Jrg. Cahaya Koto	Nagari Kurnia Selatan	Kecamatan Sungai Rumbai	Pembangunan Jembatan	1 Paket		
27	Pembangunan Jembatan Irigasi Jalan Akses Ke SD 01 Sitiung		Nagari Sitiung	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jembatan			
28	Pembangunan Jalan Aspal dari Simpang Prumnas Taratak Garden Menuju SMP 3 Sitiung dan SMA 2 Sitiung		**Nagari Siguntur**	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jalan			
29	Pembangunan jembatan dekat masjid		**Nagari Siguntur**	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jembatan			
30	Pembangunan/ penggantian jembatan piruko		Nagari Gunung Medan	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jembatan			

31	Pembangunan SPAM/ Pamsimas kampung dondan		Nagari Gunung Medan	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
32	Pembangunan/ pembukaan jalan baru Lb Aur Kampuang Dondan		Nagari Gunung Medan	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jalan			
33	Aspal Hotmix Lingkar Lapangan Koto Agung		Nagari Sungai Duo	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jalan			
34	Aspal Hotmix Lingkar Pasar Koto Agung		Nagari Sungai Duo	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jalan			
35	Pembangunan Kantor Wali Nagari Sungai Duo		Nagari Sungai Duo	Kecamatan Sitiung	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota			
36	Pembangunan Drainase Depan Kantor Wali Nagari Sungai Duo		Nagari Sungai Duo	Kecamatan Sitiung	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota			
37	Aspal Hotmix Jalan Taman Mini		Nagari Sungai Duo	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jalan			
38	peningkatan jalan lingkar jorong silago		Nagari Silago	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Jalan			jalan pasar terpisah tidak melewati keramaian
39	DAM tebing di pitopang		Nagari Silago	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			terancam 2 nagari terisolir jika ambrol
40	pembangunan bronjong lubuk karak		Nagari Lubuk Karak	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			1 jorong terisolir karena

								banjir
41	pembangunan jembatan lubuk karak		Nagari Lubuk Karak	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Jembatan	1 unit		
42	pengaspalan jalan lubuk karak -koto lamo		Nagari Lubuk Karak	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Jalan			
43	jembatan gantung jorong lubuk mansagu		Nagari Koto Nan Empat Dibawuah	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Jembatan			
44	pembangunan jembatan beton di jorong koto baru		Nagari Koto Nan Empat Dibawuah	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Jembatan			
45	DAM penanggulangan banjir		Nagari Koto Nan Empat Dibawuah	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3 jorong		
46	lanjutan hotmix padang hilalang		Nagari Banai	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Jalan			
47	pembangunan jembatan beton di jorong banai		Nagari Banai	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Jembatan	3 unit		dampak banjir
48	pembangunan pamsimas		Nagari Banai	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			
49	Normalisasi Sungai	Sungai Bulian	Nagari Timpeh	Kecamatan Timpeh	Normalisasi/Restorasi Sungai			
50	Rehab Jembatan Timpeh		Nagari Timpeh	Kecamatan Timpeh	Rehabilitasi Jembatan			
51	Jalan Aspal Hotmix Dari Marga Makmur ke Beringin Sakti	Jorong Marga Makmur	Nagari Taratak Tinggi	Kecamatan Timpeh	Pembangunan Jalan	9000m		
52	Aspal Hotmix Marga Makmur II	Jorong Marga Makmur II	Nagari Taratak Tinggi	Kecamatan Timpeh	Pembangunan Jalan	350m		
53	Drainase Jalan Poros Pasar Marga Makmur	Jorong Marga Makmur	Nagari Taratak Tinggi	Kecamatan Timpeh	Pembangunan Jalan	750m		

54	Normalisasi Sungai Beringin Sakti	Beringin Sakti	Nagari Taratak Tinggi	Kecamatan Timpeh	Normalisasi/Restorasi Sungai	3000m		
55	Aspal Jalan Lingkar Jorong	Sumber Makmur	Nagari Tabek	Kecamatan Timpeh	Pembangunan Jalan	2000 m		
56	Aspal	Pinang Makmur	Nagari Tabek	Kecamatan Timpeh	Pembangunan Jalan	1000 m		
57	Pengecoran/Rigit Beton	Suka Mulya Tinggi	Nagari Tabek	Kecamatan Timpeh	Pembangunan Jalan	300 m		
58	Normalisasi Sungai Bantang Timpeh	Tabek Maju	Nagari Tabek	Kecamatan Timpeh	Normalisasi/Restorasi Sungai	4000 m		
59	Normalisasi anak Sungai	Trimulya Sari Panyubaranagan	Nagari Panyubarangan	Kecamatan Timpeh	Normalisasi/Restorasi Sungai	1500m		
60	Rehab Aspal Sp8 s/d Sp6	Ranah Palabi	Nagari Ranah Palabi	Kecamatan Timpeh	Pembangunan Jalan			
61	Normalisasi Anak Sungai	Ranah Palabi	Nagari Ranah Palabi	Kecamatan Timpeh	Normalisasi/Restorasi Sungai			
62	Pembangunan GPU	Bukit Tujuh	Nagari Ranah Palabi	Kecamatan Timpeh	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota			
63	Peningkatan Jalan di Jembatan Penguhubunga Koto Salak dan Ampalu	Jorong Tanjung Alam Nagari Koto salak	Nagari Koto Salak	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jalan	100 M		
64	Perbaikan Aspal Jalan Poros	Jr, Pdg Tarok, Jr, Sei Lancar, Pekan senayan Ke nag Koto salak	Nagari Koto Salak	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jalan	5 Km		
65	Perbaikan Jalan Jorong Koto Ampalu	Jr Koto Ampalu	Nagari Ampalu	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jalan	4 Km		
66	Aspal Lapen Jrg mangkalang	Jr mangkalang	Nagari Ampalu	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jalan	2 Km		
67	Saluran Irigasi Jr Pintu Agung dan Mekar Sari	Jr Pintu Agun & Mekar Sari	Nagari Ampalu	Kecamatan Koto Salak	Peningkatan Jaringan IrigasiPermukaan	3 Km		
68	Rehabilitas Masjid	Jr Pasar lama, Pintu Agung	Nagari Ampalu	Kecamatan	Pengubahsuaian	3 Unit		

		dan Mekar Sari		Koto Salak	BangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota			
69	Pembangunan Jembatan Permanen Padukuan ke Ampalu	Jorong Padang Rampak	Nagari Padukuan	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jembatan	1 Unit		
70	Aspal Jalan Poros Jr Padang Tengah I dan Padang Tengah II	Jr, Pdng Tengah I dan Pdg Tengah II	Nagari Padukuan	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jalan	2500 M		
71	Pembangunan Batu Jarut Jembatan Jorong Limau Sundai dan Jr Pulau Mainan	Jr Limau Sundai, Jr Pulau Mainan	Nagari Pulau Mainan	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jembatan	2 Unit		
72	Pembangunan Alun-alun dan rukoa wisata kuliner Nagari	Nagari Pulau Mainan	Nagari Pulau Mainan	Kecamatan Koto Salak	Pengubahsuaian BangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota	1 Ls		
73	Pelebaran jalan dan Jembatan Jalan poros Nagari Simalidu	Nagari Simalidu	Nagari Simalidu	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jalan	7 Km		
74	Pengadaan Sarana Air Bersih (PAMSIMAS)	Jr Kp Tengah,Dan Kp baru	Nagari Simalidu	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2 Unit		
75	rehab jalan aspal menuju kantoar camat		Nagari Tiumang	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
76	hotmix jalan poros sukoharjo menuju kantor camat		Nagari Tiumang	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
77	rehab hotmix menuju blok E menuju pasar		Nagari Tiumang	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
78	lanjutan pembangunan aspal ke jorong…		Nagari Sungai Langkok	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
79	pembangunan jembatan banjar makmur		Nagari Sungai Langkok	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jembatan			
80	pembanguna jembatan tembok penahan tanah di jorong sekar makmur		Nagari Sungai Langkok	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jembatan			
81	aspal jalan pehubung antar nagari antar kecamatan di jorong koto		Nagari Koto Beringin	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			dibangun 2017

	beringin 1							masih pengerasan/ tanah, digunakan oleh pelajar
82	jembatan gantung antara koto beringin dengan jorong trans		Nagari Koto Beringin	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jembatan			
83	pembuatan jembatan di jorong mulia abadi		Nagari Koto Beringin	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jembatan			rusak sejak tahun 2022
84	pengaspalan pengubung antara harapan mulya 1 dan harapan mulya 2		Nagari Koto Beringin	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
85	jembatan sipangkur		Nagari Sipangkur	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jembatan			
86	aspal jalan k sma		Nagari Sipangkur	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
87	aspal ke lagan jaya 2		Nagari Sipangkur	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
88	aspal RT 1 jorong sumber mulya		Nagari Sipangkur	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
89	Box Culvert Jalan Kantor Camat		Nagari Padang Laweh	Kecamatan Padang Laweh	Pembangunan Jalan	1 Paket	150.000.000,00	
90	Kelanjutan Aspal hotmiX (jalan lingkar pusat Nagari)		Nagari Padang Laweh	Kecamatan Padang Laweh	Pembangunan Jalan	5 Km	5.000.000.000,00	
91	Pembangunan Toilet Di Gedung Sarana Olah Raga		Nagari Batu Rijal	Kecamatan Padang Laweh	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota	1 Paket	100.000.000,00	

92	Kelanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari		Nagari Muaro Sopan	Kecamatan Padang Laweh	Pengubahsuaian BangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota	1 Unit	200.000.000,00	
93	Pengerasan jalan Muaro Sopan ke padang Laweh		Nagari Muaro Sopan	Kecamatan Padang Laweh	Pembangunan Jalan	3 Km	150.000.000,00	
94	Pembangunan Jembatan		Nagari Sopan Jaya	Kecamatan Padang Laweh	Pembangunan Jalan		1.500.000.000,00	
95	Lanjutan Rigit Beton Kayu Aro	Sungai Limau	Nagari Sungai Limau	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jalan	700 meter	500.000.000,00	
96	Peningkatan Jalan Poros Nagari Dari Rigit Beton Ke Aspal Hotmit	Alahan Nan Tigo	Nagari Alahan Nan Tigo	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jalan	6 km	7.200.000.000,00	
97	Rehap Jalan Lingkar Nagari	Alahan Nan Tigo	Nagari Alahan Nan Tigo	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jalan	2 km	2.000.000.000,00	
98	Rigit Beton Lubuk Kapal	Batu Kangkung	Nagari Alahan Nan Tigo	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jalan	6 km	3.500.000.000,00	
99	Pembangunan Jembatan Permanen Lubuk Kapal	Batu Kangkung	Nagari Alahan Nan Tigo	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jembatan	60 x 4 m2	15.000.000.000,00	
100	Lanjutan Pengaspalan Ke Kantor Camat Asam Jujuhan	Lubuk Besar	Nagari Lubuk Besar	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jalan	13 km	15.000.000.000,00	
101	Aspal Hotmix Jorong Muaro Simatap Menuju HGU PT. Incasi raya	Tanjung Alam	Nagari Tanjung Alam	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jembatan	2000 meter	2.500.000.000,00	
102	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai/DAM Penahan Tebing	Tanjung Alam	Nagari Tanjung Alam	Kecamatan Asam	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	100 x 6 meter	3.000.00	

				Jujuhan			0.000,00	
103	Pembangunan Jalan Aspal dari Nagari Sinamar menuju Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar	Jorong Sinamar	Nagari Sinamar	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jalan	15 km	15.000.000.000,00	
104	Pembangunan Drainase Pembuangan dari Jalan Poros ke Sungai Jujuhan	Jorong Sinamar	Nagari Sinamar	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jalan	1 paket	200.000.000,00	
105	Peningkatan Jalan hot mix dari Koto Besar - Sungai Rumbai		Nagari Koto Besar	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan	2,5 KM		
106	Lanjutan Pembangunan Mesjid Nurul Hidayah		Nagari Koto Besar	Kecamatan Koto Besar	Pengubahsuaian BangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota	1 Paket		
107	Pembangunan Pamsimas Jr. Koto Diateh-Jr. Pekan jumat		Nagari Koto Besar	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1 Paket		
108	Lanjutan rigit beton menuju hutan adat koto besar		Nagari Koto Besar	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan	1 paket		
109	Pembangunan Perkuatan Tebing sungai TPT		Nagari Koto Tinggi	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	100 M		
110	Pembangunan SPAM / Pamsimas		Nagari Koto Tinggi	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1 Paket		
111	Aspal Hot mix jalan lingkar Kabupaten		Nagari Koto Tinggi	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan	1 Paket		
112	Lanjutan Pengerasan jalan ke Tempat Pembuangan Akhir sampah		Nagari Koto Gadang	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan			
113	Pengaspalan Jalan		Nagari Bonjol	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan	3 KM		
11	Pembangunan Batu Bronjong		Nagari Bonjol	Kecamatan	Pembangunan Bangunan	1 Paket		

4				Koto Besar	Perkuatan Tebing			
115	Pamsimas		Nagari Bonjol	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3 unit		
116	Lanjutan aspal ulang Jalan Ranah Baru		Nagari Abai Siat	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan	3 KM		
117	Lanjutan Tembok Penahan Tebing Batang Siat		Nagari Abai Siat	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1 Paket		
118	Jembatan Permanen irigasi ke Sungai Bilang		Nagari Abai Siat	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jembatan	8 M		
119	Lanjutan Hot Mix Jalan Nagari		Nagari Koto Laweh	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan	1 paket		
120	Pembuatan Drainase Jalan Hot mix		Nagari Koto Laweh	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan	1 paket		

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Pekerjaan umum Kabupaten dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Dharmasraya lebih menitik beratkan arah pembangunan pada usaha untuk meningkatkan Infrastruktur guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk pengentasan daerah – daerah tertinggal dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Dari Rencana Strategis Pembangunan Nasional, Prioritas Nasional pada wilayah Kabupaten Dharmasraya adalah bagaimana mewujudkan pembangunan ekonomi yang ekslusif dengan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan ketertinggalan, optimalisasi pemanfaatan lahan produktif, sumber daya alam serta pembangunan industri.

Renja merupakan pedoman perencanaan OPD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan OPD secara rinci. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum maka Renja tersebut dijabarkan kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran yang lebih operasional, sehingga dapat lebih terarah dan terukur.

3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

Melakukan penelaahan terkait kebijakan K/L jika ada terkait dengan kebijakan/ kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya

Dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penelaahan terhadap Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Penelaahan ini mencakup identifikasi program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang direncanakan oleh Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, serta K/L lain yang memiliki intervensi program di daerah, seperti pembangunan infrastruktur jalan nasional, irigasi, sanitasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, serta penataan ruang wilayah.

Tujuan dari penelaahan ini adalah untuk memastikan konsistensi dan sinergi antara kegiatan pusat dengan program prioritas daerah, mencegah duplikasi, serta mendorong integrasi perencanaan dan penganggaran. Hasil penelaahan menjadi acuan dalam penyempurnaan Renja Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 (Perubahan), terutama dalam penyesuaian target kinerja dan alokasi sumber daya.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: *Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri danBerkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.* Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagaiNawacita Kedua. Adapun misi pembangunan nasional yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan misi kepala daerah Provinsi Sumatera, adalah

Pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, agenda arahan Presiden RI yang sejalan dengan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang ialah Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.Sejalan dengan tujuan pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, terdapat target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, keciptakaryaan dan perumahaan. Dalam hal ini, target visium Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilihat melalui gambar 3.1

berikut:

Gambar 3.1 Target Visium Tahun 2020 – 2024 dan 2030

Sumber : Rencana Strategi Kementrian PUPR 2020-2024

Tabel 3.1 Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan

Sumber : Rencana Strategi Kementrian PUPR 2020-2024

Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Sasaran

yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang oleh Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian pembangunan infrastuktur nasional terdiri atas

Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan PN 1 & PN 5 (Kementerian PUPR)

dalam RPJMN 2020 -2024)

PN	**INDIKATOR**	**Baseline 2019**	**arget Akhir 2024**
1	Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi		
	1. Peningkatan Persentase Irigasi	12,3 %	16,4 %
	2. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru	1.000.000 Ha	500.000 Ha

Sumber : Rencana Strategi Kementrian PUPR 2020-2024

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah
kebijakan tersebut lebih jauh membahas tentang :

a. Peningkatan akses air minum dan akses sanitasi layak dan aman untuk mencapai visium Kementerian PUPR. Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa hal, yaitu peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM, dan peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan. Sedangkan, kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi, peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi, pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi, penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi, dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
b. Upaya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian agenda pembangunan infrastruktur konektivitas 2020-2024, arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah PeningkatanKonektivitas Jalan Nasional. Strategi yang digunakan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yang dijabarkan dalam Preservasi jalan, Pembangunan jalan dan jembatan, Penataan jalan nasional di kawasan perkotaan, dan Pemenuhan *Gap Funding* melalui Skema Pembiayaan Alternatif.
Berdasarkan sasaran pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Permendagri Nomor 90 tahun 2019, adapun yang menjadi fokus prioritas untuk menunjang kegiatan program Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Program Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ialah:

a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
b. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
e. Program Penataan Bangunan Gedung
f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
g. Program Penyelenggaraan Jalan
h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan dan Sasaran serta Isu-Isu Strategis yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dapat terarah dan terfokus kepada hasil yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yaitu

sebagai berikut.

3.1.2. Penelaahan Renja Dinas BMCKTR. Provinsi Sumatera Barat

Melakukan penelaahan terkait kebijakan Badan/Dinas terkait Provinsi Sumatera Barat yang telah dibahas dan disepakati pada forum perangkat daerah provinsi yang telah dilaksanakan. Sub bab ini dapat berupa kesepakatan target maupun informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan/ berlokasi di Kabupaten Dharmasraya

Sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi dan integrasi perencanaan antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(PUPR) Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penelaahan terhadap Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat.

Penelaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Dharmasraya, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi, penataan permukiman, pengelolaan air minum dan sanitasi, serta penataan ruang.

Melalui proses ini, diharapkan terjadi penyelarasan target pembangunan antar tingkatan pemerintahan, penguatan peran daerah dalam mendukung prioritas provinsi, serta menghindari tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Penelaahan juga menjadi dasar dalam menyusun rencana sinergi pendanaan dan dukungan teknis terhadap kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi RPJMD : Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur

Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan

Tujuan RPJMD : Meningkatnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas

Sasaran RPJMD :

Bidang Urusan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi	Proyeksi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur								
Indikator Tujuan	...	...	...	...	...	...	...	...
Sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan**								
Indikator Sasaran								
1. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	49,75	51,75%	52%	52,50%	53%	53,85%	55%
2. Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	...	70,40	70,40%	71,00%	71,60%	72,00%	72,70%	73%
Sasaran **Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air ...**								
Indikator Sasaran Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	...	67,35	69%	71%	73%	75%	77%	79%
Sasaran **Meningkatnya layanan penyediaan air minum**								
Indikator Sasaran Persentase penduduk yang terlayani air minum layak	%	67,35	61%	62%	63%	64%	65%	66%

Sasaran **Meningkatnya layanan penyediaan air limbah domestik**								
Indikator Sasaran Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestic	%	90,21	88%	89%	90%	91%	92%	93%
Sasaran **Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor**								
Indikator Sasaran Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor	%	59,46	62,16	62,16	64,86	67,57	70,27	75,68
Sasaran **Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**								
Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	%	N/A	5	10	10	15	20	35

BAB 4. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan realisasi 2022, 2023 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2024, maka proyeksi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG KAB. DHARMASRAYATAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG						**80.190.181.790,00**							**109.460.395.650,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**80.190.181.790,00**							**109.460.395.650,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**80.190.181.790,00**							**109.460.395.650,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**11.785.181.790,00**						**-**	**11.755.395.650,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	24.934.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela	-	-	24.934.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

												njutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan				
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	24.934.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	-		24.934.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.928.556.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	5.928.556.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS	KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH

		KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRAOPD	RENJA OPD TAHUN 2023	RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	5.928.556.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		5.928.556.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	629.686.190,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	599.900.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.000.700,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadil	-		5.000.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

												an dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur				
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 unit Paket	273.446.140,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		243.660.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	15.957.350,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		15.957.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

												1. Pemerataan pembangunan infrastruktur				
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	30.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	41.250.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		41.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD				12 Laporan	259.032.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		259.032.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	900.000.000,00			-	Meningkatk an pembangunan infrastruk	-	-	900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

												tur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur				
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	350.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				150 Unit	150.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	300.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.250.855.600,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruk tur yang berkeadil an dan berkela njutan 1. Pemerat aan pemba ngunan infrastruk tur	-	-	3.250.855.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	5.100.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruk tur yang berkeadil an dan berkela njutan 1. Pemerat aan pemba ngunan infrastruk tur	-		5.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	750.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.490.755.600,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan	-		2.490.755.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

												pembangunan infrastruktur				
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.051.150.000,00			-	Meningkatk an pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	1.051.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				33 Unit	336.150.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruk	-		336.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

												tur				
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				12 Unit	500.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruk tur yang berkeadil an dan berkela njutan 1. Pemerat aan pemba ngunan infrastruk tur	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**9.000.000.000,00**						**-**	**9.000.000.000,00**	

NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.000.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruk tur yang berkeadil an dan berkela njutan 1. Pemerat aan pemba ngunan infrastruk tur	-	-	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														

			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				31,25 KM	1.500.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				41,67 KM	2.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			-				-	1.500.000.000,00	-	-	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.000.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

												1. Pemerataan pembangunan infrastruktur				
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				60 Ha KM	1.500.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				40 Ha KM	1.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

												njutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur				
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				100 Ha KM	1.500.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**	**-**			**-**	**3.530.000.000,00**						**-**	**3.330.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.530.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	3.330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.002	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

	3															
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruk tur yang berkeadil an dan berkela njutan 1. Pemerat aan pemba ngunan infrastruk tur	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.002 8	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				4 lokasi Liter/De tik	2.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruk tur yang berkeadil an dan berkela njutan 1. Pemerat aan pemba ngunan infrastruk tur	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.002 9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				4 Unit	700.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1000 Meter SR	230.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerat	-		230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

												aan pembangunan infrastruktur				
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**	**-**			**-**	**730.000.000,00**						**-**	**730.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	730.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	730.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				50 Orang	30.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				2 Dokumen	700.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**	**-**			**-**	**485.000.000,00**						**-**	**485.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	485.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela	-	-	485.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

												njutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur				
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				100 Rumah Tangga	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatk an pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				12 M³/Hari	35.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerat	-		35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

												aan pembangunan infrastruktur				
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

									Kel/Desa							
6.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**-**	**-**			**-**	**2.000.000.000,00**						**-**	**2.000.000.000,00**	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.000.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				4 lokasi Liter/Detik	2.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Simalidu Kab. Dharmasraya, Koto	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

									Besar, Bonjol Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Tinggi			pembangunan infrastruktur				
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**	**-**			**-**	**6.710.000.000,00**						**-**	**6.710.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	6.710.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	6.710.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara														
			Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				40 Bangunan Gedung Negara	150.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				11 Bangunan Gedung	4.760.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		4.760.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 BangunanGedung	1.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				131 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAANJALAN**	**-**	**-**			**-**	**40.700.000.000,00**						**-**	**67.700.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	40.700.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	67.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				8 KM	23.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1.	-		50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

												Pemerataan pembangunan infrastruktur				
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				2 KM	8.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														

			Jumlah Jembatan yang Dibangun				32 meter dan 2 paket Jembatan	6.400.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Lubuak Karak Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sipangkur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		6.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				30 unit Jembatan	1.200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				3 Paket KM	300.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 1. Pemerataan	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

												pembangunan infrastruktur				
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				240 KM	1.800.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**	**-**			**-**	**350.000.000,00**						**-**	**350.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1.	-	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

												Pemerataan pembangunan infrastruktur				
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				200 Orang	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	150.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
		URUSAN /		**TARGE**	**REALISA**	**PRAKIRAAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA**							**PRAKIRAAN MAJU RENCANA**		

NO	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAKHIR PERIODE RENSTRAOPD	SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				0 Paket Pekerjaan	150.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**	**-**			**-**	**4.900.000.000,00**						**-**	**7.400.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	3.000.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														

			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.500.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/DesaKab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

												infrastruktur				
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	400.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

	J U M L A H	**80.190.181.790,00**		**109.460.395.650,00**	

4.2. Target Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Sungai darehTelp/Fax (0754)40006)
Email :dinaspuprdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DHARMASRAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	60,00%
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	71,60%
2	Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	73%
3	Meningkatnya layanan penyediaan air minum	Persentase penduduk yang terlayani air minum layak	90%
4	Meningkatnya layanan penyediaan air limbah domestik	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	97%
5	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor	64,86%
6	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	10%
			A

7	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp9.685.399.585,00	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp2.586.480.000,00	APBD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp977.323.750,00	APBD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp979.443.000,00	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMAIR LIMBAH	Rp 2.621.042.000	APBD
8.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp12.729.476.185,00	APBD
9.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp50.859.933.700,00	APBD, DAK
10.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp295.500.000,00	APBD
11.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 1.800.000.000	APBD
	Jumlah	**Rp80.235.399.220,00**	

Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan	Persen	58,09%	58,16%	53%	53,85%	54,58 %	55 %
2	Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air …	Persen	73,85%	72,62	72,00%	72,70%	72,65 %	72,75%
3	Meningkatnya layanan penyediaan air minum	Persen	88%	89,07	75%	77%	89,64	89,65 %
4	Meningkatnya layanan penyediaan air limbah domestik	Persen	92,15%	92,50%	64%	65%	92,55	92,65 %
5	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	Persen	62,16%	64,86%	67,57%	70,27%	64,86 %	64,86 %
6	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	7,45%	7,74%	15%	20%	8,03%	8,05 %

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Tahun 2025 ini merupakan usulan perubahan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2025 ini didasarkan perubahan dari perencanaan dan pelaksanaan dari kegiatan pada tahun 2025 dan masih sejalan dengan Rencana Strategis) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Tahun 2021-
2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2025) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang t ini nantinya akan menjadi dasar pijakan dan bahan dalam penyusunan usulan dan penyesuaian rencana kegiatan dan kebijakan umum) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi dengan baik agar tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERKIMTAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Perangkat Daerah

3.2 Target Indikator Kinerja Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada dasarnya merupakan proses untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Perubahan Renja SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah.

Sedangkan dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Dinas Perkimtan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun berjalan. Kemudian tahapan penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan. Perubahan Renja Dinas Perkimtan Tahun 2025 memuat program/kegiatan tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan perubahan tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah (Perkimtan) Tahun 2025 telah melalui proses penyusunan dan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Dinas Perkimtan khususnya tim penyusun Perubahan Renja Dinas Perkimtan 2025. Hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada tahun rencana 2025 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perkimtan Tahun 2025 selain berpedoman kepada Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 juga memperhatikan Rencana Strategis Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifekasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dab Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tujuan adalah untuk memberikan pedoman arah

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkimtan.

Tujuan dari penyusunan Renja ini adalah untuk :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkimtan hingga Triwulan II Tahun 2025
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Dinas Perkimtan
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Perkimtan Tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka pokok bahasan serta susunan garis besar penulisan Renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PERKIMTAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perkimtan Kab. Dharmasraya sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan pagu dana pada Renja Tahun 2025 sebesar Rp 11.387.199.056,00- guna mendukung 8 program, 20 kegiatan dan 57 subkegiatan selanjutnya menjadi sebesar Rp 7.389.308.178,65,- pada tahap Pergeseran III APBD Tahun 2025, dialokasikan untuk pelaksanaan 8 Program, 20 Kegiatan dan 57 subkegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.389.308.178,65,- atau realisasi fisik sebesar 8% jika dibandingkan dengan pagu APBD sebagaimana tabel 2.2.1.berikut:

Tabel 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERKIMTAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Renja Awal		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat		Unit Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV						(%)			
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=1		15	16
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1 4	**URUSAN**		**23.690.969.719**		**11.603.874.556**		**13.681.088.030**		**7.179.308.178,65**										**-**		**11.603.874.556**					
		1 4 1	**PROGRAM**		**2.930.969.719**		**2.036.266.468**		**2.497.475.420**		**3.134.103.120,00**										**-**		**11.603.874.556**					
		1 4 1 02.02	**Administrasi**		**1.861.114.719**		**1.386.438.107**		**1.659.108.700**		2.161.168.000,00										**-**		11.603.874.556					
		1 4 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan	gaji dan tunjangan	1.861.114.719		1.386.438.107		14 Bulan	1.659.108.700	2.161.168.000,00		**436.197.681,00**		488.334.008						924.531.689		11.603.874.556					
		1 4 1 02.05	**Administrasi**		30.000.000		-			30.000.000	-										**-**		11.603.874.556					
		1 4 1 02.05 9	Pendidikan dan	Pelatihan dan	30.000.000		-		1 Tahun	30.000.000	-										**-**		11.603.874.556					
		1 4 1 02.06	**Administrasi Umum**		**385.855.000**		**182.985.031**			**201.753.900**	190.628.000,00		**106.082.200,00**								**106.082.200**		**289.067.231**					
		1 4 1 02.06 1	Penyediaan	Pengadaan	9.855.000		3.507.000		12 bulan	8.099.000	5.000.000,00		1.507.000,00		1.452.000						2.959.000		**289.067.231**					
		1 4 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000		31.872.020			40.569.000	46.273.000,00		5.798.000,00		4.825.000						**10.623.000**		289.067.231					
																					-		289.067.231					
																					-		289.067.231					
																					-		289.067.231					
																					-		**-**					
																					-		**-**					
																					-		**-**					
		1 4 1 01.26 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	60.000.000		-		1 tahun	13.496.000	7.500.000,00		1.964.000,00		-						1.964.000		-					
		1 4 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan bahan logistik kantor	-		19.455.850		1 Tahun	26.980.000	15.000.000,00		4.200.000,00		2.400.000						**6.600.000**		-					
		1 4 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak Penggandaan	36.000.000		12.323.800		1 Tahun	31.609.900	15.550.000,00		1.500.000,00		1.875.000						**3.375.000**		-					
									60000 Lembar												**-**		**-**					
		1 4 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi	220.000.000		115.826.361		120 Kali	81.000.000	101.305.000,00		15.213.200,00		19.630.200						34.843.400		**-**					
		1 4 1 02.07	**Pengadaan Barang**		**-**		**-**			**25.000.000**	**47.600.000,00**										**-**		**-**					
		1 4 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Pengadaan kursi	-				2 Unit	3.000.000	-										**-**		-					
				Pengadaan Kursi					10 Unit	4.000.000	-										**-**		**-**					
		1 4 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop	-				1 unit	22.000.000	47.600.000,00		4.000.000,00		-						4.000.000		-					
		1 4 1 02.08	**Penyediaan Jasa**		**491.000.000**		**438.761.030**			**463.574.100**	**448.047.800,00**										**-**		**438.761.030**					
		1 4 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa menyurat	32.000.000				1 Tahun	4.000.000	4.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000						**3.000.000**		**438.761.030**					
		1 4 1 02.08 2	Penyediaan Jasa	Tersedianya jasa	7.000.000				1 Tahun	23.866.300											**-**		438.761.030					
		1 4 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa	452.000.000		438.761.030		12 Bulan	435.707.800	444.047.800,00		56.594.000,00		84.733.000						141.327.000		438.761.030					
				Tersedianya jasa kebersihan					1 Tahun												**-**		438.761.030					
		1 4 1 02.09	**Pemeliharaan**		**163.000.000**		**28.082.300**			**118.038.720**	**286.659.320,00**										**-**		438.761.030					
		1 4 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak kendaraan dinas	8.000.000		2.531.300		9 Unit	12.590.000	21.000.000,00		3.950.000,00		5.213.000						**9.163.000**		**11.694.300**					

		1	4	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Pemeliharaan		65.000.000		25.551.000	7 Unit	38.750.000		46.250.000,00		8.913.000,00	6.799.200					15.712.200		**11.694.300**				
								Pemeliharaan					2 Unit													-		11.694.300				
		1	4	1	02.09	6	Pemeliharaan	Pemeliharaan		-		-	6 Unit	6.100.000		9.880.000,00		1.950.000,00	2.320.000					**4.270.000**		11.694.300				
		1	4	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilit	Pemeliharaan		90.000.000		-	1 Tahun	60.598.720		209.529.320,00								-		11.694.300				
		1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**1.360.000.000**		**487.569.253**		**338.872.400**		**401.627.350,00**		**32.010.787,00**						32.010.787		11.694.300				
		1	**4**	**2**	**02.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			**200.000.000**		**11.487.432**		**120.664.600**		**4.625.750,00**								-		**11.487.432**				
		1	**4**	**2**	02.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Mengidentifikasi rumah yang terdampak bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota		150.000.000				**45.808.600**		**4.625.750,00**		-	-					-		**11.487.432**				
		1	4	2	02.01	5	Pendataan dan	Pendataan rumah		10.000.000		1.803.650	0	-	1	-								-		11.487.432				
		1	**4**	**2**	02.02		Sosialisasi dan			30.000.000		-		37.428.000										-		11.487.432				
		1	4	2	02.02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Sosialisasi teknis penyediaan dan/atau rehabilitasi rumah bagi korban bencana		10.000.000		9.683.782	0	37.428.000	1 Kagiatan	46.422.900,00		3.986.200,00	5.203.000					**9.189.200**		11.487.432				
		1	**4**	**2**	02.03		Pembangunan dan			450.000.000		115.427.950		61.615.000		**169.654.950,00**								-		11.487.432				
		1	4	2	02.03	1	Rehabilitasi Rumah	Jumlah ketersedian		175.000.000		-	4 unit	-	0	-								-		-				
		1	4	2	02.03	4	Pembangunan Rumah	Jumlah ketersedian		275.000.000		115.427.950	1 Unit	61.615.000	2 unit	169.654.950,00								-		-				
		1	**4**	**2**	02.04		Pendistribusian dan			10.000.000		1.075.000		3.895.000		1.280.100,00								-		-				
		1	4	2	02.04	2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pelaksanaan serah terima rumah bagi korban bencana		10.000.000		1.075.000	0	3.895.000	1 kegiatan	1.280.100		-	-					-		-				
		1	**4**	**2**	**02.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**			**700.000.000**		**359.578.871**		**152.697.800**		**159.652.600,00**								-		-				

		1	4	2	02.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun		700.000.000		359.578.871	2 Rumah susun	152.697.800	2 Rumah Susun	159.652.600,00		26.854.587,00		32.594.587					59.449.174		-				
		1	4	2	02.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan									1.991.050,00									-		-				
		1	4	2	02.06	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik									1.991.050,00		1.170.000,00		2.590.000					**3.760.000**		-				
		1	**4**	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**6.200.000.000**		**4.218.226.578**		**3.801.782.500**		**429.497.000,00**		**9.779.800,00**							**9.779.800**		-				
		1	**4**	**3**	**02.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**			**1.000.000.000**		**174.808.927**		**27.856.000**											-		-				
		1	4	3	02.01	2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan	Jumlah tersedianya Penyusunan Perda RP3KP		1.000.000.000		174.808.927	1 Dokume 1 Dokume n	27.856.000	0 1 Dokumen	429.497.000,00		9.779.800,00		2.915.900					**12.695.700** -		- -				
		1	**4**	**3**	**02.02**		**Penataan dan**			**200.000.000**		**61.777.146**		**100.219.600**											-		**61.777.146**				
		1	**4**	**3**	02.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			100.000.000				**69.628.600**		-									-		**61.777.146**				
		1	4	3	02.02	3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	jumlah kelompok swadaya masyarakat yang dilakukan pembinaan untuk damping Program Pengembangan Perumahan (BSPS atau sejenis)		100.000.000		61.777.146	1 Tahun	30.591.000	1 Tahun	-		-		-					-		61.777.146				
		1	**4**	**3**	**02.03**		**Peningkatan**			**5.000.000.000**		**3.981.640.505**		**3.673.706.900**											-		61.777.146				
		1	4	3	02.03	6	Pelaksanaan Pembangunan	Luas kawasan Pembangunan baru		5.000.000.000		2.312.492.529,79	4 Ha 38 Unit	3.673.706.900	2 Ha 0	-									- -		61.777.146 61.777.146				
		1	4	3	02.03	8	Pembangunan Rumah	Jumlah bantuan				1.669.147.975	0	-	45 Unit	-									-		**1.669.147.975**				
		1	**4**	**4**			**PROGRAM**			**10.000.000.000**		-		**157.821.000**		29.165.600,00									-		**1.669.147.975**				
		1	**4**	**4**	**02.01**		**Pencegahan**			**10.000.000.000**		-		**157.821.000**		29.165.600,00									-		1.669.147.975				
		1	4	4	02.01	1	Perbaikan Rumah	Jumlah		10.000.000.000			30 Rumah	157.821.000	0	29.165.600,00									-		1.669.147.975				
		1	**4**	**5**			**PROGRAM**			**3.200.000.000**		**4.861.812.258**		**6.885.136.710**		3.184.915.109									-		1.669.147.975				
		1	**4**	**5**	**02.01**		**Urusan**			**3.200.000.000**		**4.861.812.258**		**6.885.136.710**		3.184.915.109									-		1.669.147.975				

1	4	5	02.01	2	Penyediaan Prasarana,	Jumlah lingkungan	3.200.000.000	4.861.812.257,61	3 Peruma	6.885.136.710	3 Perum	3.184.915.108,65	-	-	**-**	**4.861.812.258**
						Pembangunan dan			1 Rumah		1 Rumah				-	**4.861.812.258**
						Pembangunan			1 Paket		1 Paket				**-**	4.861.812.258
						Pembangunan Pos			1 Paket		1 Paket				**-**	4.861.812.258
						Pembangunan Pos			1 Paket		1 Paket				**-**	4.861.812.258
						Pembangunan			1 Paket		1 Paket				-	4.861.812.258
						Pembangunan			1 Paket		1 Paket				**-**	**-**
						Pembanunan			1 paket		1 paket				**-**	**-**
						Pemeliharaan			1 Unit		1 Unit				**-**	-
						Pemeliharaan			2 Unit		2 Unit				-	-
						Pengadaan genset			2 Unit		2 Unit				**-**	-
						Peningkatan			5 Kawasa		5 Kawas				**-**	-
						Peningkatan PSU			1 Paket		1 Paket				**-**	**-**
						Perbaikan pompa			1 Unit		1 Unit				-	**-**
						Perbaikan/renovasi			1 Paket		1 Paket				**-**	-
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**168.140.000,00**	**-**		**-**	-
2	**10**	**2**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**					**-**		**52.380.000,00**			**-**	-
2	**10**	**2**	02.01		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu)**					**-**		52.380.000,00	-		-	-
2	10	2	02.01	1	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi			5000 Ha	-		**52.380.000,00**	-		**-**	**-**
2	**10**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**					**-**		115.760.000,00			**-**	**-**
2	**10**	**4**	02.01		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**					**-**					**-**	-
2	10	4	02.01	2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Presentase sengketa, konflik dan perkara tanah di Kabupaten Dharmasraya			100 Persen	-					-	-
2	10	4	02.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang difasilitasi/diseselsaikan			10 Kasus	-					**-**	-

		2	**10**	**5**			**PROGRAM**							**-**												**-**			-		
		2	**10**	**5**	02.01		**Penyelesaian**							**-**												**-**			**-**		
		2	10	5	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah					1 Bidang	-													-			**-**		
		2	**10**	**6**			**PROGRAM**			**#REF!**		-		**72.500.000**		115760000										**-**			-		
		2	**10**	**6**	02.01		**Penetapan Subjek**			**#REF!**		-		**72.500.000**		115760000		20.416.650,00		23.374.600						**43.791.250**			-		
		2	10	6	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah bidang tanah objek landreform (TOR) yang siap direstribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		#REF!			300 Bidang	72.500.000		115760000		20.416.650,00		**23.374.600**						**43.791.250**			-		
																		584.070.468,00		519.516.208						1.103.586.676			-		
T O T A L										23.690.969.719		11.603.874.556,40		13.681.088.030												-					
															Rata-rata capaian kinerja (%)																
															Predikat kinerja																
Faktor pendorong keberhasilan kinerja											:	*(tulis disini*																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja											:	*(tulis disini*																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya											:	*(tulis disini*																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya											:	*(tulis disini*																			

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Perkimtan Triwulan II pada Tabel 2.1 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja Program/kegiatan/subkegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dan sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya, untuk realisasi fisik sudah terlaksana namun realisasi keuangan masih 0 karena keterbatasan pecairan Penggantian Uang/GU yg dibatasi 50% sehingga pembayaran mengalami penundaan

2. Kinerja Program/kegiatan/subkegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu Program Pengembangan Perumahan pada sub kegiatan Identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten dan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus mengalami keterlambatan karena masih pada tahap perencanaan dan identifikasi lokasi pelaksanaan kegiatan
   pada triwulan III akan dilaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan

3. Kinerja Program/kegiatan/subkegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu Program Kawasan Permukiman pada sub kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh karena adanya pengurangan anggaran pada kegiatan ini pada anggaran pergeseran III sehingga belum bisa dilaksanakan Kerjasama dengan pihak Ketiga. butuh penyesuaian anggaran sesuai yg dibutuhkan pada anggaran perubahan sehingga kegiatan bisa dilaksanakan. dibutuhkan komitmen Tim anggaran Daerah untuk memprioritaskan kegiatan

4. Kinerja Program/kegiatan/subkegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, kegiatan ini masih pada tahap penyusunan perencanaan dan identifikasi masyarakat penerima bantuan sehingga triwulan 3 akan dilaksanakan percepatan terhadap kegiatan ini sehingga masyarakat bisa segera merasakan dan menerima manfaat

5. Kinerja Program/kegiatan/subkegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, masih pada tahap persiapan pelaksanaa diantaranya;
   a. Penetapan lokasi kegiatan
   b. penunjukan pelaksana
   c. penyusunan perencanaan

6. Kinerja Program/kegiatan/subkegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee pada sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota belum bisa dilaksanakan karena adanya keterbatasan dokumen/peta lokasi kegiatan yang akan menjadi objek pemberian rekomendasi atas tanah R

7. Kinerja Program/kegiatan/subkegiatan Pengelolaan Izin Membuka Tanah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah outputnya adalah jumlah sertifikasi bidang tanah aset pemerintah daerah, sampai kondisi triwulan 2 serapan anggaran masih belum optimal karena Pengsertifikatan tanah sangat tergantung BPN (Badan PertanahanNasional)

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja dan Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kab. Dharmasraya tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Dinas Perkimtan menurun dari Pagu Renja Dinas Perkimtan Tahun 2025 Kab. Dharmasraya yang semula Rp. 11.387.199.056,00 menjadi APBD Awal Dinas Perkimtan Kab. Dharmasraya Tahun 2025 sebesar Rp. 7.389.308.178,65,- selanjutnya pagu pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkimtan Tahun 2025 direncanakan menjadi Rp. 5.988.080.658,65,-.hal ini merupakan dampak implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif terlihat pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perkimtan Kab. Dharmasraya Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							11.387.199.056,00	7.389.308.178,65	5.988.080.658,65							12.213.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.087.199.056,00	7.179.308.178,65	5.769.940.658,65							11.863.000.000,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							11.087.199.056,00	7.179.308.178,65	5.769.940.658,65							11.863.000.000,00	
1	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				A nilai	A nilai	3.097.855.000,00	3.134.103.120,00	3.005.101.720,00							3.237.000.000,00	
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-			16 orang	16 orang	1.890.000.000,00	2.161.168.000,00	2.161.168.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.990.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.890.000.000,00	2.161.168.000,00	2.161.168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.990.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	-			3 orang	3 orang	30.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-			12 bulan	12 bulan	299.855.000,00	190.628.000,00	190.628.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.855.000,00	5.000.000,00	3.395.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	46.273.000,00	23.115.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	7.500.000,00	3.753.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	15.550.000,00	7.775.100,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	160 Laporan	160.000.000,00	101.305.000,00	59.188.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			180.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	160 Laporan	160.000.000,00	101.305.000,00	59.188.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			180.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah tersedianya paket pengadaan barang Aset Milik Daerah	-			35 unit	9 unit	160.000.000,00	47.600.000,00	47.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																				
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	9 Unit	100.000.000,00	47.600.000,00	4.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	516.000.000,00	448.047.800,00	448.047.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		517.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	160 Laporan	160.000.000,00	101.305.000,00	59.188.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			180.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah tersedianya paket pengadaan barang Aset Milik Daerah	-			35 unit	9 unit	160.000.000,00	47.600.000,00	47.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	9 Unit	100.000.000,00	47.600.000,00	4.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	516.000.000,00	448.047.800,00	448.047.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		517.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	12.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	40.000.000,00	46.250.000,00	46.250.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	50.000.000,00	9.880.000,00	9.880.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	209.529.320,00	209.529.320,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah				100 persen	100 persen	349.500.000,00	401.627.350,00	345.066.475,00							466.000.000,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			1 dokumen	1 dokumen	3.000.000,00	4.625.750,00	4.625.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				11 Dokumen	11 Dokumen	3.000.000,00	4.625.750,00	2.297.875,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	-			40 orang	40 orang	1.500.000,00	46.422.900,00	46.422.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		4.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																	
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				40 Orang	20 Orang	1.500.000,00	46.422.900,00	21.714.950,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			4.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-			4 rumah	4 rumah	200.000.000,00	169.654.950,00	169.654.950,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																	
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				10 Unit Rumah	3 Unit Rumah	200.000.000,00	169.654.950,00	159.799.475,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-			1 dokumen	1 dokumen	2.000.000,00	1.280.100,00	1.280.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		7.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.04	0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				4 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	1.280.100,00	615.050,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			7.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun jumlah rumah khusus yang difasilitasi pengelolaan kelembagaannya termasuk pemeliharaan jumlah rumah susun yang difasilitasi pengelolaan kelembagaanya termasuk pemeliharaannya	-			1 1 rumah khusus 1 rumah susun	1 1 rumah khusus 1 rumah susun	140.000.000,00	159.652.600,00	159.652.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki hunian/tempat tinggal (backlog)		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	159.652.600,00	150.648.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-			12 bulan	12 bulan	3.000.000,00	19.991.050,00	19.991.050,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																	
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	20 Dokumen	3.000.000,00	19.991.050,00	9.990.525,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

3	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	120.000.000,00	429.497.000,00	77.690.850,00							110.000.000,00	
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	jumlah dokumen hasil survei lokasi perumahan dan permukiman kumuh	-			1 dokumen	1 dokumen	120.000.000,00	429.497.000,00	429.497.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																	
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				11 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	429.497.000,00	77.690.850,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																	
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				11 Dokumen	11 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-				-	-	520.000.000,00	29.165.600,00	27.067.800,00							550.000.000,00	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	jumlah ketersediaan rumah layak huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Hektar	-			15 rumah	15 rumah	520.000.000,00	29.165.600,00	29.165.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																	
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				18 Unit Rumah	2 Unit Rumah	520.000.000,00	29.165.600,00	27.067.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-				-	-	6.999.844.056,00	3.184.915.108,65	2.315.013.813,65							7.500.000.000,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan dan kawasan permukiman yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjan fungsi hunian	-			50 lokasi	50 lokasi	6.999.844.056,00	3.184.915.108,65	3.184.915.108,65			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		7.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				52 Lokasi	52 Lokasi	6.999.844.056,00	3.184.915.108,65	2.315.013.813,65	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			7.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							300.000.000,00	210.000.000,00	218.140.000,00							350.000.000,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							300.000.000,00	210.000.000,00	218.140.000,00							350.000.000,00	
6	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00							150.000.000,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah	-			100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Berita Acara	20 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Pembangunan yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap direstribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				1 Bidang	10 Bidang	100.000.000,00	75.000.000,00	52.380.000,00								100.000.000,00	
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima tanah objek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 hektar	-			1 Bidang	10 Bidang	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				300 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	75.000.000,00	52.380.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

8	2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	-				40 Persen		100.000.000,00	135.000.000,00	165.760.000,00							100.000.000,00	
	2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	-	-			20 Bidang	-	100.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah																	
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah					20 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	135.000.000,00	165.760.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
												J U M L A H	**11.387.199.056,00**	**7.389.308.178,65**	**5.988.080.658,65**							**12.213.000.000,00**	

3.2 Target Indikator Kinerja Tahun 2024

Jika dilihat dari tujuan dan pencapaian sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025, maka lebih jelasnya target kinerja dipaparkan pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2 Target dan Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2024		Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi s.d TW 2	Target Renstra / Renja	Target Perubahan Renja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	Cakupan permukiman layak huni	%	88.65	84,15%	91.45	84,3	94.25	86,29	Akhir Tahun	97.05	97,05
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	90.40	91,17	92.80	91.49	95.20	91,6	Akhir Tahun	97.60	97,60
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	%	100.00	100	100.00	100	100.00	100	39.55	100.00	100
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	%	100.00	100	100.00	100	100.00	100	100	100.00	100
		Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	%	36.14	2,13	43.04	4.35	50.67	5,28	5,40	59.15	59,15
		Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	60.66	49,37	65.57	50.02	70.49	64,62	75.41	75.41	75,41
2	Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Hunian/Tempat Tinggal (Backlog)	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	%	10.01	1,14	11.12	15.34	12.51	5,8	12,8	14.30	14,30
3	Inventarisasi kepemilikan tanah	Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifkat	%	32.93	25,74	37.34	39,58	41.75	41,22	46.16	46.16	46,16

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2024		Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi s.d TW 2	Target Renstra / Renja	Target Perubahan Renja
				target	Realisasi	target	realisasi	target	realisasi	Realisasi s.d TW 2	Target Renstra / Renja	Target Perubahan Renja
4	masyarakat dan Pemerintah Daerah	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	%	6	-	7	-	8	-		9	
5	Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah milik Pemda	Jumlah kasus pertanahan milik P emda dan masyarakat yang terfasilitasi/di selesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah		BB		BB		AA			AA	
		Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) Dinas Perkimtan		BB		BB		AA			AA	

Sumber : LAKIP Dinas Perkimtan tahun 2022-2024, Monev RKPD Tw 2 Tahun 2025

Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Renstra Dinas Perkimtan tahun 2021-2026 memiliki 6 sasaran yaitu (1) Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman dengan 6 indikator kinerja anatara lain, Cakupan permukiman layak huni, Cakupan ketersediaan rumah layak huni, Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah, Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani, Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU (2) Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Hunian/Tempat Tinggal (Backlog), dengan indikator Cakupan rumah layak huni yang terjangkau (3) Inventarisasi kepemilikan tanah, dengan indikator Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifkat (4) masyarakat dan Pemerintah Daerah, dengan indikator Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir (5) Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah milik Pemda, dengan indikator Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan serta (6) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan 2 indikator antara lain Nilai AKIP Perangkat Daerah, Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) Dinas Perkimtan.

Jika dilihat dari gambaran capaian masing-masing indikator dan hasil evaluasi Renja Dinas Perkimtan hingga Tahun 2025 maka dapat dijelaskan adanya konsistensi peningkatan capaian terutama pada indikator kinerja cakupan permukiman layak huni dan Cakupan ketersediaan rumah layak huni, ini membuktikan bahwa program atau kebijakan perumahan efektif dalam meningkatkan kelayakan rumah dan penanganan pemukiman kearah yang lebih baik.

Kemudian Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah, terlihat tidak ada kegiatan rumah yang direhabilitasi namun persentase tetap 100 %, karena tidak ada kejadian bencana di tahun 2022 yang ditetapkan oleh Bupati. Diakhir tahun 2023 dikeluarkannya pernyataan bencana di kabupaten Dharmasraya oleh Bupati, sehingga di tahun 2024 1 (satu) langsung ditangani, sehingga ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana terpenuhi

Kemudian untuk kinerja bidang pertanahan terutama pada indikator Inventarisasi kepemilikan tanah, dengan indikator Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifkat menunjukkan kemajuan yang kuat dan konsisten dalam upaya Pemerintah Daerah untuk mengamankan aset tanahnya. Tren ini didorong oleh jumlah total aset yang stabil, sementara jumlah aset yang telah bersertifikat terus bertambah signifikan. pengamanan aset melalui sertifikasi sudah mencapai 41,22% di tahun 2024 meskipun belum optimal namun capain setifikasi aset tanah pemda terus mengalami peningkatan setiap tahun

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani pada tataran implementasi dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan anggaran. Keberhasilan pelaksanaan renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama dan terdapatnya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.

Perubahan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2025 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian kinerja serta digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah dapat terukur sehingga membantu dalam penyusunan rencana berikutnya secara bertahap dan berkesinambungan.

Masukan dan saran yang bersifat konstruktif akan menambah kesempurnaan dan kelengkapan rancangan dokumen ini dengan harapan akan mendukung kualitas substansi yang termuat didalamnya sekaligus menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait lainnya.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN 202...
TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) PERUBAHAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1.... PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.3.1. Maksud 3
1.3.2. Tujuan 3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 3

BAB 2.... *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT SAMPAI TRIWULAN II* 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Samapai Triwulan II 4

BAB 3.... MATRIK RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 3-1

3.1. Matrik Renja Perubahan Tahun 2025 3-1

BAB 4.... PENUTUP 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 2-1
Tabel 2- 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 2-1
Tabel 2- 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 18
Tabel 2-4 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 2-3
Tabel 2-5 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 2-5
Tabel 2-6 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 2-7
Tabel 2-7 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 2-9

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bab 1 memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Dokumen Renja PD

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perrubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Pemeritah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah:

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hingga Triwulan II Tahun 2025;

b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah;

c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah;

d. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran;

e. Acuan dalam penyusunan RKA P Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

BAB III Matrik Renja Perubahan Tahun 2025
Bab ini berisikan Program, Kegiatan, Subkegiatan Perubahan Tahun 2025

BAB IV Penutup

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DINSOSP3APPKB Kab. Dharmasraya sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan pagu dana pada Renja Tahun 2025 sebesar Rp.10.438.910.364,- guna mendukung 13 program, 26 kegiatan dan 66 subkegiatan selanjutnya menjadi sebesar Rp.11.951.467.070,- pada tahap Pergeseran III APBD Tahun 2025. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja DINSOSP3APPKB s/d Triwulan II

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	
3					*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*13=(9+10+11+12)*		*15=14/6 x100%*	
							K	Rp	K	Rp	K	RKPD	K	Rp	K	Rp
						Nilai AKIP DINSOSP3APPKB	**A (81)**									
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	**82,5**									
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial											
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.376.394.056**		**3.803.267.381**		**4.662.995.600**		**1.891.708.239**		**77%**
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**5.060.100.021**		**2.514.028.604**		**3.291.328.000**		**1.415.984.716**		**78%**
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	5.060.100.021	23 Orang/bulan	2.514.028.604	23 Orang/bulan	3.291.328.000	23 Orang/bulan	1.415.984.716		**78%**
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**306.435.819**		**311.286.954**		**247.743.500**		**99.696.905**		**134%**
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.266.151	1 Paket	4.871.000	12 Paket	5.000.000	3 Paket	1.512.000		**39%**
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.002.000	1 Paket	59.591.500	12 Paket	44.034.000	6 Paket	27.420.500		**174%**
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.881.664	1 Paket	10.499.000	12 Paket	7.500.000	3 Paket	1.206.000		**91%**
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	180 Paket	38.652.240	1 Paket	18.000.000	12 Paket	26.730.000	3 Paket	12.125.000		**78%**

1	06	01	2.06	0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	59.786.200	1 Paket	30.671.900	12 Paket	26.569.000	6 Paket	13.476.600		74%
1	06	01	2.06	0006					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	128.847.564	12 Laporan	187.653.554	12 Laporan	137.910.500	6 Paket	43.956.805		180%
1	**06**	**01**	**2.07**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**15.944.049**		**31.650.000**		**78.900.000**		**-**		**0%**
1	06	01	2.07	0005					Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang Disediakan	27 Unit	15.944.049		-	16 Unit	31.900.000		-		0%
1	06	01	2.07	0006					Pengadaan Pelatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	2 Unit	31.650.000	7 Unit	47.000.000		-		#DIV/0!
1	**06**	**01**	**2.08**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.770.343.164**		**757.012.544**		**831.754.500**		**278.666.489**		**59%**
1	06	01	2.08	0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Lembar/Buah	15.000.000	400 Laporan	4.000.000	10 Laporan	4.000.000	200 Laporan	2.000.000		40%
1	06	01	2.08	0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	81.169.704	12 Laporan	69.561.194	12 Laporan	69.993.300	6Laporan	31.800.989		125%
1	06	01	2.08	0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1.674.173.460	11 Laporan	683.451.350	12 Laporan	757.761.200	6 Laporan	244.865.500		55%
1	**06**	**01**	**2.09**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**223.571.003**		**189.289.279**		**213.269.600**		**97.360.129**		**128%**
1	06	01	2.09	0001					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.599.690	1 Unit	16.433.586	1 Unit	16.500.000		11.687.500		92%
1	06	01	2.09	0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit, 9 Unit	156.300.000	20 Unit	160.555.693	80 Unit	190.769.600	17 Unit	78.672.629		153%
1	06	01	2.09	0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	36.671.313	23 Unit	12.300.000	10 Unit	5.000.000	3 Unit	7.000.000		53%
1	06	01	2.09	0009					Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-		-	2 Unit	1.000.000		-		#DIV/0!

									Persentase PPKS yang tertangani	***99 Persen***									
1	**06**	**02**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**600.000.000**		**75.931.000**		**75.984.079**		**1.601.160**		**13%**
1	**06**	**02**	**2.03**					**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**			**600.000.000**		**75.931.000**		**75.984.079**		**1.601.160**		**13%**
1	06	02	2.03	0002					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	300.000.000	11 TKSK	60.949.300	11 Orang	60.984.150		-		**20%**
1	06	02	2.03	0004					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 LKS	300.000.000	12 Lembaga	14.981.700	15 Lembaga	14.999.929	3 Lembaga	1.601.160		**6%**
										Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	***100 Persen***									
1	**06**	**04**					**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)**		**975.000.000**		**397.283.398**	**100 Persen**	**363.023.835**		**157.051.097**		**57%**
1	**06**	**04**	**2.01**					**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)**		**860.000.000**		**338.863.398**	**100 Persen**	**321.763.835**		**132.546.597**		**55%**
1	06	04	2.01	0001					Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	550 Paket	137.500.000	25 Orang	12.793.450	50 Orang	13.105.000		14.400.000		**20%**

									Kabupaten/Kota (SPM)										
1	06	04	2.01	0002					Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	55 Orang	70.000.000	25 Orang	7.681.873	50 Orang	7.746.885		9.390.000		**24%**
1	06	04	2.01	0003					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	40 Unit	65.000.000	8 Orang	9.237.050	35 Orang	8.888.750		8.120.000		**27%**
1	06	04	2.01	0004					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	30 Orang	50.000.000	13 Orang	7.400.000	30 Orang	3.000.000		3.000.000		**21%**
1	06	04	2.01	0005					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	55 Orang	90.000.000	25 Orang	93.165.000	50 Orang	93.450.000		50.752.217		**160%**
1	06	04	2.01	0006					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	750 Orang	125.000.000	25 Orang	76.370.500	700 Orang	76.380.500		27.401.830		**83%**
1	06	04	2.01	0007					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	7 Orang	17.500.000		2.942.850	6 Orang	3.039.750		-		**17%**
1	06	04	2.01	0008					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	55 Orang	90.000.000	25 Orang	99.633.905	50 Orang	100.156.500		10.930.900		**123%**
1	06	04	2.01	0009					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	1 Unit	20.000.000		4.085.750	10 Orang	4.513.000		1.711.850		**29%**

1	06	04	2.01	0010					Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	1 Unit	120.000.000	1 Orang	2.334.100	3 Orang	2.745.050		2.695.700		4%
1	06	04	2.01	0011					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	17 Orang	15.000.000		4.862.500	17 Orang	5.130.900		1.164.100		40%
1	06	04	2.01	0012					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	24 Orang	60.000.000		18.356.420	22 Orang	3.607.500		2.980.000		36%
1	**06**	**04**	**2.02**					**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**		**115.000.000**		**58.420.000**		**41.260.000**		**24.504.500**		**72%**
1	06	04	2.02	0008					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	90.000.000		47.190.000	700 Orang	30.000.000		24.504.500		80%
1	06	04	2.02	0013					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	25.000.000		11.230.000	30 Orang	11.260.000		-		45%
1	**06**	**05**					**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**Persentase perlindungan dan jaminan sosial**		**1.150.000.000**		**97.042.021**		**99.410.150**		**12.375.250**		**10%**
1	**06**	**05**	**2.02**					**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Terverivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya**		**1.150.000.000**		**97.042.021**	**134.068 Jiwa**	**99.410.150**		**12.375.250**		**10%**
1	06	05	2.02	0002					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 persen	450.000.000	12869 KPM	44.986.356	25103 Keluarga	44.999.670	245.230 jiwa	4.054.300		11%
1	06	05	2.02	0003					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5600 KPM	700.000.000	13029 KPM	27.196.600	6531 Keluarga	29.411.500		-		4%
1	06	05	2.02	0004					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		-	25 Orang	24.859.065	62 Orang	24.998.980	9533 Orang	8.320.950		#DIV/0!

									Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	***100 Persen***								
1	**06**	**06**					**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan**		**680.000.000**		**76.947.800**	**100 Persen**	**77.548.450**		**65.189.030**	**21%**
1	**06**	**06**	**2.01**					**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota (SPM)**		**680.000.000**		**76.947.800**	**100 Persen**	**77.548.450**		**65.189.030**	**21%**
1	06	06	2.01	0001				Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	1000 Korban	240.000.000	528 Orang	49.935.000	1000 Orang	49.935.000		42.651.480	**39%**
1	06	06	2.01	0002				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	1000 Korban	200.000.000	25 Orang	8.669.950	1000 Orang	8.804.950		11.540.000	**10%**
1	06	06	2.01	0003				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	13 Tempat	130.000.000	5 Unit	8.053.500	13 Unit	8.153.500		4.448.200	**10%**
1	06	06	2.01	0004				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	90 Paket	45.000.000	35 Orang	6.243.200	80 Orang	6.337.500		3.360.000	**21%**
1	06	06	2.01	0005				Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	1000 Korban	65.000.000	500 Orang	4.046.150	1000 Orang	4.317.500		3.189.350	**11%**
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													**#DIV/0!**
2	08					Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												**#DIV/0!**

								Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	*100 Persen*									
								persentase Organisasi perempuan yang aktif	*100 Persen*									
								Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	*Madya*									
2	**08**	**02**					**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)**		**700.000.000**		**528.951.291**	**88,31**	**419.519.550**		**26.188.100**		**79%**
2	**08**	**02**	**2.03**				**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah organisasi perempuan yang dibina**		**700.000.000**		**528.951.291**	**17 Organisasi**	**419.519.550**		**26.188.100**		**79%**
2	08	02	2.03	0001			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	17 Organisasi	700.000.000	17 Organisasi	519.431.291	17 Lembaga	409.994.550		-		**74%**
2	08	02	2.03	0002			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		-		9.520.000	100 Orang	9.525.000	86 Orang	26.188.100		**#DIV/0!**
								Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	***Nindya***									
								rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	***100 Persen***									
								Rasio KDRT	***0,001 Persen***									
2	**08**	**03**					**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani**		**130.000.000**		**92.605.251**	**100 Persen**	**91.510.300**		**20.098.199**		**87%**
2	**08**	**03**	**2.01**				**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan**		**-**		**26.250.000**	**5 Kegiatan**	**26.600.000**		**-**		**#DIV/0!**

2	08	03	2.01	0001					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan KegiatanPencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	4 Dokumen	26.250.000	4 Dokumen	26.600.000		-		#DIV/0!
2	**08**	**03**	**2.02**					**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang sesuai standar**		**130.000.000**		**66.355.251**	**100 Persen**	**64.910.300**		**20.098.199**		**67%**
2	08	03	2.02	0002					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	130.000.000	44 Layanan	66.355.251	23 Layanan	64.910.300	14 Layanan	20.098.199		**67%**
2	**08**	**04**					**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**					**-**		**34.303.650**		**34.692.700**		**30.739.200**		**#DIV/0!**
2	**08**	**04**	**2.01**					**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**-**		**34.303.650**		**34.692.700**		**30.739.200**		**#DIV/0!**
2	08	04	2.01	0001					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		-	11 Perangkat daerah	34.303.650	5 Perangkat Daerah	34.692.700	6 Perangkat daerah	30.739.200		**#DIV/0!**
2	**08**	**06**					**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**Terwujudnya Kabupaten Layak Anak**		**-**		**53.275.900**	**Madya**	**55.766.000**		**3.600.000**		**#DIV/0!**
2	**08**	**06**	**2.01**					**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**				**-**		**53.275.900**		**55.766.000**		**3.600.000**		**#DIV/0!**

2	08	06	2.01	0001					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		-	17 Organisasi	53.275.900	4 Organisasi	55.766.000		3.600.000		#DIV/0!
2	**08**	**07**					**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus**		**-**		**412.911.150**	**100 Persen**	**438.489.700**		**106.930.204**		**#DIV/0!**
2	**08**	**07**	**2.01**					**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak**		**-**		**103.020.000**	**10 Kegiatan**	**103.400.000**		**8.400.000**		**#DIV/0!**
2	08	07	2.01	0004					Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		-	706 Orang	103.020.000	50 Orang	103.400.000	200 Orang	8.400.000		#DIV/0!
2	**08**	**07**	**2.02**					**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar**		**-**		**245.885.204**	**100 Persen**	**246.689.700**		**98.530.204**		**#DIV/0!**
2	08	07	2.02	0004					Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		-	91 Orang	245.885.204	90 Layanan	246.689.700	37 Layanan	98.530.204		#DIV/0!
2	**08**	**07**	**2.03**					**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase lembaga layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar**		**-**		**64.005.946**	**75 Persen**	**88.400.000**		**-**		**#DIV/0!**
2	08	07	2.03	0006					Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		-	158 Orang	64.005.946	50 Orang	88.400.000		-		#DIV/0!
2	14					Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															#DIV/0!
										persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) aktif	***100 Persen***									

									persentase kelompok tribina yang aktif	*100 Persen*									
2	**14**	**02**					**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**Persentase data kependudukan**		**132.500.000**		**220.473.550**	**90 Persen**	**222.000.000**		**35.985.000**		**179%**
2	**14**	**02**	**2.01**					**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Terbitnya Jukla/ Juknis kegiatan**		**12.500.000**		**28.473.550**	**75 Persen**	**30.000.000**		**-**		**228%**
2	14	02	2.01	0009				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	90 Persen	12.500.000	3 Satuan Pendidikan	28.473.550	3 Satuan Pendidikan	30.000.000		-		**228%**
2	**14**	**02**	**2.02**					**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			**120.000.000**		**192.000.000**		**192.000.000**		**35.985.000**		**174%**
2	14	02	2.02	0009				Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		-		-		-	6 Laporan	18.985.000		
2	14	02	2.02	0012				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000		-		**50%**
2	14	02	2.02	0013				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		-	12 Laporan	132.000.000	12 Dokumen	132.000.000	6 Dokumen	17.000.000		**#DIV/0!**
									Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	***73 Persen***									
									Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	***10 Persen***									
2	**14**	**03**					**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				**162.700.000**		**2.598.782.260**		**2.684.470.000**		**272.545.000**		**1765%**

2	**14**	**03**	**2.01**					**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**			**118.250.000**		**1.169.360.250**		**1.200.600.000**		**185.400.000**		**1146%**
2	14	03	2.01	0008				Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		-	132 Laporan	135.505.250	132 Laporan	140.000.000		-		**#DIV/0!**
2	14	03	2.01	0010				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		-	132 Laporan	524.870.000	132 Laporan	545.600.000	6Laporan	126.980.000		**#DIV/0!**
2	14	03	2.01	0011				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui RapatKoordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		-	12 Laporan	162.250.000	132 Laporan	165.000.000	3 Laporan	12.870.000		**#DIV/0!**
2	14	03	2.01	0012				Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	85 Persen	55.000.000	11 Dokumen	149.985.000	8 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	45.550.000		**356%**
2	14	03	2.01	0014				Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	90 Persen	63.250.000	4 Organisasi	196.750.000	4 Organisasi	200.000.000		-		**311%**
2	**14**	**03**	**2.02**					**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			**11.750.000**		**156.000.000**		**156.000.000**		**11.700.000**		**1427%**

2	14	03	2.02	0004					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	53 Persen	11.750.000	1560 Orang	156.000.000	937 Orang	156.000.000	35 Laporan	11.700.000		**1427%**
2	**14**	**03**	**2.03**					**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**				**32.700.000**		**844.172.010**		**898.620.000**		**75.445.000**		**2812%**
2	14	03	2.03	0001					Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	21.474.900	12 Laporan	21.600.000		-		**286%**
2	14	03	2.03	0003					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 Persen	25.200.000	2616 Orang	802.907.110	1000 Orang	857.220.000	345 Orang	75.445.000		**3486%**
2	14	03	2.03	0008					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		-	24 Laporan	19.790.000	12 Laporan	19.800.000		-		**#DIV/0!**
2	**14**	**03**	**2.04**					**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**				**-**		**429.250.000**		**429.250.000**		**-**		**#DIV/0!**
2	14	03	2.04	0002					Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		-	27 Dokumen	3.750.000	1 Dokumen	3.750.000		-		**#DIV/0!**
2	14	03	2.04	0006					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		-	27 Kampung KB	425.500.000	52 Kampung	425.500.000		-		**#DIV/0!**
										persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) aktif	***100 Persen***									

									persentase kelompok tribina yang aktif	*100 Persen*								
2	**14**	**04**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				**167.000.000**		**1.204.776.000**		**1.213.500.000**		**87.000.000**		**774%**
2	**14**	**04**	**2.01**					**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**167.000.000**		**291.276.000**		**300.000.000**		**-**		**174%**
2	14	04	2.01	0016				Pengelolaan Ketahan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			-		-		-				
2	14	04	2.01	0018				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)	100 Persen	167.000.000	31 Unit	291.276.000	50 Unit	300.000.000		-		**174%**
2	**14**	**04**	**2.02**				**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				**-**		**913.500.000**		**913.500.000**		**87.000.000**		**#DIV/0!**
2	14	04	2.02	0005				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		-	10 Laporan	435.000.000	10 Laporan	435.000.000	2 Laporan	87.000.000		**#DIV/0!**
2	14	04	2.02	0006				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		-	4785 Laporan	478.500.000	4785 Laporan	478.500.000		-		**#DIV/0!**

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan.

1. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial, merupakan salah satu tujuan mengurangi kemiskinan

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut salah satunya dapat berupa kemiskinan.

Tabel 2- 2 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mengurangi pemasalahan sosial di masyarakat						
Persentase PPKS yang tertangani	Persen	90	75	96	97	97,7

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial P3APPKB Tahun 2024

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari target 97% terealisasi 97,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa dari seluruh PPKS ditargetkan sebanyak 113.438 orang dari 119.816 orang sudah ditangani pada tahun 2023. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dalam rangka peningkatan kapasitasnya dalam melakukan verifikasi dan validasi data DTKS Kabupaten Dharmasraya tahun 2023;
- Verivali telah dilaksanakan walaupun tidak semua jorong menyelesaikannya, namun kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan telah melakukan perbaikan data yang disampaikan ke pusat setiap bulannya melalui aplikasi SIKS-NG online;
- Untuk peningkatan kapasitas pengelola data Kabupaten dilaksanakan kegiatan pembelajaran ke Kementerian Sosial RI dan Pusdatin Kemensos RI di Jakarta;
- pendampingan tenaga sosial dalam melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran Bansos di lapangan;
- Pembinaan terhadap posdaya yang sudah terbentuk dan mengaktifkan posdaya yang sudah terbentuk tapi tidak aktif, disamping itu juga ada kegiatan fasilitasi pembagian hewan qurban kepada seluruh nagari untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu;
- Pembinaan untuk akreditasi LKS, dari 12 LKS yang ada 3 LKS sudah terakreditasi.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada tahun 2023 sebesar Rp.129.104.000 dan terealisasi sebanyak Rp. 128.863.328 atau 99,81%.

2. Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana.

Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana merupakan SPM bidang Sosial (Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial). Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa SPM Bidang Urusan Sosial meliputi:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2- 3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana						
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	-	100	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	Persen	-	100	100	100	100

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial P3APPKB Tahun 2024

Dalam pencapaian target ini, kegiatan yang dilakukan berupa: Bantuan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti.

Kondisi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal mulai tahun 2020 hingga saat ini bisa dilaksanakan 100%. Dalam setiap tahunnya SPM Bidang Sosial sudah ditetapkan target Penerima Manfaat SPM. Target tersebut sesuai dengan data yang telah diterima dari stake holder terkait dan pilar-pilar sosial dengan membuat skala prioritas mana yang masuk dalam kondisi terlantar yakni Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Tuna Sosial. Jika data yang diterima melibihi dari target SPM tahunan yang telah ditentukan maka akan dicarikan sumber-sumber pendanaan yang lain yakni yang berasal dari Kementerian Sosial, BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dan sumber-sumber lain yang sah.

3. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: “Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan anak dalam pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan Gender”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah diamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender melalui analisis gender. Untuk melaksanakan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender melalui analisis gender maka dibentuk focalpoint di masing-masing OPD.

Focal Point mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja;
c. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada masing-masing unit kerja.
d. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada unit kerja.

Organisasi perempuan bertujuan untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak perempuan di bidang politik, Ekonomi, Hukum, Seksual, Reproduksi, Pendidikan Agama, Sosial dan Budaya serta lingkungan hidup. Dalam pembangunan suatu daerah, pemerintah tidak akan dapat melakukannya sendiri maka sebuah organisasi perempuan perlu berpartisipasi untuk ikut serta dalam pembangunan.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender.

Tabel 2- 4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan						
Persentase keaktifan focalpoint perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100
Persentase organisasi perempuan yang aktif	Persen	90,47	95,23	100	100	100
Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat/Nilai	-	-	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	Pratama

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial P3APPKB Tahun 2024

Keaktifan focal point perangkat daerah ini didukung dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan advokasi PPRG bagi anggota focal point se-kabupaten Dharmasraya yang dilaksanakan setiap tahun. Focal Point di setiap OPD yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut telah mampu memahami apa tugas pokoknya dan mampu untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan program yang ada pada OPD masing-masing. Ini dibuktikan dengan hasil penilaian dari Kantor Sekretariat Presiden (KSP) tentang Indikator Perencanaan Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender khususnya pada indikator penyusunan GAP dan GBS masing-masing OPD. Pada tahun 2023, seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan aktif melaksanakan pelaporan GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*).

Tercapainya Kinerja pada tahun 2023 didukung oleh Kegiatan yang sudah dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 yaitu kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota anggaran dana sebesar Rp.29.959.000,- dengan realisasi sebesar Rp.29.743.700,- (99,28%). Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas Focal Point Perangkat Daerah tahun 2023 adalah Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sekaligus Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Focal Point Perangkat Daerah.

Selanjutnya, Persentase Organisasi Perempuan yang aktif adalah sebesar 100%. Yang menjadi sasaran adalah organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Dharmasraya yang aktif dalam pemberdayaan perempuan yaitu sebanyak 17 Organisasi.

Tercapainya Kinerja pada tahun 2023 didukung oleh Kegiatan yang sudah dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 yaitu kegiatan

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran dana sebesar Rp.709.770.000,- dengan realisasi sebesar Rp.706.115.133,- (99,48%). Kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi perempuan diantaranya, pembinaan–pembinaan, study pembelajaran, sharing informasi dan bimtek pemberdayaan perempuan.

Pencapaian Indikator Kinerja tingkat Kategori Capaian APE didukung dengan adanya kebijakan, program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Dharmasraya. Adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta peraturan pelaksana dari PERDA tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan pelaksanaan strategi PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2023 yaitu Predikat / penghargaan APE kategori pratama berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas keberhasilan dan prakarsa dalam kaitannya dengan pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah.

4. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: “Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan anak dalam pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan Gender”.

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

KDRT adalah Tindakan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan. Perempuan korban kekerasan yang tertangani adalah perempuan yang mengalami kekerasan baik secara fisik, psikis, ekonomi, seksual yang telah diberikan pendampingan untuk pemulihan fisik, psikologis dan rehabilitasi sosial oleh lembaga layanan perlindungan perempuan di daerah.

Tabel 2- 5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak						
Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/Nilai	Pratama	Tidak ada penilaian	Madya	Madya	Madya
Rasio KDRT	Persen	100	100	100	100	100
Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Predikat/Nilai	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial P3APPKB Tahun 2024

Pencapaian Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Layak anak didukung dengan adanya kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Dharmasraya. Adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta peraturan pelaksana dari PERDA tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Disamping itu telah dibentuk kelembagaan (Gugus Tugas) Kabupaten Layak Anak yang bertugas untuk menyusun perencanaan serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.

Tercapainya Kinerja pada tahun 2023 didukung oleh Kegiatan yang sudah dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 yaitu kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran dana sebesar Rp. 66.409.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.803.221,- (91,55%). Kegiatan pengembangan Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan pada tahun 2023 diantaranya rapat-rapat gugus tugas KLA, Bimtek KLA bagi Gugus Tugas KLA, Sosialisasi Masjid Ramah Anak, rapat Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak serta kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak.

Pada tahun 2023 realisasi cakupan perempuan korban kekerasan yang tertangani mencapai 100%, ini berarti bahwa semua perempuan korban kekerasan di Kabupaten Dharmasraya sudah mendapatkan layanan pendampingan. Cakupan ini disebabkan karena sudah ada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kab. Dharmasraya. UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan :

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan sementara;
5. Mediasi;
6. Pendampingan korban.

UPTD PPA juga telah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, diantaranya Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) dan rumah perlindungan sebagai tempat penampungan sementara bagi perempuan korban kekerasan.. Disamping itu pada tahun 2023, Dinas SOSP3APPKB juga menyediakan layanan pengaduan secara online bagi masyarakat yang akan melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan melalui link pengaduan bit.ly//salingsappa sehingga memberi kemudahan bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan layanan. Pada tahun 2023 terdapat 21 kasus kekerasan terhadap perempuan dan telah mendapatkan layanan penjangkauan dan pendampingan. Data tersebut di atas diperoleh dari data UPTD PPA kab. Dharmasraya Tahun 2023 sebanyak 21 Kasus.

Angka kasus KDRT di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 yaitu 9 kasus. Hal ini terjadi salah satunya karena kegiatan pencegahan kekerasan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang KDRT, baik pencegahan dan penanganannya. Namun dapat juga menggambarkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan KDRT dikarenakan berbagai faktor. Sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah kekerasan di dalam rumah tangga masih merupakan tabu bagi keluarga dan tidak perlu di laporkan. Kasus KDRT merupakan fenomena sosial yang sangat memprihatinkan, beranjak dari hal tersebut sejak tahun 2021 Dinas SOSP3APPKB melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat inovasi SALING SAPA (Konsultasi Pelayanan Keliling Sahabat Perempuan dan Anak) yang memberikan layanan konseling bagi perempuan korban KDRT dan layanan pengaduan secara online yang menjamin kerahasiaan pelapor melalui link pengaduan bit.ly//salingsappa.

Analisa penyebab keberhasilan yang dilakukan:

1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik kepada korban maupaun masyarakat secara umum;
2. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga memberikan efek jera dan memanilisir terjadinya kekerasan berulang;
3. Penguatan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan pelayanan terbaik dan mampu menangani berbagai kasus kekerasan;
4. Pengembangan kerjasama yang erat antara Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan lembaga – lembaga terkait, seperti Kepolisian, rumah sakit, dan lembaga advokasi;
5. Pemberian akses yang lebih muda bagi korban kekerasan untuk memperoleh bantuan dan informasi dari Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
6. Penguatan regulasi dan kebijakan yang melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, serta mempercepat proses peradilan bagi korban kekerasan.

5. Meningkatnya jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu.

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need adalah persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi.

Tabel 2- 6 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi						
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	79,54	81,10	83,43	65,45	70,19
Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	Persen	10,75	10,29	8,17	20,76	12,53

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial P3APPKB Tahun 2024

Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022 adalah 65,53%, sedangkan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 70,19%, Hal ini di Karenakan sudah adanya pemerataan Pelayanan KB di setiap wilayah, mulai dari Nagari sampai ke tingkat Jorong. Serta Koordinasi yang baik antar OPD (Dinas Kesehatan, DPMD, Camat, Nagari dan Lintas sektor terkait) dalam keterpaduan pelaksanaan Program (kegiatan Germas dan Galcitas (tertinggal, terpencil dan perbatasan) sehingga meningkatkatnya Jumlah CPR di Kabupaten Dharmasraya.

Realisasi capaian dengan indikator Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun telah mencapai target bahkan melebihi target yang di tetapkan. Untuk cakupan peserta KB Aktif terealisasi sebesar 70,19 % dari target 66,51 % yaitu pencapaiannya 105,5 %. Pada Tahun 2023 peserta KB aktif berjumlah 25.675 orang dengan jumlah pasangan usia subur 36,578 orang. Adapun peserta KB aktip permix kontrasepsi adalah sebagai berikut : IUD (1.036), MOW (920), MOP (29), dan Implant (5253).

Target ini dapat tercapai dikarenakan kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi cukup tinggi, namun masih perlu diadakan kegiatan Advokasi dan KIE KB kepada seluruh peserta KB baik melalui petugas penyuluh KB di lapangan maupun melalui petugas medis yang melayani KB, sehingga tidak terjadi droup out peserta KB aktif. Hal ini dapat dilaksanakan dengan program Keluarga berencana dengan kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga kurang mampu, Pelayanan KIE, dan Pembinaan Keluarga Berencana.

Adapun faktor yang mendukung peningkatan angka CPR dari tahun sebelumnya adalah:

1. Adanya Petugas PLKB dan PPKBD/Sub.PPKBD tingkat Kecamatan dan Jorong
2. Adanya Kader Andalan di Setiap Kecamatan dan Kader Pembantu PLKB Non ASN
3. Adanya Kegiatan Pelayanan KB di Faskes (RSU, Puskesmas, Polindes, Pokesri, Dan Klinik Swasta, Bidan Praktek Mandiri dan Perusahaan-perusahaan Swasta) yang ada di Kabupaten Dharmasraya;
4. Adanya Kegiatan Pelayanan KBKR Bersama Mitra Kerja Dalam rangka hari Kontrasepsi Sedunia dan Hari Vasektomi sedunia;
5. Adanya Kegiatan Pelayanan Serentak melalui Momentum Bakti Sosial :
6. Pelayanan KB Serentak Bulan Kreativitas PLKB bln Januari s/d Maret 2023;
7. Pelayanan KB serentak Bakti Sosial IBI.KB-KES. Bulan Februari s/d Juni 2023;
8. Pelayanan KB Serentak Bakti Sosial TNI.KB-KES.Bulan Juli s/d September 2023;
9. Pelayanan KB serentak Bhakti Sosial Kesatuan Gerak PKK. KB-KES;
10. Pelayanan Daerah Perbatasan;
11. Pelayanan KB dalam rangka Menyambut World Contraception Day (WCD) atau Hari Kontrasepsi Sedunia;
12. Pelayanan KB Sejuta Akseptor Tahun 2023.

Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (Unmet-Need) terjadi penurunan dari 20,76% tahun 2022 turun menjadi 12,53% pada tahun 2023 dimana Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai alat kontrasepsi.

Upaya yang dilakukan adalah Kegiatan Pelayanan Serentak melalui Momentum Bakti Sosial :

1. Pelayanan KB Serentak Bulan Kreativitas PLKB Bulan Januari s/d Maret 2023;
2. Pelayanan KB serentak Bakti Sosial IBI.KB-KES Bulan Februari s/d Juni 2023;
3. Pelayanan KB Serentak Bakti Sosial TNI.KB-KES Bulan Juli s/d September 2023;
4. Pelayanan KB serentak Bhakti Sosial Kesatuan Gerak PKK. KB-KES;
5. Pelayanan Daerah Perbatasan;
6. Pelayanan KB dalam rangka Menyambut World Contraception Day (WCD) atau Hari Kontrasepsi Sedunia;
7. Pelayanan KB Sejuta Akseptor Tahun 2023.

Realisasi capaian dengan indikator cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) 12,53 % Telah mencapai target yang ingin dicapai yaitu 14,03 % Pengukuran realisasi dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pasangan usia subur tak ber KB (ingin anak tunda + tidak ingin anak lagi) dengan jumlah pasangan usia subur usia 15 – 49 Tahun.

6. Meningkatnya kesejahteraan keluarga

UPPKA adalah kelompok usaha ekonomi produktif, yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera,baik pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan. Tribina (BKB, BKR, BKL) merupakan program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang, baik secara fisik, motorik, kecerdasan emosional, dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya kepada balita dan anak remaja.

Tabel 2- 7 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kesejahteraan keluarga						
Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) aktif	Persen	100	100	100	100	100
Persentase kelompok tribina yang aktif	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial P3APPKB Tahun 2024

Persentase Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) aktif, pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya pembinaan kepada Kelompok UPPKA di setiap wilayah, dan bantuan dana dari Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupa ATTG Kompor Gas, Oven dan Kuali Besar (Kanca) di Kenagarian Batu Rijal Kecamatan Padang laweh.

Pada tahun 2023 Persentase Kelompok Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) aktif adalah 100% dengan realisasi 100 % dimana UPPKA merupakan suatu kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat yang sederhana, dengan tujuan:

1. Untuk mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif,;
2. Untuk mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga;
3. Untuk membantu meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Untuk mewujudkan keluaraga kecil, bahagia, dan sejahtera;
5. Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Keluarga.

Pencapaian 100% ini dikarenakan adanya Kelompok UPPKA memberikan kesempatan keluarga yang berpendapatan rendah untuk berkreatifitas dan berinovasi menghasilkan suatu karya contohnya kerajinan tangan guna meningkatkan pendapatan keluarga melalui pembinaan di setiap kelompok UPPKA dan mitra kerja dengan pembinaan OPD (KUMPERDAG, DINKES) dan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

Efisiensi dalam pekerjaan, waktu, dan ekonomi kelompok UPPKA yang mana pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dengan mempelajari terlebih dahulu. Sedangkan efisiensi secara ekonomi yang telah dilakukan masing-masing kelompok penggiat usaha di era kemajuan teknologi saat ini dapat menunjang usaha dari kelompok, dengan tujuan menggunakan sumber daya sebaik mungkin dengan hasil yang maksimal. Sosialisasi pengelolaan keuangan yang telah dilakukan sejauh ini secara efisiensi penggunaan sumber daya dalam ekonomi telah dapat tercapai saat pemasukan masing-masing kelompok usaha lebih banyak daripada pengeluarannya serta lebih mandiri dalam mengembangkan/meningkatkan ekonomi keluarga. Selanjutnya untuk mencapai efisiensi, biaya produksi usaha kelompok dalam pasar harus paling kecil agar mendapatkan keuntungan lebih besar. Contohnya dalam usaha meningkatkan efisiensi umumnya dihubungkan dengan biaya yang lebih kecil dalam produksi. Adapun faktor yang mendukung Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) aktif adalah :

1. Adanya Pembinaan pada Kelompok UPPKA dari OPD KB Kabupaten dan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat;
2. Adanya Operasional Kader UPPKA dari Nagari setempat ;
3. Adanya keterpaduan Program OPD terkait (Kumperdag, DPMD, Dinas Kesehatan, dan Loka POM) dalam meningkatkan pendapatan ekonomi Akseptor.

Dari 43 kelompok UPPKA yang ada sudah dilakukan sosialisasi dan Pembinaan di setiap Kelompok sehingga Kelompok tersebut mampu menghasilkan karyanya masing- masing, dengan adanya Program Keluarga Berencana pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal pada sub menu kegiatan Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (Poktan) dengan Pagu Dana sebesar Rp.337.500.000,- dengan realisasi Rp. 337.500.000 (100%). Persentase kelompok tribina

yang aktif pada tahun 2022 dan 2023 mencapai 100%. ini disebabkan adanya pembinaan yang terpadu dan sosialisasi yang Continue ke setiap wilayah kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) di Kabupaten Dharmasraya dengan melalui pelatihan-pelatihan ke kelompok Tribina yang ada (BKB, BKR, BKL).

Pada tahun 2022 dan 2023 Pesentase Tribina yang Aktif adalah 100 % dengan capaian realisasi 100%. Dimana kelompok tribina itu adalah BKB (Bina Kelompok Balita), BKR (Bina Kelompok Remaja) dan BKL (Bina Kelompok Lansia). Kelompok BKB Merupakan upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina keluarga balita. BKR merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalau komunikasi defektif anatas orang tua dan anak remaja. Sedangkan BKL merupakan kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pangasuhan, perawatan, dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahetraannya.

Pencapaian indikator kinerja 100 %, ini dikarenakan adanya Sosialisasi dan Pembinaan yang terpadu terhadap keluarga yang punya anak Balita, keluarga yang punya anak remaja dan keluarga yang punya lansia dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada keluarga untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak balita, remaja serta memberdayakan lansia yang ada pada keluarga. Dan dengan dilengkapinya sarana pra sarana Kader TRI Bina seperti Contoh BKB KIT, BKL KIT dan buku-buku panduan untuk Kader atau kelompok Tribina. Pembahasan pada kelompok BKB adalah penyuluhan/ Advokasi KIE Kecerdasan, komunikasi pasif, aktif dan gerakan Motorik. Pada kelompok BKR adalah penyuluhan/ Advokasi KIE komunikasi Orang tua dengan remaja, tentang Kebersihan dan kesehatan diri remaja, bina Keluarga Remaja dalam mewujudkan Generasi Berencana.

Sedangkan pembahasan BKL adalah penyuluhan/ Advokasi KIE 7 dimensi lansia tangguh ditinjau dari spritual, intelektual, fisik, sosialisasi dan lingkunganmewujudkan lansia tangguh dengan meningkatkan 8 fungsi agama, pembinaan fisik bagi lansia. Adapun faktor yang mendukung Kelompok Tribina yang aktif adalah :

1. Adanya Pembinaan pada Kelompok Tribina oleh tenaga Penyuluh KB, Kader, Bidan Desa dan Lintas Sektor terkait;
2. Adanya bantuan dana dan alat media dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat pada kelompok tribina dalam bentuk BKB Kit dan BKL Kit;
3. Adanya Operasional Kader tribina yang sumber dananya dari dana Nagari.

Dari 237 kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) telah dilakukan sosialisasi dan Pembinaan di setiap Kelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada keluarga untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak balita, remaja serta memberdayakan lansia yang ada pada keluarga. Dimana kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) kemudian hal ini didukung dengan adanya Program Keluarga Berencana pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal pada sub menu kegiatan Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (Poktan) dengan Pagu Dana sebesar Rp. 337.500.000,- dengan realisasi Rp. 337.500.000 (100%).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.3.1. Isu strategis

A. Urusan Sosial
- Masih adaya kemiskinan ekstrim;
- Belum terakreditasinya semua lembaga;
- Percepatan UHC untuk kabupaten Dharmasraya melalui data DTKS dan Non DTKS;
- Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) dan kewirausaan.

B. Urusan PPPA dan UPTD PPA
- Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) rendah;
- Masih minimnya program kegiatan responsif gender;
- Saranan prasarana pemenuhan hak anak atas pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang belum memadai;
- Tingginya kasus kekerasan pada anak;
- Masih terdapat kasus perkawinan usia anak;
- Partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak belum optimal;
- Masih perlunya koordinasi stakeholder dan lontas sector terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Masih perlunya dukungan stakeholder dan lintas sector terkait dalam penjangkauan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti: pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
- Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak.

C. Urusan PPKB
- Sebaran penduduk yang tidak merata di Kabupaten Dharmasraya;
- Masih kurangnya pemahaman petugas dalam pelaksanaan pelaporan dalam bentuk aplikasi;
- Kurangnya peran dan kontribusi OPD lain terhadap pengembangan kampong keluarga berkualitas;
- Pemahaman masyarakat terhadap Medis Operasi Pria (MOP) belum maksimal yang dilator belakangi oleh pendidikan budaya dan sosial;
- Belum tersedianya *laparascopy* yang lengkap untuk melayani pasien MOW walaupun Dokter kandungan sudah dilatih oleh BKKBN Provinsi Sumatera Barat;
- Belum adanya Dokter spesialis *Urologi* yang terlatih di Kabupaten Dharmasraya untuk menangani pasien MOP.

BAB 3. MATRIK RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

3.1. Matrik Renja Perubahan Tahun 2025

Bab ini berisikan Program, Kegiatan, Subkegiatan Perubahan Tahun 2025. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Kerja Perubahan DINSOSP3APPKB Tahun 2025 sebagaimana **TERLAMPIR**.

BAB 4. PENUTUP

Rencana kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun sebagai pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Akuntabilitas kinerja instansi akan dapat dinilai dari pencapaian kegiatan/ program ini yang pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban pada tingkat instansi maupun secara keseluruhan menjadi tanggungjawab kinerja Bupati sebagai Kepala Daerah.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DINSOSP3APPKB sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

Beberapa kaidah pelaksanaan Renja DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DINSOSP3APPKB agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renja dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada DINSOSP3APPKB dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja DINSOSP3APPKB, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renja secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renja DINSOSP3APPKB sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

   Demikian RENJA PERUBAHAN DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dan menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan teknologi akan berkembang pesat dalam kurun waktu yang cepat, maka RENJA ini dibuat dengan seksama dan untuk disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan kedepan.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI

KATA PENGANTAR

Bidang kependudukan merupakan salah satu hal pokok dan penting dalam kerangka dimensi pembangunan, karena segala aspek perencanaan pembangunan bertitik tolak dari dan untuk penduduk. Maka perencanaan pembangunan tidak mungkin dapat tersusun suatu yang baik, apabila manajemen kependudukan tidak dikelola secara baik dan benar.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan penduduk diperlukan suatu perencanaan yang matang, khususnya kebijakan dalam bidang administrasi kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Program dan Kegiatan.

Pengembangan strategi dan implementasinya merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, karena dalam Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sehubungan dengan hal itu, Syukur Alhamdulillah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 yang mencerminkan dan menjabarkan kegiatan secara umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Amin.

Dharmasraya, 2024

KEPALA DINAS,

ABDI AMRI, SE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19641231 198612 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 3
1.2. Landasan Hukum..... 4
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... 6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... 8
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten 11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 11

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PRG RAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 14
3.3. Program dan Kegiatan 14

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 16

BAB V. PENUTUP 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 serta pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang

akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya secara berkesinambungan.

Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya hingga Tahun 2024 dan prediksi Tahun 2025
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Pada sub bab ini menyajikan tabel e.60 evaluasi terhadap hasil capaian RKPD tahun 2024 (terlampir), serta dilengkapi dengan narasi tentang capaian pelaksanaan sub kegiatan dan target indikator program dan indikator kegiatan selama tahun 2024.

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL KABUPATEN DHARMASRAYA

DAN PENCAPAIAN RENSTRA DISDUKCAPIL KABUPATEN DHARMASRAYA s/d TAHUN 2024

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PD TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD SAMPAI TAHUN 2020	
							TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN REALISASI RENSTRA
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Pemerintahan Umum								
X	**XX**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**	**90%**						
X	XX	01	01	- Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dan materai	500 materai dan surat/paket	500 materai dan surat/paket	490 materai dan surat/paket	98%	500 materai dan surat/paket	2500 materai dan surat/paket	90%
X	XX	01	02	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah belanja listrik . Air, VPN IP dan internet kantor	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	30 Jenis	95%
X	XX	01	03	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki	6 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	46 Jenis	85%
X	XX	01	04	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional	8 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	8 Unit	52 Unit	95,9%
X	XX	01	05	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pengelola keuangan	15 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	100%	12 Orang/bula	80 Orang	90%
X	XX	01	06	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan	25 jenis	25 jenis	25 jenis	100%	25 jenis	125 Jenis	96%
X	XX	01	07	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	52 Jenis	52 Jenis	52 Jenis	100%	52 Jenis	300 Jenis	97%
X	XX	01	08	- Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4 Jenis, 8000 lembar	4 Jenis, 8000 lembar	4 Jenis, 8000 lembar	100%	4 Jenis, 8000 lembar	20 Jenis 40.000 lembar	95%
X	XX	01	09	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	30 Jenis	95%

X	XX	01	10	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah belanja surat kabar/majalah	720 Eksemplar	720 Eksemplar	720 Eksemplar	100%	720 Eksemplar	3600 eksemplar	95%
X	XX	01	11	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah belanja makan minum harian pegawai, rapat dan tamu	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	60 Jenis	94%
X	XX	01	12	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti	40 kali	40 kali	40 kali	100%	40 kali	240 kali	85%
X	**XX**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya sarana prasarana Aparatur**	**90%**		**-**				
X	XX	02	01	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Belanja Peralatan gedung kantor	7 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	30 Jenis	85%
X	XX	02	02	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / operasional	Jumlah Belanja Penggantian suku cadang Kendaraan dinas/operasional	9 Unit	8 Unit, 1 Orang Sopir	7 Unit, 1 Orang Sopir	100%	8 Unit, 2 Orang Sopir	50 Unit,	80%
X	XX	02	03	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor	1 paket	-	-	-	1 paket	3 Paket	85%
X	XX	02	04	- Penyediaan Perlengkapan kantor	Jumlah belanja perlengkapan kantor	6 jenis	-	-	-	-	10 Jenis	80%
X	**XX**	**03**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya kualitas Sumber Daya aparatur sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi**	**90%**		**-**				
X	XX	03	01	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah belanja kursus, pelatihan sosialisasi dan bimtek aparatur disdukcapil	10 kali	8 kali	8 kali	100%	10 kali	80 kali	75%
X	**XX**	**04**		**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Meningkatnya Jumlah Pengurusan dan tingkat keakurasian dokumen kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil**	**90%**		**-**				**3**
X	XX	04	01	- Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu	Jumlah Perangkat pendukung untuk pengoperasian SIAK	3 Jenis	-	-	-	-	20 jenis	75%
X	XX	04	02	- Penerapan KTP berbasis NIK Nasional	Jumlah Pelayanan KTP-el berbasis NIK Nasional	20.000 keping	25.000 keping	23.500 keping	94%	20.000 keping	100.000	83%
X	XX	04	03	- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	-	6 Jenis	86,6%
X	XX	04	12	- Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi dan Jumlah Peserta	11 sosialisasi	11 sosialisasi	11 sosialisasi	100%	11 sosialisas	55 sosialisasi	80%
X	XX	04	31	- Pelayanan Administrasi Kependudukan secara online	Jumlah Pelayanan secara online (aplikasi)	5000 pelayanan	-	-	-	5000 pelayanan	20.000	65%

X	XX	04	11	- Penataan Penduduk Rentan	Jumlah Penduduk Rentan yang terlayani	50 kk	-	-	-	-	-	0%
X	XX	04	39	- Pelayanan Dokumen Kependudukan	Jumlah Pelayanan Dokumen Kependudukan	40.000 dokumen	-	-	-	40.000 dokumen	200.000 dokumen	60%
X	XX	04	40	- Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Jumlah Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	10.000 keping	-	-	-	5.000 keping	30.000 keping	55%
X	XX	04	41	- Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Jumlah Pengelolaan dan pengembangan Perangkat SIAK	10 jenis/unit	-	-	-	10 jenis/unit	40 jenis/unit	75%
X	XX	04	42	- Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	20 kali	-	-	-	20 kali	100 kali	60%
								-				4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan.

a. Persentase Kepemilikan KTP-el

Persentase kepemilikan KTP-el Tahun 2022 ini mencapai 95,56% dari target 100%. Angka ini didapat dari :

$$= \frac{Jumlah\ Kepemilikan\ KTP{-}el}{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ 17\ Tahun\ Ke\ atas\ (Pernah\ Menikah)} x\ 100\%$$

$$= \frac{163.446}{171.011} x\ 100\%$$

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase kepemilikan KTP-el	persen	97,56	99,51	97,63	95,56

Pada tahun 2022, persentase kepemilikan KTP-el di Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 97,63%, dan pada tahun 2023 persentase sebesar 95,56%. Dibandingkan dengan Realisasi Kinerja tahun 2022, capaian realisasi kinerjapada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan persentase kepemilikan KTP-el. Karena banyaknya penduduk pemula (baru berusia 17 Tahun) yang tinggal tidak berdomisili di Kabupaten Dharmasraya.

b. Persentase Kepemilikan KIA

Persentase kepemilikan KTP-el Tahun 2023 ini mencapai 66,21% dari target 100%. Angka ini didapat dari :

$$= \frac{Jumlah\ Kepemilikan\ KIA}{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ 17\ Tahun\ Ke\ bawah} x\ 100\%$$

$$= \frac{46.678}{70.504} x\ 100\%$$

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	persen	35,87	54,68	64,02	66,21

Pada tahun 2022, persentase kepemilikan KIA di Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 64,02%, dan pada tahun 2023 persentase sebesar 66,21%. Capaian Kinerja Kepemilikan KIA terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

c. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (Usia 0-18 tahun)

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerbitan kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan persentase Akta Kelahiran sebesar 99% dengan realisasi sebesar 96,36 %. Angka ini didapat dari :

$$= \frac{Jumlah\ Kepemilikan\ Akta\ Kelahiran\ Usia\ 0-18\ Tahun}{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ 0-18\ Tahun}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{71.663}{74.730}\ x\ 100\%$$

$$= 96{,}36\%$$

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	persen	91,25	92,87	95,58	96,36

Pada tahun 2023, persentase kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 91,57%, dan pada tahun 2022 persentase sebesar 95,58%.

d. Persentase Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang diterbitkan

Kutipan akta kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan peristiwa kematian. Penerbitan kutipan akta kematian adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian.

Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan persentase Akta Kelahiran sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Angka ini didapat dari :

$$= \frac{Jumlah\ Akta\ Kematian\ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ Pengurusan\ Akta\ Kematian}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{5.468}{5.468}\ x\ 100\%$$

$$= 100\%$$

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang diterbitkan	persen	100	100	100	100

Pada tahun 2022, pengurusan Akta Kematian di Kabupaten Dharmasraya adalah sejumlah 3.803 laporan, dan pada tahun 2023 pelaporan sejumlah 5.468.

e. Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya diterbitkan

Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan persentase Akta Perkawinan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Angka ini didapat dari :

$$= \frac{Jumlah\ Akta\ Perkawinan\ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ Pengurusan\ Akta\ Perkawinan} x\ 100\%$$

$$= \frac{401}{401} x\ 100\%$$

$$= 100\%$$

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya diterbitkan	persen	100	100	100	100

Pada tahun 2022, pengurusan Akta Perkawinan di Kabupaten Dharmasraya adalah sejumlah 276 laporan, dan pada tahun 2023 pelaporan sejumlah 401 dokumen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

2.3.1 Isu Strategis

Persoalan kependudukan sebagai salah satu dari persoalan yang memerlukan perhatian ekstra dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi. Karena itu pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap pertumbuhan penduduk. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Dharmasraya perlu upaya –upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan program operasional dan kegiatan–kegiatan.

1. **Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan**

   Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 cukup baik, capaian per 31 Desember 2024 mendekati target yang telah ditetapkan baik itu melalui Perjanjian Kinerja maupun melalui Indikator Kinerja Utama.

2. **Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi**

   Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, adalah sarana prasarana yang belum memadai, belum maksimalnya pengembangan sistem informasi kependudukan terutama yang menyangkut peningkatan pelayanan, profesionalitas aparat pelaksana dan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Masyarakat dalam mengurus dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menggunakan pihak ketiga. Ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pelayanan kependudukan. Sedangkan hambatan yang masih dijumpai adanya data yang tidak valid dengan Sistem Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Sistem SIAK Pemerintah Kabupaten Dharmasraya masih bergantung kepada Sistem SIAK yang ada di Pusat salah satu nya data perekaman KTP-el yaitu masyarakat sudah melaksanakan perekaman masih menunggu konfirmasi biometrik dari Pusat serta ketersediaan Blanko KTP-

el pun menunggu pemberian dari Pemerintah Pusat, sehingga dapat membuat keterlambatan jika stok blangko habis.

2.3.2 Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Pencapaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Dharmasraya akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional melalui program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Belum tersedianya gedung kantor yang representatif, khususnya untuk pengelolaan kearsipan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Adanya dukungan perangkat keras dan lunak dari Pemerintah Pusat untuk program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online.
2. Dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan.

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan secara modern sesuai dengan standar internasional serta tertuang dalam Nawa Cita Pemerintah Republik Indonesia yang harus disukseskan pelaksanaanya.
2. Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, agar diupayakan segera dibangun gedung kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya yang representatif.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat usulan dari masyarakat yang di rangkum dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Arah dan kebijakan makro tahun 2025 dengan fokus:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik ;
5. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
6. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
7. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
8. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
9. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
10. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
11. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya melaksanakan fungsi Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik urusan Administrasi Kependudukan memiliki kewajiban menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan adminitrasi kependudukan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana Permendagri nomor 86 Tahun 2017. Tujuan PD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana stategis

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (PD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya menetapkan Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan kualitas aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip/dokumen pendaftaran penduduk;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip/dokumen pencatatan sipil
6. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sistem Informasi SIAK;
7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional. Berdasarkan kesepakatan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan para Stakeholders, disepakati sebanyak 4 program dan 19 kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Rincian Program dan Kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 tersebut sebagai berikut :

Adapun rincian rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 beserta Prakiraan maju Tahun 2026, dapat dilihat pada *Tabel III.1. Rumusan Rencana Program dan kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.*

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Dengan disusunnya Renja Tahun 2024 ini, maka mudah-mudahan dokumen turunan atau lanjutan dari pelaksanaan Renja ini juga akan baik.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala hal dan resiko yang terjadi harus menjadi tanggungjawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Dharmasraya, 2024

KEPALA DINAS,

ABDI AMRI, SE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19643112 198612 1 002

LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

BAB 1. ... PENDAHULUAN **1-1**

1.1. Latar Belakang *1-1*
1.2. Landasan Hukum *1-2*
1.3. Maksud dan Tujuan *1-3*
1.3.1. Maksud 1-3
1.3.2. Tujuan 1-3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD *1-4*

BAB 2. ... *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PMD TAHUN 2023* **2-2**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas PMD ... *2-2*
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMD *2-13*
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PMD *2-20*
2.3.1. Isu strategis 2-20
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PMD 2-21
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat *2-22*
2.4.1. Penelaahan Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan 2-22
2.4.2. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggora DPRD 2-22

BAB 3. ... TUJUAN DAN SASARAN Dinas PMD **3-1**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat *3-1*
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait 3-1
3.1.2. Penelaahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat .3-2
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah *3-3*

BAB 4. ... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PMD **4-1**

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMD *4-1*
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 ..... *4-13*

BAB 5. ... PENUTUP **5-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya 2-8
Tabel 2. 2 IKU DINAS PMD 2021-2023 2-13
Tabel 2. 3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-14
Tabel 2. 4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-15
Tabel 2. 5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-16
Tabel 2. 6 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-16
Tabel 2. 7 Status Perkembangan BUMNag Di Kabupaten Dharmasraya 2-17
Tabel 2. 8 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-18
Tabel 2. 9 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-18
Tabel 2. 10 Daftar Bumnag Bersama Di Kabupaten Dharmasraya 2-19
Tabel 2. 11 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-19
Tabel 2. 12 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-20
Tabel 2. 13 Permasalahan Dinas PMD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi 2-21
Tabel 4. 1 Rencana Kerja Dinas PMD Kab. Dharmasraya Tahun 2025 4-3
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 4-13

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bab 1 memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Dokumen Renja PD

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
   1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024.
   2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
   3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2019 s.d 2024.
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2025
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
   1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan prangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida
   2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini siserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
   1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
   1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.
11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasaraya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 serta pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah

c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah

d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran

e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Dinas PMD Tahun 2023
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMD

BAB V Penutup

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PMD TAHUN 2023

Bab II. Memuat evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2019-2023, dan penelaahan usulan masyarakat

21. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas PMD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berikut adalah hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari 4 Program, 8 Kegiatan dan 26 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 semuanya memenuhi target sesuai dengan yang direncanakan. Dari 4 Program, 8 Kegiatan dan 26 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 4.721.333.650, realisasi anggarannya sebesar Rp. 4.543.064.700 (96,22%) dan dilakukan penghematan sehingga anggaran bersisa Rp. 178.268.950. Pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas PMD Kab. Dharmasraya. Pada program ini terdapat 5 kegiatan dan 15 subkegiatan, yang semuanya mencapai target yang telah ditetapkan atau kinerja 100% dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan 5 kegiatan dan 15 subkegiatan sebesar Rp 3.094.210.850,- terealisasi sebesar 32.920.043.802,- atau 94,37%. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 15 subkegiatan yaitu :

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 subkegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp 2.108.175.000,-. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp 1.957.157.958,- atau 92.84 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji dan honor ASN di Dinas PMD.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Dinas PMD dan bersifat rutin yang terdiri dari 6 subkegiatan. Hasil dari kegiatan ini terlaksananya pelayanan administrasi umum Bapppeda. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 6 subkegiatan ini sebesar Rp 387.158.850,- terealisasi sebesar Rp 386.486.873,- atau 99.83%. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 6 subkegiatan diantaranya:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dicapai dengan indikator jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, dengan capaian indikator kinerja 100%, pagu anggaran sebesar Rp 3.593.000,- terserap sebesar Rp 3.593.000,- atau 100%, hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian indikator kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 35.860.000,- terserap sebesar Rp 35.801.000,- atau 99,84%. Hasil dari subkegiatan ini adalah tercapainya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dicapai dengan indikator jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 11.493.650,- terserap sebesar Rp 11.460.500,- atau 99.71%. Hasil dari subkegiatan ini adalah tercapai ketersedian peralatan rumah tangga.
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 27.450.000,- terserap sebesar Rp 26.951.000,- terserap 98.18%. Hasil dari subkegiatan ini adalah tercapainya ketersedian makan minum rapat dan makan minum tamu.
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 25.134.200,- terserap sesar Rp 25.122.700,- atau 99.95%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pencetakan dan penggandaan bahan kepentingan dinas.
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 283.628.000,-

terserap sebesar Rp 283.558.973,- atau 99.98%. Hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi.

3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 101.500.000,- serapan anggaran sebesar Rp 101.500.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini didukung oleh 2 subkegiatan yaitu Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran Rp. 44.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran Rp 57.500.000.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator jumlah jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp363.099.000,- dengan serapan anggaran Rp 345.774.621,- atau 95.23%. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui tigasubkegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator jumlah materai yang dibayarkan, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 4.000.000,- atau serapan anggaran Rp 4.000.000,- atau 100%. Hasil dari subkegiatan ini adalah tersedianya materai.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran Rp 37.914.400,- realisasi anggaran sebesar Rp 37.903.021,- atau 99.29\\97%. Hasil dari subkegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening listrik dan internet..
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator jumlah pembayaran honorarium THL, sopir, penjaga malam dan tenaga kebersihan dengan capaian kinerja sebesar 100%, alokasi anggaran sebesar Rp 321.184.600,- atau serapan anggaran Rp 303.871.600,- atau 94,61%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji THL, sopir, penjaga malam dan tenaga kebersihan.

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan alokasi dana sebesar Rp 134.278.000,- kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%, realisasi anggaran Rp 129.124.350,- atau 96.16%. Hasil dari kegiatan ini adalah barang milik daerah dalam kondisi baik. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang ditujukan agar kendaraan dinas jabatan terpelihara, dengan alokasi dana sebesar Rp 16.500.000,- terealisasi Rp 16.161.750,- pelaksanaan fisik kegiatan sudah terlaksana 100%

dengan realisasi keuangan 97.95%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbayarnya pajak kendaraan dan mobil dinas jabatan terpelihara dalam kondisi baik.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, hasil dari subkegiatan ini adalah kendaraan dinas operasional terpelihara dengan capaian kinerja 100% dan alokasi dana sebesar Rp 104.508.000,- anggaran tersebut terserap sebesar Rp 99.762.600,- atau 95.46%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, hasil dari subkegiatan ini adalah terpeliharanya Peralatan dan Mesin yang ada di Dinas PMD. Alokasi data untuk sub kegiatan ini adalah Rp. 13.270.000 dengan realisasi sebesar Rp. 13.200.000 atau 99.47. hasil dari subkegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin kantor.

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini alokasi anggarannya sebesar Rp 30.010.000,- dan terealisasi sebesar Rp 29.793.300,- atau 99.28% dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Desa dengan target 100% terealisasi 100%. Program Peningkatan Kerjasama Desa dari 1 kegiatan dan 2 subkegiatan yaitu :

1) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

Dengan alokasi dana sebesar Rp 30.010.000,- keluarannya adalah terfalitasinya kerjasama antar nagari dengan capaian kinerja 100% dan serapan anggaran Rp 29.793.300,- atau 99.28%. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota, hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota, capaian kinerja subkegiatan ini adalah 100% dan alokasi dana sebesar Rp. 14.138.800 dengan realisasi sebesar Rp. 13.933.600 atau 98.55%. salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pendampingan mahasiswa KKN.

b. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, Hasil dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan, capaian kinerja subkegiatan ini adalah 100% dan alokasi dana sebesar Rp. 15.871.200 dengan realisasi sebesar Rp. 15.859.700 atau 99.93%

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa merupakan program yang berhubungan dengan pembinaan aparatur nagari serta pengembangan bumnag. Capaian kinerja Program ini adalah 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 733.539.000 dengan serapan anggaran

sebesar Rp 730.124.671 atau 99.53%. Pada Program ini terdapat Satu Kegiatan dan Empat Sub Kegiatan Yaitu:

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 733.539.000, kegiatan ini ditujukan untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administasi pemerintahan desa/nagari, dengan capaian kinerja 100%, realisasi anggaran sebesar Rp.730.124.671 atau 99.53%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administasi pemerintahan desa/nagari. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 4 (empat) subkegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Penyelenggaran Administrasi pemerintahan desa, yang ditujukan untuk pendampingan terhadap aparatur nagari dalam perlu pengelolaan Dana Desa/Nagari sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alokasi dana sebesar Rp. 196.888.000 dengan capaian kinerja 100%. Hasil dari subkegiatan ini adalah pelatihan dan bimbingan teknis terhadap aparatur nagari, serapan anggaran sebesar 196.192.473 atau 99.65%

b. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, ditujukan untuk pembinaan terhadap Bumnag dan Bumnag bersama, dengan capaian kinerja 100%. Pagu anggaran untuk subkegiatan ini adalah sebesar Rp. 67.001.600 dengan realisasi sebesar Rp. 65.686.348 atau 98.04%.

c. Fasilitasi penyusunan Profil Desa, ditujukan untuk evaluasi perkembangan desa dengan capaian kinerja 100%. Alokasi anggaran Rp. 70.149.400 dengan realisasi sebesar 69.459.100 atau 99.02%. hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya data profil desa pada aplikasi prodeskel dan epdeskel.

d. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, ditujukan untuk peningkatan kapasitas anggota Badan Musyawarah (Bamus) Nagari. Capaian kinerja 100% dengan alokasi dana sebesar Rp. 399.500.000. hasil dari subkegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan terknis bagi anggota Bamus Nagari, serapan anggaran sebesar Rp. 398.786.750 atau 99.82%

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Pada Program terdapat kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, capaian jkinerja program ini adalah 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 863.573.800 dengan realisasi Rp. 863.102.927 atau 99.95%. Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

1) Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 863.573.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 863.102.927 atau 99.95%. indikator kegiatan ini adalah Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif

dalam pembangunan dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 Subkegiatan, yaitu:

a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, ditujukan untuk pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Nagari, dengan capaian kinerja 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 782.605.000 dengan serapan sebesar Rp. 782.501.627 atau 99.99%.

b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, ditujukan untuk peningkatan kapasitas anggota Lembaga Kemasyarakatan Nagari. Capaian kinerja 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44. 996.200. hasil dari kegiatan ini adalah pelatihan terhadap anggota LPM, dan pembinaan kader PKK dan Posyandu yang ada di Nagari. Serapan anggaran sebesar Rp. 44.836.650 atau 99.65%.

c. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, ditujukan untuk pembinaan Pos Pelayanan Teknologai Tepat Guna di nagari. Capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 21.796.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 21.725.000 atau 99.67%.

d. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan capaian kinerja sebesar 100%, alokasi anggaran sebesar Rp. 14.176.600. hasil dari subkegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dengan serapan anggaran sebesar Rp. 14.039.650 atau 99.03%.

Secara rinci review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2023 dan perkiraaan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 tersaji dalam Tabel Berikut.

Tabel 2. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Akan Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Unit Penanggung Jawab	Ket
1	*2*	*3*		*4*	*7*			*12=(8+9+10+11)*		*15*	*16*
					K	RP (RKPD)	APBD	K	Rp		
		2	**UNSUR PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELYANAN DASAR**								
		2.13	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
		2.13.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**3.563.813.590**	**3.094.210.850**		**2.920.043.802**	**Dinas PMD**	
		2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.741.500.650**	**2.108.175.000**		**1.957.157.958**	**Dinas PMD**	
		2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/bulan	2.741.500.650	2.108.175.000	25 Orang/bulan	1.957.157.958	Dinas PMD	
		2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**228.980.750**	**387.158.850**		**386.486.873**	**Dinas PMD**	
		2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5 Jenis	3.593.000	3.593.000	5 Jenis	3.593.000	Dinas PMD	
		2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		25 Jenis	33.241.000	35.860.000	25 Jenis	35.801.000	Dinas PMD	
		2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		15 Jenis	11.493.650	11.493.650	15 Jenis	11.460.500	Dinas PMD	

		2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 Jenis	20.367.000	27.450.000	12 Jenis	26.951.000	Dinas PMD	
		2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		3 Jenis	21.988.300	25.134.200	3 Jenis	25.122.700	Dinas PMD	
		2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Kali	138.297.800	283.628.000	100 Kali	283.558.673	Dinas PMD	
		2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**101.500.000**	**101.500.000**		**101.500.000**		
		2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		7 Jenis	44.000.000	44.000.000	7 Jenis	44.000.000		
		2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		8 Unit	57.500.000	57.500.000	8 Unit	57.500.000		
		2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**390.580.190**	**363.099.000**		**345.774.621**	**Dinas PMD**	
		2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		400 Lembar	4.000.000	4.000.000	400 Lembar	4.000.000	Dinas PMD	
		2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2 Rekening	39.019.790	37.914.400	2 Rekening	37.903.021	Dinas PMD	
		2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	347.560.400	321.184.600	12 Bulan	303.871.600	Dinas PMD	
		2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**101.252.000**	**134.278.000**		**129.124.350**	**Dinas PMD**	
		2.13.01.2.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	12.500.000	16.500.000	1 Unit	16.161.750	Dinas PMD	
		2.13.01.2.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		10 Unit	79.482.000	104.508.000	10 Unit	99.762.600	Dinas PMD	

		2.13.01.2.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		25 Unit	9.270.000	13.270.000	25 Unit	13.200.000	Dinas PMD	
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	-	-	1 Unit	-	Dinas PMD	
		2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**-**	**-**		**-**	**Dinas Pmd**	
		2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**			**-**	**-**		**-**	**Dinas Pmd**	
		2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				-		-	Dinas Pmd	
		2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**			**32.063.200**	**30.010.000**		**29.793.300**	**Dinas Pmd**	
		2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**			**32.063.200**	**30.010.000**		**29.793.300**	**Dinas Pmd**	
		2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		5 Dokumen	14.627.200	14.138.800	5 Dokumen	13.933.600	Dinas Pmd	
		2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		2 Dokumen	17.436.000	15.871.200	2 Dokumen	15.859.700	Dinas Pmd	
		2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**664.572.000**	**733.539.000**		**730.124.671**	**Dinas Pmd**	
		2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**			**664.572.000**	**733.539.000**		**730.124.671**	**Dinas Pmd**	
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1 Dokumen	127.370.000	196.888.000	1 Dokumen	196.192.473	Dinas Pmd	
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		1 Dokumen	30.739.200		1 Dokumen	-	Dinas Pmd	
		2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		104 Orang	-	-	104 Orang	-		
		2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		52 Lembaga	68.556.600	67.001.600	52 Lembaga	65.686.348	Dinas Pmd	

		2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		1 Dokumen	37.906.200	70.149.400	1 Dokumen	69.459.100	Dinas Pmd	
		2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		104 Orang	400.000.000	399.500.000	104 Orang	398.786.750		
		2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**980.968.800**	**863.573.800**		**863.102.927**	**Dinas Pmd**	
		2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**980.968.800**	**863.573.800**		**863.102.927**	**Dinas Pmd**	
		2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		2 Dokumen	900.000.000	782.605.000	2 Dokumen	782.501.627	Dinas Pmd	
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		370 Lembaga	44.996.200	44.996.200	370 Lembaga	44.836.650	Dinas Pmd	

		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi pembangunan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa		1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	Dinas Pmd	
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		1 Laporan	21.796.000	21.796.000	1 Laporan	21.725.000	Dinas Pmd	
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1 Laporan	14.176.600	14.176.600	1 Laporan	14.039.650	Dinas Pmd	
T O T A L				-	**-**	**5.241.417.590**	**4.721.333.650**	**-**	**4.543.064.700**	Dinas Pmd	
Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)								86,68%			
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)								96,22%			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMD

Tabel 2. 2 IKU DINAS PMD 2021-2023

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nag berbasis IDM	n/a	n/a	n/a	n/a	3,84	19,23	11,53	30,77	76,92	82,69
		Persentase APB nagari berbasis IDM	n/a	n/a	n/a	n/a	3,84	7,69	5,76	11,53	73,07	82,69
		Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	n/a	n/a	n/a	n/a	50	0	57,69	100	100	100
		Persentase nagari memiliki bumnag berkembang	n/a	n/a	n/a	n/a	23,08	26,92	25	32,69	34,61	34,61
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	n/a	n/a	n/a	n/a	86	100	88	100	90	100
2	Meningkatkan kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga	Jumlah Bumnag Bersama	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	1	5	9	11
		Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	2	5	4	4
3	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas PMD	n/a	n/a	n/a	n/a	B (64,33)	B (66,40)	B (66,75)	BB (72,12)	B (68,50)	BB (72,41)

1. Persentase Nagari yang Sudah Menyusun RPJM/RKP Nagari Berbasis IDM

Indikator ini Menunjukkan Persentase Nagari yang dalam menyusun RPJM/RKP Nagari sudah berdasarkan IDM

RPJM Nagari adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Nagari sebagai penjabaran dari RPJM Nagari berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Indek Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Tabel 2. 3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	**Persen**	**n/a**	**n/a**	**19,23**	**30,77**	**82,69**
Jumlah nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nag berbasis IDM		n/a	n/a	10	16	43
Jumlah Nagari Seluruhnya		n/a	n/a	52	52	52

Sumber : Bidang Pemerintahan Nagari Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi indikator ini, Persentase Nagari yang Sudah Menyusun RPJM/RKP Nagari Berbasis IDM tahun 2021 sebesar 19,23% (10 dari 52 Nagari) dan naik menjadi 30,77% (16 dari 52 nagari) pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 naik menjadi 82,69% (43 dari 52 nagari), meski terjadi kenaikan pada realisasi kinerja, namun capaian kinerja mengalami penurunan. penurunan capaian kinerja ini terjadi karena adanya peningkatan yang cukup besar terhadap kinerja dari tahun ke tahun, selain itu juga dikarenakan perubahan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. jika dibandingkan dengan target akhir pada RENSTRA yaitu sebesar 100%, maka capaian untuk tahun 2023 terhadap target akhir RENSTRA adalah sebesar 82,69%. Target akhir periode RENSTRA untuk indikator ini adalah semua nagari telah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM, untuk tahun 2023 sudah ada 43 nagari yang menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM dari 52 nagari yang ada. Masih ada 9 Nagari yang belum, Yaitu:

- Lubuk Besar
- Sinamar
- Bonjol
- Batu Rijal
- Muaro Sopan
- Banai
- Koto Nan EMpat Dibawuh
- Lubuk Karak
- Silago

2. Persentase APB Nagari Berbasis IDM

Indikator ini Menunjukkan Persentase Nagari Yang sudah Menyusun APB Nagari Berdasarkan IDM. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat Nagari. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APB Nagari. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APB Nagari (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Proses pengelolaan APB Nagari harus berbasis pada IDM yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Tabel 2. 4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase APB nagari berbasis IDM	**Persen**	**n/a**	**n/a**	**7,69**	**11,53**	**82,69**
Jumlah Nagari yang APBnya sudah berbasis IDM		n/a	n/a	4	6	43
Jumlah Nagari seluruhnya		n/a	n/a	52	52	52

Sumber : Bidang Pemerintahan Nagari Tahun 2023

Pada tabel diatas tersaji capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tahun 2021 Persentase APB Nagari Berbasis IDM adalah 7,69% (4 nagari). Pada tahun 2022 naik menjadi 11,53% (6 Nagari). Untuk tahun 2023 realisasinya menjadi 82,69% (43 nagari). Jika dibandingkan dengan target masa akhir RENSTRA yaitu 100%, capaian indikator sudah tercapai 82,69%, yang berarti sudah ada 43 nagari yang menyusun RKP nagari berbasis IDM, dan masih ada 9 nagar yang belum, yaitu:

- Lubuk Besar
- Sinamar
- Bonjol
- Batu Rijal
- Muaro Sopan
- Banai
- Koto Nan EMpat Dibawuh
- Lubuk Karak
- Silago

3. Persentase Keuangan Nagari Berbasis Siskeudes Online

Indikator ini Menunjukkan Persentase nagari yang Pengelolaan Keuangannya sudah menggunakan Siskeudes Online. Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Namun, hasil survei BPKP pada tahun 2014, menunjukkan bahwa pengetahuan perangkat Nagari sangat minim dalam hal keuangan Nagari. Oleh karena itulah dibentuk aplikasi yang bernama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka

meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Selain gratis, Siskeudes juga memiliki banyak kelebihan. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan mudah digunakan.

Tabel 2. 5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	**persen**	**n/a**	**n/a**	**0**	**100**	**100**
Jumlah Nagari yang keuangannya berbaasis Siskeudes online		n/a	n/a	0	52	52
Jumlah Nagari seluruhnya		n/a	n/a	52	52	52

Sumber : Bidang Pemerintahan Nagari Tahun 2023

Pada tabel 2.4 diatas tersaji capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tahun 2021 capaian sebesar 0%, target untuk tahun 2021 adalah 50% (26 nagari) dengan realiasi 0%. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan belum maksimalnya pelatihan terhadap aparatur nagari terkait dengan penggunaan aplikasi Siskeudes. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menyebabkan kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan karena penggunaan dana desa difokuskan kepada penanganan COVID-19. Pada tahun 2022 capaian indikator ini sebesar 173% dengan target 57,69% (30 Nagari) sedangkan realisasinya adalah 100% (52 Nagari). Capaian untuk tahun 2023 sebesar 100%, target untuk tahun ini adalah 100% (52 nagari) dengan realisasi 100% (52 nagari)

4. Jumlah Nagari Memiliki Bumnag Berkembang

Indikator ini menunjukkan Jumlah Nagari yang memiliki Bumnag yang telah berkembang dibanding dengan seluruh Nagari dalam waktu satu tahun Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Nagari**.** BUMNag harus lahir atas kehendak seluruh warga Nagari yang diputuskan melalui Musyawarah Nagari (MusNag). MusNag adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMNag mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang bakal dijalankan. Pendirian dan pengelolaan BUMNag adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Nagari yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.

Tabel 2. 6 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Nagari Memiliki Bumnag Berkembang	**persen**	**n/a**	**21,15**	**26,92**	**32,69**	**34,61**
Jumlah Nagari memiliki bumnag berkermbang		n/a	11	14	17	18
Jumlah nagari seluruhnya		n/a	52	52	52	52

Sumber : Bidang UEM SDA & TTG Tahun 2023

Pada tabel 2.5. disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 capaian kinerja indikator ini adalah 116%, target tahun 2021 adalah 23,08% atau 12 nagari memiliki Bumnag berkembang, sedangkan realisasinya adalah 26,92% atau sudah 14 nagari memiliki bumnag berkembang. Pada tahun 2022 capaianya adalah 131% dengan

target 25% atau 13 nagari memiliki bumnag berkembang sedangkan untuk realisasinya adalah 32,69% atau 17 nagari yang sudah memiliki Bumnag berkembang. Pada tahun 2023 capaiannya adalah 100% dengan target kinerja 34,62% atau 18 nagari memiliki bumnag berkembang sedangkan untuk realisasinya adalah 34,62% atau 18 nagari sudah memiliki bumnag berkembang.

Tabel 2. 7 Status Perkembangan BUMNag Di Kabupaten Dharmasraya

NO	STATUS BUMNAG			
	Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Maju
1	Koto Padang	Tebing Tinggi	Koto Baru	Sikabau
2	Sungai Rumbai Timur	Sungai Kambut	Sialang Gaung	Sitiung
3	Silago	Sunung Selasih	Sungai Dareh	Sungai Duo
4	Lubuk Karak	Sungai Rumbai	IV Koto Pulau Punjung	Sungai Langkok
5	IV Koto Di Bawuh	Kurnia Koto Salak	Koto Besar	Koto Ranah
6	Banai	Siguntur	Gunung Medan	Kurnia Selatan
7	Timpeh	Taratak Tinggi	Koto Salak	
8	Koto Beringin	Tabek	Paduakuan	
9	Alahan Nan Tigo	Panyubarangan	Simalidu	
10	Lubuk Besar	Ampalu	Ranah Palabi	
11	Koto Tinggi	Pulau Mainan	Padang Laweh	
12	Ampang Kuranji	Tiumang	Sinamar	
13		Sipangkur		
14		Batu Rijal		
15		Muaro Sopan		
16		Sopan Jaya		
17		Sungai Limau		
18		Tanjung Alam		
19		Abai Siat		
20		Koto Laweh		
21		Koto Gadang		
22		Bonjol		

5. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan

Indikator ini Menunjukkan jumlah lembaga kemasyarakatan nagari yang telah mempunyai peran aktif dalam pembangunan nagari. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (PP No. 72/2005) tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 (Permendagri No. 18/2018) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 (Permendagri No. 5/2007) tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan

kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. LKN (LKN) merupakan wadah partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. LKN dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari melalui musyawarah mufakat kemudian ditetapkan dalam Peraturan Nagari dengan berpedoman pada Peraturan Kabupaten.

Tabel 2. 8 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	**persen**	**n/a**	**n/a**	**100**	**100**	**100**
Jumlah LKN yang berperan aktif dalam pembangunan		n/a	n/a	370	370	370
Jumlah LKN Seluruhnya		n/a	n/a	370	370	370

Sumber : Bidang Kelembagaan Masyarakat Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian indikator kinerja persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang aktif dalam pembangunan, pada tahun 2021 capaian dari indikator ini adalah 116, dari target 318 LKN realisasinya adalah 370 kemudian pada tahun 2022 capaiannya adalah 114%, dari target 326 LKN realisasinya adalah 370 dan pada tahun 2023 capaian yang diperoleh adalah 111%, dari target 333 LKN realisasinya adalah 370 LKN.

6. Jumlah Bumnag Bersama

Indikator ini Menunjukkan Jumlah terbentuknya Bumnag Bersama. Bumnag Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Bumnag Bersama didirikan oleh dua nagari atau lebih yang memiliki kepentingan usaha bersama. Bumnag Bersama adalah badan usaha bukan badan sosial maupun badan amal. Namun perlu diperhatikan juga bahwa tujuan bumnag bersama adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dua pokok yang perlu dimiliki bumbag bersama adalah profit dan benefit

Tabel 2. 9 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Bumnag Bersama	**jumlah**	**n/a**	**n/a**	**0**	**5**	**11**

Sumber : Bidang UEM, SDA, & TTG Tahun 2023

Pada tahun 2021, Indikator kinerja ini belum mempunyai target sehingga capaian kinerja 0%, pada tahun 2022 capaian kinerja indikator ini mencapai 500%, dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Bumnag bersama dengan realisasi 5 Bumnag Bersama, pada tahun 2023 capaian kinerjanya adalah 122%. Pada Tahun 2021, capaian kinerja masih 0% hal ini karena pada dalam pembentukan bumnag bersama perlu diadakan berbagai macam pertemuan langsung namun karena ada Pandemi Covid-19, kegiatan-kegiatan pertemuan disarankan untuk dilakukan. Selain itu kondisi Bumnag itu sendiri yang belum pada kondisi yang baik, selain itu minimnya sosialisasi terhadap pembentukan Bumnag bersama membuat perangkat nagari dan pengurus Bumnag kurang mengetahui tentang Bumnag Bersama. Pada tahun 2022 capaian kinerja meningkat menjadi 500%, dari 1 Bumnag bersama yang

ditargetkan terbentuk, Dinas PMD berhasil memfasilitasi pembentukan sebanyak 5 (lima) Bumnag bersama, kemudian pada tahun 2023 realiasi indikator ini adalah 11 Bumnag Bersama dengan capaian kinerja 122%.

Tabel 2. 10 Daftar Bumnag Bersama Di Kabupaten Dharmasraya

NO	NAMA BUMNAG BERSAMA	KECAMATAN
1	Pulau Punjung Bersama LKD	Kecamatan Pulau Punjung
2	Sembilan Koto Saiyo LKD	Kecamatan Sembilan Koto
3	Sitiung Sejahtera LKD	Kecamatan Sitiung
4	Timpeh Bekarya LKD	Kecamatan Timpeh
5	Tiumang Sejahtera LKD	Kecamatan Tiumang
6	Sapayuang Basamo LKD	Kecamatan Padang Laweh
7	Dharma Korea Mandiri Sejahtera LKD	Kecamatan Koto Salak
8	Kato Siaga Makmur LKD	Kecamatan Koto Baru
9	Rimbo Tolang LKD	Kecamatan Koto Besar
10	Sungai Rumbai Sepakat LKD	Kecamatan Sungai Rumbai
11	Asam Jujuhan Mandiri LKD	Kecamatan Asam Jujuhan

7. Jumlah Realisasi Kerjasama Antar Nagari dan atau Pihak Ketiga

Indikator ini menunjukkan Jumlah Kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga yang terlaksana. Dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, desa membutuhkan kerjasama dalam berbagai bidang pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa baik kerjasama antar desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Tabel 2. 11 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Realisasi Kerjasama Antar Nagari dan atau Pihak Ketiga	**jumlah**	**n/a**	**n/a**	**0**	**5**	**4**

Sumber :Bidang PKP Tahun 2023

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel diatas, pada tahun 2021 capaian kinerja 0%, pada tahun 2022 target yang ditetapkan adalah 2 kerjasama dan realisasinya adalah 5 kerjasama dengan capaian kinerja sebesar 250% dan pada tahun 2023 target indikator ini adalah 4 kerjasama dengan realisasi 4 kerjasama sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari indikator ini selama tiga tahun terakhir berfluktuatif dari 0% pada tahun 2021 kemudian naik drastic menjadi 250% pada tahun 2022 dan menurun ke angka 100% pada tahun 2023. Naik dan turunnya capaian kinerja ini terjadi karena pada tahun 2021 Dinas PMD tidak menetapkan target karena pada saat itu sedang dalam keadaan pandemic covid-19 sehingga capaian kinerja masih 0%, kemudian pada tahun 2022 capaian menjadi

250% karena seiring meredanya pandemic Covid-19, kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga mulai kembali terlaksana. Pada tahun 2023 capaian kinerja menurun menjadi 100%, meskipun terjadi penurunan, capaian kinerja pada tahun 2023 masuk dalam katogori sangat berhasil.

8. Nilai AKIP Dinas PMD

Indikator ini menunjukkan Nilai AKIP yang diperoleh Dinas PMD. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Kapabel, serta meningkatnya kualitas Pelayanan Publik. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah berkomitmen dan konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Penilaian AKIP Perangkap Daerah dilakukan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja.

Tabel 2. 12 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai AKip Dinas PMD	**Indeks**	**n/a**	**BB**	**B**	**BB**	**BB**

Sumber : Sekretariat Dinas PMD Tahun 2023

Pada Tahun 2020 Hasil Penilaikan AKIP Dinas PMD oleh Inspektorat adalah BB kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menajdi B. Pada Tahun 2022 Nilai AKIP yang diperoleh Dinas PMD adalah BB dan pada Tahun 2023 adalah BB.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PMD

2.3.1. Isu strategis

Permasalahan dicantumkan agar terjadi kesinambungan dengan rencana program/kegiatan, karena pada dasarnya program/kegiatan yang direncanakan adalah merupakan langkah dalam pemecahan masalah yang telah/sedang dan akan dihadapi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Isu-isu Strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kapasitas Sumber daya manusia perangkat Nagari dan lembaga masyarakat di Nagari.
2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Rendahnya Kinerja kelembagaan masyarakat.
4. Rendahnya kinerja kelembagaan ekonomi masyarakat
5. Kurangnya penerapan teknologi tepat guna .
6. Rendahnya pemanfaatan potensi dan sumber daya desa
7. Indeks Desa

2.3.2 Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PMD

Tabel 2. 13 Permasalahan Dinas PMD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi

No	Indikator	Interpretasi	permasalahan	Faktor penentu keberhasilan/ tindak lanjut
1	Persentase Nagari yang sudah menyususn RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Rendahnya RPJM/RKP Nagari Berbasis IDM	Masih Rendahnya kapasitas perangkat nagari	- Kemampuan perangkat nagari yang tinggi - Peningkatan kapasitas perangkat Nagari
2	Persentase APB Nagari Berbasis IDM	Rendahnya APB Nagari yang Berbasis IDM	Masih rendahnya kemampuan perangkat nagari dalam menyususn APB	Peningkatan kapasitas perangkat Nagari
3	Persentase Keuangan Nagari Berbasis Siskeudes Online	Belum terlaksana Siskeudes berbasis online	Kualitas jaringan internet yang belum merata.	-Peningkatan sarana dan prasarana -peningkatan kapasitas perangkat nagari
4	Persentase Nagari Yang Memiliki Bumnag Berkembang	Rendahnya perkembangan BUMNag	Kualitas SDM yang masih rendah	-Bantuan Permodalan untuk Bumnag -Peningkatan kapasitas pengurus bumnag
5	Jumlah Bumnag Bersama	Belum terbentuknya Bumnag Bersama	Belum ada regulasi tentang bumnag bersama	-fasilitasi pembentukan bumnag bemsama -membuat regulasi bumnag bersama

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.4.1. Penelaahan Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan

Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kab. Dharmasraya tidak mendapat usulan dari Musrenbang di Kecamatan.

2.4.2 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggora DPRD

DPRD Kabupaten Dharmasraya belum menyampaikan popok-pokok pikiran anggota DPRD ke Dinas PMD Kab. Dharmasraya.

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PMD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsi dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara OPD daerah kabupaten/ kota dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi (OPD terkait). Dimana terdapat 3 (tiga) K/L yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPDT RI), (3) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan 1 (satu) OPD Provinsi yang terkait, yaitu: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Sumatera Barat.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Dharmasraya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) cq. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan yaitu Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong pembangunan desa.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes & PDTT RI) Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

1. Terwujudnya desa Berkembang dan Mandiri;
2. Tumbuh dan berkembanganya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

1. Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Berkualitas;
2. Meningkaynya Peran Lembaga Kemasyarakatan
3. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan kawasan Pedesaan
4. Meningkatnya Pendayagunaan SDA dan TTG di pedesaan

3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Kabupaten Dharmasraya) Tahun 2021 - 2026 yaitu: " Terwujudnya Kabupaten Dharmasyara Maju Yang Mandiri dan Berbudaya". Berdasarkan visi dijelaskan di atas,maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing

4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari memiliki peran dalam pencapaian misi ke empat "Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien" yang salah satu tujuannya adalah " Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari", yang lebih mikronya pada sasaran Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari, dimana pada Dinas PMD Kab. Dharmasraya salah satu sasarannya adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa, pada Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan ayat (8) disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Dan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, pada Pasal 14 ayat (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa dan ayat (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Lalu kemudian dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, pada Pasal 37 ayat (1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu Dinas PMD Kab. Dharmasraya mempunyai tujuan "Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari" dengan sasaran pertama yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa" dengan Indikator Sasaran (1) Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM, dan (2) Persentase APB nagari berbasis IDM.

3.1.2. Penelaahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat secara tidak langsung mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Misi 4 yaitu Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, dan Tujuan 1 yakni Mewujudkan Perdagangan Industri Kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing., lebih mikronya pada sasaran 4 terciptanya 100.000 enterpreneur, dimana pada sasaran Dinas PMD salah satunya adalah Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan. Tugas dan Fungsi Dinas PMD Prov Sumatera Barat saat ini adalah membentuk setiap Nagari/Desa Badan Usaha Milik Desa/Nagari, dimana BUMNag/Des ini nantinya bias menjadi lapangan pekerjaan bagi pelaku pelaku usaha di Desa melalui unit usaha nya. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas PMD Kab. Dharmasraya melalui sasaran ke-1 yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa" memiliki Indikator Sasaran yaitu Persentase nagari memiliki bumnag berkembang, dan pada sasaran ke-2 "Meningkatkan kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga" yang salah satu indikatornya adalah

Jumlah Bumnag Bersama, yang mana pada awal tahun 2023 Dinas PMD Kab. Dharmasraya sudah berhasil membentuk sebelas Bumnag Bersama.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi RPJMD : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

Tujuan RPJMD : Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari

Sasaran RPJMD : Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari

Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi				Proyeksi		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari								
Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0,8108	0,8280	0,8474	0,8464	0,8360	0,8443	0,8528
Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	Indeks	0,6917	0,7087	0,7221	0,7436	0,7198	0,7270	0,7343
Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	Indeks	0,5833	0,6039	0,6282	0,6667	0,6070	0,6131	0,6192
Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa								
Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Persen	n/a	19,23	30,77	82,69	76,92	86,54	100
Persentase APB nagari berbasis IDM	Persen	n/a	7,69	11,53	82,69	17,31	76,92	86,54
Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	Persen	n/a	0	100	100	76,92	86,54	100
Persentase nagari memiliki bumnag berkembang	Persen	n/a	26,92	32,69	34,61	28,85	32,69	34,62
Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	n/a	100	100	100	92	94	96
Meningkatkan kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga								
Jumlah Bumnag Bersama	Jumlah	n/a	0	5	11	3	4	5
Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	Jumlah	n/a	0	5	4	4	6	6
Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah								
Nilai AKIP Dinas PMD	Indeks	BB	B	BB	BB	B	BB	BB

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PMD

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMD

Berdasarkan Renstra Dinas PMD Tahun 2021-2026, pada tahun 2025 Dinas PMD melaksanakan 4 (empat) program, 7 kegiatan dan 20 subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 5.448.658.000,,- . Adapun program yang diarahkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Didukung oleh 7 kegiatan yaitu:
   1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Administrasi Umum Perangkat Daerah, didukung oleh 6 subkegiatan yaitu:
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
      b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
      c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
      d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
      e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; dan
      f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung oleh 4 subkegiatan:
      a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
      b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
      c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung oleh:
      a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
      b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
      c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
   Didukung oleh satu kegiatan
   1) Fasilitasi Kerja sama antar Desa, didukung oleh 2 Sub Kegiatan
      a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota; dan
      b. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
   Didukung oleh satu kegiatan

1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, didukung oleh tiga Sub Kegiatan yaitu:
   a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
   b. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa; dan
   c. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

   Didukung Oleh Satu Kegiatan

   1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, didukung oleh dua Sub Kegiatan Yaitu:
      a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; dan
      b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan realisasi 2021, 2022, 2023 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2024, maka proyeksi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Rencana Kerja Dinas PMD Kab. Dharmasraya Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**5.448.658.000,00**							**5.573.263.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.448.658.000,00**							**5.573.263.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**5.448.658.000,00**							**5.573.263.000,00**	
1	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	-			**100 %**	**4.088.658.000,00**						-	**4.143.263.000,00**	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Menerima Gaji dan Tunjangan	-			25 orang	3.321.763.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	3.321.763.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/Bulan	3.321.763.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.321.763.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	222.885.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Membangun berbasis negara	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	240.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	5.000.000,00	Kab Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Membangun berbasis negara	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	30.000.000,00	Kab Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Membangun berbasis negara	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diadakan				15 Paket	13.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembinaan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis negari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembinaan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis negari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	25.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembinaan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis negari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	133.895.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Desa dan dan Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis negari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	413.000.000,00			Membangun Desa dan dan Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis negari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	417.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Desa dan dan Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis negari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	45.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		47.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	364.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		365.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	142.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	155.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	17.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dan Desa dan dan Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembebasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas II. Membangun berbasis negari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	120.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dan Desa dan dan Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembebasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas II. Membangun berbasis negari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dan Desa dan dan Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembebasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas II. Membangun berbasis negari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	***Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa***	-			**100 %**	**33.000.000,00**						-	**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Persentase Fasilitasi Kerja sama Antar Nagari*	-			100 %	33.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembangunan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga	-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				5 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM.DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembangunan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM.DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembangunan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa***	**100 %**			**100 %**	**386.000.000,00**						**100 %**	**430.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	-			52 Nagari	350.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas & Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	-	430.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				3 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas & Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				52 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas & Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				2 Dokumen	56.000.000,00	Kab Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Desa dan dan Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	**2.13.08**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat***	-			**100 %**	**960.000.000,00**						-	**960.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan*	-			100 %	960.000.000,00			Membangun Desa dan dan Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	-	960.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pembentukan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pembentukan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				3 Dokumen	900.000.000,00	Kab Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Desa dan dan Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Dibingkatkan Kapasitasnya				370 Lembaga	60.000.000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Mendanai dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis negara	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		60.000.000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	JUMLAH							5.448.888.000.00							5.573.263.000.00	

4.2 Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nag berbasis IDM	Persen	30,77	82,69	76,92	86,54	86.54	92.30
2	Persentase APB nagari berbasis IDM	Persen	11,53	82,69	17,31	76,92	86.54	92.30
3	Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	Persen	100	100	76,92	86,59	100	100
4	Persentase nagari memiliki bumnag berkembang	Persen	32,69	34,61	28,85	32,69	36,54	38,46
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	100	100	92	94	100	100
6	Jumlah Bumnag Bersama	Jumlah	5	11	3	4	11	11
7	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	Jumlah	5	4	4	6	4	6
8	Nilai AKIP Dinas PMD	Indeks	BB (72,12)	BB (72,41)	B	BB	BB	BB

BAB 5. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat. Keberhasilan rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari Perangkat Daerah sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Selain itu, Penyusunan Renja Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini untuk dipedomani pada tataran implementasi dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan anggaran yang nantinya akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian kinerja serta digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja Dinas PMD tahun berikutnya sehingga kinerja Dinas PMD dapat terukur sehingga membantu dalam penyusunan rencana berikutnya secara bertahap dan berkesinambungan serta sebagai dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Dharmasraya yaitu "*Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju yang Mandiri dan Berbudaya* " yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 - 2026.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI

RENJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA

DAFTAR ISI

BAB 1	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistimatika Penulisan	4
BAB 2	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**	**5**
	2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	5
BAB 3	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	38
	3.1 Matriks Perubahan Renja	39
	3.2 Perubahan Target Kinerja Pada IKU Perangkat Daerah	51
BAB 4	**PENUTUP**	**52**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 360 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada

a. Pada Rancangan Perubahan RKPD dibutuhkan Renja pada masing-masing Dinas yang ada di Kabupaten/Kota. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah, dan Keuangan Daerah, Rencana Program, dan Kegiatan Renja yang berkenaan. Hal tersebut mengharuskan dilaksanakan perubahan Renja Tahun 2025 adalah adanya perubahan target kinerja pembangunan serta adanya penambahan dan pengurangan kegiatan Tahun 2025 dengan dilaksanakannya evaluasi Renja Tahun 2025 hingga Triwulan II, maka terdapat penyesuaian target kinerja, baik pada indikator makro yang termuat pada BAB 2 Renja, target kinerja pada indikator Kinerja Perangkat Daerah, hal ini disebabkan oleh adanya berubahnya alokasi pagu anggaran untuk pendanaan pembangunan.
b. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan terjadinya

kekurangan anggaran untuk memenuhi Kebutuhan Renja pada triwulan III dan IV pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini dimaksudkan pada Renja Perubahan Triwulan II dengan memberikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Triwulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, dan kegiatan prioritas daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan;
2. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kagiatan;
3. Menyediakan acuan bagi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam menentukan prioritas program dan kagiatan Tahun 2025 secara terpadu, terarah, dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II tahun berkenaan yang meliputi :

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan Matriks Perubahan RENJA dan Perubahan Target Kinerja Pada IKU Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

BAB 2

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi RENJA Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Secara Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya telah melakukan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RPJP 2005-2025, visi misi dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yang dituangkan dalam evaluasi Renja Tahun 2024. Untuk memperbandingkan capaian target yang dicapai dalam RPJP 2005-2025 dan capaian Renstra 2021-2026. Hasil pengukuran evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Formulir E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PD LINGKUP KABUPATEN
RENJA PERANGKAT DAERAH BAPPEDA KABUPATEN DHARMASRAYA
PERIODE TRIWULAN II

Kosongkan

NO.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026(renstra opd 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2024(Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		SKPD	Ket
												I		II		III		IV											
												9		10		11		12											
1	2	3	4	5	6		7		8												13 (9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15 = 14/6x 100%		16	17
					k	Rp.	k	Rp.	k	Rp. (RKPD)	(APBD)	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.		
			DINAS PERHUBUNGAN			**173,876,533,123**		**11,847,005,037**																				

.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**	**2**	**15**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**118,649,447,440**	**-**	**11,426,430,937**	**-**	**11,990,307,570**	**6,738,468,740**	**-**	**1,150,884,593**	**-**	**1,415,557,970**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,541,592,563**	**-**	**13,587,877,603**	**-**	**0**		
		2	**15**	**01**	**201**		**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**610,510,000**	-	**-**		**60,000,000**	**-**		**-**		-		-	-	-	-	-							
		2	**15**	**01**	**201**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		**275,255,000**	**-**	**-**		50,000,000	**-**		**-**								**-**						
		2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		**210,255,000**	**-**	**-**		-	**-**		**-**								**-**						
		2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna		**25,000,000**	**-**	**-**		-	**-**		**-**								**-**						

								n Dokumen Perubahan RKA-SKPD																											
		2	1 5	0 1	2 . 0 1	0 4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		**25,000,000**	**-**	**-**		-	**-**		**-**						**-**										
		2	1 5	0 1	2 . 0 1	0 5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		**25,000,000**	**-**	**-**		-	**-**		**-**						**-**										
		2	1 5	0 1	2 . 0 1	0 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		**25,000,000**	**-**	**-**		10,000,000	**-**		**-**						**-**										

								Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																													
		2	15	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**25,000,000**	-	-		-	**-**		-										-								
		2	**15**	**01**	**2.02**			**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**19,920,319,190**	**26 Orang**	**2,542,651,682**	**-**	**3,962,003,000**	**3,439,079,000**	**26 orang**	**742,811,797**	**-**	**862,697,895**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 orang**	1,605,509,692	**26 orang**	**4,148,161,374**	**26 orang**	0.21		
		2	15	01	2.02	1		Sub: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (34 orang) - Pembayaran tambahan penghasilan ASN (34 orang)	26 orang	19,745,319,190	26 Orang	2,542,651,682		3,952,003,000	3,439,079,000	26 orang	742,811,797	0	862,697,895	0	-	0	-	26 orang	1,605,509,692	26 orang	4,148,161,374	26 orang	0.21	Dishub	
		2	15	01	2.02	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas		25,000,000	-	-		10,000,000.0			-										-				Tidak Dianggarkan	

								ASN																													
		2	15	01	2.02	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		25,000,000	-	-		-			-										-					Tidak Dianggarkan
		2	15	01	2.02	4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		25,000,000	-	-		-			-										-					Tidak Dianggarkan
		2	15	01	2.02	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		25,000,000	-	-		-			-										-					Tidak Dianggarkan
		2	15	01	2.02	6		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemerik	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut		25,000,000	-	-		-			-										-					Tidak Dianggarkan

							saan	Pemeriksaan																								
		2	15	01	2.02	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		25,000,000	-	-		-			-									-					Tidak Dianggarkan
		2	15	01	2.02	8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara		25,000,000	-	-		-			-									-					Tidak Dianggarkan
		2	**15**	**01**	**2.05**		**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				2,527,091,000		-		50,000,000			-													
		2	15	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut		2,064,785,000	-	-		-			-													

								Kelengkapan																								
		2	15	01	2.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		29,000,000	-	-		-			-														
		2	15	01	2.05	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		29,000,000	-	-		-			-														
		2	15	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		33,000,000	-	-		-			-														
		2	15	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihanfungsi		212,573,400	-	-		50,000,000.0			-														

		2	15	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		158,732,600	-	-		-				-																
		2	**15**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**3,168,944,146**	**-**	**311,607,462**	**-**	**296,634,200**	**182,511,300**	**-**	**43,982,735**	**-**	**22,799,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66,781,735**	**-**	**70,573,300**	**-**	**0.02**		
		2	15	01	2.06	01		Sub: Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Jaringan	290,356,249	-	5,000,000	-	5,000,000.0	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	0.02	Dishub	
		2	15	01	2.06	02		Sub:Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66 Buah	221,468,300	-	15,736,500	-	30,000,000.0	30,010,000	5 Buah	0	-	7,589,000	-	-	-	-	5 Buah	7,589,000	5 Buah	23,325,500	5 Buah	0.11	Dishub	
		2	15	01	2.06	03		Sub: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Jenis	132,102,000	-	7,503,000	-	13,500,000.0	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,503,000	-	0.06	Dishub	
		2	15	01	2.06	04		Sub: Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	5 Jenis	211,468,300	-	12,120,000	-	27,000,000.0	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		-		12,120,000	-	0.06	Dishub	

							Kantor	yang Disediakan																								
		2	1 5	0 1	2 . 0 6	0 5		Sub: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	9 Macam	552,871,490	-	11,839,800	-	14,500,000.0	50,000,200	2 Macam	0	-	10,785,000	-	-	-	-	9 Macam	10,785,000	9 Macam	22,624,800	9 Macam	0.04	Dishub	
		2	1 5	0 1	2 . 0 6	0 6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		40,146,830	-	-	-	-	-	-	-		-					-	-	-	-	-	-	Dishub	Tidak Dianggarkan
		2	1 5	0 1	2 . 0 6	0 7		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		64,900,000	-	-		-	-		-															Tidak Dianggarkan
		2	1 5	0 1	2 . 0 6	0 8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		48,000,000	-	-		-	-		-															Tidak Dianggarkan
		2	1 5	0 1	2 . 0 6	0 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1,531,400,977	-	259,408,162		176,634,200.0	75,001,100		43,982,735	-	4,425,000	-	-	-	-	-	48,407,735		48,407,735		0.03		

		2	15	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		35,300,000	-	-		30,000,000.0	-		-															Tidak Dianggarkan
		2	15	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		40,930,000	-	-		-	-		-																Tidak Dianggarkan
		2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			27,557,360,827		63,500,000		595,000,000	25,000,000		-		24,850,000					**-**	**24,850,000**	**-**	**24,850,000**	**-**	0.00			
		2	15	01	2.09	01	Pengadaan Peroangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan peroranga n dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	5,265,100,000	-	-		-	-		-															
		2	15	01	2.09	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	23 unit	17,239,664,750	-	-		100,000,000	-		-															

		2	15	01	2.09	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	105 unit	273,325,327	-	-		50,000,000	-		-														
		2	15	01	2.09	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedinya jasa perbaikan peralatan kerja	60 unit	158,880,000	-	63,500,000		120,000,000	25,000,000		-		24,850,000				-	24,850,000		24,850,000		0.16		
		2	15	01	2.09	09		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor KEUR	1 unit	1,500,000,000	-	-		100,000,000	-		-														
		2	15	01	2.09	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	2,766,294,950	-	-		25,000,000	-		-														
		2	15	01	2.09	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	70 unit	354,095,800	-	-		200,000,000	-		-														

		2	**1 5**	**0 1**	**2 . 0 8**		**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**62,526,431,728**	**-**	**8,294,281,615**	**-**	**6,537,982,720**	**2,828,214,690**	**-**	**336,922,452**	**-**	**493,526,575**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**830,449,027**	**-**	**9,124,730,642**	**-**	0.15		
		2	15	01	2.08	01	Sub: Penyediaan Jas Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Surat	201,468,300		4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	20 Surat	1,000,000	-	660,000	-	-	-	-		1,660,000	-	5,660,000	-	0.03	Dishub	
		2	15	01	2.08	02	Sub: Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	396,831,500		6,138,052,865	-	3,835,205,320	93,400,890	12 Bulan	14,604,052	-	13,839,775	-	-	-	-	-	28,443,827	-	6,166,496,692	-	15.54	Dishub	
								Terpenuhi jasa penerangan lampu jalan		43,651,465,000			-	-		12 Bulan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	Dishub	
		2	15	01	2.08	03	Sub: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Unit	78,236,857		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	Dishub	
		2	15	01	2.08	04	Sub: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	11 Bulan	18,198,430,071		2,152,228,750	-	2,698,777,400	2,730,813,800	11 Bulan	321,318,400	0	479,026,800	0	-	0	-	-	800,345,200	-	2,952,573,950	-	0.16	Dishub	

								Disediakan																								
		2	**1 5**	**0 1**	**2 . 0 9**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**2,338 ,790, 549**	**-**	**214, 390, 178**	**-**	**488, 687, 650**	**263, 663, 750**	**-**	**27,1 67,6 09**	**-**	**11,6 84,5 00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38,8 52,1 09**	**-**	**244, 412, 287**	**-**	**0. 1 0**		
		2	1 5	0 1	2 . 0 9	0 1	Sub: Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersediany a pemelihar aan dan perizinan kendaraan dinas/ jabatan	5 un it	134,3 12,20 0	-	-	-	17,50 0,000	20,00 0,000	1 U nit	0	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Di sh ub	
		2	1 5	0 1	2 . 0 9	0 2	Sub:Pe nyediaa n Jasa Pemelih araan,bi aya pemelih araan,p ajak, dan perizina n kendara	Tersediany a pemelihar aan dan perizinan kendaraan dinas/ operasiona l	40 un it	490,0 00,00 0	-	209, 560, 178	-	276,1 87,65 0	236,0 03,75 0	1 U nit	27,1 67,6 09	-	7,68 4,50 0	-	-	-	-	-	34,8 52,1 09	-	244, 412, 287	-	0	Di sh ub	

							an dinas operasional atau lapangan																												
		2	1 5	0 1	2 . 0 9	0 5		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 unit	166,920,000	-	-		-		-		-																Tidak Dianggarkan
		2	1 5	0 1	2 . 0 9	0 6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedinya jasa perbaikan peralatan kerja		122,102,000	-	4,830,000		15,000,000	7,660,000		-		4,000,000				-	4,000,000	-	8,830,000	-	0	Dishub	
		2	1 5	0 1	2 . 0 9	0 9		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor KEUR		656,920,000	-	-		170,000,000	-		-																Tidak Dianggarkan
		2	1 5	0 1	2 . 0 9	1 0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		398,696,800	-	-		-	-		-																Tidak Dianggarkan

		2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		369,839,549	-	-		10,000,000	-		-															Tidak Dianggarkan
	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	**2**	**15**	**02**			**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**			**53,832,990,683**	**-**	**420,574,100**	**-**	**2,180,987,400**	**14,966,310,698**	**-**	**2,690,818,338**	**-**	**1,958,628,765**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,649,447,103**	**-**	**102,662,032**	**-**	**0**		
		2	**15**	**02**	**2.01**		**Kegiatan: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota**			**300,000,000**		**-**		**100,000,000**	**-**		**-**														Tidak Dianggarkan

		2	15	02	2.01	01	Sub: Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabuapten/ Kota	Tersedianya dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAj Kabupaten / Kota		85,000,000	-	-		100,000,000	-		-															Tidak Dianggarkan
		2	15	02	2.01	02	Sub: Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Terlaksananya sosialisasi tentang rencana induk jaringan LLAJ		105,000,000	-	-		-	-		-															Tidak Dianggarkan
		2	15	02	2.01	03	Sub: Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengendalian rencana induk jaringan LLAJ		110,000,000	-	-		-	-		-															Tidak Dianggarkan
		2	**15**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota**			**37,480,072,250**	**-**	**143,903,900**	**-**	**500,000,000**	**14,664,605,698**	**-**	**2,647,746,438**	**-**	**1,913,297,265**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,561,043,703**	**-**	**102,662,032**	**-**	**0**		

		2	15	02	2.02	01	Sub: Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tersediannya prasarana jalan di jalan kabupaten		19,826,207,000	-	-		100,000,000	-		-															
		2	15	02	2.02	02	Sub: Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah tersediannya perlengkapan jalan	200 Buah	10,504,025,250	-	64,254,700	-	200,000,000	249,989,578		0	-	38,407,332	-	-	-	-	-	38,407,332	-	102,662,032	-	0	Dishub	
		2	15	02	2.02	03	Sub: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah terpeliharanya prasarana jalan dengan baik	13 Unit	1,960,505,000	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub	
		2	15	02	2.02	04	Sub: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah terpeliharanya perlengkapan jalan dengan baik		5,189,335,000	-	79,649,200		200,000,000	14,414,616,120		2,647,746,438		1,874,889,933						4,522,636,371						Tidak Dianggarkan
		2	**15**	**02**	**2.03**		**Kegiatan: Pengelolaan Terminal Tipe C**			1,312,596,500		-		-	-		-														Tidak Dianggarkan
		2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penum	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun		86,150,000	-	-		-	-		-														Tidak Dianggarkan

							pang Tipe C																										
		2	1 5	0 2	2 . 0 3	0 2		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun		240,000,000	-	-		-		-		-														Tidak Dianggarkan
		2	1 5	0 2	2 . 0 3	0 3		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		559,615,000	-	-		-		-		-														Tidak Dianggarkan
		2	1 5	0 2	2 . 0 3	0 4		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		396,831,500	-	-		-		-		-														Tidak Dianggarkan
		2	1 5	0 2	2 . 0 3	0 5		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya		30,000,000	-	-		-		-		-														Tidak Dianggarkan
		2	**1 5**	**0 2**	**2 . 0 5**			**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**7,325,092,250**	**-**	**186,975,500**	**-**	**325,987,400**	**201,631,750**	**-**	**12,590,900**	**-**	**44,658,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57,248,900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dishub**	

		2	1 5	0 2	2 . 0 5	0 1		Penyedi aan Sarana dan Prasaran a Pengujia n Berkala Kendara an Bermoto r	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	9 Un it	2,947, 810,0 00	-	-	-	100 ,00 0,0 00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Di sh ub	
		2	1 5	0 2	2 . 0 5	0 2		Peningk atan Kapasita s Sumber Daya Manusia Pengujia n Berkala Kendara an Bermoto r	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatk an Kapasitasn ya		936,8 00,00 0				50, 000 ,00 0	-		-																	
		2	1 5	0 2	2 . 0 5	0 4		Penyedi aan Bukti Lulus Uji Berkala Kendara an Bermoto r	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		228,9 41,25 0	-	-		40,0 00,0 00	-		-																Tid ak Dia ngg ark an
		2	1 5	0 2	2 . 0 5	0 7		Pemelih araan Sarana dan Prasaran a Pengujia n Berkala Kendara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihar a		2,806 ,286, 000	-	186, 975, 500		105, 987, 400	201, 631, 750		12,5 90,9 00		44,6 58,0 00					57,2 48,9 00	-	244, 224, 400	-	0	Di sh ub	Tid ak Dia ngg ark an

							an Bermotor																														
		2	1 5	0 2	2 . 0 5	0 9		Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100,000,000	-	-		30,000,000	-		-																	Tidak Dianggarkan
		2	1 5	0 2	2 . 0 5	1 0		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		305,255,000	-	-		-	-		-																	Tidak Dianggarkan
		2	**1 5**	**0 2**	**2 . 0 6**		**Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**				**750,832,683**	**-**	**-**	**-**	**50,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

		2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	12 Kali	134,950,183		-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub	Tidak Dianggarkan
		2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		362,882,500		-		-	-		-														Tidak Dianggarkan
		2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten		85,000,000		-			-		-														Tidak Dianggarkan

								/ Kota																								
		2	1 5	0 2	2 . 0 6	0 4	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota		80,000,000		-		-		-		-													Tidak Dianggarkan
		2	1 5	0 2	2 . 0 6	0 5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota		88,000,000		-		50,000,000	-		-														Tidak Dianggarkan
		2	**1 5**	**0 2**	**2 . 0 7**		**Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota**			550,000,000		-		**20,000,000**	-		-														Tidak Dianggarkan

		2	15	02	2.07	01		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan		240,000,000		-		-		-		-																	Tidak Dianggarkan
		2	15	02	2.07	02		Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya		40,000,000		-		-		-		-																	Tidak Dianggarkan
		2	15	02	2.07	03		Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		135,000,000		-		20,000,000		-		-																	Tidak Dianggarkan
		2	15	02	2.07	04		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		135,000,000		-		-		-		-																	Tidak Dianggarkan
		2	**15**	**02**	**2.08**			**Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**			**1,197,867,000**	**-**	**89,694,700**	**-**	**185,000,000**	**100,073,250**	**-**	**30,481,000**	**-**	**673,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31,154,500**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2	15	02	2.08	01		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Bulan	509,984,500		-	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub	

		2	1 5	0 2	2 . 0 8	0 2		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		115,000,000		-		-		-		-		-													Tidak Dianggarkan
		2	1 5	0 2	2 . 0 8	0 3		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		115,000,000		-		-		-		-															tidak Dianggarkan
		2	1 5	0 2	2 . 0 8	0 4		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten /Kota		457,882,500		89,694,700		185,000,000	100,073,250		30,481,000		673,500				31,154,500		120,849,200	-	0	Dishub	tidak Dianggarkan

		2	**1 5**	**0 2**	**2 . 0 9**		**Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Anatar Kota Dalam Satu Daerah Kabupate/ Kota**			3,915 ,765, 000		-		**1,00 0,00 0,00 0**	-		-							-						Tid ak Dia ngg ark an
		2	1 5	0 2	2 . 0 9	0 1	Penyedi aan Angkuta n Umum Untuk Jasa Angkuta n Orang dan/ atau Barang Antar kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupat en/ Kota	Tersediany a angkutan umum dalam akbupaten / kota		3,000, 000,0 00		-		1,000 ,000, 000	-		-													Tid ak Dia ngg ark an
		2	1 5	0 2	2 . 0 9	0 2	Pengend alian dan Pengaw asan Ketersed iaan Angkuta n Umum Untk Jasa	Jumlah Laporan Pengendali an dan Pengawasa n Ketersedia an Angkutan Umum untuk Jasa		915,7 65,00 0		-		-	-		-													Tid ak Dia ngg ark an

							Angkutan/ Orang dan/ atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota																								
		2	**15**	**02**	**2.16**		**Kegiatan : Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Yang Melayani Trayek Serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			1,000,765,000		-		**-**	-		-														Tidak Dianggarkan
		2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu)	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah		85,000,000		-		-	-		-														Tidak Dianggarkan

							Daerah Kabupate/ Kota	Kabupaten / Kota																											
		2	1 5	0 2	2 . 1 6	0 2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerakh Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		457,882,500		-		-		-		-																	Tidak Dianggarkan
		2	1 5	0 2	2 . 1 6	0 3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten		457,882,500		-		-		-		-																	Tidak Dianggarkan

							Daerah Kabupaten/ Kota	/Kota																								
		2	**15**	**03**			**Program Pengelolaan Pelayaran**			1,394,095,000		-		-	-																Tidak Dianggarkan
		2	**15**	**03**	**2.05**		**Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai Dengan Domisili Badan Usaha**	**Jumlah izin dan rekomendasi yang di keluarkan**		25,000,000		-		-	-																Tidak Dianggarkan
							Koordinasi dan Sinkrodinasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin angkutan penyeberangan		25,000,000		-		-	-																Tidak Dianggarkan

							Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																									
		2	**15**	**03**	**2.13**		**Kegiatan : Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**			1,369,095,000		-		-	-																	Tidak Dianggarkan
		2	15	03	2.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah rekoomendasi		237,000,000		-		-																			Tidak Dianggarkan
		2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan	Tersedianya pelabuhan sungai dan alat penyebera		629,050,000		-		-																			Tidak Dianggarkan

							Danau	ngan (ponton)																								
		2	1 5	0 3	2 . 1 3	0 3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan dan alat penyeberangan yang dioperasikan dan dipelihara		410,000,000		-		-																			Tidak Dianggarkan
		2	1 5	0 3	2 . 1 3	0 4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pengawasan pelabuhan sungai dan danau		93,045,000		-		-																			Tidak Dianggarkan
										173,876,533,123		**11,847,005,037**		**14,171,294,970**	**21,704,779,438**	**-**	**3,841,702,931**	**-**	**3,374,186,735**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,215,889,666**	**-**	**13,690,539,635**				

Rata-rata capaian kinerja (%)	**51%**
Predikat kinerja	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	**:**
Faktor penghambat pencapaian kinerja	**:**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	**:**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	**:**

Disusun :
Gunung Medan, Juni 2025

Dievaluasi :
Pulau Punjung, Juni 2025

Dinas Perhubungan

KEPALA

CATUR EBYANDRI MUSHENDRA, S.STP,M.Si

NIP.19770121 199511 1 003

BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KEPALA

H.PARYANTO,S.Sos, MT

NIP.19690609 198902 1 001

Hasil Realisasi program/kegiatan pada triwulan II tahun 2025, bahwa dilihat berdasarkan realisasi Belanja masing-masing Sub Kegiatan telah melaksanakan anggaran dan kinerja dengan realisasi sebesar 33,57%. Capaian ini Masih Rendah jika dilihat dari besarnya capaian Program/kegiatan pada triwulan II yang diharapkan sebesar 53,35% atau lebih. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan masih dalam tahap persiapan, pengkerjaan .

Adapun perkembangan capaian Program/kegiatan hingga triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
    a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
    a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Faktor – Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/Kegiatan.

    Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan masih dalam tahap persiapan, pengkerjaan sehingga masih belum tercapainya target pada Triwulan II ini.

BAB 3

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatan perangkat daerah berikut dengan jumlah pagu indikatif masing-masing program yang direncanakan. Secara eksplisit juga memuat matrik tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang mempedomani visi, misi, program kegiatan strategis Kepala Daerah terpilih dan sudah dikelompokkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta Urusan Pilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.1 Matrik Perubahan Renja

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**14.171.294.970,00**	**21.704.779.438,00**	**21.644.453.238,00**	**7.473.158.268,00**							**15.988.424.467,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.171.294.970,00**	**21.704.779.438,00**	**21.644.453.238,00**	**7.473.158.268,00**							**15.988.424.467,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**14.171.294.970,00**	**21.704.779.438,00**	**21.644.453.238,00**	**7.473.158.268,00**							**15.988.424.467,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 Persen**	**100 Persen**	**11.990.307.570,00**	**6.738.468.740,00**	**6.773.697.990,00**	**1.199.030.757,00**							**13.189.338.327,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined*				5 Dokumen 5 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		66.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				1 Dokumen 30 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.962.003.000,00	3.439.079.000,00	3.439.079.000,00	-522.924.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.358.203.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.952.003.000,00	3.439.079.000,00	3.439.079.000,00	-512.924.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			4.347.203.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				60 orang	0 orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/ Penerangam bangunan Kantor yang disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				100 Laporan 28 Paket 30 paket 6 dokumen 7 paket 8 paket	100 Laporan 11 paket 13 paket 2 paket 37 Paket 58 paket	296.634.200,00	182.511.300,00	108.789.050,00	-187.845.150,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		326.297.620,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	13 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	2.498.000,00	-2.502.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	58 Paket	30.000.000,00	30.010.000,00	14.846.000,00	-15.154.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				28 Paket	37 Paket	13.500.000,00	7.500.000,00	3.727.000,00	-9.773.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			14.850.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	27.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-19.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			29.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	11 Paket	14.500.000,00	50.000.200,00	25.000.000,00	10.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			15.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	176.634.200,00	75.001.100,00	55.218.050,00	-121.416.150,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			194.297.620,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				12 unit 1 Unit 1 Unit 22 Unit 3 unit	5 Unit	595.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-570.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		654.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	5 Unit	120.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-95.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			132.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			27.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur				220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan 14 Laporan 400 Laporan	12 Laporan 14 Laporan 400 Laporan	6.537.982.720,00	2.828.214.690,00	2.828.214.690,00	-3.709.768.030,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.191.780.992,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur				4.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.835.205.320,00	93.400.890,00	93.400.890,00	-3.741.804.430,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur				4.218.725.852,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	14 Laporan	2.698.777.400,00	2.730.813.800,00	2.730.813.800,00	32.036.400,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur				2.968.655.140,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				1 Unit 2 Unit 3 Unit 45 Unit 9 Unit	14 Unit 1 Unit 9 Unit	488.687.650,00	263.663.750,00	372.615.250,00	-116.072.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		537.556.415,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	17.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur				19.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	276.187.650,00	236.003.750,00	244.955.250,00	-31.232.400,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			303.806.415,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	14 Unit	15.000.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	-7.340.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			16.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0 Unit	170.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			187.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan**				**100 Persen**	**0 Persen**	**2.180.987.400,00**	**14.966.310.698,00**	**14.870.755.248,00**	**618.098.740,00**							**2.799.086.140,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Persentase capaian dokumen penetapan rencana induk jaringan LLAJ /Kota*				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*				210 Unit 2 Unit 451 Unit	24 Unit 349 Unit	500.000.000,00	14.664.605.698,00	14.623.491.698,00	14.123.491.698,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				451 Unit	24 Unit	200.000.000,00	249.989.578,00	243.966.328,00	43.966.328,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				210 Unit	349 Unit	200.000.000,00	14.414.616.120,00	14.379.525.370,00	14.179.525.370,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara*				10 Unit 1600 Dokumen 1 Laporan 2 orang 2 Unit	10 Unit	325.987.400,00	201.631.750,00	163.601.250,00	-162.386.150,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		358.586.140,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				5 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1600 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			44.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	10 Unit	105.987.400,00	201.631.750,00	163.601.250,00	57.613.850,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			116.586.140,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

			Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota*				1 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota*				12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00	100.073.250,00	83.662.300,00	-101.337.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		203.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00	100.073.250,00	83.662.300,00	-101.337.700,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			203.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*				2 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**14.171.294.970,00**	**21.704.779.438,00**	**21.644.453.238,00**	**7.473.158.268,00**						**15.988.424.467,00**	

3.2 Perubahan Target Kinerja pada IKU Perangkat Daerah.

Tabel 0-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Panjang Ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	Indeks	22.09	51	64	65	…	…
2	V/C (volume capacity Ratio)	Persen	0,24	0,22	0,40	0,40	…	…
3	Jumlah penambahan trayek angkutan umum	Persen	-	-	0	2	0	0
4	Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR	Persen	77,82	62,2	88%	89%	…	…
5	Akreditasi Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	indeks	B	A	A	A	…	…
6	Hasil evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Persen	64,86	68,92	74,872 BB	77,436 BB		
7	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks			35,0	40,3		
8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80,86	83,23	81,5	82,0		

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Perhubungan tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2025. Dalam proses penyusunanannya, Perubahan RKPD Tahun 2025 sudah melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Perubahan RKPD tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan perencanaan pembangunan pada periode RPJMD tahun 2021-2026. Sehingga rumusan kebijakan pembangunan tahunan sudah mempedomani RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RKPD Tahun 2025/ Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 telah disempurnakan sesuai dengan arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat, arah kebijakan Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta evaluasi capaian kinerja pembangunan hingga tahun 2024. selanjutnya Dokumen RKPD Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI

PEMERINTAHAN
KABUPATEN
DHARMASRAYA

RENCANA KERJA 2025 PERUBAHAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Lintas Sumatra, Km. 1 Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung
Kode Pos 27573

Diskominfo Kab. Dharmasraya
diskominfo@dharmasrayakab.go.id
www.dharmasrayakab.go.id
diskominfo.dharmasraya

PEMERITAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Telp. 0754 (451578) Sikabau Kode Pos (27573)
Website:dharmasrayakab.go.id e-mail : diskominfo.dharmasrayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR: 189.1/ /KPTS-DISKOMINFO/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. DHARMASRAYA TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan pembangunan, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;
b. bahwa untuk kelancaran proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyusunnya dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Kabupaten Dharmasraya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.
14. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030
15. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;
2. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;

3. Mengusulkan konsep rencana kerja kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya untuk ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2025

KEPALA,

DARISMAN, S.Si.MM
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19750217 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Dharmasraya sebagai laporan
2. Kepala Bapppeda Kabupaten Dharmasraya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 189.1/ /KPTS-DISKOMINFO/2025
TANGGAL : MARET 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. DHARMASRAYA TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
3.	Kasubag. Keuangan, Program dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kabid. Teknologi dan Infrastruktur Komunikasi	Anggota
5.	Kabid. Statistik dan Persandian	Anggota
6.	Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
7.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Fungsional Manggala Informatika Ahli Muda	Anggota
9.	Fungsional Statistisi Ahli Muda	Anggota
10.	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
11.	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
12.	Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Ahli Pertama	Anggota
13.	Fungsional Pengelola Sistem Informasi	Anggota
14.	Asnimar, S.Sos	Sekretariat
15.	Dalpison Hendrik, S.ST	Sekretariat
16.	Yufrizal, A.Md	Sekretariat

17.	Putri Maharani, S.IP	Sekretariat

KEPALA,

DARISMAN, S.Si.MM
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19750217 200003 1 001

PEMERITAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Telp. 0754 (451578) Sikabau Kode Pos (27573)
Website:dharmasrayakab.go.id e-mail : diskominfo.dharmasrayakab.go.id

KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR: 189.1/ /KPTS-DISKOMINFO/2025

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Kabupaten Dharmasraya;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
18. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030
19. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan acuan bagi seluruh Bagian di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2025

KEPALA,

DARISMAN, S.Si.MM
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19750217 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Dharmasraya sebagai laporan
2. Kepala Bapppeda Kabupaten Dharmasraya.

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini dapat selesai pada waktunya. Rencana kerja yang dilakukan penyesuaian karena adanya pelantikan Kepala Daerah Tahun 2025 dan bentuk pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan suatu perencanaan yang memuat suatu program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya yang mengacu pada sasaran strategis dan indikator kinerja perubahan yang telah ditetapkan.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai upaya membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya. Upaya perubahan yang dilakukan pada akhirnya diharapkan akan mendukung Kinerja Pembangunan Kabupaten Dharmasraya lebih optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan peranan tersebut maka Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2025 ini memiliki nilai strategis dalam upaya peningkatan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja lembaga yang kita banggakan ini. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama disampaikan terimakasih.

Semoga rencana kerja perubahan tahun 2025 dinas komunikasi dan informatika ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi perangkat daerah sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

SIKABAU, SEPTEMBER 2025

KEPALA DINAS,

DAFTAR ISI

BAB 1. .. PENDAHULUAN 1-5

1.1. Latar Belakang 1-5
1.2. Landasan Hukum 1-6
1.3. Maksud dan Tujuan 1-7
1.3.1. Maksud 1-7
1.3.2. Tujuan 1-7
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1-7

BAB 2. .. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023* 2-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-3
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-7
2.3.1. Isu strategis 2-7
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 2-8
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-8
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 3. .. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 35
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait 36
3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat 36
*3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah ..... **Error! Bookmark not defined.***

BAB 4. .. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 4-1
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 4-6

BAB 5. .. PENUTUP 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-165 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2-166 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2023..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5-1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 6-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 4-5

Tabel 6-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan yang dilakukan penyesuaian karena adanya pelantikan Kepala Daerah Tahun 2025 dan bentuk pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 57 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik , Persandiaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
   1) evaluasi hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024.
   2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
   3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
   4) hasil evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun tahun 2019 s.d 2024.

c. Penyusunan Rancangan Renja Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2025

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
   1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan prangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida

2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini siserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.

e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
   1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
   1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor (1308);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.
11. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran dan Belanja Negara
13. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

14. Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor (1308); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II **Hasil Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023**
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rencana Kerja (Renja)

Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB IV **Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah**

BAB V Penutup

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya adalah penjabaran Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatik Kabupaten Dharmasraya.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya menyajikan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023.

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 5.071.961.272,-** dengan capaian realisasi keuangan sebesar **Rp 4.211.725.354,- (83,04%)**

Tabel 2.1

Capaian Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	(%)
	Urusan : Wajib Bukan Pelayanan Dasar	**5.071.961.272**	**4.211.725.354**	**83,04%**
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/Kota	**3.493.671.472**	**2.964.152.452**	**84,84%**
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.903.883.000**	**1.756.927.853**	**92,28%**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.903.883.000	1.756.927.853	92,28%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**159.192.400**	**119.516.500**	**75,08%**
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	634.000	630.000	99,37%
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.656.000	18.394.000	89,05%
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.820.300	2.639.800	93,60%
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.574.000	10.347.000	97,85%
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.324.500	13.323.000	99,99%

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	(%)
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.183.600	74.182.700	66,72%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.375.596.072**	**1.039.483.149**	**75,57%**
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100,00%
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	921.886.472	666.459.349	72,29%
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.690.000	1.500.000	88,76%
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.819.600	370.323.800	82,14%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**55.000.000**	**48.224.950**	**87,68%**
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000	48.224.950	87,68%
	Program : Informasi dan Komunikasi Publik	**1.486.545.400**	**1.159.577.490**	**78,00%**
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**1.451.014.200**	**1.124.259.240**	**77,48%**
13	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	224.750.000	188.941.000	84,07%
14	Pelayanan Informasi Publik	49.121.800	39.776.900	80,98%
15	Layanan Hubungan Media	1.006.789.600	727.485.407	72,26%
16	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	18.349.600	18.295.537	99,71%
17	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	39.840.600	37.811.646	94,91%
18	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	112.162.600	111.948.750	99,81%
	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	**35.531.200**	**35.318.250**	**99,40%**
	Kegiatan : Pengelola E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**35.531.200**	**35.318.250**	**99,40%**
19	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	35.531.200	35.318.250	99,40%
	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**74.558.400**	**70.884.412**	**95,07%**

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	(%)
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**74.558.400**	**70.884.412**	**95,07%**
20	Membangun Metadata Statistik Sektoral	11.398.400	8.026.850	70,42%
21	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63.160.000	62.857.562	99,52%
	Program : Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah	**17.186.000**	**17.111.000**	**99,56%**
	Kegiatan : penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	**17.186.000**	**17.111.000**	**99,56%**
22	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.186.000	17.111.000	99,56%

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mendukung agenda pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 7 (Tujuh) tujuan dengan 8 (Delapan) Sasaran Strategis. Tujuan, indikator tujuan dan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sarana Pemerintahan Yang Memiliki Telekomunikasi Terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2017 memberlakukan pengelolaan bandwidth baik menggunakan sistem radio maupun fiber optic (jaringan internet/ intranet) terintegrasi secara bertahap untuk seluruh perangkat daerah yang terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dan telah tercapai pada tahun 2019 sesuai Rentsra dan RPJMD tahun 2016-2021. Untuk tahapan Renstra 2021-2026 difokuskan untuk pemeliharaan, peningkatan ke sistem fiber optic dan penambahan sarana baru di Nagari, Sekolah (SMP dan SD) serta Puskesmas sebagai layanan public tingkat pertama di masyarakat. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mempercepat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus mewujudkan pembangunan smart city secara bertahap dan berkelanjutan.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Meningkatnya Sarana Pemerintahan Yang Memiliki Telekomunikasi Terintegrasi

	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	unit	38 Unit	41 Unit	43 unit	45 Unit	45 Unit

		%	NA	NA	NA	61,64%	91,84%

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Pada tahun 2019 sampai 2021 masih menggunakan Renstra tahun 2016 – 2021 yang target sarana pemerintahan yang memiliki Telekomunikasi terintegrasi pada seluruh perangkat daerah (38 OPD)sedangkan tahun 2021-2023 menggunakan Renstra proses peralihan pencapaian target Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi Untuk tahun 2023 ditargetkan sebanyak 49 Unit (38 OPD, 5 Nagari, 2 SMP, 2 SD, 2 Puskesmas) dan yang berhasil dilaksanakan yaitu 45 Unit (38 OPD, 5 Nagari dan 2 Puskesmas) atau 91,84% saja. Penilaian capaian kinerja dapat dinterprestasi penilaian **SANGAT BAIK**.

2. Meningkatnya Jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, sistem informasi adalah informasi untuk manajemen pengambilan keputusan atau kebijakan dan menjalankan operasional dari kombinasi orang-orang, teknologi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Sistem informasi ini menjadi bagian dalam Sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Meningkatnya Jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Jumlah Sistem Informa dan Aplikasi Dalam Sistem Pemerinta Berbasis Elektronik	Layanan	43 layanan	43 layanan	52 layanan	43 layanan	77 Layanan
		%				61,64%	91,84%

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

3. **Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, penyebaran informasi publik merupakan proses penyampaian informasi kepada masyarakat yang memuat data serta informasi yang benar dan jelas mengenai segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika yang

dalam hal ini sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang informasi baik dari produktivitas, kualitas, efesiensi, dan kepuasaan melakukan penyebaran informasi kegiatan pembangunan ke publik untuk menciptakan tranparansi.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah

	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	NA	65%	65 %	85%	87%

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

4. Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen Area Perubahan Perangkat Daerah

AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam upaya pembaruan di daerah dilaksanakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen Area Perubahan Perangkat Daerahyang dilakukan setiap tahun.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah		B	BB	BB	BB	B

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

5. Meningkatnya Kinerja ASN

Dalam usaha meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara salah satunya dengan meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan teknis baik yang dilakukan oleh BKPSDM atau dinas terkait.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kinerja ASN	Orang	NA	NA	5	5	6

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

tahun 2023 ditargetkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 5 orang, dan telah berhasil dilaksanakan oleh 6 orang dengan rincian 1 orang Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III an. Ana Setyawati (Kabid. TIK) dan 5 orang Pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggaran oleh BKPSDM atau bidang terkait baik secara online maupun offline Penilaian capaian kinerja dapat dinterprestasi penilaian **MEMUASKAN**.

6. Meningkatnya Pengamanan Sistem Informasi Persandian

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, keamanan pelayanan pemerintah yang berbasis aplikasi serta menggunakan sertifikat digital. Sertifikat digital adalah dokumen dalam bentuk elektronik yang digunakan untuk membuktikan kepemilikan sebuah perangkat yang menggunakan public key. Sertifikat digital menampilkan beberapa informasi seperti informasi kunci, identitas pemiliknya serta tanda tangan digital dari suatu organisasi yang memverifikasi sertifikat. Sertifikat digital digunakan untuk mempercepat pelayanan masyarakat, dimana proses penandatanganan berkas yang dibutuhkan masyarakat dapat dilakukan dengan meggunakan bardcode tertentu dan dapat dilakukan dimana saja pimpinan berada.

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Meningkatnya Pengamanan Sistem Informasi Persandian

	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Jumlah Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sertifikat Digital	%	NA	NA	55%	55.26%	76.32 %

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Dalam pencapaian sasaran strategis keenam ini yaitu meningkatnya keamanan pelayanan pemerintah yang berbasis aplikasi dengan indicator peningkatan persentase jumlah perangkat daerah yang menggunakan sertifikat digital. Untuk meningkatkan target kegiatan ini diperlukan dasar hukum dan telah dilaksanakan pada tahun 2019 diterbitkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan akan dikembangkan dengan peraturan tentang pemanfaatan sertifikat digital.

Indikator kinerja persentase jumlah perangkat daerah yang menggunakan sertifikat digital ditargetkan tahun 2023 dapat tercapai 19 OPD atau 50% OPD yang ada di Kab. Dharmasraya dapat menggunakan sertifikat digital dalam pelayanan publik dan pelayanan administrasi. Sampai saat ini 29 OPD (76,32%) yang telah menggunakan sertifikat digital. . Penilaian capaian kinerja dapat

dinterprestasi penilaian **BAIK**.

7. Meningkatkan Ketersediaan dan Ketepatan Data Statistic Sektoral Untuk Dasar Pengambilan Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Manfaat s2-7tatistic sektoral adalah untuk mengetahui kecenderungan (trend), menentukan prioritas, acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan. Data dan Informasi. Statistik Sektoral menjadi acuan bagi penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Meningkatkan Ketersediaan dan Ketepatan Data Statistic Sektoral Untuk Dasar Pengambilan Kebijakan Pembangunan

	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Ketersediaan Dan Ketepatan Data Statistic Sektoral Untuk Dasar Pengambilan Kebijakan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu strategis

Terkait Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, maka Pemerintah perlu menaruh perhatian khususnya mengenai informasi yang wajib dibuka untuk publik, informasi yang dikecualikan, dan juga mekanisme penanganan sengketa informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Akses informasi merupakan hak setiap warga masyarakat, oleh sebab itu pemerintah daerah wajib melakukan uji konsekuensi dalam kategori dikecualikan”. Disamping itu untuk menciptakan masyarakat informasi, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat informasi tersebut.

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Dharmasraya yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintah Provinsi dan Pusat dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang masih jauh dari yang diharapkan, juga lihat dari jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dharmasraya dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informatika, maka dalam layanan

komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

- Masih terdapatnya lokasi blankspot di Kabupaten Dharmasraya
- Belum optimalnya pemanfaatann teknologi informasi
- Kurangnya pengetahuan masyarakat akan informasi pembangunan
- Kurangnya respon/masukan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan
- Belum tersedianya data center
- Belum adanya gedung komando/command center teknologi informasi dan komunikasi
- Belum adanya grand desain pengembangan komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai Teknologi Informasi dan komunikasi.

2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pelayanan informasi pembangunan dari manual ke digital yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
2. Komitmen dan keterlibatan pejabat pada top dan middle management di setiap OPD dalam workflow aplikasi yang masih belum optimal.
3. Keterbatasan peralatan dan perlengkapan pelayanan informasi pembangunan yang berada di seluruh Nagari.
4. Kurangnya SDM yang mampu melakukan penulisan informasi di media massa dan media social.
5. Kurangnya penyampaian kegiatan dan informasi pembangunan di media massa dan media social local dan nasional dengan berbagai bentuk.

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sertifikasi ahli informasi dan komunikasi di kalangan ASN (tingkat literasi TIK yang minim).
2. Internalisasi perubahan paradigma pengelolaan proses kerja dari manual ke elektronik di setiap OPD yang belum kuat.
3. Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi di instansi pemerintah (Integrasi baru sebagian OPD, Nagari, Puskesmas, Sekolah dan Instansi Vertikal) dan kekuatan integrasi yang ada masih lemah.

4. Aplikasi untuk pelayanan administasi pemerintahan dan pelayanan publik belum terintegrasi, sehingga belum menunjang operasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. Masih terdapatnya area blankspot/low signal di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
6. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan akses pelayanan publik secara manual.

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui pada Bidang Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya basis data yang handal, akurat, terintegrasi dan berkesinambungan untuk seluruh kebutuhan pembangunan
2. Sistem pengelolaan dan penyajian data dilakukan secara parsial
3. Mekanisme pengelolaan data yang belum terbentuk dalam suatu regulasi.
4. Kurangnya pemahaman pengambil kebijakan terhadap pentingnya data dalam pengambilan kebijakan
5. Data belum menjadi kebutuhan utama yang tren di masyarakat karena bentuk hasilnya tidak langsung dirasakan masyarakat
6. Data dan informasi pembangunan belum dianggap sebagai asset
7. Keterbatasan tenaga sumber daya manusia yang mampu mengelola pengamanan aplikasi dan website sehingga harus kerjasama dengan BSSN
8. Belum terdapatnya standar keamanan informasi yang ada di Kab. Dharmasraya
9. Belum adanya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pengamanan aplikasi, server dan website

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang telah diterima dari proses Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Forum OPD secara umum kebutuhan sarana komunikasi masyarakat , diman usulan yang diterima adalah sebagaii berikut :

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Dharmasraya

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS)	Nagari Banai Kecamatan IX Koto	Meningkatkan akses	1 Unit	

kemampuan penangkapan internet menggunakan handphone yang umumnya menjadi kewajiban pihak swasta. Pelaksanaan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah koordinasi dan

monitoring terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Khusus pembangunan Blankspot akan dikoordinasikan dengen kementerian Komunikasi dan Informatika agar dapat dibangun melalui PT. Telkom yang merupakan perusahaan BUMN.

Kondisi lain ditemui secara tidak langsung dimana dalam diskusi kegiatan Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Forum OPD terdapat keluhan masyarakat untuk mempercepat proses pelayanan BPJS. Dinas Komunikasi dan Informatika memahami proses yang diinginkan adalah bagian dari proses smart city.

Dari hasil musrenbang secara berjenjang tidak terdapat pokok-pokok pikiran DPRD.

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka menpercepat pembangunan di bidang komunikasi dan informatika di daerah, maka penyelenggara pemerintah daerah perlu meningkatkan efesiensi dan efektivitas dengan memperhatikan aspek hubungan dengan pusat, potensi dan keanekaragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa terdapat beberapa urusan dalam bidang komunikasi dan informatika meliputi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Pemerintah Provinsi; Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan subdomaian dilingkup Pemerintah Provinsi; serta Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Propinsi.

Terkait Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, maka Pemerintah Provinsi perlu menaruh perhatian khususnya mengenai informasi yang wajib dibuka untuk publik, informasi yang dikecualikan , dan juga mekanisme penanganan sengketa informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Akses informasi merupakan hak setiap warga masyarakat, oleh sebab itu pemerintah daerah wajib melakukan uji konsekuensi dalam kategori dikecualikan”.

Sedangkan untuk pengelolaan nama domain, peran dari Pemerintah Daerah adalah menentukan struktur penamaan domaian instansinya dan unit kerja yang berada dibawah struktur induk/instansi sesuai dengan peraturan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dari masing-masing daerah. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan penyelenggaraan website, konten, Sumber Daya Manusia serta infrastrukturnya. Terhitung Bulan Januari 2015 pendaftaran domain instansi pemerintah dapat didaftarkan melalui https://domain.go.id.

Disamping itu untuk menciptakan masyarakat informasi, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat informasi tersebut.

3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

3.1.1.Penelahaan Rencana Kerja Kementrian Komunikasi dan Informatika

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi digital, berbagai sumber daya ekonomi saat ini dimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dan kualitas yang semakin baik. Penetrasi ekonomi digital yang berlangsung cepat dan dinamis telah membentuk lanskap ekonomi digital di Indonesia saat ini tidak saja mencakup *on demand services*, *e-commerce* dan *financial technology* (*Fintech*), namun juga penyedia layanan *internet of things* (IoT). Proyeksi perkembangan ekonomi digital di Indonesia diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai transaksi *e-commerce* sebesar 1.625 persen menjadi USD 130 miliar dalam periode 2013-2020. Layanan *Fintech* berbasis *peer-to-peer lending* (P2P) sampai tahun 2020 juga diperkirakan semakin luas untuk menjangkau 145 juta pengguna telepon pintar (53,0 persen penduduk). Pemanfaatan IoT juga berpotensi untuk mendorong integrasi pengelolaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga menjadi lebih efisien. Perkembangan ekonomi digital ke depan masih dihadapkan pada tantangan terkait kerangka regulasi, serta kecepatan untuk penerapan teknologi telekomunikasi seperti 5G.

Strategi Pembangunan Infrastruktur

Strategi Pembangunan Insfrastrukur dalam bidang Teknologi Informasil dan Komunikasi (TIK) untuk Transformasi Digital mencakup:

- Penuntasan Infrastruktur TIK
- Pemanfaatan Infrastruktur TIK
- Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi difokuskan pada: (1) peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta; (2) peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; (3) Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; (4) peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; (5) peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; dan (6) peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas.

Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan, yaitu: pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi melalui: salah satunya pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital;

Arah Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera

Wilayah Sumatera yang berdekatan dengan negara-negara lain terutama Asia menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional. Berbagai inisiasi kerja sama internasional yang mencakup wilayah Sumatera seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand (*Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle*), integrasi kawasan (*belt and road initiatives*), dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi, perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global. Dalam lima tahun mendatang, transformasi ekonomi di Wilayah Sumatera diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan akhir dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan. Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera diarahkan untuk hilirisasi komoditas unggulan

dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor dengan didukung pengembangan hub internasional di Kuala Tanjung sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Barat. Strategi Pembangunan Wilayah Sumatera akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:*)

(1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain:

(2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain:

(1) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah; dan (d) pengelolaan dan kualitas belanja dana APBD sebagian daerah dan dana Otonomi Khusus Aceh dapat

terus ditingkatkan.

(2) Penguatan konektivitas dan kualitas pelayanan transportasi perkotaan yang dipadukan dengan jaringan multi moda pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan non-tol, yang dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain; (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan (c) memantapkan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera

3.1.2. Penelahaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Bidang Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Pemanfaatan aplikasi informatika dan website harus terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah. Upaya tersebut masih menemui beberapa permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya:

a. Belum optimalnya penyelenggaran urusan pemerintahan yang terintegrasi kedalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
b. Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
c. Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet
d. Belum optimalnya pelayanan, publikasi dan penyebarluasan informasi publik berbasis elektronik

2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyediaan data dan informasi yang *reliable, up to date,* dan relevan harus terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara terintegrasi. Beberapa permasalahan yang kerap dihadapi terkait dengan data dan informasi antara lain :

a. Data dipublikasikan oleh BPS disemester dua setiap tahun, sementara kebutuhan data untuk perencanaan diperlukan pada diawal tahun, dan seringkali data yang dipublikasikan tidak sinkron dengan data dari OPD.
b. Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi;
c. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah spasial dan aspasial.
d. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
e. Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral dari OPD.
f. Belum adanya peraturan daerah atau peraturan gubernur tentang pengelolaan data dan rencana induk statistik sektoral statistik sektoral.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi imformasi yang semakin cepat berkembang. Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem, beberapa permasalahan pada urusan persandian adalah :

a. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah
b. Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah;
c. Belum meratanya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelola keamanan informasi;
d. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi;

Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)

- Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) (75 UKPP)
- Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%) Dengan
- Indeks domain kebijakan internal SPBE
- Indeks domain Tata Kelola SPBE
- Indeks domain Manajemen SPBE
- Indeks domain Layanan SPBE
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)
- Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2025 merupakan tahun kedua masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya dalam mencapai visi jangka menengah 2021-2026 yaitu : **"**Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri Dan Berbudaya **".**

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

Dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 telah ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2021-2026 yaitu:

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3. Memajukan pendidikan yang berkarakter
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pembangunan yang berkelanjutan
7. Membangkitkan identitas daerah
8. Membangun berbasis nagari.

Secara khusus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya menunjang dalam aspek infrastruktur melalui penyediaan infrastruktur bidang Komunikasi, informatika, Statistik, dan Persandian.

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Dharmasraya mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilazkukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kominfo, maka Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 disesuaikan dengan target kinerja dalam indicator kinera utama yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi RPJMD Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

Tujuan RPJMD Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik

Sasaran RPJMD Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi	Proyeksi					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	SEKRETARIAT										
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Meningkatnya kualitas imPlementasi sistem akuntabilitas kinerja dan menajemen area perubahan perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
				Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat							
	Meningkatnya profesionalisme ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan			0	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
			Meningkatnya Kinerja ASN	ASN yang tersertifikasi kompetensi	0	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
	KOMINFO										
	Meningkatnya OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh			38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD
			Meningkatnya sarana pemerintahan yang memiliki	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD
					1 Nagari	1 Nagari	10 Nagari	20 Nagari	30 Nagari	40 Nagari	52 Nagari
							10 SMP	20 SMP	25 SMP	25 SMP	33 SMP

		Dinas Kominfo	telekomunikasi terintegrasi	terintegrasi			10 SD	20 SD	30 SD	40 SD	50 SD
					1 Puskesmas	1 Puskesmas	5 Puskesmas	8 Puskesmas	11 Puskesmas	13 Puskesmas	13 Puskesmas
	Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi			43 layanan	43 layanan	52 layanan	57 layanan	62 layanan	67 layanan	72 layanan
			Meningkatnya Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	43	43	10 Aplikasi Baru	15 Aplikasi Baru	20 Aplikasi Baru	25 Aplikasi Baru	30 Aplikasi Baru
	Meningkatnya masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah			65%	65%	85%	87%	90%	93%	95%
			Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11 Klp	11 Klp	65%	70%	75%	80%	85%
				Jumlah informasi kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan melalui media internal pemerintah			100 Berita	200 Berita	300 Berita	400 Berita	500 Berita

				daerah							
				Jumlah peliputan informasi program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah			100 Kali	200 Kali	300 Kali	400 Kali	500 Kali
				Jumlah kerjasama media swasta untuk penyebaran informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah			20 Media	20 Media	20 Media	20 Media	20 Media
	SANDI										
	Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah	persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem informasi persandian			2 OPD	10 OPD	15 OPD	20 OPD	25 OPD	30 OPD	38 OPD
			Meningkatnya pengamanan sistem informasi persandian	persentase aplikasi yang dilakukan asesment	21 web, 4 Aplikasi	21 web, 4 Aplikasi	5 Aplikasi	10 Aplikasi	15 Aplikasi	20 Aplikasi	25 Aplikasi
			Meningkatnya Keamanan Pelayanan Pemerintah yang Berbasis Aplikasi	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	2 Unit	2 Unit	40%	50%	60%	80%	100%

	STATISTIK										
	Terwujudnya satu data Dharmasraya	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			2 OPD	10 OPD	15 OPD	20 OPD	25 OPD	30 OPD	38 OPD
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			2 OPD	10 OPD	15 OPD	20 OPD	25 OPD	30 OPD	38 OPD
			Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan kebijakan Pembangunan	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	100%	100%	60%	70%	80%	90%	100%
				Jumlah Nagari Statistik	1 Nagari	1 Nagari	20 Nagari	30 Nagari	40 Nagari	52 Nagari	52 Nagari
				Jumlah Kecamatan Statistik			2 Kecamatan	4 Kecamatan	6 Kecamatan	9 Kecamatan	11 Kecamatan

BAB 4. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya 2021-2026. Dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat 4 (empat) program yang dirumuskan dalam rencana kerja perubahan tahun 2025 yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program informasi dan komunikasi publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penyelenggaraan statistik Sektoral

Program tersebut dirinci dalam masing-masing kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditampilkan dalam tabel 3.1

Dalam pelaksanaan kegiatan dibagi dalam 4 (empat) fungsi sesuai dengan tugas pokok yaitu:

1. Sekretariat
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika
4. Bidang Statistik dan Persandian

Untuk Sekretariat dilaksanakan dengan 1 (satu) Program yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/Kota, yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.825.533.270**
• Pembayaran Gaji Pegawai ASN	2.825.533.270
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**0**
• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**82.989.150**
• Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.506.000
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.938.000
• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.028.050
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.396.000
• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.611.700
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.509.400
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**0**
• Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
• Pengadaan Mebel	0
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.283.048.080**
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	912.749.080
• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.440.000
• Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	356.853.000
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**245.488.000**
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	41.000.000
• Pemeliharaan Aset tetap lainnya	70.200.000
• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	30.000.000
• Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	83.288.000

Untuk Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan 1 (satu) Program yaitu :

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	**1.042.114.350**
1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**1.042.114.350**
• Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0
• Relasi Media	754.551.850

- Pelayanan Informasi Publik 18.885.500
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik 262.777.000
- Layanan Hubungan Media 0
- Kemitraan Pemangku Kemitraan 0
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 5.900.000
- Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika **240.486.700**

1. Pengelolaan e-govemment di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota **240.486.700**

- Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 0
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 215.501.950
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 0
- Penyelenggaraan sistim penghubung layanan Pemerintah 0
- Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda 24.984.750

Untuk Bidang Statistik dilaksanakan dengan 1 (satu) Program yaitu :

1. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral,** yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
   1. **Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** **14.736.100**
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 0
   - Membangun Meta Data Statistik Sektoral 0
   - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 9.540.000
   - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu data Indonesia 5.195.500

Untuk Bidang Persandian dilaksanakan dengan 1 (satu) Program yaitu:

1. **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi,** yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
   1. **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota** **17.235.750**
   - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 0

• Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	17.235.750
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**0**
• Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0

Tabel 4-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

4.2. Target Kinerja Tahun 2025

Dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 memiliki target sebagai berikut :

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	38 OPD
			5 Nagari
			3 Puskesmas
2.	Meningkatnya Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	80 Layanan
3.	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%
		Jumlah informasi kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan melalui media internal pemerintah daerah	400 Berita
		Jumlah peliputan informasi program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah	400 kali
		Jumlah kerjasama media swasta untuk penyebaran informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	40 Media
4.	Meningkatnya pengamanan sistem informasi persandian	Aplikasi yang dilakukan asesment	1 Aplikasi
5.	Meningkatnya Keamanan Pelayanan Pemerintah yang Berbasis Aplikasi	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	80%
6.	Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan kebijakan Pembangunan	Persentase Data Statistik Sektoral	100%
		Jumlah Nagari Statistik	15 Nagari
		Jumlah Kecamatan Statistik	1 Kecamatan
7.	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan menajemen area perubahan perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB
8.	Meningkatnya Kinerja ASN	ASN yang tersertifikasi kompetensi	5 Orang

BAB 5. PENUTUP

Rencana Kerja perubahan tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ini juga merupakan penyesuaian target kinerja karena adanya pelantikan Kepala Daerah Tahun 2025 dan bentuk pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025 yang akan menjadi bagian pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2025, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin.

Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala yang terjadi, maka strategi pemecahan masalah yang digunakan di masa yang akan datang adalah:

1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dengan segala keterbatasannya serta sarana lain yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas
2) Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat selain sosialisasi dan publikasi hasil pembangunan serta kebijalan Pemkab bahwa pentingnya memiliki ijin-ijin, agar terwujudnya ketertiban secara umum, baik administrasi maupun non administrasi
3) Melakukan pengawasan di lapangan serta mengadakan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat termasuk sekolah-sekolah agar mematuhi aturan berlalulintas yang baik, tertib dan disiplin dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
4) Mengoptimalkan tenaga teknis yang terampil di berbagai bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di samping itu untuk meminimalkan kendala yang dihadapi maka jalan yang akan ditempuh antara lain:

    a) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien
    b) Menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal kegiatan secara tepat
    c) Secara bertahap mengadakan penyempurnaan strategi melaksanakan kegiatan
    d) Menyempunakan penyusunan anggaran agar teralokasi secara baik
    e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lebih intensif.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati Dharmasraya, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**5.985.790.200,00**	**6.227.036.800,00**	**5.787.120.400,00**	**-198.669.800,00**							**7.598.566.997,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.985.790.200,00**	**6.227.036.800,00**	**5.787.120.400,00**	**-198.669.800,00**							**7.598.566.997,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.785.790.200,00**	**6.162.546.100,00**	**5.755.148.550,00**	**-30.641.650,00**							**7.241.566.997,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo**				**100 %**	**100 %**	**4.769.992.387,00**	**4.701.756.700,00**	**4.472.547.500,00**	**575.374.610,00**							**5.345.366.997,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Pengisian data statistik sektoral* *Penyusunan Buku SAKIP, Renstra, Renja, LPPD, LKPJ* *Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan* *Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan*				1 unit 4 Dokumen 89 % 97 %	1 unit 4 Dokumen 89 % 97 %	50.000.000,00	20.528.000,00	10.189.000,00	-39.811.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Data dan Informasi		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				5 Data	5 Data	50.000.000,00	20.528.000,00	10.189.000,00	-39.811.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 23 orang*				21 orang	21 orang	2.814.183.330,00	2.825.530.120,00	2.825.533.270,00	11.349.940,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.870.466.997,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.814.183.330,00	2.825.530.120,00	2.825.533.270,00	11.349.940,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.870.466.997,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Diklat yang diikuti Staf Diskominfo*				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*ATK Kantor* *Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll* *Jumlah Tamu ke Diskominfo* *Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll* *Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain* *Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll* *Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah*				10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	183.659.457,00	149.926.500,00	82.989.150,00	-100.670.307,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		330.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.247.296,00	5.006.000,00	2.506.000,00	-741.296,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	29.909.000,00	14.938.000,00	-5.062.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.412.161,00	7.574.750,00	4.028.050,00	-1.384.111,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	17.400.000,00	10.396.000,00	-19.604.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	11.611.700,00	-13.388.300,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	75.036.750,00	39.509.400,00	-60.490.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Gedung Command Center th 1* *Kendaraan Roda 4 (1 unit)* *Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll* *Roda 2* *Saarana dan Prasarana Gedung Command Center th 2*				0 Unit 1 Unit 5 Unit	0 Unit 1 Unit 5 Unit	165.000.000,00	53.450.000,00	25.300.000,00	-139.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		310.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	4 Unit	50.000.000,00	53.450.000,00	25.300.000,00	-24.700.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Materai Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll* *Surat Terkirim* *Tagihan Listrik 2 unit,* *Tagihan Internet 1 Tahun* *THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang*				18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis	18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis	1.191.649.600,00	1.410.584.080,00	1.283.048.080,00	91.398.480,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.192.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	912.749.080,00	912.749.080,00	212.749.080,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	12.740.000,00	9.440.000,00	4.440.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	482.649.600,00	481.095.000,00	356.859.000,00	-125.790.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			483.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jaringan internet Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit) Videotron (1 unit)*				1 Tahun 1 unit	1 Tahun 1 unit	355.500.000,00	241.738.000,00	245.488.000,00	-110.012.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		527.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	17.500.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	3.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	38.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			39.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	5 Unit	100.000.000,00	50.100.000,00	70.200.000,00	-29.800.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.638.000,00	83.288.000,00	-16.712.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat**				**95 persen**	**95 persen**	**885.797.813,00**	**1.176.888.000,00**	**1.042.114.350,00**	**756.402.187,00**							**1.642.200.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah* *Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM)* *Kelompok informasi masyarakat* *Kontrak Media* *Perda/Perbup tentang SPBE* *Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)*				10 Media 118 Unit 1 Perbup 40 Kelompok 6 jenis 9 Kelompok	10 Media 118 Unit 1 Perbup 40 Kelompok 6 jenis 9 Kelompok	885.797.813,00	1.176.888.000,00	1.042.114.350,00	156.316.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyebaran informasi publik terhadap kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah		1.642.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				49 Laporan	12 Laporan	475.797.813,00	918.599.000,00	754.551.850,00	278.754.037,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.020.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				20 Permohonan	20 Permohonan	50.000.000,00	37.161.000,00	18.885.500,00	-31.114.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			51.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				6 Media	6 Media	300.000.000,00	212.978.000,00	262.777.000,00	-37.223.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			510.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				40 Orang	40 Orang	60.000.000,00	8.150.000,00	5.900.000,00	-54.100.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			61.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik**				**25 aplikasi**	**25 aplikasi**	**130.000.000,00**	**283.901.400,00**	**240.486.700,00**	**124.000.000,00**							**254.000.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Integrasi Rumah Data Sosialisasi Aplikasi baru*				25 Aplikasi 61 Unit	25 Aplikasi 61 Unit	130.000.000,00	283.901.400,00	240.486.700,00	110.486.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik		254.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 dokumen Laporan	1 dokumen Laporan	30.000.000,00	50.061.500,00	24.984.750,00	-5.015.250,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				3 Aplikasi	0 Aplikasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			153.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	1 Layanan	50.000.000,00	233.839.900,00	215.501.950,00	165.501.950,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			51.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**100.000.000,00**	**29.669.200,00**	**14.736.100,00**	**-85.263.900,00**							**102.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral**				**95 %**	**95 %**	**100.000.000,00**	**29.669.200,00**	**14.736.100,00**	**2.000.000,00**							**102.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral jumlah diklat, pelatihan, bimtek petugas statistik OPD produsen data dan wali data pendukung* *Jumlah Kecamatan Statistik* *Jumlah nagari Statistik* *Jumlah survey dan rekomendasi BPS*				130 orang 15 kegiatan 46 Nagari 5 Dokumen 9 Kecamatan	130 orang 15 kegiatan 46 Nagari 5 Dokumen 9 Kecamatan	100.000.000,00	29.669.200,00	14.736.100,00	-85.263.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan kebijakan pembangunan		102.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				52 Orang	10 Orang	50.000.000,00	19.258.200,00	9.540.600,00	-40.459.400,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			51.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	10.411.000,00	5.195.500,00	-44.804.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			51.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**100.000.000,00**	**34.821.500,00**	**17.235.750,00**	**-82.764.250,00**							**255.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah**				**38 %**	**38 %**	**100.000.000,00**	**34.821.500,00**	**17.235.750,00**	**155.000.000,00**							**255.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Asesment Aplikasi oleh BSSN* *Jumlah Asesment website oleh BSSN*				20 aplikasi 50 Unit	20 aplikasi 50 Unit	50.000.000,00	34.821.500,00	17.235.750,00	-32.764.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya keamanan pelayanan pemerintah yang berbasis aplikasi		102.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	50.000.000,00	34.821.500,00	17.235.750,00	-32.764.250,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			102.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital*				80 %	80 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya keamanan pelayanan pemerintah yang berbasis aplikasi		153.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				38 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			153.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H								**5.985.790.200,00**	**6.227.036.800,00**	**5.787.120.400,00**	**-198.669.800,00**							**7.598.566.997,00**	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN

N 202

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga rencana kerja ini dapat diselesaikan. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta hasil Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Kabupaten Dharmasraya tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 menjabarkan lebih rinci lagi mengenai program, kegiatan dan target capaian masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, seiring dengan penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Demikian kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Pulau Punjung, Agustus 2025

KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

NOFRIADI RONI PUSKA, ST, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19801115 200501 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I. PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Landasan Hukum.....

1.3 Maksud dan Tujuan.....

1.4 Sistematikan Penulisan Renja .....

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT TAHUN LALU .....

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....

3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....

3.2 Perubahan Target Kinerja Tahun 2024.....

BAB IV. PENUTUP.....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan 1Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (Renstra dan RPJMD) yang dituangkan dalam Renja OPD ke dalam perencanaan tahunan. Renja dapat

dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN dengan memperhatikan renja Provinsi dan Renja Kementrian terkait. Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renja OPD juga sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut terkait dengan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, rancangan awal RPJMD, Renstra OPD, rancangan awal RKPD Kabupaten Dharmasraya, memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dan hasil musrembang kecamatan tahun 2022, maka acuan yang dijadikan pedoman penyusunan

renja tahun 2024 adalah ranperda RPJ8PD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 pada tahapan keempat tahun 2021-2026.

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaannya baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tahapan dan proses penyusunan RKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya, RKPD Kabupaten Dharmasraya dan Renja Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 ini akan menjadi acuan bagi daerah dalam

menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) , acuan bagi Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD tahun 2024. Untuk lebih jelas alur penyusunan Renja Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 adalah sebagai berikut :

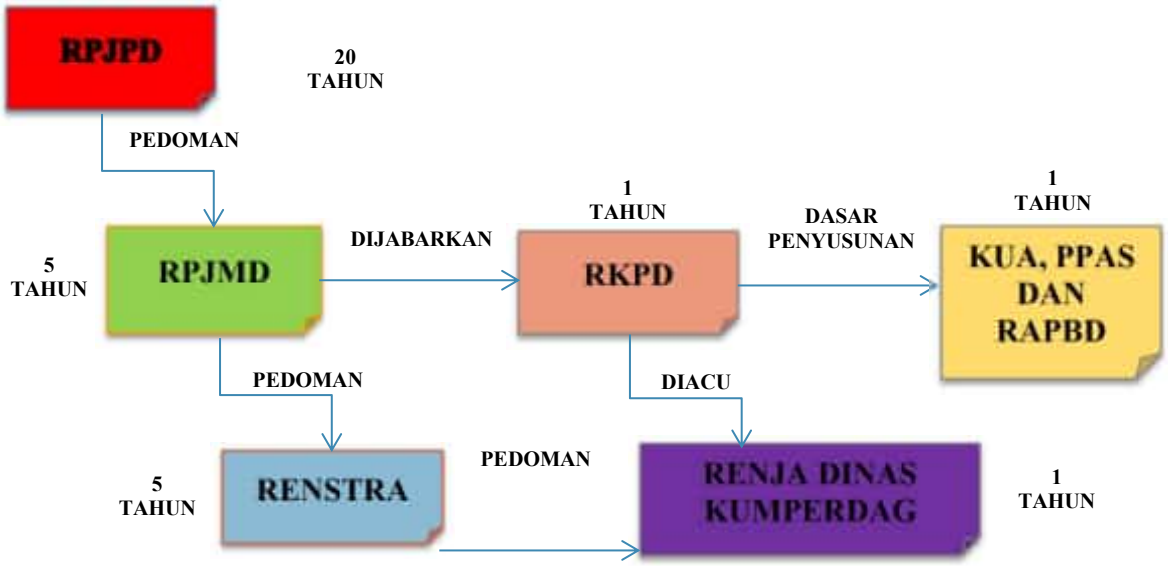

Seiring dengan sedang disusunnya RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas KUMPERDAG Tahun 2021-2026 pada saat ini, dan sinergisitas Renstra Kementerian dan Provinsi terkait, maka diperlukan beberapa penyesuaian terhadap dokumen Renja Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembar Lepas Sekretariat Negara Tahun 1994);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; (Lembar Lepas Sekretariat Negara Tahun 1995)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

16. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan

Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

1.6 Landasan Hukum

1.7 Maksud dan Tujuan

1.8 Sistematikan Penulisan Renja

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.2 Perubahan Target Kinerja Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025

Pada Tahun 2025 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun tersebut. Maka untuk menjabarkan tujuan dan sasaran agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya juga telah menetapkan indikator kinerja utama masing-masing sasaran strategis tersebut seperti digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2021 - 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Definisi
1	2	3	4
Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Yang Berdaya Saing	Persentase koperasi sehat	%	Persentase Koperasi Sehat Sesuai Kriteria
Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro Yang Berdaya Saing	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	Persentase pelaku usaha kriteria mikro menjadi pelaku usaha kriteria kecil

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Definisi
1	2	3	4
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Meningkatkan Pasar Tertib Ukur Menuju Terwujudnya Daerah Tertib Ukur	Persentase pasar rakyat yang telah direvitalisasi	%	Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi
	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	%	Persentase alat UTTP yang di tera, ditera ulang dan bertanda tera sah
Meningkatnya Daya Saing IKM	Persentase peningkatan omzet IKM	%	Persentase IKM yang meningkat omzetnya
	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	%	Persentase IKM yang telah memiliki izin usaha sesuai dengan aturan yang berlaku
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Soistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan oleh Inspektorat	Nilai/Prediket	Capaian nilai AKIP dari Inspektorat
	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Oleh Inspektorat	Nilai/Prediket	Hasil penilaian PMPRBdari Inspektorat

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan kinerja tahun kelima dari Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Yang Berdaya Saing Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro Yang berdaya Saing	Persentase koperasi sehat	68,66 %
		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	70 %
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Meningkatkan Pasar Tertib Ukur Menuju Terwujudnya Daerah Tertib Ukur	Persentase pasar rakyat yang telah direvitalisasi	37,83 %
		Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	67,41 %
3.	Meningkatnya Daya Saing IKM	Persentase peningkatan omzet IKM	11,40 %
		Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	90 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas kineja pemerintah daerah	Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan oleh Inspektorat	78,092 /BB

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa ada 4 sasaran strategis yang harus dicapai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan pada tahun 2025 dengan 8 indikator kinerja.

Berikut capaian kinerj a sampai dengan triwulan II tahun 2025 :

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan							5.500.000.000,00	4.949.183.715,00	4.791.394.870,00							6.902.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK							4.265.	4.549.	4.530.							5.432.	

						BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							500.000,00	155.215,00	054.120,00										500.000,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							4.265.500.000,00	4.549.155.215,00	4.530.054.120,00										5.432.500.000,00	
1	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 %	-	3.973.837.500,00	4.489.156.865,00	4.300.070.120,00										5.119.500.000,00	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Penigkatan Perencanaan, Penganggaran, dan	-			100 %	100 %	51.562.500,00	15.676.250,00	15.676.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan menge	2. Mewujudkan ekon	Meningkatnya kualitas					48.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	omi daerah yang maju	pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	27.562.500,00	15.676.250,00	7.837.850,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			28.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

				01	06																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	0 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	2.131.762.500,00	3.067.814.000,00	3.067.814.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerinta		3.008.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																			h			
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.123.851.063,00	3.067.814.000,00	3.067.814.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			3.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

				02	07																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	0 Laporan	7.911.437,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	0 %	8.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerinta		9.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																			h			
	2	1 7	0 1	2 . 0 3	0 0 0 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																

							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			9.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			100 %	0 %	10.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerinta		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																			h			
	2	1 7	0 1	2 . 0 4	0 0 0 4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																

							Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	0 %	20.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerinta		35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																			h			
	2	1 7	0 1	2 . 0 5	0 0 0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	330.418.750,00	167.550.650,00	167.550.650,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerinta		419.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																			h			
	2	1 7	0 1	2 . 0 6	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	10 Paket	4.858.750,00	5.000.000,00	2.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			4.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

				06	02																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	40 Paket	50.000.000,00	30.000.000,00	14.999.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				26 Paket	13 Paket	28.665.000,00	15.150.000,00	8.410.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
	2	1 7	0 1	2 . 0 6	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	6 Paket	40.000.000,00	23.400.000,00	13.965.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

				06	05																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	6 Paket	41.895.000,00	19.001.200,00	9.499.900,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	74.999.450,00	37.426.100,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
	2	1 7	0 1	2 . 0 6	0 0 1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																

							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	495.000.000,00	110.847.695,00	110.847.695,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerinta		535.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																			h			
	2	1 7	0 1	2 . 0 7	0 0 0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	330.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			335.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.	00	Pengadaan Mebel																

				0 7	0 5																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	40.000 .000,0 0	0,00	0,00	Kab. Dhar masr aya, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Melanj utkan hilirisa si dan menge mbang kan industr i berbas is sumbe r daya alam untuk menin gkatka n nilai tamba h di dalam negeri.	2. Mew ujud kan ekon omi daer ah yang maju			50.000 .000,0 0	DINAS KOPE RASI, USAH A KECIL, MENE NGAH DAN PERD AGAN GAN

	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	3 Unit	80.000.000,00	110.847.695,00	10.350.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			90.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
	2	1 7	0 1	2 . 0 7	0 0 1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	756.331.250,00	1.049.278.270,00	1.049.278.270,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerinta		861.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																			h			
	2	1 7	0 1	2 . 0 8	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.063.750,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			6.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

				0 8	0 2																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	226.012.500,00	309.920.270,00	309.920.270,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			230.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	24.255.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
	2	1 7	0 1	2 . 0 8	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	735.358.000,00	735.358.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	170.762.500,00	77.990.000,00	77.990.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerinta		189.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																			h			
	2	1 7	0 1	2 . 0 9	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	20.562.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

				09	02																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	51 Unit	22.050.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			24.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
	2	1 7	0 1	2 . 0 9	0 0 0 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																

							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	0 Unit	25.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

				09	09																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

2	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				100 %	100 %	50.000.000,00	30.078.800,00	57.044.150,00						55.000.000,00	
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	50.000.000,00	30.078.800,00	30.078.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro yang berdaya		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

						dalam Daerah Kabupaten/Kota											untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		saing			
	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota															

							Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	50.000.000,00	30.078.800,00	57.044.150,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	2	17	04			PROGRAM	Peningkatan jumlah				40 KSP/	40 KSP/	71.662.500,0	10.900.750,0	5.439.700,00							73.000.000,0	

						PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	KSP/USP yang berkualitas baik				USP	USP	0	0						0	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keangg	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	71.662.500,00	10.900.750,00	10.900.750,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Fasilitasi dan Penguatan kelembagaan koperasi yang berdaya saing		73.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

						otaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											gkatkan nilai tambah di dalam negeri.					
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																

							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	5 Unit Usaha	71.662.500,00	10.900.750,00	5.439.700,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			73.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

4	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Perkoperasian bagi Koperasi				100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	157.984.750,00						55.000.000,00	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Fasilitasi dan Penguatan kelembagaan koperasi yang berdaya saing		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

						Daerah Kabupaten/Kota											untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.					
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi															

							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				67 Orang	104 Orang	50.000.000,00	0,00	157.984.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
5	2	17	06			PROGRAM	-				-	-	0,00	0,00	0,00							0,00	

						PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	menin gkatka n nilai tamba h di dalam negeri.					
	2	1 7	0 6	2 . 0 1	0 0 0 4	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																

							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				-	52 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

6	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				100 %	100 %	120.000.000,00	19.018.800,00	9.515.400,00							130.000.000,00	

	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-			100 %	100 %	120.000.000,00	19.018.800,00	19.018.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro yang berdaya saing		130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

						dengan Para Pemangku Kepentingan																
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																

							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				90 Unit Usaha	0 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.	00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																	

				01	04																
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				90 Unit Usaha	50 Unit Usaha	70.000.000,00	19.018.800,00	9.515.400,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Pajak Daerah	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.234.500.000,00	400.028.500,00	261.340.750,00								1.470.000.000,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						800.000.000,00	269.929.000,00	169.891.000,00								915.000.000,00	
7	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan				100 %	100 %	410.000.000,00	198.068.250,00	124.647.500,00								445.000.000,00	

	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksanya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-			100 %	100 %	350.000.000,00	198.068.250,00	198.068.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan saran a dan prasarana pasar rakyat		380.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.	00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																	

				01	01																	
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			310.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya,								

															Koto Salak, Semua Kel/Desa							
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																

							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				12 Unit	1 dokumen dan 12 bln Unit	50.000.000,00	198.068.250,00	124.647.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-			100 %	0 %	60.000.000,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekono	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	mi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																

							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekono	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	mi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
8	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUT	Terciptanya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Parenting				100 %	0 %	200.000.000,00	7.994.000,00	5.061.250,00						250.000.000,00	

						UHAN POKOK DAN BARANG PENTING															
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 %	0 %	50.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	n nilai tamba h di dalam negeri.					
	3	3 0	0 4	2 . 0 1	0 0 0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																

							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terjaminnya Persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	90.000.000,00	7.994.000,00	7.994.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan saran a dan prasarana pasar rakyat		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.	00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan															

				02	02																
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	7.994.000,00	5.061.250,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota															
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				5 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	0 %	60.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.					
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																

							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	0 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

9	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				100 %	100 %	130.000.000,00	63.866.750,00	40.182.250,00						150.000.000,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-			100 %	100 %	130.000.000,00	63.866.750,00	63.866.750,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan pasar tertib ukur menuju terwujudnya Daerah Terti		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		b Ukur			
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																

							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				800 Unit	500 Unit	60.000.000,00	59.363.000,00	37.677.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.	00	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																	

				01	02																	
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	4.503.750,00	2.505.250,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal																
							Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				50 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
10	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri				100 %	0 %	60.000.000,00	0,00	0,00							70.000.000,00	

	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlakasanannya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-			100 %	0 %	60.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan saran a dan prasarana pasar rakyat		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	2.	00	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																

				0 1	0 5																	
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				1 UMKM	0 UMKM	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	3	3 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							434.500.000,00	130.099.500,00	91.449.750,00								555.000.000,00	
1 1	3	3 1	0 2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet IKM Peningkatan Perencanaan dan Pemebangunan Industri				100 298 % IKM	298 100 IKM %	350.000.000,00	110.945.000,00	81.877.500,00								460.000.000,00	
	3	3 1	0 2	2 . 0 1		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupa	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	350.000.000,00	110.945.000,00	110.945.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan daya saing IKM		460.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGAN

						ten/Kota											sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.					GAN
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				50 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.	00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																

				01	05																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				80 Dokumen	80 Dokumen	150.000.000,00	110.945.000,00	81.877.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																
							Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				8 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
12	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase				100 100 % persen	100 100 % persen	84.500.000,00	19.154.500,00	9.572.250,00							95.000.000,00	

							data Informasi Industri yang ter update															
	3	3 1	0 4	2 . 0 1		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupa	Tersedinya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	84.500 .000,0 0	19.154 .500,0 0	19.154 .500,0 0			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan daya saing IKM		95.000 .000,0 0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

						ten/Kota											tambah di dalam negeri.				
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)															

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				24 Dokumen	24 Dokumen	40.000.000,00	19.154.500,00	9.572.250,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	3 1	0 4	2 .	0 0	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																	

				01	03																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				11 Dokumen	0 Dokumen	44.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	JUMLAH	5.500.000.000,00	4.949.183.715,00	4.791.394.870,00							6.902.500.000,00	

Dari capaian pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II diatas, dapat dilihat bahwa yang bisa dianalisa hanyalah sebatas anggaran, mulai dari rencana sampai dengan realisasi yang telah dilaksanakan pada triwulan II.

Pada bulan April 2025 telah dilaksanakan Pergeseran IV yang Merupakan Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Tahun 2025, sehingga terjadi Pengurangan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Sebesar 50%. Dengan demikian Pelaksanaan Program Kegiatan juga harus disesuaikan dengan kondisi Anggaran yang ada.

Program dan kegiatan di Sekretariat yang bersifat rutin, semuanya bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan menyesuaikan dengan ketersedian anggaran pada GU Dinas.

Program dan kegiatan pada Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, pada dasarnya juga sudah terlaksana sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Program dan kegiatan di Bidang Perdagangan tidak ada kendala yang berarti, sejauh ini masih sesuai dengan rencana, namun ada penyesuaian target kinerja khusus nya pada IKU UTTP yang ditera dan yang ditera ulang, pada awal tahun 2025 target 800 Unit dirubah menjadi 500 unit.

Program dan kegiatan di Bidang Perindustrian juga sudah terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan.

Secara keseluruhan pelaksanaan Program dan kegiatan sudah dapat terlaksana sebagaimana mestinya walaupun agak terkendala dari ketersediaan anggaran di GU dinas,hal ini mungkin bisa diatasi kedepannya dengan merevisi jadwal kegiatan dan rencana anggaran kasnya sehingga di harapkan tidak ada kendala lagi kedepannya. Sekaitan dengan target program dan kegiatan yang ada pada Renstra, untuk pelaksanaan tahun ini tidak ada permasalahan dan diharapkan masih bisa tercapai sepenuhnya.

Pencapaian target kinerja yang ada pada Indikator Kinerja Utama, sampai dengan evaluasi triwulan II ini belum bisa kita jadikan patokan karena seluruh target IKU tersebut merupakan akumulasi dari hasil kegiatan yang dilaksanakan secara paralel selama satu tahun dan tidak bisa dipecah evaluasinya menjadi bagian – bagian pada setiap triwulannya. Hal ini baru bisa dilakukan setelah triwulan IV berakhir pada tahun ini.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

MATRIK RENJA PERUBAHAN 2025 (SIPD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				

								2023	2024											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan							5.500.000.000,00	4.949.183.715,00	4.791.394.870,00							6.902.500.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.265.500.000,00	4.549.155.215,00	4.530.054.120,00							5.432.500.000,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							4.265.500.000,00	4.549.155.215,00	4.530.054.120,00							5.432.500.000,00	
1	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP	-				100 %	-	3.973.837.500,00	4.489.156.865,00	4.300.070.120,00							5.119.500.000,00	

						ATEN/KOTA															
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penigkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	51.562.500,00	15.676.250,00	15.676.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi		48.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																			peme rintah				
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	27.562.500,00	15.676.250,00	7.837.850,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			28.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	tambah di dalam negeri.						
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				6 Laporan	0 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

							Kinerja SKPD										gkatkan nilai tambah di dalam negeri.					
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	2.131.762.500,00	3.067.814.000,00	3.067.814.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas		3.008.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																		tambah di dalam negeri.		kinerja instansi pemerintah			
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.123.851.063,00	3.067.814.000,00	3.067.814.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			3.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.						
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				20 Laporan	0 Laporan	7.911.437,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumbe	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

							Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											r daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.					
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	0 %	8.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan siste		9.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		m akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			
	2	17	01	2.03	004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																

							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			9.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			100 %	0 %	10.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	1 7	0 1	2 . 0 4	0 0 0 4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																
							Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	0 %	20.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan		35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	330.418.750,00	167.550.650,00	167.550.650,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		419.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	10 Paket	4.858.750,00	5.000.000,00	2.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			4.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	40 Paket	50.000.000,00	30.000.000,00	14.999.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

				06	03																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				26 Paket	13 Paket	28.665.000,00	15.150.000,00	8.410.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	6 Paket	40.000.000,00	23.400.000,00	13.965.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
	2	1 7	0 1	2 . 0 6	0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	6 Paket	41.895.000,00	19.001.200,00	9.499.900,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

				06	09																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	74.999.450,00	37.426.100,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	495.000.000,00	110.847.695,00	110.847.695,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan		535.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			
	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	330.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			335.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.	00	Pengadaan Mebel																

				07	05																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	3 Unit	80.000.000,00	110.847.695,00	10.350.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			90.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
	2	1 7	0 1	2 . 0 7	0 0 1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	756.331.250,00	1.049.278.270,00	1.049.278.270,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		861.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.063.750,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			6.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
	2	1 7	0 1	2 . 0 8	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	226.012.500,00	309.920.270,00	309.920.270,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			230.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

				08	03																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	24.255.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	735.358.000,00	735.358.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
	2	1 7	0 1	2 . 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	170.762.500,00	77.990.000,00	77.990.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan		189.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	20.562.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

				09	02																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	51 Unit	22.050.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			24.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
	2	1 7	0 1	2 . 0 9	0 0 0 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																

							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	0 Unit	25.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

				09	09																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

2	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				100 %	100 %	50.000.000,00	30.078.800,00	57.044.150,00							55.000.000,00	
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	50.000.000,00	30.078.800,00	30.078.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro yang berdaya saing		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

						Kabupaten/Kota											meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.					
	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota															

							Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	50.000.000,00	30.078.800,00	57.044.150,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	2	17	04			PROGRAM	Peningkatan jumlah				40 KSP/	40 KSP/	71.662.500,00	10.900.750,00	5.439.700,00							73.000.000,00	

						PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	KSP/USP yang berkualitas baik				USP	USP										
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keangg	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	71.662.500,00	10.900.750,00	10.900.750,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Fasilitasi dan Penguatan kelembagaan koperasi yang berdaya saing		73.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

						otaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											gkatkan nilai tambah di dalam negeri.					
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																

							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	5 Unit Usaha	71.662.500,00	10.900.750,00	5.439.700,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			73.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

4	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Perkoperasian bagi Koperasi				100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	157.984.750,00						55.000.000,00	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Fasilitasi dan Penguatan kelembagaan koperasi yang berdaya saing		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

						Kabupaten/Kota											untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.				
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi															

							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				67 Orang	104 Orang	50.000.000,00	0,00	157.984.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
5	2	17	06			PROGRAM	-				-	-	0,00	0,00	0,00							0,00	

						PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	menin gkatka n nilai tamba h di dalam negeri.					
	2	1 7	0 6	2 . 0 1	0 0 0 4	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																

							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				-	52 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

6	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				100 %	100 %	120.000.000,00	19.018.800,00	9.515.400,00							130.000.000,00	

	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-			100 %	100 %	120.000.000,00	19.018.800,00	19.018.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro yang berdaya saing		130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

						Para Pemangku Kepentingan																
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																

							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				90 Unit Usaha	0 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.	00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																

				01	04																
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				90 Unit Usaha	50 Unit Usaha	70.000.000,00	19.018.800,00	9.515.400,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Pajak Daerah	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.234.500.000,00	400.028.500,00	261.340.750,00								1.470.000.000,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						800.000.000,00	269.929.000,00	169.891.000,00								915.000.000,00	
7	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan				100 %	100 %	410.000.000,00	198.068.250,00	124.647.500,00								445.000.000,00	

	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksanya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-			100 %	100 %	350.000.000,00	198.068.250,00	198.068.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		380.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.	00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																	

				01	01																	
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			310.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya,							

															Koto Salak, Semua Kel/Desa						
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															

							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				12 Unit	1 dokumen dan 12 bln Unit	50.000.000,00	198.068.250,00	124.647.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-			100 %	0 %	60.000.000,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																

							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
8	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUT	Terciptanya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Parenting				100 %	0 %	200.000.000,00	7.994.000,00	5.061.250,00							250.000.000,00	

						UHAN POKOK DAN BARANG PENTING															
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 %	0 %	50.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	n nilai tamba h di dalam negeri.					
	3	3 0	0 4	2 . 0 1	0 0 0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																

							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terjaminnya Persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	90.000.000,00	7.994.000,00	7.994.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.	00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan															

				02	02																
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	7.994.000,00	5.061.250,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				5 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	0 %	60.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.					
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																

							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	0 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

9	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				100 %	100 %	130.000.000,00	63.866.750,00	40.182.250,00						150.000.000,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-			100 %	100 %	130.000.000,00	63.866.750,00	63.866.750,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan pasar tertib ukur menuju terwujudnya Daerah Tertib		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		Ukur			
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																

							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				800 Unit	500 Unit	60.000.000,00	59.363.000,00	37.677.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.	00	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																	

				01	02																
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	4.503.750,00	2.505.250,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal															
							Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				50 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
10	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri				100 %	0 %	60.000.000,00	0,00	0,00							70.000.000,00	

	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlakasanaanya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-			100 %	0 %	60.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	2.	00	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																

				01	05																	
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				1 UMKM	0 UMKM	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	3	3 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							434.500.000,00	130.099.500,00	91.449.750,00								555.000.000,00	
11	3	3 1	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan Perencanaan dan Pemebangunan Industri Persentase peningkatan omzet IKM				100 298 % IKM	100 298 % IKM	350.000.000,00	110.945.000,00	81.877.500,00								460.000.000,00	
	3	3 1	02	2. 01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupa	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	350.000.000,00	110.945.000,00	110.945.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan daya saing IKM		460.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANG

						ten/Kota											sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.					AN
	3	3 1	0 2	2 . 0 1	0 0 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				50 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.	00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																	

				01	05																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				80 Dokumen	80 Dokumen	150.000.000,00	110.945.000,00	81.877.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																
							Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				8 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

																	dalam negeri.					
12	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase data Informasi				100 100 % persen	100 100 % persen	84.500.000,00	19.154.500,00	9.572.250,00							95.000.000,00	

							Industri yang ter update															
	3	3 1	0 4	2 . 0 1		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupa	Tersedinya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	84.500.000,00	19.154.500,00	19.154.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan daya saing IKM		95.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

						ten/Kota											tambah di dalam negeri.				
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)															

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				24 Dokumen	24 Dokumen	40.000.000,00	19.154.500,00	9.572.250,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	31	04	2.	00	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																	

				01	03																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				11 Dokumen	0 Dokumen	44.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	JUMLAH	5.500.000.000,00	4.949.183.715,00	4.791.394.870,00							6.902.500.000,00	

3.1 Perubahan Target Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA

No	/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI		TARGET RENSTRA	TARGET RENJA PD 2024	
			2023	2024	2025	AWAL	PERUBAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	KOPERASI/ KOPERASI DAN USAHA MIKRO /Persentase Koperasi Sehat	%	59.7	45		45	45
2	USAHA MIKRO /KOPERASI DAN USAHA MIKRO/Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	%	58.55	60		60	60
3	PERDAGANGAN/ PERDAGANGAN/Persentase Pasar Rakyat Yang Telah Direvitalisasi	%	32.4	37		37	37
4	METROLOGI / PERDAGANGAN/Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah	%	44.77	45		45	45
5	PERINDUSTRIAN / PERINDUSTRIAN/Persentase Peningkatan Omzet IKM	%	8.54	8,3		8,3	8,3
6	PERINDUSTRIAN / PERINDUSTRIAN/Persentase IKM Yang Memiliki Legalitas Sesuai Standar	%	75.68	80		80	80
7	Nilai AKIP oleh Inspektorat	Nilai/Predikat	76.07/ BB	76,184 / BB		76,184 / BB	76,184 / BB

Pada Renja Perubahan 2025 ini tidak diperlukan melakukan perubahan pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

Karena meskipun anggran tidak sesuai dengan yang diharapkan namun semua pihak di bawah koordinasi pimpinan sudah di instruksikan untuk tetap dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana awal dengan cara melakukan inovasi dan improvisasi dalam mensiasati keterbatasan anggaran pada kegiatan dimaksud.

BAB IV
PENUTUP

Renja perubahan Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025. Renja Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 mempedomani rancangan awal RKPD Tahun 2025, RPJMD Tahun 2021-2026, perkiraan hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Kumperdag Tahun 2021-2026, dan hasil Musrembang kecamatan tahun 2022. Sehubungan dengan sedang disusunnya rancangan awal RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan rancangan awal Rencana Strategis Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 saat ini, maka Renja Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 perlu dilakukan untuk sinkronisasi perencanaan tahunan dengan rancangan awal RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan rancangan awal Rencana Strategis Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Dalam Renja perubahan Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, dan industri yang diemban oleh Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari

seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Perubahan Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya tahun 2025.

Semoga Renja perubahan Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI

RENJA PERUBAHAN

2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Dharmasraya

RENCANA KERJA (RENJA)
DPMPTSP TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) disusun dengan cara meninjau keserasian antara rancangan renja skpd dengan aspirasi masyarakat, dimana outputnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten Dharmasraya. Rencana kerja skpd Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya disusun sebagai penjabaran program-program serta arahan kebijakan yang ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) perubahan dpmptsp Kabupaten Dharmasraya periode 2021 – 2026, serta memperhatikan perkembangan kebutuhan prioritas pada tahun 2025.

Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD. Perencanaan pembangunan merencanakan pendapatan SKPD dan juga pemanfaatan atau pengeluaran dari pendapatan tersebut. Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) untuk program program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Sikabau, Oktober 2025

Kepala DPMPTSP,

NALDI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP : 198204112000121002

DAFTAR ISI

BAB 1. .. PENDAHULUAN 1-1

1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Landasan Hukum 1-2
1.3. Maksud dan Tujuan 1-3
1.3.1. Maksud 1-3
1.3.2. Tujuan 1-3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1-3

BAB 2. .. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN* 2-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-1
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-7
2.3.1. Isu strategis 2-7
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 2-7
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-1
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan 2-1
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD 2-1

BAB 3. .. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3-1

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 3-1
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait 3-1
3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat 3-1
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3-1

BAB 4. .. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 4-1
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 4-24

BAB 5. .. PENUTUP ..... Error! Bookmark not defined.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
   1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024.
   2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
   3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2019 s.d 2024.

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2025

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan prangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida
2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini siserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.

e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan kepala BKPM RI Nomor 3 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintergrasi secara elektronik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2023
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan non Perizinan Kepada Kepala Dinas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II **Hasil Evaluasi Renja DPMPTSP Tahun 2025 TRIWULAN II**
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

BAB IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

BAB V Penutup

BAB 2.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rencana Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya adalah penjabaran Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatik Kabupaten Dharmasraya.Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya menyajikan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024

.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			2024			RENSTRA 2024		Akhir RENSTRA 2026		ANGGARAN		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*=6/5*100*	*8*	*9*	*=9/8*100*	*11*	*12*	*=12/11*100*				*14*	*=12/14*100*	*16*	*=12/16*100*	*18*	*19*	*=19/18*100*
1	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Moal	Miliar	173.783	283.336	163	163.308	423.750	25948	55500	1.126.000	202.883	1,2	1.228.327.091.106	102	197,639	62681	263099	427.976	Rp 1.052.974.000	Rp 1.036.272.608	9.841.388.372
		Persentase Realisasi Pertumbuhan Penanaman Modal	%	-	-	-	32	14	43750	33	669	2.027	3,4	9.03	266	3,4	2.027	40	1.67250			
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	BB	BB	BB	73,44	7386	10057	7344	7304	10	76,87	75,85	99	78,44	9946	7844	57292576	Rp 2.458.814.490.000	Rp 2.405.215.636.00	9.782.013.429
		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DPMPTSP	Nilai	-	-	-	261	3543	13575	0	0	-				41,1	0	459	0			
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP	Nilai	8830	8820	100	8833	8735	9889	8836	8880	100	88,39	88,70	101	88,41	10050	8884	9995			

		Persentase Pengaduan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	10000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan

1. Indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

SASARAN STRATEGIS I : Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif

1. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal
2. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal

Tabel 0-1 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	**Rp**	160.860.163.587	148.462.000.000	196.395.700.000	423.750.000.000	1.126,000.000.000	1.228.327.091.106	282.556.716.978
Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	%	0,07	0,32	1,96	4,24	66,9	9.03	(77)

Sumber : Bidang DalakTahun 2024 (diolah)

Untuk Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif ada 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dapat dijadikan alat ukur pencapaian.

1. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal

Nilai realisasi investasi pada tahun 2024 dengan target Rp. 1,2 T terealisasi Rp. 1.228.327.091.106 Triliun dengan kategori berhasil. Sedangkan pada tahun 2025 triwulan II nilai realisasi investasi dengan target Rp. 1,3 T terealisasi Rp. 282.556.716.978 M dengan kategori sangat berhasil. Maka baik tahun 2023 maupun tahun 2024 nilai realisasi investasi selalu melebihi target yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Dharmasraya yang terdapat pada Renstra 2021-2026.

Perkembangan realisasi investasi berdasarkan LKPM dan Izin Usaha ini sangat tergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha baik PMA maupun PMDN dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tahunnya. Jika kepatuhan para pengusaha dalam menyampaikan LKPM tersebut semakin baik maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi

investasi pada tahun-tahun berikutnya akan semakin meningkat dan pemerintah daerah dapat memantau perkembangan investasi dengan baik. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pengusaha maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pun akan cenderung menurun bahkan semakin berkurang.

Oleh karena itu, sinergitas antara pengusaha dengan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan agar setiap kegiatan investasi di daerah dapat dikendalikan dan terpantau dengan baik sehingga diharapkan Iklim Investasi di Kabupaten Dharmasrya cenderung lebih kondusif pada tahun-tahun berikutnya.

2. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal

Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal pada tahun 2024 dengan target 3,4 % terealisasi 9,03 % dengan kategori cukup berhasil dan melebihi target yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Dharmasraya yang terdapat pada Renstra 2021-2026.

Pencapaian target indicator kenaikan persentase pertumbuhan realisasi investasi penanaman modal pada sasaran strategis yang kedua tahun 2023 diharapkan dapat berkonstribusi terhadap pencapaian misi 3 RPJMD periode tahun 2021-2026 kabupaten Dharmasraya yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada tujuan meningkatnya realisasi investasi dengan sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi di Kabupaten Dharmasraya.

Pertumbuhan realisasi investasi penanaman modal di Kabupaten Dharmasraya masih didominasi oleh PMN yaitu sebesar 91%. Faktor pendorong tingginya pertambahan investasi yaitu :

a. Iklim investasi yang kondusif;
b. Pelayanan perizinan secara online yang memudahkan pelaku usaha melakukan permohonan perizinan kapanpun dan dimanapun;
c. Fasilitasi investor dalam menyelesaikan kendala terkait investasi
d. Dibukanya layanan konsultasi dan pendampingan pembuatan perizinan melalui OSS.

Hal ini juga didukung dengan adanya pula bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebagai bentuk fasilitasi yang dilakukan kepada investor untuk merealisasikan penanaman modalnya di wilayah Kabupaten Dharmasraya, yang kegiatannya mencakup bimbingan pengisian permohonan dan kelengkapan administrasi perizinan dan non perizinan pelaksanaan penanaman modal, bimbingan kewajiban pemenuhan kewajiban investor dan bimbingan pengisian Laporan

Kegiatan Penanaman Modal. Selain itu juga didukung dengan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025.

2. Indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

SASARAN STRATEGIS II : *Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Untuk mewujudkan sasaran strategis II ini didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang dijadikan tolak ukur pelaksanaan kinerja.

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP
3. Persentase Pengaduan yang diselesaikan

Tabel 0-2 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Triwulan III 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai		BB	BB	73,86	73,04	75,85	-
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP	Nilai		88,27	88,82	87,35	88.80	88,70	97,10
Persentase Pengaduan yang diselesaikan					100	100	100	100

Sumber : Dinas PMPTSP Tahun 2024 (diolah)

Capaian indikator Kinerja pada sasaran II Triwulan III DPMPTSP tahun 2025 untuk Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **97,10** dengan kategori **Sangat Berhasil** pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target yang harapkan, serta kemampuan SDM dalam pencapaian target kinerja tersebut.

BERIKUT HASIL PENILAIAN 9 UNSUR DIATAS DI DAPATKAN NILAI RATA-RATA:

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATARATA	MUTU PELAYANAN
U1	Persyaratan	3,867	A
U2	Prosedur	3,889	A
U3	Waktu Pelayanan	3,867	A
U4	Biaya/Tarif	3,889	A
U5	Produk Layanan	3,889	A
U6	Kompetensi Pelaksana	3,867	A
U7	Perilaku Pelaksana	3,884	A
U8	Sarana dan Prasarana	3,884	A
U9	Penanganan Pengaduan	4,000	A
INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PMPTSP		**97,10**	**Sangat Baik**

Dari hasil diatas rata-rata semua unsur sudah pada kategori sangat baik. Sehingga secara keseluruhan untuk indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didapatkan nilai **97,10** dengan kategori **Sangat Baik.**

Laporan Pengaduan dan tindak lanjut ada empat kasus yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan empat kasus tersebut terselesaikan dengan baik.

LAPORAN PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	NAMA/ PERUSAHAAN	ALAMAT	NO/ TANGGAL PENGADUAN	MEDIA	JENIS PENGADUAN	TANGGAPAN/TINDAK LANJUT	STATUS	WAKTU/ TGL PENYELESAIAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SESUAI SOP
1	Maudy	Tiumang Kecamatan Tiumang Baru	19 Agustus 2025	Secara Langsung/ *Lisan*	Alur pengurusan SIA	Menjelaskan prosedur pendaftaran dan penerbitan izin bagi apotek untuk memulai operasionalnya. Prosesnya dimulai dengan apoteker mengajukan berkas persyaratan kepada DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya, Kemudian DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya akan mensurati Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perihal rekomendasi, kemudian tim pemeriksa Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi lokasi apotek dalam waktu 6 hari kerja. Berdasarkan hasil verifikasi, apotek akan diberi izin atau penundaan/penolakan.	Selesai	1 (Satu) Hari/ 19 Agustus 2025	14 Hari Kerja
2	Doni Kartago	Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung	28 Agustus 2025	Secara Langsung/ *Lisan*	Persyaratan NIB untuk Koperasi Merah Putih	Persyaratan : NPWP Koperasi Merah Putih, NPWP Pengurus Koperasi, Fc KTP Pengurus, SK Pendirian Koperasi Merah Putuh, Scan Akta Notaris Koperasi, NIK Koprasi dan Email Koperasi	Selesai	1 (Satu) Hari/ 28 Agustus 2025	14 Hari Kerja
3	Ika Putri Ramdani	Silago, Kecamatan Sembilan Koto	8 September 2025	Secara Langsung/ *WhatsApp*	Pengajuan perpanjangan SIP di MPP Digital ditolak (*SS WhatsApp sebagaimana terlampir*)	Menyampaikan untuk pengajuan di akun sisdmk satu sehat, kemudian melakukan pemanduan dengan menyampaikan untuk bikin di MPP Digital dengan pilihan Habis Kontrak	Selesai	1 (Satu) Hari/ 8 September 2025	14 Hari Kerja
4	Yenly	Pekanbaru, Riau	23 September 2025	Secara Langsung/ *WhatsApp*	Menonaktifkan SIP di MPP Digital (*SS WhatsApp sebagaimana terlampir*)	Menyampaikan untuk menonaktifkan Riwayat Pekerjaan di Akun Sisdmk	Selesai	1 (Satu) Hari/ 23 September 2025	14 Hari Kerja
							Jumlah Pengaduan		4
							Jumlah Pengaduan yang belum terselesaikan		0
							Persentase		100%

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasya dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

a. Faktor Internal

1) Kekuatan:

a) Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b) Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat/pemohon izin;

c) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mendukung proses perizinan dan non perizinan;

d) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;

e) Koordinasi internal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cukup optimal.

2) Kelemahan:

a) Kualitas/kompetensi aparatur dalam bidang penanaman modal, perizinan berusaha dan non perizinan berusaha belum optimal dan belum memadai;

b) Belum optimalnya tata laksana antara Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu dengan OPD teknis terkait pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha.

b. Faktor Eksternal

1) Peluang:

a) Dukungan goodwill dan political will yang sangat kuat untuk meningkatkan investasi, pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;

b) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;

c) Adanya dukungan dari Pemangku Kepentingan (stakeholder);

d) Tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap dunia usaha atas kemudahan layanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang berbasis teknologi.

2) Ancaman

a) Kebutuhan investor akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi belum terpenuhi;

b) Pemahaman investor terhadap ketentuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih rendah

Kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2024 dan pencapaian pelaksanaan kinerja PD sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pada tahun 2025 DPMTPSP Kabupaten Dharmasraya sudah melaksanakan program dan kegiatan belum sesuai dengan ploting dan tata kala yang sudah dibuat oleh masing masing bidang, karena beberapa pelaksanaan kegiatan mundur dari tatakala. Realisasi capaian untuk masing masing kegiatan sampai dengan triwulan III sebagian besar belum mencapai 100 %. Hambatan dan Permasalahan yang

dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan sampai dengan triwulan III di tahun 2025 adalah sebagaian besar di kegiatan yang berhubungan dengan anggaran yang harus efisiensi sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan karena dampaknya yang sangat penting bagi perangkat daerah, berikut isu-isu strategis DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya:

1. Masih rendahnya kemitraan usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah/besar;
2. Masih rendahnya usaha mikro kecil yang berkembang menjadi usaha menengah/besar
3. Masih rendahnya informasi terkait potensi investasi di Kabupaten Dharmasraya berbasis teknologi informasi;
4. Masih belum optimalnya investor yang merealisasikan modalnya dan sadar akan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Masih adanya potensi perubahan regulasi di pemerintah pusat terkait perizinan dan penanaman modal.
6. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Sistem pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman, adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten dalam satu wadah yaitu dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP); S
7. Pada satu sisi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan semakin tinggi, namun pada sisi yang lain kemampuan anggaran sangat terbatas padahal dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan kegiatan;
8. Tertib administrasi dan adanya kepastian hukum berusaha di Bidang Penanaman Modal mendorong terciptanya iklim investasi di Kabupaten Dharmasraya yang lebih kondusif.

2.3.2 Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

1. Perlunya penyesuaian peraturan di daerah sesuai dengan peraturan perundangan terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Contoh : Terdapat kekosongan jabatan fungsional karena ketidaksesuaian antara Peraturan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
2. Adanya kebijakan pelimpahan kewenangan tentang pembangunan dan pengembangan sistem informasi perizinan dan non perizinan.
3. Pelaku usaha belum menyampaikan LKPM karena ketidaktahuan adanya kewajiban penyampaian LKPM dan ketidaktahuan tata cara penyampaian LKPM. Selain hal tersebut kewenangan untuk pelaporan LKPM ada di kantor pusat perusahaan sehingga untuk lokasi cabang di Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki hak akses untuk menyampaikan pelaporan hal ini yang menjadi permasalahan di daerah sehingga laporan terkendala.
4. Pelaku usaha belum menyampaikan LKPM karena ketidakpatuhan pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian LKPM secara berkala.
5. Terlalu banyak penyusunan evaluasi penyelenggaraan kinerja DPMPTSP yang diselenggarakan oleh Kementerian maupun Lembaga terkait.
6. Masih kurang optimalnya kegiatan promosi investasi.
7. Perizinan Berusaha melalui OSS RBA masih dirasa sulit bagi masyarakat terutama pelaku usaha mikro.
8. Mall Pelayanan Publik tidak dapat dikembangkan karena keterbatasan luas bangunan gedung.
9. Pengguna bangunan gedung masih menjadi satu dengan Perangkat Daerah lain.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal baik PMA maupun PMDN serta pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, penanaman modal dan pengadaan barang/jasa, diantaranya:

1. Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi pelayanan melalui elektornik / internet dalam website http://dpmptsp.dharmasrayakab.go.id
2. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal,
3. Meningkatnya pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat dan pengusaha,
4. Terciptanya pelayanan perizinan yang transparan, cepat, tepat dan murah.
5. Memberikan pelayanan prima di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kepada masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.
6. Meningkatkan upaya pemberian informasi serta penanganan konsultasi dan pengaduan terhadap izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
7. Melakukan kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya, sehingga diharapkan semua izin sudah ada regulasinya dan untuk memacu perkembangan potensi investasi melalui kemudahan berusaha.
8. Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait promosi kegiatan festival, kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya, dan dapat berpartisipasi ikut pameran di suatu Kota atau Negara dengan menampilkan produk- produk khas Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Pengembangan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Dharmasraya melalui kerjasama dengan instansi, lembaga, BUMN, BUMD dan atau swasta yang memberikan pelayanan publik bagi masyarakat dan pengembangan Sistem Informasi MPP Online Terintegrasi.

2. Penyusunan Kajian Akademik dan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 50 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
3. Penyusunan Peraturan Bupati Dharmasraya yang mengatur mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan.
4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
5. Pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui temu investor, podcast, pameran, siaran radio, pembuatan video dan pembuatan leaflet.
6. Peningkatan kualitas SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat.
7. Koordinasi dan sinkronisasi DPMPTSP dengan Perangkat Daerah Teknis dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah.
8. Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan.
9. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Inspeksi Pengawasan Perizinan Berusaha secara terintegrasi dengan melibatkan Perangkat Daerah Teknis untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha.
10. Integrasi sistem dan data antar Perangkat Daerah yang tergabung dalam Print From Home dan Mal Pelayanan Publik.
11. Pengembangan Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan.
12. Pengembangan sistem yang telah berjalan agar memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini disajikan pada perangkat daerah yang menerima usulan Musrenbang dan/atau Pokok-pokok pikiran Anggota DPRD

2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Tabel 0-3 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2		NIHIL						
3								
4								
5								

Pada tahun lalu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak ada mendapatkan alokasi dana untuk penyelenggaraan usulan Musrenbang Kecamatan.

2.4.2 Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD

Tabel 0-4 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2		NIHIL						
3								
4								
5								

Pada tahun lalu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak ada mendapatkan alokasi dana untuk penyelenggaraan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD.

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Penelaahan Renja K/L dan SKPD provinsi yang telah dibahas dalam forum PD provinsi

3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

Melakukan penelaahan terkait kebijakan K/L jika ada terkait dengan kebijakan/ kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya

Sasaran : Mewujudkan masyarakat Indonesiayang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Strategi :

a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs)
b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
c. Meningkatkan efektivitas kerjasama penanaman modal
d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
e. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
h. Meningkatkan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
i. Meningkatkan produktivitas penanaman modal
j. Meningkatkan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
k. Meningkatkan daya saing dan akses pasar

l. Meningkatkan penanaman modal pada industry yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor

m. Meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar

n. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya alam

Arahan Kebijakan : 1. Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal.

2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bekelanjutan.

3.1.2 Penelaahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Melakukan penelaahan terkait kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu terkait Provinsi Sumatera Barat yang telah dibahas dan disepakati pada forum perangkat daerah provinsi yang telah dilaksanakan. Sub bab ini dapat berupa kesepakatan target maupun informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan/ berlokasi di Kabupaten Dharmasraya dapat dilaksanakan sebagai berikut :

Sasaran : 1. Sasaran Strategis pertama : “Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat”

Dengan indikator kinerja : “Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN”;

2. Sasaran Strategis kedua : “Meningkatnya Kualitasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu”;

Dengan indikator kinerja : “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”;

3. Sasaran Strategis ketiga : “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”

Strategi : 1. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi, yaitu :

a. Mengembangkan potensi dan peluang investasi;

b. Memberikan kemudahan berinvestasi di Sumatera Barat;

c. Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi;

d. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan fasilitasi penanganan permasalahan penanaman modal;

e. Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannyamelaporkan LKPM;

2. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai Standar Pelayanan, yaitu ;

a. Membuat Regulasi Teknis Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan izin- izin Strategis;

b. Menerapkan Pola Online System Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan;

c. Meningkatan Kapasitas Aparatur PTSP;

d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan

Arahan Kebijakan : 1. Kebijakan untuk mencapai sasaran meningkatnya realisasi investasi,yaitu:

a. Mengoptimalkan fungsi pemusatan basis data potensi dan peluang investasi dan pengolahan informasi peluang investasi;

b. Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah;

c. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Sumatera Barat melalui berbagai media.

d. Melaksanakan Pengawasan dan evaluasi, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;

e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap PMA & PMDNPotensi jumlah UMKM dan Koperasi yang cukup besar dalam perekonomian

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah terkait Pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya, sehingga pelayanan perizinan menjadi ujung tombak dalam menggerakan perekonomian masyarakat serta memudahkan investor dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Dharmasraya. Sehinggga terwujud komitmen pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat,mudah dan transparan.Strategis dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pengembangan /Upgrading Aplikasi, dibentuknya Satgas Percepatan realisasi LKPM yang melibatkan semua bidang di Dinas PMPTSP dan lintas SKPD,lanjutan pelaksanaan forum Investasi bersama atau komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten,Penyederhanaan regulasi investasi penanaman

modal, peningkatan kompetensi melalui Diklat/pelatihanyang mengacu pada aktivitas unit layananan per bidang, kegiatan monitoring dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang program dan kegiatan. Koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dan Kabupaten/kota serta dengan kementrian dan Lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan sudah bersinergi dengan mengacu kepada Visi Kementrian Investasi/BKPM yaitu visi BKPM adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan VISI DAN MISI Visi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat 2013 – 2032 adalah : "Menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan Utama Investasi di Wilayah Sumatera Yang Berdaya Saing Tinggi dan Paling Kooperatif serta Paling Menarik Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang lebih Sejahtera dan Berkeadilan". Misi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat 2013 – 2032 sebagai berikut :

1. Meningkatkan infrastruktur di semua sektor yang menunjang untuk menjadikan Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu tujuan utama penanaman modal di wilayah Sumatera dan Indonesia tahun 2032.
2. Meningkatkan iklim kondusif yang berdaya saing tinggi sesuai persepsi para stakeholders penanaman modal bagi upaya mempercepat pengembangan dan peningkatan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat tahun 2032.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah kooperatif bagi penanaman modal di wilayah Sumatera tahun 2032.
4. Mengembangkan semua potensi yang ada dalam desain kemenarikan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah paling menarik bagi penanaman modal di wilayah Sumatera tahun 2032.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Misi RPJMD : " Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing"

Tujuan RPJMD : "Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing".

Sasaran RPJMD :

1. Meningkatnya investasi. Sasaran ini diarahkan pada meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif, serta melakukan pengendalian dan pengawasan penanaman modal serta kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal.
2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas kenerja Pemerintahan. Sasaran ini diarahkan pada meningkatkan kualitas pelayanan serta kebijakan dan pelaporan.

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi	Proyeksi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif								
Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	Milyar	243.688.133.770	148.462.000.000	163.308.200.000.000	179.639.020.000.000	197.639.922.000.000	197.602.922.000.000	239.099.535.620.000
Persentase Realisasi Pertumbuhan Penanaman Modal	%		3,0	3,2	3,3	3,4	3,5	4,0
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah								
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai		72,8	73,44	75,31	76,87	78,44	80,0
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DPMPTSP	Nilai		21,1	26,1	31,1	36,1	41,1	45,9
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai		88,30	88,33	88,36	88,39	88,41	88,43
Persentase Pengaduan yang diselesaikan	%		100	100	100	100	100	100

BAB 4.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya 2021-2026. Dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat 4 (empat) program yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2025 yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengeleolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/Kota, yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**6.655.000**
• **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	6.655.000
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.308.339.000**
• Pembayaran Gaji Pegawai ASN	2.272.976.000

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**268.991.250**
• Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.782.000
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.331.000
• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.278.000
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.289.000
• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.552.500
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.273.000
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**13.000.000**
• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**599.787.710**
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	128.988.110
• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.660.000
• Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	450.629.600
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**77.250.000**
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	59.750.000

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**3.393.000**
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**3.393.000**
• Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3.393.000
• Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
	60.473.050
1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	60.473.050
• Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	13.023.150
• Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	34.885.450
• Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	4.685.050
• Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	7.879.400
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**27.756.600**
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**27.756.600**
• Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	3.521.250
• Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	5.720.450
• Pengawasan Penanaman Modal	18.514.900.
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
• Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun DPMPTSP Kabupaten Dharamasraya dengan partisipasi berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki

kondisi DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya yang ada. Kondisi umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani sudah diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
2. Didukung sarana dan prasarana yang layak dan memadai;
3. Investasi di Kabupaten Dharmasraya meningkat sehingga lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dharmasraya meningkat;
4. Adanya peta investasi untuk memudahkan calon investor berinvetasi di Kabupaten Dharmasraya;
5. Penyelenggaraan MPP dapat bertahan dan berjalan sesuai dengan harapan yaitu memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi.

Urusan pemerintah bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 4 (empat) program, 4 (empat) kegiatan, 11 (sebelas) sub kegiatan serta 1 (satu) program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 0-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
													Nasional	Daerah
1	2					3	4	8		9	10	11	12	13
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				6.689.098.750				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.689.098.750				
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6.689.098.750				
128	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen		5.338.007.750				
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	6.655.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	6.655.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	20 Orang/bulan		2.308.339.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		2.308.339.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Orang/bulan 1 Paket 1 Paket 1 Paket undefined undefined 1 Paket 1 Laporan 1 Paket		268.991.250			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		5.455.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		44.775.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		17.115.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		26.999.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		36.696.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		137.950.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	57 Unit 1 Paket 2 Unit 44 Unit		1.944.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

	2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	294.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54 Unit	0	154.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	69 Unit	242.725.000	1.045.400.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	450.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	565.090.500				Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		105.415.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		15.660.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		440.015.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemeliharaa AC ruangan pemeliharaan laptop/pc pemeliharaan printer Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara/diservice Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit 9 Unit 30 Unit 12 Unit 1 Unit		244.932.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	21.500.000	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	40.500.000	53.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	0	2.440.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	0	30.940.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	53.771.040	143.052.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
129	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan Investasi	2 dokumen		154.425.485				
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi yang dapat mendorong daya saing penanaman modal	2 dokumen	0	110.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal								
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0	110.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunya pemetaan potensi dan perencanaan pengembangan penanaman modal daerah	1 Dokumen	0	44.425.485			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	44.425.485	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

130	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan Promosi dan kerjasama investasi	4 Dokumen 4 kegiatan		402.556.250				
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	4 kegiatan		402.556.250			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen		375.056.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota								

							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	0	27.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
131	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	100 persen 100 persen	110.017.650	184.017.265				
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 persen		184.017.265			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah								

							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen		70.018.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha		39.999.650	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko								

							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	0	43.999.615	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko								
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	0	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
132	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Penanaman Modal	100 persen		580.092.000				
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	220 perusahaan		580.092.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				580.092.000				
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.		87.013.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	450 Pelaku Usaha		319.052.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal								

							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	285 Kegiatan Usaha		174.027.000	Kab. Dharmasraya , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
133	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya data dan sistem informasi Perizinan dan non perizinan pada Penanman Modal	4 Dokumen	0	30.000.000				
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Aplikasi yang dikembangkan dengan perangkat lunak	4 Dokumen	0	30.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								

							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	0	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
										6.689.098.750					

4.2. Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 0-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai realisasi Investasi	Rp	423,75 Milyar	1,126 Triliun	197,639,922,000,000	197,602,922,000,000	1,130 Triliun	1,140 Triliun
2	Persentase Realisasi Pertumbuhan Penanaman Modal	%	14	66,9	3,4	3,5	66,10	66,20
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,86	73,04	76,87	78,44	76,87	77,44
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP	Nilai	87,35	88,80	88,39	88,41	88,39	88,41
5	Persentase Pengaduan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang mengacu pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Dharmasraya serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025. Rencana Awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan Sumber Daya Manusia di tahun 2025 sangat dibutuhkan penambahan anggaran sehingga peningkatan pelayanan dan keterampilan sumber daya aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat akan lebih meningkat, Untuk optimalisasi penyusunan dokumen ini perlu setiap bagian dan bidang menyusun rencana dan langkah-langkah persiapan pelaksanaannya.

5.2 Kaidah –Kaidah Pelaksanaan

a. Dinas PMPTSP berkewajiban mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026.
b. Merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
c. Setiap bagian dan bidang dalam menyusun program, kegiatan dan Sub Kegiatannya harus mampu melaksanakan peningkatan kinerja pelayananf sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dan mampu memberikan hasil (outcome) yang optimal yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna layanan dan para investor.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas PMPTSP dalam pencapaian Visi dan Misi
Bupati Dharmasraya dalam mencapai tujuan sasaran program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 maka Dinas PMPTSP telah dan akan melanjutkan beberapa program unggulan yang inovatif dalam peningkatan pelayanan perizinan dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- Inovasi SIAMPUH (Sistem Informasi Aman Mengurangi Jarak Tempuh)
  Evaluasi pelaksanaan inovasi SIAMPUH sebagai perantara pengajuan permohonan izin dan memberikan informasi persyaratan perizinan di Kecamatan dan Nagari sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengurus izin

- FRIDAY ENGLISH DAY
  FRIDAY ENGLISH DAY adalah inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas SDM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memakai bahasa inggris dan meningkatakan lerning organitation serta meningkatkan life skills sumber daya manuasia sehingga menghasilkan sumber daya manuasia yang berkualitas dapat melayani Penanaman Modal Asing.
- Perizinan Puskesmas Mandiri Capai Target (PPKM CTAR)
  PPKM CTAR adalah pelayanan perizinan mandiri yang memproses Surat Izin Praktek (SIP) atau Perpanjangan Surat Izin Praktek petugas kesehatan secara online maka petugas kesehatan dapat memperoleh izin secara langsung dengan tidak mengganggu waktu tugas pelayanan kesehatan di tempat tugas.
- Tegur Sayn Bila Tidak Raman (TESA BIDARA)
  TESA BIDARA adalah Inovasi pelayanan publik meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), untuk meningkatkan percaya diri pelugas pelayanan untuk masyarakat berdasarkan 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) dalam rangka meningkatkan investasi di Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- Generasi Izin Urus Sendiri (GENIUS)
  GENIUS adalah Inovasi Perizinan Penelitian untuk mahasiswa/ mahasiswi yang akan mengambil data sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan secara Online dan mempermudah mahasiswa/ mahasiswi mempercleh izin penelitian secara mandiri serta memberikan motivasi generasi milenial yang mempunyai kemampuan digitalisasi dalam perkembangan teknologi untuk memproses izin penelitian sehingga menjadi generasi yang berkualitas
- Gerakan Seribu Nomor Induk Berusaha (GERBU NIB)
  GERBU NIB adalah Inovasi pelayanan perizinan secara serentak oleh petugas pelayanan didampingi petugas Nagari langsung kelokasi tempat usaha untuk memberikan sosialisasi dan informasi terkait perizinan serta evaluasi izin usaha dan memben kemudahan untuk memperoleh izin usaha terutama usaha UMKM
- Perizinan Mandiri Penerapan di Nagari (PERMENDAGRI)
  PERMENDAGRI adalah penerapan pelayanan penzinan mikro bagi pelaku usaha di Nagari yang berupa penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), dimana inovasi ini bertujuan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha
- Kami Layani dengan Ikhas dan Sepenuh Hati (KALA DIA SEHATI)
  KALA DIA SEHATI adalah inovasi untuk membentuk Sumber Daya Manuasia (SDM) yang berkualitas dan memberikan pelayanan terbaik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya dengan tugas Menerapakan Budaya PRIMA Profesional, Ramah, Ikhas, Maksimal dan Akurat. Melayani dengan tulus tanpa pambrih, dan Bekerjasama anatara Sumber Daya Manuasia di Dinas PMPTSP.
- Live Informasi, Konsultasi dan Pengaduan Layanan Penzinan (LIVE IKLAN LARIZ) LIVE IKLAN LARIZ adalah pelayanan perizinan tentang informasi dan konsultasi serta pengaduan terkait perizinan secara live di media sosial sekaligus mensosialisasikan tentang perizinan kepada masyarakat.
- Inovasi PERI KELING (Perizinan Keliling Nagari)
  Melaksanakan pelayanan di Nagari dengan petugas dari Dinas PMPTSP turun ke Nagari berdasarkan jadwal yang ditetapkan bekerjasama dengan petugas pelayanan Nagari untuk penerbitan izin usaha
- Inovasi IMUD (Izin Mudah untuk Lanjut Usia)
- Mal Pelayanan Publik Digital (MPP DIGITAL)
  MPP DIGITAL adalah Pemanfaatan teknologi digital dalam pemberia pelayanan kepada masyarakat yang mengakselerasi dan memodernisasi pelayanan publik

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PRUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1. ..PENDAHULUAN.....1-1

1.1. Latar Belakang.....11-1
1.2. Landasan Hukum.....1-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....1-3
1.3.1. Maksud…….....**Error! Bookmark not defined.**
1.3.2. Tujuan..... *1-4*
1.4. Sistematika Penulisan……..1-4

BAB 2. ..*EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU*.....2-6

2.1. Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025……2-6

BAB 3. ..RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……..3-15

3.1. Matrik Perubahan Rencana Kerja.....3-155
3.2. Perubahan Target Kinerja Pada IKU Perangkat Daerah……....3-18

BAB 4. ..PENUTUP.....4-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.1 Matrix Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.2 Perubahan Target Kinerja Pada IKU Perangkat Daerah.....**3-28**.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bab 1 memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Dokumen Renja PD

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun lima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan. Renja Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang terdiri

dari 10 Program, 13 Kegiatan dan 27 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda Dan Olahraga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2018-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan Tahun 2025 serta pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisa, Pemuda dan Olahaga . Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisa, Pemuda dan Olahaga . Kabupaten Dharmasraya secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisa, Pemuda dan Olahaga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisa, Pemuda dan Olahaga hingga Triw II Tahun 2025 dan prediksi Tahun 2026
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan Renja PD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisa, Pemuda dan Olahaga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai dengan triw. II tahun Berkenaan.

Bab ini memuat Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisa, Pemuda dan Olahaga Kabupaten Dharmasraya triw. II Tahun 2025,

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab ini berisikan Matrik Perubahan Renja dan Perubahan target kinerja pada IKU Perangkat daerah .

BAB IV Penutup

BAB 2. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab II. Memuat evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan (Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, yang memenuhi target kinerja, yang melebihi target kinerja, factor 2 penyebab tidak tercapainya)

2.1. Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Tahun 2025, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Dharmasraya sebagai Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Melaksanakan 3 (dua) urusan yaitu Urusan Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata dan Bidang Pemuda dan Olahraga.

Dalam pelaksanaan Urusan tersebut, Dinas Kebudayaan. Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan 8 program dengan 13 kegiatan dengan 26 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.800.731.112,- dengan realisasi anggaran hingga triwulan II sebesar Rp. 3.697.751.609,- atau 34,24 %, dengan realisasi kinerja 34,24 % kondisi sampai triwulan II,

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Juni 2025 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan. Lebih jelasnya evaluasi Renja Dinas Kebudayaan. Pariwisata, Pemuda dan Olahraga hingga triwulan 2 disampaikan pada tabel 2.1 berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PERIODE PELAKSANAAN: TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024
												I		II		III		IV						[%]
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			38.389.307.199	289	14.110.186.923		10.817.300.000	10.900.731.112		1.272.373.427		2.425.378.182					3.697.751.609		18.287.937.532		47,43
		2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			6.410.357.600	-	1.844.577.885		3.151.700.000	2.168.916.676		179.326.000	-	74.643.859	-	-	-	-	253.969.759	-	2.098.640.635		32,74
		2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			799.299.000	-	186.948.800		465.000.000	456.783.300		60.295.000	-	50.323.250	-	-	-	-	110.618.250	-	297.567.050		37
	Meningkatkan peran pemuda sebagai pembangunan			Jumlah organisasi pemuda yang aktif	416 Organisasi															-		0		
				Jumlah pemuda/kepemudaan yang berprestasi	40 Orang															-		0		
				Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	30 Orang															-		0		
		2 19 2 02.01	Penyuluhan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			799.299.000	-	186.948.800	385	465.000.000	456.783.300	168	60.295.000	-	50.323.250	-	-	-	-	110.618.250	-	297.567.050		37
		2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dan Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	22 orang	629.299.000	22 org	6.948.800	80	-	0		-		-					0		6.948.800		1
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota							200.000.000										0		0		0
		2 19 2 02.01 0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	25.000.000	5 unit	180.000.000	3	-	0									0		180.000.000		720
			Pelatihan Pengelolaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berpotensi dalam meningkatkan potensi pemuda							75.000.000	364.657.400		-		49.200.250					49.200.250		49.200.250		197
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitasan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota						360	215.000.000	72.125.900	108	60.295.000		1.123.000					61.418.000		61.418.000		344
		2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			5.611.058.600	-	1.526.032.785	1	1.964.700.000	1.562.167.376	-	119.031.000	-	24.320.609	-	-	-	-	143.352.509	-	1.671.385.285		33
	Meningkatkan perolehan cabang olahraga dan prestasi olahraga			Jumlah cabang olahraga yang Aktif Bisa tercapai	30 Cabor															0		0		
				Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	29 Cabor															0		0		
				Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	7 Cabor															0		0		
				Jumlah pelatih bersertifikat	5 Orang															0		0		

		2 19 3 02.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**50.000.000**	-	**875.303.185**	-	**1.121.700.000**	**423.383.946**	-	**2.381.600**	-	**13.482.000**	-	-	-	-	-	**15.863.600**	-	**891.256.785**		1.793
		2 19 3 02.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	terlaksananya koordinasi dan terselenggaranya Kompetisi satuan pendidikan dasar	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan		5 dimensi	50.000.000											0		0		-
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedi					9 unit	1.071.700.000	423.383.946,00		2.381.600		13.482.000					0	15.863.600		**15.863.600**		
		2 19 3 02.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang	1 Tahun	25.000.000	6 unit	875.303.185	9 Unit	-	0										0		**875.303.185**		3.502
		2 19 3 02.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**650.000.000**	-	**320.849.500**	-	**400.000.000**	**564.070.930**	-	**10.163.500**	-	**9.018.600**	-	-	-	-	-	**19.182.100**	-	**340.031.600**		52
		2 19 3 02.02 1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (LPI, Turnamen SSB, Basket Ball, Turnamen Sepak Bola U-35)	4 even	25.000.000	4 even		5 Kegiatan	250.000.000	63.575.000				850.000					0	850.000		**850.000**		3
		2 19 02 2.02 02	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			25.000.000			10 orang	150.000.000	500.495.930		10.163.500		8.168.600					0	18.332.100		**18.332.100**		73
		2 19 3 02.02 0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	1 orang	600.000.000	55 org	320.849.500	0	-	0										0		**320.849.500**		53
		2 19 03 2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**			**1.800.000.000**	-	-	-	**300.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		2 19 3 02.03.07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Tersedianya Bonus Atlet Olahraga Kabupaten/Kota (Porprov)		900.000.000	8 cbg	-		50.000.000											0		0		
		2 19 3 02.03.09	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Penghargaan		900.000.000	8 cbg	-	250 org	250.000.000											0		0		-
		2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahrag				0		**25.000.000**	0		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 19 03 2.04 06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota					3	35.000.000											0		0		
		2 19 03 2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	penyediaan data		**2.585.058.400**	-	**331.796.100**	1	**110.000.000**	**574.712.500**	-	**106.486.000**	-	**1.820.000**	-	-	-	-	-	**108.306.000**	-	**440.096.500**		17
		2 19 03 2.05 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		25.000.000			11 laporan	110.000.000	574.712.500,00		106.486.000		1.820.000					0	108.306.000		**108.306.000**		433
		2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pembinaan dalam rangka	1 Unit	2.561.058.400	1 unit	331.796.100	1	-	0										0		**331.796.100**		13
	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat			Jumlah organisasi pramuka yang aktif	210 Organisasi																0		0		
		2 19 4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**525.000.000**	-	**129.696.300**	-	**700.000.000**	**150.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**129.696.300**		25
		2 19 4 02.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**			**525.000.000**	-	**129.696.300**	-	**700.000.000**	**150.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**129.696.300**		25
		2 19 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			25.000.000			1 organisasi	50.000.000											0		0		-
		2 19 04 2.01 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	orang	25.000.000	35 org	129.696.300	5 org	25.000.000	150.000.000		-		-					0	0		**129.696.300**		518

	2 19.04 2.01 03	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		25.000.000			10 laporan	250.000.000											0		0		-
	2 19.04 2.01 08	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan	1 Tahun	450.000.000	-	-	25 unit	75.000.000											0		0		-
	2 19.04 2.01 09	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan					15 organisasi	300.000.000											0		0		
	2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**31.361.335.700**	**289**	**12.289.519.193**	**347**	**11.646.200.000**	**8.605.632.096**	**39**	**1.065.950.097**	**35**	**2.350.734.332**	-	-	-	-	**52**	**3.417.684.429**	-	**15.427.203.622**	-	33
	2 22 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**22.142.362.100**	**187**	**3.067.541.198**	**98**	**4.571.200.000**	**3.899.875.160**	**38**	**728.152.641**	**33**	**734.577.232**	-	-	-	-	**52**	**1.463.129.873**	-	**4.531.071.063**	-	20
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Tersedia dan Termanfaatkan	A Nilai/Predikat																0		0		
			Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Budparpora	45,7 Nilai/Predikat																0		0		
	2 22.01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**216.684.000**	-	-	-	**40.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 22.01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja Tahun 2022	1 Dokumen	216.684.000	-	-	1 doku	40.000.000			-								0		0		-
	2 22.01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**14.920.820.000**	**22 org**	**2.134.975.695**	**22**	**3.200.000.000**	**2.775.120.000**	**19**	**526.075.229**	**19**	**542.004.400**	-	-	-	-	**19**	**1.068.080.629**	-	**3.203.060.324**		21
	2 22.01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang	14.920.820.000	22 org	2.134.975.695	22	3.200.000.000	2.775.120.000	19	526.075.229	19	542.004.400					19	1.068.080.629		3.203.060.324		21
	2 22.01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**25.000.000**	-	-	-	**13.200.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 22.01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas pegawai		25.000.000				13.200.000			-								0		0		-
	2 22.01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1.316.288.386**	**36**	**163.847.438**	**7**	**231.000.000**	**104.124.856**	**5,50**	**88.515.879**	**###**	**7.699.000**	-	-	-	-	**7,25**	**96.214.879**		**260.062.320**		22
	2 22.01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5 pkt	30.866.400	1 pkt	4.879.000	1	6.000.000	2.500.000	0.25	1.976.000	0.3	425.000					0.5	2.401.000		**7.280.000**		24
	2 22.01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	6 pkt	169.242.000	3 pkt	14.913.500	3	30.000.000	17.600.000	1	11.238.000	1	3.683.000					2	14.921.000		**29.836.500**		19
	2 22.01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 pkt	23.000.000	3 pkt	7.486.000	1	25.000.000	5.760.000	0.25	3.219.000	0.3	1.459.000					0.5	4.678.000		**12.164.000**		1
	2 22.01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	101.400.000	2 pkt	16.998.000	1	25.000.000	6.550.000	0.35	2.511.000	0.3	2.132.000					0.6	4.643.000		**21.641.000**		21
	2 22.01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	6 paket	87.200.000	1 pkt	10.582.100	1	25.000.000	9.778.000	0.65	9.625.000		-					0.65	9.625.000		**20.207.100**		20
	2 22.01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 laporan	919.579.900	36	158.986.933	12	120.000.000	68.036.300	3	59.946.870		-					3	59.946.870		**168.933.726**		18
	2 22.01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12	15.000.000											0		0		
	2 22.01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**25.000.000**	-	-	**8**	**110.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 22.01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		25.000.000			3	60.000.000	-				-						0		0		-
	2 22.01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang					5	50.000.000	0.00				-						0		0		
	2 22.01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**5.221.500.000**	**144**	**716.477.645**	**24**	**422.300.000**	**520.408.300**	**12**	**108.938.542**	**18**	**159.049.032**	-	-	-	-	**22**	**267.987.574**		**984.465.219**		15
	2 22.01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	25.000.000	36	3.960.000	12	5.000.000	4.000.000	3	1.200.000	3	1.200.000					6	2.400.000		**6.360.000**		25
	2 22.01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.000.000.000	36	158.961.700	12	150.000.000	183.400.000	3	30.047.842	3	29.914.432					6	59.962.274		**210.824.034**		21

	2 22 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Laporan	76.500.000	36	11.340.000	12	17.000.000	9.880.000	3	1.505.000	1	475.000					4	2.380.000		13.620.000		18
	2 22 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.112.100.000	36	550.315.885	12	950.000.000	643.120.000	3	76.185.700	5	127.110.500					6	203.345.300		753.661.185		18
	2 22 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**423.700.000**	**7**	**52.636.400**	**29**	**155.000.000**	**199.022.410**	**1**	**4.622.000**	**2**	**26.224.800**	-	-	-	-	**4**	**30.846.800**		**83.483.200**		20
	2 22 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	111.000.000	1	16.341.000	1	25.000.000	17.500.000	0.22	1.990.000	0.4	7.720.200					0.57	9.710.200		26.051.200		23
	2 22 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 2 Unit	276.000.000	6	36.295.400	6	50.000.000	38.000.000	1	2.632.000	2	18.504.600					3	21.136.600		57.432.000		21
	2 22 01 2.09 03	Pemeliharaan Mebel	terpeliharanya kursi		1.700.000		-	1	10.000.000											-		-		-
	2 22 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5.000.000		-	20	25.000.000	-										-		-		-
	2 22 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan ruangan kantor	1 unit 1 unit	30.000.000		-	1	50.000.000	144.322.410		-		-						-		-		-
	2 22 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**5.795.204.100**	-	**4.287.821.294**	**36**	**4.756.000.000**	**2.384.864.775**	**8**	**24.077.856**	-	**21.234.700**	-	-	-	-	-	**45.312.556**	-	**6.333.133.850**	-	109
Meningkatnya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat			Persentase lembaga adat yang	55 persen																-		-		
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Terbentu																				-		-		
	2 22 02 2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**4.585.000.000**	-	**3.776.907.474**	**36**	**456.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.776.907.474**		126
	2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	4.550.000.000		3.776.907.474	36	250.000.000	8		-	-	-	-	-		-		-		**3.776.907.474**		127
	2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	terlaksananya penguatan adat dan istiadat terhadap LKAAM KAN dan Bundo Kanduang		25.000.000			200 org	200.000.000											-		-		-
	2 22 02 2 02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Jenis Kesenian Daerah yang dilestarikan					3	**1.750.000.000**															
	2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan					5 objek	1.500.000.000			-										-		
	2 22 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan					3	250.000.000			-										-		
	2 22 02 2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**1.210.204.100**	-	**510.913.820**	**500**	**2.500.000.000**	**2.384.864.775**	**8**	**24.077.856**	-	**21.234.700**	-	-	-	-	-	**45.312.556**	-	**556.226.376**	-	46
	2 22 02 2.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan	1 objek	1.150.204.100	1 Tahun	510.913.820	1	250.000.000	218.257.350	8	20.931.856	-	5.705.500	-	-		-		26.637.356		**537.551.176**		46
	2 22 03 2.04 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina		25.000.000			500	750.000.000			-								-		-		-
	2 22 04 2.05 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Dilestarikan		25.000.000			15 unit	1.500.000.000	2.180.857.420		3.146.000		15.529.200						18.675.200		**18.675.200**		75

	3 26 02 2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			25.000.000	-	-	2	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 26 02 2.01 02		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Retosan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2	25.000.000	-	-	2	150.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 26 02 2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			25.000.000		14.583.600	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
	3 26 02 2.02 06		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		25.000.000		14.583.600	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
	3 26 03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			517.410.000		103.775.183	2	570.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif				Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang Ditiliti	57 lembaga																										
	3 26 03 2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			517.410.000		103.775.183	2	570.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	3 26 03 2.01 02		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	517.410.000		103.775.183	2	570.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	103.775.183	-	20							
	3 26 05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			50.000.000		237.630.152	36	300.000.000	26.148.350	-	26.096.430	-	-	-	-	-	-	-	-	26.096.430	-	237.630.152	-	475					
Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif				Jumlah pelaku ekonomi kreatif	60																										
	3 26 05 2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			25.000.000	-	237.630.152	36	300.000.000	26.148.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.630.152	-	1.311					
	3 26 05 2.01 06		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	25.000.000		237.630.152	36	300.000.000	26.148.350	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	237.630.152	-	1.311							
	3 26 05 2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			25.000.000	-	-	-	-	-	-	26.096.430	-	-	-	-	-	-	-	-	26.096.430	-	26.096.430	-	104					
	3 26 05 2.02 01		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	25.000.000			0	-	-		26.096.430									26.096.430		26.096.430		104					
TOTAL						30.389.367.100	289	14.110.186.023	382	15.857.900.000	10.000.731.112	39	1.272.373.427	35	2.425.339.152	-	-	-	-	52	3.697.751.609	-	10.101.881.202	-	47,36					

Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)	23,38%
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)	34,24%
Predikat kinerja	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	(Isilah disini .....)
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	(Isilah disini .....)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	(Isilah disini .....)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	(Isilah disini .....)

Dikeluarkan di
Pada Tanggal 2025
(Nama Kabupaten)
KEPALA

(LASMETA, M.Kes)

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KEPALA

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Kebudayaan. Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Triwulan II Tahun 2025 pada Tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Program yang tidak memenuhi target kinerja ada 5 program atau 62,5% (5 program dari 8 program)., kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja ada 8 kegiatan, atau 57,14% (8 kegiatan dari 14 Kegiatan).

sedangkan sub kegiatan yang tidak memenuhi target ada 12 sub kegiatan atau 46,15 % (12 Sub kegiatan dari 26 sub kegiatan).

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Program yang telah memenuhi target kinerja ada 3 program atau 37,50 % (3 program dari 8 program)., Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja ada 6 kegiatan, atau 42,85% (6 kegiatan dari 14 Kegiatan).

sedangkan sub kegiatan yang telah memenuhi target ada 21 sub kegiatan atau 53,84 % (14 Sub kegiatan dari 26 sub kegiatan).

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja

Program / kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan adalah nihil atau 0 %.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

a..Faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya target kinerja antara lain:

- Pada Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda, kegiatan ini dilaksanakan pada triw. III.
- Kegiatan pengembangan SDM kepramukaan pada triwulan II belum adanya proposal yang diajukan dari penerima hibah.
- Masih banyak proposal mengajuan dana hibah yang belum terealisasi, disebabkan masih dalam proses.
- Belum Terdatanya Cagar budaya yang akan ditetapkan;
- Masih banyak proposal mengajuan dana bantuan rehab rumah gadang yang belum terealisasi, disebabkan masih dalam proses.

b. Faktor-faktor yang menjadi pendukung terpenuhinya atau melebihi target kinerja antara lain:
    - Perencanaan yang semakin matang;
    - Koordinasi yang semakin baik dan peningkatan pemahaman tugas,
    - Dukungan SDM dan Sarpras;
    - Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

2.1.5 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.

Dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat berimplikasi pada tidak tercapainya target program dan kegiatan sehingga target-target program yang belum tercapai tersebut perlu perhatian khusus atau lebih diprioritaskan dan diambil kebijakan agar target tersebut dapat dicapai pada tahun rencana.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Tersebut:

a. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berkualitas;

b. Melakukan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi yang lebih intensif;

c. Mengoptimalkan dukungan sarpras, anggaran dan SDM yang dimiliki.

BAB 3.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan RKPD Kab. Dharmasraya tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga sebelum perubahan sebesar Rp. 15.892.900.000,- pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 menjadi Rp. 10.928.770.798,- ada penurunan sebesar Rp. 4.964.129.202,-. hal ini disebabkan Refocusing Anggaran pada Dinas Budparpora.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif terlihat pada tabel 3.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

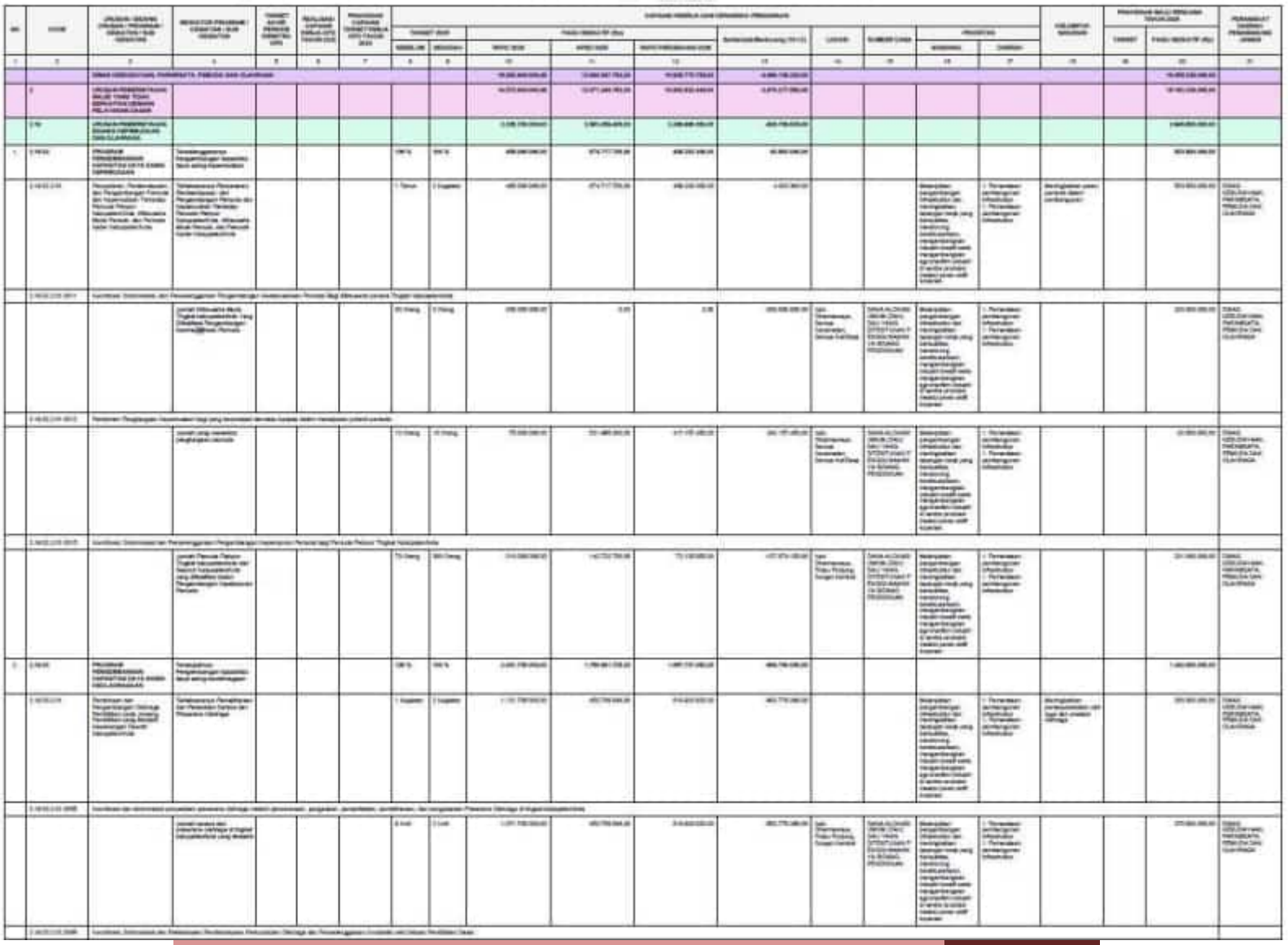

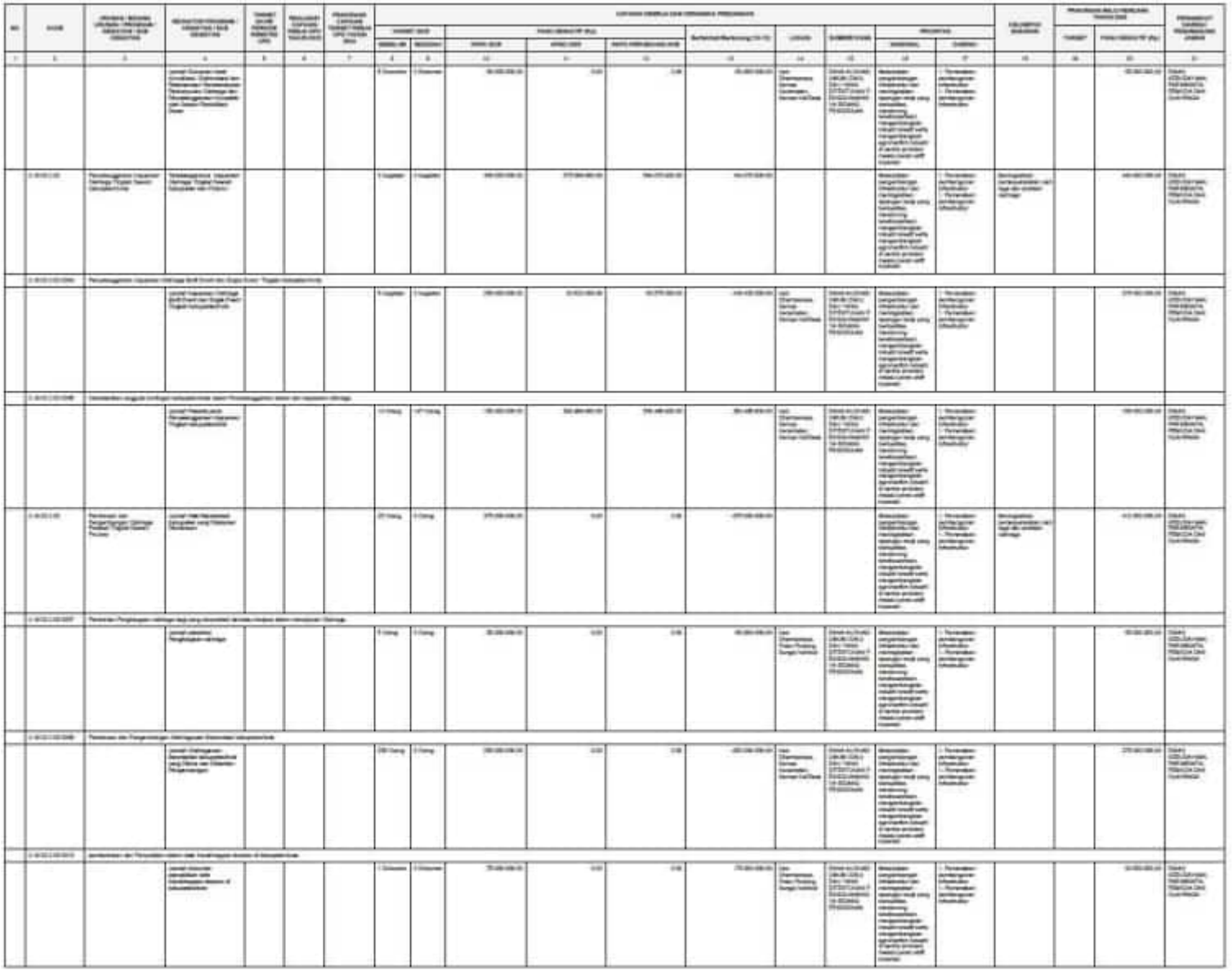

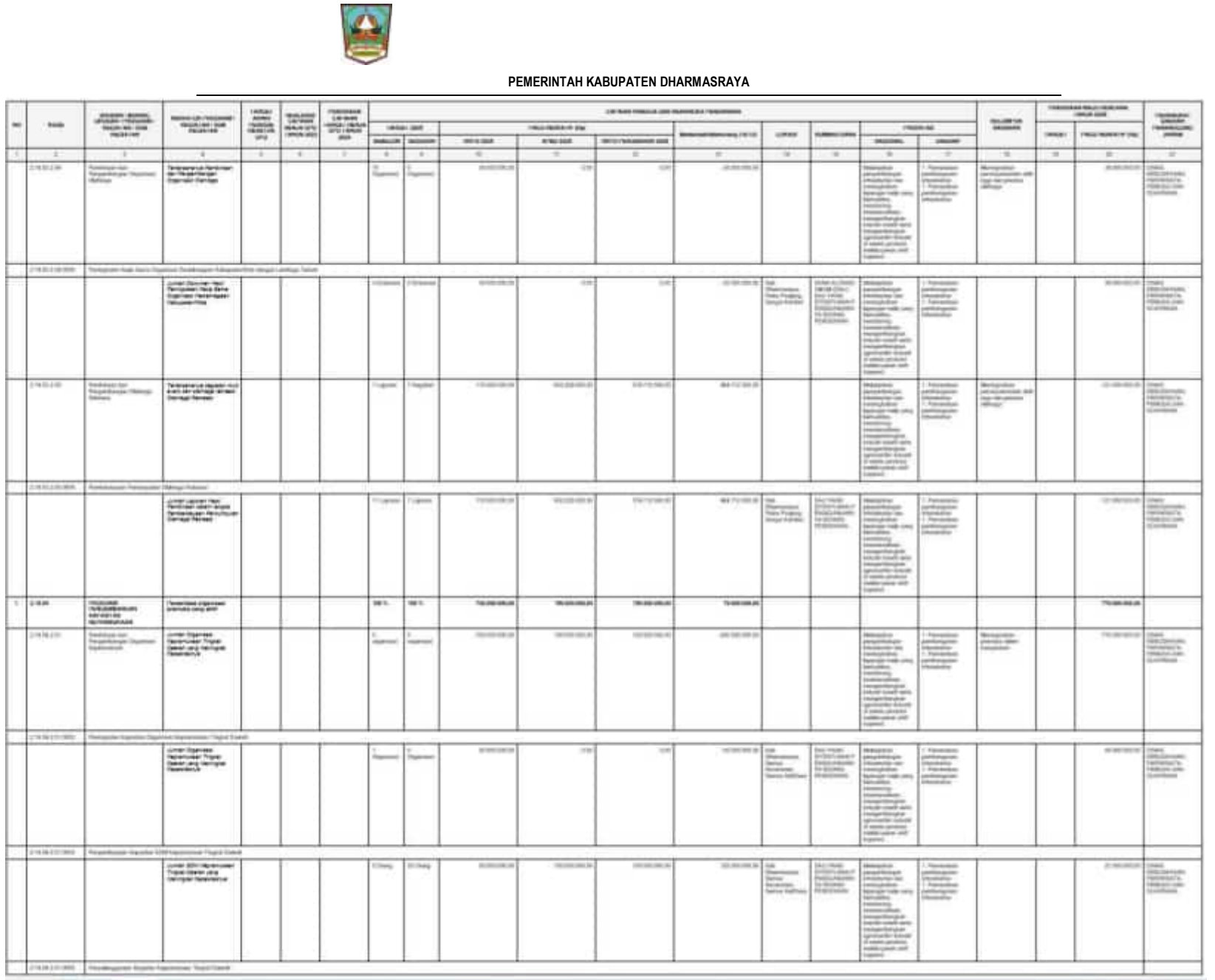

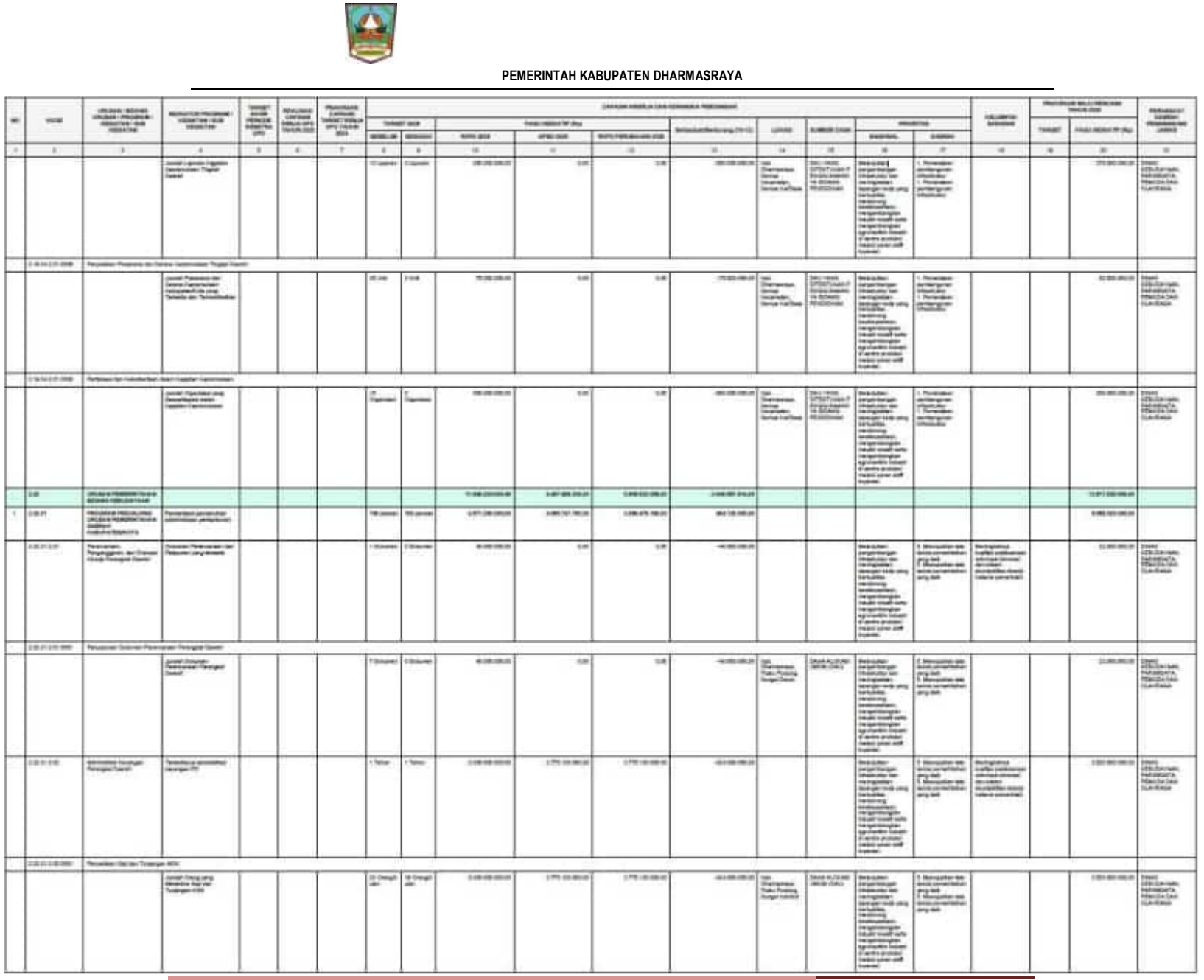

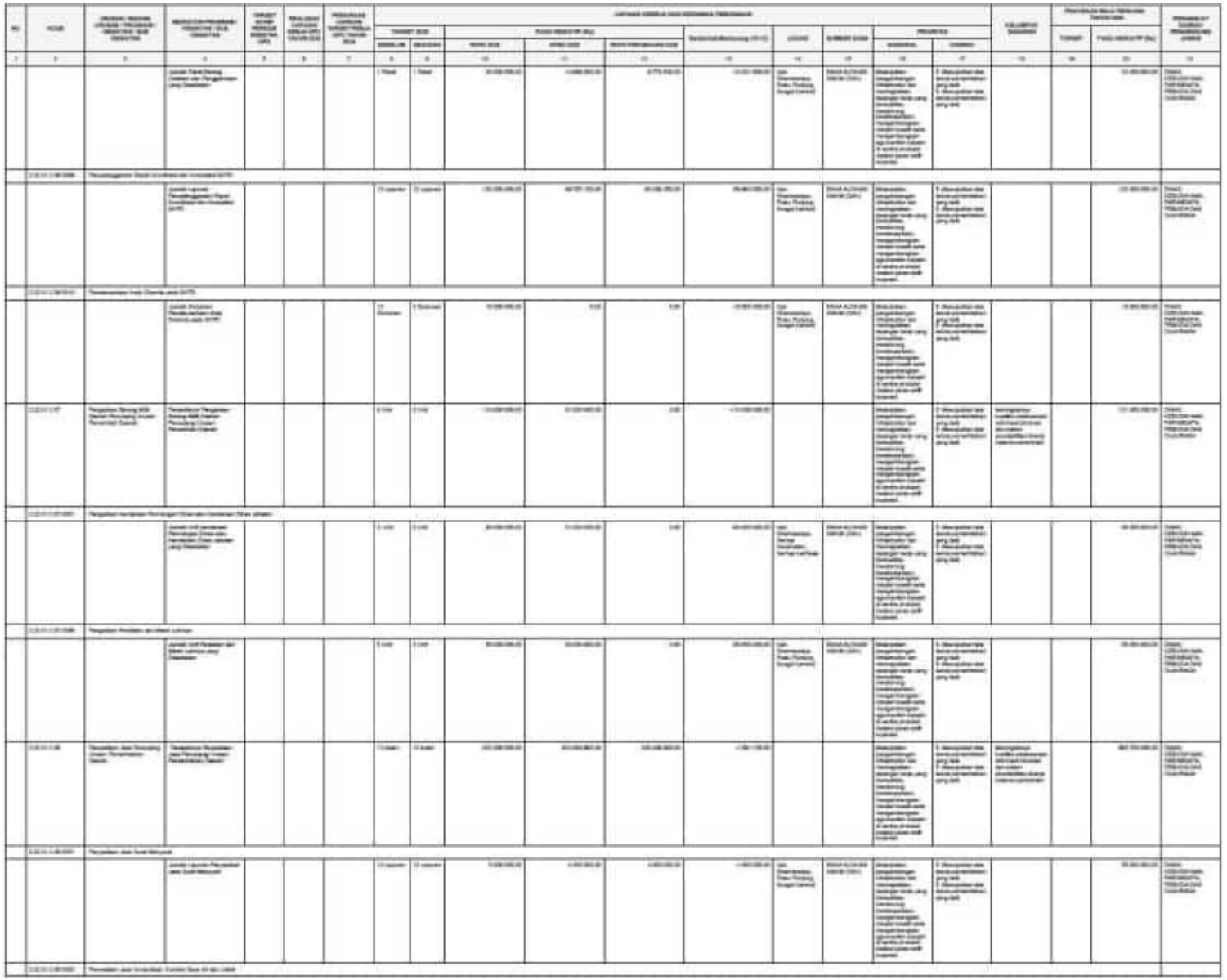

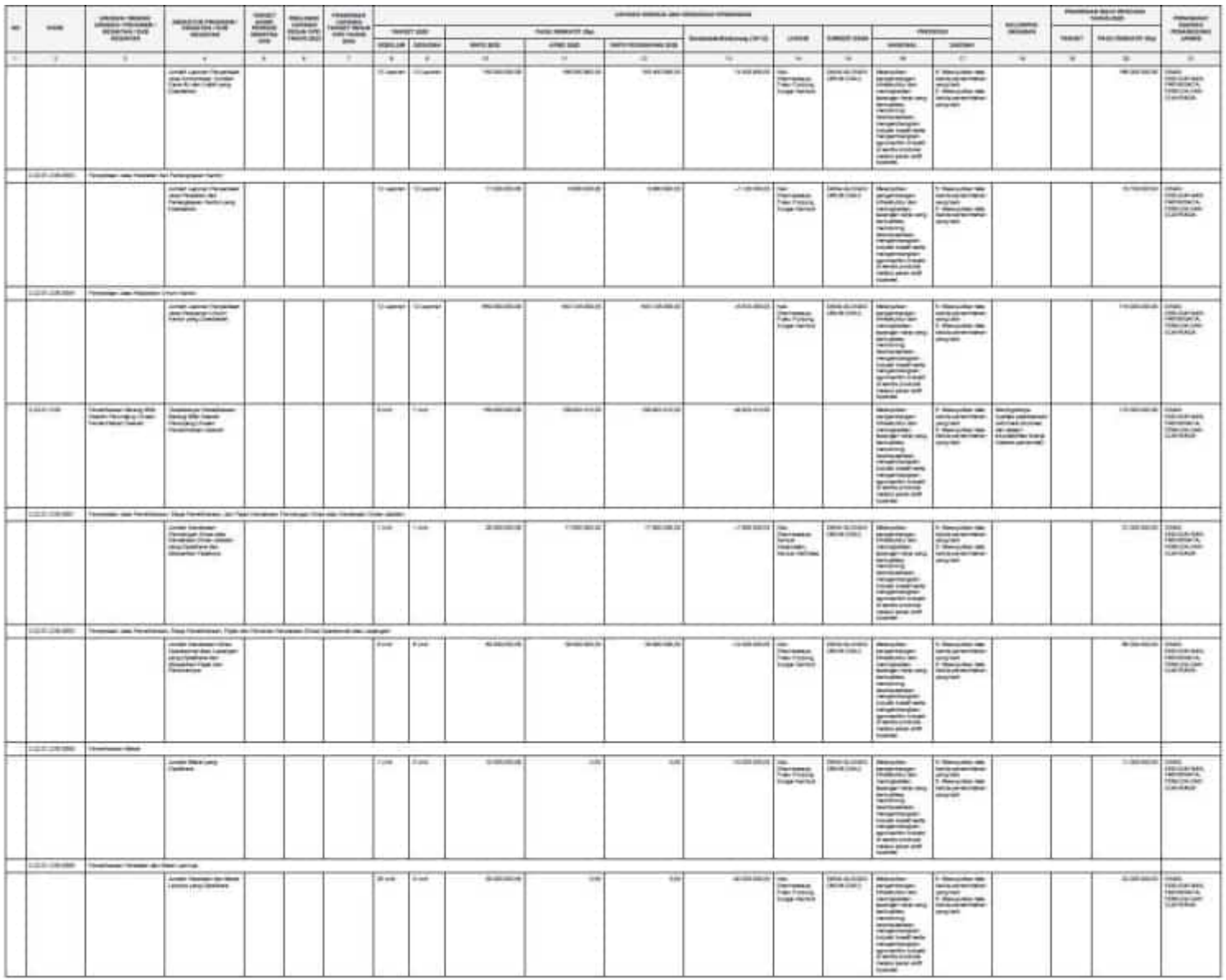

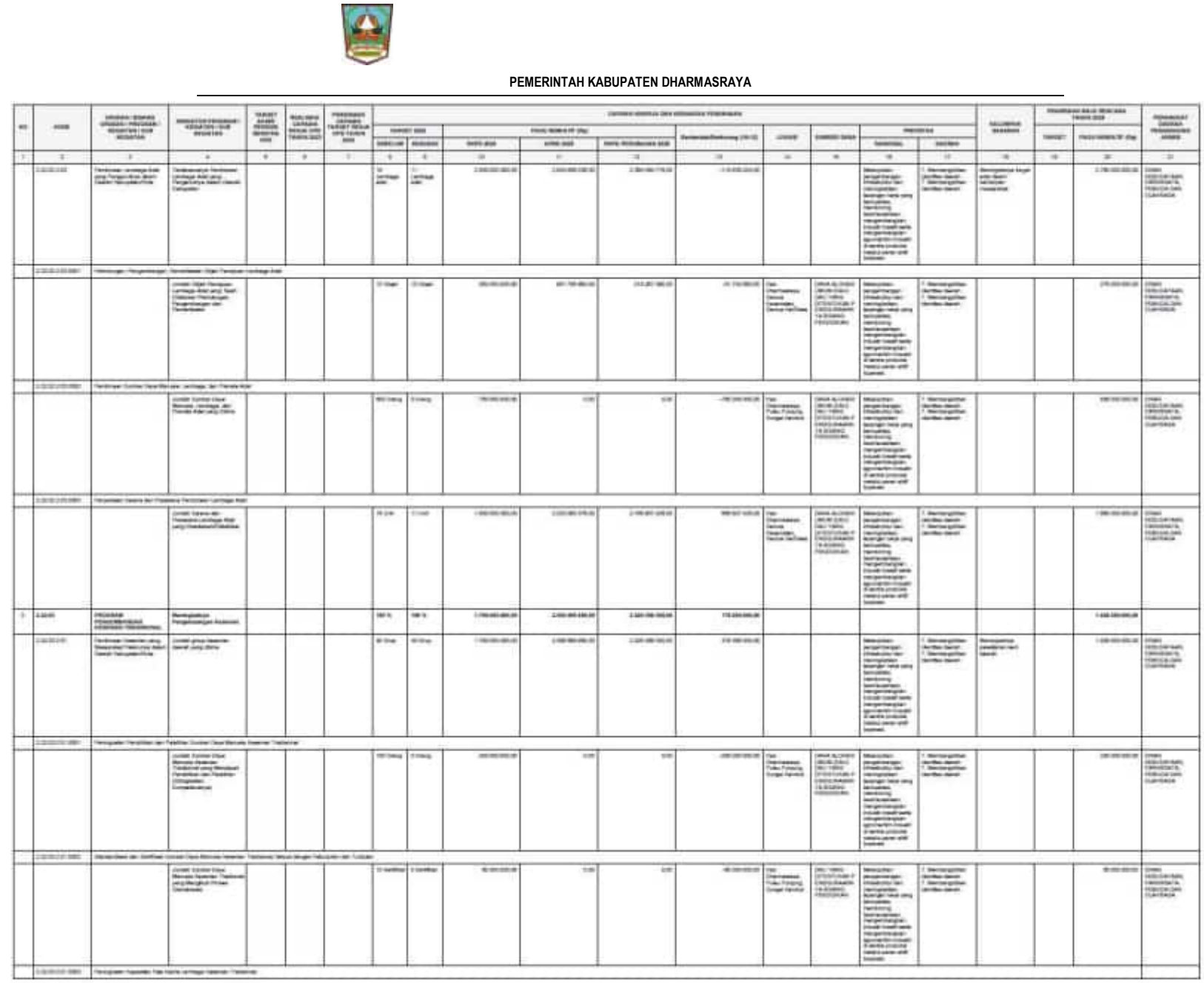

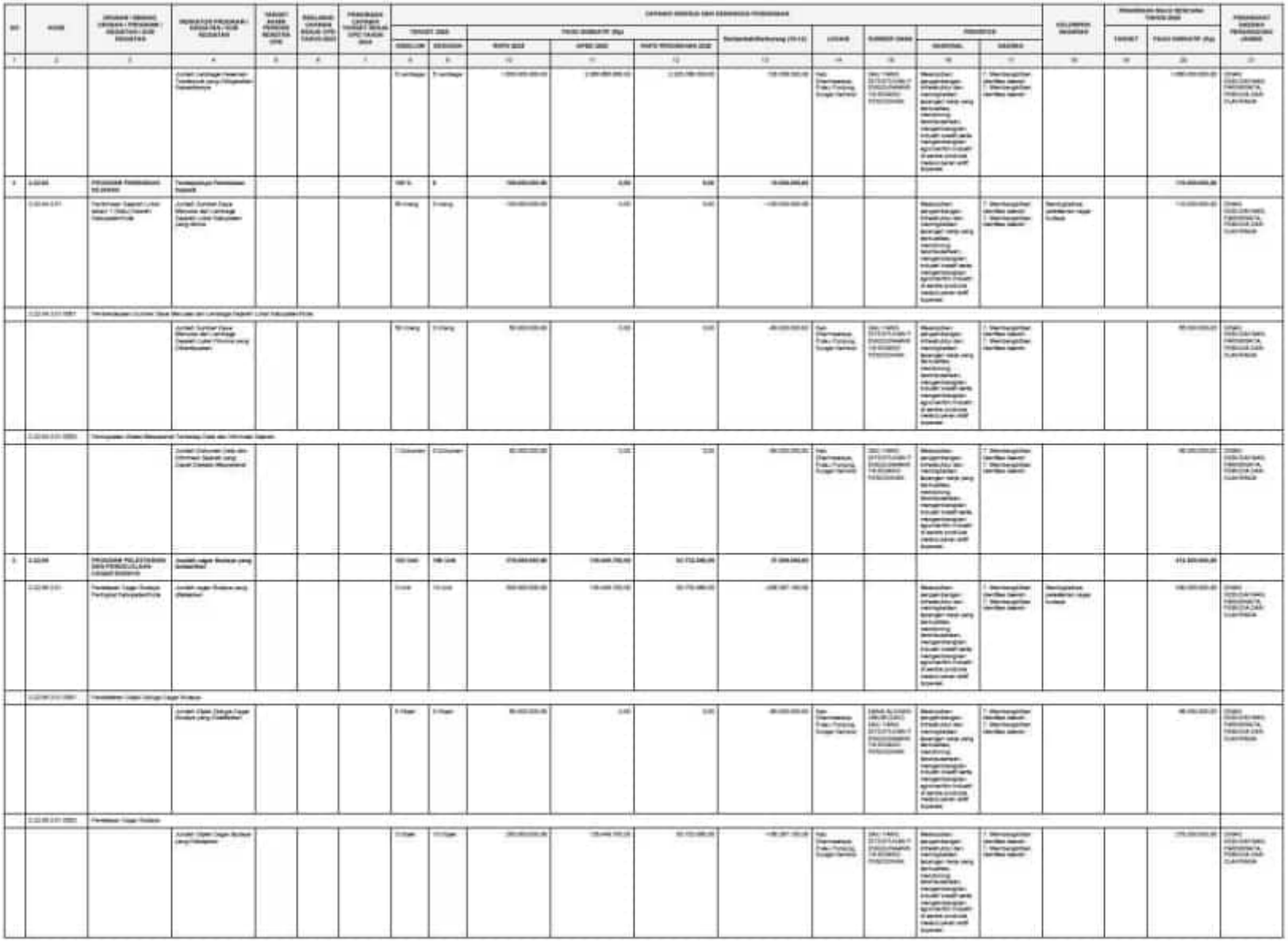

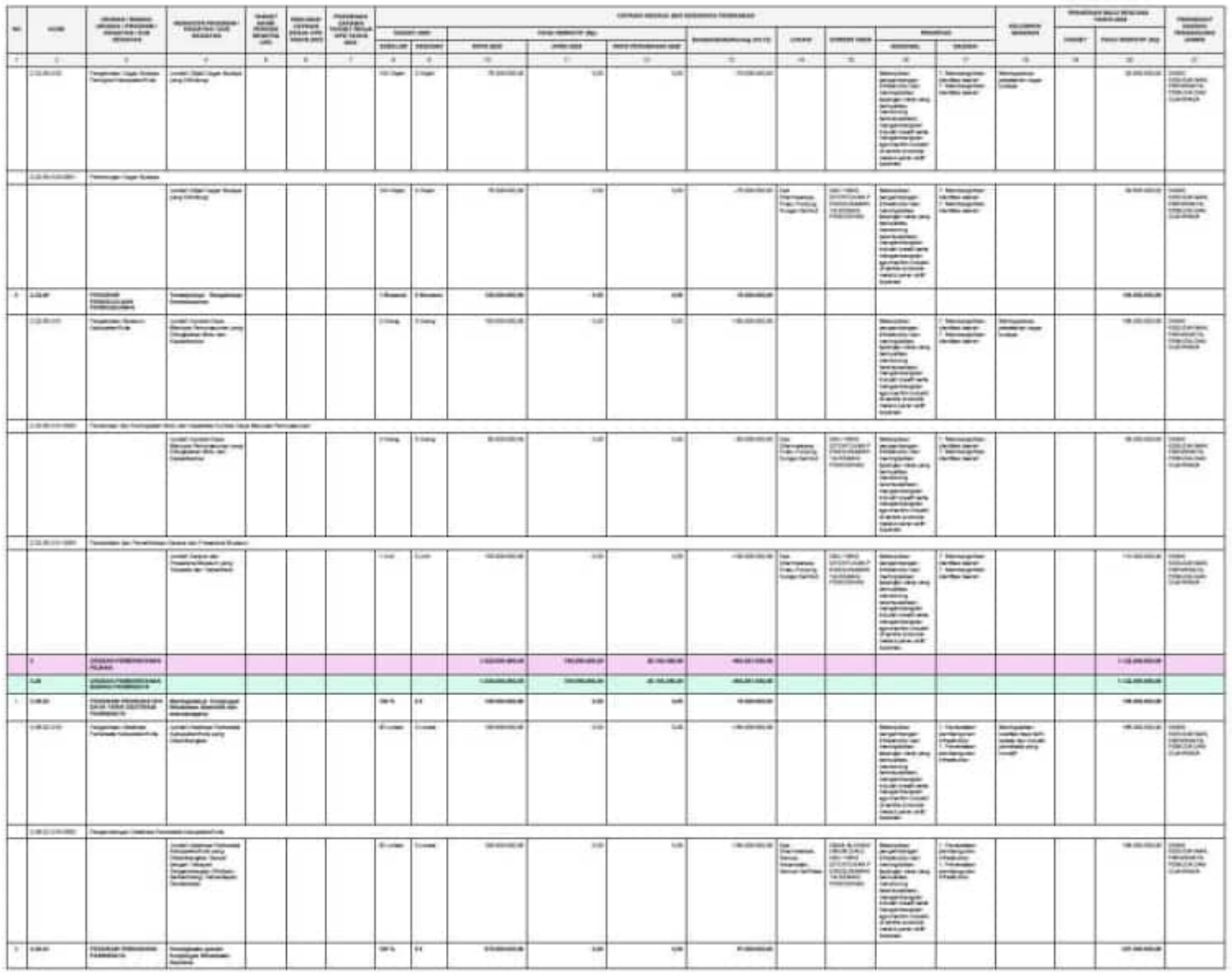

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	[illegible]	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	[illegible]				[illegible] %	[illegible] %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible] Orang	[illegible] Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible] Orang	[illegible] Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	J U M L A H								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	

3.2. Perubahan Target Kinerja pada IKU Perangkat Daerah

Jika dilihat dari tujuan dan pencapaian sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025, maka lebih jelasnya target kinerja dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

PERUBAHAN TARGET KINERJA PADA IKU PERANGKAT DAERAH

No	Urusan/Bidang/ Sasaran/Indikator	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target Renstra		
				2022	2023	2024	2025	Awal	Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								
A	BIDANG KEBUDAYAAN								
A. 1.	Meningkatnya pelestarian seni daerah								
		Jumlah group kesenian daerah yang dibina	Grup	30	40	45	50	50	50
		Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	Jenis	14	16	18	20	20	20
A. 2.	Meningkatnya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat								
		Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	80	85	89	95	95	95
A 3.	Meningkatnya pelestarian cagar budaya								

		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Unit	45	3	4	18	18	18
		Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	101	102	106	116	116	116
A 4.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah								
		Nilai AKIP Dinas Budparpora oleh Inspektorat	Nilai	B (60,45)	BB (65,45)	BB (74,256)	BB (77,12)	BB (77,12)	BB (77,12)
II	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								
B	BIDANG PARIWISATA								
B. 1.	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif								
		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	71.550	188.463	101.453	110.000	110.000	110.000
		Tingkat hunian akomodasi	orang	19.200	61.514	22.102	21.321	21.321	21.321
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif	usaha	36	45	47	52	52	52
		Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina	lembaga	21	24	-	37	12	12
III	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA**								
C	BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA								
C 1.	Meningkatkan pemasyarakatan olahraga dan prestasi olahraga								
		Jumlah cabang olahraga yang Aktif Bisa Tercapai	cabor	35	25	21	30	30	30

		Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	cabor	21	15	15	29	29	29
		Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	cabor	7	4	6	7	7	7
		Jumlah Pelatih Bersetifikat	Orang	18	20	24	24	24	24
C .2.	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan								
		Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	246	236	236	236	236	236
		Jumlah Pemuda/kepemudaan yang berprestasi	Orang	25	30	35	40	40	40
		Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	32	32	30	35	35	35
A. C.	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat								
		Jumlah organisasi pramuka yang aktif	Organisasi	210	210	210	210	210	210

BAB 4. PENUTUP

Bab 4 berisi Kesimpulan dan saran-saran terhadap Renja Perubahan Tahun 2025

Renja Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olagraga Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 di lingkup Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olagraga Kabupaten Dharmasraya, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025. Renja Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olagraga Kabupoten Dharmasraya tahun 2025 mempedomani rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2025, RPJMD Tahun 2021-2026, perkiraan hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olagraga Tahun 2021-2026,

Dalam Renja Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olagraga Kabupoten Dharmasraya tahun 2025 telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olagraga Kabupoten Dharmasraya dalam pelaksanaan program dan kegiatan,. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja Perubahan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olagraga yang diemban oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olagraga Kabupaten Dharmasraya. Oleh harena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olagraga Kabupoten Dharmasraya tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kabupaten Dharmasraya disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olagraga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1... PENDAHULUAN 1-1

1.1. Latar Belakang.....1-1
1.2. Landasan Hukum 1-2
1.3. Maksud dan Tujuan 1-2
1.3.1. Maksud..... 1-2
1.3.2. Tujuan..... 1-2
1.4. Sistematika Dokumen RKPD.....1-3

BAB 2... *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II*..... 2-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....2-2
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....2-4
2.3.1. Isu strategis..... 2-4
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah..... 2-4
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-1
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan..... 2-1
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD..... 2-1

BAB 3... TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 3-1

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat ***Error! Bookmark not defined.***
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait..... 3-1
3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat..... 3-1
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3-3

BAB 4... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....4-1
4.2. Target Kinerja Tahun 2025..... ***Error! Bookmark not defined.***

BAB 5... PENUTUP..... 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-2
Tabel 2-2 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-2
Tabel 2-3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-2
Tabel 2-4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-3
Tabel 2-5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-3
Tabel 2-6 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan 2-1
Tabel 2-7 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD 2-1
Tabel 4-1 Penetapan Rencana Kerja Badan/Dinas ... Tahun 2025 4-2
Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 1.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah No 6 Tahun 2016. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintah bidang Kearsipan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Keasipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kerasipan disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
   1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
   2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
   3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; dan
   4) hasil evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun tahun 2020 s.d 2025.

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
   1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida

2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini diserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.

e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
   1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
   1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun tahun 2009 tentang Kearsipan;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 tahun 2007 tentang tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program,

kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hingga Tahun 2025 dan prediksi Tahun 6
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perubahn Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Triwulan II Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Triwulan II Tahun 2025, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BAB IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

BAB V Penutup

BAB 2.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada sub bab ini menyajikan tabel e.60 evaluasi terhadap hasil capaian rkpd tahun 2025 (terlampir), serta dilengkapi dengan narasi tentang capaian pelaksanaan sub kegiatan dan target indikator program dan indikator kegiatan selama tahun 2025.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATENDHARMASRAYA
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 sd 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang akan dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (triwulan II)		unit PD Penanggung
												I		II		III		IV						(%)		
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 =7+ 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	Rp.APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Inspektorat																						
				Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																						
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																						
		2.23	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**		**507.89**	**33,169,403,460**	**208**	**21,218,219,955**	**206.31**	**4,077,413,850**	**3,917,230,045**	**9**	**767,243,063**	**4**	**837,938,366**	-	-	-	-	**14**	**1,605,181,429**	**221**	**22,823,401,384**	**43.60**	**68.81**	**DPK**
		2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	25,068,480,460	100	8,807,871,183	100	3,732,451,800	3,493,018,545	9	751,259,063	-	795,899,206	-	-	-	-	9	1,547,158,269	109	10,355,029,452	109.24	41.31	
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia	42 Dokumen	165,000,000	14	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	33.33	0.00	
		2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	42 Dokumen	165,000,000	14	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	33.33	0.00	
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan PD	1 Dokumen	16,831,109,460	1	6,391,410,699	1	2,808,115,000	2,727,219,000	0.25	618,547,326	-	693,365,579.00	-	-	-	-	1	1,311,912,905	2	7,703,323,604	200.00	45.77	
		2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 org	16,831,109,460	44	6,391,410,699	23	2,808,115,000	2,727,219,000	5	618,547,326	7	693,365,579	-	-	-	-	12	1,311,912,905	56	7,703,323,604	193.10	45.77	
		2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	300,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yg terpelihara	25 Dokumen	170,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya aset daerah dan BMD (Data Base)	9 laporan	130,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	298,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	200 paket	108,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang dilatih	62 Orang	190,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,903,571,000	1	580,846,633	1	161,015,600.00	163,706,000.00	0.25	21,995,600	0.25	10,202,800.00	0.25	-	0.25	-	1	32,198,400	2	613,045,033	200.00	32.20	
		2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	35,000,000	2	17,266,600	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17,266,600	33.33	49.33	
		2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	203,000,000	2	86,142,300	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	86,142,300	33.33	42.43	
		2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	137,000,000	2	34,827,700	1	26,057,000	41,955,000	-	10,349,000	-	1,020,000	-	-	-	-	-	11,369,000	2	46,196,700	33.33	33.72	
		2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	125,000,000	2	62,250,000	1	21,758,000	20,185,000	-	3,110,000	-	2,420,000	-	-	-	-	-	5,530,000	2	67,780,000	33.33	54.22	
		2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	153,571,000	2	28,490,800	1	13,720,000	15,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28,490,800	200.00	18.55	
		2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	1,130,000,000	24	351,869,233	12	99,480,600	85,666,000	-	8,536,600	-	6,762,800	-	-	-	-	-	15,299,400	24	367,168,633	33.33	32.49	
		2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177 unit/set	1,654,000,000	96	389,511,500	17	111,350,000	35,000,000	-	3,300,000	-	-	-	-	13	-	13	3,300,000	109	392,811,500	61.58	23.75	
		2.23.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	250,000,000	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	250,000,000	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	153 unit	511,000,000	87	275,180,000	9	16,000,000	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	275,180,000	56.86	53.85	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 sd 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang akan dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (triwulan II)		unit PD Penanggung
												I		II		III		IV						(%)		
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 =7+ 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	Rp.APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit/set	303,000,000	9	114,331,500	8	44,350,000	23.000.000	-	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000	9	117,631,500	112.50	38.82	
		2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lanjutan gedung layanan perpustakaan Daerah (Lantai dan Plafon)	1 unit	250,000,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 unit	250,000,000	0	-	0	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pagar dan paving block depo	2 paket	90,000,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2,706,200,000	12	1,067,315,201	12	360,891,200	408,297,545	3	76,004,025	3	81,860,827.00	3.00	-	3	-	12	157,864,852	24	1,225,180,053	200.00	45.27	
		2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	13,000,000	12	2,750,000	12	2,000,000	2.000.000	-	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	600,000	12	3,350,000	20.00	25.77	
		2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	113,200,000	21	93,256,141	12	40,800,000	86.886.945	-	31,468,525	-	16,204,827	-	-	-	-	-	47,673,352	21	140,929,493	29.17	124.50	
		2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	2,580,000,000	21	971,309,060	12	318,091,200	319.411.200	-	44,235,500	-	65,356,000	-	-	-	-	-	109,591,500	21	1,080,900,560	29.17	41.90	
		2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226 Unit	1,210,600,000	39	378,787,150	29	291,080,000	158,796,000	6	31,412,112	2	10,470,000.00	-	-	-	-	8	41,882,112	47	420,669,262	20.64	34.75	
		2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	215,000,000	2	50,500,500	1	16,000,000	61.940.000	-	18,232,512	-	3,300,000	-	-	-	-	-	21,532,512	2	72,033,012	33.33	33.50	
		2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	549,600,000	14	129,446,650	7	58,120,000	60.000.000	-	6,229,600	-	4,580,000	-	-	-	-	-	10,809,600	14	140,256,250	27.45	25.52	
		2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 unit	86,000,000	21	14,040,000	20	16,980,000	11.650.000	-	1,050,000	-	850,000	-	-	-	-	-	1,900,000	21	15,940,000	12.88	18.53	
		2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Sewa gedung kantor)	6 Unit	360,000,000	2	184,800,000	1	199,980,000	25.206.000	-	5,900,000	-	1,740,000	-	-	-	-	-	7,640,000	2	192,440,000	33.33	53.46	
2				**Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan**																						
	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat			**Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan**																						
		2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		107.89	4,727,423,000	8	12,213,470,088	6.31	164,990,050	309,116,500	-	6,467,000.0	-	37,045,300	-	-	-	-	-	43,512,300	8	12,256,982,388	7.31	259.27	
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Dibina	7.89 Persen	4,507,423,000	7.89	12,213,470,088	6.31	164,990,050	309,116,500	-	6,467,000.0	-	37,045,300	-	-	-	-	-	43,512,300	8	12,256,982,388	100.00	271.93	
		2.23.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perpustakaan yang dibina	25 perpustakaan	3,202,423,000	25	1,893,512,208	20	119,880,050	197,071,150	-	6,467,000	0	1,210,000	-	-	-	-	0	7,677,000	25	1,901,189,208	100.49	59.37	
		2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	89.00 layanan	-	-	-	20.00	5,000,000	16,377,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan Elekronik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan Elektronik di Kabupaten	89.00 layanan	425,000,000	-	-	30.00	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
				Tersedianya TIK	40 unit	300,000,000	40	285,175,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	285,175,000	100.00	95.06	
		2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai	34 Perpustakaan	210,000,000	6	987,086,900	10	39,884,800	81,992,050	-	5,985,000	-	1,210,000	-	-	-	-	-	7,195,000	6	994,281,900	17.65	473.47	
				jumlah pengadaan perabot layanan perpustakaan (DAK)	262 unit/set/bh	670,023,000			0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina di Kabupaten	145 Perpustakaan	75,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah pemustaka sekolah, nagari,dan TBM	489,200 pemustaka	547,400,000	154882	418,518,708	65	59,995,250	55,953,300	-	482,000	-	-	-	-	-	-	-	482,000	154,882	419,000,708	31.66	76.54	
				Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan							-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peningkatan SDM Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Kabupaten	125 Orang	150,000,000	-	-	100	5,000,000	33,640,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 sd 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang akan dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (triwulan II)		unit PD Penanggung
												I		II		III		IV						(%)		
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 =7+ 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	Rp.APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	3,818 eksemplar	650,000,000	3068	202,731,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,068	202,731,600	80.36	31.19	
		2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2,900 Exemplar	75,000,000	-	-	1,000.00	5,000,000	9,107,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan , Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten / Kota	Tersedianya Data dan Informasi tentang Perpustakaan dan Tanaga Perpustakaan di Kabupaten Dharmasraya	35 Dokumen	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	500 orang	1,305,000,000	3,629	10,319,957,880	200	45,110,000	112,045,350	-	-	-	35,835,300	-	-	-	-	-	35,835,300	3,629	10,355,793,180	725.80	793.55	
		2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	850,000,000	-	10,319,957,880	3.00	5,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,319,957,880	0.00	1214.11	
		2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Duta Baca di Kab. Dharmasraya	orang		-	-	20.00	5,000,000	8,362,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Insklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis Inklusi Sosial Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	25 perpustakaan	320,000,000	10	-	10	30,110,000	48,167,750	-	-	-	2,710,000	-	-	-	-	-	2,710,000	10	2,710,000	40.00	0.85	
				Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Transformasi Perpustakaan Berbasis Insklusi Sosial	440 orang	135,000,000	105	112,382,150	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	112,382,150	23.86	83.25	
		2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	60 orang	175,000,000	-	-	20	5,000,000	55,515,400	-	-	-	33,125,300	-	-	-	-	-	33,125,300	-	33,125,300	0.00	18.93	
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dilstarikan	100 Persen	220,000,000		-	0	-	-		-		-		-									
		2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	40 naskah kuno	195,000,000		-	-	-	-		-		-		-						-	0.00	0.00	
		2.23.03.2.01.02	Pengembangan , Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikandan didaya gunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	40 naskah kuno	195,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	2 koleksi	25,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	0.00	0.00	
		2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Kolekasi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	10 eksemplar	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
3	**Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu**			**Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku**																						
				Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku																						
		2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		300	3,373,500,000	100	196,878,684	100	179,972,000	115,095,000		9,517,000	4.34	4,993,860	-	-	-	-	4	14,510,860	104	211,389,544	34.78	6.27	
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100 persen	2,098,500,000	100	196,878,684	100	179,972,000	115,095,000		9,517,000	4.34	4,993,860	-	-	-	-	4	14,510,860	104	211,389,544	104.34	10.07	
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dikelola	1 Dokumen	803,500,000	1	155,587,234	1	164,032,000	115,095,000		9,517,000	0.04	4,993,860	-	-	-	-	0	14,510,860	1	170,098,094	104.34	21.17	
		2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah perangkat daerah dan Nagari yang menyelenggarakan kearsipan secara baku melalui Pembinaan Kearsipan	24 OPD	200,000,000	8	76,327,150	30	88,277,000	49,830,000	-	9,517,000	-	4,993,860	-	-	-	-	-	14,510,860	8	90,838,010	33.33	45.42	
				Jumlah SDM PD yang memdapatkan pembinaan kearsipan	208 orang	250,000,000	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	22.60	0.00	
		2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip Dinamis yang ditata dan dipelihara	24 Daftar arsip	203,500,000	8	49,019,684	120	32,726,000	23,464,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	49,019,684	33.33	24.09	
		2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38 OPD	150,000,000	38	30,240,400	38	43,029,000	41,801,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	30,240,400	100.00	20.16	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 sd 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang akan dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (triwulan II)		unit PD Penanggung
												I		II		III		IV							(%)		
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 =7+ 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	Rp.APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	12 Dokumen	445,000,000	2	12,101,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12,101,750	16.67	2.72	
		2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang di simpan sebagai khazanah arsip di depo arsip	12 Daftar arsip	445,000,000	2	12,101,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12,101,750	16.67	2.72	
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan informasi arsip Dinamis dan statis secara nasional	1 Layanan	850,000,000	-	29,189,700.00	1	15,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,189,700	0.00	3.43	
		2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Arsip Daerah yang di publikasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	6 pengguna	570,000,000	-	29,189,700	1.00	15,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,189,700	0.00	5.12	
		2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kearsipan yang dilatih tentang Jaringan Informasi Kearsipan	6 org	280,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,	100 persen	1,150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	5 Dokumen	175,000,000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0.00	0.00	
		2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah daftar arsip usul musnah	5 Dokumen	175,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	1 Dokumen	175,000,000			-	-	-											-	-	0.00	0.00	
		2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1 Dokumen	175,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	jumlah arsip yang digabung dan/atau dibubarkab	20 Dokumen	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0.00	0.00	
		2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip perangkat daerah yang terselamatkan bagi penggabungan Perangkat Daerah	5 OPD	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip perangkat daerah yang terselamatkan bagi Pembubaran Perangkat Daerah	5 OPD	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pendampingan Penyelamatan arsip bagi pemekaran Kecamatan	5 Kecamatan	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Nagari yang mendapatkan pendampingan Penyelamatan arsip bagi pemekaran Kecamatan	5 Nagari	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100 Persen	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip statis yang autentik dan terpecaya yang dapat digunakan	1 Dokumen	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip daerah yang dialih mediakan	1 Dokumen	175,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
		2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Terwujudnya izin penggunaan arsip yang terkelola dengan baik sesuai dengan aturan	100 Persen	125,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0.00	0.00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 sd 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang akan dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (triwulan II)		unit PD Penanggung
												I		II		III		IV						(%)		
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 =7+ 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	Rp.APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Terciptanya peningkatan dan efektifitas pelayanan publik melalui layanan izin penggunaan arsip tertutup	1 Dokumen	125,000,000		-	-	-	-											-	-	0.00	0.00	
		2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP yang bisa digunakan sebagai acuan layanan penggunaan arsip tertutup	5	Dokumen 125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		6.58	39.37		68.81	
																				Predikat kinerja		-		-	-	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Dengan pagu Dana sebagai berikut:
Jumlah program : 3
Jumlah kegiatan : 8
Jumlah Sub Kegiatan : 25
Pagu dana APBD : Rp **3.917.230.045**

Total pagu Belanja Rp. **3.917.230.045**,- (Tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh lima rupiah). Realisasi keuangan sampai dengan Juni 2025 (Triwulan II) ini sebesar Rp. **837.938.366,-**
Sesuai dengan daftar terlampir : Di Excell (monev matrik evaluasi)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan.

Ada dua Indikator pada Bidang perpustakaan yang disajikan pada tabel berikut ini dari tahun 2019 sd tahun 2023 dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pencapaian dari tahun ke tahun sudah mencapai target kinerja .

Indikator kinerja Jumlah Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan

Tabel 2-1 Indikator kinerja Jumlah Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan	Orang	157.579	45.164	202.273	152.286	154.042

Sumber : IKU Tahun 2019-2023

Berdasarkan dari tabel 2-1 dengan indikator kinerja Jumlah Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan dari tahun 2019-2023 yang mana jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan didapatkan dari data orang yang mengunjungi Perpustakaan di seluruh Kabupaten Dharmasraya. Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran kinerja Renstra/ RPJM tahun Pada tahun 2023 terdapat realisasi 154.042 orang yang telah mengunjungi perpustakaan sesuai dengan data yang telah ada dan

di nyatakan telah mencapai target. Keberhasilan capaian kinerja indikator ini ditunjang oleh program dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan denngan sub kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja Persentase Perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan

Tabel 2-2 Indikator kinerja Persentase Perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan

Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	%	8,09	6,25	32,39	38,68	45,28

Sumber : IKU Tahun 2019-2023

Berdasarkan dari tabel 2-2 dengan indikator kinerja Persentase Perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 menunjukan bahwa Persentase Perpustakaan yang Melaksanakan Manajemen Perpustakaan dengan realisasi 45,28% yang didapat dari Renstra/ RPJM dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{144}{318} * 100$$

Indikator kinerja Nilai Akip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Inspektorat

Tabel 2-3 Indikator Nilai Akip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Inspektorat Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan kearsipan oleh Inspektorat	Nilai/ Prediket	BB	BB	BB 74,18	BB 75,34	BB 76,51

Sumber : Lakip Tahun 2019-2023

Berdasarkan dari tabel 2-3 dengan indikator kinerja Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Inspektorat dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 menunjukan bahwa Nilai AKIP Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan oleh Inspektorat dengan realisasi BB 76,51 yang didapat dari Renstra/ RPJM.

Indikator kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 2-4 Indikator kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai			21,7	26,8	31,9

Sumber : IKU Tahun 2019-2023

Berdasarkan dari tabel 2-4 dengan indikator Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 menunjukan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan target 31,9 yang didapat dari Renstra/ RPJM.

Indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2-5 Indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai			80,0	81,4	81,0

Sumber : IKU Tahun 2019-2023

Berdasarkan dari tabel 2-5 dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 menunjukan bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 81,0 yang didapat dari Renstra/ RPJM.

Indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Tabel 2-6 Indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%			47,37	57,89	68,42

Sumber : IKU Tahun 2019-2023

Berdasarkan dari tabel 2-6 dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 menunjukan bahwa Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dengan realisasi 68,42% yang didapat dari Renstra/ RPJM dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{26}{38} * 100$$

Indikator kinerja Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku

Tabel 2-7 Indikator kinerja Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	%	5,77	5,77	23,08	30,77	38,46

Sumber : IKU Tahun 2019-2023

Berdasarkan dari tabel 2-7 dengan indikator kinerja Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 menunjukan bahwa Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku dengan realisasi 38,46% yang didapat dari Renstra/ RPJM dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{20}{52} * 100$$

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Isu strategis

Isu-isu penting yang dapat diamati dalam pengembangan lembaga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya dalam menghadapi tantangan dan peluang dan bertanggung jawab dalam pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan sehingga harus berupaya mengoptimalkan tingkat kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , antara lain:

Tantangan/ Permasalahan

Perpustakaan :

1. Perpustakaan umum Kabupaten Dharmasraya belum memiliki gedung yang representative.
2. Pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan nagari perpustakaan sekolah.
3. Koleksi berbagai jenis perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan masih terbatas.
5. Layanan perpustakaan keliling belum menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya di karenakan Perpustakaan Umum KabupatenDharmasraya hanya memiliki 3 unit mobil perpustakaan keliling.
6. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan perpustakaan umum Kabupaten Dharmasraya

Kearsipan

1. Belum optimalnya kerjasama pengelola kearsipan
2. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola kearsipan;
3. Belum satu pemahaman dan kesetaraan pemikiran aparatur terhadap arti pentingnya arsip, sehingga kearsipan kurang mendapat perhatian
4. Sarana kerja untuk pengelolaan arsip masih belum memadai

Peluang

Dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelengga-raan Pemerintahan berbasis TIK (e-Government) terbuka peluang sekaligus tantangan bagi DPK Kabupaten Dharmasraya untuk menyediakan Pelayanan Perpustakaan berbasis TIK (e-Library) dan Pelayanan Kearsipan berbasis TIK (e-Archive). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat menjadi simpul Pemersatu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana motto ANRI Arsip simpul pemersatu bangsa, melalui akuisisi arsip-arsip penting (asli/salinan/ foto copy) Perangkat Daerah yang disimpan di Depo Arsip Kabupaten Dharmasraya.

Rekam jejak (track record) berbagai kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Dharmasaya, dapat ditelusuri melalui pendokumentasian Kegiatan-Kegiatan Penting Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2.3.2 Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan PD dapat berasal dari beberapa unsur, antara lain adalah sebagai berikut;

1. Keterbatasan SDM di bidang Perpustakaan dan Kearsipan, keterbatasan kemampuan tersebut berdampak tertundanya percepatan kegiatan dan pada akhirnya pencapaian dan sasaran dapat terganggu.
2. Kondisi aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang hanya berjumlah 19 orang termasuk Kepala Dinas menyebabkan pendelegasian tugas –tugas kurang optimal.
3. Alokasi anggaran yang sangat terbatas menyebabkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang ada menjadi kurang optimal dalam mencapai indicator kinerja yang diharapkan.
4. Kurangnya Pemahaman terhadap fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. ada beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang masih belum memahami fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga belum memanfaatkan peran dan fungsi DPK tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya presentase permintaan Perangkat Daerah untuk meminta bantuan dalam mendata dan menata kelola arsip Perangkat Daerah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.4.1Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Tidak ada usulan Musrenbang Kecamatan

2.4.2 Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD

usulan Pokir DPRD Tidak ada

BAB 3.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

Melakukan penelaahan terkait kebijakan K/L jika ada terkait dengan kebijakan/ kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya

3.1.2. Penelaahan Renja Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Melakukan penelaahan terkait kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait Provinsii Sumatera Barat yang telah dibahas dan disepakati pada forum perangkat daerah provinsi yang telah dilaksanakan. Sub bab ini dapat berupa kesepakatan target maupun informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan di provinsi sumatera barat namun untuk kegiatan provinsi yang mengingclude kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya belum terpenuhi disebabkan RPJMD Provinsi belum sesuai dengan RPJMD Kabupaten. Berikut ini dilampiran Rencana Program dan Kegiatan Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

Kode						Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan SIPD RI (Output)	Target Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 Lokasi	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7
2	24	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100	%		
2	24	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	85	%		
2	24	01	1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	Padang	RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, Renja, Renja Perubahan
2	24	01	1	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	Padang	LAKIP, LPPD dan LKPJ, Laporan Tahunan, Laporan Pengendalian dan Evaluasi Bulanan

											dan Semesteran Perangkat Daerah
2	24	01	1	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	Padang	Pelaporan SIMBANGDA Internal Perangkat Daerah, Pengelolaan SPIP, IKM, Reformasi Birokrasi
2	24	01	1	01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	Padang	Forum Perangkat Daerah
2	24	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	%		
2	24	01	1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	Orang/ Bulan	Padang	
2	24	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	dokumen	Padang	

2	24	01	1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	laporan	Padang	
2	24	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100	%		
2	24	01	1	03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	Padang	
2	24	01	1	03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	Padang	
2	24	01	1	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	Padang	
2	24	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%		
2	24	01	1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	69	paket	Padang	
2	24	01	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	69	orang	padang	
2	24	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%		

2	24	01	1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	paket	Padang	
2	24	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	paket	Padang	
2	24	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	paket	Padang	
2	24	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	paket	Padang	
2	24	01	1	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120	dokumen	Padang	
2	24	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	laporan	Padang, Kab/Kota dan Jakarta	
2	24	01	1	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300	dokumen	Padang	
2	24	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100	%		
2	24	01	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	Padang	
2	24	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		

2	24	01	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	Padang	
2	24	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	Padang	
2	24	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	laporan	Padang	
2	24	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik 100%	100	%		
2	24	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	unit	Padang	
2	24	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54	unit	Padang	
2	24	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	Padang	
2	24	02				Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	73,00	%		

2	24	02	1	01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	10	Pencipta Arsip		
2	24	02	1	01	0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	300	arsip	Padang	
2	24	02	1	01	0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	150	arsip	Padang	
2	24	02	1	01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	300	arsip	Padang	
2	24	02	1	01	0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	50	Orang	Padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	24	02	1	01	0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	30	Instansi	Padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	24	02	1	01	0009	Penyusunan Database Arsiparis	Jumlah arsiparis	1	Dokumen	Padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	24	02	1	01	0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	1	Unit	Padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran

2	24	02	1	01	0011	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	19	Laporan	Padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	24	02	1	01	0012	Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	31	Lembaga	Padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	24	02	1	01	0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	6	Lembaga	Padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	24	02	1	02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	- Jumlah arsip statis yang diakusisi dan diolah - Jumlah Arsip Statis yang dipreservasi - Jumlah Akses layanan Arsip Statis	- 5 - 1 - 15	- Pencipta Arsip - Daftar Arsip - Pengguna Arsip		
2	24	02	1	02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	100	arsip	Padang	
2	24	02	1	02	0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai	3	orang	Padang	
2	24	02	1	02	0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	1	arsip	Padang	

2	24	02	1	02	0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	3002	arsip	padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	24	02	1	03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah simpul jaringan yang terintegrasi dalam jaringan informasi kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	5	Simpul Jaringan		
2	24	02	1	03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	500	pengguna	Padang dan Kab/Kota	
2	24	02	1	03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1	laporan	Padang	
2	24	03				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	76,66	%		
2	24	03	1	01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah pencipta arsip yang dibina dalam melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	12	Pencipta Arsip		

2	24	03	1	01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500	arsip	Padang	
2	24	03	1	02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip akibat bencana yang dilakukan	9	Kali		
2	24	03	1	02	0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	800	arsip	Padang dan Kab/Kota	
2	24	03	1	02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	600	arsip	Padang dan Kab/Kota	
2	24	03	1	03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah provinsi yang arsipnya diselamatkan	3	OPD		
2	24	03	1	03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	4	daftar	Padang	
2	24	03	1	04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah daftar arsip statis yang telah diautentifikasi arsip atas alih media arsip statis	6	Daftar Arsip		

2	24	03	1	04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1	arsip	Padang	
2	24	03	1	04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1	arsip	Padang	
2	24	04				Program Perizinan Penggunaan Arsip	Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi	1	Regulasi		
2	24	04	1	01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Jumlah aturan atau prosedur tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	1	SOP		
2	24	04	1	01	0004	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	1	SOP	Padang	
2	24	04	1	01	0005	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1	arsip	Padang	
2	23	02				Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan Ting-kat Provinsi sesuai SNP	1,72	%		
2	23	02	1	01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	8	Perpustakaan		

2	23	02	1	01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	1	perpustakaan	Padang	
2	23	02	1	01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	250	eksemplar	Padang	
2	23	02	1	01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15	perpustakaan	Padang dan Kab/Kota	
2	23	02	1	01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	70	orang	Padang	
2	23	02	1	01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1	Layanan	Padang	
2	23	02	1	01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	600	eksemplar	Padang	

2	23	02	1	01	0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1	dokumen	Padang	
2	23	02	1	01	0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	66,30	nilai	Padang	
2	23	02	1	01	0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	16	indeks	Padang	
2	23	02	1	01	0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	10	dokumen	Padang	
2	23	02	1	01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	5	perpustakaan	Padang, Kab/Kota	
2	23	02	1	01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1	dokumen	Padang, Kab/Kota	
2	23	02	1	01	0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	15	Perpustakaan	Padang, Kab/Kota	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	23	02	1	02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	26010	Orang		
2	23	02	1	02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	18	lokus	Semua Kab/Kota	

2	23	02	1	02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	10	Orang	Padang	
2	23	02	1	02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	12	perpustakaan	Padang	
2	23	02	1	02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	1	orang	Padang	
2	23	03				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223	Jumlah		
2	23	03	1	01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah KCKR koleksi daerah Provinsi yang terhimpun dan pemberian penghargaan kepada Wajib Serah Simpan	2	KCKR		
2	23	03	1	01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	350	eksemplar	Kab/Kota Se Sumatera Barat	
2	23	03	1	01	0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2	Penerbit	Kab/Kota Se Sumatera Barat	
2	23	03	1	02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	2	Buku		

2	23	03	1	02	0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	450	entry	Kab/Kota Se Sumatera Barat	
2	23	03	1	02	0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1	naskah	Kab/Kota Se Sumatera Barat	
2	23	03	1	03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah naskah kuno milik daerah Provinsi Sumatera Barat yang di inventarisasi dan didaftarkan serta di alihmediakan ke digital	2	Naskah		
2	23	03	1	03	0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	5	eksemplar	Padang	
2	23	03	1	03	0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	60	orang	Padang	
2	23	03	1	04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah koleksi Minangkabausiana yang dikembangkan sesuai kebutuhan pemustaka	1	Koleksi		
2	23	03	1	04	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	300	eksemplar	Padang	

2	23	03	1	04	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	300	eksemplar	Padang	

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah. .

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga/PD dalam jangka waktu tertentu. Sasaran dimaksudkan adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja Perangkat Daerah sehingga merupakan cambuk/motipator bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Sesuai dengan kebijakan dan program bidang pembangunan daerah dimana Perpustakaan dan Kearsipan termasuk Bidang Sosial Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai bidang garapan yang sama, yakni sama – sama mengelola informasi dan memberikan layanan publik. Persamaan mendasar dari Arsip dan bahan Perpustakaan adalah bahwa keduanya membutuhkan pemeliharaan dan Pelestarian. Media simpan bahan Perpustakaan dan Arsip dapat berupa media simpan konvensional (kertas), media simpan digital dan elektronik serta media simpan khusus, Perbedaannya adalah bahwa perpustakaan mengelola informasi bingkai yaitu informasi yang sengaja diciptakan untuk didesiminasikan kepada publik sedangkan kearsipan mengelola informasi yang lahir karena adanya kegiatan organisasi dan institusi. Hal ini sejalan dengan Tujuan Perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan yang menyatakan bahwa

"*Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa*" demikian pula sejalan dengan Tujuan penyelenggaraan Kearsipan yang diamanatkan dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa Tujuan Kearsipan adalah:

Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perorangan. serta ANRI Sebagai penyelenggara Arsip Nasional yakni:

a. *Menjamin ketersedian Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.*
b. *Menjamin terwujudnya pengelolaaan Arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.*
c. *Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak, keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.*
d. *Mendinamisasikan penyelengaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu.*
e. *Menjamin keselamatan dan kaamanan arsip sebagai bukti pertangung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*
f. *Menjamin keselamatan asset Nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa .*
g. *Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.*

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya dituntut untuk melakukan upaya penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan

azas pembelajaran sepanjang hayat, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya serta melakukan upaya pengelolaan kearsipan secara baik dan benar berdasarkan kaedah kearsipan dengan efisien dan efektif.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 berikut indikator kinerja pelayanan, program pendukung, yang telah dirumuskan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, disajikan sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Menciptakan Masyarakat Gemar Membaca.
2. Mewujudkan Tata Kearsipan yang Baik pada Kelembagaan Pemerintah Daerah

b. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu.

Dalam upaya melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan perpustakaan dan kearsipan Tahun 2024, *kebijakan-kebijakan* yang akan ditempuh adalah:

a. Urusan Perpustakaan

Salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya adalah Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia. Sehubungan dengan itu kebijakan pembangunan perpustakaan Tahun 2024 yaitu meningkatkan mutu, perluasan, pemerataan dan relevansi pendidikan dengan melakukan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan rute / jangkauan /lokasi pos layanan untuk kunjungan mobil perpustakaan keliling ke perpustakaan sekolah dan perpustakaan nagari se- Kabupaten Dharmasraya
2. Meningkatkan minat dan kemampuan baca di kalangan pelajar, Masyarakat umum dan aparatur pemerintahan dengan melaksanakan lomba pengembangan minat baca
3. Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan, dan sarana perpustakaan.
4. Melaksanakan suvervisi, pembinaan, dan stimulasi kepada perpustakaan se- Kabupaten Dharmasraya.
5. Menyelengarakan kordinasi pengembangan budaya baca.

b. Urusan Kearsipan

Dalam upaya Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah dan kualitas pelayanan yang baik terhadap masyarakat, kebijakan dan strategi yang ditempuh antara lain adalah:

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Kearsipan
2. Penyediaan sarana gedung Depo arsip , serta sarana pengolahan, dan penyimpanan dokumen arsip daerah.
3. Melakukan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah/ pembenahan arsip daerah .
4. Menduplikatkan dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika dan menghimpun dokumen arsip penyelenggaraan acara pemerintahan daerah
5. Melaksanakan pengembangan penataan dan penyelenggaraan kearsipan

Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah . Kegiatan

adalah bahagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang termasuk peralatan dan teknologi, dana , atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Pada tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merencanakan beberapa program dan kegiatan yang penting demi percepatan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya, dan tentunya sesuai dan mengacu pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, adapun secara umum sebagai berikut :

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program pembinaan perpustakaan

a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota;
b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.

3) Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
   a. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah
   b. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

4) Program pengelolaan arsip
   a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
   c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

5) Program perlindungan dan penyelamatan arsip
   a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun.
   b. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota.
   c. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB 4.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

Berdasarkan realisasi 2020 hingg atahun 2024 serta proyeksi tahun berjalan (tahun) 2025, maka proyeksi tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RKPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang akan dievaluasi					
1	2	3	4	5	6					
					K	RKPD	K	Rp.APBD	K	Rp.APBD
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			**Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Inspektorat**						
				Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						
		2.23	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**		**206.31**	**4,077,413,850**	**206.31**	**3,917,230,045**	**206.31**	**3,623,215,245**
		2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	3,732,451,800	100	3,493,018,545	100	3,378,105,045
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia	0	-	0	-	0	-
		2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	0	-	0	-	0	-
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan PD	1	2,808,115,000	1	2,727,219,000	1	2,727,219,000
		2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	2,808,115,000	23	2,727,219,000	23	2,727,219,000
		2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-
		2.23.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yg terpelihara	-	-	-	-	-	-
		2.23.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya aset daerah dan BMD (Data Base)	-	-	-	-	-	-
		2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-
		2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	-	-	-	-	-	-
		2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang dilatih	-	-	-	-	-	-
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	161,015,600.00	1	163,706,000.00	1	89,033,500.00
		2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	0	0	0	0	0
		2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	0	0	0	0	0
		2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	26,057,000	1	41.955.000	1	25.220.500
		2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	21,758,000	1	20.185.000	1	12.985.000
		2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	13,720,000	1	15.900.000	1	7.940.000
		2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	99,480,600	12	85.666.000	12	42.888.000
		2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-
		2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17	111,350,000	17	35,000,000	17	5,000,000
		2.23.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	25,000,000	-	-	-	-
		2.23.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	25,000,000	-	-	-	-
		2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	16,000,000	9	12.000.000	9	0
		2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	44,350,000	8	23.000.000	8	5.000.000
		2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lanjutan gedung layanan perpustakaan Daerah (Lantai dan Plafon)	0	-	0	-	0	-
		2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	1,000,000	0	-	0	-
		2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pagar dan paving block depo	0	-	0	-	0	-
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	360,891,200	12	408,297,545	12	405,448,545
		2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2,000,000	12	2.000.000	12	2.000.000
		2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	40,800,000	12	86.886.345	12	84.037.345
		2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	318,091,200	12	319.411.200	12	319.411.200
		2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29	291,080,000	29	158,796,000	29	151,404,000
		2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	16,000,000	1	61.940.000	1	61.940.000
		2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	58,120,000	7	60.000.000	7	60.000.000
		2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	16,980,000	20	11.650.000	20	11.650.000
		2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Sewa gedung kantor)	1	199,980,000	1	25.206.000	1	17.814.000
2	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat			**Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan**						
				Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan						
		2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		6.31	164,990,050	6.31	309,116,500	6.31	187,683,200
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Dibina	6.31	164,990,050	6.31	309,116,500	6.31	187,683,200
		2.23.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perpustakaan yang dibina	20	119,880,050	20	197,071,150	20	110,747,050

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang akan dievaluasi					
1	2	3	4	5	6					
					K	RKPD	K	Rp.APBD	K	Rp.APBD
		2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan Elekronik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan Elektronik di Kabupaten	30.00	5,000,000	30.00	-	30.00	-
				Tersedianya TIK	-	-	-	-	-	-
		2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10	39,884,800	10	81,992,050	10	44,444,550
				jumlah pengadaan perabot layanan perpustakaan (DAK)	0		0	-	0	-
				Jumlah Pengembangan SDM Perpustakaan Sekolah/ Nagari dan TBM yang di ikut Pelatihan		-		-		-
		2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Bertambahnya Kolekasi Kekhasan Daerah	20	-	20	-	20	-
		2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar yang Dibina di Kabupaten	30	-	30	-	30	-
		2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina di Kabupaten	0	-	0	-	0	-
		2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah pemustaka sekolah, nagari,dan TBM	65	59,995,250	65	55,953,300	65	27,896,650
				Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi						
		2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peningkatan SDM Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Kabupaten	100	5,000,000	100	33,640,550	100	21,175,800
		2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	-	-	-	-	-	-
		2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1,000.00	5,000,000	1,000.00	9,107,500	1,000.00	9,107,500
		2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan , Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten / Kota	Tersedianya Data dan Informasi tentang Perpustakaan dan Tanaga Perpustakaan di Kabupaten Dharmasraya	-	-	-	-	-	-
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	200	45,110,000	200	112,045,350	200	76,936,150
		2.23.02.2.02.01	Sosialisiasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Tersosialisasinya Minat dan Budaya Baca pada satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya	-	-	-	-	-	-
		2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.00	5,000,000	3.00	-	3.00	-
				Tersedianya gedung layanan perpustakaan daerah		-				
				Tersedianya perabot/tik layanan perpustakaan	-	-	-	-	-	-
		2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Duta Baca di Kab. Dharmasraya	20.00	5,000,000	20.00	8,362,200	20.00	5,241,100
		2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Insklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis Inklusi Sosial Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10	30,110,000	10	48,167,750	10	31,827,550
				Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Transformasi Perpustakaan Berbasis Insklusi Sosial	-	-	-		-	
		2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	20	5,000,000	20	55,515,400	20	39,867,500
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dilstarikan	0	-	0	-	0	-
		2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	-	-	-	-	-	-
		2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan , Perawatan , Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Tersosialisasikannya tentang Naskah Kuno ke Masyarakat yang ada Naskah Kunonya	-	-	-	-	-	-
		2.23.03.2.01.02	Pengembangan , Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikandan didaya gunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	-	-	-	-	-	-
		2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	-	-	-	-	-	-
		2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	tersedianya Koleksi Budaya Etnis Nusantara	-	-	-	-	-	-
		2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Kolekasi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	-	-	-	-	-	-
3	**Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu**			**Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku**						
				Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku						
		2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		100	179,972,000	100	115,095,000	100	57,427,000
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100	179,972,000	100	115,095,000	100	57,427,000
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dikelola	1	164,032,000	1	115,095,000	1	57,427,000
		2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah perangkat daerah dan Nagari yang menyelenggarakan kearsipan secara baku melalui Pembinaan Kearsipan	30	88,277,000	30	49,830,000	30	24,895,000
				Jumlah SDM PD yang memdapatkan pembinaan kearsipan	47	-	47	-	47	-
		2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip Dinamis yang ditata dan dipelihara	120	32,726,000	120	23,464,000	120	11,663,000
				Jumlah Penyusutan arsip dinamis yang dilaksanakan	-		-	-	-	-
		2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38	43,029,000	38	41,801,000	38	20,869,000
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	-	-	-	-	-	-
		2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang di simpan sebagai khazanah arsip di depo arsip	-	-	-	-	-	-
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan informasi arsip Dinamis dan statis secara nasional	1	15,940,000	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang akan dievaluasi					
1	2	3	4	5	6					
					K	RKPD	K	Rp.APBD	K	Rp.APBD
		2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kearsipan yang dilatih tentang Jaringan Informasi Kearsipan	-	-	-	-	-	-
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,	-	-	-	-	-	-
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	jumlah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	-	-	-		-	
		2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliiki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah daftar arsip usul musnah	-	-	-	-	-	-
		2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan	-	-	-	-	-	-
		2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-	-	-	-	-	-
		2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	-	-	-	-	-	-
		2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip Perangkat daerah yang dilakukan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	-	-	-	-	-	-
		2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	jumlah arsip yang digabung dan/atau dibubarkab	-	-	-	-	-	-
		2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip perangkat daerah yang terselamatkan bagi penggabungan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-
		2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip perangkat daerah yang terselamatkan bagi Pembubaran Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-
		2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pendampingan Penyelamatan arsip bagi pemekaran Kecamatan	-	-	-	-	-	-
		2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Nagari yang mendapatkan pendampingan Penyelamatan arsip bagi pemekaran Kecamatan	-	-	-	-	-	-
		2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	-	-	-	-	-	-
		2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip statis yang autentik dan terpecaya yang dapat digunakan	-	-	-		-	
		2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip daerah yang dialih mediakan	-	-	-	-	-	-
		2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Terwujudnya izin penggunaan arsip yang terkelola dengan baik sesuai dengan aturan	-	-	-	-	-	-
		2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Terciptanya peningkatan dan efektifitas pelayanan publik melalui layanan izin penggunaan arsip tertutup	-	-	-	-	-	-
		2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP yang bisa digunakan sebagai acuan layanan penggunaan arsip tertutup	-	-	-	-	-	-
						4,077,413,850		**3,917,230,045**		**3,623,215,245**

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**4.077.413.850,00**	**3.917.230.045,00**	**3.623.215.245,00**	**-454.198.605,00**							**3.973.876.250,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.077.413.850,00**	**3.917.230.045,00**	**3.623.215.245,00**	**-454.198.605,00**							**3.973.876.250,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.897.441.850,00**	**3.802.135.045,00**	**3.565.788.245,00**	**-331.653.605,00**							**3.793.904.250,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.732.451.800,00**	**3.493.018.545,00**	**3.378.105.045,00**	**-103.537.600,00**							**3.628.914.200,00**	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				23 orang	23 orang	2.808.115.000,00	2.727.219.000,00	2.727.219.000,00	-80.896.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.808.115.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.808.115.000,00	2.727.219.000,00	2.727.219.000,00	-80.896.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.808.115.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 paket	1 paket	161.015.600,00	163.706.000,00	89.033.500,00	-71.982.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		58.478.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.057.000,00	41.955.000,00	25.220.500,00	-836.500,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			23.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.758.000,00	20.185.000,00	12.985.000,00	-8.773.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			21.758.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.720.000,00	15.900.000,00	7.940.000,00	-5.780.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			13.720.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	99.480.600,00	85.666.000,00	42.888.000,00	-56.592.600,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				111 Unit	1 Unit	111.350.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	-106.350.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		110.350.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				49 Unit	0 Unit	16.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				49 Unit	1 Unit	44.350.000,00	23.000.000,00	5.000.000,00	-39.350.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			44.350.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	360.891.200,00	408.297.545,00	405.448.545,00	44.557.345,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		360.891.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.800.000,00	86.886.345,00	84.037.345,00	43.237.345,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			40.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	318.091.200,00	319.411.200,00	319.411.200,00	1.320.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			318.091.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				78 unit	78 unit	291.080.000,00	158.796.000,00	151.404.000,00	-139.676.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		291.080.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	16.000.000,00	61.940.000,00	61.940.000,00	45.940.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	58.120.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	1.880.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			58.120.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	78 Unit	16.980.000,00	11.650.000,00	11.650.000,00	-5.330.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.980.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	199.980.000,00	25.206.000,00	17.814.000,00	-182.166.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			199.980.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Jumlah Perpustakaan Yang Dibina**				**6.31 persen**	**6.31 persen**	**164.990.050,00**	**309.116.500,00**	**187.683.200,00**	**0,00**							**164.990.050,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi*				23 Perpustakaan	23 Perpustakaan	119.880.050,00	197.071.150,00	110.747.050,00	-9.133.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		119.880.050,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	5.000.000,00	16.377.750,00	8.122.550,00	3.122.550,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	39.884.800,00	81.992.050,00	44.444.550,00	4.559.750,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			39.884.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				65 Layanan	65 Layanan	59.995.250,00	55.953.300,00	27.896.650,00	-32.098.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			59.995.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	5.000.000,00	33.640.550,00	21.175.800,00	16.175.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	5.000.000,00	9.107.500,00	9.107.500,00	4.107.500,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				30 Perpustakaan	0 Perpustakaan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya*				400 Orang	400 Orang	45.110.000,00	112.045.350,00	76.936.150,00	31.826.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		45.110.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	8.362.200,00	5.241.100,00	241.100,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	30.110.000,00	48.167.750,00	31.827.550,00	1.717.550,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			30.110.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3 Perpustakaan	0 Perpustakaan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	55.515.400,00	39.867.500,00	34.867.500,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**179.972.000,00**	**115.095.000,00**	**57.427.000,00**	**-122.545.000,00**							**179.972.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Terwujud Penyelenggaraan kearsipan Yang Patuh dan Taat Terhadap Uu**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**179.972.000,00**	**115.095.000,00**	**57.427.000,00**	**0,00**							**179.972.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Naskah Dinas Yang Diciptakan Dan Digunakan*				30 Berkas	30 Berkas	164.032.000,00	115.095.000,00	57.427.000,00	-106.605.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu		164.032.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				30 Berkas	30 Berkas	88.277.000,00	49.830.000,00	24.895.000,00	-63.382.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			88.277.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				120 Berkas	120 Berkas	32.726.000,00	23.464.000,00	11.663.000,00	-21.063.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			32.726.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Laporan	38 Laporan	43.029.000,00	41.801.000,00	20.869.000,00	-22.160.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			43.029.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN*				1 Layanan	Layanan	15.940.000,00	0,00	0,00	-15.940.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu		15.940.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	0 Pengguna	15.940.000,00	0,00	0,00	-15.940.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.940.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	J U M L A H								**4.077.413.850,00**	**3.917.230.045,00**	**3.623.215.245,00**	**-454.198.605,00**							**3.973.876.250,00**	

4.2. Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Satuan	Realisasi				Target Renja PD	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Meningkatkan Minat Baca Masyarakat**								
		Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	Orang	152.286	152.286	156.300	156.168	150.000	150.000
		Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	persen	35,68%	38,68%	44,97%	51,26 %	57,55%	63,84%
2	**Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**								
		Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Inspektorat	Nilai	BB(70,45)	BB (75,34)	BB (76,51)	BB (79,24)	BB (78,84	A (80)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	80	81,4	81	82,63	82	82,5
3	**Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu.**								
		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	47,37	57,89	68,42	78,95	89,47	100
		Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	persen	23,08	30,77	38,46	46,15	53,85	61,54

BAB 5.
PENUTUP

Rencana kerja Perubahan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan tujuan organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2025, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta loyalitas yang tinggi demi mengemban tujuan organisasi untuk menuju pegawai pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya.

...

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN BUPATI
DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) DINAS PERTANIAN TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB 1 PENDAHULUAN 1-1

1.1 Latar Belakang 1-1

1.2 Landasan Hukum 1-2

1.3 Madsud dan Tujuan 1-3

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Renja PD 1-3

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2-1

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 2-1

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3-1

3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 3-1

3.2. Perubahan Target Kinerja Tahun 2025 3-13

BAB 4 PENUTUP 4-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Evaluasi Terhadap Hasil Capaian RKPD Tahun 2025 Kondisi sampai dengan Triwulan II	2-2
Tabel 3-1	Matriks Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025	3-10
Tabel 3-2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025	3-13

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bab 1 memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Dokumen Renja PD

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun keempat dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah (Perubahan renja PD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 serta pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan Renja PD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB 2. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab II. Memuat evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2019-2023, dan penelaahan usulan masyarakat

2.1. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2025 dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2025. Selain itu juga mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya sampai dengan triwulan II.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai reviu hasil evaluasi pelaksananaan renja Dinas Pertanian dan perkiraan pencapaian kinerja. Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Adapun laporan hasil evaluasi terhadap rencana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya periode pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2025 pada tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (renja 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II		III		IV									
1	2	3		7			8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5		15	16
				K	RP	Rp. APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		**22.072.854.800**	**18.771.143.595**		**3.002.405.481**		**3.708.367.769**		-		-		**6.710.773.250**		-		-		
1		**3 27 1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**16.062.854.800**	**14.679.033.595**		**2.991.897.881**		**3.517.247.319**		-		-		**6.509.145.200**		-		-		
		3 27 1 02:02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**13.168.854.800**	**12.529.194.000**		**2.682.333.043**		**2.953.986.310**		-		-		**5.636.319.353**		-		-		
		3 27 1 02:02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang	13.168.854.800	12.529.194.000	119 Orang	2.682.333.043	119 Orang	2.953.986.310	-	-		-	119 Orang	5.636.319.353		-		-		
		3 27 1 02:06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**411.000.000**	**154.035.500**		**45.195.546**		**62.559.616**		-		-		**107.755.162**		-		-		
		3 27 1 02.6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	9 Paket	8.000.000	3.636.000	1 Paket	2.479.000	1 Paket	1.157.000	-	-		-	1 Paket	3.636.000		-		-		
		3 27 1 02:06 2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	50.000.000	25.024.500	5 Paket	8.426.000	3 Paket	3.050.000	-	-		-	5 Paket	11.476.000		-		-		
		3 27 1 2.06 3	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	18 Paket	15.000.000	4.995.000	2 Paket	2.457.500	3 Paket	2.535.000	-	-		-	2 Paket	4.992.500		-		-		
		3 27 1 02:06 4	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	15 Paket	33.000.000	10.943.000	3 Paket	3.465.000		4.619.000	-	-		-	3 Paket	8.084.000		-		-	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02:06 5	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15 Paket	30.000.000	9.325.000	2 Paket	3.500.000	2 Paket	2.301.000	-	-		-	3 Paket	5.801.000		-		-		
		3 27 1 02:06 18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	275.000.000	100.112.000	3 Laporan	24.868.046	3 Laporan	48.897.616	-	-		-	3 Laporan	73.765.662		-		-		
		3 27 1 02:07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**155.000.000**	-		-		-												
		3 27 1 02:07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	155.000.000	0		-		-												
		3 27 1 02:08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.674.000.000**	**1.608.234.095**		**224.910.492**		**152.936.293**		-		-		**377.849.785**		-		-		
		3 27 1 02:08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.000.000	4.000.000,00	1 Laporan	500.000	1 Laporan	1.500.000	-	-		-	1 Paket	2.000.000		-		-		

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (renja 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3						7			8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5		15	16
								K	RP	Rp. APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3	27	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	140.000.000	129.628.895	3 Laporan	17.423.592	3 Laporan	34.787.743	-	-	-	-	12 Laporan	52.211.335						
		3	27	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.530.000.000	1.474.605.200	3 Laporan	206.986.900	3 Laporan	316.651.550	-	-	-	-	3 Laporan	523.638.450						
		3	**27**	**1**	**02:09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**684.000.000**	**387.570.000**		**39.458.800**		**147.762.100**		-		-		**187.220.900**						
		3	27	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	14.000.000	16.500.000	1 Unit	1.500.000	1 Unit	4.265.000	-	-	-	-	1 Unit	5.765.000						
		3	27	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138 Unit	300.000.000	291.600.000	16 Unit	34.898.800	70 Unit	138.572.100	-	-	-	-	18 Unit	173.470.900						
		3	27	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28 Unit	20.000.000	15.100.000	6 Unit	3.060.000	8 Unit	4.925.000	-	-	-	-		7.985.000						
		3	27	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	350.000.000	64.370.000		-		-	-	-	-	-		-						
2		**3**	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**900.000.000**	**1.301.680.100**		**3.130.000**		**55.811.350**		-		-		**58.941.350**						
		3	**27**	**2**	**02:01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**150.000.000**	**133.743.200**		-		**5.536.300**		-		-		**5.536.300**						
		3	27	2	02:01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	150.000.000	133.743.200	1 Laporan	-	1 Laporan	5.536.300	-	-	-	-	Laporan	5.536.300						
		3	**27**	**2**	**02:02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		**250.000.000**	**1.148.565.650**		**3.130.000**		**46.706.550**		-		-		**49.836.550**						
		3	27	2	02:02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	125.000.000	1.092.010.000	1 Dokumen	840.000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	840.000						
		3	27	2	02:03	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	125.000.000	56.555.650	1 Dokumen	2.290.000	1 Dokumen	46.706.550	-	-	-	-	1 Dokumen	48.996.550						

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (renja 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3						7			8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5		15	16
								K	RP	Rp. APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3	27	2	02:06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**		**500.000.000**	**19.371.250**		-		**3.568.500**		-		-		**3.568.500**					
		3	27	2	02:06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	30 Ekor	500.000.000	19.371.250		-		3.568.500		-		-		3.568.500					
3		3	27	02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**3.950.000.000**	**2.404.495.100**		**4.267.600**		**20.414.850**		-		-		**24.682.450**					
		3	27	03	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**		**600.000.000**	**773.596.300**		**3.467.600**		**10.834.800**		-		-		**14.302.400**					
		3	27	3	02:01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	100.000.000	376.569.000	1 Laporan	1.010.000	1 Laporan	-		-		-	1 Laporan	1.010.000					
		3	27	3	02:01	14	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000	148.820.400		-		-		-		-		-					
		3	27	3	02:01	15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	256.206.900	1 Dokumen	2.457.600	1 Dokumen	10.834.800		-		-	1 Dokumen	13.292.400					
		3	27	3	02:02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**		**3.350.000.000**	**1.630.898.800**		**800.000**		**9.580.050**		-		-		**10.380.050**					
		3	27	3	02:02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6 Unit	800.000.000	101.243.500		-		-		-		-		-					
		3	27	3	02:02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	14 Unit	2.100.000.000	1.481.296.900		-	1 Unit	2.709.050		-		-		2.709.050					
		3	27	3	02:02	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1 Unit	100.000.000	-		-		-		-		-		-					
		3	27	3	02:02	11	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	1 Unit	100.000.000	14.764.950		-	1 Unit	480.000		-		-		480.000					
		3	27	3	02:02	14	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	6 Unit	150.000.000	21.063.450	1 Unit	800.000	2 Unit	1.556.000		-		-		2.356.000					

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (renja 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3						7			8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5		15	16
								K	RP	Rp. APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3	27	3	02:02	15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	1 Unit	100.000.000	12.530.000			1 Unit	4.835.000						4.835.000						
4		3	27	4			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		**130.000.000**	**68.888.950**		**1.210.000**		**2.794.250**		-		-		**4.004.250**						
		3	**27**	**4**	**02:01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**100.000.000**	**60.531.450**		**1.210.000**		**1.040.000**		-		-		**2.250.000**						
		3	27	4	02:01	8	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000	60.531.450	1 Laporan	1.210.000	1 Laporan	1.040.000					1 Laporan	**2.250.000**						
		3	**27**	**4**	**02:04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**30.000.000**	**8.357.500,00**		-		**1.754.250**												
		3	27	4	02:04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	30.000.000	8.357.500	1 Laporan	-	1 Laporan	1.754.250						**1.754.250**						
5		**3**	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		**50.000.000**	**8.663.350**		-		-		-		-		-						
		3	**27**	**5**	**02:01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		**50.000.000**	**8.663.350**		-		-		-		-		-						
		3	27	5	02:01	6	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	50.000.000	8.663.350	1 Laporan	-	1 Laporan	-	-	-	-	-	1 Laporan	-						
6		**3**	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**950.000.000**	**310.382.500**		**1.900.000**		**112.100.000**		-		-		**114.000.000**						
		3	**27**	**7**	**02:01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**950.000.000**	**310.382.500**		**1.900.000**		**112.100.000**		-		-		**114.000.000**						
		3	27	7	02:01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	11 Unit	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		3	27	7	02:01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1 Unit	150.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

No	Sasaran	Kode Rekening					Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (renja 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran BPIMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPIMD s/d		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3						7			8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5		15	16
								K	RP	Rp. APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1	27	7	02.01	6	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	65 Orang	50.000.000	110.382.500	65 Orang	1.900.000	65 Orang	112.100.000						114.000.000						
TOTAL																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																										
Predikat kinerja																										

Keberhasilan pencapaian realisasi program/kegiatan didasarkan pada keberhasilan capaian berdasarkan rencana kerja dan rencana anggaran kas yang disususun selama Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan analisa rencana kerja dan rencana anggaran kas yang telah ditetapkan melalui tabel 2.1 tersebut diatas dapat diuraikan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

   Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 6 Program 13 Kegiatan 24 sub kegiatan dengan kriteria capaian fisik sebesar < 75% dari 100% yang direncanakan sebagai berikut:

   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

      - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian fisik tercapai 67,77% atau sebesar Rp. 5.636.319.353,- dari 100% atau sebesar Rp.8.316.446.283,- pada Triwulan II yang direncanakan.
      - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian fisik tercapai 57,69% atau sebesar Rp. 11.476.000,- dari 100% atau sebesar Rp.19.893.000,- pada Triwulan II yang direncanakan.
      - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian fisik tercapai 66,67% atau sebesar Rp. 2.000.000,- dari 100% atau sebesar Rp. 3.000.000,- pada Triwulan II yang direncanakan
      - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian fisik tercapai 69,05% atau sebesar Rp. 52.211.335,- dari 100% atau sebesar Rp. 75.616.856,- pada Triwulan II yang direncanakan.
      - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, capaian fisik tercapai 70,08% atau sebesar Rp. 523.638.450,- dari 100% atau sebesar Rp. 747.207.108,- pada Triwulan II yang direncanakan.
      - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, capaian fisik

tercapai 34,94% atau sebesar Rp. 5.765.000,- dari 100% atau sebesar Rp. 16.500.000,- pada Triwulan II yang direncanakan.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, capaian fisik tercapai 71,45% atau sebesar Rp. 173.470.900,- dari 100% atau sebesar Rp. 242.800.000,- pada Triwulan II yang direncanakan.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, capaian fisik tercapai 52,89% atau sebesar Rp. 7.985.000,- dari 100% atau sebesar Rp. 15.100.000,- pada Triwulan II yang direncanakan.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, capaian fisik tercapai 0% atau sebesar Rp. 0,- dari 100% atau sebesar Rp. 64.370.000,- pada Triwulan II yang direncanakan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, capaian fisik tercapai 4,43% atau sebesar Rp. 5.536.300,- dari 100% atau sebesar Rp. 124.825.100,- pada Triwulan II yang direncanakan.
- Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, capaian fisik tercapai 0,11% atau sebesar Rp. 840.000,- dari 100% atau sebesar Rp. 740.315.000,- pada Triwulan II yang direncanakan.
- Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain, capaian fisik tercapai 20,08% atau sebesar Rp. 3.568.500,- dari 100% atau sebesar Rp. 17.771.250,- pada Triwulan II yang direncanakan.

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pertanian lainnya, capaian fisik tercapai 1,42% atau sebesar Rp. 1.010.000,- dari 100% atau sebesar Rp. 71.129.000,- pada Triwulan II yang direncanakan.
- Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota, capaian fisik tercapai 0,0% atau sebesar Rp. 0,- dari 100% atau sebesar Rp. 83.788.800,- pada Triwulan II yang direncanakan.
- Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota, capaian fisik tercapai 24,98% atau sebesar Rp. 13.292.400,- dari 100% atau sebesar Rp. 53.219.800,- pada Triwulan II yang direncanakan.
- Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan,rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani, capaian fisik tercapai 0,0% atau sebesar Rp. 0,- dari 100% atau sebesar Rp. 101.243.500,- pada Triwulan II yang direncanakan.
- Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, capaian fisik tercapai 0,55% atau sebesar Rp. 2.709.050,- dari 100% atau sebesar Rp. 490.436.950,- pada Triwulan II yang direncanakan.
- Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak, capaian fisik tercapai 3,25% atau sebesar Rp. 480.000,- dari 100% atau sebesar Rp. 14.764.950,- pada Triwulan II yang direncanakan.
- Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan, capaian fisik tercapai 11,36% atau sebesar Rp. 2.356.000,- dari 100% atau sebesar Rp. 20.743.450,- pada Triwulan II yang direncanakan.
- Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan, capaian

fisik tercapai 50,73% atau sebesar Rp. 4.835.000,- dari 100% atau sebesar Rp. 9.530.000,- pada Triwulan II yang direncanakan.

d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
    - Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian fisik tercapai 3,96% atau sebesar Rp. 2.250.000,- dari 100% atau sebesar Rp. 56.801.450,- pada Triwulan II yang direncanakan.
    - Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan, capaian fisik tercapai 21,77% atau sebesar Rp. 1.754.250,- dari 100% atau sebesar Rp. 8.057.500,- pada Triwulan II yang direncanakan.

e. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
    - Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, capaian fisik tercapai 0,0% atau sebesar Rp. 0,- dari 100% atau sebesar Rp. 8.663.350,- pada Triwulan II yang direncanakan.

f. Program Penyuluhan Pertanian
    - Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian, capaian fisik tercapai 62,26% atau sebesar Rp. 114.000.000,- dari 100% atau sebesar Rp. Rp183.092.500,- pada Triwulan II yang direncanakan.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

   Program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 2 Program 2 Kegiatan 6 sub kegiatan, dengan kriteria capaian fisik sebesar 75%-100% dari 100% yang direncanakan sebagai berikut:

   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, capaian fisik tercapai 100% atau sebesar Rp. 3.636.000,- dari 100% atau sebesar Rp. 3.636.000,- pada Triwulan II yang direncanakan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, capaian fisik tercapai 99,95% atau sebesar Rp. 4.992.500,- dari 100% atau sebesar Rp. 4.995.000,- pada Triwulan II yang direncanakan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, capaian fisik tercapai 82,85% atau sebesar Rp. 8.084.000,- dari 100% atau sebesar Rp. 9.756.900,- pada Triwulan II yang direncanakan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, capaian fisik tercapai 81,42% atau sebesar Rp. 5.801.000,- dari 100% atau sebesar Rp. 7.125.000,- pada Triwulan II yang direncanakan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian fisik tercapai 83,87% atau sebesar Rp. 73.765.662,- dari 100% atau sebesar Rp. 87.956.746,- pada Triwulan II yang direncanakan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, capaian fisik tercapai 88,77% atau sebesar Rp. 48.996.550,- dari 100% atau sebesar Rp. 55.194.650,- pada Triwulan II yang direncanakan.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

   Tidak terdapat Program Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Adapun yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan disebabkan oleh faktor-faktor penghambat berikut:

a. Adanya Perubahan kelompok penerima kegiatan sumber dana insentif fiskal pada anggaran perubahan dikarenakan kelompok penerima tidak memenuhi syarat ketentuan.
b. Belum adanya aturan untuk pelaksanaksanaan kegiatan sumber dana DBH sawit
c. Lambatnya usulan proposal penerima bantuan dari kelompok penerima.
d. Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dikarenakan alasan teknis.

Adapun yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja program/kegiatan disebabkan oleh faktor-faktor keberhasilan berikut:

a. Perencanan kegiatan yang semakin baik
b. Adanya konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan pencairan anggaran
c. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai
d. Peningkatan Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

   Faktor-faktor penghambat berimplikasi pada tidak tercapainya target capaian program Renstra Dinas Pertanian sampai kondisi trwulan II. Perbaikan kondisi ini akan dilaksanakan di triwulan II sampai triwulan IV dan akan dilakukan upaya-upaya serta penetapan kebijakan untuk percepatan penyelesaian pencapaian target program/kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan agar tercapai dengan optimal.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
   a. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas;
   b. Meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi yang lebih intensif;
   c. Mengoptimalkan dukungan sarpras, anggaran dan SDM yang dimiliki.

BAB 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan RKPD Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Secara keseluruhan pagu indikatif RKPD Dinas Pertanian menurun Tahun 2025 yang semula sebesar Rp. 22.072.854.800,00,- dan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025 menjadi Rp. 20.183.488.645,00,- ada penurunan sebesar Rp. 1.889.366.155,00,-.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk menunjang pencapaian indikator kinerja utama (IKU) maka disusunlah perubahan rencana kerja tahun 2025 untuk upaya peningkatan pencapaian kinerja serta pelaksanaan realisasi program/kegiatan. Perubahan rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 Matrik Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERTANIAN							**22.072.854.800,00**	**20.550.391.245,00**	**20.183.488.645,00**	**-1.889.366.155,00**							**23.099.334.660,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**22.072.854.800,00**	**20.550.391.245,00**	**20.183.488.645,00**	**-1.889.366.155,00**							**23.099.334.660,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**22.072.854.800,00**	**20.550.391.245,00**	**20.183.488.645,00**	**-1.889.366.155,00**							**23.099.334.660,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**16.092.854.800,00**	**14.913.605.095,00**	**14.678.932.595,00**	**840.979.860,00**							**16.933.834.660,00**	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Honorarium ASN*				12 Bulan	12 Bulan	13.168.854.800,00	12.529.194.000,00	12.529.194.000,00	-639.660.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		13.813.653.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				119 Orang/ bulan	113 Orang/ bulan	13.168.854.800,00	12.529.194.000,00	12.529.194.000,00	-639.660.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			13.813.653.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum*				12 Bulan	12 Bulan	411.000.000,00	304.957.000,00	154.035.500,00	-256.964.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		394.800.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	4 Paket	8.000.000,00	7.275.000,00	3.636.000,00	-4.364.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			8.400.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15 Paket	50.000.000,00	50.358.000,00	25.024.500,00	-24.975.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			57.750.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 Paket	5 Paket	15.000.000,00	9.990.000,00	4.995.000,00	-10.005.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			15.750.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	33.000.000,00	18.443.000,00	10.943.000,00	-22.057.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			34.650.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	10 Paket	30.000.000,00	18.650.000,00	9.325.000,00	-20.675.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			31.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	275.000.000,00	200.241.000,00	100.112.000,00	-174.888.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			246.750.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang diadakan*				13 Unit	8 Unit	155.000.000,00	83.650.000,00	0,00	-155.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		157.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	8 Unit	155.000.000,00	83.650.000,00	0,00	-155.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			157.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Perkantoran*				12 Bulan	12 Bulan	1.674.000.000,00	1.608.234.095,00	1.608.234.095,00	-65.765.905,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.833.509.660,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			4.400.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	129.628.895,00	129.628.895,00	-10.371.105,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			147.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.530.000.000,00	1.474.605.200,00	1.474.605.200,00	-55.394.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			1.682.109.660,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*				140 Unit	170 Unit	684.000.000,00	387.570.000,00	387.469.000,00	-296.531.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		734.372.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	14.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			15.400.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				138 Unit	138 Unit	300.000.000,00	291.600.000,00	291.600.000,00	-8.400.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			329.472.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	20.000.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	-4.900.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			22.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	350.000.000,00	64.370.000,00	64.269.000,00	-285.731.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			367.500.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Sarana Pertanian**				**10 %**	**10 %**	**900.000.000,00**	**2.439.029.850,00**	**2.097.747.300,00**	**32.500.000,00**							**932.500.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Peningkatan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*				10 %	10 %	150.000.000,00	153.985.050,00	243.743.200,00	93.743.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		152.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	153.985.050,00	243.743.200,00	93.743.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			152.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, perkebunan dan Hortikultura*				10 %	10 %	250.000.000,00	1.211.902.300,00	1.489.047.850,00	1.239.047.850,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		260.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	1.124.732.000,00	1.321.222.000,00	1.196.222.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			125.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	87.170.300,00	167.825.850,00	42.825.850,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			135.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Peningkatan populasi ternak*				10 %	5 %	500.000.000,00	1.073.142.500,00	364.956.250,00	-135.043.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH		519.750.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				30 Ekor	74 Ekor	500.000.000,00	1.073.142.500,00	364.956.250,00	-135.043.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			519.750.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Prasarana pertanian**				**10 %**	**10 %**	**3.950.000.000,00**	**2.619.734.550,00**	**2.901.784.450,00**	**774.000.000,00**							**4.724.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan*				4 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000,00	953.057.000,00	830.249.350,00	230.249.350,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		635.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	456.641.400,00	370.569.000,00	270.569.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota																		
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan				1 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	196.437.800,00	146.820.400,00	-153.179.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			315.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	299.977.800,00	312.859.950,00	112.859.950,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			210.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara*				29 Unit	19 Unit	3.350.000.000,00	1.666.677.550,00	2.071.535.100,00	-1.278.464.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		4.089.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				6 Unit	1 Unit	800.000.000,00	101.749.500,00	101.243.500,00	-698.756.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			840.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				14 Unit	10 Unit	2.100.000.000,00	1.487.869.400,00	1.481.293.200,00	-618.706.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			2.730.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			210.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak																		
			Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	19.999.900,00	455.404.950,00	355.404.950,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			100.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan																		
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	42.016.750,00	21.063.450,00	-128.936.550,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			156.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	15.042.000,00	12.530.000,00	-87.470.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Peningkatan Produksi Daging**				**10 %**	**5 %**	**130.000.000,00**	**85.224.900,00**	**68.888.950,00**	**6.500.000,00**							**136.500.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular*				100 %	100 %	100.000.000,00	70.009.900,00	60.531.450,00	-39.468.550,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH		105.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	70.009.900,00	60.531.450,00	-39.468.550,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			105.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesmavet*				10 Unit	10 Unit	30.000.000,00	15.215.000,00	8.357.500,00	-21.642.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH		31.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	15.215.000,00	8.357.500,00	-21.642.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			31.500.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian**				**100 %**	**100 %**	**50.000.000,00**	**9.989.350,00**	**8.663.350,00**	**2.500.000,00**							**52.500.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah area asuransi usaha tani yang mendapat subsidi*				500 Ha	200 Ha	50.000.000,00	9.989.350,00	8.663.350,00	-41.336.650,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																		
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	9.989.350,00	8.663.350,00	-41.336.650,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kapassitas SDM Pertani dan penyuluh**				**75 %**	**75 %**	**950.000.000,00**	**482.807.500,00**	**427.472.000,00**	**-630.000.000,00**							**320.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Fasilitasi bagi Penyuluhan Pertanian*				100 %	100 %	950.000.000,00	482.807.500,00	427.472.000,00	-522.528.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		320.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				11 Unit	0 Unit	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				-	708 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	2 Unit	150.000.000,00	400.000.000,00	117.089.500,00	-32.910.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			157.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				65 Orang	65 Orang	50.000.000,00	82.807.500,00	310.382.500,00	260.382.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	J U M L A H								**22.072.854.800,00**	**20.550.391.245,00**	**20.183.488.645,00**	**-1.889.366.155,00**							**23.099.334.660,00**	

3.2 Perubahan Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 3-2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target Renstra	TARGET Renja PD 2025	
			2023	2024	2025	awal	Perubahan
1	Produksi Padi	Ton	53.868,84	57.300,45	67.500	60.000	60.000
2	Produkasi Jagung	Ton	2.755,39	4.290,49	4.000	3.500	3.500
3	Produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat)	Ton	123.104,94	127.906,45	103.500	125.000	125.000
4	Produksi Karet	Ton	32.712,38	33.870,33	31.000	33.000	33.000
5	Populasi sapi/kerbau (ekor)	Ekor	42.612,00	41.684,00	42.250	42.700	42.700
6	Produksi Daging (Ton)	Ton	1.697,15	1.786,00	1.200	1.750	1.750
7	Nilai AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai/ Prediket	B (77,13)	A (80,29)	BB (76,104)	BB (77, 13)	A (80,29)

BAB 4. PENUTUP

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya diharapkan prioritas pembangunan merujuk kepada program dan kebijakan nasional disektor pertanian. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Dharmasraya Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kab.Dharmasraya Tahun 2025 untuk setiap triwulan III dan triwulan IV. Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kab.Dharmasraya Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan Pertanian di Kabupaten Dharmasraya.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya pada Tahun Anggaran 2025.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2025

1

1
1
2
1.3.1. 2
1.3.2. 3
3

1

1
2
4
2.3.1. 4
2.3.2. 4
1
2.4.1. 1
2.4.2. 1

1

1
3.1.1. 1
3.1.2. 1
2

1

1
7

1

Tabel 2-1 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-2
Tabel 2-2 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-2
Tabel 2-3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-2
Tabel 2-4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-3
Tabel 2-5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-3
Tabel 2-6 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan 2-1
Tabel 2-7 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD 2-1
Tabel 4-1 Penetapan Rencana Kerja Badan/Dinas ... Tahun 2025 4-2
Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 4-3

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2023 , Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/2/KPTS-BUP/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
   1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2025.
   2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
   3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2020 s.d 2025.

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
   1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida
   2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini diserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.

e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
   1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan nomor 6 Tahun 2023
8. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan, Pelaksanaan Undang – undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
9. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi
10. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang petunjuk Teknislima program unggulan Kementerian Transmigrasi (Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, Trans Gotong Royong)
11. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Kementrian Transmigrasi
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga Tahun 2024 dan prediksi Tahun 2025
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II **Hasil Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024**
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BAB IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

BAB V **Penutup**

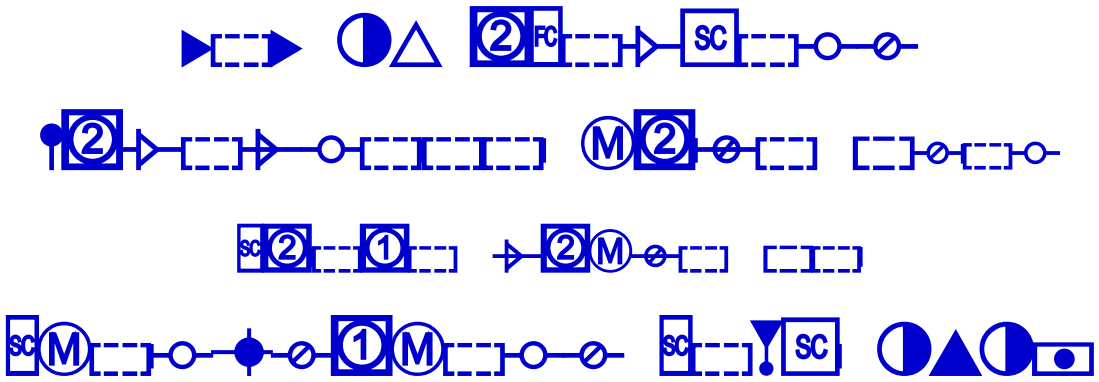

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berikut adalah hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari 5 Program, 8 Kegiatan dan 26 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 semuanya memenuhi target sesuai dengan yang direncanakan. Dari 5 Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 3.902.437.750, realisasi anggarannya sebesar Rp. 3.629.056.040,- persentase sebesar 99,98% dan dilakukan penghematan sehingga anggaran bersisa Rp. 273.381.710. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya terdapat 5 (Lima) program dengan beberapa kegiatan yakni, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari program tersebut di atas dapat dilihat capaian dan realisasi kegiatannya sebagai berikut:

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan

1. Indikator kinerja utama perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tabel 2-1 Indikator Partisipasi angkatan Kerja Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,72	73,04	71,65	73,93	74,45

Sumber : Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa capaian kinerja pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2024 terjadi peningkatan kembali dibandingkan dengan tahun-sebelumnya. Dimana capaian pada tahun 2024 mencapai 74,45 persen, sedangkan tahun 2023 sebesar 73,95 persen.

2. Indikator kinerja utama perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- **Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan.**

Tabel 2-2 Indikator Persentase Lulusan Pelatihan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	persen	25	29	39,45	36,4	49,72

Sumber : Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat kita lihat, bahwa capaian kinerja pada Lulusan Pelatihan yang ditempatkan terdapat peningkatan tahun sebelumnya dengan persentase 49,72.

3. Indikator kinerja utama perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- **Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**

Tabel 2-3 Indikator Persentase Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	persen	80,14	93,86	91,93	39,2	49,72

Sumber : Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2024

Dari pemaparan dalam tabel di atas dapat kita cermati, bahwa Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan dinilai berhasil dan mencapai target. Dimana, untuk pengukuran capaian kinerja tersebut dapat kita cari dengan membandingkan antara jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dengan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan.

4. Indikator kinerja utama perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- **Persentase kasus kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan**

Kasus perselisihan hubungan industrial mencakup segala hal yang diperselisihkan antara pekerja dan pemberi kerja. Seperti perselisihan hak, PHK (Pemutusan hak kerja) dan kepentingan. Sedangkan pada pelanggaran norma kerja lebih bervariasi. dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase kasus-kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan} = \frac{Jumlah\ Kasus\ Yang\ Terselesaikan}{Jumlah\ Kasus\ yang\ ada} x100\%$$

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus Ketenagakerjaan yang ditangani. Dimana jumlah target tahun 2023 sebanyak 15 kasus, sedangkan jumlah kasus yang tertangani sebanyak 20 kasus.

Tabel 2-4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Kasus kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan	**persen**	**142**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2024

5. Indikator kinerja utama perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penilaian AKIP merupakan hasil penilaian laporan kinerja akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya. Untuk menentukan persentase hasil penilaian AKIP dapat diketahui melalui rumus di bawah ini :

$$\text{Penilaian AKIP} = \frac{Hasil\ penilaian}{Target} x100\%$$

Pada tahun 2023 untuk penilaian Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah berhasil mencapai target yang ditentukan. Dimana target yang ditentukan adalah BB dengan realisasi capaian BB (76,29).

Pencapaian kinerja pada indikator Hasil Penilaian AKIP Perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi semakin baik. Untuk melihat perbandingan capaian kinerja hasil penilaian AKIP Perangkat Daerah dengan tahun sebelumnya, dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah						
Hasil Penilaian	Bobot	BB	BB	BB	BB (76,29)	BB (76,29)
Target	Bobot	BB	BB	BB	BB (73,63)	BB (75,75)

Sumber : Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat kita lihat, pada tahun 2020 sampai tahun 2024 capaian kinerja yang diraih Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah predikat BB dengan target BB.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu strategis

Isu-isu penting yang dapat disampaikan antara lain sebagai berikut:

- Bidang Tenaga Kerja

a. Masih Tingginya angka pengangguran
b. Masih rendahnya minat bekerja ke luar negri
c. Upah buruh masih ada yang dibawah standar UMP
d. Masih rendahnya angka lulusan kejuruan yang bekerja
e. Sering terlambatnya masyarakat mendapat informasi tentang peluang bekerja pada perusahaan
f. Belum maksimalmya kerja sama dengan perusahaan

2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Adapun permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaran tugas dan fungsi perangkat daerah tahun 2023 antara lain.

a. Penyaluran Penempatan Tenaga Kerja. Untuk Kegiatan Penempatan ini, masih relative rendah kalau dibandingkan dengan pencari kerja, hal ini disebabkan minimnya lowongan kerja. Sementara kerja sama Dinas dengan perusahaan belum maksimal dalam merekrut pekerja diperusahaan.
b. Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : Khusus hubungan industrial yang timbul diperusahaan dan dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Dharmasraya pada umumnya adalah perselisihan hubungan kerja (PHK) tetapi hanya sebagian kecil dari kasus-kasus tersebut yang disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan terhadap kasus-kasus yang disampaikan, telah difasilitasi untuk penyelesaiannya.
c. Pendidikan Pelatihan Kejuruan Balai Latihan Kerja, Pelaksanaan peandidikan dan pelatihan kejuruan yang dilaksanakan pada Balai Latihan Kerja telah dilaksanakan untuk 18 paket dengan jumlah siswa sebanyak 288 orang, yang pendanaannya berasal dari Dana APBN, melalui UPT Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, UPT BPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI.
d. Melimpahkan kasus Hubungan Industrial yang tidak dapat diselesaikan oleh Dinas untuk dapat difasilitasi melalui Pegawai mediator di Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
e. Melakukan kerjasama / koordinasi dengan Dinas Provinsi Sumatera Barat terkait dengan kegitan pemeriksaan dan pengujian di Perusahaan.
f. Melakukan pembinaan/penyuluhan/sosialisasi kepada pengusaha / manajemen serta tenaga kerja tentang arti penting dari penyusunan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.

2.4.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang Nagari hingga ketingkat Kecamatan ada beberapa usulan masyarakat yang terkait dengan program maupun kegiatan yang akan diusulkan untuk Renja Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2025.

2.5.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD

Untuk tahun Anggaran 2023, DPRD Kabupaten Dharmasraya tidak ada menyampaikan usulan pokok-pokok pikiran anggota DPRD kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tahun 2024 terdapat usulan Pokok pokok Pikiran DPRD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan jumlah Pagu anggaran Sebesar Rp. 51.465,900,-

Tabel 2-7 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Usulan Drs. H. Mawarman	Koto Padang	Koto Padang	Koto Baru	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Keg	Rp. 51.465.900,-	1

Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ini merupakan usulan Pokok Pokok Pikiran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya a.n Drs.H.Mawarman yang diarahkan untuk kegiatan Pelatihan menjahit bagi masyarakat Koto Padang. Kegiatan ini dilaksanakan selama 10 hari diikuti oleh 10 orang.

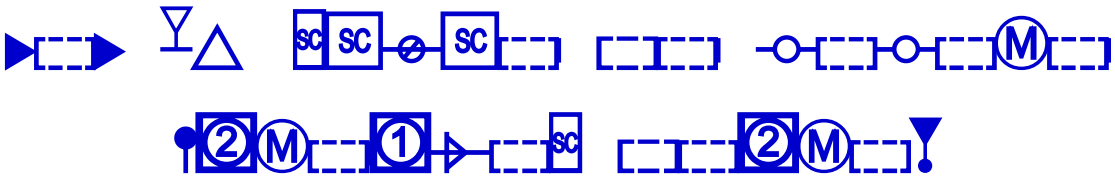

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Pemerintah juga berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antar kelompok sosial.

Pemerintah juga ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian / Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional. Selain itu, menurut Perpres tersebut, RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya, dengan Visi Pemerintah Daerah " **TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA**" yang berhubungan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat pada "**Misi 3: Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**"" dengan tujuan perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing dengan Sasaran Mengurangi Pengangguran.

3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

Pendidikan Pelatihan Kejuruan Balai Latihan Kerja, Pelaksanaan peandidikan dan pelatihan kejuruan yang dilaksanakan pada Balai Latihan Kerja telah dilaksanakan untuk 18 paket dengan jumlah

siswa sebanyak 288 orang, yang pendanaannya berasal dari Dana APBN, melalui UPT Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, UPT BPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI

3.1.2. Penelaahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Melakukan kerjasama / koordinasi dengan Dinas Provinsi Sumatera Barat terkait dengan kegitan pemeriksaan dan pengujian di Perusahaan, dan juga Melimpahkan kasus Hubungan Industrial yang tidak dapat diselesaikan oleh Dinas untuk dapat difasilitasi melalui Pegawai mediator di Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi RPJMD : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
Tujuan RPJMD : Mengurangi Pengangguran
Sasaran RPJMD : Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

Bidang Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi				Proyeksi		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan : Mengurangi Pengangguran								
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,90	5,88	5,68	(Sedang penilaian)	5,29	5,10	4,9
Sasaran : Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja								
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	72,72	73,04	71,65	72	80,25	81,43	82,23
Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	Persen	25	29	39,45	29,51	30,34	32,18	32,2
Sasaran : Terwujudnya Kesempatan Kerja								
Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	persen	80,14	93,86	91,93	51,82	45,12	46,32	47,98
Sasaran : Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Peningkatan Perlindungan Hak-hak dasar pelayanan buruh								
Persentase Kasus-kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan	Laporan	142	100	100	100	100	100	100
Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah								

Hasil penilaian AKIP Perangkat Daerah	bobot	BB	BB	BB	BB (76,29)	BB	BB	A
Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	indeks	-	-	78,49	79,04	81,5	82	82,5

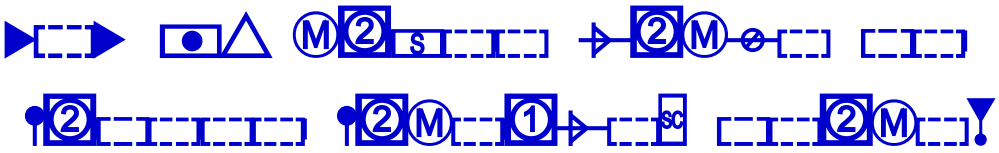

1.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

Berdasarkan realisasi 2020 hingga tahun 2024 serta proyeksi tahun berjalan (tahun) 2024, maka proyeksi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

REALISASI DAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA NAKERTRANS (IKU NAKERTRANS) TAHUN 2024

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi						Target RPJMD		Target Tahunan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja											
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	68,37	70,17	72,72	73,04	71,65	72	80,25	81,43	80,25	81,43
2	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	persen	22,6	24	25	29	39,45	29,51	30,34	32,18	30,34	32,18
	Terwujudnya Kesempatan Kerja											
1	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	92,85	90,20	80,14	93,86	91,93	51,82	45,12	46,32	45,12	46,32
	Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Peningkatan Perlindungan Hak-hak dasar Pekerja/buruh											
1	Persentase kasus kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kulitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan											
1	Hasil Penilaian AKIP perangkat daerah	bobot	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	indeks	-	-	-	-	78,49	79,04	81,5	82	81,5	82

Tabel 4-2 Penetapan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025

MATRIK RENJA

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (%)	KEADAAN CAPAIAN AWAL (%) TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET AKHIR (%) TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Selisih/Lebih/Kurang (13-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	JUMLAH 2025	SESUDAH				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							6.455.554.250,00	5.755.555.560,00	5.811.544.110,00	433.050.140,00							6.354.605.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.455.554.250,00	5.755.555.560,00	5.811.544.110,00	433.050.140,00							6.354.605.000,00	
	3.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							6.455.554.250,00	5.755.555.560,00	5.811.544.110,00	433.050.140,00							6.354.605.000,00	
1	3.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pengangguran yang dicanpakan oleh lembaga Bekerja				65,23 persen	65,23 persen	330.000.000,00	150.000.000,00	274.870.250,00	73.000.000,00							300.000.000,00	
	3.07.03.3.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta/Pencari pelatihan/ UPT Kompetensi yang terdaftar				4 Paket	3 Paket	230.000.000,00	150.000.000,00	274.870.250,00	44.870.250,00			Membangun dan desa dan dan kawasan untuk pemutusan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberdayaan kemiskinan.	1. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas/ 2. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.07.03.3.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pencari Kerja berdasarkan Standar Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Pelatihan/ Berbasis kompetensi pada Tahun n				50 Orang	30 Orang	230.000.000,00	140.000.000,00	274.870.250,00	44.870.250,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Rumbai	DAU DANA DESA/DANA PENGGUNAAN (% BEHAS PENDESAAN	Membangun dan desa dan dan kawasan untuk pemutusan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberdayaan kemiskinan.	1. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas/ 2. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	3.07.06	PROGRAM PEMBINAPAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang dilatih/pelatihan				20,54 persen	30,54 persen	440.000.000,00	170.220.260,00	69.870.500,00	0,00							600.000.000,00	
	3.07.06.3.01	Pelaksanaan latihan Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja (AK) Dilatih/pelatih Hasil/ RAK/ dan dll)				150 Orang	150 Orang	200.000.000,00	90.000.000,00	50.000.750,00	100.870.250,00			Membangun dan desa dan dan kawasan untuk pemutusan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberdayaan kemiskinan.	1. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas/ 2. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas	Tenaga/Hasil Kewirausaha Kerja		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.07.06.3.01.0002	Pelaksanaan latihan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih/pelatih (dalam) Lapatan/ RAK/ dan dll)				150 Orang	150 Orang	240.000.000,00	90.000.000,00	50.000.750,00	100.870.250,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Rumbai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan dan kawasan untuk pemutusan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberdayaan kemiskinan.	1. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas/ 2. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.07.06.3.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Disnaker				1 Kog	100 Orang	200.000.000,00	80.000.000,00	20.000.750,00	170.000.250,00			Membangun dan desa dan dan kawasan untuk pemutusan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberdayaan kemiskinan.	1. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas/ 2. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas	Tenaga/Hasil Kewirausaha Kerja		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

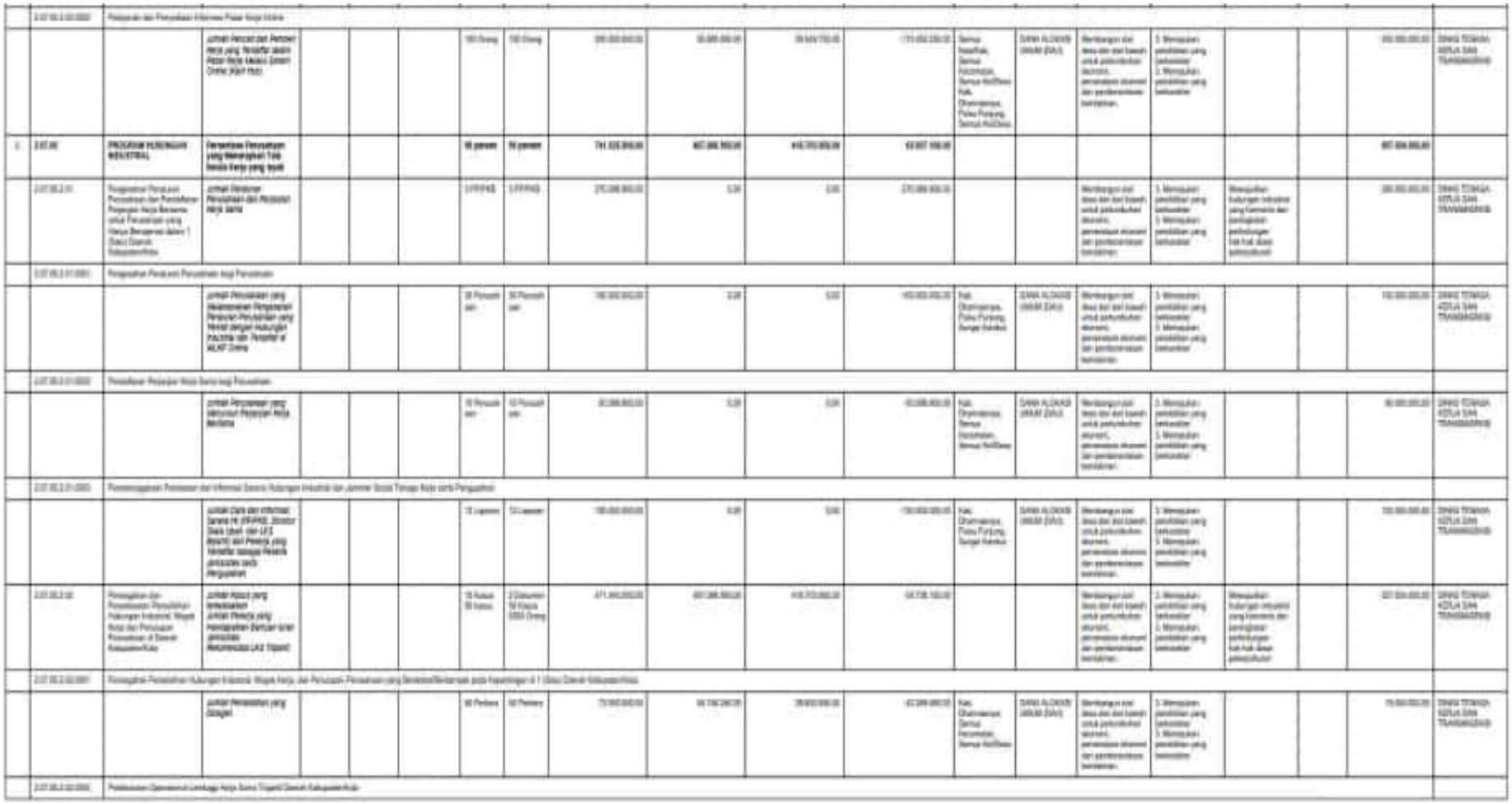

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA (RP)	REALISASI CAPAIAN KINERJA SPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA SPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		Pagu INDIKATIF (Rp)			Realisasi/Berkurang (3-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KUMULATIF	KE-2025/24	RAPIP 2025	APBD 2025	RAPIP PERUBAHAN 2025				KAJ DINAS	DAERAH			
	3.10.01.2.06.0001	Penyediaan Perumahan Korpri Tangga																		
			Jumlah Rumah Perbatasan Rumah Tangga yang Difasilitasi				1 Paket	1 Paket					Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan dari lawasi untuk pemutakhiran ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentukan kemitraan.	1. Memajukan pendidikan yang berkualitas/ 3. Memajukan pendidikan yang berkualitas/				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.10.01.2.06.0002	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Rumah Bahan Logistik Kantor yang Difasilitasi				3 Paket	3 Paket					Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan dari lawasi untuk pemutakhiran ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentukan kemitraan.	1. Memajukan pendidikan yang berkualitas/ 3. Memajukan pendidikan yang berkualitas/				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.10.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Hasil Barang Cetakan dan Penggandaan yang Difasilitasi				6 Paket	6 Paket					Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan dari lawasi untuk pemutakhiran ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentukan kemitraan.	1. Memajukan pendidikan yang berkualitas/ 3. Memajukan pendidikan yang berkualitas/				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.10.01.2.06.0004	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan					Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan dari lawasi untuk pemutakhiran ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentukan kemitraan.	1. Memajukan pendidikan yang berkualitas/ 3. Memajukan pendidikan yang berkualitas/				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah				23 Unit 6 Unit	23 Unit 6 Unit							Membangun dan desa dan dari lawasi untuk pemutakhiran ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentukan kemitraan.	1. Memajukan pendidikan yang berkualitas/ 3. Memajukan pendidikan yang berkualitas/	Aset Orus Tenaga Kerja dan Transmigrasi			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.10.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan				2 Unit	2 Unit					Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan dari lawasi untuk pemutakhiran ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentukan kemitraan.	1. Memajukan pendidikan yang berkualitas/ 3. Memajukan pendidikan yang berkualitas/				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.10.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				4 Unit	4 Unit					Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan dari lawasi untuk pemutakhiran ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentukan kemitraan.	1. Memajukan pendidikan yang berkualitas/ 3. Memajukan pendidikan yang berkualitas/				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

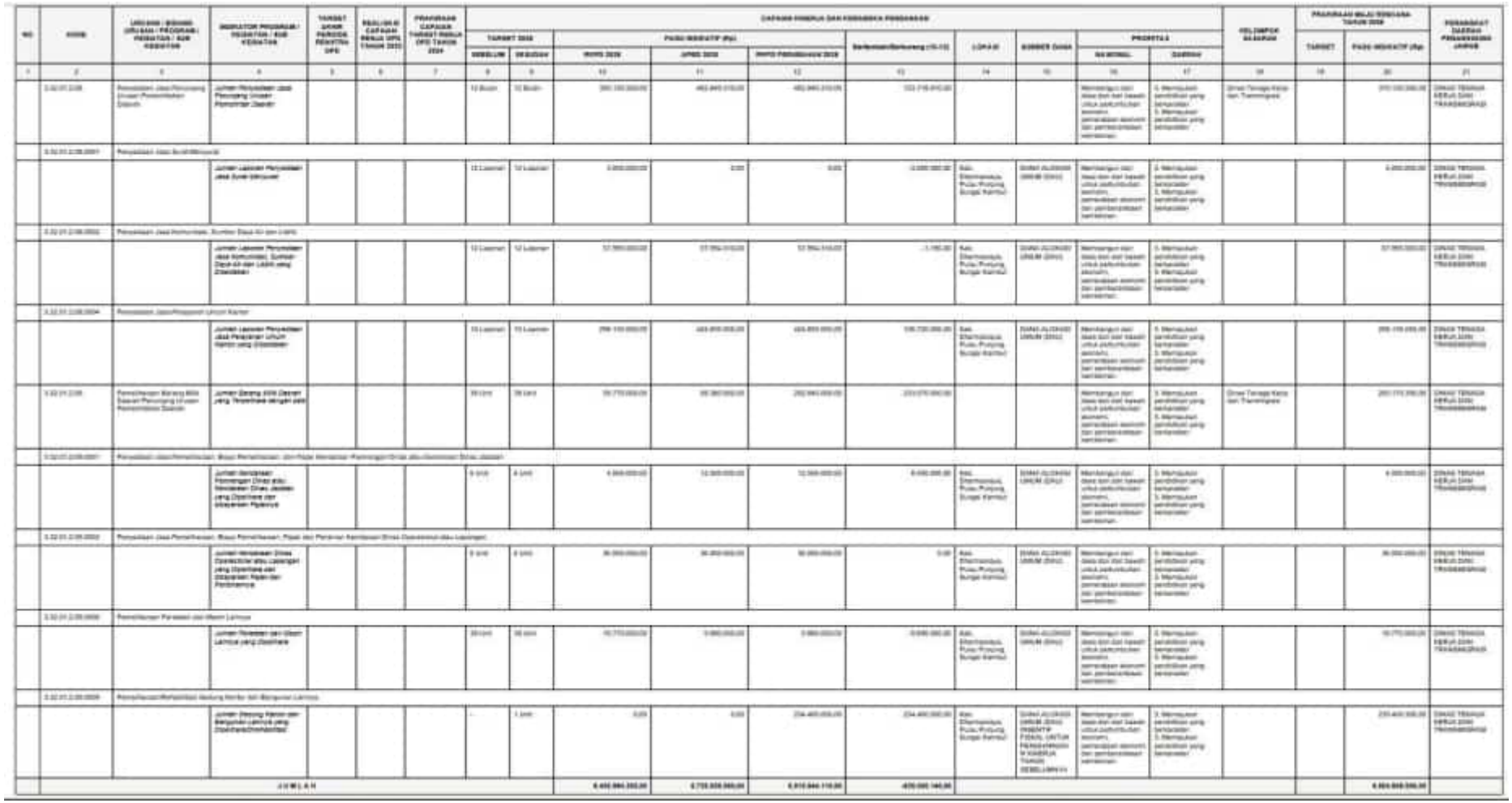

1.2. Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,65	73,93	71	74	71	74
2	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	persen	39,45	29,51	30,34	32,18	30,34	32,18
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	91,93	39,2	45,12	46,32	45,12	46,32
4	Persentase Kasus kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Hasil penilaian AKIP Perangkat Daerah	bobot	BB	BB (76,29)	BB	BB	BB	BB
7	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	indeks	78,49	79,04	81,5	82	81,5	82

BAB 5
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani pada tataran implementasi dalam pelaksanaan Kegiatan dan anggaran. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat terlaksana seoptimal mungkin apabila semua aparatur dan stake holder tekait berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama dan terdapatnya koordinasi yang baik dalam mencapai target pembanguan yang telah ditetapkan.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tahun 2025 menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian kinerja serta digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025 sehingga kinerja Perangkat Daerah dapat terukur sehingga pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkesinambungan.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025

Jalan Lintas Sumatera KM.10 Pulau Punjung,
Provinsi Sumatera Barat 27573
Telp. (0754) 558222, Faksimile (0754) 558222
http://setwan.dharmasrayakab.go.id

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025

Jalan Lintas Sumatera KM.10 Pulau Punjung, Provinsi Sumatera Barat 27573
Telp. (0754) 558222, Faksimile (0754) 558222
http://setwan.dharmasrayakab.go.id

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.3.1. Maksud 4
1.3.2. Tujuan 4
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 5

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16
2.3.1. Isu strategis 16
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 18
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 20
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan 20
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD 20

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 21

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 21
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait 22
3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat 22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 23

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 27

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 27
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 36

BAB 5. PENUTUP 37

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Evaluasi Terhadap Renja Sekretariat DPRD Tahun 202 15
Tabel 2-2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 15
Tabel 2-3 Penelaahan Hasil Musrenbang Kecamatan 20
Tabel 2-4 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD 20
Tabel 4-1 Penetapan Rencana Kerja Sekretaraiat DPRD Tahun 2025 28
Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 36

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun pertama dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD. Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Selanjutnya Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini akan menjadi acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Tahun 2025.

Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

1) Penyusunan rencana;
2) Penetapan rencana;
3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan

4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Sekretariat DPRD mempunyai peranan penting dalam menjaga mekanisme pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah dengan OPD, masyarakat dan stakeholder lain tetap terjaga, sehingga kebijakan dan program pembangunan akan lebih tepat sasaran. Peningkatan efektifitas kebijakan dan hasil-hasil pembangunan berkembang dinamis sangat pesat, sementara itu di sisi lain kebijakan pembangunan disusun untuk kurun waktu yang lama, yaitu kebijakan jangka panjang, dan kebijakan jangka menengah dan kebijakan tahunan. Oleh karena itu, peran Sekretariat DPRD yang baik diharapkan akan mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang sangat pesat, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya akan tepat sasaran.

Kegiatan pelayanan publik, selain sebagai bagian dari kewajiban pemerintah terhadap masyarakatnya, untuk mengukur seberapa jauh penerimaan masyarakat terhadap program-program pelayanan kepada masyarakat luas dan usulan-usulan perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disadari sepenuhnya bahwa peran Sekretariat DPRD akan mampu menciptakan pelayanan prima yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini SKPD dan masyarakat luas.

Renja Perubahan Sekretariat DPRD disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/2/KPTS-BUP/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui :
   a. evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2025;
   b. Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;
   c. Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   d. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2020 s.d 2025.
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   a. Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026;
   b. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;

c. Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida;
d. Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini diserahkan ke Bapperida untuk dilakukan verifikasi.

4. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

   Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.

5. Penetapan Renja Perangkat Daerah

   Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD Tahun 2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

Sekretariat DPRD sebagai bagian dari lembaga Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program pembangunan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, membangun citra Pimpinan Pemerintahan dan menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi, misi, dan agenda pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. ***Maksud***

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Skretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD secara berkesinambungan.

1.3.2. ***Tujuan***

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD hingga Tahun 2024 dan prediksi Tahun 2025;
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah;
d. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran; dan
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Sekretariat DPRD.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Periode Pelaksanaan : Triwulan II

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV						(%)			
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14 = 6 + 12		15=13/5 x100%		16	17
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp .		
		4	**2**				**SEKRETARIAT DPRD**																							
		4	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**																							
		4	**2**	**1**	2:02		**Administrasi Keuangan Perangkat**																							

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022	Unit Penanggung Jawab	Ket
									I		II		III		IV											
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14 = 6 + 12		15=13/5 x100%		16	17
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp .		
		4 2	**SEKRETARIAT DPRD**			**33.237.557.790**		**42.909.197.180**		**36.933.190.400**		**5.686.276.018**	**-**	**12.222.126.534**												
		4 2 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**5.977.853.460**		**###########**		**22.671.907.050**		**1.111.499.643**	**-**	**7.686.915.874**												
		4 2 1 2:02	**Administrasi Keuangan Perangkat**					**2.581.787.580**		**16.272.582.550**		**510.084.438**		**6.637.416.327**												

							Daerah																									
		4	2	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 18 Orang			2 bulan	2.119.756.479	14 bulan	2.581.787.580	1 tahun	16.272.582.550	2 bulan	510.084.438	3 bulan	6.637.416.327										Setwan	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**517.239.000**		**282.619.500**	**0**	**0**	**0**	**6.500.000**											
		4	**2**	**1**	2:06		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya						1 Tahun	517.239.000	6 org / 1 Tahun	282.619.500	0	-		6.500.000										Setwan	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah					**1.980.700.035**		**1.737.664.150**		**1.286.405.250**		**277.622.750**		**550.954.099**											
		4	2	1	2:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				50.183.500	1 paket	51.981.000	1 paket/ 1 Tahun	25.944.500		11.567.500		-										Setwan	
		4	2	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				519.520.260	1 paket	421.425.000	1 paket/ 1 Tahun	350.973.000		30.915.000		263.252.999,00										Setwan	
		4	2	1	2:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga				176.181.000	1 paket	138.990.000	1 paket/ 1Tahun	69.367.000		10.790.000		41.150.000,00										Setwan	
		4	*2*	*1*	*2:06*	*4*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tersedianya bahan logistik kantor*				*508.852.000*	*1 paket*	*398.750.000*	*1 paket/ 1Tahun*	*398.750.000*		*147.000.000*		*68.070.000,00*										*Setwan*	

		4	*2*	*1*	*2:06*	*5*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tersedianya barang cetakan & penggandaan*				*332.440.000*	*1 paket*	*355.095.400*	*1 paket/1Tahun*	*264.597.700*	*2 bulan*	*20.070.000*	*3 bulan*	*125.980.000,00*											*Set wan*	
		4	*2*	*1*	*2:06*	*9*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*				*393.523.275*	*1 laporan*	*371.422.750*	*1 laporan/1Tahun*	*176.773.050*		*57.280.250*		*52.501.100,00*											*Set wan*	
		4	**2**	**1**	**2:07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**940.580.000**		**1.861.175.000**		**1.644.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**												
		4	***2***	***1***	*2:07*	*1*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tersedianya Kendaraan Dinas Pimpinan*				*746.000.000*	*1 unit*	*1.642.000.000*	*2 unit*	*1.642.000.000*	*0*	*-*		*-*											*Set wan*	
		4	*2*	*1*	*2:07*	*6*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tersedianya peralatan gedung kantor*				*194.580.000*	*30 unit*		*30 unit*	*2.750.000*	*0*	*-*		*-*											*Set wan*	
		4	**2**	**1**	2:08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**1.465.561.367**		**1.780.183.000**		**1.780.183.000**		**209.180.955**		**276.867.221**												
		4	*2*	*1*	*2:08*	*1*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Terlaksananya Pembelian Materai*			*2 bulan*	*55.500.000*	*12 laporan*	*35.000.000*	*1 laporan*	*35.000.000*	*2 bulan*	*10.500.000*	*3 bulan*	*14.000.000*											*Set wan*	
		4	*2*	*1*	*2:08*	*2*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tersedianya Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan Listrik*			*2 bulan*	*290.630.067*	*12 laporan*	*445.200.000*	*1 laporan*	*445.200.000*	*2 bulan*	*60.585.055*	*3 bulan*	*50.240.121,00*											*Set wan*	

		4	*2*	*1*	*2:08*	*4*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tersedianya Pembayaran gaji PPPk dan Outsourcing*			*2 bulan*	*1.119.431.300*	*12 laporan*	*1.299.983.000*	*1 laporan*	*1.299.983.000*	*2 bulan*	*138.095.900*	*3 bulan*	*212.627.100,00*											*Setwan*	
		4	**2**	**1**	**2:09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**669.974.058**		**6.209.694.300**		**703.695.750**		**42.093.500**	**-**	**126.255.227**												
		4	*2*	*1*	*2:09*	*1*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tersedianya jasa Premi Asuransi Kendaraan, dan belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat*				*181.888.258*	*3 unit*	*244.500.000*	*3 unit*	*244.500.000*		*31.364.400*		*78.849.627,00*											*Setwan*	
		4	*2*	*1*	*2:09*	*2*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tersedianya Pemeliharaan Kendaran Dinas Operasional*				*70.739.300*	*13 unit*	*82.000.000*	*15 unit*	*82.000.000*		*8.644.100*		*22.405.600,00*											*Setwan*	
		4	*2*	*1*	*2:09*	*6*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*					*169.806.500*	*200 unit*	*212.650.000*	*210 unit / 1 Tahun*	*202.195.750*		*2.085.000*		*-*											*Setwan*	
		4	*2*	*1*	*2:09*	*9*	*Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan*	*Tersedianya jasa Premi Asuransi Gedung dan*				*247.540.000*	*1 unit*	*5.670.544.300*	*1 unit / 1 tah*	*175.000.000*		*-*		*25.000.000*											*Setwan*	

						Bangunan Lainnya	*Belanja Pemeliharaan/ Rehab Gedung*							*un*																				
		4	**2**	**1**	2: 15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**				**691.420.000**		**490.000.000**		**490.000.000**		**20.000.000**		**45.000.000**														
		4	*2*	*1*	*2: 15*	*1*	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*	*Tersedianya Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya*				*691.420.000*	*30 paket*	*400.000.000*	*30 paket*	*400.000.000*	*2 bulan*	*20.000.000*	*3 bulan*	*45.000.000,00*													*Setwan*	
		4	*2*	*1*	*2: 15*		*Pelaksanaan Medical Check Up DPRD*	*Jumlah Orang yang Mengikut Medical Check Up DPRD*					*30 orang*	*90.000.000*	*30 orang /bln / 1 Tahun*	*90.000.000*		*-*		*-*														
		4	**2**	**1**	**2: 16**		**Layanan Administrasi DPRD**					**229.618.000**		**288.485.000**		**211.671.000**		**52.518.000**		**50.423.000**														
		4	*2*	*1*	*2: 16*	*3*	*Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*Tersedianya Makan Minum Kegiatan Rapat-Rapat DPRD*				*229.618.000*	*48 laporan*	*288.485.000*	*60 laporan/ 1 Tahun*	*211.671.000*	*2 bulan*	*52.518.000*	*3 bulan*	*50.423.000,00*													*Setwan*	
		4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**					**27.259.704.330**		**27.442.969.150**		**14.261.283.350**		**4.574.776.375**	**-**	**4.535.210.660**														
		4	**2**	**2**	2: 01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**					**8.233.447.684**		**5.890.067.200**		**3.088.447.100**		**548.067.093**	**-**	**967.013.059**														
		4	*2*	*2*	*2: 01*	*1*	*Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*				*8.035.327.684*	*5 dokumen*	*5.630.387.200*	*5 dokumen/ 1Tahun*	*2.828.767.100*	*2 bulan*	*548.067.093*		*967.013.059,00*													*Setwan*	

		4	*2*	*2*	*2:01*	*4*	*Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik*	*Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik*				*198.120.000*	*5 dokumen*	*259.680.000*	*5 dokumen/1 Tahun*	*259.680.000*		*-*		*-*													*Setwan*	
		4	**2**	**2**	**2:02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**					**3.600.896.281**		**3.585.790.450**		**1.791.573.000**		**0**		**0**																
		4	*2*	*2*	*2:02*	*1*	*Pembahasan KUA dan PPAS*	*pembahasan KUA dan PPAS*				*802.935.965*	*1 dokumen*	*747.659.000*	*1 dokumen*	*373.781.250*																	*Setwan*	
		4	*2*	*2*	*2:02*	*2*	*Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*pembahasan KUA dan PPAS Perubahan*				*799.673.279*	*1 dokumen*	*737.620.450*	*1 dokumen*	*368.069.500*																	*Setwan*	
		4	*2*	*2*	*2:02*	*3*	*Pembahasan APBD*	*Pembahasan APBD*				*660.872.841*	*1 dokumen*	*695.708.500*	*1 dokumen*	*347.661.750*																	*Setwan*	
		4	*2*	*2*	*2:02*	*4*	*Pembahasan APBD Perubahan*	*Pembahasan APBD Perubahan*				*663.258.300*	*1 dokumen*	*697.760.500*	*1 dokumen*	*348.603.250*																	*Setwan*	
		4	*2*	*2*	*2:02*	*6*	*Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*pembahasan pertanggung jawaban APBD*				*674.155.896*	*1 dokumen*	*707.042.000*	*1 dokumen*	*353.457.250*																	*Setwan*	
		4	**2**	**2**	2:04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**					**4.463.259.034**		**3.640.513.600**		**2.239.367.300**		**572.222.860**		**700.158.234**																
		4	***2***	***2***	*2:04*	*1*	*Orientasi DPRD*					*761.322.836*																								
		4	*2*	*2*	*2:04*	*2*	*Pendalaman Tugas DPRD*	*Tersedianya Bimbingan Teknis DPRD*				*2.057.731.598*	*6 dokumen*	*2.258.153.600*	*6 dokumen/6 kali*	*1.548.187.300*	*2 bulan*	*472.922.860*	*3 bulan*	*328.330.734,00*													*Sekretariat DPRD*	
		4	*2*	*2*	*2:04*	*8*	*Publikasi dan Dokumentasi*					*1.644.204.600*	*12 dokume*	*1.382.360.000*	*12 dokum*	*691.180.000*	*2 bul*	*99.300.000*	*3 bula*	*371.827.500*																

													n		*en/ 6 Kali*		*an*		*n*																		
		4	**2**	**2**	2: 05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**					**10.962. 101.331**		**14.326.597.900**		**7.141.895. 950**		**3.454.486.422**		**2.868.039.367**																		
		4	*2*	*2*	*2: 05*	*1*	*Kunjungan Kerja dalam Daerah*	*Kunjungan Kerja dalam Daerah*				*10.757. 724.331*	*12 laporan*	*13.374.856.900*	*60 laporan*	*6.671.012. 450*	*2 bulan*	*3.454.486.422*	*3 bulan*	*2.781.854.367*																*Setwat*	
		4	*2*	*2*	*2: 05*	*3*	*Pelaksanaan Reses*	*Pelaksanaan Reses*				*204.377 .000*	*90 dokumen*	*951.741.000*	*3 dokumen*	*470.883.500*				*86.185.000*																*Setwan*	
TOTAL																**36.933.190.400**		**10.261.052.393**		**12.154.056.534**																
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				
Predikat kinerja																																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	**:**	*(tulis disini ……)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja	**:**	*(tulis disini ……)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	**:**	*(tulis disini ……)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	**:**	*(tulis disini ……)*

Berdasarkan Tabel di atas Sekretariat DPRD terdiri dari 2 (dua) Program yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 8 Jumlah kegiatan dan 20 Sub kegitan.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang terdiri dari 4 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan.

Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 adalah Rp.33.237.557.790,- Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang di evaluasi berjumlah Rp.42.909.197.180.- dan Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2025 yang di evaluasi sebanyak Rp.36.933.190.400,-.

Total pagu Belanja Rp.42.000.000.000,- (Empat Puluh Dua milyar rupiah). Realisasi keuangan sampai dengan Juni 2025 (Triwulan II) ini sebesar Rp.12.222.126.534,- Sesuai dengan daftar terlampir di Excell (monev matrik evaluasi).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan.

1. Indikator kinerja utama perangkat daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah terbaru tidak ada satu daftar tunggal, melainkan dirumuskan secara spesifik untuk setiap instansi dengan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) PD masing-masing yang sejalan dengan RPJMD.

Tabel 2-2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan Administratif :						
1. Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	**Persen**			**90**	**95**	**95**

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2. Persentase tercapainya Fasilitasi hubungan Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD	**Persen**			**95**	**95**	**96**
Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah :						
1. Nilai Akip Perangkat Daerah	**Persen**			**B (64,03)**	**B (67,24)**	**B (7,81)**
2. Nilai IKM anggota DPRD terhadap Pelayanan Setwan				**95**	**90**	**90**

Sumber : Lakip Setwan 2024

Gambar tersebut menampilkan tabel yang berisi indikator kinerja utama perangkat daerah untuk tahun 2020-2024 tabel di atas mencakup indikator terkait fasilitasi tugas dan fungsi DPRD serta peningkatan akuntabilitas perangkat daerah. Indikator yang dinilai meliputi persentase agenda DPRD yang difasilitasi, persentase tercapainyafsilitasi hubungan kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah, Nilai Akip perangkat Daerah dan nilai IKM anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya. Terdapat data persentase dan nilai numerik untuk setiap indikator pada tahun-tahun yang berbeda.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab

Pemerintah Daerah, dampak luasnya yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya bangkit terhadap janji politik yang perlu diwujudkan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

a. **Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi**.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah, lembaga, dan organisasi lainnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.

b. **Penguatan Kapasitas SDM**.

Memperkuat kapasitas SDM Sekretariat DPRD dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Didalam menjalankan perannya, Sekretariat DPRD menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada dangan cara seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan karir, maupun peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan produktivitas kerja dapat meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan, mengatasi tantangan, membangun inovasi, meningkatkan daya saing bagi organisasi.

c. **Optimalisasi Proses Legislasi**.

Mengoptimalkan proses legislasi untuk memastikan pengesahan Raperda dananggaran tepat waktu. Optimalisasi proses legislasi berkaitan erat dengan dengan efektivitas DPRD Kabupaten Dharmasraya dan/atau fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam membuat pembentukan peraturan-peraturan, mulai dari proses pembahasan sampai dengan proses

pengesahan belum optimal. Kepentingan politik, kualitas produk legislasi serta kemampuan SDM berpengaruh kepada optimalnya proses legislasi.

d. Optimalisasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan.

Selain menyusun Peraturan Daerah terdapat dua fungsi lain yang hasur dijalankan oleh DPRD Kabupaten Dharmasraya, yaitu fungsi penganggaran dan pengawasan. Fungsi penggangaran terkait dengan penyusunan dan pengesahan APBD dan APBDP Kab. Dharmasraya termasuk, sedangkan fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terdistribusi kepada perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Optimalisasi dukungan terhadap kedua fungsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPRD Kab. Dharmasraya.

e. Peningkatan Harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif.

Meningkatkan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Hal ini sangat penting yaitu untuk memastikan agar pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. Harmonisasi yang baik akan Meningkatkan kolaborasi yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran.

2.3.2. Permasalahan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Identifikasi Permasalahan

a. Kualitas Layanan yang Tidak Konsisten: Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD menunjukkan fluktuasi, yang mengindikasikan adanya masalah dalam konsistensi layanan.

b. Tidak tercapainya target Pengesahan Raperda menjadi Perda: Prosentase Raperda yang disahkan tepat waktu masih di bawah target, menunjukkan adanya kendala dalam proses legislasi.

c. Agenda DPRD yang dinamis: Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan tugas Anggota DPRD menjadi terkendala

dikarenakan sering terjadi perubahan jadwal pembahasan dari agenda yang telah ditetapkan.

d. Keterlambatan dalam Pembahasan LKPJ: Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu menunjukkan adanya masalah dalam koordinasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah.

e. Nilai AKIP yang tidak mencapai target: Nilai AKIP Perangkat Daerah menunjukkan angka yang tidak memuaskan, mencerminkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan.

2) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan.

Tantangan Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

a. Meningkatnya harapan masyarakat:

Masyarakat mengharapkan layanan yang lebih baik dan transparan, yang menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD untuk memenuhi ekspektasi tersebut.

b. Sumber Daya Manusia yang terbatas:
Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM di Sekretariat DPRD dapat menghambat efektivitas pelayanan.

c. Kompleksitas proses legislasi:
Proses legislasi yang kompleks dan memerlukan banyak tahapan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengesahan Raperda.

d. Perubahan kebijakan yang cepat:
Perubahan kebijakan yang cepat di tingkat nasional dan regional dapat menyulitkan Perangkat Daerah dalam menyesuaikan diri.

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya, yaitu:

a. Pemanfaatan teknologi informasi:
Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan.

b. Kerjasama dengan Stakeholder:
Membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder dapat meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas.

c. Program pelatihan untuk SDM:
Mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM di Sekretariat DPRD.

d. Inisiatif partisipasi masyarakat:
Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

e. Pengembangan sistem pelaporan yang efektif:

Mengembangkan sistem pelaporan yang lebih efektif untuk memantau kinerja dan hasil program.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini disajikan pada perangkat daerah yang menerima usulan Musrenbang dan/atau Pokok-pokok pikiran Anggota DPRD

2.4.1. Penelaahan Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Tabel 2-3 Penelaahan Hasil Musrenbang Kecamatan

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Usulan …							
2	Usulan …	N I H I L						
3	Usulan …							
4	Usulan …							
5	Usulan …							

Narasi …

2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD

Tabel 2-4 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Usulan …							
2	Usulan …	N I H I L						
3	Usulan …							
4	Usulan …							
5	Usulan …							

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Penelaahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD provinsi yang telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah (PD) provinsi merupakan proses sinkronisasi dan penyempurnaan. Penelaahan ini memastikan Renja selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD, serta mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Berikut adalah poin-poin utama dalam penelaahan tersebut:

1. Proses Penelaahan

1. **Pembahasan dalam Forum PD**: Rancangan awal Renja dibahas dalam Forum Perangkat Daerah, yang dihadiri oleh seluruh OPD terkait, termasuk Sekretariat DPRD, Bappeda, dan perwakilan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan kebijakan prioritas provinsi dan nasional.

2. **Sistem Informasi Terpadu**: Proses penelaahan sering kali memanfaatkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran seperti KRISNA, yang memungkinkan pembahasan secara daring dan terintegrasi antar-K/L (Kementerian/Lembaga) dan pemerintah daerah.

3. **Sinkronisasi program**: Penelaahan memastikan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan oleh Sekretariat DPRD tidak tumpang tindih dengan program OPD lain, serta mendukung pencapaian target RKPD provinsi.

2. Fokus Penelaahan Renja Sekretariat DPRD

Penelaahan Renja Sekretariat DPRD biasanya berfokus pada beberapa aspek berikut:

- **Kesesuaian dengan visi dan misi**: Apakah program dan kegiatan yang diusulkan mendukung pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah yang tertuang dalam Renstra.
- **Peningkatan pelayanan kepada DPRD**: Mengevaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota dewan dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan hak mereka. Indikator yang digunakan dapat berupa nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Sekretariat DPRD.

- **Target kinerja dan anggaran**: Menilai kewajaran dan ketepatan target indikator kinerja serta kesesuaian anggaran yang diusulkan dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan.
- **Kesesuaian dengan prioritas pembangunan**: Memastikan bahwa rencana kerja Sekretariat DPRD sejalan dengan Prioritas Pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- **Peningkatan akuntabilitas**: Menelaah kerangka logis antara sasaran kegiatan, indikator, dan output yang diharapkan.

3. Hasil penelaahan

1. **Penyempurnaan rancangan Renja**: Setelah melalui penelaahan, Rancangan Renja Sekretariat DPRD disempurnakan berdasarkan masukan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum PD. Berita acara kesepakatan dapat ditandatangani oleh perwakilan pemangku kepentingan untuk meresmikan hasil penelaahan.
2. **Acuan penyusunan RKA**: Rancangan Renja yang telah disempurnakan ini kemudian menjadi acuan bagi OPD untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. **Pengesahan menjadi Renja definitif**: Renja yang sudah final akan ditetapkan menjadi dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD yang definitif, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Secara ringkas, penelaahan Renja Sekretariat DPRD provinsi adalah tahap krusial untuk memastikan bahwa rencana kerja tahunan telah selaras dengan prioritas pembangunan daerah, didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, serta terintegrasi dengan rencana kerja perangkat daerah lainnya.

3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

Melakukan penelaahan terkait kebijakan K/L jika ada terkait dengan kebijakan/ kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya;

3.1.2. Penelaahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Melakukan penelaahan terkait kebijakan Sekretariat DPRD terkait Provinsi Sumatera Barat yang telah dibahas dan disepakati pada forum perangkat daerah provinsi yang telah dilaksanakan. Sub bab ini dapat berupa kesepakatan target maupun informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan/ berlokasi di Kabupaten Dharmasraya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi , memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan di terjemahkan kedalam sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya secara optimal, Sekretariat DPRD menetapkan tujuan strategis utama, yaitu mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif dan efisien. Tujuan ini menjadi landasan bagi seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam rencana strategis tahun 2025-2029. Sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat DPRD menggunakan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan sebagai ukuran utama. Indikator ini mencerminkan sejauh mana Sekretariat mampu memberikan layanan yang responsif, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislatif, penganggaran dan pengawasan.

Sehubungan dengan hal terebut, visi, misi dan prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029, yaitu :

- **Visi** : “**DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA”**

SEJAHTERA *:*

Menggambarkan kondisi masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang mengalami kondisi kesejahteraanekonomi dan sosial yang lebih baik serta mampu bersaing secara reginal dan nasional.

MERATA :

Kabupaten Dharmasraya diharapan adanya pemerataan pembangunan yang merata yang diukur dari indikator kinerja pembangunan kewilayahan berdasarkan kecamatan ataupun tingkat nagari Berbudaya.

- **Misi :**

adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan guna menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : **Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi yang mesti disediakan oleh pemerintah untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan adanya peningkatan infratsrtur yang memadai diharapkan dapat mengurangi Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata berbagai hambatan pembangunan dan aktivitas ekonomi di masyarakat. Salah satunya berupa infrastruktur terkait konektivitas. Dengan adanya konektivitas yang memadai maka dapat mengurangi biaya ekonomi dalam sektor transportasi sekaligus menjadi pemicu percepatan pembnagunan wilayah. Selanjutnya infrastruktur dasar yang terdiri dari air minum sanitasi serta kebutuhan rumah tinggal yang layak serta didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang layak.

Misi 2 : Pemerintahan Yang Transparan, Profesional, Efektif Dan Efisien.

Adapun tujuan dari penyelenggaran pemerintah/pemerintah daerah adalah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya keterbatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah maka aspek efisiensi dan efektifitas merupakan unsur pokok yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan, baikyang bersifat makro, maupun target yang sesuai dengan prioritas daerah.

Misi 3 : Mengembangkan Sistem, Kebijakan dan Implementasi Pelestarian Lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global yang disepakati dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun tujuan dari misi ini adalah menciptakan pembangunan berkelanjutan serta terbangunnya komitmen stakeholders untuk menjaga lingkungan lestari.

Misi 4 : **Membangun SDM untuk Menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata**.

Pembangunan di bidang sumber daya manusia diarahkan dalam peningkatan daya saing sumber daya manusia terutama pada dimensi pengetahuan, umur panjang dan hidup sehat yang menjadi pembentuk penilaian indikator indek pembangunan manusia. Dimana IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan terutama bidang kesehatan, pendidikan dan bidang terkait lainnya.

Misi 5 : Transformasi ekonomi guna meningkatkan pembangunan ekonomi.

Dimana pembangunan ekonomi suatu wilayah diukur dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, adapun indikator yang dapat dugunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi ini adalah perkembangan PDRB, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Misi 6 : Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi.

Dharmasraya memandang pentingnya kehidupan sosial dipelihara, dibina, dan dikembangkan menjadi kekuatan milik masyarakat. Untuk itu arah kebijakan adalah penyiapan satuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan gotoroyong. Sementara itu, adat merupakan modal kulturan yang melekat, sehingga dapat dikembangkan lagi penerapannya untuk kehidupan di nagari nagari. Arah kebijakan adalah memperkuat krlembagaan adat, sinergitas dan kontrol lembaga adat terhadap penghidupan masyarakat.

Sekretariat DPRD secara tidak langsung berkontribusi pada Visi dan misi Bupati terpilih, yang mana visi tersebut adalah : "**DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA"** sedangkan untuk misi terdapat pada Misi bupati yang ke **2 (dua)** yaitu: : **TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, PROFESIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN.**

- Tujuan : **MENINGKATKAN KUALITAS REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF.**
- Sasaran : **BIROKRASI YANG BERSIH, EFISIEN DAN AKUNTABEL**.

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

Berdasarkan realisasi 2020 hingg atahun 2024 serta proyeksi tahun berjalan (tahun) 2025, maka proyeksi tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4-1 Penetapan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. DHARMASRAYA TAHUN 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**42.000.000.000,00**	**56.599.992.150,00**	**36.933.190.400,00**	**-5.066.809.600,00**				**45.380.350.000,00**
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**42.000.000.000,00**	**56.599.992.150,00**	**36.933.190.400,00**	**-5.066.809.600,00**				**45.380.350.000,00**
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah**			**24.218.450.000,00**	**29.157.023.000,00**	**22.671.907.050,00**	**1.801.350.000,00**				**26.019.800.000,00**
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	2.200.000.000,00	2.581.787.580,00	2.581.787.580,00	381.787.580,00				2.500.000.000,00
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ b ulan	24 Orang/ b ulan	2.200.000.000,00	2.581.787.580,00	2.581.787.580,00	381.787.580,00	Dharmasraya	PAD, DAU DBH		2.500.000.000,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	300.000.000,00	517.239.000,00	282.619.500,00	-17.380.500,00				320.000.000,00
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	300.000.000,00	517.239.000,00	282.619.500,00	-17.380.500,00	Dharmasraya	PAD		320.000.000,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	2.013.450.000,00	1.737.664.150,00	1.286.405.250,00	-727.044.750,00		PAD		2.240.000.000,00
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	50.450.000,00	51.981.000,00	25.944.500,00	-24.505.500,00	Dharmasraya	PAD		60.000.000,00
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	650.000.000,00	421.425.000,00	350.973.000,00	-299.027.000,00	Dharmasraya	PAD		680.000.000,00
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	203.000.000,00	138.990.000,00	69.367.000,00	-133.633.000,00	Dharmasraya	PAD		250.000.000,00
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	450.000.000,00	398.750.000,00	398.750.000,00	-51.250.000,00	Dharmasraya	PAD		500.000.000,00
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	310.000.000,00	355.095.400,00	264.597.700,00	-45.402.300,00	Dharmasraya	PAD		350.000.000,00
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	371.422.750,00	176.773.050,00	-173.226.950,00	Dharmasraya	PAD		400.000.000,00
4.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1.445.000.000,00	1.861.175.000,00	1.644.750.000,00	199.750.000,00				1.799.800.000,00
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	1.642.000.000,00	1.642.000.000,00	642.000.000,00	Dharmasraya	PAD		1.200.000.000,00
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	130 Unit	130 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Dharmasray	PAD		200.000.000,00
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	246.000.000,00	219.175.000,00	2.750.000,00	-243.250.000,00	Kab. Dharmasraya	PAD		350.000.000,00
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	49.000.000,00	0,00	0,00	-49.000.000,00	Dharmasraya	PAD		49.800.000,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	2.339.000.000,00	1.780.183.000,00	1.780.183.000,00	-558.817.000,00				2.500.000.000,00
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Dharmasraya	DAU		40.000.000,00
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	445.200.000,00	445.200.000,00	-4.800.000,00	Dharmasraya	DAU		460.000.000,00
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.854.000.000,00	1.299.983.000,00	1.299.983.000,00	-554.017.000,00	Dharmasraya	DAU		2.000.000.000,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1.861.000.000,00	6.209.694.300,00	703.695.750,00	-1.157.304.250,00				2.380.000.000,00
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	305.000.000,00	244.500.000,00	244.500.000,00	-60.500.000,00	Dharmasraya	DAU		310.000.000,00
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	206.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	-124.000.000,00	Dharmasraya	DAU		210.000.000,00
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 Unit	210 Unit	350.000.000,00	212.650.000,00	202.195.750,00	-147.804.250,00	Dharmasraya	DAU		360.000.000,00
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	5.670.544.300,00	175.000.000,00	-825.000.000,00	Dharmasraya	DAU		1.500.000.000,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1 Tahun	1 Tahun	13.510.000.000,00	14.180.794.970,00	14.180.794.970,00	670.794.970,00				13.700.000.000,00
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD											
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan	12.500.000.000,00	13.690.794.970,00	13.690.794.970,00	1.190.794.970,00	Dharmasraya	DAU		12.600.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD											
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	510.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-110.000.000,00	Dharmasraya	DAU		550.000.000,00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD											
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	30 Orang	500.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-410.000.000,00	Dharmasraya	DAU		550.000.000,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	1 Tahun	1 Tahun	550.000.000,00	288.485.000,00	211.671.000,00	-338.329.000,00				580.000.000,00
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD											
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	60 Laporan	60 Laporan	550.000.000,00	288.485.000,00	211.671.000,00	-338.329.000,00	Dharmasraya	DAU		580.000.000,00
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**17.781.550.000,00**	**27.442.969.150,00**	**14.261.283.350,00**	**1.579.000.000,00**				**19.360.550.000,00**
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1 Tahun	1 Tahun	4.600.000.000,00	5.890.067.200,00	3.088.447.100,00	-1.511.552.900,00				5.150.000.000,00
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	3.200.000.000,00	5.630.387.200,00	2.828.767.100,00	-371.232.900,00	Dharmasraya	DAU		3.500.000.000,00
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah											
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Dharmasraya	DAU		1.200.000.000,00
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik											
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	5 Dokumen	400.000.000,00	259.680.000,00	259.680.000,00	-140.320.000,00	Dharmasraya	DAU		450.000.000,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	3.951.000.000,00	3.585.790.450,00	1.791.573.000,00	-2.159.427.000,00				4.200.000.000,00
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS											
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	747.659.000,00	373.781.250,00	-426.218.750,00	Dharmasraya	DAU		850.000.000,00
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	737.620.450,00	368.069.500,00	-431.930.500,00	Dharmasraya	DAU		850.000.000,00
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD											
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	695.708.500,00	347.661.750,00	-452.338.250,00	Dharmasraya	DAU		850.000.000,00
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan											
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	697.760.500,00	348.603.250,00	-451.396.750,00	Dharmasraya	DAU		850.000.000,00
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD											
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	751.000.000,00	707.042.000,00	353.457.250,00	-397.542.750,00	Dharmasraya	DAU		800.000.000,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Tahun	1 Tahun	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00				850.000.000,00
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah											
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Dharmasraya	DAU		850.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	6 Kali	6 Kali	3.000.000.000,00	3.640.513.600,00	2.239.367.300,00	-760.632.700,00				3.700.000.000,00
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD											
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000.000,00	2.258.153.600,00	1.548.187.300,00	-451.812.700,00	Dharmasraya	AU		2.200.000.000,00
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD											
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000.000,00	1.382.360.000,00	691.180.000,00	-308.820.000,00	Dharmasraya	DAU		1.500.000.000,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	5.430.550.000,00	14.326.597.900,00	7.141.895.950,00	1.711.345.950,00				5.460.550.000,00
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah											
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	60 Laporan	60 Laporan	4.680.550.000,00	13.374.856.900,00	6.671.012.450,00	1.990.462.450,00	Dharmasraya	DAU		4.700.550.000,00
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses											
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	750.000.000,00	951.741.000,00	470.883.500,00	-279.116.500,00	Dharmasraya	DAU		760.000.000,00
J U M L A H					**42.000.000.000,00**	**56.599.992.150,00**	**36.933.190.400,00**	**-162.182.386.948,93**				**45.380.350.000,00**

4.2. Target Kinerja Tahun 2025

Target kinerja tahun 2025 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi				Target Renja PD	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Terpenuhi fasilitasi dalam pelaksanaan Pembentukan Ranperda, Proses Penetapan APBD, dan Pengawasa PenyelenggaraanPemerintah Daerah	1. Nilai IKM anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	95	90	90	83,17	80	80
		2. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persen				100	100	100
		3. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen				100	80	100
		4. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen				100	100	100

B.5 PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani pada tataran implementasi dalam pelaksanaan Kegiatan dan anggaran. Keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretaiat DPRD Tahun 2025 dapat terlaksana seoptimal mungkin apabila semua aparatur dan stake holder tekait berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama dan terdapatnya koordinasi yang baik dalam mencapai target pembanguan yang telah ditetapkan.

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian kinerja serta digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 sehingga kinerja Perangkat Daerah dapat terukur sehingga pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkesinambungan.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI

PEMERINTAH
KABUPATEN
DHARMASRAYA

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

bapperida.dharmasrayakab.go.id

Bapperida Dharmasraya

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bapperida Tahun 2025sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bapperida merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang akan datang. Rencana Kerja ini memuat rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan RENJA sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan merupakan acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bapperida Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pada perubahan tahun 2025, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan Bapperida untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Pulau Punjung, 21 Agustus 2025
Plt. KEPALA BAPPPEDA

FRINALDI ST., M.Sc
Pembina Utama/ IV.a
NIP. 19751205 200501 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu 4

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 14
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 14
3.2 Target Indikator Kinerja Tahun 2025 27

BAB V PENUTUP 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada dasarnya merupakan proses untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Perubahan Renja SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah.

Sedangkan dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Bapperida mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun berjalan. Kemudian tahapan penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan. Perubahan Renja Bapperida Tahun 2025 memuat program/kegiatan tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan perubahan tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 telah melalui proses penyusunan dan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah khususnya tim penyusun Perubahan Renja Bapperida 2025. Hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada tahun rencana 2025 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Penyusunan Perubahan Renja Bapperida Tahun 2025 selain berpedoman kepada Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 juga memperhatikan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Bapperida Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifekasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dab Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembnagaunan, Riset dan Inovasi Daerah;
14. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Bapperida Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tujuan adalah untuk memberikan pedoman arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida.

Tujuan dari penyusunan Renja ini adalah untuk :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida hingga Triwulan II Tahun 2025
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Bapperida
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Bapperida Tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka pokok bahasan serta susunan garis besar penulisan Renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPERIDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bapperida Kab. Dharmasraya sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan pagu dana pada Renja Tahun 2025 sebesar Rp 5,183,811,350,- guna mendukung 4 program, 12 kegiatan dan 25 subkegiatan selanjutnya menjadi sebesar Rp 4,528,926,550,- pada tahap Pergeseran IV APBD Tahun 2025, dialokasikan untuk pelaksanaan 3 Program, 10 Kegiatan dan 23 subkegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1,829,560,738,- atau realisasi fisik sebesar 40,39% jika dibandingkan dengan pagu APBD dan 35,29% jika dibandingkan dengan pagu Renja Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2025, sebagaimana tabel 2.2.1.berikut:

Tabel 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPERIDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
											I		II							
	4		5		6		7		7		8		9		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%	
			Rp		K	Rp	K	RP RKPD	K	RP APBD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp
Urusan pemerintahan																				
PERENCANAAN				**24,632,379,057**		**15,340,608,878**		**4,753,811,350**		**4,528,926,550**		**864,098,219**		**965,462,519**		**1,829,560,738**		**18,823,567,275**		**2.67**
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	**Nilai AKIP Bapppeda**		**A**		**A (86.96)**		**A**		**A (81.48)**											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**%**		**19,434,571,513**	**100.00**	**12,308,495,391**	**100**	**3,451,855,468**	**100%**	**3,794,045,550**	**21**	**795,766,952**	**23.50**	**891,651,598**	**44.48**	**1,687,418,550**	**44.48**	**13,995,913,941**	**#DIV/0!**	**0.72**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen yang dihasilkan**	**Dok**		**20,000,000**				**-**										**-**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja dan Renstra PD	Dok	7	20,000,000														-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase tertib adminitrasi keuangan**	**Bulan**	**600**	**15,665,809,150**	**100.00**	**8,457,891,640**	**100**	**2,156,842,468**	**100**	**3,198,961,000**	**25**	**644,080,205**	**25**	**724,572,302**	**50**	**1,368,652,507**	**150**	**9,826,544,147**	**25.00**	**0.63**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	138	*15,665,809,150*	84 orang	*8,457,891,640*	22 orang	2,156,842,468	23 orang	3,198,961,000	23 orang	644,080,205	22 orang	724,572,302	22 orang	1,368,652,507	22 Orang	9,826,544,147	**26.19**	0.63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**600**	**642,165,781**	**100.00**	**1,520,115,029**	**100**	**244,513,000**	**100%**	**124,350,900**	**25**	**57,323,050**	**25**	**46,555,502**	**50**	**103,878,552**	**50**	**1,623,993,581**	**8.33**	**2.53**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (lampu, kabel)	Paket	36	8,044,497	12 paket	32,458,000	6 Paket	9,900,000	6 paket	6,846,000	3 paket	3,436,000	3 paket	2,200,000	3 paket	5,636,000	15 paket	38,094,000	41.67	4.74
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	15	100,163,334	6 paket	243,583,913	3 Paket	22,000,000	3 paket	19,716,000	3 paket	10,855,600	3 paket	6,926,000	3 paket	17,781,600	9 paket	261,365,513	73.33	2.61
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	18	34,095,624	3 paket	122,272,250	3 paket	30,613,000	3 paket	33,093,000	3 paket	17,655,000	3 paket	13,475,000	3 paket	31,130,000	3 paket	153,402,250	66.67	4.50
	- tabung gas	Tabung	240				4 tabung		4 tabung		1 tabung		2 tabung		3 tabung					

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
											I		II							
	- air galon	Galon	2,400				400 galon		400 galon		70 galon		150 galon		220 galon					
	- peralatan perabot kegiatan kantor lainnya	Jenis	42				7 jenis		7 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	43,483,770	12 Paket	124,283,000	5 Paket	25,000,000	5 paket	7,500,000	5 Paket	4,770,000	5 paket	2,730,000	5 Paket	7,500,000	17 Paket	131,783,000	56.67	3.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Paket	30	49,120,555	12 Paket	115,090,400	5 Paket	22,000,000	5 paket	6,252,800	5 paket	4,756,500	5 paket	741,000	5 paket	5,497,500	17 Paket	120,587,900	56.67	2.45
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket pengadaan buku bacaan peraturan perencanaan pembangunan	Paket	2	4,630,500			1 paket											-		0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2,100	402,627,500	272.00	882,427,466	150 laporan	135,000,000	150 laporan	50,943,100	3 laporan	15,849,950	3 laporan	20,483,502	6 laporan	36,333,452	278	918,760,918	13.24	2.28
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**%**	**600**	**1,228,943,550**	**400.00**	**431,455,000**	**100%**	**315,000,000**	**100%**	**25,300,000**		**-**		**-**		**-**	**400**	**431,455,000**	**66.67**	**0.35**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	744,750,000	1.00	279,200,000										-	1	279,200,000	20.00	0.37
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional roda 2	Unit		33,000,000																
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	65,000,000.00			1 unit	65,000,000												
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan dan mesin	Unit	28	386,193,550.00	10 unit	152,255,000	18 unit	250,000,000	2 unit	25,300,000						-				
	laptop		10		2 unit		7													
	AC		5		3 unit		5									-				
	printer		7		1 unit		5		1 unit											
	scanner		1				-													
	TV untuk rapat		2		1 unit		1		1 unit											
	Kulkas mini portabel		1																	
	Tablet		1																	
	Dispenser		1																	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**600**	**915,938,032**	**400.00**	**1,739,336,366**	**100**	**565,500,000**	**4 jenis**	**369,380,650**	**25**	**82,514,754**	**25.00**	**86,391,685**	**50.00**	**168,906,439**	**450**	**1,908,242,805**	**75.00**	**2.08**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	*36*	*7,320,500*	*48 laporan*	*22,000,000*	*12 laporan*	*7,500,000*	4 laporan	*5,000,000*	1 laporan	*2,000,000*	*1 laporan*	2,000,000	*2 laporan*	4,000,000	*2 laporan*	26,000,000	*5.56*	*3.55*

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
											I		II							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	177,156,100	48 laporan	356,390,396	12 laporan	120,000,000	12 Laporan	102,999,050	3 laporan	24,794,354	3 laporan	22,511,885	*6 laporan*	47,306,239	54 laporan	403,696,635	75.00	2.28
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	21,838,516	12 laporan	72,250,000	12 laporan	13,000,000	12 laporan							-	12 laporan	72,250,000	50.00	3.31
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	709,622,916	48 laporan	1,288,695,970	12 laporan	425,000,000	12 laporan	261,381,600	3 laporan	55,720,400	6 laporan	61,879,800	*6 laporan*	117,600,200	54 laporan	1,406,296,170	75.00	1.98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	**%**	**600**	**961,715,000**	**400.00**	**159,697,356**	**100%**	**170,000,000**	**100%**	**76,053,000**	**25**	**11,848,943**	**25**	**34,132,109**	**50**	**45,981,052**	**450**	**325,470,664**	**75.00**	**0.34**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	29,472,333	1 mobil jabatan	71,295,480	1 unit	18,500,000	1 unit	21,000,000	1 mobil jabatan	5,589,643	1 mobil jabatan	1,500,000	1 mobil jabatan	7,089,643	1 mobil jabatan	78,385,123	66.67	2.66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	59	76,016,072	44 unit	88,401,876	10 unit	22,000,000	12 unit	23,000,000	2 motor , 1 mobil	1,799,300	1 mobil, 1 motor	6,250,655	2 motor , 1 mobil	8,049,955	2 motor , 1 mobil	96,451,831	79.66	1.27
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	185	175,000,000	108 unit		10 unit	15,500,000	27 unit	16,840,000	7 unit	4,460,000	22 unit	12,380,000	29 unit	16,840,000	29 unit	16,840,000	15.68	0.10
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	440,750,000	1 unit	119,792,256	8 unit	114,000,000		15,213,000		-	1 unit	14,001,454	1 unit	14,001,454	2 unit	133,793,710	33.33	0.30
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	**Capaian sasaran RPJMD**	%	**95**		100.64		**95**		95											
	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	%	**95**		104.01		**95**		95								104			
	Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan	%	**95**		91.80		**95**		95								92			
	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Indeks	**26**		22.75		**25**		25								23			
	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Indeks	**23**		19.54		**22**		22								20			
	Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	Indeks	**17**		-		**16**		16											

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
											I		II							
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase kesesuai perencanaan dan penganggaran**	**%**	**100.00**	**2,191,562,077**	**100.00**	**2,580,006,180**	**95**	**925,600,000**	**95**	**609,377,850**		**39,356,600**		**42,047,600**		**81,404,200**	**100.00**	**2,765,833,728**	**83.05**	**1.26**
	Persntase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	**%**	**100.00**		**100.00**		**95**		**95**								**100.00**		**71.50**	
	Persentase pencapaian hasil RPJMD	**%**	**100.00**		**100.64**		**95**		**95**								**100.64**		**75.27**	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD sesuai tatacara dan tahapan yang berlaku**	**Dok**	**16**	**1,680,052,077**	**11.00**	**2,546,404,080**	**5 dok**	**850,000,000**	**5 dok**	**607,127,850**	**1 dok**	**39,356,600**	**2 dok**	**42,047,600**	**2 dok**	**81,404,200**	**13**	**2,627,808,280**	**81.25**	**1.56**
Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah berita acara konsultasi publik	Berita Acara	3	**67,691,250**								**-**								
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	jumlah berita acara pelaksanaan konsultasi publik	Berita Acara	2	**40,000,000**				-				**-**								
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	9	185,060,827	6.00	375,397,438	2 berita acara	150,000,000	2 berita acara	92,200,000	2 berita acara	9,390,000	2.00	6,840,000	2.00	16,230,000	8	391,627,438	88.89	2.12
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dok	16	1,387,300,000	11.00	2,171,006,642	4 Dokumen	700,000,000	3 Dokumen	514,927,850	1 dok	29,966,600	2 dok	35,207,600	2.00	65,174,200	13	2,236,180,842	81.25	1.61
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase tersedianya data, analisis data perencanaan pembangunan yang berkualitas**	**%**	**100**	**320,850,000**	**95.00**	**19,995,400**	**100**	**50,000,000**	**1**	**2,250,000**		**-**		**-**	**0.00**	**-**	**95**	**87,768,350**	**95.00**	**0.27**
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dok	6	320,850,000	4.00	87,768,350	1	50,000,000	1	2,250,000					4.00	-	67	87,768,350	11.11	0.27
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	37	25,415,000		-				-		-		-		-		-		0.00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rumusan**	**222**	**190,660,000**	**37 rumusan**	**13,606,700**	**37 rumusan**	**25,600,000**	**37 rumusan**	**-**		**-**		**-**		**-**	**148**	**50,257,098**	**66.67**	**0.26**

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
											I		II							
	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	**OPD**	**222**		**37 OPD**		**37 OPD**		**37 OPD**								**148**		**66.67**	
	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup	**OPD**	**222**		**37 OPD**		**37 OPD**		**37 OPD**								**148**		**66.67**	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	OPD	24	197,014,518	8.00	4,515,000	4 laporan	25,600,000								-	8		33.33	0.00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	OPD	24	*190,660,000*	8.00	50,257,098										-	8	50,257,098	33.33	0.26
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase pencapaian hasil Renja PD**	**%**	**95**	***3,006,245,468***	**91.80**	**452,107,307**	**95%**	**376,355,882**		**125,503,150**	**23.09**	**28,974,667**	**25.31**	**31,763,321**		**60,737,988**	**91.80**	**2,061,819,606**		**0.69**
	Persentase pencapaian hasil Renstra PD	**%**	**95**		**104.01**		**95%**										**104.01**			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**%**	**100%**	**766,056,435**	**98.62**	**125,879,624**	**100%**	**177,000,000**		**62,691,900**		**14,416,300**		**6,810,900**		**21,227,200**	**50**	**497,316,303**	**50.00**	**0.65**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	19	45,094,280	14 dok	157,842,500	4 Dokumen	55,000,000	19	26,689,700	1 dokumen	7,050,000	2 dokumen	3,965,900	2 dokumen	11,015,900	16 dok	168,858,400	84.21	3.74
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Laporan	12	*193,192,155*	8 laporan	222,098,601	4 laporan	25,000,000								-	8 laporan	222,098,601	66.67	1.15
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dok	19	*527,770,000*	6 OPD	318,246,603	4 Dokumen	75,000,000	19	36,002,200	1 dokumen	7,366,300	2 dokumen	2,845,000	2 dokumen	10,211,300	16 dok	328,457,903	84.21	0.62

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
											I		II							
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	24	*135,850,000*	18 OPD	69,798,828	4 laporan	22,000,000								-	18 OPD	69,798,828		0.51
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA**	**%**	**95%**	**584,706,683**	**98.62**	**176,200,268**	**100%**	**71,068,882**	**95%**	**21,249,100**		**1,485,000**		**8,393,000**		**9,878,000**		**186,078,268**	**50.70**	**0.32**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dok	19	*47,999,500*	14.00	114,523,818			-							-	16	114,523,818	84.21	2.39
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	20 laporan	*227,007,183*	8 laporan	15,154,150	4 lapoaran	38,068,882		21,249,100	3 laporan	1,485,000	3 laporan	8,393,000	6 laporan	9,878,000	16	25,032,150	50.00	11.03
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dok	14	*309,700,000*	16.00	46,522,300			-			-				-	16	46,522,300	84.21	0.15
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	12	*134,300,000*			4 lapoaran	33,000,000				-						-		
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**%**	**100%**	**1,655,482,350**	**95.52**	**1,472,576,341**	**100%**	**128,287,000**	**100%**	**41,562,150**		**13,073,367**	**53.62**	**16,559,421**		**29,632,788**	**95.52**	**1,378,425,035**	**52.35**	**0.83**
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan	24	40,262,750	12.00	94,151,306	4 Laporan	36,602,500	12 Laporan	41,562,150	3 laporan	13,073,367	3 laporan	16,559,421	18 laporan	29,632,788	75.00	123,784,094	25.00	3.07

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
											I		II							
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dok	16	635,000,000	2 Dokumen	298,169,722					-					-	2.00	298,169,722	60.00	0.47
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)	Laporan	1 laporan																	
	Penyusunan Stratagi Sanitasi Kabupaten (SSK)	Laporan	1 laporan		1 dokumen SSK															
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dok	17	*860,599,900*	17.00	1,032,706,533	4 Dokumen	50,000,000								-	-	1,032,706,533		1.20
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	16	*159,882,450*	100.00	47,548,780	4 laporan	41,684,500				-				-		47,548,780		
Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	**Indeks Inovasi Daerah/Indexs Government Award**																			
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				***623,764,290***		**636,617,197**		**430,000,000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**636,617,197**		**1.02**
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Indeks inovasi daerah**	**Indeks**	**70**	***623,764,290***	**63.12**	**636,617,197**	**72.50**	**430,000,000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**636,617,197**		**1.02**
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Persentase peenelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**%**					**45**	**365,000,000**		**-**		**-**		**-**		**-**				

Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2025 yang akan di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
											I		II							
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	4	*121,665,024*	1 rekomendasi	230,327,060	1 Rekomendasi	250,000,000								-				
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	4	*306,595,860*	0.00	611,503,566	3 laporan	115,000,000								-				
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	Dok	1 dokumen		1 dokumen															
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah inovasi PD yang dpublikasikan**	**Inovasi**	**90**	***623,764,290***	**102.00**	**636,617,197**	**70**	**65,000,000**		**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**102**	**636,617,197**	**128%**	**1.02**
	Jumlah inovasi PD yang lolos verifekasi sesuai ketentuan	**Inovasi**	**90**		**102.00**		**70**													
Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dok	6	*623,764,290*	102.00	636,617,197	1 Dokumen	65,000,000								-	102	636,617,197	128%	1.02
				25,256,143,347	**0.63**	**15,977,226,075**		**5,183,811,350**		**4,528,926,550**	**16.67**	**864,098,219**	**18.62**	**965,462,519**	**35.29**	**1,829,560,738**	**375%**	**19,460,184,472**	**0.77**	**3.69**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**35.29%**									

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Bapperida Triwulan II pada Tabel 2.1 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja Program/kegiatan/subkegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang, hal ini dikarenakan gangguan teknis pendaftaran pembelian barang pada LPSE Kab. Dharmasraya sehingga perubahan metode pembelian barang (TV dan printer) dari pembelian melalui e-katalog ke pembelian manual/langsung sehingga pembelian barang tertunda.

2. Kinerja program program/kegiatan/subkegiatan pada 2 program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan:
   1) komitmen utuk menyelesaikan pekerjaan
   2) Komitmen dalam pelaksanaan sesuai tahapan, dan dukungan seluruh PD dalam pelaksanaan kegiatan
   3) Penyusunan jadwal perencanaaan sesuai time line perencanaan dan aturan perencanaan
   4) Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan
   5) Koordinasi dengan PD terkait dan pemetaan data berdasar bidang urusan untuk memudahkan PD dalam melengkapi data
   6) Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan baik
   7) Koordinasi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif

Berdasarkan faktor-faktor penyebab dan pendukung yang telah disampaikan, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Menyusun KAK kegiatan agar pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dapat terarah sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan
2. Penyusunan aliran kas dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan
3. Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang disertai dengan pengendalian dan evaluasi serta penyediaaan data informasi kebutuhan perencanaan;

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja dan Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kab. Dharmasraya tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Bapperida menurun dari Pagu Renja Bapperida Tahun 2025 Kab. Dharmasraya yang semula Rp. 5.161.811.350,00 menjadi APBD Awal Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2025 sebesar Rp. 5.476.645.350,00,- selanjutnya pagu pada Perubahan Rencana Kerja Bapperida Tahun 2025 direncanakan menjadi Rp. 4.794.496.350,00,- dengan penurunan anggaran sebesar Rp. 682,149,000.00,-. hal ini merupakan dampak implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tambahan anggaran pada pengadaan peralatan dan mesin berupa laptop guna menunjang beban kerja dan mempermudah proses kerja pada ASN Bapperida yang mengarahkan efisiensi biaya perjalanan dinas non-DAK (Dana Alokasi Khusus) dipotong sebesar 50%, dan upaya mengurangi pemborosan belanja operasional, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, dan pengadaan peralatan.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif terlihat pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				**5.161.811.350,00**	**5.476.645.350,00**	**4.794.496.350,00**				**7.495.227.382,00**
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**5.161.811.350,00**	**5.476.645.350,00**	**4.794.496.350,00**				**7.495.227.382,00**
5	**01**				**PERENCANAAN**				**4.731.811.350,00**	**4.976.645.350,00**	**4.674.496.350,00**				**6.460.227.382,00**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**3.451.855.468,00**	**3.956.919.000,00**	**3.939.615.350,00**				**5.069.815.100,00**
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran keuangan PD**	**100 persen**	**100 persen**	**2.156.842.468,00**	**3.198.961.000,00**	**3.198.961.000,00**				**3.216.818.000,00**
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.156.842.468,00	3.198.961.000,00	3.198.961.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Alokasi Umum (DAU)		3.216.818.000,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	244.513.000,00	229.224.350,00	229.224.350,00				403.944.300,00
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7 Paket	9.900.000,00	9.156.000,00	11.431.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		10.890.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	22.000.000,00	30.083.000,00	24.804.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		23.000.000,00
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	30.613.000,00	41.772.000,00	42.292.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		33.674.300,00
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	9.510.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		39.930.000,00
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	22.000.000,00	12.507.700,00	6.253.700,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		30.250.000,00
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	170 Laporan	135.000.000,00	120.705.650,00	142.930.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		266.200.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 persen**	**100 persen**	**315.000.000,00**	**83.300.000,00**	**83.300.000,00**				**750.000.000,00**
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	2 Unit	250.000.000,00	83.300.000,00	52.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**565.500.000,00**	**369.380.650,00**	**369.380.650,00**				**654.152.800,00**
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5.000.000,00
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	102.999.050,00	102.999.050,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		120.000.000,00
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	13.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		16.500.000,00
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	425.000.000,00	261.381.600,00	261.381.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		512.652.800,00
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik**	**100 persen**	**100 persen**	**170.000.000,00**	**76.053.000,00**	**76.053.000,00**				**44.900.000,00**
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	18.500.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		26.400.000,00
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	22.000.000,00	23.000.000,00	29.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	27 Unit	15.500.000,00	16.840.000,00	16.840.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		18.500.000,00
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	114.000.000,00	15.213.000,00	15.213.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuai Perencanaan dan penganggaran Persentase pencapaian hasil RPJMD**	**100 95 persen persen**	**100 95 persen persen**	**925.600.000,00**	**768.719.350,00**	**609.377.850,00**				**830.200.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Bimtek Penyusunan Renstra PD Koordinasi Penyusunan Renstra PD Penyusunan RAD SPM 2025-2029 Penyusunan RKPD 2026 dan Perubahan Tahun 2025 Penyusunan RPJMD sesuai tata cara dan tahapan yang berlaku**	**1 Dokumen 2 Dokumen**	**1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Dokumen**	**850.000.000,00**	**683.944.850,00**	**683.944.850,00**				**775.000.000,00**
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota										
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	150.000.000,00	157.016.000,00	92.200.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		350.000.000,00
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen Dokumen	3 dokumen Dokumen	700.000.000,00	526.928.850,00	514.927.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		425.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Data Geospasial Tersedianya data, analisis data perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas (Data Statisktik)**	**37 OPD**	**1 ddokumen 1 dokumen**	**50.000.000,00**	**55.727.000,00**	**55.727.000,00**				**30.000.000,00**
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	55.727.000,00	2.250.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		30.000.000,00
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan valuasi terhadap pelaksanaaan rencana pembangunan daerah**	**37 OPD**	**37 OPD**	**25.600.000,00**	**29.047.500,00**	**29.047.500,00**				**25.200.000,00**
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	0 Laporan	25.600.000,00	29.047.500,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		25.200.000,00
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase pencapaian Hasil Renja PD**	**95 persen**	**95 persen**	**354.355.882,00**	**251.007.000,00**	**125.503.150,00**				**560.212.282,00**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100 persen**	**100 persen**	**155.000.000,00**	**125.384.500,00**	**125.384.500,00**				**263.923.000,00**
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen Dokumen	3 dokumen Dokumen	55.000.000,00	71.430.750,00	26.689.700,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		43.923.000,00
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	53.953.750,00	36.002.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		110.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
						(RPJPD. RPJMD dan RKPD)									
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		110.000.000,00
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA**	**95 persen**	**95 persen**	**71.068.882,00**	**42.498.200,00**	**42.498.200,00**				**78.173.582,00**
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian										
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	38.068.882,00	42.498.200,00	21.249.100,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)		41.873.582,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA										
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	0 Laporan	33.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		36.300.000,00
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100 persen**	**100 persen**	**128.287.000,00**	**83.124.300,00**	**83.124.300,00**				**218.115.700,00**
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur										
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	36.602.500,00	83.124.300,00	41.562.150,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)		40.262.750,00
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 dokumen Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		132.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan										
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	0 Laporan	41.684.500,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		45.852.950,00
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**430.000.000,00**	**500.000.000,00**	**120.000.000,00**				**1.035.000.000,00**
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Indeks Inovasi Daerah**	**70 index**	**75 index**	**430.000.000,00**	**500.000.000,00**	**120.000.000,00**				**1.035.000.000,00**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**45 persen**	**45 persen**	**365.000.000,00**	**386.671.500,00**	**386.671.500,00**				**870.000.000,00**
5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan										
						Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	250.000.000,00	286.023.400,00	98.869.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		100.000.000,00
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	3 Laporan	0 Laporan	115.000.000,00	100.648.100,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		770.000.000,00
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah inovasi PD yang lolos verifikasi sesuai ketentuan**	**70 inovasi**	**70 inovasi**	**65.000.000,00**	**113.328.500,00**	**113.328.500,00**				**165.000.000,00**
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi										
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	113.328.500,00	21.131.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		165.000.000,00
J U M L A H									**5.161.811.350,00**	**5.476.645.350,00**	**4.794.496.350,00**				**7.495.227.382,00**

3.2 Target Indikator Kinerja Tahun 2024

Jika dilihat dari tujuan dan pencapaian sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025, maka lebih jelasnya target kinerja dipaparkan pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2 Target dan Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2024		Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi s.d TW 2	Target Renstra/ Renja	Target Perubahan Renja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian sasaran RPJMD	%	90	105.3	90	104.09	95	100.64	Akhir Tahun	95	95
		Rata-rata capaian Renstra PD	%	90	135.68	90	102.7	95	102.21	Akhir Tahun	95	95
		Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan	%	90	93.76	90	89.06	95	91.80	39.55	95	95
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan kinerja	Bobot	22	22.2	22	22.28	24	22.75	Tw 3	25	25
		Nilai SAKIP Komponen pengukuran kinerja	Bobot	19	18.19	19	18.64	21	19.54	Tw 3	22	22
2	Meningkatnya Fungsi Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Kebijakan dan pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah/ Indexs Government Award	Bobot/ indeks	Sangat Inovatif 65	Inovatif 57.84	Sangat Inovatif 70	Inovatif 55.61	Sangat Inovatif 72.5	Inovatif 63.12	Akhir Tahun	Sangat Inovatif 75	Sangat Inovatif 75
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penilaian AKIP Bapperida	Bobot/ indeks	BB/ 79.92	BB/ 72.52	A/ 80.44	A/ 83.71	A/ 80.96	A/ 86.96	Tw 3	A 81.48	A 81.48

Sumber : LAKIP Bapperida tahun 2022-2024, Monev RKPD Tw 2 Tahun 2025

Bapperida Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Renstra Bapperida tahun 2021-2026 memiliki 3 sasaran yaitu (1) meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan 5 indikator kinerja anatara lain capaian sasaran RPJMD, rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan, nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja, nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja. Namun dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya Dimana evaluasi SAKIP mulai tahun 2022 hingga sekarang lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah sehingga indikator Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja tidak diakomodir lagi dampaknya Sasaran (1) meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dikerucutkan menjadi 4 indikator kinerja saja antara lain capaian sasaran RPJMD, rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan, nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja. (2) meningkatnya fungsi litbang dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah dengan indikator Indeks inovasi daerah (Indexs Government Award) serta (3) meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator nilai AKIP Bapperida dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Bapperida. Hal yang tidak jauh berbeda dengan sasaran 1, pada sasaran 3 indikator sasarannya dikerucutkan menjadi 1 indiktor saja yaitu indikator nilai AKIP Bapperida dikarenakan penilaian RB hanya melekat pada Pemerintah Daerah saja.

Jika dilihat hasil realisasi tahun 2022-2023 serta hasil evaluasi Monitoring dan Evaluasi Renja Bapperida hingga triwulan 2 Tahun 2025 maka dapat dijelaskan bahwa pada sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada 2 (dua) indikator sasaran yaitu capaian sasaran RPJMD dan rata-rata capaian Renstra PD tidak dilakukan koreksi target capaian walaupun capaian telah melebihi target yang ditetapan yakni melebihi 100%, dikarenakan capaian indikator/OPD yang tinggi menutupi capain terhadap indikator /OPD yang rendah atau subsidi silang pencapaian kinerja.

Dilain hal sasaran meningkatnya fungsi litbang dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah dengan indikator Indeks inovasi daerah (Indexs Government Award), terdapat koreksi pencapaian target kinerja tahun 2025 dari indeks Inovasi sebesar 70 pada Renja Tahun Bapperida Tahun 2025 ke angka 75 pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Hal yang sama juga dilakukan pada pencapaian target pada sasaran ketiga meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator nilai AKIP Bapperida, dimana target sesuai denga target Renstra walaupun capaian telah melebihi target Renstra hal dengan asumsi kedepannya penilaian atas AKIP yang semakin selektif serta masa transisi pada penerapan Renstra Baperida Periode Tahun 2025-2029.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani pada tataran implementasi dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan anggaran. Keberhasilan pelaksanaan renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama dan terdapatnya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian kinerja serta digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah dapat terukur sehingga membantu dalam penyusunan rencana berikutnya secara bertahap dan berkesinambungan.

Masukan dan saran yang bersifat konstruktif akan menambah kesempurnaan dan kelengkapan rancangan dokumen ini dengan harapan akan mendukung kualitas substansi yang termuat didalamnya sekaligus menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait lainnya.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

Pulau Punjung, 2025
Badan Keuangan Daerah,
K e p a l a,

Asril, AP, M.Si
NIP. 19750225 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**

DAFTAR ISI ..... **II**

BAB 1. .. PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang *1*
1.2. Landasan Hukum *1*
1.3. Maksud dan Tujuan *2*
1.3.1. Maksud 2
1.3.2. Tujuan 3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD *3*

BAB 2. .. *EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 TAHUN 2025* **4**

BAB 3. .. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH **26**

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 ..... *26*

BAB 4. .. PENUTUP **42**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara'
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Dharmasraya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 serta pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai acuan bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan RKA Tahun 2025

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Umum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Perubahan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 diperlukan evaluasi capaian sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program, 13 kegiatan, dan 89 sub kegiatan dengan anggaran total sebagaimana tertuang di dalam Pergeseran APBD ketiga Tahun 2025 sejumlah Rp169.569.932.256,00. Anggaran yang digunakan untuk menghitung realisasi ini adalah anggaran sampai dengan triwulan I dengan total anggaran sebesar Rp114.145.030.315,00. Namun demikian anggaran Belanja Tidak Terduga tidak termasuk dalam perhitungan realisasi capaian sehingga target yang digunakan adalah anggaran setelah dikurangi target dan realisasi Belanja Tidak Terduga sehingga target yang digunakan sebesar Rp24.145.030.315 dengan realisasi Rp22.663.497.890,00 atau 93.86%.

Pelaksanaan program-program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan 3 indikator, yaitu Persentase ketepatan waktu, Persentase penyerapan belanja daerah dan Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik. Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta Sekretariat. Target program pada pada Triwulan 2 tahun 2025 setelah adalah sebesar Rp.129.940.031.350,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.517.025.187,00 atau sebesar 17,22% persen Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Tatakala penyusunan APBD sudah jelas.
2. Terdapat anggaran yg mendukung.

3. Koordinasi dengan OPD terkait berjalan lancar baik melalui daring maupun luring.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Peraturan dan sistem terkait pengelolaan keuangan daerah sangat dinamis ditindaklnajuti dengan koordinasi kepada kementrian dalam negeri dan untuk update data kepada OPD dilakukan melalui forum tersendiri.
2. Belum adanya acuan untuk penyusunan ASB.

B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan indicator kinerja Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.444.340.300,00,00 dengan realisasi sebesar Rp.117.756.617,00,00 atau sebesar 26,50%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah dilaksanakannya rekonsiliasi dengan pengurus barang OPD setiap bulan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 657.524.650,00 dengan realisasi sebesar Rp.177.158.467,00 atau sebesar 26,94%, yang terdiri 8 sub kegiatan dari 12 sub kegiatan.:

C. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan 3 indikator, yaitu Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian, Nilai pendapatan Pajak Daerah dan Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar . Program ini dilaksanakan oleh 2 bidang, Target program pada tahun 2025 sebesar Rp. 657.524.650,00 dengan realisasi sebesar Rp. 177.158.467,00 atau sebesar 26,94%. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

- Masih menggunakan realisasi tahun lalu.
- Dari pihak eksternal (WP) dalam melakukan pelaporan belum sesuai dengan ketentuan
- Tidak dapat menemui WP karena berada di luar kota.dan ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada yang bersangkutan.
- Objek pajak tidak dapat ditemukan ditindaklanjuti dengan mengirimkan tagihan kepada WP.

D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan indikator kinerja Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Target program pada tahun 2025 adalah BB (Nilai). Realisasi program belum dapat ditampilkan karena masih dalam proses evaluasi dan penilaian oleh Inspektorat. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 9.757.584.525,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.457.942.599,00 atau sebesar 35,44%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah sudah dilaksanakannya evaluasi internal. Dan sudah menindaklanjuti LHP tahun sebelumnya. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih belum lengkapnya bukti dukung sehingga belum bisa menyajikan data secara lengkap serta masih digunakannya data realisasi tahun 2024. Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 15 sub kegiatan

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN			
						I		II	
			K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp
5 2	**KEUANGAN**			**126.235.103.044**	**141.367.446.125**		**10.038.439.864**		**26.269.882.870**
5 2 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.540.569.620**	**9.936.160.525**		**1.513.213.571**	**-**	**3.457.942.599**
5 2 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**7.000.000.000**	**8.242.757.225**		**1.255.364.763**		**2.870.058.173**
5 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	7.000.000.000	8.242.757.225		1.255.364.763		2.870.058.173
5 2 1 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**910.176.019**	**388.820.500**		**91.889.834**		**241.830.332**
5 2 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	24.696.000	9.990.000		2.856.000		3.399.000

5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	200.166.019	39.994.400		5.614.400		63.236.000
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	98.784.000	55.705.000		9.427.000		18.882.000
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	92.610.000	55.006.000		9.511.000		20.310.000
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	185.220.000	93.119.100		29.216.700		74.469.900
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD	12 Paket	308.700.000	135.006.000		35.264.734		61.533.432
5	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**104.088.000**	**86.175.000**		**-**		**-**
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	104.088.000	86.175.000		-		-
5	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.163.317.641**	**1.034.527.800**		**156.407.374**		**324.987.194**

5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12.000.000	14.995.000		2.000.000		4.201.000
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	290.424.960	313.150.000		44.830.874		134.362.294
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.166.019	193.415.000		35.194.000		7.246.400
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	660.726.662	512.967.800		74.382.500		179.177.500
5	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**362.987.960**	**183.880.000**		**9.551.600**		**21.066.900**
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.374.200	16.500.000		3.746.000		9.403.000

5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	142.613.760	91.850.000		5.805.600		11.663.900
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	75.530.000		-		-
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**115.710.164.912**	**129.940.031.350**		**8.392.215.793**		**22.517.025.187**
5	**2**	**2**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**			**2.485.773.920**	**1.722.783.000**		**154.690.600**		**292.602.730**
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	672.091.840	239.350.000		716.000		716.000
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	294.336.000	242.030.000		-		-
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	139.245.120	284.895.000		35.774.600		35.774.600

5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	1.057.473.760	956.508.000		118.200.000		256.112.130
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dokumen	322.627.200					
5	**2**	**2**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**			**487.203.360**	**216.631.000**		**38.494.534**		**59.010.534**

2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	80.143.840	43.432.000		9.492.400		15.192.400

5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	407.059.520	173.199.000		29.002.134		43.818.134
5	**2**	**2**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**			**267.246.560**	**507.729.150**		**19.432.000**		**83.490.650**
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	71.693.440	76.722.000		-		-
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LaporanKeuangan SKPD, BLUDdan Laporan KeuanganPemerintah Daerah yangTerkonsolidasi	54 dokumen	182.600.320	158.650.000		19.432.000		83.490.650
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 dokumen		272.357.150				0

					Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
5	2	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen	12.952.800					
5	2	2	2.03	006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1.000.000	17.066.250		-		
5	**2**	**2**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**112.240.986.000**	**127.123.568.200**		**8.148.827.959**		**21.830.899.573**

5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 laporan	110.240.986.000	117.348.568.200		8.045.827.959		21.684.410.523
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	2.000.000.000	9.775.000.000		103.000.000		146.489.050
5	02	02	2.04	001	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 laporan	2.750.957.200	5.134.311.500		-		
5	**2**	**2**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**			**228.955.072**	**369.320.000**		**30.770.700**		**251.021.700**
5	2	2	2.05	1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen HasilInventarisasi dan AnalisisData Bidang KeuanganDaerah	2 Dokumen	27.356.640	36.654.000		**-**		4.460.000
5	2	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah server yang terpelihara	2 Dokumen	201.598.432	332.666.000		30.770.700		246.561.700

5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**277.226.720**	**557.965.250**		**47.864.100**		**117.756.617**
5	**2**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**			**277.226.720**	**557.965.250**		**47.864.100**		**117.756.617**
5	2	3	2.01	0	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1.000.000,00	75.978.000		7.857.500		25.640.500
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	62.507.200	20.464.000		-		7.828.000
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	137.637.920	392.000.700		38.508.600		72.485.867
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	76.081.600	52.763.050		-		7.711.150
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 dokumen	1.000.000	92.737.500		1.498.000		4.091.100
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**707.141.792**	**933.289.000**		**85.146.400**		**177.158.467**
5	**2**	**4**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**			**707.141.792**	**933.289.000**		**85.146.400**		**177.158.467**

5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	258.758.752	200.024.000		6.160.900		18.805.217
5	2	4	02:01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah								
5	2	4	02:01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah								
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7 Laporan	55.014.400	415.077.000		19.328.000		34.689.050
5	2	4	02:01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah								
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	85000 Obyek Pajak	203.976.640	128.735.000		53.316.000		65.604.000
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	19 Laporan	189.392.000	189.453.000		6.341.500		58.060.200

BAB 3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya memiliki 4 (empat) rumusan program, 8 (delapan) rumusan kegiatan, dan 39 (tiga puluh sembilan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran rancangan perubahan APBD untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 141.645.349.615,00 Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, yaitu :

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagaimana dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rekening					Uraian	Sebelum					Sesudah					Total
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Badan Keuangan Daerah																
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp. 15.351.067.175	Rp. 286.175.000	Rp. 9.775.000.000	Rp. 121.182.559.700	Rp. 146.594.801.875	Rp. 13.375.312.725	Rp. 374.675.000	Rp. 1.775.000.000	Rp. 117.178.797.140	Rp. 132.703.784.865	Rp. 145.613.128.742,00
5	02				KEUANGAN	Rp. 15.351.067.175	Rp. 286.175.000	Rp. 9.775.000.000	Rp. 121.182.559.700	Rp. 146.594.801.875	Rp. 13.375.312.725	Rp. 374.675.000	Rp. 1.775.000.000	Rp. 117.178.797.140	Rp. 132.703.784.865	Rp. 145.613.128.742,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 9.849.985.525	Rp. 86.175.000			Rp. 9.936.160.525	Rp. 9.137.960.125	Rp. 159.525.000			Rp. 9.297.485.125	Rp. 11.718.360.160,00
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8.242.757.225				Rp. 8.242.757.225	Rp. 7.676.781.845				Rp. 7.676.781.845	Rp. 7.860.744.640,00
5	02	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 8.242.757.225				Rp. 8.242.757.225	Rp. 7.676.781.845				Rp. 7.676.781.845	Rp. 7.840.000.000,00
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 542.241.100				Rp. 542.241.100	Rp. 513.142.600				Rp. 513.142.600	Rp. 1.026.312.021,00
5	02	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9.990.000				Rp. 9.990.000	Rp. 9.990.000				Rp. 9.990.000	Rp. 27.659.520,00
5	02	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 193.415.000				Rp. 193.415.000	Rp. 153.383.000				Rp. 153.383.000	Rp. 224.185.941,00
--	02	01	2,06	0004	Uraian	Rp. 55.006.000				Rp. 55.006.000	Rp. 49.186.000				Rp. 49.186.000	Total
5	02	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 93.119.100				Rp. 93.119.100	Rp. 146.091.600				Rp. 146.091.600	Rp. 207.446.400,00
5	02	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 135.006.000				Rp. 135.006.000	Rp. 110.830.000				Rp. 110.830.000	Rp. 345.744.000,00
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp. 86.175.000			Rp. 86.175.000		Rp. 159.525.000			Rp. 159.525.000	Rp. 689.727.360,00
5	02	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel							Rp. 24.525.000			Rp. 24.525.000	Rp. 69.148.800,00
5	02	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp. 86.175.000			Rp. 86.175.000		Rp. 135.000.000			Rp. 135.000.000	Rp. 116.578.560,00
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 881.107.200				Rp. 881.107.200	Rp. 762.655.680				Rp. 762.655.680	Rp. 1.190.293.016,00
5	02	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 14.995.000				Rp. 14.995.000	Rp. 14.995.000				Rp. 14.995.000	Rp. 13.440.000,00
5	02	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 313.150.000				Rp. 313.150.000	Rp. 293.148.480				Rp. 293.148.480	Rp. 325.275.955,00
5	02	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 39.994.400				Rp. 39.994.400	Rp. 39.994.400				Rp. 39.994.400	Rp. 111.563.200,00
5	02	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 512.967.800				Rp. 512.967.800	Rp. 414.517.800				Rp. 414.517.800	Rp. 740.013.861,00
5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 183.880.000				Rp. 183.880.000	Rp. 185.380.000				Rp. 185.380.000	Rp. 863.081.363,00
5	02	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 16.500.000				Rp. 16.500.000	Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 22.819.104,00
5	02	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 91.850.000				Rp. 91.850.000	Rp. 91.850.000				Rp. 91.850.000	Rp. 159.727.411,00
5	02	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 75.530.000				Rp. 75.530.000	Rp. 75.530.000				Rp. 75.530.000	Rp. 224.000.000,00
5	02	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											Rp. 251.659.520,00

5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 3.933.849.400	Rp. 200.000.000	Rp. 9.775.000.000	Rp. 121.182.559.700	Rp. 135.091.409.100	Rp. 3.312.171.350	Rp. 200.000.000	Rp. 1.775.000.000	Rp. 117.178.797.140	Rp. 122.465.968.490	Rp. 132.591.465.609,00
5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 1.722.783.000				Rp. 1.722.783.000	Rp. 1.346.516.500				Rp. 1.346.516.500	Rp. 2.412.175.359,00
5	02	02	2,01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 239.350.000				Rp. 239.350.000	Rp. 145.429.500				Rp. 145.429.500	Rp. 376.371.430,00
5	02	02	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 242.030.000				Rp. 242.030.000	Rp. 104.277.500				Rp. 104.277.500	Rp. 329.656.320,00
5	02	02	2,01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp. 284.895.000				Rp. 284.895.000	Rp. 177.745.500				Rp. 177.745.500	Rp. 155.954.534,00
5	02	02	2,01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp. 956.508.000				Rp. 956.508.000	Rp. 919.064.000				Rp. 919.064.000	Rp. 1.184.370.611,00
5	02	02	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 216.631.000				Rp. 216.631.000	Rp. 148.958.550				Rp. 148.958.550	Rp. 553.507.763,00
5	02	02	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp. 43.432.000				Rp. 43.432.000	Rp. 28.457.550				Rp. 28.457.550	Rp. 89.761.101,00
5	02	02	2,02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 173.199.000				Rp. 173.199.000	Rp. 120.501.000				Rp. 120.501.000	Rp. 455.906.662,00
5	02	02	2,03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 524.795.400				Rp. 524.795.400	Rp. 291.411.300				Rp. 291.411.300	Rp. 573.896.422,00
5	02	02	2,03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp. 76.722.000				Rp. 76.722.000	Rp. 46.396.000				Rp. 46.396.000	Rp. 80.296.653,00
5	02	02	2,03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 158.650.000				Rp. 158.650.000	Rp. 94.395.850				Rp. 94.395.850	Rp. 204.512.358,00
5	02	02	2,03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp. 272.357.150				Rp. 272.357.150	Rp. 135.360.200				Rp. 135.360.200	Rp. 279.007.411,00
5	02	02	2,03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp. 17.066.250				Rp. 17.066.250	Rp. 15.259.250				Rp. 15.259.250	Rp. 1.120.000,00
5	02	02	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 1.300.320.000		Rp. 9.775.000.000	Rp. 121.182.559.700	Rp. 132.257.879.700	Rp. 1.362.240.000		Rp. 1.775.000.000	Rp. 117.178.797.140	Rp. 120.316.037.140	Rp. 128.795.456.384,00
5	02	02	2,04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp. 1.300.320.000			Rp. 116.048.248.200	Rp. 117.348.568.200	Rp. 1.362.240.000			Rp. 112.044.485.640	Rp. 113.406.725.640	Rp. 123.469.904.320,00
5	02	02	2,04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Rp. 9.775.000.000		Rp. 9.775.000.000			Rp. 1.775.000.000		Rp. 1.775.000.000	Rp. 2.240.000.000,00
5	02	02	2,04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				Rp. 5.134.311.500	Rp. 5.134.311.500				Rp. 5.134.311.500	Rp. 5.134.311.500	Rp. 3.081.072.064,00
5	02	02	2,05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rp. 169.320.000	Rp. 200.000.000			Rp. 369.320.000	Rp. 163.045.000	Rp. 200.000.000			Rp. 363.045.000	Rp. 256.429.681,00
5	02	02	2,05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Rp. 36.654.000				Rp. 36.654.000	Rp. 13.379.000				Rp. 13.379.000	Rp. 30.639.437,00
5	02	02	2,05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Rp. 132.666.000	Rp. 200.000.000			Rp. 332.666.000	Rp. 149.666.000	Rp. 200.000.000			Rp. 349.666.000	Rp. 225.790.244,00

5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 633.943.250				Rp. 633.943.250	Rp. 316.806.200				Rp. 316.806.200	Rp. 320.573.926,00
5	02	03	2,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 633.943.250				Rp. 633.943.250	Rp. 316.806.200				Rp. 316.806.200	Rp. 320.573.926,00
5	02	03	2,01	0001	Penyusunan Standar Harga	Rp. 75.978.000				Rp. 75.978.000	Rp. 61.789.000				Rp. 61.789.000	Rp. 1.120.000,00
5	02	03	2,01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp. 20.464.000				Rp. 20.464.000	Rp. 17.732.000				Rp. 17.732.000	Rp. 70.008.064,00
5	02	03	2,01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah											Rp. 1.120.000,00
5	02	03	2,01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp. 392.000.700				Rp. 392.000.700	Rp. 115.492.000				Rp. 115.492.000	Rp. 154.154.470,00
5	02	03	2,01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp. 52.763.050				Rp. 52.763.050	Rp. 33.810.200				Rp. 33.810.200	Rp. 85.211.392,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 933.289.000				Rp. 933.289.000	Rp. 608.375.050	Rp. 15.150.000			Rp. 623.525.050	Rp. 982.729.047,00
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 933.289.000				Rp. 933.289.000	Rp. 608.375.050	Rp. 15.150.000			Rp. 623.525.050	Rp. 982.729.047,00
5	02	04	2,01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 200.024.000				Rp. 200.024.000	Rp. 92.656.300				Rp. 92.656.300	Rp. 289.809.802,00
5	02	04	2,01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 415.077.000				Rp. 415.077.000	Rp. 254.707.750	Rp. 15.150.000			Rp. 269.857.750	Rp. 61.616.128,00
5	02	04	2,01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 128.735.000				Rp. 128.735.000	Rp. 115.072.500				Rp. 115.072.500	Rp. 228.453.837,00
5	02	04	2,01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp. 189.453.000				Rp. 189.453.000	Rp. 135.296.500				Rp. 135.296.500	Rp. 212.119.040,00
5	02	04	2,01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						Rp. 10.642.000				Rp. 10.642.000	Rp. 120.000.000,00

BAB 4. PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan dalam bentuk indikasi program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025. Hal ini tidak lain dalam rangka menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan tugas pokok dan fungsi kelembagaan terhadap peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Pendapatan sebagai operasionalisasi pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) BKD selanjutnya.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan penyusunan sasaran kinerja Renstra yang diselenggarakan oleh BKD. Sehingga diharapkan Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan kegiatan dan target kinerja dalam pencapaian target Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Akan tetapi rencana kerja ini akan dapat dilaksanakan dengan optimal jika mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama seluruh aparatur yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya baik secara moril maupun materil.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PRUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025

1

Tabel 3-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 3-1
Tabel 3-2 Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3-3
Tabel 3-3 Perubahan Target Kinerja Tahun 2024 3-13

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah (Perubahan renja PD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 serta pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan Renja PD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2026, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025

Pada sub bab ini menyajikan tabel e.60 evaluasi terhadap hasil capaian rkpd tahun 2025 (terlampir), serta dilengkapi dengan narasi tentang capaian pelaksanaan sub kegiatan dan target indikator program dan indikator kegiatan selama tahun 2025.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

A. Program Kepegawaian Daerah

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Untuk menunjang terlaksananya kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN didukung oleh beberapa sub kegiatan. Capaian dan realisasi sub kegiatan tersebut dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini:

1.1. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN.

Kegiatan ini berfungsi untuk menghitung kebutuhan, kelebihan dan kekurangan ASN (formasi jabatan) yang ada di lingkungan Pemkab Dharmasraya. Jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 15.036.800,- dengan realisasi sampai triwulan II sebesar Rp. 4.860.900,- Melihat kondisi realisasi di atas, maka dapat dilihat capaian kinerja sebesar 32,32 %.

1.2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam pengadaan dan penerimaan PNS dan PPPK. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sedang melaksanakan Pengusulan NIP CPNS dan PPPK formasi tahun 2024 yang terdiri dari CPNS sebanyak 94 orang. Dengan rincian tenaga kesehatan 58 orang dan tenaga teknis sebanyak 36 orang. Selain itu juga sedang dilakukan pengusulan NIP untuk PPPK Tahap I sebanyak 227 orang dengan rincian tenaga guru 52 orang, tenaga kesehatan 173 orang dan tenaga teknis 52 orang.

Jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Rp.110.558.300,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan II sebanyak Rp.47.581.454,- Atau dengan capaian kinerja sebesar 43 persen.

1.3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Sampai triwulan II tahun 2025, BKPSDM telah melayani pengadministrasian ASN yang akan memasuki masa pensiun sebanyak 48 orang. Yang terdiri dari Batas Usia Pensiun (BUP), Atas Permintaan Sendiri (APS), Janda /Duda. Dengan rincian sebagai berikut:

a.	Batas Usia Pensiun (BUP)	=	44 orang
b.	Atas Permintaan Sendiri (APS)	=	3 orang
c	Janda / duda	=	1 orang

Jumlah Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebanyak : Rp.5.004.750,- keuangannya belum teralisasi sampai triwulan II sementara kegiatan telah dilaksanakan.

1.4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem informasi Manajemen PNS digunakan oleh Pemda Dharmasraya untuk Membuat Statistik Data seluruh ASN Kabupaten Dharmasraya berupa Updating database kepegawaian dalam hal mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, dll.

Jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 10.500.750,- dengan realisasi sampai triwulan II sebesar Rp. 7.181.800,- dengan capaian 68,39 %. dengan predikat berhasil.

1.5. Pengelolaan Data Kepegawaian

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi PNS dalam memperoleh Kelengkapan Administrasi kepegawaian seperti Karsu, Karis, Taspen dan SK Konversi NIP Baru. Sampai triwulan II, BKPSDM telah melayani PNS yang melakukan kelengkapan administrasi kepegawaian sebanyak 85 orang. Dengan rincian, penerbitan Tapera sebanyak 31 orang, Pengurusan Taspen sebanyak 27 orang dan konversi NIP baru sebanyak 4 orang dan Cuti diluar tanggungan negara sebanyak 2 orang dan cuti besar sebanyak 21 orang.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.984.000,- dan terealisasi sampai triwulan II sebesar Rp. 5.235.000,- atau dengan capaian sebesar 52,43% dengan predikat berhasil.

2. Mutasi dan Promosi ASN

Dalam menunjang terlaksananya kegiatan Mutasi dan Promosi ASN didukung oleh beberapa sub kegiatan. Capaian dan realisasi sub kegiatan tersebut dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini:

2.1. Pengelolaan Mutasi ASN

Selama triwulan II tahun 2025, telah dilakukan mutasi antar instansi terhadap ASN sebanyak 17 orang.

Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.4.995.000. Dengan realisasi sampai triwulan II sebesar Rp.3.195.000 capaian sebesar 64 % dengan predikat berhasil.

2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Kegiatan ini dititikkan pada Kenaikan Pangkat bagi ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dilaksanakan dua bulan sekali. Sampai triwulan II, telah dilaksanakan kenaikan pangkat sebanyak 3 periode, yakni periode Februari, April dan Juni. Jumlah PNS yang diproses kenaikan pangkatnya hingga triwulan II tahun 2025 adalah sebanyak 194 orang.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 10.019.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.990.000,- capaian sebesar 30 % .

3. Pengambangan Kompetensi ASN

Dalam menunjang terlaksananya kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN didukung oleh beberapa sub kegiatan. Capaian dan realisasi sub kegiatan tersebut dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini:

3.1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Sampai triwulan II BKPSDM belum bisa melaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah dengan menggunakan Sistem CAT (Computer Assistment Test) Badan Kepegawaian Negara (BKN), karena masih menunggu Jadwal dari BKN Regional XII Pekanbaru. Direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Dengan jumlah peserta yang akan mengikuti ujian dinas sebanyak 35 orang,

dengan rincian Ujian Dinas tingkat II sebanyak 5 orang, ujian dinas tingkat I sebanyak 27 orang, dan UPKP sebanyak 3 orang.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.30.898.950,- belum adanya realisasi anggaran karena kegiatan memang belum dilaksanakan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 terjadi peningkatan ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah. Pada tahun 2024, ASN yang mengikuti ujian dinas sebanyak 23 orang dan ASN yang melaksanakan ujian penyesuaian ijazah sebanyak 3 orang. Pada tahun 2023, jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah berjumlah 21 orang. Dengan rincian ujian dinas sebanyak 17 orang dan penyesuaian ijazah diikuti oleh 4 orang.

Adapun jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah pada tahun 2022 adalah sebanyak 23 orang, dengan rincian: ujian dinas sebanyak 18 orang dan penyesuaian ijazah sebanyak 5 orang.

Sedangkan pada tahun 2021, jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas sebanyak 18 orang dan ASN yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah sebanyak 14 orang.

3.2. Pengelolaan Asessment Center

Kegiatan ini dititikberatkan pada penempatan ASN, pelantikan jabatan struktural dan fungsional, serta pengambilan sumpah janji CPNS dan PPPK yang ada di lingkungan Pemkab Dharmasraya. Sampai triwulan II tahun 2025 telah dilakukan penempatan ASN sebanyak 1 orang, dengan rincian : Pelantikan pejabat Struktural Ess.II sebanyak 1 orang, dan pelaksanaan job fit Pejabat Esselon II sebanyak 23 orang.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 100.593.150,- dan terealisasi sampai triwulan II sebesar Rp57.715.647,- dengan capaian sebesar 57.37 %. Dengan predikat berhasil.

3.3. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

Dalam rangka pengembangan kompetensi ASN telah dilaksanakan pengiriman peserta diklat sebanyak 1 orang.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 687.762.050,- dan realisasi sampai triwulan II sebesar Rp. 21.312.600,- dengan reasisasi sebesar 4 %.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi penurunan karena kurangnya pengajuan dari OPD untuk mengikuti Diklat Teknis dan belum adanya Diklat yang dilaksanakan oleh BKPSDM.

3.4. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Pada tahun 2025 telah diberikan izin belajar bagi 50 orang ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Dengan tugas belajar yang tidak diberhentikan sebanyak 50 orang. Dengan total anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.771.000,- keuangannya belum teralisasi sampai triwulan II sementara kegiatan telah dilaksanakan.

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Dalam menunjang terlaksananya kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur didukung oleh beberapa sub kegiatan. Capaian dan realisasi sub kegiatan tersebut dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini:

4.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Kegiatan ini dalam rangka memfasilitasi ASN dalam Pengelolaan Administasi Kepegawaian seperti penyusunan SKP yang bertujuan untuk melihat prestasi kerja ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya.

Pada tahun 2025, pelaksanaan penilaian SKP dilakukan setiap bulan. Hingga triwulan II, persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu sebesar 86 persen. Selama triwulan II, persentase yang paling rendah adalah pada bulan Juni. Dimana hanya mencapai 57.48 persen. Terkait hal ini BKPSDM telah memberi teguran dan mengirimkan surat kepada masing-masing kepala OPD,

agar menegur ASN di OPD terkait untuk membuat SKP. Selain itu, Tim dari BKPSDM juga melaksanakan coaching clinik ke OPD untuk mempercepat penyusunan skp.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.012.500,- dan terealisasi sampai triwulan II sebesar Rp. 3.203.600,-, atau realisasi sebesar 64% dengan peringkat berhasil.

4.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Tanda Kehormatan atau penghargaan bagi PNS yang Mengabdi dengan masa kerja 10, 20 dan 30 Tahun. Pada tahun 2025 PNS masih dalam proses.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 15.528.500,- dengan realisasi sampai triwulan II sebesar Rp. 4.102.000,- atau realisasi sebesar 26.41 % untuk penyelesaian Administrasinya.

4.3. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan konseling perkawinan bagi PNS dan memberikan rekomendasi izin bagi PNS yang akan menikah, memproses izin perceraian bagi PNS yang mengajukan perceraian serta memproses PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 17.921.000,- dan terealisasi sampai triwulan II sebesar Rp. 9.305.300,- atau realisasi sebesar 52 %

Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan sampai triwulan II ini berjumlah 13 kasus .

B. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

B.1. Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

Kegian ini menitikberatkan pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), dan pelatihan dasar CPNS (latsar).

Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator yang wajib diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pelatihan PKA bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial Jabatan Administrator. Kompetensi yang dikembangkan dalam PKA merupakan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja, yang merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas Jabatan Administrator.

Pelatihan PKA dilaksanakan melalui empat agenda pembelajaran, yaitu: Agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, Agenda kepemimpinan kinerja, Agenda manajemen kinerja, dan Agenda aktualisasi kepemimpinan.

Jumlah anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.032.244.900,- dengan realisasi sampai triwulan II sebesar Rp. 17.769.672,-.atau realisasi sebesar 1,72 %

Pada tahun 2025 triwulan II ini Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) belum dilaksanakan, dan hanya pelatihan dasar CPNS (latsar) dilaksanakan sebanyak 1 orang di PPSDM regional Bukitinggi.

1.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

Berdasarkan realisasi 2023, 2024 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2025, maka proyeksi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi				Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	62,86	83,19	82,21	sedang dalam Penilaian	81,9	82	81,9	82
2	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	100	100	100	0	100	100	100	100
3	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase	50	53	55,3	30,6	56	56,5	56	56,5
4	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Persentase	44	81,9	81,9	6,1	57	58	57	58
5	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	Persentase	63,5	96	94		97	97	97	97
6	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar,Manjerial dan Fungsional	Persentase	23	14,7	26,5	48,6	26	26,5	26	26,5
7	Hasil penilaian AKIP Perangkat Daerah	Indeks	BB	BB (73)	75,95 (BB)	Dalam penilaian	BB	BB	BB	BB
8	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	indeks	82,26	82,26	82,02	Dalam penilaian	81	82	81	82

Tabel 3-2 Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

MATRIK RENJA HASIL INPUTAN SIPD RI

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA (RP)	REALISASI CAPAIAN RENJA (RP) TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA (RP) TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANGAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Mutasi/Kontrakting (Y/ 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							MODELLINI	SEKARAN	RAPID 2025	APRIL 2025	RAPID PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							6.550.000.000,00	6.610.340.000,00	5.650.000.750,00	-2.517.000.250,00							6.750.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6.550.000.000,00	6.610.340.000,00	5.650.000.750,00	-2.517.000.250,00							6.750.000.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							7.194.000.000,00	6.876.444.400,00	5.656.746.000,00	-2.000.000.700,00							6.047.000.000,00	
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keperatnya administrasi pemerintahan				100 persen	100 persen	6.533.000.000,00	4.626.944.700,00	4.650.340.000,00	-33.000.000,00							6.001.000.000,00	
	5.03.01.2.01	Penerbitan Pengangganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Naskah tentang penerbitan, pengangganan dan evaluasi kinerja perangkat daerah				10 dokumen	10 dokumen	44.000.000,00	24.200.000,00	17.070.000,00	-20.801.000,00			Menyiapkan informasi publik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, nomoko, pak, dan pemerintahan	1. Menyajikan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Menyajikan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan informasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Pelaksanaan Dokumen Pemerintahan Perangkat Daerah																		
			Jumlah dokumen Pemerintahan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	44.000.000,00	24.200.000,00	17.070.000,00	-20.801.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	SIMA ALDIRAS UMUM (2022)	Menyiapkan informasi publik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, nomoko, pak, dan pemerintahan	1. Menyajikan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Menyajikan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah				3 dokumen	3 dokumen	4.500.000.000,00	4.730.000.000,00	4.130.200.000,00	-100.700.000,00			Menyiapkan informasi publik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, nomoko, pak, dan pemerintahan	1. Menyajikan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Menyajikan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan informasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang dibiayai Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/Lokasi	30 Orang/Lokasi	4.500.000.000,00	4.730.000.000,00	4.130.200.000,00	-100.700.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	SIMA ALDIRAS UMUM (2022)	Menyiapkan informasi publik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, nomoko, pak, dan pemerintahan	1. Menyajikan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Menyajikan tata kelola pemerintahan yang baik			4.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kelayanan administrasi kantor				5 paket	5 paket	386.000.000,00	150.000.000,00	36.111.000,00	-201.201.000,00			Menyiapkan informasi publik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, nomoko, pak, dan	1. Menyajikan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Menyajikan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan informasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

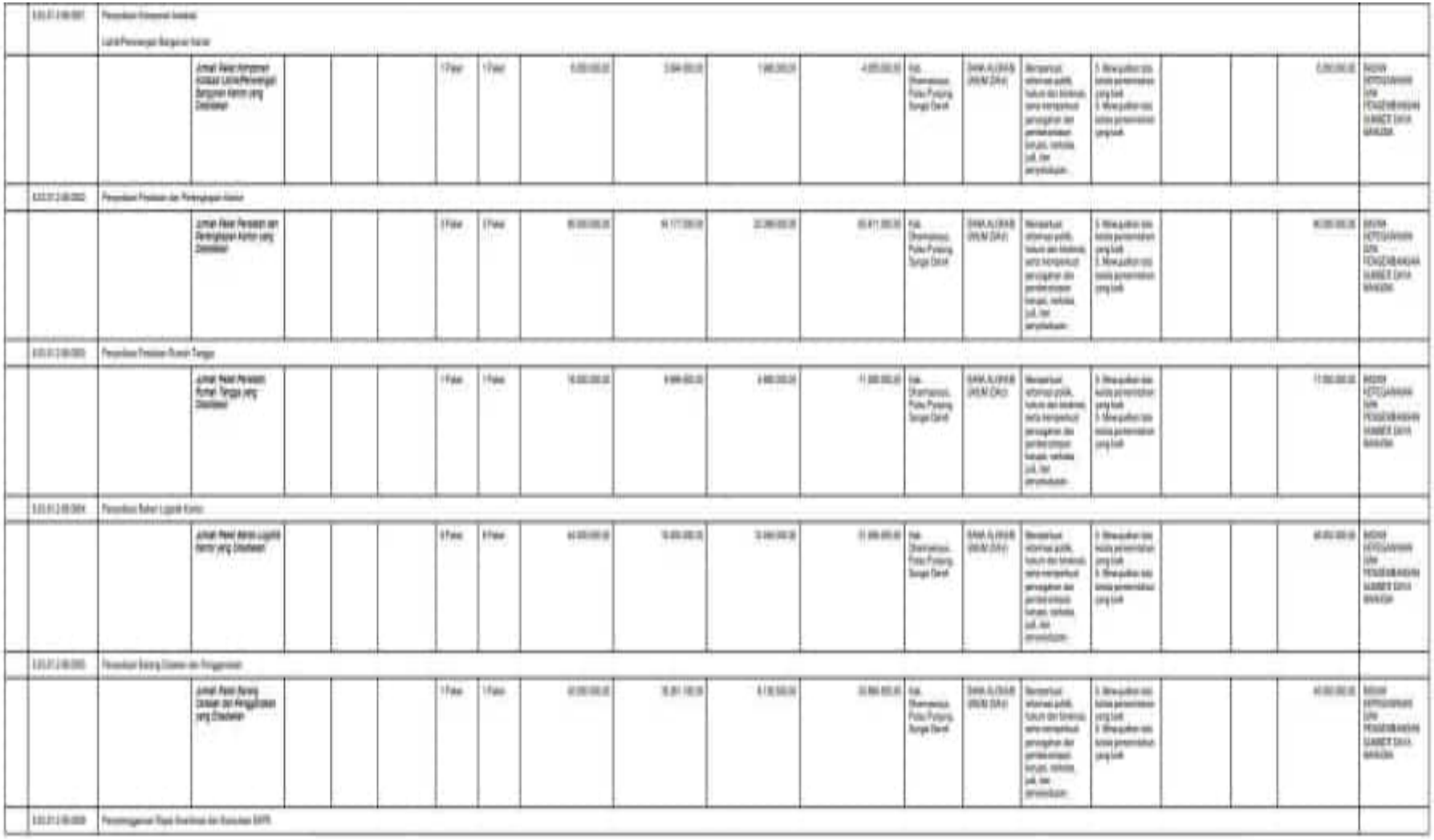

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PROGRAM/ CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERUBAHAN MULO RENCANA TAHUN 2024		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berkesinambungan (Ya/ Tidak)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		RELOKASI DI DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							MENELAN	SESUDAH	RAPBD 2024	APBD 2024	RAPBD PERUBAHAN 2024				DI SESUAI	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Hasil kunjungan dan monitoring (MTE)				1 Laporan	1 Laporan					Kab. Dharmasraya, Sentosa Kecamatan Sentosa Kec/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengutamakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, terrorisme, judi, dan penyalahgunaan	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih				
	6.03.01.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah				3 unit	2 unit							Mengutamakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, terrorisme, judi, dan penyalahgunaan	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan aparatur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			
	6.03.01.2.07.0002	Pengelolaan Administrasi Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah roh Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit					Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengutamakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, terrorisme, judi, dan penyalahgunaan	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih				
	6.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Mebel (Meja yang Disediakan				50 Unit	0 Unit					Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengutamakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, terrorisme, judi, dan penyalahgunaan	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih				
	6.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	0 Unit					Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengutamakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, terrorisme, judi, dan penyalahgunaan	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih				
	6.03.01.2.07.0008	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit					Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengutamakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, terrorisme, judi, dan penyalahgunaan	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih				
	6.03.01.2.09	Pemeliharaan Jalan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana jasa pemeliharaan sarana pemerintah daerah				3 laporan	3 laporan							Mengutamakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, terrorisme, judi, dan penyalahgunaan	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan aparatur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			

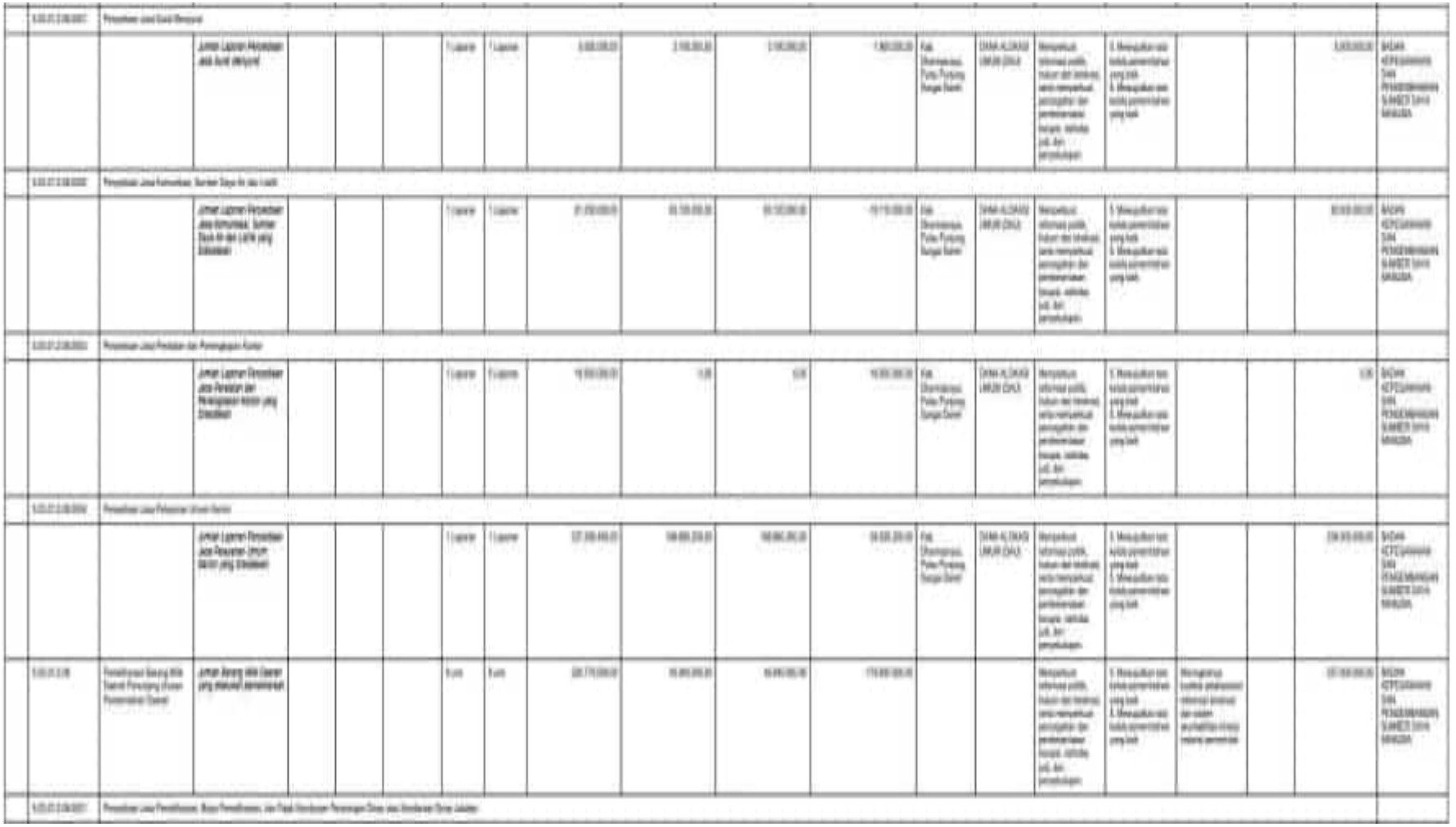

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET (OUTPUT) PERIODE RENSTRA (SPM)	REALISASI CAPAIAN KINERJA SPM TAHUN 2023	PENARIKAN CAPAIAN TARGET KINERJA SPM TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BELUM PENCAPAI TAHUN 2024		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Kenaikan/Penurunan (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KUANTUM	KETERANGAN	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan disediakan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menyediakan informasi publik, hukum dan kedaulatan, serta menyediakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, LGI, dan penyalahgunaan	1. Menyediakan data kerja pemerintahan yang baik 2. Menyediakan data kerja pemerintahan yang baik					
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan disediakan Pajak dan Perlengkapannya				5 Unit	5 Unit	31.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menyediakan informasi publik, hukum dan kedaulatan, serta menyediakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, LGI, dan penyalahgunaan	1. Menyediakan data kerja pemerintahan yang baik 2. Menyediakan data kerja pemerintahan yang baik			31.000.000,00		
	5.03.01.2.06.0006	Pemeliharaan Rumah dan Bukan Lainnya																		
			Jumlah Perawatan dan rawat Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	19.770.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menyediakan informasi publik, hukum dan kedaulatan, serta menyediakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, LGI, dan penyalahgunaan	1. Menyediakan data kerja pemerintahan yang baik 2. Menyediakan data kerja pemerintahan yang baik			19.000.000,00		
	5.03.01.2.06.0005	Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan/Dimanfaatkan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menyediakan informasi publik, hukum dan kedaulatan, serta menyediakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, LGI, dan penyalahgunaan	1. Menyediakan data kerja pemerintahan yang baik 2. Menyediakan data kerja pemerintahan yang baik			150.000.000,00		
2	**5.03.20**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**Persentase ASN yang mengikuti BKI dapat serta Persentase Pensiunan yang telah menerima Jumlah kasus ASN yang ditangani**				**30 50 20 persen pasti punya**	**20 50 10 persen persen Lainnya**	**1.021.000.000,00**	**300.725.000,00**	**300.000.000,00**	**-1.321.725.000,00**							**300.000.000,00**	
	5.03.20.2.01	Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawaian Data	Jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan ASN				200 Dokumen	200 Dokumen	200.000.000,00	101.384.000,00	99.737.750,00	400.262.250,00			Menyediakan informasi publik, hukum dan kedaulatan, serta menyediakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, LGI, dan penyalahgunaan	1. Menyediakan data kerja pemerintahan yang baik 2. Menyediakan data kerja pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		99.000.000,00	
	5.03.20.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen atau Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	46.000.000,00	19.000.000,00	7.750.000,00	37.950.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menyediakan informasi publik, hukum dan kedaulatan, serta menyediakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, LGI, dan penyalahgunaan	1. Menyediakan data kerja pemerintahan yang baik 2. Menyediakan data kerja pemerintahan yang baik			8.000.000,00		

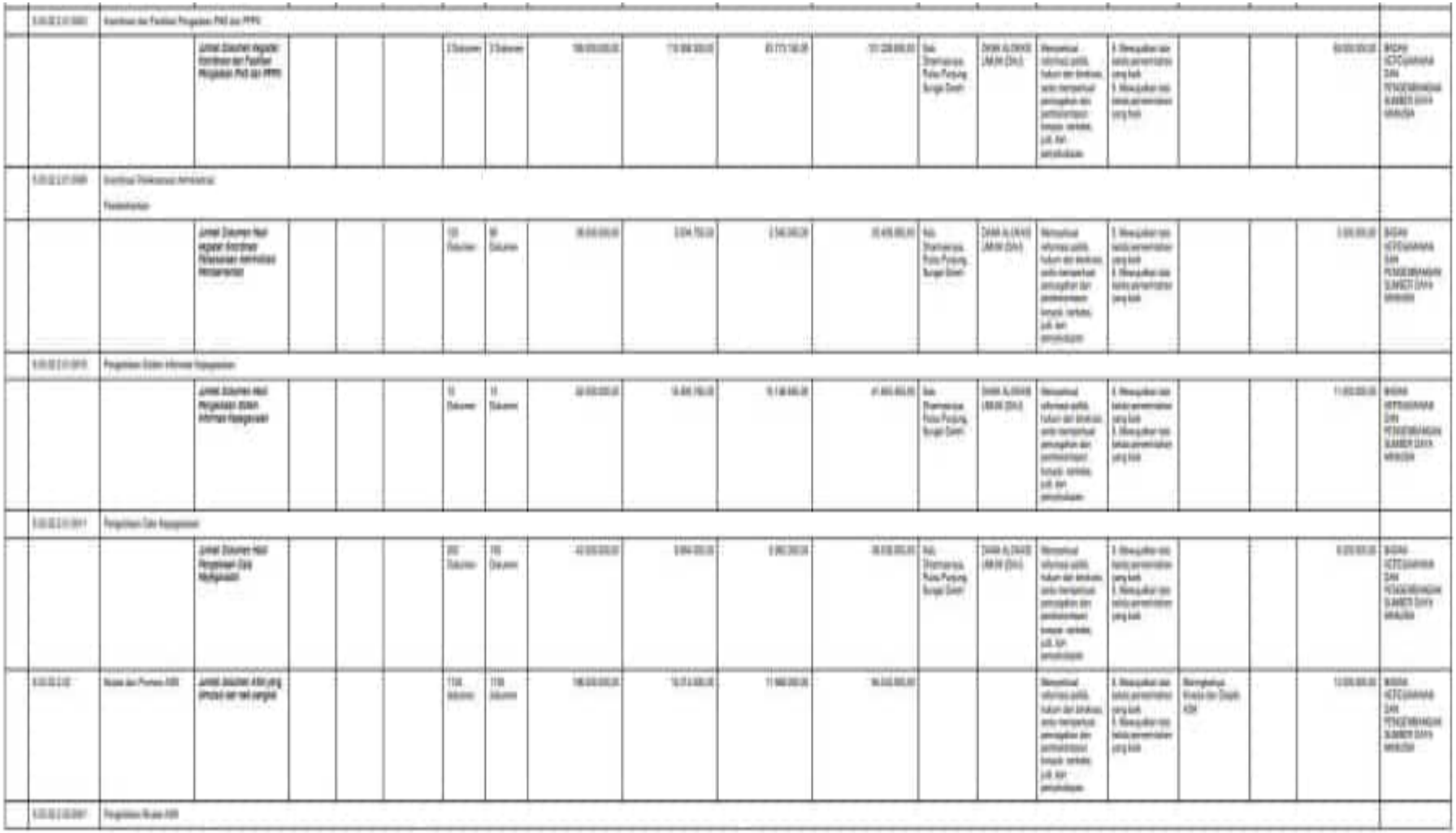

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU PERUBAHAN TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Perkiraan/Berkurang (+/-)	LOKASI	SUMBER Dana	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							BERKURANG	SETELAH	SEBELUM	JUMLAH 2024	SETELAH PERUBAHAN 2024				BULAN(KG)	SASARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasa Jasaboga Angkutan Tinggi Jakarta Administrasi Jakarta Pelaksana dan secara KSH Kota Daerah				Dok Dokumen	Dok Dokumen					Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan informasi publik, hukum dan kinerjanya serta mempertahankan pencegahan dan pemberantasan korupsi, nominasi, judi, dan penyimpangan	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik				
		Pengelolaan Kerahasian Pengisian KSH																		
			Jumlah Pengelolaan Kerahasian Pengisian KSH				Dok Dokumen	Dok Dokumen					Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan informasi publik, hukum dan kinerjanya serta mempertahankan pencegahan dan pemberantasan korupsi, nominasi, judi, dan penyimpangan	2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik				
		Pengembangan Kerahasian KSH	Jumlah KSH yang mengikuti pengembangan Kerahasian				000 orang	000 orang							Mempertahankan informasi publik, hukum dan kinerjanya serta mempertahankan pencegahan dan pemberantasan korupsi, nominasi, judi, dan penyimpangan	2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN			
		Penyelenggaran Kerahasian Kerasa KSH																		
			Jumlah KSH yang Mengikuti Pengembangan				00 Orang	00 Orang					Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan informasi publik, hukum dan kinerjanya serta mempertahankan pencegahan dan pemberantasan korupsi, nominasi, judi, dan penyimpangan	2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik				
		Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				000 Dokumen	000 Dokumen					Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan informasi publik, hukum dan kinerjanya serta mempertahankan pencegahan dan pemberantasan korupsi, nominasi, judi, dan penyimpangan	2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik				
		Pengelolaan Administrasi Data dan Sertifikasi KSH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Data dan Sertifikasi KSH				000 Dokumen	00 Dokumen					Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan informasi publik, hukum dan kinerjanya serta mempertahankan pencegahan dan pemberantasan korupsi, nominasi, judi, dan penyimpangan	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik				

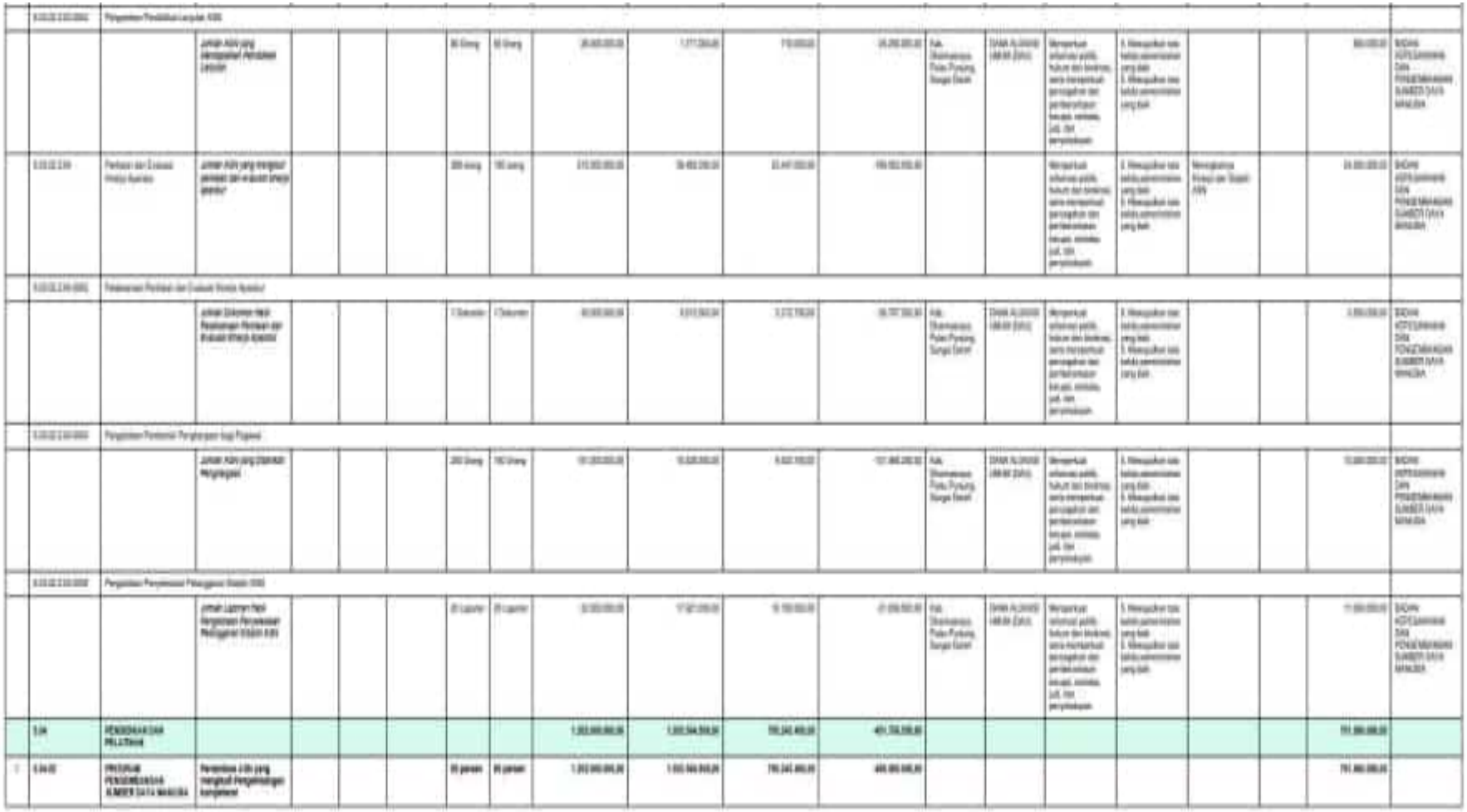

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	

1.2. Perubahan Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 3-3 Perubahan Target Kinerja Tahun 2025

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target Renstra	Target Renja PD 2025	
			2022	2023	2024	2025	awal	Perubahan
1	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	62,86	82,35	81,6	81,7	81,7	81,7
2	Persentase Perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	50	53	55,3	55	55	55
4	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Persen	44	81,9	81,9	56	56	56
5	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	Persen	63,5	96	94	97	97	97
6	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional.	Persen	23	14,7	26,5	25,5	25,5	25,5
7	Hasil penilaian AKIP perangkat daerah	Bobot	BB	BB (73,22)	BB (75,95)	BB	BB	BB
8	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	Indeks	82,26	82,26	82,02	83	83	83

BAB 5
PENUTUP

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan OPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis OPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan OPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perubahan tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2025 sampai triwulan II, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN TAHUN 2025

INSPEKTORAT

Pulau Punjung, Agustus 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat, dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas dari Kolusi, Korupsi serta Nepotisme. Rencana Kerja Perubahan akan dijabarkan lebih lanjut mengenai program, kegiatan dan target masing-masing.

Sangat disadari adanya keterbatasan isi dokumen ini sebagai acuan untuk mendukung keberhasilan dalam pengawasan dan pembinaan suatu instansi pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya tidak menutupi kemungkinan terjadinya penyempurnaan-penyempurnaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Pulau Punjung, Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN DHARMASRAYA

Drs. ANDY SUMANTO, CFrA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681220 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat 7

2.2 Analisis Kinerja Inspektorat 13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat 14

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH 15

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 15

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat 15

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 18

BAB V PENUTUP 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya, dengan kata lain, pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.

Kewenangan daerah yang luas mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan negara, mulai dari perencaaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dane valuasi. Fungsi manajemen senantiasa berjalan secara simultan dan proporsional dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi.

Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sudah semestinya berjalan Sinergis dengan Pemerintahan Pusat secara konsisten.

Secara Yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Perubahan Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dibidang pengawasan, agar mampu eksis dan bertahan dalam persaingan yang semakin kuat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Inspektorat Kabupaten Dharmasraya terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tesebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan kerja merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dewasa ini, karena pencapaian kerja merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat untuk mengimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rencana kerja perubahan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi. Peluang dan kendala yang ada mungkin timbul. Rencana Kerja Perubahan mengandung visi, misi, tujuan, strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
10. (aturan teknis tentang urusan masing2)

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Dharmasraya secara berkesinambungan.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

1. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya hingga Tahun 2025 dan prediksi Tahun 2026;
2. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah;

4. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran;
5. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Inspektorat, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Inspektorat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Inspektorat Tahun 2024 dan Realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Inspektorat Tahun 2023. Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai reviu hasil evaluasi pelaksananaan renja inspekorat dan perkiraan pencapaian kinerja. Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Inspektorat selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun lalu dapat dikemukakan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Lebih mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi dibidang pengawasan terhadap instansi/unit kerja, sehingga dapat tercipta pemahaman yang sama tentang pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
2. Lebih mengefektifkan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) oleh masing-masing organisasi terhadap bawahannya, sehingga dapat teridentifikasi kesalahan secara dini dan diperbaiki serta tidak menjadi masalah/penyimpangan yang mengarah pada tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan, dengan cara menambah dari anggaran Inspektorat Kabupaten Dharmasraya maupun mengajukan kepada Bupati Dharmasraya melalui program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Dharmasraya.
4. Upaya Penambahan pegawai pada Inspektorat dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pengawasan maupun kegiatan perencanaan.
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengawasan, melalui sosialisasi secara langsung maupun melaui media massa baik cetak maupun elektronika.

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Dharmasraya telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Inspektorat Kabupaten Dharmasraya memperolah dana yang bersumber dari APBD dan telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2023 termasuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.5.767.632.900 terdiri dari belanja Operasional sebesar Rp.5.163.132.900 dan belanja Modal sebesar Rp.604.500.000

Realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kapabilitas APIP	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 177.381.200	Rp 173.098.300	97,59%
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 62.451.000	Rp 62.410.000	99,93%
		Reviu Laporan Kinerja	Rp 36.901.000	Rp 36.860.000	99,89%
		Reviu Laporan Keuangan	Rp 68.752.000	Rp 68.677.200	99,89%
		Pengawasan Desa	Rp 132.666.800	Rp 132.488.600	99,87%
		Kerjasama Pengawasan Internal	Rp 88.538.200	Rp 88.440.300	99,89%
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp 53.558.800	Rp 53.480.000	99,85%

		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp 45.550.600	Rp 45.310.000	99,47%
2	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rp 97.675.400	Rp 92.433.700	94,63%
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 200.496.400	Rp 200.400.100	99,95%
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp 95.897.000	Rp 94.340.400	98,38%
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp 107.501.400	Rp 107.442.700	99,95%
3	Nilai AKIP perangkat Daerah Inspektorat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 69.864.800	Rp 69.847.584	99,98%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 160.893.000	Rp 159.886.664	99,37%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 7.633.000	Rp 7.630.000	99,96%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 45.485.000	Rp 45.483.300	100,00%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 33.160.000	Rp 33.151.305	99,97%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 28.018.000	Rp 28.012.000	99,98%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.680.000	Rp 1.120.000	66,67%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 189.463.600	Rp 188.446.489	99,46%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 604.500.000	Rp 604.500.000	100,00%
		Penyediaan Jasa Surat	Rp 1.700.000	Rp 1.700.000	100,00%

		Menyurat			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 96.373.700	Rp 89.016.035	92,37%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp12.990.000	Rp12.986.735	99,97%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 217.349.000	Rp 200.419.200	92,21%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp16.000.000	Rp15.971.835	99,82%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 64.000.000	Rp 63.900.770	99,84%
Jumlah			**0**	**0**	

2.2. Analisis Kinerja Inspektorat Tahun 2024

Sesuai dengan Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Dharmasraya yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka untuk mengetahui Kinerja Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Dharmasraya untuk optimalisasi fungsi konstruktif pengawasan adalah :

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatkan Kapasitas, Kewenangan dan Komptensi SDM APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%	Sangat Berhasil
Meningkatkan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	3	2,994	99,8%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat Daerah	indeks	77	76.73	99%	Sangat Berhasil
	Nilai PMRB Perangkat Daerah	indeks				

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Isu Strategis dalam rangka perwujudan peran APIP yang Efektif adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran Perangkat Derah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan oleh pihak internal dan eksternal.
2. Masih terdapatkan temuan hasil Pemeriksaan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi.
3. Belum optimalnya penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Pemerintah Daerah
4. Belum optimalnya implementasi SAKIP di Lingkungan Perangkat Daerah
5. Masih ada Perangkat Daerah/unit kerja yang belum tertib dalam pengelolaan barang milik daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah diharapkan mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 pada tahap III.

Dari analisis hasil pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2024 masih terdapat tingginya tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik yang bersifat administrasi maupun bersifat keuangan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pasal11 yang menyatakan Perwujudan peran aparat pengawasan internpemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus:

a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraantugas dan fungsi Instansi Pemerintah
c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

Dari amanat peraturan pemerintah tersebut terlihat jelas bahwa APIP mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk melaksanakan pembinaaan terhadap institusi pemerintahan daerah dalam bentuk memberikan ***Advice*** baik pada tahap pemeriksaan maupun dalam proses/kegiatan ***Consulting*** yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan ***Quality Assurance*** bahwa pengelolaan kegiatan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Dharmasraya merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu: , yaitu: “**Mendorong peningkatkan tata kelola pemerintah daerah melalui optimalisasi fungsi pengawasan** “

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran di rancang Indikator Sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian target. Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP;
2. Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

INSPEKTORAT

TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Nama OPD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2026	
			Lokasi	target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	8	9	10
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**7.489.221.150**			
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**Inspektorat**	**100 persen**	**5.948.592.300**			
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia**	**Inspektorat**	**4 Dokumen**	**56.867.500**			
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	Inspektorat	4 Dokumen	56.867.500			
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terkelolanya administrasi keuangan PD**	**Inspektorat**	**39 Orang**	**4.387.128.000**			
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	39 Orang	4.387.128.000			
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Aparatur yang dilatih	Inspektorat	39 Orang	**539.870.000**			
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang dilatih	Inspektorat	39 Orang	539.870.000			
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	12 bulan	**304.166.000**			-
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	8 Paket	6.380.000			-
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	10 Paket	43.162.000			-
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	2 Paket	19.085.000			
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	5 Paket	12.496.000			-
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat	2 Paket	10.000.000			-

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2026	
			Lokasi	target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	8	9	10
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan yang tersedia	Inspektorat	0 Laporan	-			
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	20 Laporan	213.043.000			-
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Inspektorat	38 Unit	**154.100.000**			-
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	0 Unit	-			-
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Inspektorat	20 unit	18.800.000			
6.01.01.2.07.05	Pengadaan peralatan dan mesian lainnya	Tersedianya peralatan dan mesian lainnya	Inspektorat	9 unit	135.300.000			-
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	12 bulan	**339.940.600**			
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	12 Laporan	2.000.000			
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	12 Laporan	109.667.600			
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	0 Laporan	-			
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelolaan administrasi keuangan dan honorarium Non PNS yang tersedia	Inspektorat	12 Laporan	228.273.000			
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	23 Unit	**166.520.200**			
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	9 Unit	12.500.000			-
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Inspektorat	16 Unit	58.500.000			-
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Inspektorat	59 Unit	27.200.000			
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat	1 Unit	68.320.200			

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2026	
			Lokasi	target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	8	9	10
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Inspektorat**	**117 Dokumen**	**915.890.700**			
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Terlaksananya Pengawasan Internal**	**Inspektorat**	**105 Dokumen**	**803.816.550**			
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	5 laporan	99.150.000			
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	23 laporan	102.788.800			
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	10 Laporan	114.226.250			
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	14 Laporan	101.595.450			
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Inspektorat	24 laporan	115.410.050			
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Inspektorat	12 Kesepakatan	147.608.000			
6.01.02.2.01.07	Monitoring danb Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	15 dokumen	123.038.000			
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat	Inspektorat	12 Laporan	**112.074.150**			
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya Penelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat	5 laporan	64.691.650			
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	12 laporan	47.382.500			
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi**	Inspektorat	**16 Dokumen**	**624.738.150**			-
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Terlaksananya perencanaan pengawasan dengan baik**	**Inspektorat**	**1 Rekomendasi**	**105.745.000**			-
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	1 Rekomendasi	105.745.000			-
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Terlaksananya pendampingan dan asistensi**	**Inspektorat**	**15 dokumen**	**518.993.150**			-

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2026	
			Lokasi	target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	8	9	10
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	5 Perangkat Daerah	147.519.000			-
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	5 Perangkat Daerah	137.619.000			-
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	5 Kegiatan	233.855.150			-
					7.489.231.150			

Pulau Punjung, 2024

INSPEKTUR

Dr. ANDI SUMANTO, CFrA
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP. [illegible]220 199009 1 001

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun sebagai upaya untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahap III dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan pembangunan baik yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahap III maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan semua pihak.

Dukungan berupa kerjasama yang baik sangat kami harapkan, sehingga terwujudnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang bersih dan berwibawa akan lebih cepat tercapai.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA) PERUBAHAN
KECAMATAN PULAU PUNJUNG
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1. 1

1.1. 1
1.2. 1
1.3. 2
1.3.1. 2
1.3.2. 2
1.4. 3

BAB 2. 1

2.1. 1
2.2. 5
2.3. 13
2.3.1. 13
2.3.2. **Error! Bookmark not defined.**
2.4. **Error! Bookmark not defined.**
2.4.1. **Error! Bookmark not defined.**
2.4.2. **Error! Bookmark not defined.**

BAB 3. 1

3.1. **Error! Bookmark not defined.**
3.1.1. **Error! Bookmark not defined.**
3.1.2. **Error! Bookmark not defined.**
3.2. 1

BAB 4. 1

4.1. 1
4.2. 3

BAB 5. 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-165 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 2-8
Tabel 2-166 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2025 2-11
Tabel 5-1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 3-2
Tabel 6-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 4-2
Tabel 6-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya 4-6

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah(Renja PD) Tahun 2025 serta pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pulau Punjung secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pulau Punjung hingga Tahun 2025 dan prediksi Tahun 2026
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulau Punjung, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pulau Punjung, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pulau Punjung

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB 2. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU*

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada sub bab ini menyajikan tabel e.60 evaluasi terhadap hasil capaian rkpd tahun 2023 (terlampir), serta dilengkapi dengan narasi tentang capaian pelaksanaan sub kegiatan dan target indikator program dan indikator kegiatan selama tahun 2023.

Tabel T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DABRAH s/d TAHUN
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Kurun sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TINGKAT PROGRAM KEGIATAN DAN URUSAN PERANGKAT DAERAH TAHUN (2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (akhir Tahun 2025)		TABEL BANTU	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2024)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2024)	TINGKAT REALISASI (%)		PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (akhir Tahun 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9+7+6)	11=(10/4)	12	13
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										Kecamatan Pulau Punjung	1
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	80				#DIV/0!		0	0	Kecamatan Pulau Punjung	1
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85				#DIV/0!		0	0	Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Kecamatan Pulau Punjung	1
	Penyusunan Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan										Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										Kecamatan Pulau Punjung	1
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3				#DIV/0!		0	0	Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.863.127.980	1.885.213.000	1.818.508.317	98%	1.898.530.869	1.850.027.189		#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.863.127.980	1.885.213.000	1.818.508.317	98%	1.898.530.869	1.850.027.189		#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.863.127.980	1.885.213.000	1.818.508.317	98%	1.898.530.869	1.850.027.189		#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terlaksanya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	21	1.863.127.980	1.885.213.000	1.818.508.317	98%	1.898.530.869	1.579.167.136	288.974.636	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			103.160.700	145.118.500	143.047.975	139%		98.072.000	57.891.700	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Penyedia Komponen Listrik, air dan lainnya			1.887.600	1.991.000	1.936.500	103%		987.000	950.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi			1.887.600	1.991.000	1.936.500	103%		987.000	950.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bersumber Dana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bersumber Dana (Paket)	1	1.887.600	1.991.000	1.936.500	103%		987.000	-1.811.100	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.360.000	18.826.000	16.605.995	91%		8.000.000	7.968.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terselenggaranya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	18.360.000	18.826.000	16.605.995	91%		8.000.000	-42.906.995	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			9.000.100	6.636.095	6.586.000	73%		3.204.000	3.148.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terselenggara Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	9.000.100	6.636.095	6.586.000	73%		3.204.000	18.810.100	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.500.000	34.900.000	34.898.000	259%		14.980.000	14.980.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terselenggara Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	13.500.000	34.900.000	34.898.000	259%		14.980.000	63.378.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.500.000	10.610.000	10.370.000	77%		5.298.500	5.298.500	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terselenggara Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	13.500.000	10.610.000	10.370.000	77%		5.298.500	28.268.500	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			46.963.000	74.153.500	72.580.380	154%		25.583.000	25.317.700	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	46.963.000	74.153.500	72.580.380	154%		25.583.000	145.096.380	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			38.000.000	0	0	0%		0	0	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya			38.000.000	0	0	0%		0	0	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya			38.000.000	0	0	0%		0	0	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terselenggara Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainya yang Disediakan (Unit)	1	38.000.000	0	0	0%		0	38.000.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			173.360.930	183.222.000	170.114.074	98%		129.089.080	119.914.722	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			173.360.930	183.222.000	170.114.074	98%		129.089.080	119.914.722	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000	1.500.000	1.500.000	75%		2.000.000	2.000.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terlaksanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2.000.000	1.500.000	1.500.000	75%		2.000.000	5.500.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.000.000	9.500.000	9.481.004	158%		9.500.260	9.481.572	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terselenggara Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	6.000.000	9.500.000	9.481.004	158%		9.500.260	28.981.264	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.440.000	3.330.000	3.300.000	74%		3.830.000	3.780.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terselenggara Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4.440.000	3.330.000	3.300.000	74%		3.830.000	11.570.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			165.920.930	168.892.000	165.925.090	97%		113.758.820		#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terselenggara Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	165.920.930	168.892.000	165.925.090	97%		113.758.820	104.683.192	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.500.000	16.000.000	16.777.830	108%		16.000.000		#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.500.000	16.000.000	16.777.830	108%		16.000.000		#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			11.500.000	14.000.000	13.451.500	117%		14.000.000	14.000.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terselenggara Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	11.500.000	14.000.000	13.451.500	117%		14.000.000	38.951.500	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.000.000	4.000.000	3.326.100	83%		5.000.000	4.378.300	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terselenggara Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	4.000.000	4.000.000	3.326.100	83%		5.000.000	12.326.100	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**7.300.000**	**4.580.000**	**4.580.000**	63%		**4.680.000**	**4.680.000**	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85				#DIV/0!		0	0	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7.300.000	4.580.000	4.580.000	63%		4.680.000	4.680.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan			7.300.000	4.580.000	4.580.000	63%		4.680.000	4.680.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tersisa	Pelayanan Perizinan Non Usaha		6.880.000	4.080.000	4.080.000	60%		4.080.000	4.080.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tersisa dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	6.880.000	4.080.000	4.080.000	60%		4.080.000	14.960.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tersisa dengan Kegiatan			500000	500.000	500.000	100%		600.000	600.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tersisa dengan Rekomendasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rekomendasi pada Urusan Pemerintahan	12	500000	500.000	500.000	100%		600.000	600.000	50.000 Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12.080.000**	**47.685.000**	**47.370.000**	392%		**11.600.000**		#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85				#DIV/0!		0		0 Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.080.000	47.685.000	**47.370.000**	392%		**11.600.000**	11.600.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.080.000	47.685.000	**47.370.000**	392%		**11.600.000**	11.600.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.03.2.01.0001	Penyelenggaraan Perasipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			12.080.000	47.685.000	**47.370.000**	392%		**11.600.000**	11.600.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	12.080.000	47.685.000	**47.370.000**	392%		**11.600.000**	71.050.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	100%		**2.700.000**	**3.360.000**	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Penduduk Yang Merasa Aman Berusaha Sepanjang di Area Tempat	85				#DIV/0!		0		0 Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.04.2.02	Koordinasi Pelayanan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			2.700.000	2.700.000	**2.700.000**	100%		**2.700.000**	**3.360.000**	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Koordinasi Pelayanan dan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			2.700.000	2.700.000	**2.700.000**	100%		**2.700.000**	**3.360.000**	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Perundang-Undangan daerah/Kepolisian Negara Republik Indonesia			2.700.000	2.700.000	**2.700.000**	100%		**2.700.000**	**3.360.000**	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan daerah/Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan daerah/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	2.700.000	2.700.000	**2.700.000**	100%		**2.700.000**	8.100.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**10.580.000**	**5.700.000**	**5.700.000**	54%		**5.700.000**	**5.700.000**	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan nagari	Persentase nagari yang telah dikunjungi pengawasan dan	100	10.580.000	5.700.000	**5.700.000**	54%		**5.700.000**	21.560.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi			10.580.000	5.700.000	**5.700.000**	54%		**5.700.000**	**5.700.000**	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			10.580.000	5.700.000	**5.700.000**	54%		**5.700.000**	**5.700.000**	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			10.580.000	5.700.000	**5.700.000**	54%		**5.700.000**	**5.700.000**	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1
	Terlaksanya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam (Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1	10.580.000	5.700.000	**5.700.000**	54%		**5.700.000**	21.560.000	#DIV/0! Kecamatan Pulau Punjung	1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan

Sasaran 1

Meningkatkan Kinerja Penyelengaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

1. Indikator kinerja utama perangkat daerah Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP

Pada indikator ini merujuk kepada Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada ukuran kinerja yang menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga lainnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur operasional standar

Interpretasi dari indikator ini tergantung dari bebrapa interpretasi diantaranya ;

1. **Persentase Ketepatan Waktu**: Ini adalah rasio antara jumlah pelayanan yang dilakukan tepat waktu dengan total jumlah pelayanan yang dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu, diukur dalam persentase. Ketepatan waktu biasanya diukur dengan membandingkan waktu penyelesaian pelayanan dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam SOP.
2. **Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan**: Merujuk pada jenis pelayanan yang diberikan oleh instansi atau lembaga tersebut. Pelayanan perizinan mencakup proses pemberian izin, lisensi, atau persetujuan dari pemerintah atau badan lainnya, sementara pelayanan non-perizinan mencakup layanan yang tidak memerlukan izin atau persetujuan khusus, seperti pelayanan informasi, konsultasi, atau pelayanan administratif lainnya.
3. **Standar Operasional Prosedur (SOP)**: Merupakan pedoman atau aturan yang mengatur tata cara dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan suatu proses atau kegiatan tertentu. SOP biasanya mencakup detail tentang prosedur, waktu yang dibutuhkan, tanggung jawab, dan langkah-langkah kualitas lainnya untuk memastikan konsistensi dan kinerja yang optimal dalam penyediaan layanan.

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator kinerja utama perangkat daerah Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	%	-	-	80	80	80
Variabel Persentase Ketepatan Waktu						
Variabel Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan						
Variabel Standar Operasional Prosedur (SOP)						

Dengan demikian, Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan sesuai SOP adalah ukuran kinerja yang menggambarkan sejauh mana suatu lembaga atau instansi pemerintah memenuhi waktu penyelesaian pelayanan yang telah ditetapkan dalam SOP, baik untuk layanan yang bersifat perizinan maupun non-perizinan. Dalam pelaksanaan indicator ini dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan mengingat selalu diadakannya perbaikan dari berbagai aspek.

2. Indikator kinerja utama perangkat daerah *Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD*

Pada indikator ini merujuk pada seberapa besar usulan atau hasil kesepakatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan yang akhirnya diikutsertakan atau dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator ini mengacu kepada proporsi atau persentase dari hasil Musrenbang yang berhasil diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan kerja Pemerintah Daerah yang lebih formal, yaitu RKPD. Hal ini menunjukkan sejauh mana aspirasi masyarakat atau stake holders lokal tercermin dan dijadikan bagian dari RKPD yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu.

Interpretasi dari indikator ini tergantung dari bebrapa interpretasi diantaranya ;

1. **Prioritas Pembangunan**: Hasil musrenbang menjadi acuan dalam menetapkan prioritas pembangunan di daerah tersebut. Program dan kegiatan yang telah disepakati dalam musrenbang kemudian diakomodasi dalam RKPD sebagai bagian dari agenda pembangunan tahunan.
2. **Legitimasi Partisipatif**: RKPD yang memuat hasil musrenbang menunjukkan adanya aspek partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak dalam musrenbang memberi legitimasi atas prioritas dan program pembangunan yang disepakati.
3. **Keterhubungan Antara Musrenbang dan RKPD**: Inklusi hasil musrenbang dalam RKPD menunjukkan adanya keterhubungan yang erat antara proses perencanaan partisipatif dengan dokumen perencanaan resmi pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung dihubungkan dengan rencana kerja pemerintah.
4. **Pertanggungjawaban Publik**: Dengan memuat hasil musrenbang dalam RKPD, pemerintah daerah menunjukkan keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap publik. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD merupakan komitmen yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5. **Pembangunan Berkelanjutan**: Dalam interpretasi yang lebih luas, hasil musrenbang yang ditampung dalam RKPD diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan karena mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat yang diintegrasikan ke dalam rencana kerja pemerintah.

Tabel 2-1Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator *Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD*	%	-	-	60	60	60
Variabel Program dan Kegiatan Pembangunan						
Variabel Sumber Daya						
Variabel Prioritas Pembangunan						
Variabel Partisipasi Masyarakat						

Sumber : RENJA Tahun 2024

Dengan demikian, interpretasi dari persentasi hasil musrenbang yang ditampung dalam RKPD mencakup aspek-aspek partisipatif, keterhubungan antara perencanaan partisipatif dengan dokumen resmi perencanaan pemerintah, serta pertanggungjawaban publik dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada perkembangan dalam beberapa Tahun belakangan mengindikasikan sudah makin tingginya usulan yang ditampung dalam RKPD dengan cara mengerucutkan kembali usulan menjadi skala prioritas yang lebih sedikit namun bisa terakomodir dalam RKPD.

3. Indikator kinerja utama perangkat daerah Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Pulau Punjung

Indikator ini merujuk kepada merujuk pada data atau statistik tentang jumlah insiden atau gangguan terkait dengan ketertiban umum (trantibum) yang dikelola atau ditangani di suatu wilayah administratif, dalam hal ini wilayah Kecamatan Pulau Punjung.

Interpretasi dari indikator ini tergantung dari bebrapa interpretasi diantaranya ;

1. **Jumlah Gangguan Trantibum**: Ini merujuk pada jumlah insiden atau kejadian yang melibatkan gangguan terhadap ketertiban umum di suatu wilayah tertentu. Gangguan tersebut dapat berupa berbagai jenis pelanggaran atau tindakan yang mengganggu ketertiban sosial, seperti perkelahian, perusakan harta benda, tindak kejahatan, ataubencana alam dan pelanggaran aturan lainnya.
2. **Ditangani di Wilayah Kecamatan Pulau Punjung**: Ini menunjukkan bahwa gangguan tersebut terjadi atau dikelola di wilayah administratif tertentu, yaitu Kecamatan Pulau Punjung. Kecamatan adalah unit administratif di bawah kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, termasuk masalah-masalah terkait ketertiban umum.

Tabel 2-2Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator *Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Pulau Punjung*	**Kasus**	**-**	**-**	**3**	**3**	**3**
Variabel Jumlah Gangguan Trantibum						

Sumber : RENJA Tahun 2024

Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Pulau Punjung" adalah data tentang jumlah insiden atau kejadian yang mengganggu ketertiban umum yang dikelola atau ditangani di wilayah administratif Kecamatan Pulau Punjung. Dalam beberapa tahun belakangan ada beberapa jenis gangguan trantibum yang terjadi di Kecamatan Pulau Pujung namun gangguan tersebut bisa ditangani berkat koordinasi dan kerjasama lintas lembaga.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Indikator kinerja utama perangkat daerah Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Pulau Punjung

Indikator ini merujuk kepada penilaian AKIP yang mencakup berbagai aspek kinerja instansi pemerintah, seperti manajemen keuangan, efektivitas program dan kegiatan, akuntabilitas, transparansi, dan aspek-aspek lain yang relevan. Hasil penilaian ini dapat berupa laporan yang mencakup temuan-temuan, rekomendasi, serta evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah

Interpretasi hasil penilaian AKIP (Audit Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Pulau Punjung dapat bervariasi tergantung pada temuan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa.

1. **Kinerja Keuangan**: Jika hasil penilaian menunjukkan kinerja keuangan yang baik, hal ini bisa diartikan bahwa pengelolaan keuangan Kecamatan Pulau Punjung telah dilakukan dengan baik, termasuk pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan yang akurat, dan penggunaan anggaran yang efisien.
2. **Efektivitas Program dan Kegiatan**: Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pulau Punjung efektif, hal ini menunjukkan bahwa program-program tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas**: Jika hasil penilaian menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, ini menandakan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di Kecamatan Pulau Punjung dilakukan secara terbuka dan akuntabel kepada masyarakat, dengan penyampaian informasi yang jelas dan tersedia bagi publik.
4. **Kepatuhan Terhadap Aturan dan Regulasi**: Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa Kecamatan Pulau Punjung telah mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, hal ini menandakan bahwa instansi tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari potensi risiko pelanggaran hukum.
5. **Rekomendasi Perbaikan**: Jika hasil penilaian mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, interpretasi dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional Kecamatan Pulau Punjung melalui implementasi rekomendasi yang diberikan

Tabel 2-3Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Pulau Punjung	**Nilai**	**-**	**-**	60.7 B	64.56 B	68.42 B

Semenjak ditetapkan dalam indikator kinerja pada RENSTRA 2021-2026 Nilai AKIP Kecamatan Pulau Punjung tiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini tidak lepas dari perbaikan perbaikan yang dilakukan baik secara administratif atau non administratif.

5. Indikator kinerja utama perangkat daerah Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Pulau Punjung

Definisi indikator ini merujuk kepada Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Pulau Punjung merujuk pada evaluasi internal yang dilakukan terhadap implementasi program-program reformasi birokrasi

Interpretasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Pulau Punjung akan sangat tergantung pada temuan spesifik dalam evaluasi tersebut.

1. **Efektivitas Implementasi Program**: Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa program-program reformasi birokrasi telah diimplementasikan dengan baik, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa Kecamatan Pulau Punjung telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja birokrasi lokal.
2. **Peningkatan Efisiensi dan Transparansi**: Jika hasil penilaian menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik dan peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, ini dapat diinterpretasikan sebagai tanda positif bahwa reformasi birokrasi telah berhasil mendorong perubahan yang diinginkan.
3. **Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholder**: Jika hasil penilaian menunjukkan tingkat partisipasi dan keterlibatan yang tinggi dari berbagai pihak, termasuk staf pemerintah, pemimpin lokal, dan masyarakat, ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi dukungan yang kuat untuk reformasi birokrasi.
4. **Tantangan dan Hambatan**: Jika hasil penilaian mengidentifikasi tantangan atau hambatan dalam implementasi reformasi birokrasi, ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Interpretasi ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi lebih lanjut dalam mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi.
5. **Rekomendasi Perbaikan**: Jika hasil penilaian menyertakan rekomendasi perbaikan, ini dapat diinterpretasikan sebagai arahan bagi Kecamatan Pulau Punjung untuk fokus pada area-area tertentu yang memerlukan perbaikan lebih lanjut dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. **Keselarasan dengan Tujuan Nasional**: Interpretasi juga dapat mencakup evaluasi sejauh mana hasil penilaian tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah.

Tabel 2-4Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator kinerja utama perangkat daerah Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Pulau Punjung	**Nilai**	**-**	**-**	-	-	-

6. Indikator kinerja utama perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat

Definisi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merujuk kepada sebuah metrik atau indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap layanan atau kinerja suatu pemerintah, lembaga, atau organisasi tertentu. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat menilai kualitas layanan yang diberikan, kinerja organisasi, atau pemenuhan kebutuhan dan harapan mereka.

Interpretasi Indeks Kepuasan Masyarakat melibatkan analisis terhadap data yang dihasilkan dari survei atau metode pengukuran lainnya untuk memahami persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan atau kinerja yang diukur

1. **Analisis Skor Rata-rata**: Jika indeks kepuasan menggunakan skala tertentu (misalnya, skala 1-5), langkah pertama adalah menghitung skor rata-rata dari semua responden. Skor rata-rata ini mencerminkan kepuasan rata-rata masyarakat terhadap layanan atau kinerja yang diukur.
2. **Klasifikasi Kepuasan**: Berdasarkan skor rata-rata, dapat diklasifikasikan tingkat kepuasan masyarakat. Misalnya, skor di atas 4 dapat dianggap sebagai tingkat kepuasan tinggi, skor antara 3-4 sebagai kepuasan sedang, dan skor di bawah 3 sebagai kepuasan rendah.
3. **Analisis Distribusi**: Selain skor rata-rata, penting untuk menganalisis distribusi skor untuk memahami seberapa merata persepsi kepuasan di antara responden. Misalnya, apakah sebagian besar responden memberikan skor tinggi atau terdapat variasi besar dalam skor yang diberikan?
4. **Perbandingan dengan Standar atau Target**: Hasil indeks kepuasan dapat dibandingkan dengan standar atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah hasil indeks tersebut mencapai target yang ditetapkan? Jika tidak, apa penyebabnya dan bagaimana langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil?

5. **Analisis Sub-grup**: Penting untuk melakukan analisis sub-grup untuk memahami apakah ada perbedaan dalam kepuasan antara kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, atau latar belakang sosial-ekonomi. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi ketidaksetaraan dalam akses atau kepuasan layanan.
6. **Trend dan Perubahan dari Waktu ke Waktu**: Jika survei dilakukan secara berkala, penting untuk melihat trend dan perubahan dari waktu ke waktu dalam indeks kepuasan masyarakat. Apakah ada peningkatan atau penurunan signifikan dari periode sebelumnya? Apa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan tersebut?
7. **Interpretasi Kualitatif**: Selain data kuantitatif, penting juga untuk memperhatikan informasi kualitatif, seperti komentar atau umpan balik dari responden, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat.

Tabel 2-5Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator kinerja utama perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	**Nilai**			88.33	90.16	89.85

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu strategis

Dalam pelaksanaan setiap Kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan tahun 2025 adalah :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum bisa dilakukan secara maksimal karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran akibat dari dampak efisiensi, sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dan perubahan dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran.
2. Belum terpenuhinya sarana peralatan kerja yang memadai seperti computer unit dan dukungan ketersediaan jaringan internet yang lebih baik dalam rangka mengikuti perkembangan zaman yang sudah melangkah pada pelayanan berbasis komputerisasi.

Masih perlu sosialisasi fasilitasi intens tentang pemahaman perundang-undangan bagi perangkat pemerintahanNagari.

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Punjung

VISI : Mewujudkan Dharmasraya yang Mandiri dan Berbudaya
MISI : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan tata kelola Kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	a. Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	persen	80	80	80	90	90	90
		b. persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	60	60	60	60	65	65
		c. Jumlah gangguan tranti bum yang tangani di wilayah kecamatan	Kasus	3	3	3	3	3	3
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	a. Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Pulau Punjung	Nilai/ Predikat	72.18 BB	72.18 BB	72.18 BB	72.28 BB	76.14 BB	80 A
		b. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Pulau Punjung	Nilai	-	-	-	32,6	37,4	42,3
		c. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	85	85	90	90	90

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan realisasi 2021, 2022 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2023, maka proyeksi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

1.2. Target Kinerja Tah un 2025

Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP	%	80	80	90	90	90	90
2	Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan Yang ditampung dalam RKPD	%	60	60	60	60	60	60
3	Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Pulau Punjung	Kasus	3	3	3	3	3	3
4	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Pulau Punjung	%	72.18	72.18	72.28 BB	76.14 BB	72.28 BB	76.14 BB
5	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Pulau Punjung	%	-	-	32,6	37,4	32,6	37,4
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90.16	89.85	90	90	90	90

BAB 5 PENUTUP

...

Rencana Kerja Kecamatan Pulau Punjung (Renja PD) merupakan Rencana Kerja tahunan yang disusun guna menyiapkan secara optimal Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025. Rencana Kerja ini sendiri akan menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Dengan adanya rencana kerja ini nantinya diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan dengan labih baik.

Penyusunan Renja sebagai suatu dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan kerja PD merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan. Rancangan kerja masa yang akan datang harus selalu mempedomani Program dan kegiatan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Evaluasi secara terstruktur dan berkelanjutan pada tahun berjalan dapat mengakomodir tingkat perobahan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan penyusunan Dokumen Renja PD diharapkan nantinya dapat dilakukan penjabaran Visi dan Misi, serta Sasaran yang telah ditetapkan dengan maksimal. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Punjung ini mengakomodir Penetapan Skala prioritas dalam penyusunan rancangan Program dan kegiatan. Hal ini diperlukan dalam melakukan sinergitas dengan PD terkait.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR .....TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KOTO BARU TAHUN 2025

DAFTAR ISI

1.3.1. 22
1.3.2. 33
2
2.3.1. 152.15
2.3.1. 152.15
Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.
7

Tabel 2.1 Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **2.1**

Tabel 2.2: Capaian Kinerja Sasaran I **2.3**

Tabel 2.3 Jenis Pelayanan dan Waktu Pelayanan **2.5**

Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Musrenbang tahun 2023 yang Ditampung Dalam RKPD **2.6**

Tabel 2.5 Rekapitulasi Penanganan Kasus Oleh Aparatur Kecamatan **2.10**

Tabel 2.6: Capaian Kinerja Sasaran II **2.13**

Tabel 1-1 Matrik Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Koto Baru Kab. Dharmasraya Tahun 2025 **4.2**

Tabel 1-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 4.3

Grafik 2.1 : Indikator Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP 2.4

Grafik 2.2:Indikator Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan Yang ditampung dalam RKPD 2.8

Grafik 2.3: Indikator Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Koto Baru 2.11

–

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. **Kecamatan Koto Baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan Koto Baru melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pelayanan , Bidang Kesra, Bidang Pemerintahan Nagari,Bidang Ekbang dan Bidang trantibun.**

Rencana Kerja Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Kecamatan Koto Baru disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
   1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024.
   2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
   3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2019 s.d 2024.

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2025

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
   1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan prangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida
   2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini siserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.

e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
   1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
   1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Koto Baru Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmengdagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan pembangunan dan Keungan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023- 2043;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Koto Baru secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Koto Baru hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II **Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Koto Baru Tahun 2023**
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Koto Baru, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Koto Baru , dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Koto Baru

BAB IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

BAB V Penutup

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KOTO BARU TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Koto Baru Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Koto Baru

Untuk mendukung menjalankan tugas dan fungsinya tahun 2024 Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya mendapat alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. **2.051.789.950,-** yang dialokasikan untuk pelaksanaan 8 Program dan 17 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. **1.985.274.892** dengan capaian kinerja keuangan sebesar **96,76 %.**

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun 2024 antara lain :

2.1.1 Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.1 Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	1.525.550.000	1.482.843.455	97,20	**%**
2.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	198.522.250	197.561.705	99,52	%
3.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	282.942.800	261.525.112	92,43	%
4.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	20.000.000	19.689.720	98,45	%
5.	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	3.455.000	2.555.000	73,95	%
6.	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	13.344.900	13.344.900	100,00	%
7.	**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	3.455.000	2.555.000	73,95	%
8.	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	4.625.000	4.305.000	93,08	%

Beberapa program dan kegiatan Kecamatan Koto Baru diatas tidak dapat dilaksanakan dan tidak mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ada kegiatan yang anggaran tidak tersedia setelah perobahan dan ada anggaran terserap secara maksimal, karena terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya di kosongkan serta ada pengurangan gaji di Pegawai Non ASN di Kecamatan Koto Baru

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat daerah belum dapat dilaksanakan dikarenakan Rencana Kerja 2022 merupakan Tahun ke-3 dari periode Rencana strategis 2021-2026.

-Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Pada Perangkat Daerah Kecamatan Koto Baru dalam pelaksanaan Renja 2024 tidak ada Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi.

-Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Pada Perangkat Daerah Kecamatan Koto Baru dalam pelaksanaan Renja 2024, Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

-Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dalam Renja 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Koto Baru tidak ditemukan.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA, TERPENUHINYA ATAU MELEBIHI TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN; ANTARA LAIN

a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan /program yang akan diselenggarakan baik kecamatan,

b. Sering terjadinya beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan namun belum didukung ketersediaan anggaran.

- **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah,** Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Koto Baru, belum bisa diukur karena merupakan tahun keempat peride Renstra.
- **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut,** perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,serta perlunya adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan.

SASARAN I
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan

Tabel 2.2: Capaian Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian Kinerja	Kategori	Perbandingan Capaian dengan Renstra		Perbandingan Capaian dengan akhir Renstra 2026	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi			Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP	80%	86,58%	90%	86,74 %	96,38 %	Sangat Berhasil	90%	86,74 %	90%	86,74 %
Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan Yang ditampung dalam RKPD	60%	65%	60%	77,27 %	128,78%	Sangat Berhasil	60%	77,27 %	65%	77,27 %
Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Koto Baru	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	100%	Sangat Berhasil	3 Kasus	3 Kasus	3 kasus	3 kasus
Data Tertimbang					100%					
Mean					\ 108,38					

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja **sasaran strategis 1 *" Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Koto Baru"*** dengan capaian ***sangat berhasil*** atau 108,38%

Adapun rincian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1
Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP

Sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 target persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP adalah sebesar 90% dan capaiannya pada adalah sebesar 86,74% dengan tingkat capaian adalah 96,38% dengan kategori ***sangat berhasil .***

Grafik 2.1 :Indikator Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP

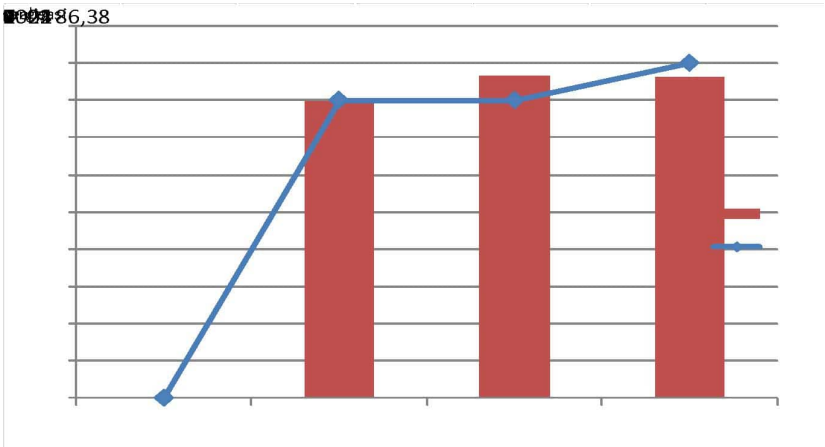

- **Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini dan membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

  Indikator Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP pada tahun 2024 realisasi pencapaiaannya

  Tidak Sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan Non perizinan 90 dapat direalisasikan 86,74% dengan capaian 96,38% (sangat berhasil). Dimana pada tahun 2024 pencapaiannya meningkat dibandingkan pencapaian tahun 2023 dengan yaitu sebesar 0,24%.

- **Perbandingan Antara realisasi indikator kinerja tahun ini dan target yang tertuang dalam Renstra.**

  Indicator Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP pada tahun 2024 Kurang memenuhi target yang tertuang dalam Renstra yakni pada skala 90%.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternatif Solusi.**

  Kurang target indicator Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP pada tahun 2024 tidak terlepas dari kuranngnnya dukungan Anggaran, sarana dan prasarana serta komitmen SDM

Kantor Camat Koto baru untuk menghadirkan konsep pelayanan yang telah berbasis reformasi birokrasi berlandaskan layanan prima. Jika terdapat beberapa pelayanan yang ketepatan waktunya tidak sesuai dengan SOP disebabkan dokumen harus ditanda tangani Camat, namun terkadang Camat sedang melaksanakan tugas dinas luar sehingga waktu pelayanan lebih lama dari yang ditetapkan pada SOP.

- **Waktu Pelayanan di jabarkan sebagai berikut:**

Tabel 2.3 Jenis Pelayanan dan Waktu Pelayanan

Jenis Pelayanan	Waktu Pelayanan Sesuai SOP	Pelaksanaan
SKTM (Surat Keterangan Miskin	10 Menit	9 Menit
Surat Pindah	10 Menit	8 Menit
Dispensasi Nikah	10 Menit	15 Menit
Skck	10 menit	8 menit
Beda Nama	10 Menit	10 Menit
Ahli Waris	20 Menit	10 Menit
Izin Keramaian	10 Menit	15 Menit
Legalisasi Lainnya	10 Menit	10 Menit

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Penentuan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya menggunakan rumus

$$\frac{\text{(Pagu Anggaran x Capaian Kinerja\%)- Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} = \%$$

Efisiensi Anggaran

PA : 3.455.000

CK: 96,38% = 0,96

RA 2.555.000

$$\frac{\text{(PA x CK\%)- RA}}{\text{PA}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{\text{(=3.455.000X0,9638)-2.555.000}}{\text{3.455.000}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{\text{3.329.929-2.555.000}}{\text{3.455.000}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{774.929}{3.455.000} \text{ x}100\%$$

0,2243 x100%

22,43%

Indicator Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP pada tahun 2024 didukung dengan anggaran dana sebesar Rp.3.455.000,00. Realisasi dana diakhir tahun adalah Rp. 2.555.000,00 Dengan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebesar 22,43% berkurangnya realisasi disebabkan adanya rasionalisasi anggaran sehingga anggaran kegiatan harus dikurangi. Walaupun hanya didukung dengan dana yang terbatas namun jajaran Kantor Camat Koto Baru tetap berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga target yang ditetapkan bisa tercapai.

- **Analisis Program Penunjang.**
  Indicator Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP pada tahun 2024 ditunjang melalui program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Program ini dirasa sudah tepat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung ketercapaian indicator kinerja yang ditetapkan dan diharapkan kedapannya ada dukungan penambahan anggaran.

Indikator Kinerja 2
Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan Yang ditampung dalam RKPD

Sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 target hasil musrenbang yang ditampung dalam RKPD adalah sebesar 60 %, yang dapat direalisasikan adalah dengan persentasi 77,27% dengan capaian 128,78% (sangat berhasil).

Adapun Rincian usulan kegiatan pada Musrenbang Tahun 2023 Kecamatan Koto Baru untuk RKPD tahun 2024 adalah 22 (tiga puluh empat) usulan dan yang ditampung dalam RKPD ada 17 (usulan) dengan rincian sebagai Berikut;

Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Musrenbang tahun 2023 yang Ditampung Dalam RKPD

No	Hasil Musrenbang Kecamatan	Lokasi (Desa/Nagari)	Keterangan
1	Ruang Terbuka Hijau Nagari Koto Baru (Monumen Dharmasraya)	Koto Baru	Tertampung dalam RKPD
2	Pembangunan rigit beton jalan lingkar lubuk pering tarandam	Koto Baru	Tertampung dalam RKPD

3	Lanjutan Pembangunan Saluran Cacing Rawang Bakung	Koto Baru	Tertampung dalam RKPD
4	Perbaikan Lampu Hias Street Food Simpang IV Koto Baru	Koto Baru	Tertampung dalam RKPD
5	Dam dan Pelebaran Jalan Simpang Jalan Asoy ke Jembatan Seberang Piruko	Koto Baru	Tertampung dalam RKPD
6	Pembangunan Rigit Beton Jalan Perbatasan Jorong Sialang Gaung dengan Jorong Ranah	Sialang Gaung	Tertampung dalam RKPD
7	Pembangunan Rigit Beton Jorong Tarantang Simpang Kantor desa Lama	Sialang Gaung	Tertampung dalam RKPD
8	Rehab Pasar	Sialang Gaung	Tertampung dalam RKPD
9	Rehab Kantor Wali Nagari Sialang Gaung	Sialang Gaung	Tidak Tertampung dalam RKPD
10	Pembangunan Street Food Simpang Lancar Juo Jorong Padang Bintungan II Utara	Sialang Gaung	Tertampung dalam RKPD
11	Pembangunan aspal Hotmix Ampang Kuranji ke Aur Jaya	Ampang Kuranji	Tidak Tertampung dalam RKPD
12	Pembangunan bangunan Perkuatan Tebing/DAM Penahan Tebing (Retaining Wall Tebing Marung)	Ampang Kuranji	Tertampung dalam RKPD
13	Rehab/perbaikan jalan; Aspal Hotmix, pengaspalan jalan kabupaten (Aspal Hotmix)	Ampang Kuranji	Tertampung dalam RKPD
14	Pembangunan/lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan Umum Nagari	Ampang Kuranji	Tidak Tertampung dalam RKPD
15	Pembangunan Jaringan Irigasi (Pembangunan Irigasi Sekunder Sawah Saiyo Sungai Saung)	Ampang Kuranji	Tertampung dalam RKPD
16	Pembangunan/lanjutan Kantor Wali Nagari	Koto Padang	Tidak Tertampung dalam RKPD
17	Hotmix Jalan Aur Jaya ke Ampang Kuranji	Koto Padang	Tidak Tertampung dalam RKPD
18	Pembangunan Drainase Jalan Lintas Nagari Koto Padang	Koto Padang	Tertampung dalam RKPD
19	Pembangunan JUT Nagari Koto Padang	Koto Padang	Tertampung dalam RKPD
20	Pembangunan Jembatan Permanen Nagari Koto Padang ke Aur Jaya (DL)	Koto Padang	Tertampung dalam RKPD
21	Rehab Gedung Pertemuan (UDKP) Kecamatan Koto Baru	Kec Koto Baru	Tertampung dalam RKPD

22	Rehap Gedung Kantor Camat Koto Baru	Kec Koto Baru	Tertampung dalam RKPD

Grafik 2.2:Indikator Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan Yang ditampung dalam RKPD

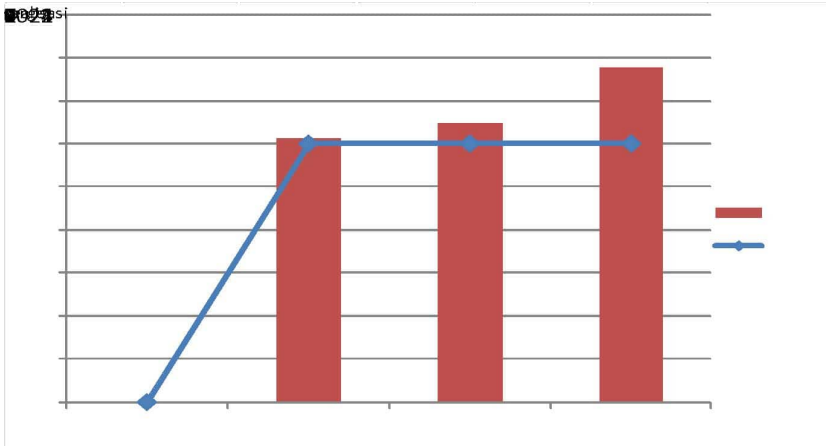

dari grafik menunjukkan bahwa capaian indikator tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu hal ini terjadi karena capaian indikator setiap tahun sangat tergantung pada keselerasan usulan dengan prioritas kegiatan yang ada dalam RKPD Kabupaten dan pada indikator kini interprestasi penilaian 77,27% atau Sangat berhasil

- **Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini dan membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

  Indikator Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan Yang ditampung dalam RKPD pada tahun 2024 realisasi pencapaiaannya telah memenuhi target sebesar 60 %, yang dapat direalisasikan adalah dengan persentasi 77,27% dengan capaian 128,78% (sangat berhasil).

- **Perbandingan Antara realisasi indikator kinerja tahun ini dan target yang tertuang dalam Renstra.**

  Indikator Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan Yang ditampung dalam RKPD pada tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Renstra yakni pada skala 65%.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternatif Solusi.**

  Tercapainya Indikator Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan Yang ditampung dalam RKPD pada tahun 2024 tidak terlepas dari adanya dukungan Anggaran, sarana dan prasarana serta komitmen dari Camat Koto baru untuk menghadirkan segenap stake holder di wilayah kecamatan pada kegiatan Musrenbang

Kecamatan agar bisa menampung seluruh aspirasi dari berbagai kalangan dan mengawal hasil Musrenbang sampai pada Musrenbang tingkat Kabupaten. Serta capaian indikator setiap tahun sangat tergantung pada keselerasan usulan dengan prioritas kegiatan yang ada dalam RKPDnKabupaten dan pada indikator kini interprestasi penilaian 77,27% atau Sangat berhasil

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Penentuan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya menggunakan rumus

$$\frac{\text{(Pagu Anggaran x Capaian Kinerja\%)- Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} = \%$$

Efisiensi Anggaran

PA : 13.344.900
CK: 128,78% = 1,2

RA 13.344.900

$$\frac{\text{(PA x CK\%)- RA}}{\text{PA}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{\text{(=13344900X1,2)-13344900}}{\text{13.344.900}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{\text{2.668.980}}{\text{13.344.900}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{\text{2.668.980}}{\text{13.344.900}} \text{ x}100\%$$

0,200 x100%

20%

Indikator Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan Yang ditampung dalam RKPD pada tahun 2024 didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 13.344.900,00. melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dan Rp. 13.344.900,00 Dengan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebesar 20% pada Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang di desa. Walaupun hanya didukung dengan dana yang terbatas namun jajaran Kantor Camat Koto Baru tetap berupaya melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada segenap stake holder, pemerintah Nagari dan pemangku kepentingan di wilayah kecamatan Koto Baru .

- **Analisis Program Penunjang.**
  Indikator Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan Yang ditampung dalam RKPD pada tahun 2024 ditunjang melalui Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang di desa. Program ini dirasa sudah tepat dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah nagari di wilayah Kecamatan Koto Baru dan diharapkan kedapannya ada dukungan penambahan anggaran.

Indikator Kinerja 3
Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Koto Baru

Sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 target Jumlah gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Koto Baru adalah sebanyak 3 Kasus, yang dapat direalisasikan adalah penanganan sebanyak 3 kasus dengan dengan capaian 100 % kategori (berhasil).

Adapun Rincian gangguan Trantibum yang berhasil ditangani oleh Aparatur Kecamatan bekerja sma deng Penegak Peraturan Daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Rekapitulasi Penanganan Kasus Oleh Aparatur Kecamatan

No	Kasus	Lokasi dan Waktu Kejadian	Keterangan
1	Banjir di beberapa titik di Nagari Koto Baru dan Nagari Ampang Kuranji	1 Januari dan 1 Januari 2025 Nagari Koto Baru dan Nagari Ampang Kuranji	Aparatur Kecamatan Koto Baru bersama dengan Instansi Polri, Satpol PP-Damkar dan Dinas Sosial beserta jajaran Pemerintah Nagari dan masyarakat sekitar melakukan evakuasi dan penanganan banjir. Aparatur Kecamatan Koto Baru juga melakukan pendataan dan penyaluran bantuan kepada korban Banjir

2	Pembersihan sarang tawon	26 Mei 2024 Jorong pasar banda Nagari Ampang Kuranji	Aparatur Kecamatan Koto Baru bersama dengan Instansi Polri, Satpol PP-Damkar dan Pemerintah Nagari dan masyarakat sekitar melakukan evakuasi dan penanganan sarang tawon.
3	Kebakaran Rumah warga (a.n Norani)	13 Juni 2024 Pukul 18.30 WIB Jorong Pasar Usang Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru	Aparatur Kecamatan Koto Baru bersama Satpol pp-Damkar serta perangkat Pemerintah Nagari melakukan penanganan bencana kebakaran pada salah satu rumah warga. Aparatur Kecamatan bekerja sama dengan Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan dalam waktu yang cepat. Kebakaran di perkirakan bersumber dari arus pendek listrik

Grafik 2.3: Indikator Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Koto Baru

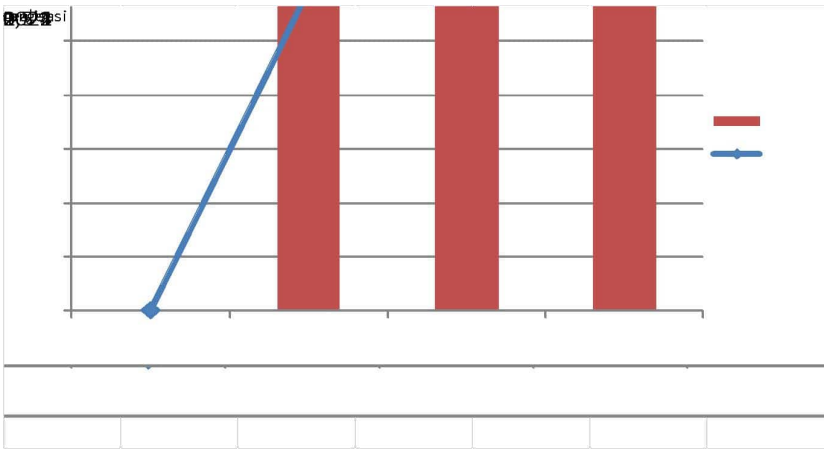

- **Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini dan membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

  Indikator gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan pada tahun 2024 realisasi pencapaiaannya Sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target Jumlah gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan pada tahun 2024 3 kasus dapat direalisasikan 3 kasus dengan capaian 100% (sangat berhasil).

- **Perbandingan Antara realisasi indikator kinerja tahun ini dan target yang tertuang dalam Renstra.**

  Indikator Jumlah gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan

pada tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Renstra yakni penanganan sebanyak 3 Kasus.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternatif Solusi.**

  Tercapainya Jumlah gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan pada tahun 2024 tidak terlepas dari adanya dukungan Anggaran, sarana dan prasarana serta Koordinasi yang baik telah dibangun Camat Koto Baru dengan Instansi terkait penegakan peratuaran seperti Polri dan Satpol PP-Damkar Kab. Dharmasraya. Komitmen dari Camat Koto baru untuk menghadirkan suasana ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif juga didukung segenap stake holder dan pemangku kepentingan di wilayah kecamatan Koto Baru.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

  Penentuan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya menggunakan rumus

$$\frac{\text{(Pagu Anggaran x Capaian Kinerja\%)- Realisasi Angggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} = \%$$

Efisiensi Anggaran

PA : 3.455.000

CK: 96,38% = 0,96

RA 2.555.000

$$\frac{\text{(PA x CK\%)- RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{(=3.455.000X0,9638)-2.555.000}}{\text{3.455.000}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{3.329.929-2.555.000}}{\text{3.455.000}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{774.929}}{\text{3.455.000}} \times 100\%$$

0,2243 x100%

22,43%

Indikator Jumlah gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan pada tahun 2024 didukung dengan anggaran dana sebesar Rp.3.455.000,00. melalui Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yng tugas dan fungsinya di bidang penegakan Perauran Per-UU atau POLRI. Pada akhir tahun realisasi anggarannya adalah Rp. 2.555.000,00 dengan sisa anggran sebesar Rp. 900.000,00 Dengan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebesar 22,43% ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran sehingga terjadi pengurangan anggaran .Walaupun hanya didukung dengan dana yang terbatas namun jajaran Kantor Camat Koto

Baru tetap berupaya melakukan koordinasi dan konsultasi serta terlibat aktif dalam penegakan peraturan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum bersama unsure POLRI dan Satpol PP-Damkar di wilayah Kecamatan Koto Baru.

- **Analisis Program Penunjang.**
  Indikator Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum pada tahun 2024 ditunjang melalui Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yng tugas dan fungsinya di bidang penegakan Perauran Per-UU atau POLRI. Program ini dirasa sudah tepat dalam mendukung aparatur Kecamatan Koto Baru untuk ikut menciptakan ketentraman dan ketertiban umum bersama unsur POLRI dan Satpol PP-Damkar di wilayah Kecamatan Koto Baru dan diharapkan kedapannya ada dukungan penambahan anggaran.

SASARAN II

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 2.6: Capaian Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja	Tahun 2023		Perbandingan Capaian dengan Renstra		Kategori	Tahun 2024		Perbandingan Capaian dengan akhir Renstra 2026	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	Capaian	Target	Capaian
Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Koto Baru	68.42 B	77,39 (BB/ Sangat Baik)	68.42 B	77,39 (BB/ Sangat Baik)	Berhasil	72.28 BB	Penilaian di 2025	80 A	n/a
Indeks									

Kepuasan Masyarakat	81.0	86,58	81.0	86,58	Baik	81.5	86,74	82.5	n/a

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja **sasaran strategis II "Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"** pada tahun 2024 yang sudah selesai dinilai menunjukkan hasil yang positif dimana dari 2 Indikator sasaran yang ditetapkan semua telah mencapai target yang ditetapkan.

Adapun rincian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran 2 pada tahun 2024 yang sudah dinilai adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja

- **Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Koto Baru**
- **Indeks Kepuasan Masyarakat**

- **Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini dan membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

  Ketiga indicator pada sasaran II ini adalah indicator berbentuk penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat, Bapperida dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya. Untuk LKjIP Kecamatan Koto Baru tahun 2023 yang dinilai pada tahun 2024 kedua indicator menunjukkan tren yang sangat memuaskan karena telah berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.

- **Perbandingan Antara realisasi indikator kinerja tahun yang sudah dinilai dan target yang tertuang dalam Renstra.**

  Kedua indicator pada sasaran II pada tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Renstra.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternatif Solusi.**

  Tercapainya target penilaian pada kedua indicator sasaran strategis II tidak terlepas dari komitmen Camat bersama jajaran dalam menerapkan system manajemen kinerja di lingkungan kantor Kecamatan Koto Baru dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

  Penentuan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya menggunakan rumus

$$\frac{\text{(Pagu Anggaran x Capaian Kinerja\%)- Realisasi Angggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} = \%$$

Efisiensi Anggaran

PA : 2.027.910.050

CK: 100,00% = 1

RA 1.962.514.992

$$\frac{\text{(PA x CK\%)- RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

$$\frac{(= 2.027.910.050 \text{ X } 1)-1962514992}{1.962.514.992} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{65.395.058}{2.027.910.050} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{65.395.058}{2.027.910.050} \text{ x}100\%$$

0,0322 x100%

3%

kedua indicator diatas didukung dengan penyediaan anggaran sebesar Rp. 2.027.910.050,00 dengan realisasi anggaran Rp. 1.962.514.992,00 serta anggran tersisa anggaran, Dengan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebesar 3% Melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- **Analisis Program Penunjang.**

  Sasaran Strategis II ini didukung melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini meliputi anggaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang habis pakai, belanja pemeliharaan asset dan belanja modal serta belanja penyediaan jasa lainnya dalam menunjang pelaksanaan kinerja jajaran kantor Camat Kecamatan Koto Baru,

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu strategis

Dalam pelaksanaan setiap Kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan tahun 2024 adalah :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum bisa dilakukan secara maksimal karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran akibat dari dampak pandemi, sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dan perubahan dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran.
2. Belum terpenuhinya sarana peralatan kerja yang memadai seperti computer unit dan dukungan ketersediaan jaringan internet yang lebih baik dalam rangka mengikuti perkembangan zaman yang sudah melangkah pada pelayanan berbasis komputerisasi. Masih perlu sosialisasi fasilitasi intens tentang pemahaman perundang-undangan bagi perangkat Pemerintah Nagari

2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

-Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan, Pada Perangkat Daerah Kecamatan Koto Baru dalam pelaksanaan Renja 2024, Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

-Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dalam Renja 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Koto Baru tidak ditemukan

Dan ada beberapa factor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi target kinerja dari Program/Kegiatan antara lain :

a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan /program yang akan diselenggarakan baik kecamatan,
b. Sering terjadinya beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan namun belum didukung ketersediaan anggaran.

- **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah,** Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Koto Baru, belum bisa diukur karena merup[akan tahun pertama peride Renstra.
- **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut,** perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,serta perlunya adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu indikatornya kinerja utama perangkat daerah Indikator kinerja utama perangkat daerah Kecamatan Koto Baru Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP

Pada indikator ini merujuk kepada Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada ukuran kinerja yang menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga lainnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur operasional standar

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.3. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Koto Baru

VISI : **Mewujudkan Dharmasraya yang Mandiri dan Berbudaya**
MISI : **Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan tata kelola Kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	a. Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	persen	80	80	80	90	90	90
		b. persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	60	60	60	60	65	65
		c. Jumlah gangguan tranti bum yang tangani di wilayah kecamatan	Kasus	2	3	3	3	3	3
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	a. Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Koto Baru	Nilai/ Predikat	60.7 B	64.56 B	68.42 B	72.28 BB	76.14 BB	80 A
		b. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Koto Baru	Nilai	19,0	23,1	27,8	32,6	37,4	42,3
		c. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	80.5	81.0	81.5	82.0	82.5

BAB 4.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan realisasi 2021, 2022 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2023, maka proyeksi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 0-1

MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KOTO BARU KAB. DHARMASRAYA TAHUN 2025

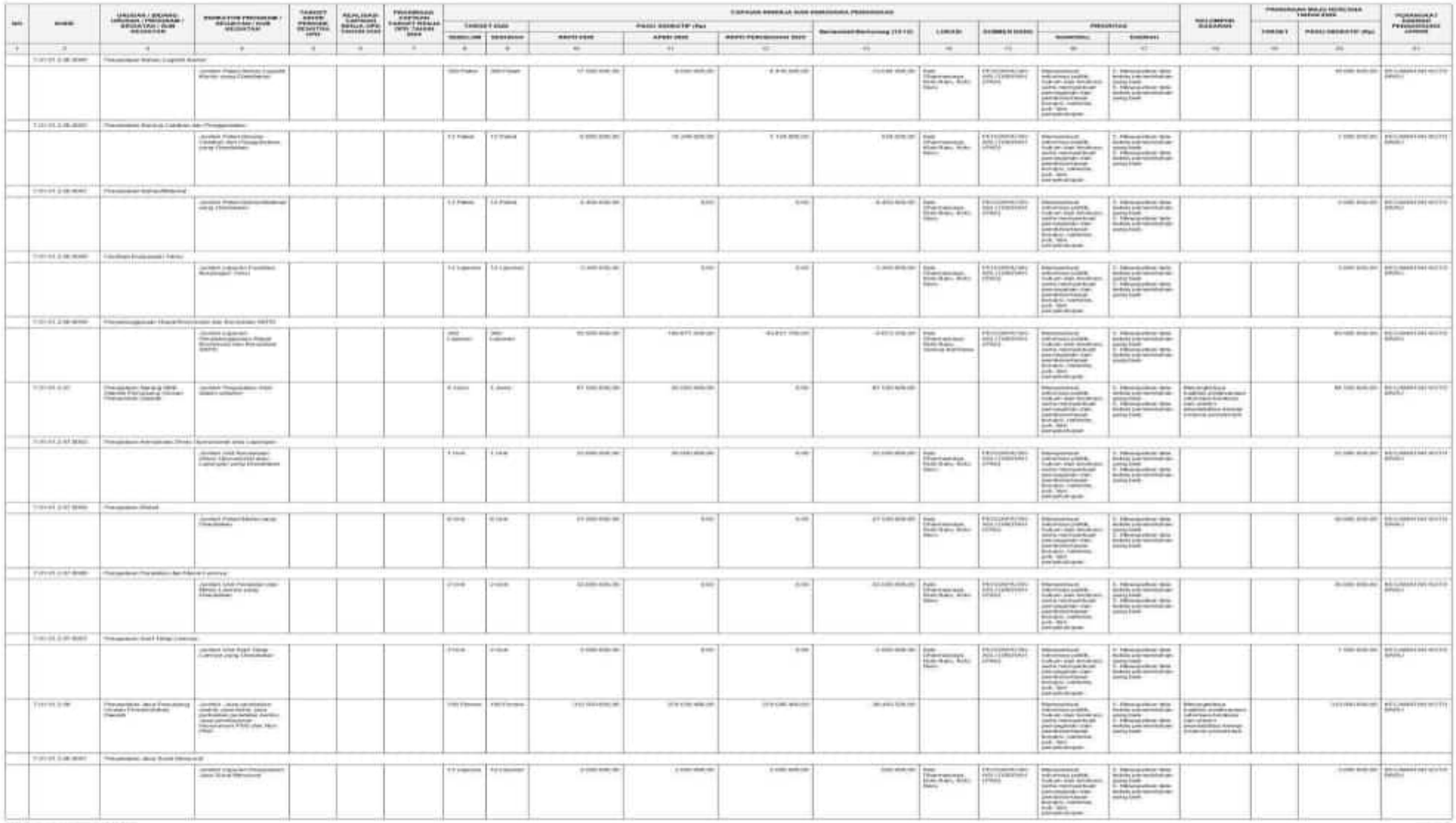

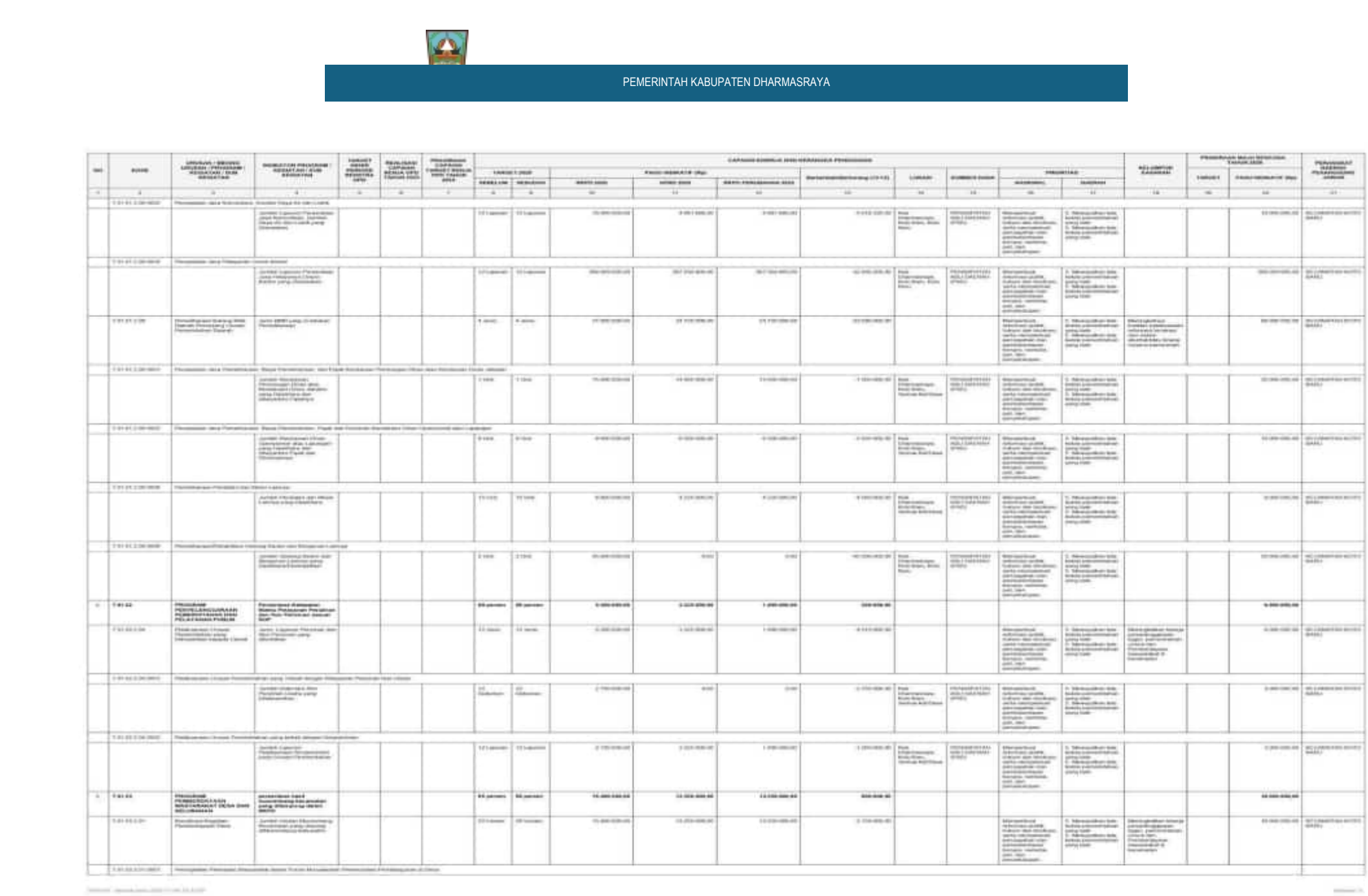

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	KECAMATAN KOTO BARU
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]				100 persen	100 persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				3 Kasus	3 Kasus	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	KECAMATAN KOTO BARU
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				12 Laporan	12 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	KECAMATAN KOTO BARU
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				7 Jenis	7 Jenis	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	KECAMATAN KOTO BARU
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				12 Dokumen	12 Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	KECAMATAN KOTO BARU
	J U M L A H								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	

1.2. Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 0-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Kec. Koto Baru	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Keytepatan waktu pelayanan perizinan dan Non perizinan sesuai SOP	Persen	80,06	86,58	90	90	90	90
2	Persentase hasil musrembang kecamatan yang di tamping dalam RKPD	Persen	61,5	65	60	65	60	65
3	Jumlah Gangguan Trantibun yang ditangani di wilayah kecamatan	Kasus	3	3	3	3	3	3
4	Hasil Peilain AKIP Kecamatan Koto Baru	Nilai Prediket	77,39	77,39	72.28 BB	76.14 BB	72.28 BB	76.14 BB
5	Hasil Penialain Mandiri pelaksanaan reformasi Birokrasi kecamtan Koto Baru	Nilai	0	0	32,6	37,4	32,6	37,4
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,59	86,58	81.5	82.0	81.5	82.0

BAB 2. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Koto Baru (Renja PD) merupakan Rencana Kerja tahunan yang disusun guna menyiapkan secara optimal Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025. Rencana Kerja ini sendiri akan menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Dengan adanya rencana kerja ini nantinya diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan dengan labih baik.

Penyusunan Renja sebagai suatu dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan kerja PD merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan. Rancangan kerja masa yang akan datang harus selalu mempedomani Program dan kegiatan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Evaluasi secara terstruktur dan berkelanjutan pada tahun berjalan dapat mengakomodir tingkat perobahan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Koto Baru secara berkesinambungan.

Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada perangkat Daerah Kecamatan Koto Baru dalam pelaksanaan Renja 2023 ,Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran.

Dalam bab II pada narasi Renja ini ada sub babnya yang berkaiatan dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Koto Baru, pada Renja 2025 ini Kecamatan Koto Baru Memiliki 2(Dua) saran dan 5 (Lima) Indikator yang masing-masingnya memiliki Sasaran,definisi,interpretasi,perkembangan data serta dilengkapi dengan data perbandingan tahun sebelumnya.Dalam Bab ini Juga terdapat isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah salah satunya belum terpenuhinya sarana peralatan kerja yang memadai seperti computer unit dan dukungan ketersediaan jaringan internet yang lebih baik dalam rangka mengikuti perkembangan zaman yang sudah melangkah pada pelayanan berbasis komputerisasi,masih perlu sosialisasi fasilitasi intens tentang pemahaman perundang-undangan bagi perangkat pemerintah Nagari.

Dalam Bab III terdapat penjelasan Tujuan dan Sasaran Perangkar daerah Kecamatan Koto Baru,yang mana Tujuan RPJMD Kecamatan Koto Baru Yaitu : Mewujudkan tata kelola kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah.

Sasaran RPJMD Kecamatan Koto Baru adalah : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan tugas pemerintah umum dan pemberdayaan Masyarakat di kecamatan.

Dalam Baba IV menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah,Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan

Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Dengan penyusunan Dokumen Renja PD diharapkan nantinya dapat dilakukan penjabaran Visi dan Misi, serta Sasaran yang telah ditetapkan dengan maksimal. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Koto Baru ini mengakomodir Penetapan Skala prioritas dalam penyusunan rancangan Program dan kegiatan. Hal ini diperlukan dalam melakukan sinergitas dengan PD terkait.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR .....TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1. .. PENDAHULUAN 1-1

1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Landasan Hukum 1-2
1.3. Maksud dan Tujuan 1-3
1.3.1. Maksud 1-3
1.3.2. Tujuan 1-3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1-3

BAB 2. .. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU* 2-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-3
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-9
2.3.1. Isu strategis 2-9
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 2-9
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-1
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan Sungai Rumbai 2-1
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 3. .. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... Error! Bookmark not defined.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat ***Error! Bookmark not defined.***
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat **Error! Bookmark not defined.**
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3-1

BAB 4. .. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 4-1
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Sungai Rumbai 4-9

BAB 5. .. PENUTUP 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-165 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2-166 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2023 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5-1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 .... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 6-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 2

Tabel 6-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. **Kecamatan Sungai Rumbai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan Sungai Rumbai melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pelayanan , Bidang Kesra, Bidang Pemerintahan Nagari,Bidang Ekbang dan Bidang trantibun.**

Rencana Kerja Kecamatan Sungai rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Kecamatan Sungai Rumbai disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
   1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024.
   2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
   3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2019 s.d 2024.

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2025

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
   1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan prangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida
   2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini siserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.

e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Rumbai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmengdagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan pembangunan dan Keungan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023- 2043;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sungai Rumbai secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Rumbai hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II **Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Sungai Rumbai Tahun 2023**
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Rumbai, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Rumbai , dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Rumbai

BAB IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

BAB V Penutup

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI RUMBAI TAHUN 2024

21. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Rumbai Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Rumbai

Untuk mendukung menjalankan tugas dan fungsinya tahun 2024 Kecamatan Sungai Rumbai i Kabupaten Dharmasraya mendapat alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. **1.374.423.950,-** yang dialokasikan untuk pelaksanaan 5 Program dan 9 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. **1.334.464.549** dengan capaian kinerja keuangan sebesar **97,09 %.**

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun 2023 antara lain :

2.1.1. a. Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp. **1.107.027.000**.,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. **1.1.069.091.563**- atau terealisasi sebesar 96,57 %.
b. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp. **117.855.350**,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. **117.647.386**,- atau terealisasi sebesar 99,82%
c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran Rp.0,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. **0**,- atau Belum terealisasi sebesar 0%.
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. **118.841.600**,- dengan anggaran terserap sebesar Rp.**117.574.350**,- atau terealisasi sebesar 98,93 %
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. **14.200.000**,- dengan anggaran terserap sebesar Rp**. 13.651.250**,- atau terealisasi sebesar 96,14 %.

Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pagu Total sebesar Rp. **1.357.923.950**- telah terserap Rp. **1.317.964.549** atau terealisasi sebesar 97,06%

2.1.1.b. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan dengan jumlah anggaran Rp.**1.850.000,-** telah terserap sebesar Rp.**1.850.000** atau terealisasi sebesar 100 %

2.1.1.c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa jumlah anggaran Rp. **11.950.000,-** Telah terserap Rp. **11.950.000**,- atau terealisasi sebesar 100%.

2.1.1. d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan jumlah anggaran Rp.**900.000**,- telah terserap Rp. **900.000**,- atau terealisasi sebesar 100 %

2.1.1.e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koorinsi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah anggaran Rp. **1.800.000**,- Telah terserap Rp. **1.800.000**,- atau terealisasi sebesar 100 %

Beberapa program dan kegiatan Kecamatan Sungai Rumbai diatas tidak dapat dilaksanakan dan tidak mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ada kegiatan yang anggaran tidak tersedia setelah perobahan dan ada anggaran terserap secara maksimal, karena terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya di kosongkan serta ada pengurangan gaji di Pegawai Non ASN di Kecamatan Sungai Rumbai

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat daerah belum dapat dilaksanakan dikarenakan Rencana Kerja 2022 merupakan Tahun ke-3 dari periode Rencana strategis 2021-2026.

-Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Rumbai dalam pelaksanaan Renja 2024 tidak ada Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi.

-Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Rumbai dalam pelaksanaan Renja 2024, Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

-Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dalam Renja 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Rumbai tidak ditemukan.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA, TERPENUHINYA ATAU MELEBIHI TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN; ANTARA LAIN

a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan /program yang akan diselenggarakan baik kecamatan,

b. Sering terjadinya beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan namun belum didukung ketersediaan anggaran.

- **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah,** Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Rumbai, belum bisa diukur karena merupakan tahun keempat peride Renstra.
- **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut,** perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,serta perlunya adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan

1. Indikator kinerja utama perangkat daerah Indikator kinerja utama perangkat daerah Kecamatan Sungai Rumbai Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP

   Pada indikator ini merujuk kepada Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada ukuran kinerja yang menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga lainnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur operasional standar

   Interpretasi dari indikator ini tergantung dari bebrapa interpretasi diantaranya ;

   1. **Persentase Ketepatan Waktu**: Ini adalah rasio antara jumlah pelayanan yang dilakukan tepat waktu dengan total jumlah pelayanan yang dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu, diukur dalam persentase. Ketepatan waktu biasanya diukur dengan membandingkan waktu penyelesaian pelayanan dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam SOP.
   2. **Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan**: Merujuk pada jenis pelayanan yang diberikan oleh instansi atau lembaga tersebut. Pelayanan perizinan mencakup proses pemberian izin, lisensi, atau persetujuan dari pemerintah atau badan lainnya, sementara pelayanan non-perizinan mencakup layanan yang tidak memerlukan izin atau persetujuan khusus, seperti pelayanan informasi, konsultasi, atau pelayanan administratif lainnya.
   3. **Standar Operasional Prosedur (SOP)**: Merupakan pedoman atau aturan yang mengatur tata cara dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan suatu proses atau kegiatan tertentu. SOP biasanya mencakup detail tentang prosedur, waktu yang dibutuhkan, tanggung jawab, dan langkah-langkah kualitas lainnya untuk memastikan konsistensi dan kinerja yang optimal dalam penyediaan layanan.

Tabel 2-1 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3	(4)	(5)	6)	(7)
Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP	**Persen**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
umlah rekomendasi tentang perizinan dan Non perizinan	Dokumen	1.300	1.400	1.300	1.400	1.450
Jumlah IMB yang di terbitkan sesuai dengan kewenangan	Dokumen	25	30	25	30	-

Sumber : ..., Tahun 2024

Dengan demikian, Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan sesuai SOP adalah ukuran kinerja yang menggambarkan sejauh mana suatu lembaga atau instansi pemerintah memenuhi waktu penyelesaian pelayanan yang telah ditetapkan dalam SOP, baik untuk layanan yang bersifat perizinan maupun non-perizinan. Dalam pelaksanaan indicator ini dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan mengingat selalu diadakannya perbaikan dari berbagai aspek dan sampai Triwulan II Tahun 2024 pada kondisi bulan Apri

1. Indikator kinerja utama perangkat daerah ***Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD***

Pada indikator ini merujuk pada seberapa besar usulan atau hasil kesepakatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan yang akhirnya diikutsertakan atau dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator ini mengacu kepada proporsi atau persentase dari hasil Musrenbang yang berhasil diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan kerja Pemerintah Daerah yang lebih formal, yaitu RKPD. Hal ini menunjukkan sejauh mana aspirasi masyarakat atau stake holders lokal tercermin dan dijadikan bagian dari RKPD yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu.

Interpretasi dari indikator ini tergantung dari bebrapa interpretasi diantaranya ;

1. **Prioritas Pembangunan**: Hasil musrenbang menjadi acuan dalam menetapkan prioritas pembangunan di daerah tersebut. Program dan kegiatan yang telah disepakati dalam musrenbang kemudian diakomodasi dalam RKPD sebagai bagian dari agenda pembangunan tahunan.
2. **Legitimasi Partisipatif**: RKPD yang memuat hasil musrenbang menunjukkan adanya aspek partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak dalam musrenbang memberi legitimasi atas prioritas dan program pembangunan yang disepakati.
3. **Keterhubungan Antara Musrenbang dan RKPD**: Inklusi hasil musrenbang dalam RKPD menunjukkan adanya keterhubungan yang erat antara proses perencanaan partisipatif dengan dokumen perencanaan resmi pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung dihubungkan dengan rencana kerja pemerintah.
4. **Pertanggungjawaban Publik**: Dengan memuat hasil musrenbang dalam RKPD, pemerintah daerah menunjukkan keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap publik. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD merupakan komitmen yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5. **Pembangunan Berkelanjutan**: Dalam interpretasi yang lebih luas, hasil musrenbang yang ditampung dalam RKPD diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan karena mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat yang diintegrasikan ke dalam rencana kerja pemerintah.

Tabel 0-2 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Persentase Hasil Musrembang Kecamatan yang di tampung dalam RKPD	**persen**					

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Koordinasi dan pembinaan nagari / pemberdayaan desa /Nagari	nagari	4	4	4	4	4
Usulan Musrembang untuk RKPD	usulan	50	60	60	60	65

Sumber Data Tahun 2024

Dengan demikian, interpretasi dari persentasi hasil musrenbang yang ditampung dalam RKPD mencakup aspek-aspek partisipatif, keterhubungan antara perencanaan partisipatif dengan dokumen resmi perencanaan pemerintah, serta pertanggungjawaban publik dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada perkembangan dalam beberapa Tahun belakangan mengindikasikan sudah makin tingginya usulan yang ditampung dalam RKPD dengan cara mengerucutkan kembali usulan menjadi skala prioritas yang lebih sedikit namun bisa terakomodir dalam RKPD.

2. Indikator kinerja utama perangkat daerah Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Sungai Rumbai

Indikator ini merujuk kepada merujuk pada data atau statistik tentang jumlah insiden atau gangguan terkait dengan ketertiban umum (trantibum) yang dikelola atau ditangani di suatu wilayah administratif, dalam hal ini wilayah Kecamatan Sungai Rumbai

Interpretasi dari indikator ini tergantung dari bebrapa interpretasi diantaranya ;

1. **Jumlah Gangguan Trantibum**: Ini merujuk pada jumlah insiden atau kejadian yang melibatkan gangguan terhadap ketertiban umum di suatu wilayah tertentu. Gangguan tersebut dapat berupa berbagai jenis pelanggaran atau tindakan yang mengganggu ketertiban sosial, seperti perkelahian, perusakan harta benda, tindak kejahatan, ataubencana alam dan pelanggaran aturan lainnya.
2. **Ditangani di Wilayah Kecamatan Sungai Rumbai**: Ini menunjukkan bahwa gangguan tersebut terjadi atau dikelola di wilayah administratif tertentu, yaitu Kecamatan Sungai Rumbai adalah unit administratif di bawah kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, termasuk masalah-masalah terkait ketertiban umum.

Tabel 0-3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase kejadian gangguan trantibum yang di tangani aparatur kecamatan	**kasus**					
Koordinasi Penerapan dan Penegakn Peraturan Daerah dan Peraturan Kepaka daerah	Kasus / persen	100	100	3	100	100
Jumlah kasus yang terjadi	Kasus / persen	100	100	3	3	4

Sumber :data bulan April Tahun 2024

Adapun Kasus gangguan trantibum yang ditangani aparatur kecamatan pada tahun 2024 sebagai berikut;

1. Balap Liar dengan knalpot racing oleh sekelompok remaja. Kasus ini terjadi di Nagari Kurnia Selatan dan Sungai Rumbai. Langkah-langkah yang dilakukan bersama Tim kepolisian memanggil orang tua dan anak untuk diberikan bimbingan dan pernyataan untuk tidak mengulangi kembali kegiatan tersebut. Melalui Ninik Mamak beserta perangkat Nagari, Babinsa dan Bhabinkantibmas melalukan sosialisasi tentang kenalan remaja dan bahaya yang ditimbulkan.
2. Maraknya Warga Eks Suku Batak yang membuka Warung Tuak disertai Music Keras. Kasus ini terjadi di nagari Kurnia Selatan

   Penyelesaian yang dilakukan dengan mendatangi lokasi tersebut secara bersama- sama bamus nagari, Babinkantibmas, Babinsa, ketua Pemuda dan Ormas untuk dilakukan sosialisasi dan pernyataan tidak mengulangi kejadian tersebut, dan dengan cara ini masyarakat yang bermukim didaerah di maksud telah merasa amandan nyaman.
3. Terjadinya perkelahian antar gerombolan siswa SMA dengan siswa SMK Kec. Sungai Rumbai,yang terjadi di jalur dua . kemudian dilakukan penyelesaian dengan mengadakaan pertemuan kepala sekolah kedua belah pihak dengan menghadirkan anggota Kapolsek Sungai rumbai pihak kecamatan secara bersama- sama bamus nagari, Babinkantibmas, Babinsa, ketua Pemuda dan orangb tua/ wali dari para siswa yang terlibat dengan membuat pernyataan tidak mengulangi kejadian tersebut, dan dengan cara ini masyarakat yang bermukim didaerahdi maksud telah merasa amandan nyaman.
4. Maraknya Penyalahgunaan pemakaian narkoba di Nagari Sungai Rumbai Timur kemudian terjadi penangkapan terhadap beberapa orang pelaku, dengan adanya kejadian tersebut maka pemuka masyarakat ,ketua pemuda dan aparat hokum melakukan musyawarah dan duduk bersama mencari solusi untuk menghentikan penyebaran pemakaian barang narkoba terssebut dan pihak ka[polsek mengadakan sosialisasi tentang akibat dari pemakian narkoba kepada para siswa SMP dan SMA dilingkungan Kecamatan Sungai Rumbai.

3. Indikator kinerja utama perangkat daerah Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Sungai Rumbai

Indikator ini merujuk kepada penilaian AKIP yang mencakup berbagai aspek kinerja instansi pemerintah, seperti manajemen keuangan, efektivitas program dan kegiatan, akuntabilitas, transparansi, dan aspek-aspek lain yang relevan. Hasil penilaian ini dapat berupa laporan yang mencakup temuan-temuan, rekomendasi, serta evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah

Interpretasi hasil penilaian AKIP (Audit Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Sungai Rumbai dapat bervariasi tergantung pada temuan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa.

1. **Kinerja Keuangan**: Jika hasil penilaian menunjukkan kinerja keuangan yang baik, hal ini bisa diartikan bahwa pengelolaan keuangan Kecamatan Sungai Rumbai telah dilakukan dengan

baik, termasuk pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan yang akurat, dan penggunaan anggaran yang efisien.

2. **Efektivitas Program dan Kegiatan**: Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Rumbai efektif, hal ini menunjukkan bahwa program-program tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas**: Jika hasil penilaian menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, ini menandakan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di Kecamatan Sungai Rumbai dilakukan secara terbuka dan akuntabel kepada masyarakat, dengan penyampaian informasi yang jelas dan tersedia bagi publik.
4. **Kepatuhan Terhadap Aturan dan Regulasi**: Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa Kecamatan Sungai Rumbai telah mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, hal ini menandakan bahwa instansi tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari potensi risiko pelanggaran hukum.

5 Rekomendasi Perbaikan: Jika hasil penilaian mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaikiatau ditingkatkan, interpretasi dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kinerja dan efisiensioperasional Kecamatan Sungai Rumbai melalui implementasi rekomendasi yang diberikan

Tabel 0-4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
Indikator Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Sungai Rumbai			70,41/ B	72.184/ BB	72.45/ BB	**78,12 BB**

Semenjak ditetapkan dalam indikator kinerja pada RENSTRA 2021-2026 Nilai AKIP Kecamatan Sungai Rumbai tiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini tidak lepas dari perbaikan perbaikan yang dilakukan baik secara administratif atau non administratif.

4. Indikator kinerja utama perangkat daerah Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Sungai Rumbai

Definisi indikator ini merujuk kepada Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Sungai rumbai merujuk pada evaluasi internal yang dilakukan terhadap implementasi program-program reformasi birokrasi

Interpretasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Sungai rumbai akan sangat tergantung pada temuan spesifik dalam evaluasi tersebut.

1. **Efektivitas Implementasi Program**: Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa program-program reformasi birokrasi telah diimplementasikan dengan baik, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa Kecamatan Sungai Rumbai telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja birokrasi lokal.
2. **Peningkatan Efisiensi dan Transparansi**: Jika hasil penilaian menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik dan peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, ini dapat diinterpretasikan sebagai tanda positif bahwa reformasi birokrasi telah berhasil mendorong perubahan yang diinginkan.
3. **Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholder**: Jika hasil penilaian menunjukkan tingkat partisipasi dan keterlibatan yang tinggi dari berbagai pihak, termasuk staf pemerintah, pemimpin lokal, dan masyarakat, ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi dukungan yang kuat untuk reformasi birokrasi.

4. **Tantangan dan Hambatan**: Jika hasil penilaian mengidentifikasi tantangan atau hambatan dalam implementasi reformasi birokrasi, ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Interpretasi ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi lebih lanjut dalam mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi.
5. **Rekomendasi Perbaikan**: Jika hasil penilaian menyertakan rekomendasi perbaikan, ini dapat diinterpretasikan sebagai arahan bagi Kecamatan Sungai Rumbai untuk fokus pada area-area tertentu yang memerlukan perbaikan lebih lanjut dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. **Keselarasan dengan Tujuan Nasional**: Interpretasi juga dapat mencakup evaluasi sejauh mana hasil penilaian tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah.

Tabel 0-5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator kinerja utama perangkat daerah Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Sungai Rumbai			**22,0**	**25,4**	**29,59**	

5. Indikator kinerja utama perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat

Definisi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merujuk kepada sebuah metrik atau indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap layanan atau kinerja suatu pemerintah, lembaga, atau organisasi tertentu. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat menilai kualitas layanan yang diberikan, kinerja organisasi, atau pemenuhan kebutuhan dan harapan mereka.

Interpretasi Indeks Kepuasan Masyarakat melibatkan analisis terhadap data yang dihasilkan dari survei atau metode pengukuran lainnya untuk memahami persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan atau kinerja yang diukur

1. **Analisis Skor Rata-rata**: Jika indeks kepuasan menggunakan skala tertentu (misalnya, skala 1-5), langkah pertama adalah menghitung skor rata-rata dari semua responden. Skor rata-rata ini mencerminkan kepuasan rata-rata masyarakat terhadap layanan atau kinerja yang diukur.
2. **Klasifikasi Kepuasan**: Berdasarkan skor rata-rata, dapat diklasifikasikan tingkat kepuasan masyarakat. Misalnya, skor di atas 4 dapat dianggap sebagai tingkat kepuasan tinggi, skor antara 3-4 sebagai kepuasan sedang, dan skor di bawah 3 sebagai kepuasan rendah.
3. **Analisis Distribusi**: Selain skor rata-rata, penting untuk menganalisis distribusi skor untuk memahami seberapa merata persepsi kepuasan di antara responden. Misalnya, apakah sebagian besar responden memberikan skor tinggi atau terdapat variasi besar dalam skor yang diberikan?
4. **Perbandingan dengan Standar atau Target**: Hasil indeks kepuasan dapat dibandingkan dengan standar atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah hasil indeks tersebut mencapai target yang ditetapkan? Jika tidak, apa penyebabnya dan bagaimana langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil?
5. **Analisis Sub-grup**: Penting untuk melakukan analisis sub-grup untuk memahami apakah ada perbedaan dalam kepuasan antara kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, atau latar belakang sosial-ekonomi. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi ketidaksetaraan dalam akses atau kepuasan layanan.

6. **Trend dan Perubahan dari Waktu ke Waktu**: Jika survei dilakukan secara berkala, penting untuk melihat trend dan perubahan dari waktu ke waktu dalam indeks kepuasan masyarakat. Apakah ada peningkatan atau penurunan signifikan dari periode sebelumnya? Apa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan tersebut?
7. **Interpretasi Kualitatif**: Selain data kuantitatif, penting juga untuk memperhatikan informasi kualitatif, seperti komentar atau umpan balik dari responden, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat.

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator kinerja utama perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	**Nilai**		80	80,5	81,0	82,0

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu strategis

Dalam pelaksanaan setiap Kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan tahun 2024 adalah :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum bisa dilakukan secara maksimal karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran akibat dari dampak pandemi, sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dan perubahan dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran.
2. Belum terpenuhinya sarana peralatan kerja yang memadai seperti computer unit dan dukungan ketersediaan jaringan internet yang lebih baik dalam rangka mengikuti perkembangan zaman yang sudah melangkah pada pelayanan berbasis komputerisasi. Masih perlu sosialisasi fasilitasi intens tentang pemahaman perundang-undangan bagi perangkat Pemerintah Nagari

2.3.2 Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

-Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Rumbai dalam pelaksanaan Renja 2024, Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

-Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dalam Renja 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Rumbai tidak ditemukan

Dan ada beberapa factor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi target kinerja dari Program/Kegiatan antara lain :

a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan /program yang akan diselenggarakan baik

kecamatan,

b. Sering terjadinya beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan namun belum didukung ketersediaan anggaran.

- **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah,** Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Rumbai, belum bisa diukur karena merup[akan tahun pertama peride Renstra.
- **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut,** perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,serta perlunya adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu indikatornya kinerja utama perangkat daerah Indikator kinerja utama perangkat daerah Kecamatan Sungai Rumbai Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP

Pada indikator ini merujuk kepada Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada ukuran kinerja yang menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga lainnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur operasional standar

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan Sungai Rumbai

Tabel 0-6 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan Sungai Rumbai

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Bidang Fisik							
1	Lanscape Kantor Camat (Paping Blok dan Batu Baronjong)	Ktr camat S Rumbai	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai		1		
2	Plafon Aula Kantor Camat Sungai Rumbai	Ktr camat S Rumbai	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai		1		
3	Lanjutan Pembangunan GOR mini dan Pembangunan Drainase Menuju GOR mini	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai		2		
4	Pengaspalan Kembali jalur Tugu Nagari Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai		4		
5	Lanjutan Pembagunan Gadung Pertemuan /Serba Guna	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai		30X50		
6	Pembangunan Jalan menuju Solok Selatan	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai		1		
7	Rehap jalan Kehutanan sampaing Kantor Wali	Sungai Rumbai Timur	Sungai Rumbai Timur	Sungai Rumbai		4		
8	Revitalisasi jalan menuju Puskesmas	Sungai Rumbai Timur	Sungai Rumbai Timur	Sungai Rumbai		500		
9	Pemasangan Paving Blok dan Pagar Puskesmas Sungai Rumbai	Sungai Rumbai Timur	Sungai Rumbai Timur	Sungai Rumbai		1		
10	Rigid Beton Jalan Lingkar	Kurnia Koto Salak	Kurnia Koto Salak	Sungai Rumbai		2500		
11	Aspal Hotmix Jr. Tawakal Khasanah	Kurnia Koto salak	Kurnia Koto salak	Sungai Rumbai		3000		
12	Rehap jalan aspal Poros Lingkar Nagari	Kurnia Selatan	Kurnia Selatan	Sungai Rumbai		12.000		
13	Penerangan jalan	Kurnia Selatan	Kurnia Selatan	Sungai Rumbai		1		

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
14	Pembangunan Drainase jalan Kabupaten	Kurnia Selatan	Kurnia Selatan	Sungai Rumbai		10.000		
	BIDANG EKONOMI							
1	Pembangunan Pondok Jualan Area Pasar Nagari	Kurnia Koto Salak	Kurnia Koto Salak	Sungai Rumbai		1		
2	Pembukaan Jalan Lingkar Produksi	Kurnia Kooto salak	Kurnia Kooto salak	Sungai Rumbai		1		
3	Pengerasan jalan Produksi	Kurnia Selatan	Kurnia Selatan	Sungai Rumbai		19.500		
	BIDANG SOSIAL BUDAYA							
1	Pembangunan Puskesmas Pembantu Sungai Rumbai (PUSTU)	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai		1		
2	Pembangunan Balairong Adat Tujuh Gonjong ukuran 8x15M	S Rumbai Timur	S Rumbai Timur	Sungai Rumbai		1		
3	Pembuatan MCK 3 SD dan 1 SMP	S Rumbai Timur	S Rumbai Timur	Sungai Rumbai		4		
4	Pembangunan Gedung SD Koto Indah	Kurnia Koto Salak	Kurnia Koto Salak	Sungai Rumbai		1		
5	Sarana Prasarana Perlengkapan Olahraga	Kurnia Selatan	Kurnia Selatan	Sungai Rumbai		1		

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah : Kecamatan Sungai Rumbai

VISI : Mewujudkan Dharmasraya yang Mandiri dan Berbudaya

Misi RPJMD : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

Tujuan RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Kecamatan dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Sasaran RPJMD :Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi				Proyeksi		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan :Mewujudkan tatakelola Kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah								
Sasaran 1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan								
Indikator Sasaran : a.Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	persen		70	80	80	90	90	90
Indikator sasaran : b.Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		60	60	60	65	65	65

Indikator Sasaran : c.Persentasi Gangguan trantibum yang ditangani di wilayah kecamatan	Kasus		2	3	3	3	4	4
Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.								
Indikator Sasaran : a.Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Sungai Rumbai	Nilai/Perikat		63,41/ B	72,184/ BB	74,138/ B	73,364/ BB	76,682/ BB	80/ BB
Indikator Sasaran : b.Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Sungai Rumbai	Nilai		24,4	25,4	30,3	32,8	37,6	42,5

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan realisasi 2021, 2022 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2023, maka proyeksi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

MATRIK PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA PERUBAHAN OPD) KECAMATAN SUNGAI RUMBAI KAB. DHARMASRAYA TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2025	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SUNGAI RUMBAI						1.829.993.200,00	1.616.082.047,00							2.833.749.880,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.829.993.200,00	1.616.082.047,00							2.833.749.880,00	
	7.01	KECAMATAN						1.829.993.200,00	1.616.082.047,00							2.833.749.880,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen			100 persen	1.808.583.200,00	1.604.551.947,00						100 persen	2.794.788.114,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	-			15 orang	1.546.591.000,00	1.359.038.997,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.223.164.109,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.01.2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.546.591.000,00	1.359.038.997,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Meningkat	-		2.223.164.109,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-			1 Tahun	112.916.800,00	83.593.850,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Meningkat	-	-	180.864.121,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				7 Paket	1.610.000,00	2.477.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		2.486.144,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	11.681.500,00	6.960.500,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud	-		25.242.651,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				3 Paket	5.404.000,00	1.791.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud	-		5.856.400,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	10.000.000,00	15.525.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud	-		29.716.000,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	5.179.300,00	5.179.300,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud	-		6.911.665,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

	7.01.01.2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	79.042.000,00	51.661.050,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujud	-		110.651.261,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	*Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun*	-			3 Jenis	0,00				-	**Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujud**	-	-	**50.000.000,00**	**KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**
	7.01.01.2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	0,00		Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujud	-		50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah Jasa pembelian materai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS***	-			**1 Tahun**	**129.825.400,00**	**120.193.100,00**			-	**Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujud**	-	-	**288.153.972,00**	**KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**
	7.01.01.2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				2 Laporan	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujud	-		2.928.200,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

	7.01.01.2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	14.298.000,00	14.055.700,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud	-		19.326.120,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.01.2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				6 Laporan	0,00		Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud	-		3.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.01.2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	113.927.400,00	104.537.400,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud	-		262.889.652,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jenis BMD yang di Pemeliharaan***	-			**3 Jenis**	**19.250.000,00**	**41.726.000,00**			-	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud**	-	-	**52.606.912,00**	**KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**
	7.01.01.2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud	-		18.037.712,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				6 Unit	6.250.000,00	6.250.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		17.569.200,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	4.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud	-		5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	0,00	25.476.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud	-		12.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP***	**90 persen**			**90 persen**	**1.400.000,00**	**350.000,00**						**90 persen**	**4.831.530,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan*	-			12 Jenis	1.400.000,00	350.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud	-	-	4.831.530,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*				35 Dokumen	700.000,00	350.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud	-		3.221.020,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*				550 Laporan	700.000,00		Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan	-		1.610.510,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD***	**65 persen**			**65 persen**	**13.860.000,00**	**13.860.000,00**						**65 persen**	**18.796.116,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten*	-			3 Jenis	13.860.000,00	13.860.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	18.796.116,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				45 Lembaga Kemasyarakatan	13.860.000,00	13.860.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		18.796.116,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah***	**100 persen 100 persen 100 persen**			**100 persen 100 persen**	3.440.000,00	820.000,00						**100 persen 100 persen 100 persen**	**4.685.120,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan*	-			3 Kasus	3.440.000,00	820.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud	-	-	4.685.120,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*				3 Laporan	3.440.000,00	520.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud kan tata kelola pem erintahan yang baik	-		4.665.120,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan***	**100 Persen 100 Persen**			**100 Persen 100 Persen**	3.120.000,00	0,00						**100 Persen 100 Persen**	**10.648.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	-			7 Jenis	3.120.000,00				-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud	-	-	10.648.000,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang *Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				4 Dokumen	3.120.000,00		Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud	-		10.648.000,00	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	JUMLAH							**1.829.993.200,00**	**1.616.082.847,00**							**2.833.749.880,00**	

Sungai Rumbai, Otober 2025
Camat Sungai Rumbai

MARCO ANDRIAS,S.IP,MM
NIP. 19860603200701100l

Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Kec. Sungai Rumbai	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Keytepatan waktu pelayanan perizinan dan Non perizinan sesuai SOP	Persen	80	80	90%	90	90	90
2	Persentase hasil musrembang kecamatan yang di tamping dalam RKPD	Persen	60	60	80%	65	80	65
3	Jumlah Gangguan Trantibun yang ditangani di wilayah kecamatan	Kasus	3	3	3	3	5	4
4	Hasil Peilain AKIP Kecamatan Sungai Rumbai	Nilai Prediket	66,728/B	72,184BB	73,364/BB	78,046 BB	72,184/BB	76,682/BB
5	Hasil Penialain Mandiri pelaksanaan reformasi Birokrasi kecamtan sungai rumbai	Nilai	23,2	28	32,8	39,8	32,8	37,6
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,5	87,5	81,5	82,0	81,5	82,5

BAB 5. PENUTUP

Bab 5 berisi Kesimpulan dan saran-saran terhadap RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

…

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Rumbai (Renja PD) merupakan Rencana Kerja tahunan yang disusun guna menyiapkan secara optimal Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025. Rencana Kerja ini sendiri akan menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Dengan adanya rencana kerja ini nantinya diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan dengan labih baik.

Penyusunan Renja sebagai suatu dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan kerja PD merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan. Rancangan kerja masa yang akan datang harus selalu mempedomani Program dan kegiatan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Evaluasi secara terstruktur dan berkelanjutan pada tahun berjalan dapat mengakomodir tingkat perobahan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sungai Rumbai secara berkesinambungan.

Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada perangkat Daerah Kecamatan Sungai rumbai dalam pelaksanaan Renja 2023 ,Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran.

Dalam bab II pada narasi Renja ini ada sub babnya yang berkaiatan dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Sungai Rumbai, pada Renja 2025 ini Kecamatan Sungai Rumbai Memiliki 2(Dua) saran dan 5 (Lima) Indikator yang masing-masingnya memiliki Sasaran,definisi,interpretasi,perkembangan data serta dilengkapi dengan data perbandingan tahun sebelumnya.Dalam Bab ini Juga terdapat isu-

isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah salah satunya belum terpenuhinya sarana peralatan kerja yang memadai seperti computer unit dan dukungan ketersediaan jaringan internet yang lebih baik dalam rangka mengikuti perkembangan zaman yang sudah melangkah pada pelayanan berbasis komputerisasi,masih perlu sosialisasi fasilitasi intens tentang pemahaman perundang-undangan bagi perangkat pemerintah Nagari.

Dalam Bab III terdapat penjelasan Tujuan dan Sasaran Perangkar daerah Kecamatan Sungai Rumbai,yang mana Tujuan RPJMD Kecamatan Sungai Rumbai Yaitu : Mewujudkan tata kelola kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah.

Sasaran RPJMD Kecamatan Sungai Rumbai adalah : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan tugas pemerintah umum dan pemberdayaan Masyarakat di kecamatan.

Dalam Baba IV menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah,Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Dengan penyusunan Dokumen Renja PD diharapkan nantinya dapat dilakukan penjabaran Visi dan Misi, serta Sasaran yang telah ditetapkan dengan maksimal. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Rumbai ini mengakomodir Penetapan Skala prioritas dalam penyusunan rancangan Program dan kegiatan. Hal ini diperlukan dalam melakukan sinergitas dengan PD terkait.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR..... TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KOTO SALAK
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1. .. PENDAHULUAN..... 1-1

1.1. Latar Belakang..... 1-1
1.2. Landasan Hukum..... 1-2
1.3. Maksud dan Tujuan..... 1-3
1.3.1. Maksud..... 1-3
1.3.2. Tujuan..... 1-3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD..... 1-3

BAB 2. .. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU*..... 2-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 2-3
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 2-9
2.3.1. Isu strategis..... 2-9
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah..... 2-9
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 2-1
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan Koto Salak..... 2-1
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 3. .. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... Error! Bookmark not defined.

*3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat**Error! Bookmark not defined.***
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait..... **Error! Bookmark not defined.**
3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas.....Provinsi Sumatera Barat**Error! Bookmark not defined.**
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah..... 3-1

BAB 4. .. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 4-1

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 4-1
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Koto Salak..... 4-9

BAB 5. .. PENUTUP..... 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-165 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2-166 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2023.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5-1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 6-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024..... 2

Tabel 6-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Rencana Kerja Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. **Kecamatan Koto Salak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan Koto Salak melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pelayanan , Bidang Kesra, Bidang Pemerintahan Nagari,Bidang Ekbang dan Bidang trantibun.**

Rencana Kerja Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Kecamatan Koto Salak disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
   1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024.
   2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
   3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2019 s.d 2024.

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2025

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
   1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan prangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida
   2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini siserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.

e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2. LandasanHukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Koto Salak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmengdagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan pembangunan dan Keungan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023- 2043;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

1.3. MaksuddanTujuan

131. *Maksud*

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Koto Salak secara berkesinambungan.

132 *Tujuan*

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Koto Salak hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. SistematikaDokumenRKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II **Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Koto Salak Tahun 2023**
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Koto Salak, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Koto Salak, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Koto Salak

BAB IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

BAB V Penutup

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KOTO SALAK TAHUN 2024

21. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Koto Salak Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Koto Salak

Untuk mendukung menjalankan tugas dan fungsinya tahun 2024 Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya mendapat alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. **1.221.976.200,-** yang dialokasikan untuk pelaksanaan 5 Program dan 19 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. **1.171.730.313** dengan capaian kinerja keuangan sebesar **95,89 %.**

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun 2024 antara lain :

21 a. Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp. **890.455.000**,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. **848.497.733**- atau terealisasi sebesar 95,28 %.
b. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp. **138.063.100**,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. **137.601.880**,- atau terealisasi sebesar 99,66%
c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran Rp**. 27.600.000,-** dengan anggaran terserap sebesar Rp. 27.350.000,- atau terealisasi sebesar 99.09 %.
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. **134.958.100**,- dengan anggaran terserap sebesar Rp.**128.622.000**,- atau terealisasi sebesar 95,31 %
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. **17.970.000**,- dengan anggaran terserap sebesar Rp**. 16.728.700**,- atau terealisasi sebesar 93,14 %.

Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pagu Total sebesar Rp. **1.209.046.200,**- telah terserap Rp. **1.158.800.313,-** atau terealisasi sebesar 95,84%

2.1.1.b. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan dengan jumlah anggaran Rp.**2.850.000,-** telah terserap sebesar Rp.**2.850.000** atau terealisasi sebesar 100 %

2.1.1.c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa jumlah anggaran Rp. **7.680.000,-** Telah terserap Rp. **7.680.000**,- atau terealisasi sebesar 100%.

2.1.1. d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan jumlah anggaran Rp.**1.200.000**,- telah terserap Rp. **1.200.000**,- atau terealisasi sebesar 100 %

2.1.1.e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koorinsi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah anggaran Rp. **1.200.000**,- Telah terserap Rp. **1.200.000**,- atau terealisasi sebesar 100 %

Beberapa program dan kegiatan Kecamatan Koto Salak diatas tidak dapat dilaksanakan dan tidak mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ada kegiatan yang anggaran tidak tersedia setelah perobahan dan ada anggaran terserap secara maksimal, karena terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya di kosongkan serta ada pengurangan gaji di Pegawai Non ASN di Kecamatan Koto Salak

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat daerah belum dapat dilaksanakan dikarenakan Rencana Kerja 2022 merupakan Tahun ke-3 dari periode Rencana strategis 2021-2026.

-Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Pada Perangkat Daerah Kecamatan Koto Salak dalam pelaksanaan Renja 2024 tidak ada Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi.

-Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Pada Perangkat Daerah Kecamatan Koto Salak dalam pelaksanaan Renja 2024, Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

-Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dalam Renja 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Koto Salak tidak ditemukan.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA, TERPENUHINYA ATAU MELEBIHI TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN; ANTARA LAIN

a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan /program yang akan diselenggarakan baik kecamatan,

b. Sering terjadinya beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan namun belum didukung ketersediaan anggaran.

- **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah,** Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Koto Salak, belum bisa diukur karena merupakan tahun keempat peride Renstra.
- **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut,** perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,serta perlunya adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan

1. Indikator kinerja utama perangkat daerah Indikator kinerja utama perangkat daerah Kecamatan Koto Salak Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP

   Pada indikator ini merujuk kepada Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non- Perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada ukuran kinerja yang menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga lainnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur operasional standar

   Interpretasi dari indikator ini tergantung dari bebrapa interpretasi diantaranya ;

   1. **Persentase Ketepatan Waktu**: Ini adalah rasio antara jumlah pelayanan yang dilakukan tepat waktu dengan total jumlah pelayanan yang dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu, diukur dalam persentase. Ketepatan waktu biasanya diukur dengan membandingkan waktu penyelesaian pelayanan dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam SOP.
   2. **Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan**: Merujuk pada jenis pelayanan yang diberikan oleh instansi atau lembaga tersebut. Pelayanan perizinan mencakup proses pemberian izin, lisensi, atau persetujuan dari pemerintah atau badan lainnya, sementara pelayanan non- perizinan mencakup layanan yang tidak memerlukan izin atau persetujuan khusus, seperti pelayanan informasi, konsultasi, atau pelayanan administratif lainnya.
   3. **Standar Operasional Prosedur (SOP)**: Merupakan pedoman atau aturan yang mengatur tata cara dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan suatu proses atau kegiatan tertentu. SOP biasanya mencakup detail tentang prosedur, waktu yang dibutuhkan, tanggung jawab, dan langkah-langkah kualitas lainnya untuk memastikan konsistensi dan kinerja yang optimal dalam penyediaan layanan.

Tabel 2-1 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(4)		6)	(7)
Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP	**Persen**		**70**	**95**	**80**	**85**
umlah rekomendasi tentang perizinan dan Non perizinan	Dokumen					
Jumlah IMB yang di terbitkan sesuai dengan kewenangan	Dokumen					-

Sumber : ..., Tahun 2024

Dengan demikian, Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan sesuai SOP adalah ukuran kinerja yang menggambarkan sejauh mana suatu lembaga atau instansi pemerintah memenuhi waktu penyelesaian pelayanan yang telah ditetapkan dalam SOP, baik untuk layanan yang bersifat perizinan maupun non-perizinan. Dalam pelaksanaan indicator ini dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan mengingat selalu diadakannya perbaikan dari berbagai aspek dan sampai Triwulan II Tahun 2024 pada kondisi bulan April

1. Indikator kinerja utama perangkat daerah ***Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD***

Pada indikator ini merujuk pada seberapa besar usulan atau hasil kesepakatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan yang akhirnya diikutsertakan atau dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator ini mengacu kepada proporsi atau persentase dari hasil Musrenbang yang berhasil diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan kerja Pemerintah Daerah yang lebih formal, yaitu RKPD. Hal ini menunjukkan sejauh mana aspirasi masyarakat atau stake holders lokal tercermin dan dijadikan bagian dari RKPD yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu.

Interpretasi dari indikator ini tergantung dari bebrapa interpretasi diantaranya ;

1. **Prioritas Pembangunan**: Hasil musrenbang menjadi acuan dalam menetapkan prioritas pembangunan di daerah tersebut. Program dan kegiatan yang telah disepakati dalam musrenbang kemudian diakomodasi dalam RKPD sebagai bagian dari agenda pembangunan tahunan.
2. **Legitimasi Partisipatif**: RKPD yang memuat hasil musrenbang menunjukkan adanya aspek partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak dalam musrenbang memberi legitimasi atas prioritas dan program pembangunan yang disepakati.
3. **Keterhubungan Antara Musrenbang dan RKPD**: Inklusi hasil musrenbang dalam RKPD menunjukkan adanya keterhubungan yang erat antara proses perencanaan partisipatif dengan dokumen perencanaan resmi pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung dihubungkan dengan rencana kerja pemerintah.
4. **Pertanggungjawaban Publik**: Dengan memuat hasil musrenbang dalam RKPD, pemerintah daerah menunjukkan keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap publik. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD merupakan komitmen yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5. **Pembangunan Berkelanjutan**: Dalam interpretasi yang lebih luas, hasil musrenbang yang ditampung dalam RKPD diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan karena mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat yang diintegrasikan ke dalam rencana kerja pemerintah.

Tabel 0-2 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Persentase Hasil Musrembang Kecamatan yang di tampung dalam RKPD	persen					

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Koordinasi dan pembinaan nagari / pemberdayaan desa /Nagari	nagari	5	5	5	5	5
Usulan Musrembang untuk RKPD	usulan	50	60	60	60	65

Sumber Data Tahun 2024

Dengan demikian, interpretasi dari persentasi hasil musrenbang yang ditampung dalam RKPD mencakup aspek-aspek partisipatif, keterhubungan antara perencanaan partisipatif dengan dokumen resmi perencanaan pemerintah, serta pertanggungjawaban publik dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada perkembangan dalam beberapa Tahun belakangan mengindikasikan sudah makin tingginya usulan yang ditampung dalam RKPD dengan cara mengerucutkan kembali usulan menjadi skala prioritas yang lebih sedikit namun bisa terakomodir dalam RKPD.

2. Indikator kinerja utama perangkat daerah Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Koto Salak

Indikator ini merujuk kepada merujuk pada data atau statistik tentang jumlah insiden atau gangguan terkait dengan ketertiban umum (trantibum) yang dikelola atau ditangani di suatu wilayah administratif, dalam hal ini wilayah Kecamatan Koto Salak

Interpretasi dari indikator ini tergantung dari bebrapa interpretasi diantaranya ;

1. **Jumlah Gangguan Trantibum**: Ini merujuk pada jumlah insiden atau kejadian yang melibatkan gangguan terhadap ketertiban umum di suatu wilayah tertentu. Gangguan tersebut dapat berupa berbagai jenis pelanggaran atau tindakan yang mengganggu ketertiban sosial, seperti perkelahian, perusakan harta benda, tindak kejahatan, atau bencana alam dan pelanggaran aturan lainnya.
2. **Ditangani di Wilayah Kecamatan Koto Salak**: Ini menunjukkan bahwa gangguan tersebut terjadi atau dikelola di wilayah administratif tertentu, yaitu Kecamatan Koto Salak adalah unit administratif di bawah kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, termasuk masalah-masalah terkait ketertiban umum.

Tabel 0-3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase kejadian gangguan trantibum yang di tangani aparatur kecamatan	**kasus**					
Koordinasi Penerapan dan Penegakn Peraturan Daerah dan Peraturan Kepaka daerah	Kasus / persen	100	100	3	100	100
Jumlah kasus yang terjadi	Kasus / persen	100	100	3	0	0

Sumber :data bulan April Tahun 2024

Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Koto Salak" adalah data tentang jumlah insiden atau kejadian yang mengganggu ketertiban umum yang dikelola atau ditangani di wilayah administratif Kecamatan Koto Salak Dalam beberapa tahun belakangan ada beberapa jenis gangguan trantibum yang terjadi di Kecamatan Koto Salak namun gangguan tersebut bisa ditangani berkat koordinasi dan kerjasama lintas lembaga.

3. Indikator kinerja utama perangkat daerah Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Koto Salak

Indikator ini merujuk kepada penilaian AKIP yang mencakup berbagai aspek kinerja instansi pemerintah, seperti manajemen keuangan, efektivitas program dan kegiatan, akuntabilitas, transparansi, dan aspek-aspek lain yang relevan. Hasil penilaian ini dapat berupa laporan yang mencakup temuan- temuan, rekomendasi, serta evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah

Interpretasi hasil penilaian AKIP (Audit Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Koto Salak dapat bervariasi tergantung pada temuan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa.

1. **Kinerja Keuangan**: Jika hasil penilaian menunjukkan kinerja keuangan yang baik, hal ini bisa diartikan bahwa pengelolaan keuangan Kecamatan Koto Salak telah dilakukan dengan

baik, termasuk pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan yang akurat, dan penggunaan anggaran yang efisien.

2. **Efektivitas Program dan Kegiatan**: Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Koto Salak efektif, hal ini menunjukkan bahwa program-program tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas**: Jika hasil penilaian menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, ini menandakan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di Kecamatan Koto Salak dilakukan secara terbuka dan akuntabel kepada masyarakat, dengan penyampaian informasi yang jelas dan tersedia bagi publik.
4. **Kepatuhan Terhadap Aturan dan Regulasi**: Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa Kecamatan Koto Salak telah mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, hal ini menandakan bahwa instansi tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari potensi risiko pelanggaran hukum.

5 Rekomendasi Perbaikan: Jika hasil penilaian mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaikiatau ditingkatkan, interpretasi dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kinerja dan efisiensioperasional Kecamatan Koto Salak melalui implementasi rekomendasi yang diberikan

Tabel 0-4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2024

Indikator		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
Indikator Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Koto Salak			**58,75/C**	**60,61/B**	**67,18/B**	**69.33/B**

Semenjak ditetapkan dalam indikator kinerja pada RENSTRA 2021-2026 Nilai AKIP Kecamatan Koto Salak tiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini tidak lepas dari perbaikan perbaikan yang dilakukan baik secara administratif atau non administratif.

4. Indikator kinerja utama perangkat daerah Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Koto Salak

Definisi indikator ini merujuk kepada Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Koto Salak merujuk pada evaluasi internal yang dilakukan terhadap implementasi program- program reformasi birokrasi

Interpretasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Koto Salak akan sangat tergantung pada temuan spesifik dalam evaluasi tersebut.

1. **Efektivitas Implementasi Program**: Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa program-program reformasi birokrasi telah diimplementasikan dengan baik, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa Kecamatan Koto Salak telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja birokrasi lokal.
2. **Peningkatan Efisiensi dan Transparansi**: Jika hasil penilaian menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik dan peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, ini dapat diinterpretasikan sebagai tanda positif bahwa reformasi birokrasi telah berhasil mendorong perubahan yang diinginkan.
3. **Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholder**: Jika hasil penilaian menunjukkan tingkat partisipasi dan keterlibatan yang tinggi dari berbagai pihak, termasuk staf pemerintah, pemimpin lokal, dan masyarakat, ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi dukungan yang kuat untuk reformasi birokrasi.

4. **Tantangan dan Hambatan**: Jika hasil penilaian mengidentifikasi tantangan atau hambatan dalam implementasi reformasi birokrasi, ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Interpretasi ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi lebih lanjut dalam mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi.
5. **Rekomendasi Perbaikan**: Jika hasil penilaian menyertakan rekomendasi perbaikan, ini dapat diinterpretasikan sebagai arahan bagi Kecamatan Koto Salak untuk fokus pada area-area tertentu yang memerlukan perbaikan lebih lanjut dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. **Keselarasan dengan Tujuan Nasional**: Interpretasi juga dapat mencakup evaluasi sejauh mana hasil penilaian tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah.

Tabel 0-5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator kinerja utama perangkat daerah Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Koto Salak			**18,1**	**N/A**	**0**	**0**

5. Indikator kinerja utama perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat

Definisi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merujuk kepada sebuah metrik atau indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap layanan atau kinerja suatu pemerintah, lembaga, atau organisasi tertentu. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat menilai kualitas layanan yang diberikan, kinerja organisasi, atau pemenuhan kebutuhan dan harapan mereka.

Interpretasi Indeks Kepuasan Masyarakat melibatkan analisis terhadap data yang dihasilkan dari survei atau metode pengukuran lainnya untuk memahami persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan atau kinerja yang diukur

1. **Analisis Skor Rata-rata**: Jika indeks kepuasan menggunakan skala tertentu (misalnya, skala 1-5), langkah pertama adalah menghitung skor rata-rata dari semua responden. Skor rata-rata ini mencerminkan kepuasan rata-rata masyarakat terhadap layanan atau kinerja yang diukur.
2. **Klasifikasi Kepuasan**: Berdasarkan skor rata-rata, dapat diklasifikasikan tingkat kepuasan masyarakat. Misalnya, skor di atas 4 dapat dianggap sebagai tingkat kepuasan tinggi, skor antara 3-4 sebagai kepuasan sedang, dan skor di bawah 3 sebagai kepuasan rendah.
3. **Analisis Distribusi**: Selain skor rata-rata, penting untuk menganalisis distribusi skor untuk memahami seberapa merata persepsi kepuasan di antara responden. Misalnya, apakah sebagian besar responden memberikan skor tinggi atau terdapat variasi besar dalam skor yang diberikan?
4. **Perbandingan dengan Standar atau Target**: Hasil indeks kepuasan dapat dibandingkan dengan standar atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah hasil indeks tersebut mencapai target yang ditetapkan? Jika tidak, apa penyebabnya dan bagaimana langkah- langkah perbaikan yang dapat diambil?
5. **Analisis Sub-grup**: Penting untuk melakukan analisis sub-grup untuk memahami apakah ada perbedaan dalam kepuasan antara kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, atau latar belakang sosial-ekonomi. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi ketidaksetaraan dalam akses atau kepuasan layanan.

6. **Trend dan Perubahan dari Waktu ke Waktu**: Jika survei dilakukan secara berkala, penting untuk melihat trend dan perubahan dari waktu ke waktu dalam indeks kepuasan masyarakat. Apakah ada peningkatan atau penurunan signifikan dari periode sebelumnya? Apa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan tersebut?
7. **Interpretasi Kualitatif**: Selain data kuantitatif, penting juga untuk memperhatikan informasi kualitatif, seperti komentar atau umpan balik dari responden, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat.

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator kinerja utama perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		80	80,61	80	75

23. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

231. *Isu strategis*

Dalam pelaksanaan setiap Kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan tahun 2024 adalah :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum bisa dilakukan secara maksimal karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran akibat dari dampak pandemi, sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dan perubahan dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran.
2. Belum terpenuhinya sarana peralatan kerja yang memadai seperti computer unit dan dukungan ketersediaan jaringan internet yang lebih baik dalam rangka mengikuti perkembangan zaman yang sudah melangkah pada pelayanan berbasis komputerisasi. Masih perlu sosialisasi fasilitasi intens tentang pemahaman perundang-undangan bagi perangkat Pemerintah Nagari

232. *Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah*

-Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Pada Perangkat Daerah Kecamatan Koto Salak dalam pelaksanaan Renja 2024, Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

-Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dalam Renja 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Koto Salak tidak ditemukan **Dan ada beberapa factor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi target kinerja dari Program/Kegiatan antara lain :**

a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan /program yang akan diselenggarakan baik

kecamatan,

b. Sering terjadinya beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan namun belum didukung ketersediaan anggaran.

- **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah,** Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Koto Salak, belum bisa diukur karena merupakan tahun pertama peride Renstra.
- **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut,** perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,serta perlunya adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

AnalisisKinerjaPelayananPerangkatDaerah

Salah satu indikatornya kinerja utama perangkat daerah Indikator kinerja utama perangkat daerah Kecamatan Koto Salak Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP

Pada indikator ini merujuk kepada Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non- Perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada ukuran kinerja yang menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga lainnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur operasional standar

24. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

241. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan Koto Salak

Tabel 2.4.1- 1 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatkan jalan di jembatan penghubung koto salak dan Ampalu	Jr. Tanjung Alam	Koto Salak	Koto Salak	Dinas PUPR	100 M		
2	Pembangunan Gedung Sekolah Dasar	Nag. Koto Salak	Koto Salak	Koto Salak	Dinas Pendidikan	6 Ruang Kelas		
3	Perbaikan Aspal Jalan poros	Jr. Pdg. Tarok, Sei Lancar, Pekan Senayan	Koto Salak	Koto Salak	Dinas PUPR	5 Km		
4	Pemasangan Lampu Penerang Jalan	Nag. Koto Salak	Koto Salak	Koto Salak	Dinas Perhubungan	50 Buah		
5	Bantuan perlengkapan Olah raga dan sepak bola	Nag. Koto Salak	Koto Salak	Koto Salak	Dinas Budparpora	2 Tim		
6	Pembangunan Jembatan permanen padukuan ke Ampalu	Jr. Padang Rampak	Padukuan	Koto Salak	Dinas PUPR	I unit		
7	Aspal Jalan Poros Jr Padang Tengah I dan Padang Tengah II	Jr, Pdng Tengah I dan Pdg Tengah II	Padukuan	Koto Salak	Dinas PUPR	2500 M		
8	Dam Puskesmas Sitiung II		Padukuan	Koto Salak	Dinas PUPR	80 M		
9	Pembukaan Jalan Produksi Perkebunan Jorong Padukuan Jr, Padang Tengah I	Jr Padukuan, Jr Pdg Tengah I	Padukuan	Koto Salak	Dinas PUPR	8 km		
10	Pembangunanbatu bronjong	jr panagn rampak	Padukuan	Koto Salak	Dinas Kumperdag	1 Unit		
11	Pembangunan Batu Jarut Jembatan	Jr Limau Sundai, Jr Pulau Mainan	Pulau Mainan	Koto Salak	Dinas PUPR	2 Unit		
12	Pembangunan Alun-alun dan rukoa wisata kuliner Nagari	Nagari Pulau Mainan	Pulau Mainan	Koto Salak	Dinas PUPR	1 Ls		
	Pengerasan Jalan Usaha Tani	Nagari Pulau	Pulau Mainan	Koto Salak	Dinas Kesehatan	1000 M		

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
13		Mainan						
14	Pembanguan Pagar Polindes	Nagari Pulau Mainan	Pulau Mainan	Koto Salak	Dinas Pertanian	1 Unit		
15	Pembangunan Gedung Posyandu	Nagari Pulau Mainan	Pulau Mainan	Koto Salak	Dinas Pendidikan	1 Unit		
16	Pelebaran jalan dan Jembatan Jalan poros	Nagari Simalidu	Nag Simalidu	Koto Salak	Dinas PUPR	7 M		
17	Pembangunan Drainase Semua Jorong		Nag Simalidu	Koto Salak	Dinas PUPR	1400 M		
18	Pengadaan Sarana Air Bersih (PAMSIMAS)		Nag Simalidu	Koto Salak	Dinas Pertanian	2 Unit		
19	Pembangunan dan Pengembangan Pasar Nagari	Jr Setia Budi	Nag Simalidu	Koto Salak	Dinas Kesehatan	1 Unit		
20	Lanjutan Pembangunan Rumah Gadang	Nagari Simalidu	Nag Simalidu	Koto Salak	Dinas Kesehatan	1 Unit		
21	Perbaikan Jalan Jorong Koto Ampalu	Jr Koto Ampalu	Ampalu	Koto Salak	Dinas PUPR	4 Km		
22	Aspal Lapen Jrg mangkalang	Jr mangkalang	Ampalu	Koto Salak	Dinas PUPR	2 Km		
23	Saluran Irigasi Jr Pintu Agung dan Mekar Sari	Jr Pintu Agun & Mekar Sari	Ampalu	Koto Salak	Dinas PUPR	3 Km		
24	Pembangunan Los Kuliner	Jorng Pasar Baru	Ampalu	Koto Salak	Dinas Kumperdag	20 Unit		
25	Rehabilitas Masjid	Jr Pasar lama, Pintu Agung dan Mekar Sari	Ampalu	Koto Salak	Dinas Budparpora	3 Unit		

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuandansasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah :

Kecamatan Koto Salak

VISI : Mewujudkan Dharmasraya yang Mandiri dan Berbudaya

Misi RPJMD : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

Tujuan RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Kecamatan dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Sasaran RPJMD :Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi				Proyeksi		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan :Mewujudkan tatakelola Kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah								
Sasaran 1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan								
Indikator Sasaran : a.Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	persen		70	80	80	90	90	95
Indikator sasaran : b.Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		**7**	**56,25**	**55,5**	57	65	65

Indikator Sasaran : c.Persentasi Gangguan trantibum yang ditangani di wilayah kecamatan	Kasus		2	3	0	0	3	3
Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.								
Indikator Sasaran : a.Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Koto Salak	Nilai/Perikat		**58,75/C**	**60,61/B**	**67,18/B**	69,33/ B	73,666/ BB	76.512/ BB
Indikator Sasaran : b.Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Koto Salak	Nilai		**18,1**	**N/A**	**0**	0	0	0
Indeks Kepuasan Masyarakat			80	80,61	80	75	81	81

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan realisasi 2021, 2022 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2023, maka proyeksi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

MATRIK PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KOTO SALAK KAB. DHARMASRAYA TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KOTO SALAK							**1.666.664.200,00**	**1.651.166.600,00**	**1.559.838.600,00**	**-106.825.600,00**							**1.851.830.620,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.666.664.200,00**	**1.651.166.600,00**	**1.559.838.600,00**	**-106.825.600,00**							**1.851.830.620,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.666.664.200,00**	**1.651.166.600,00**	**1.559.838.600,00**	**-106.825.600,00**							**1.851.830.620,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.653.704.200,00**	**1.631.916.600,00**	**1.548.148.600,00**	**183.970.420,00**							**1.837.674.620,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pembayaran gaji dan tunjangan asn*				1 Tahun	1 Tahun	1.333.004.200,00	1.321.341.000,00	1.321.341.000,00	-11.663.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.445.304.620,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.333.004.200,00	1.321.341.000,00	1.321.341.000,00	-11.663.200,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.445.304.620,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai*				2 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.250.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	0 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.850.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	0 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.400.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terselenggarayan Administrasi Umum Perkantoran*				100 persen	100 persen	96.000.000,00	116.344.000,00	58.876.000,00	-37.124.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		105.600.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	2.000.000,00	2.026.000,00	997.000,00	-1.003.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK

	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	13.310.000,00	6.655.000,00	-1.345.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			8.800.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	5.166.000,00	3.538.000,00	-1.462.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.500.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.500.000,00	5.100.000,00	-4.900.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.000.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.000.000,00	7.614.000,00	3.722.400,00	-4.277.600,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			8.800.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.300.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	77.728.000,00	38.863.600,00	-21.136.400,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			66.000.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun*				4 Jenis	Jenis	43.200.000,00	25.500.000,00	0,00	-43.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		43.670.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	21.500.000,00	25.500.000,00	0,00	-21.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			19.800.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	0 Unit	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			7.150.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	15.200.000,00	0,00	0,00	-15.200.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.720.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS*				100 persen	100 persen	147.000.000,00	144.261.600,00	143.461.600,00	-3.538.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		161.700.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	-800.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00	-2.264.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			8.250.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	137.500.000,00	137.025.600,00	137.025.600,00	-474.400,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			151.250.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jenis BMD yang di Pemeliharaan*				12 Unit	12 Unit	30.500.000,00	24.470.000,00	24.470.000,00	-6.030.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		73.150.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	12.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			13.750.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	4.000.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	1.750.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.400.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4.000.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	720.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			44.000.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.000.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase ketetapan Waktu Pelayanan perizinan dan Non perizinan sesuai SOP**				**90 persen**	**90 persen**	**2.280.000,00**	**5.485.000,00**	**1.730.000,00**	**128.000,00**							**2.408.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditimpahkan kepada Camat	*Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan*				10 Jenis	10 Jenis	2.280.000,00	5.485.000,00	1.730.000,00	-550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		2.408.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	1.180.000,00	3.785.000,00	880.000,00	-300.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.298.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	1.100.000,00	1.700.000,00	850.000,00	-250.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.110.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**				**60 Persen**	**60 Persen**	**7.680.000,00**	**8.480.000,00**	**8.480.000,00**	**768.000,00**							**8.448.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten*				3 Jenis	3 Jenis	7.680.000,00	8.480.000,00	8.480.000,00	800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		8.448.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	7.680.000,00	8.480.000,00	8.480.000,00	800.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			8.448.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**600.000,00**	**100.000,00**							**1.100.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan*				3 Kasus	3 Kasus	1.000.000,00	1.500.000,00	600.000,00	-400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.100.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	1.500.000,00	600.000,00	-400.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.100.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**3.785.000,00**	**880.000,00**	**200.000,00**							**2.200.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari*				100 persen	100 persen	2.000.000,00	3.785.000,00	880.000,00	-1.120.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		2.200.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	3.785.000,00	880.000,00	-1.120.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000,00	KECAMATAN KOTO SALAK
	J U M L A H								**1.666.664.200,00**	**1.651.166.600,00**	**1.559.838.600,00**	**-106.825.600,00**							**1.851.830.620,00**	

Tabel 2.4.1- 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP	%	95	80	90	90	85	90
2	Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan Yang ditampung dalam RKPD	%	56,25	55,5	60	65	65	65
3	Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Koto Salak	Kasus	3	0	3	4	3	4
4	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Koto Salak	%	60,61/ B	67,18/ B	70,80/ BB	73,666/ BB	70,80/ BB	73,666/ BB
5	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Koto Salak	%	N/A	0	0	0	0	0
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,61	80	80,5	81	80,5	81

BAB 5. PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Koto Salak Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani pada tataran implementasi dalam pelaksanaan Kegiatan dan anggaran. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Koto Salak dapat terlaksana seoptimal mungkin apabila semua aparatur dan stake holder tekait berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama dan terdapatnya koordinasi yang baik dalam mencapai target pembanguan yang telah ditetapkan.

Renja Perubahan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Tahun 2025 menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian kinerja serta digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 sehingga kinerja Perangkat Daerah dapat terukur sehingga pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkesinambungan.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Rencana Kerja Perubahan

Kecamatan Koto Besar

Tahun 2025

Kecamatan Koto Besar

KABUPATEN DHARMASRAYA

Alamat :
Jl. Raya Koto Besar Kode Pos 27573
Webiste http : //www.kotobesar.dharmasraya.go.id

1

1.1 1

1.2 2

1.3 2

1.3.1. 2

1.3.2. 3

1.4 3

2 1

2.1 1

2.2 2

2.3 7

2.3.1. 7

2.3.2. 7

2.4 **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

2.4.1. **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

2.4.2. **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

3 1

3.1 **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

3.1.1. **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

3.1.2. **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

3.2 1

4 1

4.1 1

4.2 6

5 1

Tabel 2-165 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022

Tabel 2-166 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2023

Tabel 5-1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Tabel 6-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Tabel 6-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya

1.1

Kecamatan Koto Besar K 2025 merupakan Rencan penjabaran dari pelaksa encanakan dalam Dokume Daerah (RKPD) Kabupa agai tahun kelima dari per angka Menengah Daerah cana Kerja (Renja) Kecama masraya Tahun 2025 di eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perenca si Pembangunan Daerah, eraturan Daerah Tentang Panjang Daerah dan Re enengah Daerah, Serta T bangunan Jangka Panjang angka Menengah Daerah, h Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perenca n Daerah. Proses Penyus ahan Kecamatan Koto B ahun 2025 tetap memper ah dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerin 5, agar didalam pelaksa sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Koto Besar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025

dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 serta pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Koto Besar secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Koto Besar hingga Tahun 2024 dan prediksi Tahun 2025
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Koto Besar Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Koto Besar dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Koto Besar

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

el e.60 evaluasi terha (terlampir), serta dileng pelaksanaan sub kegia ndikator kegiatan selam

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan

Sasaran 1

Meningkatkan Kinerja Penyelengaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

1. Indikator kinerja utama perangkat daerah Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP

Pada indikator ini merujuk kepada Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada ukuran kinerja yang menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga lainnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur operasional standar

Interpretasi dari indikator ini tergantung dari bebrapa interpretasi diantaranya ;

1. **Persentase Ketepatan Waktu**: Ini adalah rasio antara jumlah pelayanan yang dilakukan tepat waktu dengan total jumlah pelayanan yang dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu, diukur dalam persentase. Ketepatan waktu biasanya diukur dengan membandingkan waktu penyelesaian pelayanan dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam SOP.

2. **Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan**: Merujuk pada jenis pelayanan yang diberikan oleh instansi atau lembaga tersebut. Pelayanan perizinan mencakup proses pemberian izin, lisensi, atau persetujuan dari pemerintah atau badan lainnya, sementara pelayanan non-perizinan mencakup layanan yang tidak memerlukan izin atau persetujuan khusus, seperti pelayanan informasi, konsultasi, atau pelayanan administratif lainnya.

3. **Standar Operasional Prosedur (SOP)**: Merupakan pedoman atau aturan yang mengatur tata cara dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan suatu proses atau kegiatan tertentu. SOP biasanya mencakup detail tentang prosedur, waktu yang dibutuhkan, tanggung jawab, dan langkah-langkah kualitas lainnya untuk memastikan konsistensi dan kinerja yang optimal dalam penyediaan layanan.

Tabel 0-1 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator kinerja utama perangkat daerah Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				70	80	80
Variabel Persentase Ketepatan Waktu						
Variabel Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan						
Variabel Standar Operasional Prosedur (SOP)						

Dengan demikian, Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan sesuai SOP adalah ukuran kinerja yang menggambarkan sejauh mana suatu lembaga atau instansi pemerintah memenuhi waktu penyelesaian pelayanan yang telah ditetapkan dalam SOP, baik untuk layanan yang bersifat perizinan maupun non-perizinan. Dalam pelaksanaan indicator ini dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan mengingat selalu diadakannya perbaikan dari berbagai aspek.

2. Indikator kinerja utama perangkat daerah *Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD*

Pada indikator ini merujuk pada seberapa besar usulan atau hasil kesepakatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan yang akhirnya diikutsertakan atau dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator ini mengacu kepada proporsi atau persentase dari hasil Musrenbang yang berhasil diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan kerja Pemerintah Daerah yang lebih formal, yaitu RKPD. Hal ini menunjukkan sejauh mana aspirasi masyarakat atau stake holders lokal tercermin dan dijadikan bagian dari RKPD yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu.

Interpretasi dari indikator ini tergantung dari bebrapa interpretasi diantaranya ;

1. **Prioritas Pembangunan**: Hasil musrenbang menjadi acuan dalam menetapkan prioritas pembangunan di daerah tersebut. Program dan kegiatan yang telah disepakati dalam musrenbang kemudian diakomodasi dalam RKPD sebagai bagian dari agenda pembangunan tahunan.

2. **Legitimasi Partisipatif**: RKPD yang memuat hasil musrenbang menunjukkan adanya aspek partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak dalam musrenbang memberi legitimasi atas prioritas dan program pembangunan yang disepakati.

3. **Keterhubungan Antara Musrenbang dan RKPD**: Inklusi hasil musrenbang dalam RKPD menunjukkan adanya keterhubungan yang erat antara proses perencanaan partisipatif dengan dokumen perencanaan resmi pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung dihubungkan dengan rencana kerja pemerintah.

4. **Pertanggungjawaban Publik**: Dengan memuat hasil musrenbang dalam RKPD, pemerintah daerah menunjukkan keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap publik. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD merupakan komitmen yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

5. **Pembangunan Berkelanjutan**: Dalam interpretasi yang lebih luas, hasil musrenbang yang ditampung dalam RKPD diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan karena mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat yang diintegrasikan ke dalam rencana kerja pemerintah.

Tabel 0-2 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator *Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD*				60	60	60
Variabel Program dan Kegiatan Pembangunan						
Variabel Sumber Daya						
Variabel Prioritas Pembangunan						
Variabel Partisipasi Masyarakat						

Dengan demikian, interpretasi dari persentasi hasil musrenbang yang ditampung dalam RKPD mencakup aspek-aspek partisipatif, keterhubungan antara perencanaan partisipatif dengan dokumen resmi perencanaan pemerintah, serta pertanggungjawaban publik dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada perkembangan dalam beberapa Tahun belakangan mengindikasikan sudah makin tingginya usulan yang ditampung dalam RKPD dengan cara mengerucutkan kembali usulan menjadi skala prioritas yang lebih sedikit namun bisa terakomodir dalam RKPD.

3. Indikator kinerja utama perangkat daerah Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Koto Besar

Indikator ini merujuk kepada merujuk pada data atau statistik tentang jumlah insiden atau gangguan terkait dengan ketertiban umum (trantibum) yang dikelola atau ditangani di suatu wilayah administratif, dalam hal ini wilayah Kecamatan Koto Besar.

Interpretasi dari indikator ini tergantung dari bebrapa interpretasi diantaranya ;

1. **Jumlah Gangguan Trantibum**: Ini merujuk pada jumlah insiden atau kejadian yang melibatkan gangguan terhadap ketertiban umum di suatu wilayah tertentu. Gangguan tersebut dapat berupa berbagai jenis pelanggaran atau tindakan yang mengganggu ketertiban sosial, seperti perkelahian, perusakan harta benda, tindak kejahatan, ataubencana alam dan pelanggaran aturan lainnya.
2. **Ditangani di Wilayah Kecamatan Koto Baru**: Ini menunjukkan bahwa gangguan tersebut terjadi atau dikelola di wilayah administratif tertentu, yaitu Kecamatan Koto Besar. Kecamatan adalah unit administratif di bawah kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, termasuk masalah-masalah terkait ketertiban umum.

Tabel 0-3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator *Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Koto Besar*				◑	⌶	⌶
Variabel Jumlah Gangguan Trantibum						

Sumber : Renja Tahun 2024

Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Koto Besar" adalah data tentang jumlah insiden atau kejadian yang mengganggu ketertiban umum yang dikelola atau ditangani di wilayah administratif Kecamatan Koto Besar. Dalam beberapa tahun belakangan ada beberapa jenis gangguan trantibum yang terjadi di Kecamatan Koto Besar namun gangguan tersebut bisa ditangani berkat koordinasi dan kerjasama lintas lembaga.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Indikator kinerja utama perangkat daerah Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Koto Besar

Indikator ini merujuk kepada penilaian AKIP yang mencakup berbagai aspek kinerja instansi pemerintah, seperti manajemen keuangan, efektivitas program dan kegiatan, akuntabilitas, transparansi, dan aspek-aspek lain yang relevan. Hasil penilaian ini dapat berupa laporan yang mencakup temuan-temuan, rekomendasi, serta evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah

Interpretasi hasil penilaian AKIP (Audit Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Koto Besar dapat bervariasi tergantung pada temuan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa.

1. **Kinerja Keuangan**: Jika hasil penilaian menunjukkan kinerja keuangan yang baik, hal ini bisa diartikan bahwa pengelolaan keuangan Kecamatan Koto Besar telah dilakukan dengan baik, termasuk pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan yang akurat, dan penggunaan anggaran yang efisien.
2. **Efektivitas Program dan Kegiatan**: Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Koto Besar efektif, hal ini menunjukkan bahwa program-program tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas**: Jika hasil penilaian menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, ini menandakan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di Kecamatan Koto Besar dilakukan secara terbuka dan akuntabel kepada masyarakat, dengan penyampaian informasi yang jelas dan tersedia bagi publik.
4. **Kepatuhan Terhadap Aturan dan Regulasi**: Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa Kecamatan Koto Besar telah mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, hal ini menandakan bahwa instansi tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari potensi risiko pelanggaran hukum.
5. **Rekomendasi Perbaikan**: Jika hasil penilaian mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, interpretasi dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional Kecamatan Koto Besar melalui implementasi rekomendasi yang diberikan

Tabel 0-4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Koto Besar						

Semenjak ditetapkan dalam indikator kinerja pada RENSTRA 2021-2026 Nilai AKIP Kecamatan Koto Besar tiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini tidak lepas dari perbaikan perbaikan yang dilakukan baik secara administratif atau non administratif.

5. Indikator kinerja utama perangkat daerah Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Koto Besar

Definisi indikator ini merujuk kepada Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Koto Besar merujuk pada evaluasi internal yang dilakukan terhadap implementasi program-program reformasi birokrasi

Interpretasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Koto Besar akan sangat tergantung pada temuan spesifik dalam evaluasi tersebut.

1. **Efektivitas Implementasi Program**: Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa program-program reformasi birokrasi telah diimplementasikan dengan baik, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa Kecamatan Koto Besar telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja birokrasi lokal.
2. **Peningkatan Efisiensi dan Transparansi**: Jika hasil penilaian menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik dan peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, ini dapat diinterpretasikan sebagai tanda positif bahwa reformasi birokrasi telah berhasil mendorong perubahan yang diinginkan.
3. **Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholder**: Jika hasil penilaian menunjukkan tingkat partisipasi dan keterlibatan yang tinggi dari berbagai pihak, termasuk staf pemerintah, pemimpin lokal, dan masyarakat, ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi dukungan yang kuat untuk reformasi birokrasi.
4. **Tantangan dan Hambatan**: Jika hasil penilaian mengidentifikasi tantangan atau hambatan dalam implementasi reformasi birokrasi, ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Interpretasi ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi lebih lanjut dalam mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi.
5. **Rekomendasi Perbaikan**: Jika hasil penilaian menyertakan rekomendasi perbaikan, ini dapat diinterpretasikan sebagai arahan bagi Kecamatan Koto Besar untuk fokus pada area-area tertentu yang memerlukan perbaikan lebih lanjut dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. **Keselarasan dengan Tujuan Nasional**: Interpretasi juga dapat mencakup evaluasi sejauh mana hasil penilaian tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah.

Tabel 0-5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator kinerja utama perangkat daerah Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Koto Besar						

6. Indikator kinerja utama perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat

Definisi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merujuk kepada sebuah metrik atau indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap layanan atau kinerja suatu pemerintah, lembaga, atau organisasi tertentu. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat menilai kualitas layanan yang diberikan, kinerja organisasi, atau pemenuhan kebutuhan dan harapan mereka.

Interpretasi Indeks Kepuasan Masyarakat melibatkan analisis terhadap data yang dihasilkan dari survei atau metode pengukuran lainnya untuk memahami persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan atau kinerja yang diukur

1. **Analisis Skor Rata-rata**: Jika indeks kepuasan menggunakan skala tertentu (misalnya, skala 1-5), langkah pertama adalah menghitung skor rata-rata dari semua responden. Skor rata-rata ini mencerminkan kepuasan rata-rata masyarakat terhadap layanan atau kinerja yang diukur.
2. **Klasifikasi Kepuasan**: Berdasarkan skor rata-rata, dapat diklasifikasikan tingkat kepuasan masyarakat. Misalnya, skor di atas 4 dapat dianggap sebagai tingkat kepuasan tinggi, skor antara 3-4 sebagai kepuasan sedang, dan skor di bawah 3 sebagai kepuasan rendah.
3. **Analisis Distribusi**: Selain skor rata-rata, penting untuk menganalisis distribusi skor untuk memahami seberapa merata persepsi kepuasan di antara responden. Misalnya, apakah sebagian besar responden memberikan skor tinggi atau terdapat variasi besar dalam skor yang diberikan?
4. **Perbandingan dengan Standar atau Target**: Hasil indeks kepuasan dapat dibandingkan dengan standar atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah hasil indeks tersebut mencapai target yang ditetapkan? Jika tidak, apa penyebabnya dan bagaimana langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil?
5. **Analisis Sub-grup**: Penting untuk melakukan analisis sub-grup untuk memahami apakah ada perbedaan dalam kepuasan antara kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, atau latar belakang sosial-ekonomi. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi ketidaksetaraan dalam akses atau kepuasan layanan.
6. **Trend dan Perubahan dari Waktu ke Waktu**: Jika survei dilakukan secara berkala, penting untuk melihat trend dan perubahan dari waktu ke waktu dalam indeks kepuasan masyarakat. Apakah ada peningkatan atau penurunan signifikan dari periode sebelumnya? Apa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan tersebut?
7. **Interpretasi Kualitatif**: Selain data kuantitatif, penting juga untuk memperhatikan informasi kualitatif, seperti komentar atau umpan balik dari responden, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat.

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator kinerja utama perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai			—▲	—▲	—▲

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu strategis

Dalam pelaksanaan setiap Kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan tahun 2023 adalah :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum bisa dilakukan secara maksimal karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran akibat dari dampak pandemi, sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dan perubahan dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran.
2. Belum terpenuhinya sarana peralatan kerja yang memadai seperti computer unit dan dukungan ketersediaan jaringan internet yang lebih baik dalam rangka mengikuti perkembangan zaman yang sudah melangkah pada pelayanan berbasis komputerisasi.
   Masih perlu sosialisasi fasilitasi intens tentang pemahaman perundang-undangan bagi perangkat Pemerintah Nagari

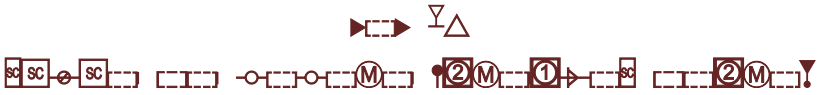

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Koto Besar

VISI : Mewujudkan Dharmasraya yang Mandiri dan Berbudaya

MISI : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan tatakelola Kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	a. Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	persen	70	80	80	90	90	90
		b. Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	60	60	60	65	65	65
		c. Persentasi Gangguan trantibum yang ditangani di wilayah kecamatan	Kasus	2	3	3	3	4	4
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	a. Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Koto Besar	Nilai/Perikat	63,41/ B	66,728/ B	70,046/ B	73,364/ BB	76,682/ BB	80/ BB
		b. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Koto Besar	Nilai	19,0	23,2	28	32,8	37,6	42,5
		c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	80,5	81,5	82	82,5	82,5

BAB 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan realisasi 2021, 2022 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2024, maka proyeksi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TAHUN 2025

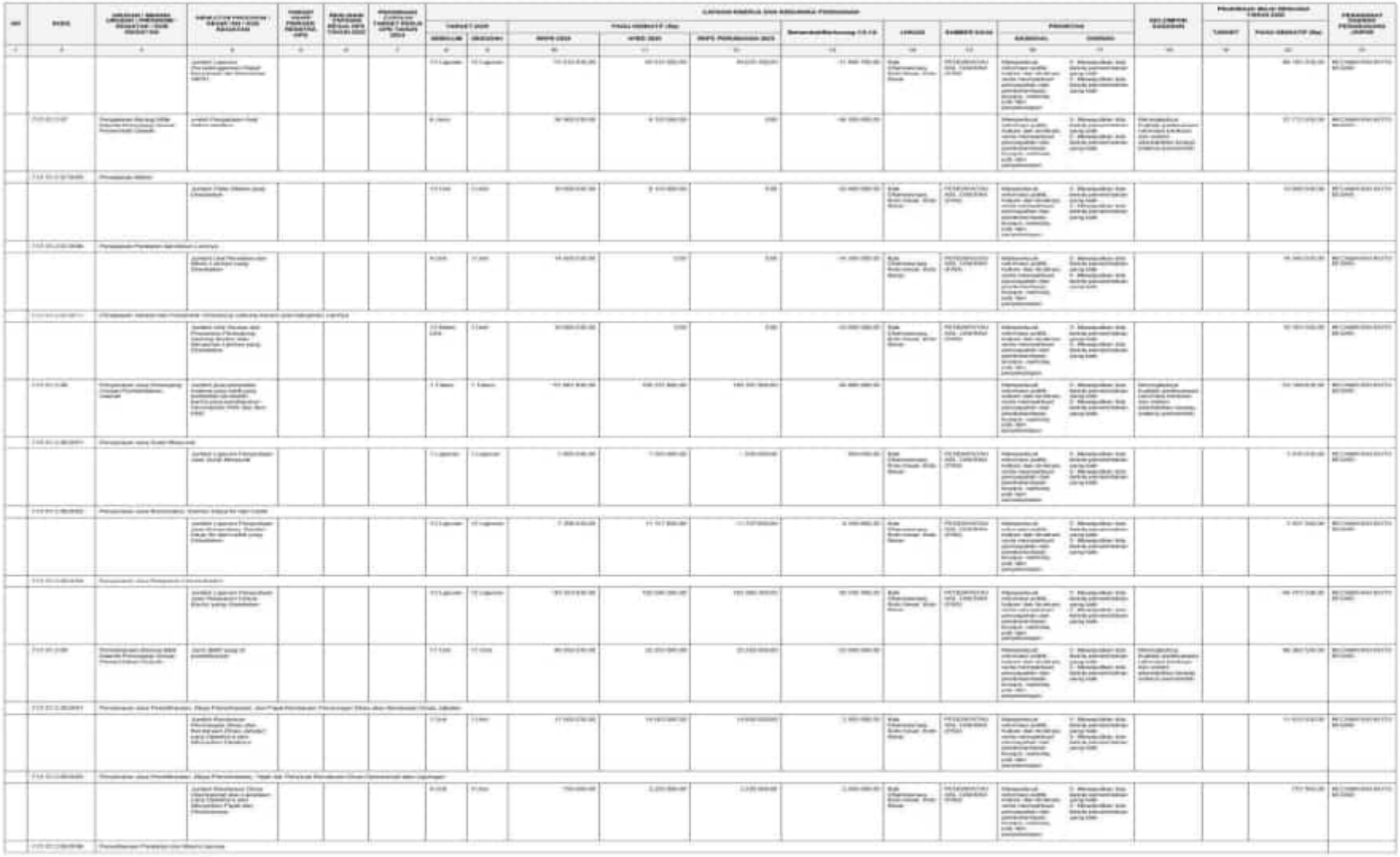

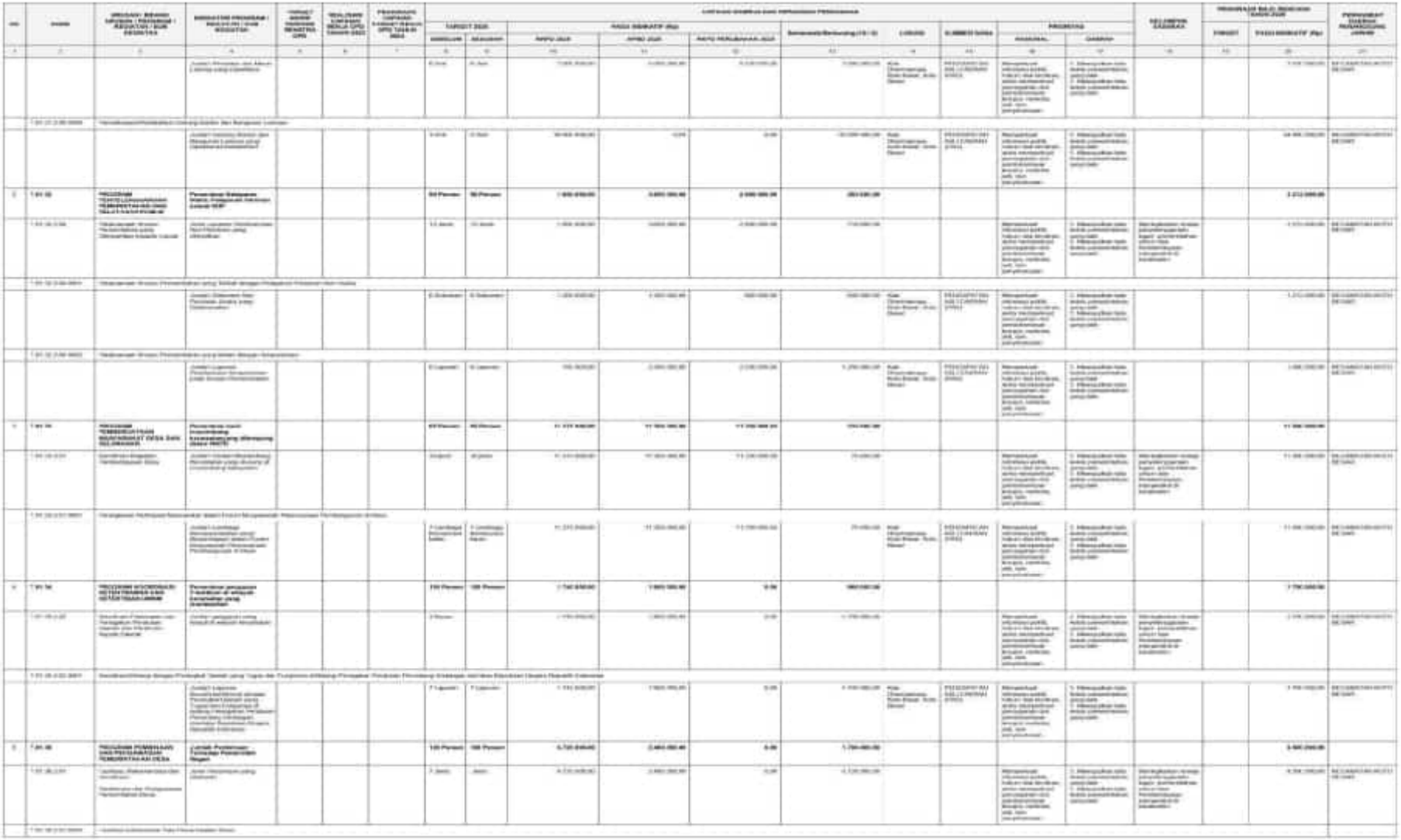

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				17 Dokumen	21 Dokumen	8.770.000,00	2.400.000,00	0,00	8.770.000,00	Kab Dharmasraya Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.500.000,00	KECAMATAN KOTO BESAR
JUMLAH									2.156.739.609,00	2.215.628.690,00	2.137.501.590,00	-162.182.366.944,93							2.251.190.476,00	

1.5. Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 0-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP	%						
2	Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan Yang ditampung dalam RKPD	%						
3	Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Koto Besar	Kasus						
4	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Koto Besar	%						
5	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Koto Besar	%						
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	%						

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Koto Besar (Renja PD) merupakan Rencana Kerja tahunan yang disusun guna menyiapkan secara optimal Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025. Rencana Kerja ini sendiri akan menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Dengan adanya rencana kerja ini nantinya diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan dengan labih baik.

Penyusunan Renja sebagai suatu dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan kerja PD merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan. Rancangan kerja masa yang akan datang harus selalu mempedomani Program dan kegiatan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Evaluasi secara terstruktur dan berkelanjutan pada tahun berjalan dapat mengakomodir tingkat perobahan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan penyusunan Dokumen Renja PD diharapkan nantinya dapat dilakukan penjabaran Visi dan Misi, serta Sasaran yang telah ditetapkan dengan maksimal. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Koto Baru ini mengakomodir Penetapan Skala prioritas dalam penyusunan rancangan Program dan kegiatan. Hal ini diperlukan dalam melakukan sinergitas dengan PD terkait.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PADANG LAWEH
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1. .. PENDAHULUAN 1-1

1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Landasan Hukum 1-2
1.3. Maksud dan Tujuan 1-2
1.3.1. Maksud 1-2
1.3.2. Tujuan 1-2
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1-3

BAB 2. .. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU* 2-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ***Error! Bookmark not defined.***
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ***Error! Bookmark not defin***
2.3.1. Isu strategis ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah **Error! Bookmark not defined.**
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ***Error! Bookmark not defined.***
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 3. .. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Error! Bookmark not defined.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat ***Error! Bookmark not define***
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat **Error! Bookmark not defined.**
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah ***Error! Bookmark not defined.***

BAB 4. .. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 3-1

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 3-1
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 3-6

BAB 5. .. PENUTUP 4-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2-2 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2-3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2-4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2-5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2-6 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2-7 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4-1 Penetapan Rencana Kerja Badan/Dinas ... Tahun 2025 3-2
Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 3-6

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Kecamatan Padang Laweh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, Kecamatan Padang Laweh melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Perubahan Kecamatan Padang Laweh disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/2/KPTS-BUP/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
   1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2025.
   2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
   3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2020 s.d 2025.

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
   1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida
   2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini diserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.

e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
   1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
   1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Padang Laweh Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Padang Laweh secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Padang Laweh hingga Tahun berjalan 2025 dan prediksi Tahun 2026

b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah

c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah

d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran

e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II **Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Padang Laweh Tahun 2024**
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Laweh, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Laweh, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padang Laweh

BAB IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

BAB V Penutup

BAB 2. EVALUASI SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Laweh sampai dengan TWII Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada sub bab ini menyajikan tabel e.60 evaluasi terhadap hasil capaian rkpd tahun 2024 (terlampir), serta dilengkapi dengan narasi tentang capaian pelaksanaan sub kegiatan dan target indikator program dan indikator kegiatan selama tahun 2024.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV

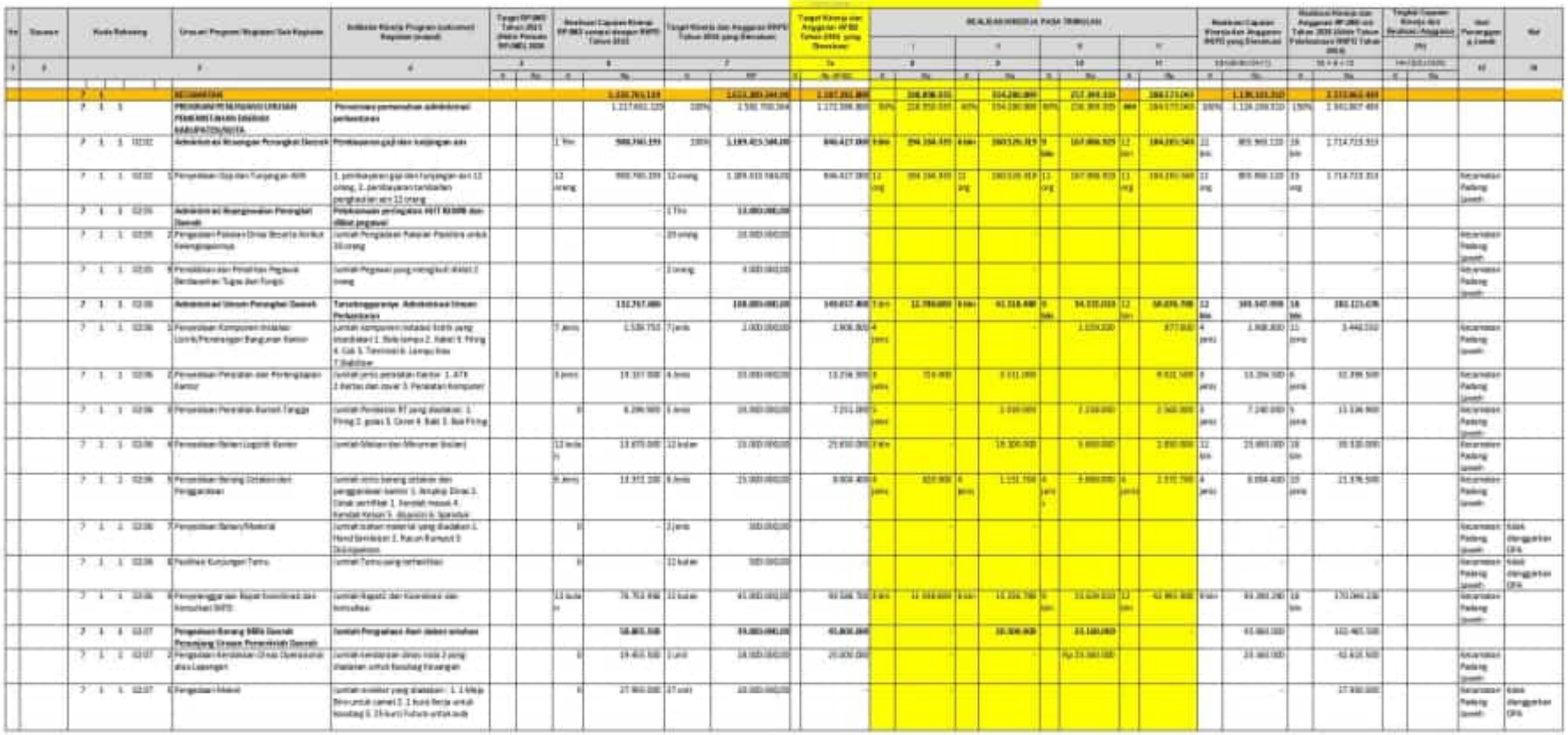

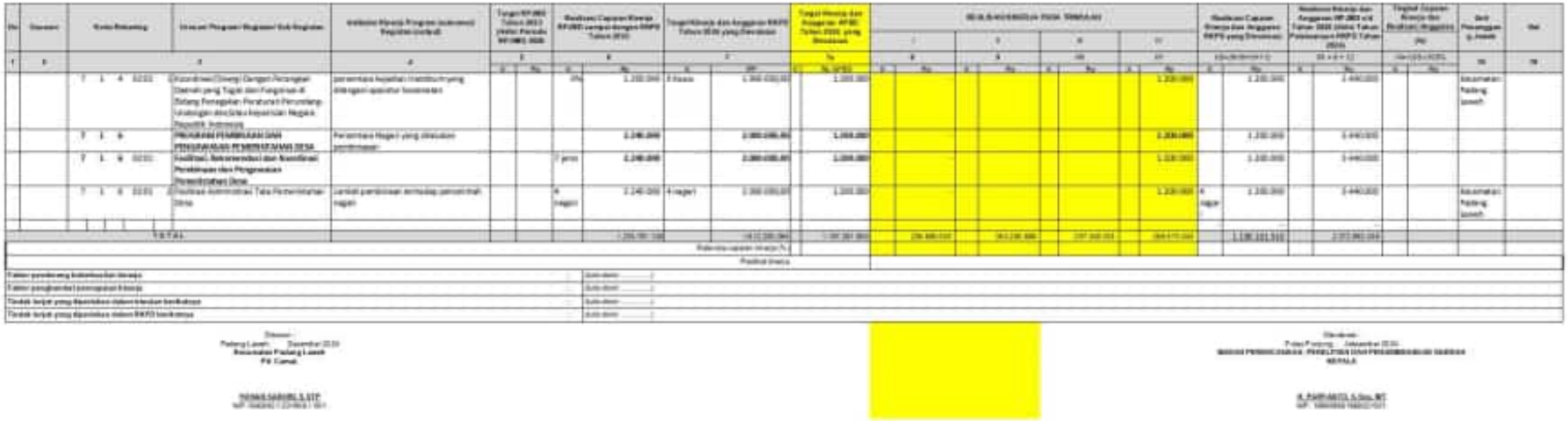

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Laweh Tahun 2024

Renja Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Kecamatan Padang Laweh pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **1.187.281.800**- yang dialokasikan untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan 5 Program dan 9 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp**. 1.139.101.310**,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar **95,94 %.**

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun 2024 antara lain :

2.1.1.a. Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran **Rp.846.427.000,-** dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. **805.963.120** atau terealisasi sebesar 95,21 %.
b. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran **Rp149.657.400**,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp**149.347.990**,- atau terealisasi sebesar 99,79%
c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran Rp. **0**,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. **0**,- atau terealisasi sebesar 0%.
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. **110.002.400**,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. **105.086.650**,- atau terealisasi sebesar 95,53 %
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. Rp**20.500.000**,- dengan anggaran terserap sebesar Rp **20.148.000**,- atau terealisasi sebesar 98,28 %.

Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pagu Total sebesar Rp. **1.172.386.800**, - telah terserap Rp. **1.124.206.310**,- atau terealisasi sebesar 95,89 %

2.1.1.b. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan dengan jumlah anggaran Rp.**2.550.000,-** telah terserap sebesar Rp. **2.550.000,-** atau terealisasi sebesar 100 %

2.1.1.c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa jumlah anggaran Rp. **9.945000**,- Telah terserap Rp. **9.945.000**,- atau terealisasi sebesar 100%.

2.1.1.d.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumdengan jumlah anggaran Rp. **1.200.000.000** telah teserapi sebesar Rp.**1.200.000,-** atau terealisasi sebesar 100 %

2.1.1.e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah anggaran Rp. **1.200.000**,- Telah terserap Rp. **1.200.000**,- atau terealisasi sebesar 100 %

Beberapa program dan kegiatan Kecamatan Padang Laweh diatas tidak dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran tidak terserap secara maksimal, karena terdapat beberapa kekosongan jabatan serta ada pengurangan gaji di Pegawai Non ASN di Kecamatan Padang Laweh.
2. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran tidak terserap 100 % karena adanya kelebihan pada pembayaran pajak kendaraan yang tidak bisa diperkirakan.

   Dan hampir semua program dan kegiatan Kecamatan Padang Laweh dapat memenuhi target yang di perjanjikan.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

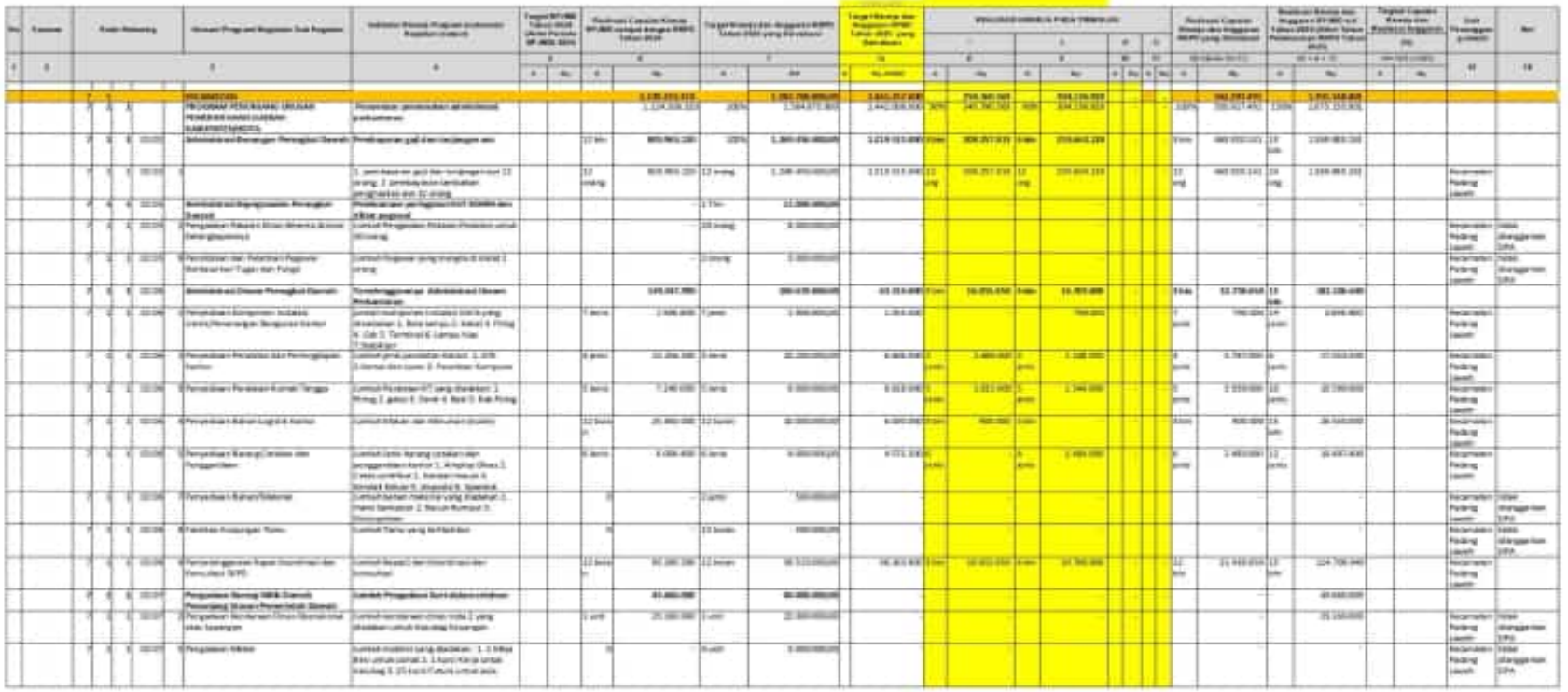

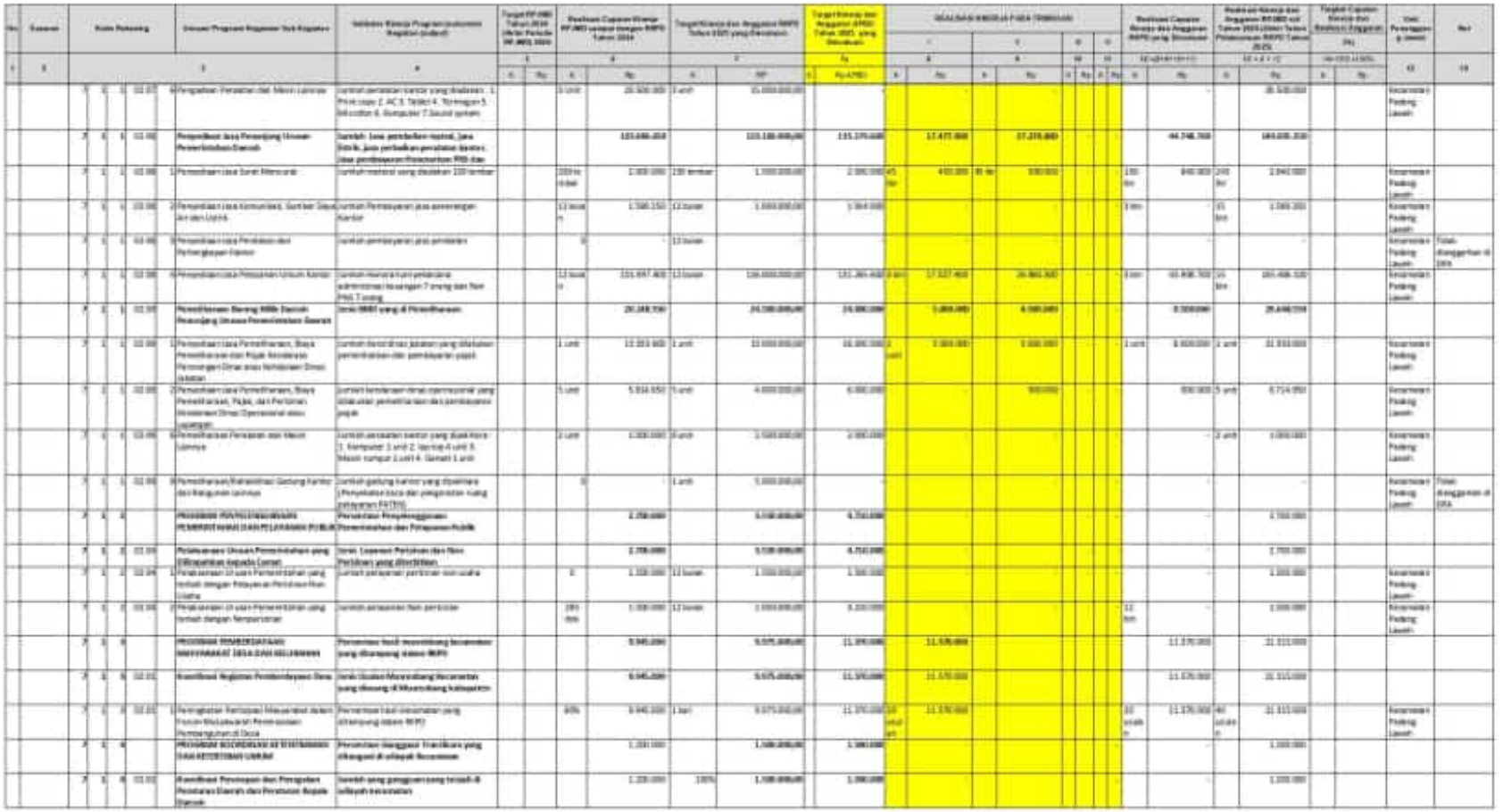

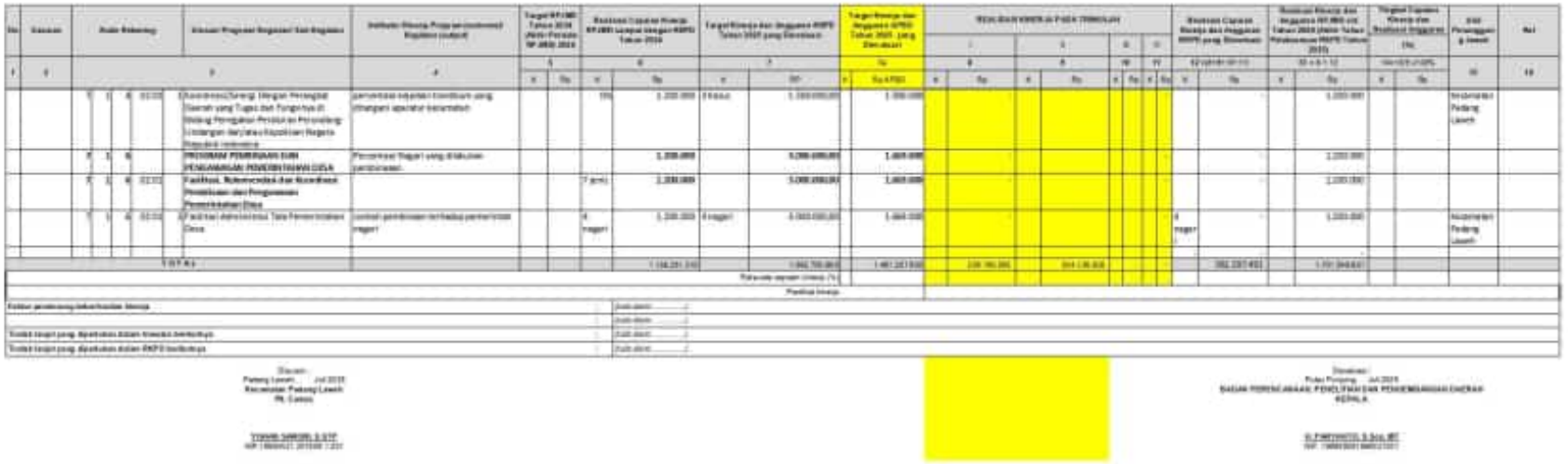

2.1.2. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025

Renja Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Kecamatan Padang Laweh pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **1.461.257.600**- yang dialokasikan untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan 5 Program dan 9 kegiatan. Dari jumlah dana yang terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp**.562.297.491**,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 38,48**%.**

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun 2025 antara lain :

2.1.2.a. Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 1.219.515.000,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 463.920.141- atau terealisasi sebesar 38,04%.
b. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.63.314.000- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 32.758.650,- atau terealisasi sebesar 51,73 %
c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran Rp.0 - dengan anggaran terserap sebesar Rp.0,- atau terealisasi 40,35 %
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 135.179.600,- dengan anggaran terserap sebesar Rp.44.748.700,- atau Belum terealisasi sebesar 33,10%.
e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp.24.000.000,- dengan anggaran terserap sebesar Rp.9.500.000,- atau terealisasi sebesar 39,58 %.

Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pagu Total sebesar Rp. 1.442.008.600,- Sampai dengan Triwulan II Tahun anggaran 2025 telah terserap Rp. 550.927.491,- atau terealisasi sebesar 38,20%

2.1.2.b. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan dengan jumlah anggaran Rp.4.710.000,- terealisasi Rp.0,- atau terealisasi sebesar 0%

2.1.2.c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa jumlah anggaran Rp.11.370.000,-- Telah terserap Rp.11.370.000 ,- atau terealisasi sebesar 100%.

2.1.2.d.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumdengan jumlah anggaran Rp.1.500.000,- terealisasi Rp.0- atau terealisasi sebesar 0%

2.1.2.e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah anggaran Rp.1.669.000,- Sampai dengan Triwulan II Tahun anggaran 2024 Telah terserap Rp. 0,- atau Belum terealisasi sebesar 0%.

BAB 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan realisasi 2023, 2024 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2025, maka proyeksi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3-1 Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Padang Laweh Tahun 2025

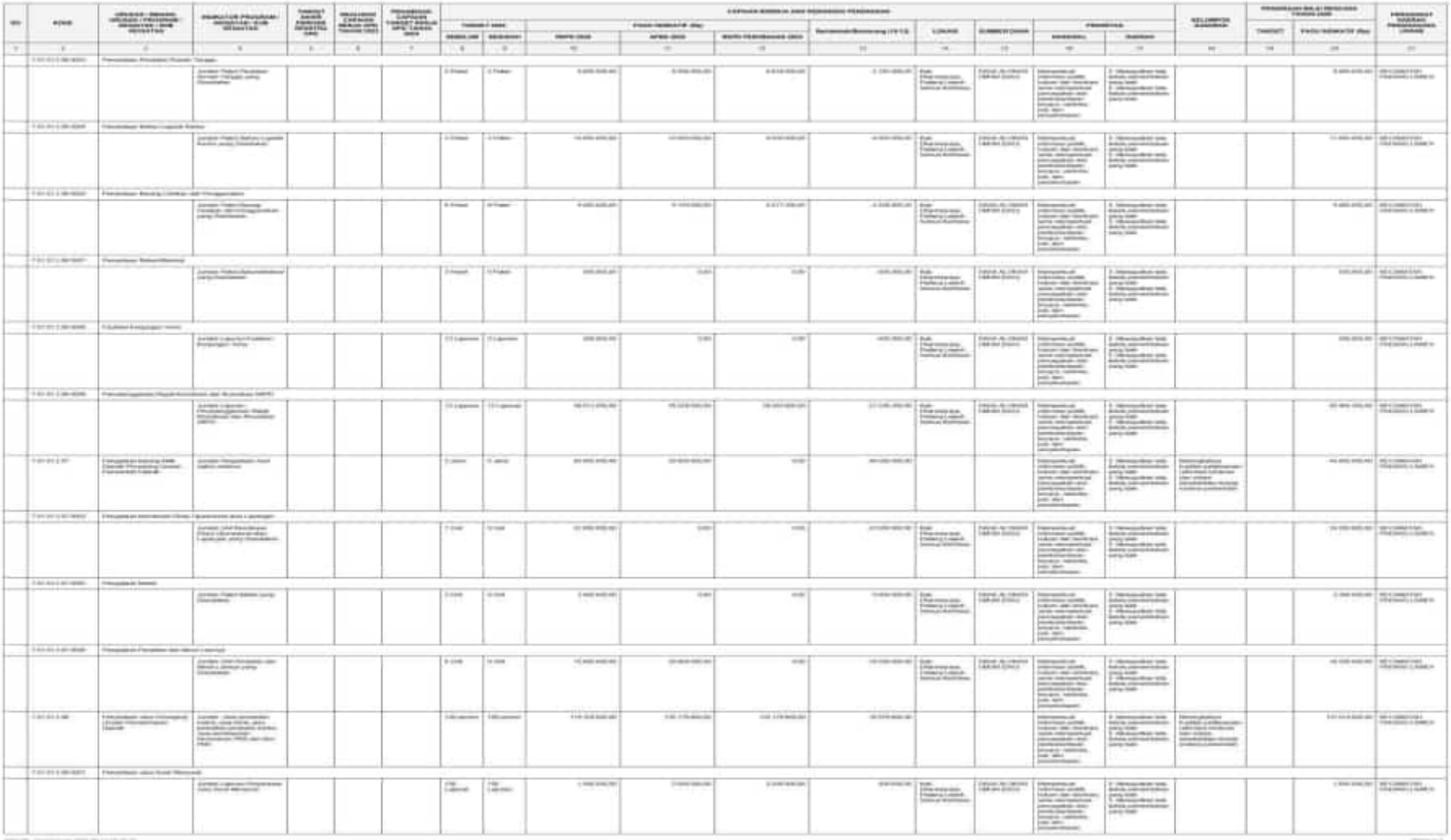

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAN										KELOMPOK SASARAN	PROGRAM MULAI MENJABAT TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Kebutuhan Pendanaan (10-13)	LOKASI	SUMBER DANA	PROPOSTIF			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KONDISI AWAL	KONDISI	RAPE 2023	APBD 2025	RAKO PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[illegible]	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Pamusi Kec/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengerikut referensi politik, hukum dan strategis, serta memperkuat penegakan dan pemeliharaan kongsi, rumbeka, pdt, dan penyelusupan	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik			[illegible]	KECAMATAN PADANG LAWEH
	[illegible]	Penyediaan Jasa Kebutuhan Unsur Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Unsur Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Pamusi Kec/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengerikut referensi politik, hukum dan strategis, serta memperkuat penegakan dan pemeliharaan kongsi, rumbeka, pdt, dan penyelusupan	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik			[illegible]	KECAMATAN PADANG LAWEH
	[illegible]	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan				4 jenis	5 jenis	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Mengerikut referensi politik, hukum dan strategis, serta memperkuat penegakan dan pemeliharaan kongsi, rumbeka, pdt, dan penyelusupan	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas pada instansi pemerintah		[illegible]	KECAMATAN PADANG LAWEH
	[illegible]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Pamusi Kec/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengerikut referensi politik, hukum dan strategis, serta memperkuat penegakan dan pemeliharaan kongsi, rumbeka, pdt, dan penyelusupan	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik			[illegible]	KECAMATAN PADANG LAWEH
	[illegible]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Pamusi Kec/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengerikut referensi politik, hukum dan strategis, serta memperkuat penegakan dan pemeliharaan kongsi, rumbeka, pdt, dan penyelusupan	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik			[illegible]	KECAMATAN PADANG LAWEH
	[illegible]	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Pamusi Kec/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengerikut referensi politik, hukum dan strategis, serta memperkuat penegakan dan pemeliharaan kongsi, rumbeka, pdt, dan penyelusupan	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik			[illegible]	KECAMATAN PADANG LAWEH
	[illegible]	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Pamusi Kec/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengerikut referensi politik, hukum dan strategis, serta memperkuat penegakan dan pemeliharaan kongsi, rumbeka, pdt, dan penyelusupan	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik			[illegible]	KECAMATAN PADANG LAWEH

2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kelepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				90 persen	90 persen	3.550.000,00	6.870.000,00	4.710.000,00	355.000,00							3.905.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				10 Jenis	10 Jenis	3.550.000,00	6.870.000,00	4.710.000,00	1.160.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		3.905.000,00	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				6 Dokumen	6 Dokumen	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.650.000,00	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				255 Laporan	255 Laporan	2.050.000,00	3.870.000,00	3.210.000,00	1.160.000,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.255.000,00	KECAMATAN PADANG LAWEH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				60 persen	60 persen	9.975.000,00	11.370.000,00	11.370.000,00	997.500,00							10.972.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang ditusung di Musrenbang kabupaten				3 Jenis	3 Jenis	9.975.000,00	11.370.000,00	11.370.000,00	1.395.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		10.972.500,00	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang [illegible] Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat stabilitas politik, hukum dan [illegible], serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik [illegible]			[illegible]	KECAMATAN PADANG LAWEH
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah [illegible] di wilayah kecamatan				3 Kasus	3 Kasus	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Memperkuat stabilitas politik, hukum dan [illegible], serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik [illegible]	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		[illegible]	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan [illegible] Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan [illegible] Negara Republik Indonesia				2 Laporan	2 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat stabilitas politik, hukum dan [illegible], serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik [illegible]			[illegible]	KECAMATAN PADANG LAWEH
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pemerintahan [illegible]				100 persen	100 persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah [illegible] yang [illegible]				7 [illegible]	7 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Memperkuat stabilitas politik, hukum dan [illegible], serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik [illegible]	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		[illegible]	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam [illegible] Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat stabilitas politik, hukum dan [illegible], serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik [illegible]			[illegible]	KECAMATAN PADANG LAWEH
	JUMLAH								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	

3.2 Perubahan Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 3-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target Renstra	TARGET Renja PD 2025	
			2023	2024	2025	awal	Perubahan
1	Persentase Ketetapan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai dengan SOP	persen	85	90	90	95	95
2	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	Persen	56,52	57,14	60	65	65
3	Jumlah gangguan trantibum yang di wilayah kecamatan	Kasus	3	3	3	3	3
	Sasaran II : Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah						
4	Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah	Bobot	67,97/B	Nilai 71,94/Prediket BB	74,308/BB	77,154/BB	77,154/BB
5	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) Kecamatan Padang Laweh	Bobot	-	-	-	-	-
6	Indeks Kepuasan masyarakat	Bobot	80,0	81,2	81,5	82,0	82,0

No

BAB 4.

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Laweh (Renja PD) merupakan Rencana Kerja tahunan yang disusun guna menyiapkan secara optimal Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025. Rencana Kerja ini sendiri akan menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Dengan adanya rencana kerja ini nantinya diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan dengan labih baik.

Penyusunan Renja Perubahan sebagai suatu dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan kerja PD merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan. Rancangan kerja masa yang akan datang harus selalu mempedomani Program dan kegiatan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Evaluasi secara terstruktur dan berkelanjutan pada tahun berjalan dapat mengakomodir tingkat perobahan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan penyusunan Dokumen Renja Perubahan PD diharapkan nantinya dapat dilakukan penjabaran Visi dan Misi, serta Sasaran yang telah ditetapkan dengan maksimal. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Padang Laweh ini mengakomodir Penetapan Skala prioritas dalam penyusunan rancangan Program dan kegiatan. Hal ini diperlukan dalam melakukan sinergitas dengan PD terkait.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR .....TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TIUMANG TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN 1-1

1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Landasan Hukum 1-2
1.3. Maksud dan Tujuan 1-3
1.3.1. Maksud 1-3
1.3.2. Tujuan 1-3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1-3

BAB 2. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU* 2-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-3
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 2-10
2.3.1. Isu strategis 2-10
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 2-10
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-1
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan Tiumang 2-1
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD **Kesalahan! Bookmark tidak diten**

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat .....
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait ***Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.***

3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat .....
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3-2

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 4-1
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Tiumang 4-9

BAB 5. PENUTUP 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-165 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 .....

Tabel 2-166 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2023 .....

Tabel 5-1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Tabel 6-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.....4-2

Tabel 6-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.....

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. **Kecamatan Tiumang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan Tiumang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pelayanan , Bidang Kesra, Bidang Pemerintahan Nagari,Bidang Ekbang dan Bidang trantibun.**

Rencana Kerja Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Kecamatan Tiumang disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
   1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024.
   2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
   3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2019 s.d 2024.

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2025

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
   1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan prangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida
   2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini siserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
   1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
   1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tiumang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmengdagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan pembangunan dan Keungan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023- 2043;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tiumang secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tiumang hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II **Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Tiumang Tahun 2024**
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tiumang, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tiumang, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tiumang

BAB IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

BAB V Penutup

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TIUMANG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tiumang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Tiumang

Untuk mendukung menjalankan tugas dan fungsinya tahun 2024 Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya mendapat alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. **1.672.992.800,-** yang dialokasikan untuk pelaksanaan 5 Program dan 9 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp**. 1.**388.346.439 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 82.99**%.**

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun 2024 antara lain :

2.1.1. a. Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 1,313,259,000.,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. **1.015.854.000**- atau terealisasi sebesar 77.35 %.
b. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp. **112.423.700**,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. **158.989.700**,- atau terealisasi sebesar 141.42 %
c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 0,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. 27**.800.000**,- atau Belum terealisasi sebesar 100 %.
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. **205.100.100**,- dengan anggaran terserap sebesar Rp.**190.700.100**,- atau terealisasi sebesar 92,98 %
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. **21.410.000**,- dengan anggaran terserap sebesar Rp**. 21.410.000**,- atau terealisasi sebesar 100 %.

Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pagu Total sebesar Rp. **1.672.992.800**- telah terserap Rp. **1.**388.346.439 atau terealisasi sebesar 82.99%

2.1.1.b. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan dengan jumlah anggaran Rp.**6.110.000,-** telah terserap sebesar Rp.7**.010.000** atau terealisasi sebesar 100 %

2.1.1.c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa jumlah anggaran Rp. **11.690.000,-** Telah terserap Rp. **11.690.000**,- atau terealisasi sebesar 100%.

2.1.1. d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan jumlah anggaran Rp.**3.000.000**,- telah terserap Rp.**6.000.000**,- atau terealisasi sebesar 100 %

2.1.1.e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koorinsi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah anggaran Rp. **0**,- Telah terserap Rp. **0** atau terealisasi sebesar 0 %

Beberapa program dan kegiatan Kecamatan Tiumang diatas tidak dapat dilaksanakan dan tidak mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ada kegiatan yang anggaran tidak tersedia setelah perobahan dan ada anggaran terserap secara maksimal, karena terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya di kosongkan serta ada pengurangan gaji di Pegawai Non ASN di Kecamatan Tiumang

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat daerah belum dapat dilaksanakan dikarenakan Rencana Kerja 2022 merupakan Tahun ke-3 dari periode Rencana strategis 2021-2026.

-Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Pada Perangkat Daerah Kecamatan Tiumang dalam pelaksanaan Renja 2024 tidak ada Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi.

-Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Pada Perangkat Daerah Kecamatan Tiumang dalam pelaksanaan Renja 2024, Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

-Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dalam Renja 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Tiumang tidak ditemukan.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA, TERPENUHINYA ATAU MELEBIHI TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN; ANTARA LAIN

a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan /program yang akan diselenggarakan baik kecamatan,

b. Sering terjadinya beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan namun belum didukung ketersediaan anggaran.

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tiumang, belum bisa diukur karena

merupakan tahun keempat peride Renstra.

- **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut,** perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,serta perlunya adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan

1. Indikator kinerja utama perangkat daerah Indikator kinerja utama perangkat daerah Kecamatan TiumangPersentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP

   Pada indikator ini merujuk kepada Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada ukuran kinerja yang menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga lainnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur operasional standar

   Interpretasi dari indikator ini tergantung dari bebrapa interpretasi diantaranya ;

   1. **Persentase Ketepatan Waktu**: Ini adalah rasio antara jumlah pelayanan yang dilakukan tepat waktu dengan total jumlah pelayanan yang dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu, diukur dalam persentase. Ketepatan waktu biasanya diukur dengan membandingkan waktu penyelesaian pelayanan dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam SOP.
   2. **Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan**: Merujuk pada jenis pelayanan yang diberikan oleh instansi atau lembaga tersebut. Pelayanan perizinan mencakup proses pemberian izin, lisensi, atau persetujuan dari pemerintah atau badan lainnya, sementara pelayanan non-perizinan mencakup layanan yang tidak memerlukan izin atau persetujuan khusus, seperti pelayanan informasi, konsultasi, atau pelayanan administratif lainnya.
   3. **Standar Operasional Prosedur (SOP)**: Merupakan pedoman atau aturan yang mengatur tata cara dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan suatu proses atau kegiatan tertentu. SOP biasanya mencakup detail tentang prosedur, waktu yang dibutuhkan, tanggung jawab, dan langkah-langkah kualitas lainnya untuk memastikan konsistensi dan kinerja yang optimal dalam penyediaan layanan.

Tabel 2-1 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3	(4)	(5)	6)	(7)
Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP	**Persen**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
umlah rekomendasi tentang perizinan dan Non perizinan	*Dokumen*	*300*	*350*	*360*	*500*	-
Jumlah IMB yang di terbitkan sesuai dengan kewenangan	Dokumen	25	30	25	30	-

Sumber : ..., Tahun 2024

Dengan demikian, Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan sesuai SOP adalah ukuran kinerja yang menggambarkan sejauh mana suatu lembaga atau instansi pemerintah memenuhi waktu penyelesaian pelayanan yang telah ditetapkan dalam SOP, baik untuk layanan yang bersifat perizinan maupun non-perizinan. Dalam pelaksanaan indicator ini dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan mengingat selalu diadakannya perbaikan dari berbagai aspek dan sampai Triwulan II Tahun 2024 pada kondisi bulan Apri

1. Indikator kinerja utama perangkat daerah ***Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD***

Pada indikator ini merujuk pada seberapa besar usulan atau hasil kesepakatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan yang akhirnya diikutsertakan atau dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator ini mengacu kepada proporsi atau persentase dari hasil Musrenbang yang berhasil diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan kerja Pemerintah Daerah yang lebih formal, yaitu RKPD. Hal ini menunjukkan sejauh mana aspirasi masyarakat atau stake holders lokal tercermin dan dijadikan bagian dari RKPD yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu.

Interpretasi dari indikator ini tergantung dari bebrapa interpretasi diantaranya ;

1. **Prioritas Pembangunan**: Hasil musrenbang menjadi acuan dalam menetapkan prioritas pembangunan di daerah tersebut. Program dan kegiatan yang telah disepakati dalam musrenbang kemudian diakomodasi dalam RKPD sebagai bagian dari agenda pembangunan tahunan.
2. **Legitimasi Partisipatif**: RKPD yang memuat hasil musrenbang menunjukkan adanya aspek partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak dalam musrenbang memberi legitimasi atas prioritas dan program pembangunan yang disepakati.
3. **Keterhubungan Antara Musrenbang dan RKPD**: Inklusi hasil musrenbang dalam RKPD menunjukkan adanya keterhubungan yang erat antara proses perencanaan partisipatif dengan dokumen perencanaan resmi pemerintah. Hal ini

mengindikasikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung dihubungkan dengan rencana kerja pemerintah.

4. **Pertanggungjawaban Publik**: Dengan memuat hasil musrenbang dalam RKPD, pemerintah daerah menunjukkan keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap publik. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD merupakan komitmen yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5. **Pembangunan Berkelanjutan**: Dalam interpretasi yang lebih luas, hasil musrenbang yang ditampung dalam RKPD diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan karena mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat yang diintegrasikan ke dalam rencana kerja pemerintah.

Tabel 0-2 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Persentase Hasil Musrembang Kecamatan yang di tampung dalam RKPD	**persen**					
Koordinasi dan pembinaan nagari / pemberdayaan desa /Nagari	nagari	3	3	3	3	3
Usulan Musrembang untuk RKPD	usulan	50	60	60	60	65

Sumber Data Tahun 2024

Dengan demikian, interpretasi dari persentasi hasil musrenbang yang ditampung dalam RKPD mencakup aspek-aspek partisipatif, keterhubungan antara perencanaan partisipatif dengan dokumen resmi perencanaan pemerintah, serta pertanggungjawaban publik dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada perkembangan dalam beberapa Tahun belakangan mengindikasikan sudah makin tingginya usulan yang ditampung dalam RKPD dengan cara mengerucutkan kembali usulan menjadi skala prioritas yang lebih sedikit namun bisa terakomodir dalam RKPD.

2. Indikator kinerja utama perangkat daerah Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Tiumang

Indikator ini merujuk kepada merujuk pada data atau statistik tentang jumlah insiden atau gangguan terkait dengan ketertiban umum (trantibum) yang dikelola atau ditangani di suatu wilayah administratif, dalam hal ini wilayah Kecamatan Tiumang

Interpretasi dari indikator ini tergantung dari bebrapa interpretasi diantaranya ;

1. **Jumlah Gangguan Trantibum**: Ini merujuk pada jumlah insiden atau kejadian yang melibatkan gangguan terhadap ketertiban umum di suatu wilayah tertentu. Gangguan tersebut dapat berupa berbagai jenis pelanggaran atau tindakan yang

mengganggu ketertiban sosial, seperti perkelahian, perusakan harta benda, tindak kejahatan, ataubencana alam dan pelanggaran aturan lainnya.

2. **Ditangani di Wilayah Kecamatan Tiumang**: Ini menunjukkan bahwa gangguan tersebut terjadi atau dikelola di wilayah administratif tertentu, yaitu Kecamatan Tiumangadalah unit administratif di bawah kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, termasuk masalah-masalah terkait ketertiban umum.

Tabel 0-3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase kejadian gangguan trantibum yang di tangani aparatur kecamatan	**kasus**					
Koordinasi Penerapan dan Penegakn Peraturan Daerah dan Peraturan Kepaka daerah	Kasus / persen	100	100	10	100	100
Jumlah kasus yang terjadi	Kasus / persen	3	3	3	3	3

Sumber :data bulan April Tahun 2024

Adapun Kasus gangguan trantibum yang ditangani aparatur kecamatan pada tahun 2024 sebagai berikut;

1. Balap Liar dengan knalpot racing oleh sekelompok remaja. Kasus ini terjadi di Nagari Sungai Langkok . Langkah-langkah yang dilakukan bersama Tim kepolisian memanggil orang tua dan anak untuk diberikan bimbingan dan pernyataan untuk tidak mengulangi kembali kegiatan tersebut. Melalui Ninik Mamak beserta perangkat Nagari, Babinsa dan Bhabinkantibmas melalukan sosialisasi tentang kenalan remaja dan bahaya yang ditimbulkan.
2. Maraknya pencurian sawit di nagari tiumang Penyelesaian yang dilakukan dengan mendatangi lokasi tersebut secara bersama- sama bamus nagari, Babinkantibmas, Babinsa, ketua Pemuda dan Ormas untuk dilakukan sosialisasi dan pernyataan tidak mengulangi kejadian tersebut, dan dengan cara ini masyarakat yang bermukim didaerah di maksud telah merasa amandan nyaman.
3. Maraknya Penyalahgunaan pemakaian narkoba di Nagari Tiumang kemudian terjadi penangkapan terhadap beberapa orang pelaku, dengan adanya kejadian tersebut maka pemuka masyarakat ,ketua pemuda dan aparat hokum melakukan musyawarah dan duduk bersama mencari solusi untuk menghentikan penyebaran pemakaian barang narkoba terssebut dan pihak kapolsek mengadakan sosialisasi tentang akibat dari

pemakian narkoba kepada para siswa SMP dan SMA dilingkungan Kecamatan Tiumang.

3. Indikator kinerja utama perangkat daerah Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Tiumang

Indikator ini merujuk kepada penilaian AKIP yang mencakup berbagai aspek kinerja instansi pemerintah, seperti manajemen keuangan, efektivitas program dan kegiatan, akuntabilitas, transparansi, dan aspek-aspek lain yang relevan. Hasil penilaian ini dapat berupa laporan yang mencakup temuan-temuan, rekomendasi, serta evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah

Interpretasi hasil penilaian AKIP (Audit Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Tiumangdapat bervariasi tergantung pada temuan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa.

1. **Kinerja Keuangan**: Jika hasil penilaian menunjukkan kinerja keuangan yang baik, hal ini bisa diartikan bahwa pengelolaan keuangan Kecamatan Tiumang telah dilakukan dengan baik, termasuk pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan yang akurat, dan penggunaan anggaran yang efisien.
2. **Efektivitas Program dan Kegiatan**: Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tiumang efektif, hal ini menunjukkan bahwa program-program tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas**: Jika hasil penilaian menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, ini menandakan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di Kecamatan Tiumang dilakukan secara terbuka dan akuntabel kepada masyarakat, dengan penyampaian informasi yang jelas dan tersedia bagi publik.
4. **Kepatuhan Terhadap Aturan dan Regulasi**: Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa Kecamatan Tiumangtelah mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, hal ini menandakan bahwa instansi tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari potensi risiko pelanggaran hukum.
5 **Rekomendasi Perbaikan**: Jika hasil penilaian mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaikiatau ditingkatkan, interpretasi dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kinerja dan efisiensioperasional Kecamatan Tiumang melalui implementasi rekomendasi yang diberikan

Tabel 0-4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
Indikator Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Tiumang			63,41/ B	66.728/ B	70.046/ BB	**73,382/ BB**

Semenjak ditetapkan dalam indikator kinerja pada RENSTRA 2021-2026 Nilai AKIP Kecamatan Tiumang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini tidak lepas dari perbaikan perbaikan yang dilakukan baik secara administratif atau non administratif.

4. Indikator kinerja utama perangkat daerah Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Tiumang

Definisi indikator ini merujuk kepada Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Tiumang merujuk pada evaluasi internal yang dilakukan terhadap implementasi program-program reformasi birokrasi

Interpretasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Tiumang akan sangat tergantung pada temuan spesifik dalam evaluasi tersebut.

1. **Efektivitas Implementasi Program**: Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa program-program reformasi birokrasi telah diimplementasikan dengan baik, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa Kecamatan Tiumang telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja birokrasi lokal.
2. **Peningkatan Efisiensi dan Transparansi**: Jika hasil penilaian menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik dan peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, ini dapat diinterpretasikan sebagai tanda positif bahwa reformasi birokrasi telah berhasil mendorong perubahan yang diinginkan.
3. **Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholder**: Jika hasil penilaian menunjukkan tingkat partisipasi dan keterlibatan yang tinggi dari berbagai pihak, termasuk staf pemerintah, pemimpin lokal, dan masyarakat, ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi dukungan yang kuat untuk reformasi birokrasi.
4. **Tantangan dan Hambatan**: Jika hasil penilaian mengidentifikasi tantangan atau hambatan dalam implementasi reformasi birokrasi, ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Interpretasi ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi lebih lanjut dalam mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi.
5. **Rekomendasi Perbaikan**: Jika hasil penilaian menyertakan rekomendasi perbaikan, ini dapat diinterpretasikan sebagai arahan bagi Kecamatan Tiumanguntuk fokus pada area-area tertentu yang memerlukan perbaikan lebih lanjut dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. **Keselarasan dengan Tujuan Nasional**: Interpretasi juga dapat mencakup evaluasi sejauh mana hasil penilaian tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah.

Tabel 0-5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator kinerja utama perangkat daerah Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Tiumang			**23,2**	**28**	**32,8**	**37,6**

5. Indikator kinerja utama perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat

Definisi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merujuk kepada sebuah metrik atau indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap layanan atau kinerja suatu pemerintah, lembaga, atau organisasi

tertentu. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat menilai kualitas layanan yang diberikan, kinerja organisasi, atau pemenuhan kebutuhan dan harapan mereka.

Interpretasi Indeks Kepuasan Masyarakat melibatkan analisis terhadap data yang dihasilkan dari survei atau metode pengukuran lainnya untuk memahami persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan atau kinerja yang diukur

1. **Analisis Skor Rata-rata**: Jika indeks kepuasan menggunakan skala tertentu (misalnya, skala 1-5), langkah pertama adalah menghitung skor rata-rata dari semua responden. Skor rata-rata ini mencerminkan kepuasan rata-rata masyarakat terhadap layanan atau kinerja yang diukur.
2. **Klasifikasi Kepuasan**: Berdasarkan skor rata-rata, dapat diklasifikasikan tingkat kepuasan masyarakat. Misalnya, skor di atas 4 dapat dianggap sebagai tingkat kepuasan tinggi, skor antara 3-4 sebagai kepuasan sedang, dan skor di bawah 3 sebagai kepuasan rendah.
3. **Analisis Distribusi**: Selain skor rata-rata, penting untuk menganalisis distribusi skor untuk memahami seberapa merata persepsi kepuasan di antara responden. Misalnya, apakah sebagian besar responden memberikan skor tinggi atau terdapat variasi besar dalam skor yang diberikan?
4. **Perbandingan dengan Standar atau Target**: Hasil indeks kepuasan dapat dibandingkan dengan standar atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah hasil indeks tersebut mencapai target yang ditetapkan? Jika tidak, apa penyebabnya dan bagaimana langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil?
5. **Analisis Sub-grup**: Penting untuk melakukan analisis sub-grup untuk memahami apakah ada perbedaan dalam kepuasan antara kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, atau latar belakang sosial-ekonomi. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi ketidaksetaraan dalam akses atau kepuasan layanan.
6. **Trend dan Perubahan dari Waktu ke Waktu**: Jika survei dilakukan secara berkala, penting untuk melihat trend dan perubahan dari waktu ke waktu dalam indeks kepuasan masyarakat. Apakah ada peningkatan atau penurunan signifikan dari periode sebelumnya? Apa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan tersebut?
7. **Interpretasi Kualitatif**: Selain data kuantitatif, penting juga untuk memperhatikan informasi kualitatif, seperti komentar atau umpan balik dari responden, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat.

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator kinerja utama perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	**Nilai**		80	80,5	81,5	82,0

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu strategis

Dalam pelaksanaan setiap Kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan tahun 2024 adalah :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum bisa dilakukan secara maksimal karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran akibat dari dampak pandemi, sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dan perubahan dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran.
2. Belum terpenuhinya sarana peralatan kerja yang memadai seperti computer unit dan dukungan ketersediaan jaringan internet yang lebih baik dalam rangka mengikuti perkembangan zaman yang sudah melangkah pada pelayanan berbasis komputerisasi.
   Masih perlu sosialisasi fasilitasi intens tentang pemahaman perundang-undangan bagi perangkat Pemerintah Nagari

2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

-Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Pada Perangkat Daerah Kecamatan Tiumang dalam pelaksanaan Renja 2024, Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

-Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dalam Renja 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Tiumang tidak ditemukan

Dan ada beberapa factor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi target kinerja dari Program/Kegiatan antara lain :

a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan /program yang akan diselenggarakan baik kecamatan,
b. Sering terjadinya beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan namun belum didukung ketersediaan anggaran.

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tiumang, belum bisa diukur karena merupakan tahun pertama peride Renstra.

- **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut,** perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,serta perlunya adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu indikatornya kinerja utama perangkat daerah Indikator kinerja utama perangkat daerah Kecamatan Tiumang Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP

Pada indikator ini merujuk kepada Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada ukuran kinerja yang menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga lainnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur operasional standar

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan Tiumang

Tabel 0-6 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan Tiumang

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Bidang Fisik							
1	Pagar kantor camat	Ktr Camat Tiumang	Tiumang	Tiumang		1		
2	Pelitur Aula Kantor Camat Tiumang	Ktr Camat Tiumang	Tiumang	Tiumang		1		
3	rehab/ perbaikan jalan : aspal beton, pengaspalan jalan Kabupaten, peningkatan jalan kabupaten	Tiumang	Tiumang	Tiumang		2		
4	rehab jalan aspal menuju kantor camat	Tiumang	Tiumang	Tiumang		4		
5	Lanjutan Pembagunan Gedung Pertemuan /Serba Guna	Tiumang	Tiumang	Tiumang		30X50		
6	perbaikan polsi dan rumah bersalin	Tiumang	Tiumang	Tiumang		1		
7	hotmix jalan poros sukoharjo menuju kantor camat	Tiumang	Tiumang	Tiumang		1		
8	rehab hotmix menuju blok E menuju pasar	Tiumang	Tiumang	Tiumang		500		
1	lanjutan pembangunan aspal ke jorong...	Tiumang	Tiumang	Tiumang		1		
2	pembangunan jembatan banjar makmur	simpai langkok	Tiumang	Tiumang		1		
3	pembangunn jembatan tembok penahan tanah di jorong sekar makmur	simpai langkok	simpai langkok	Tiumang		1		
4	bantuan alat pertanian komben	simpai langkok	simpai langkok	Tiumang		12		
5	drainasi SD 02 tiumang (Dinas Perkintan	simpai langkok	simpai langkok	Tiumang		1		
6	lanjutan pembangunan musholah SD 12 tiumang	simpai langkok	simpai langkok					
1	aspal jalan perhubung antar nagari antar kecamatan di jorong koto beringin 1	koto beringin	koto beringin	Tiumang		1		
2	jembatan gantung antara koto beringin dengan jorong trans	koto beringin	koto beringin	Tiumang		1		
3	pembuatan jembatan di jorong mulia abadi	koto beringin	koto beringin	Tiumang		1		
4	pengaspalan pengubung antara harapan mulya 1 dan harapan mulya 2	koto beringin	koto beringin	Tiumang				
5	pembuatan GOR mini di jorong mekar mulia	sipungkur	sipungkur	Tiumang		1		
1	jembatan sipungkur	sipungkur	sipungkur	Tiumang		1		
2	aspal jalan k tmu	sipungkur	sipungkur	Tiumang		4		
3	aspal ke tagan jaya 2	sipungkur	sipungkur	Tiumang		1		
4	aspal RT 2 jorong sumber mulya	sipungkur	sipungkur	Tiumang		1		
5	pagar smp 1 tiumang	sipungkur	sipungkur	Tiumang		1		

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah : Kecamatan Tiumang

VISI : Mewujudkan Dharmasraya yang Mandiri dan Berbudaya

Misi RPJMD : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

Tujuan RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Kecamatan dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Sasaran RPJMD :Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi				Proyeksi		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan :Mewujudkan tatakelola Kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah								
Sasaran 1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan								
Indikator Sasaran : a.Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	persen		70	80	80	90	90	90
Indikator sasaran : b.Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		60	60	60	65	65	65
Indikator Sasaran : c.Persentasi Gangguan trantibum yang ditangani di wilayah kecamatan	Kasus		2	3	3	3	4	4
Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.								
Indikator Sasaran :	Nilai/Perik			66,728/	70,046/	73,364/	76,682/	80/

a.Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Tiumang	at		63,41/ B	B	B	BB	BB	BB
Indikator Sasaran : b.Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Tiumang	Nilai		23,2	28	32,8	37,6	42,5	42,5

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan realisasi 2021, 2022 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2023, maka proyeksi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

MATRIK PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA PERUBAHAN OPD) KECAMATAN TIUMANG KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				7 Paket	3,360,000.00	1,680,000.00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		9,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	17,730,000.00	8,804,000.00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata	-		20,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				3 Paket	7,960,000.00	4,107,500.00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata	-		10,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	15,000,000.00	12,480,000.00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata	-		18,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	10,440,800.00	5,297,300.00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		15,500,000.00	KECAMATAN TIUMANG

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan *Rapat Koordinasi dan Konsultasi* SKPD				12 Laporan	76,016,000.00	47,011,700.00	Kab. Dharmasraya, Trumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud kan	-		88,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah *Pengadaan Aset* dalam setahun**	-			**3 Jenis**	**0.00**				-	**Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud**	-	-	**222,640,000.00**	**KECAMATAN TIUMANG**
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit *Peralatan dan Mesin Lainnya* yang Disediakan				6 Unit	0.00		Kab. Dharmasraya, Trumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud kan	-		222,860,000.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah *Jasa pendidikan mental, jasa teknik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS***	-			**1 Tahun**	**234,991,300.00**	**175,224,050.00**			-	**Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud**	-	-	**235,996,600.00**	**KECAMATAN TIUMANG**
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				2 Laporan	2,000,000.00	1,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Trumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud kan	-		2,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* yang Disediakan				12 Laporan	8,994,700.00	8,535,650.00	Kab. Dharmasraya, Trumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud kan	-		10,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG

	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	0.00		Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud kan	-		10,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	223,996,600.00	167,668,400.00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud kan	-		223,996,600.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis BMD yang di Pemeliharaan**	-			**3 Jenis**	**16,550,000.00**	**24,330,000.00**			-	**Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud kan**	-	-	**27,000,000.00**	**KECAMATAN TIUMANG**
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	13,500,000.00	14,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud kan	-		15,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6,000,000.00	8,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud kan tata kelola pem erintahan yang baik	-		7,500,000.00	KECAMATAN TIUMANG

	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	7,010,000.00	4,330,000.00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sensus Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan			0.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0.00	0.00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sensus Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan			4,500,000.00	KECAMATAN TIUMANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP**	**90 persen**			**90 persen**	**4,900,000.00**	**1,700,000.00**						**90 persen**	**8,000,000.00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-			12 Jenis	4,900,000.00	1,700,000.00				Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan			8,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				35 Dokumen	1,300,000.00	0.00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sensus Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan			3,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				850 Laporan	3,400,000.00	1,700,000.00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sensus Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan			5,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD**	**65 persen**			**65 persen**	**11,600,000.00**	**11,600,000.00**						**65 persen**	**11,690,000.00**	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang disusung di Musrenbang kabupaten	-			3 Jenis	11,600,000.00	11,600,000.00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggj araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud kan tata kelola pem erintahan yang baik			11,600,000.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				45 Lembaga Kemasyara katan	11,600,000.00	11,600,000.00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggj araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud kan tata kelola pem erintahan yang baik			11,690,000.00	KECAMATAN TIUMANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang ditanggani Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah**	**100 persen 100 persen 100 persen**			**100 persen 100 persen**	**3,000,000.00**	**900,000.00**						**100 persen 100 persen 100 persen**	**3,000,000.00**	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-			3 Kasus	3,000,000.00	900,000.00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggj araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud kan			3,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	3,000,000.00	900,000.00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggj araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujud kan tata kelola pem erintahan yang baik			3,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG

5	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	*jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari Perwakilan Nagari yang dilakukan pembinaan*	**100 Persen 100 Persen**			**100 Persen 100 Persen**	**5,000,000.00**	**900,000.00**						**100 Persen 100 Persen**	**5,000,000.00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	-			7 Jenis	5,000,000.00	900,000.00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Meningkatkan	-	-	5,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka *Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				4 Dokumen	5,000,000.00	900,000.00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Meningkatkan	-		5,000,000.00	KECAMATAN TIUMANG
	J U M L A H							**1,049,341,100.00**	**1,441,893,694.00**							**2,325,559,600.00**	

Tiumang Otober 2025
Camat Tiumang

MARIUS,SH,MH
NIP. 197002042009011016

Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Kec. Tiumang	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Keytepatan waktu pelayanan perizinan dan Non perizinan sesuai SOP	Persen	80	80	90%	90	90	90
2	Persentase hasil musrembang kecamatan yang di tamping dalam RKPD	Persen	60	60	80%	65	80	65
3	Jumlah Gangguan Trantibun yang ditangani di wilayah kecamatan	Kasus	3	3	3	3	5	4
4	Hasil Peilain AKIP Kecamatan Tiumang	Nilai Prediket	66,728/B	72,184BB	73,364/BB	78,046 BB	72,184/BB	76,682/BB
5	Hasil Penialain Mandiri pelaksanaan reformasi Birokrasi kecamtan Tiumang	Nilai	23,2	28	32,8	39,8	32,8	37,6
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,5	87,5	81,5	82,0	81,5	82,5

BAB 5. PENUTUP

Bab berisi Kesimpulan dan saran-saran terhadap RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Rencana Kerja Kecamatan Tiumang (Renja PD) merupakan Rencana Kerja tahunan yang disusun guna menyiapkan secara optimal Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025. Rencana Kerja ini sendiri akan menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Dengan adanya rencana kerja ini nantinya diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan dengan labih baik.

Penyusunan Renja sebagai suatu dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan kerja PD merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan. Rancangan kerja masa yang akan datang harus selalu mempedomani Program dan kegiatan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Evaluasi secara terstruktur dan berkelanjutan pada tahun berjalan dapat mengakomodir tingkat perobahan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tiumangsecara berkesinambungan.

Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada perangkat Daerah Kecamatan Tiumang dalam pelaksanaan Renja 2024 ,Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran.

Dalam bab II pada narasi Renja ini ada sub babnya yang berkaiatan dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Tiumang, pada Renja 2025 ini Kecamatan Tiumang Memiliki 2 (Dua) saran dan 5 (Lima) Indikator yang masing-masingnya memiliki Sasaran,definisi,interpretasi,perkembangan data serta dilengkapi dengan data perbandingan tahun sebelumnya.Dalam Bab ini Juga terdapat isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah salah satunya belum terpenuhinya sarana peralatan kerja yang memadai seperti computer unit dan dukungan ketersediaan jaringan internet yang lebih baik dalam rangka mengikuti perkembangan zaman yang sudah melangkah pada

pelayanan berbasis komputerisasi,masih perlu sosialisasi fasilitasi intens tentang pemahaman perundang-undangan bagi perangkat pemerintah Nagari.

Dalam Bab III terdapat penjelasan Tujuan dan Sasaran Perangkar daerah Kecamatan Tiumang, yang mana Tujuan RPJMD Kecamatan TiumangYaitu : Mewujudkan tata kelola kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah.

Sasaran RPJMD Kecamatan Tiumang adalah : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan tugas pemerintah umum dan pemberdayaan Masyarakat di kecamatan.

Dalam Baba IV menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah,Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Dengan penyusunan Dokumen Renja PD diharapkan nantinya dapat dilakukan penjabaran Visi dan Misi, serta Sasaran yang telah ditetapkan dengan maksimal. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Tiumangini mengakomodir Penetapan Skala prioritas dalam penyusunan rancangan Program dan kegiatan. Hal ini diperlukan dalam melakukan sinergitas dengan PD terkait.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPD) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 mendasar pada peraturan yang mengkait, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Permendagri No. 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 serta pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan RKA Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam

rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hingga Tahun 2024 dan prediksi Tahun 2025
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dengan memuat Data Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I

BAB III Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Tahun 2025, Badan Kesatuan Bagsa dan Politik Kab. Dharmasraya sebagai Unsur Pemerinatahan Umum melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam pelaksanaan Urusan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 program dengan 10 kegiatan dengan 26 sub kegiatan dengan anggaran Awal sebesar Rp. 4.727.989.485,- selanjutnya menjadi Rp. 4.039.516.635,- dengan realisasi anggaran hingga triwulan II sebesar Rp. 1.119.574.465,- atau 27,72 %, dengan realisasi kinerja 27,72 % kondisi sampai triwulan II, sebagaimana table berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN			
					I		II	
			K	RP	K	Rp	K	Rp
8 1	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**Rp 4.039.516.635**		**Rp 584.090.947**		**Rp 535.483.518**
8 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Rp 1.637.229.100**		**Rp 321.743.933**		**Rp 359.009.868**
8 1 1 2.01	**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Penyusunan Renja, LKJiP, LPPD dan Pelaporan lainnya**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**
8 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp -		Rp -		Rp -
8 1 1 02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Rp 1.224.084.000**		**Rp 256.597.135**		**Rp 292.549.121**
8 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	9 Orang	Rp 1.224.084.000		Rp 256.597.135		Rp 292.549.121
8 1 1 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Rp 74.924.250**		**Rp 26.683.300**		**Rp 20.123.000**

8	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 1.012.250		Rp -		Rp -
8	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 14.989.000		Rp 4.624.000		Rp 2.516.000
8	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	Rp 3.121.000		Rp 1.257.000		Rp -
8	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bln	Rp 11.044.000		Rp 2.330.000		Rp 3.720.000
8	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Bln	Rp 5.038.500		Rp 4.905.000		Rp -
8	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bln	Rp 39.719.500		Rp 13.567.300		Rp 13.887.000
8	**1**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**
8	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		Rp -		Rp -		Rp -
8	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		Rp -		Rp -		Rp -
8	**1**	**1**	**02:08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Rp 196.500.850**		**Rp 22.200.298**		**Rp 27.372.747**

8	1	1	02:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	Rp	4.000.000		Rp	1.000.000		Rp	1.000.000
8	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Lap	Rp	19.480.650		Rp	3.652.398		Rp	3.386.347
8	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Lap	Rp	-		Rp	-		Rp	-
8	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	Rp	173.020.200		Rp	17.547.900		Rp	22.986.400
8	**1**	**1**	**02:09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Rp**	**141.720.000**		**Rp**	**16.263.200**		**Rp**	**18.965.000**
8	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Diansa Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	4 unit	Rp	2.500.000		Rp	718.200		Rp	-
8	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	Rp	33.000.000		Rp	14.945.000		Rp	17.965.000
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	35 Unit	Rp	6.220.000		Rp	600.000		Rp	1.000.000
8	1	1	02:09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	Rp	100.000.000		Rp	-		Rp	-

8	**1**	**2**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**Rp 846.896.350**		**Rp 62.208.614**		**Rp 109.731.000**
8	**1**	**2**	**02:01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			**Rp 846.896.350**		**Rp 62.208.614**		**Rp 109.731.000**
8	1	2	02:01	3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelatihan Bela Negara bagi Pelajar, Mahasiswa dan Generasi Muda	105 0rg	Rp 43.690.750		Rp 5.426.800		Rp 17.663.000
						Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi FPK bagi Generasi Muda	100 org					
						Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi GNRM bagi ASN Kab.Dharmasraya	50 org					
						Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan bagi pelajar,mahasisawa dan ASN	100 org					
8	1	2	02:01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Rapat yang terlaksana bagi Pengurus FPK	6 kali	Rp 14.251.750		Rp 702.000		Rp -

8	1	2	2.01	8	Pembentukan Paskibraka	Penyelenggaraan Paskibraka dan Karyawisata Paskibraka		Rp 788.953.850		Rp 56.079.814		Rp 92.068.000
8	**1**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**Rp 1.179.641.685**		**Rp 188.204.300**		**Rp 762.000**
8	**1**	**3**	**02:01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**			**Rp 1.179.641.685**		**Rp 188.204.300**		**Rp 762.000**
8	1	3	02:01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Rapat yang terlaksana oleh tim Verifikasi dana Bantuan Partai Politik	3 Kali Rapat	Rp 1.177.181.485		Rp 188.204.300		Rp 762.000
						Jumlah Partai Politik yang menerima bantuan keuangan bagi Partai Politik	1 Kali					
						Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan pada Bimtek Pembinaan Administrasi Keuangan Parpol	30 org					

						Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	100 org					
						Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bidang Politik	100 org					
8	1	3	02:01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Monitoring dan pemantauan situasi Politik	10 Kali	Rp 2.460.200		Rp -		Rp -
8	**1**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**Rp 7.575.800**		**Rp 197.500**		**Rp 3.801.700**
8	**1**	**4**	**02:01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			**Rp 7.575.800**		**Rp 197.500**		**Rp 3.801.700**
8	1	4	02:01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang	Jumlah Ormas yang terdata	8 Kali	Rp 7.575.800		Rp 197.500		Rp 3.801.700

					Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang terbina dan menerima dana hibah	8 Kali				
8	**1**	**5**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**Rp 47.639.300**		**Rp -**	**Rp 2.427.750**
8	**1**	**5**	**02:01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**			**Rp 47.639.300**		**Rp -**	**Rp 2.427.750**
8	1	5	02:01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah penyuluhan Narkoba bagi generasi muda	120 org/ 1 Kali	Rp 28.977.300		Rp -	Rp 1.301.850
						Jumlah Ranperda tentang Narkoba yang ditetapkan beserta Sosialisasinya	1 Kali				
8	1	5	02:01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Terlaksananya Rapat Pengurus FKUB	6 Kali	Rp 18.662.000		Rp -	Rp 1.125.900
8	**1**	**6**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**Rp 320.534.400**		**Rp 11.736.600**	**Rp 59.751.200**

8	**1**	**6**	**02:01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**			**Rp 320.534.400**		**Rp 11.736.600**		**Rp 59.751.200**
8	1	6	02:01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jumlah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	6 Kali 1 Kali	Rp 289.458.650		Rp 10.845.600		Rp 58.851.200
8	1	6	02:01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pemantauan dan Pengawsan orang Asing	4 Kali	Rp 31.075.750		Rp 891.000		Rp 900.000
TOTAL												

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Semester I pada Tabel 2.1 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu :
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan Pemeliharaan/Rehabilirasi Gedung Kantor dan Bngunan Lainnya, hal ini dikarenakan belum adanya keputusan dan kepastian tentang penggunaan anggaran tersebut.
   - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada sub kegiatan Pembentukan Paskibraka, hal ini dikarenakan ada belanja yang sedang proses LS dan TU.
   - Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, hal ini dikarenakan menunggu Hasil Audit BPK terkait pemeriksaan pertanggungjawaban Tahun sebelumnya dan lambatnya parpol mengumpulkan bahan administrasi bantuan keuangan.
   - Program Peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan Fasilitasi penanganan konflik social pada sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, hal ini dikarenakan kegiatan FGD Forkopimda yang seharusnya sudah dilaksanakan 3 kali untuk semester I ini, namun baru dilaksanakan 1 kali karena kendala penyesuaian waktu pimpinan bersama forkopimda untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada 2 program Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan:
   1. komitmen utuk menyelesaikan pekerjaan
   2. Penyusunan jadwal perencanaaan sesuai time line perencanaan dan aturan perencanaan
   3. Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan

4. Koordinasi dengan pihak terkait
5. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan baik
6. Koordinasi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif

Berdasarkan faktor-faktor penyebab dan pendukung yang telah disampaikan, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Menyusun KAK kegiatan agar pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dapat terarah sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan
2. Penyusunan aliran kas dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya memiliki 6 (enam) rumusan program dengan 11 (sebelas) rumusan kegiatan dengan 31 (tiga puluh satu) rumusan sub kegiatan. Total Anggaran rancangan perubahan APBD untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.039.516.635,-.

Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya, yaitu :

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagaimana dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							25.990.727.230,00	4.727.989.485,00	4.039.516.635,00							28.585.195.903,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							25.990.727.230,00	4.727.989.485,00	4.039.516.635,00							28.585.195.903,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							25.990.727.230,00	4.727.989.485,00	4.039.516.635,00							28.585.195.903,00	
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				100 persen	100 persen	5.024.104.500,00	1.735.501.500,00	1.637.229.100,00							5.580.573.460,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporaan yang tersedia	-			7 dokumen	0 Dokumen	26.000.000,00	0,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		28.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	0 Dokumen	26.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			28.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 tahun	1 tahun	2.696.524.000,00	1.224.084.000,00	1.224.084.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.966.176.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	8 Orang/bulan	2.696.524.000,00	1.224.084.000,00	1.224.084.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.966.176.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	12 bulan	574.430.300,00	142.696.650,00	142.696.650,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		702.431.840,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	2.002.250,00	1.012.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	29.978.000,00	14.989.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			66.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.000.000,00	6.227.000,00	3.121.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			36.222.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.300.000,00	15.000.000,00	11.044.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			43.230.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.344.800,00	9.877.400,00	5.038.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			47.679.280,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	388.785.500,00	79.612.000,00	39.719.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			498.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-			undefined unit/set	undefined unit/set	1.341.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.475.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	595.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			654.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	335.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			368.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				38 Unit	0 Unit	127.200.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			139.920.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	0 Unit	233.800.000,00	24.500.000,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			257.180.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 bulan	12 bulan	243.750.200,00	196.500.850,00	196.500.850,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		268.125.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.150.000,00	19.480.650,00	19.480.650,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			24.365.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	217.600.200,00	173.020.200,00	173.020.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			239.360.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedia pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 bulan	12 bulan	142.400.000,00	141.720.000,00	141.720.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		140.140.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	5.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			6.380.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	69.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			75.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				17 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	22.600.000,00	6.220.000,00	6.220.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			24.860.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani				5 persen	5 persen	2.402.000.000,00	1.238.119.350,00	846.896.350,00							2.642.200.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			355 orang		2.402.000.000,00	1.238.119.350,00	1.238.119.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		2.642.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				110 Orang	80 Orang	198.000.000,00	77.179.950,00	43.690.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			217.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	

							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Laporan	12 Laporan	104.000.000,00	26.023.000,00	14.251.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			114.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka																		
							Jumlah Paskibraka				355 Orang	355 Orang	2.100.000.000,00	1.134.916.400,00	788.953.850,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.310.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan dan Pemantauan Situasi Politik				30 persen	80 persen	16.848.622.730,00	1.242.334.535,00	1.179.641.685,00							18.418.722.443,00	

	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-			130 orang	140 orang	16.848.622.730,00	1.242.334.535,00	1.242.334.535,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		18.418.722.443,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				80 Orang	61 Orang	16.678.622.730,00	1.237.403.285,00	1.177.181.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			18.231.722.443,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	170.000.000,00	4.931.250,00	2.460.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			187.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan				35 kelompok	35 kelompok	210.000.000,00	15.171.000,00	7.575.800,00							231.000.000,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-			undefined undefined	3 Laporan	210.000.000,00	15.171.000,00	15.171.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Jumlah Organisasi masyarakat dan partai politik yang terbina		231.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	210.000.000,00	15.171.000,00	7.575.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			231.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan LSM				30 kasus	30 kasus	428.000.000,00	87.236.200,00	47.639.300,00							528.000.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-			6 laporan	6 laporan	428.000.000,00	87.236.200,00	87.236.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		528.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Orang	200 Orang	140.000.000,00	52.412.200,00	28.977.300,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			154.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	0 Orang	165.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			181.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				8 Laporan	8 Laporan	123.000.000,00	34.824.000,00	18.662.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			192.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Penyakit Masyarakat				2 kasus	2 kasus	1.078.000.000,00	409.626.900,00	320.534.400,00							1.184.700.000,00	

	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta PenangananKonflik di Daerah	-			80 orang	80 orang	1.078.000.000,00	409.626.900,00	409.626.900,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		1.184.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				80 Orang	60 Orang	1.022.000.000,00	355.679.950,00	289.458.650,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.124.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	56.000.000,00	53.946.950,00	31.075.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			60.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
											J U M L A H		**25.990.727.230,00**	**4.727.989.485,00**	**4.039.516.635,00**							**28.585.195.903,00**	

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan dalam bentuk indikasi program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025.. Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat terlaksana seoptimal mungkin apabila semua aparatur dan stake holder terkait berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama dan terdapatnya koordinasi yang baik dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian kinerja serta digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 sehingga kinerja Perangkat Daerah dapat terukur sehingga pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkesinambungan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI